Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Marilah kita memanjatkan segenap puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun 2020 ini dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dengan tepat waktu. Sesuai amanah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 dan Pasal 71, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun 2020 merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 dan merupakan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 pada tahun ke-5 (tahun terakhir). Capaian kinerja tahun 2020 dapat dipertimbangkan sebagai data dasar / baseline dalam periode perencanaan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 baik dalam RPJMD, Renstra OPD, RKPD, maupun Renja OPD. Pencapaian sasaran pembangunan dan kinerja pelaksanan program / kegiatan menjadi hal yang harus dipertanggungjawabkan untuk menegaskan komitmen terhadap setiap penggunaan uang Negara / Daerah harus berorientasi kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Cakupan LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun 2020 terdiri atas : capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya

penyelesaian setiap urusan pemerintahan; kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; tindak lanjut rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah tahun anggaran sebelumnya.

Atas dasar hasil penyelenggaraan urusan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, telah banyak tercapai dan beberapa capaian masih ada yang belum optimal. Harus disadari masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dipecahkan, sebagaimana sebagian capaian indikator kinerja yang belum optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan rekomendasi hasil pembahasan DPRD diharapkan menjadi pertimbangan yang penting dalam melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan urusan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun – tahun selanjutnya.

Demikian LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun 2020 telah disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban dan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan Kabupaten Sidoarjo lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungan bagi kita semua untuk senantiasa menuju Sidoarjo yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR, S.IP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Dasar Hukum 1

B. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 3

C. Gambaran Umum Daerah 8

1. Kondisi Geografis Daerah 8

2. Gambaran Umum Demografis 12

3. Kondisi Perekonomian 21

D. Sumber Daya PNS 22

E. Pengelolaan Pendapatan Daerah 24

F. Pengelolaan Belanja Daerah 31

G. Pengelolaan Pembiayaan Daerah 37

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 39

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 51

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 51

B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Per Urusan Pemerintahan 70
1. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 70
2. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan 392
3. Unsur Penunjang 467
C. Penanganan Covid 576

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 612

BAB V PENUTUP 618

LAMPIRAN PENGHARGAAN 620

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan perundang - undangan yang melatar belakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Sidoarjo Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Pada Masa Transisi menuju Masyarakat yang

sehat, disiplin, dan produktif di tengah pandemi *corona virus disease 2019* di Kabupaten Sidoarjo

B. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama – sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021.

1. Visi

Memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah serta kendala yang dihadapi pada periode pemerintahan Tahun 2010 - 2015, serta prakiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2016 – 2021. Selain itu juga mengacu pada visi 20 tahun dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2006 – 2025, maka rumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2016 – 2021, yaitu :

” KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN ”

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok - pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana berikut :

- ***Inovatif*** ; Melakukan proses pembangunan dengan menerapkan berbagai inovasi di bidang pembangunan fisik dan non fisik untuk mendukung akselerasi pembangunan menuju Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
- ***Sejahtera*** ; Makmur, aman, nyaman dan sentosa serta terlepas dari segala macam gangguan (tenteram), baik material maupun spiritual

pada dimensi ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM. Unsur visi ini menegaskan bahwa Pasangan Kepala Daerah terpilih (KDH) untuk senantiasa mendedikasikan diri pada perjuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo sampai tahun 2021 pada segala aspek kehidupan. Aspek kehidupan seperti, kesehatan, pendidikan, ekonomi, keadilan sosial budaya, stabilitas keamanan, ketertiban, kedamaian dan peradaban akan mencapai puncak sehingga masyarakat akan semakin beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, demokratis dan berbudaya tinggi yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

- ***Mandiri*** ; Cita-cita dan semangat kerja bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo harus mampu mewujudkan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara layak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan.
- ***Berkelanjutan*** ; Proses pembangunan yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (Brundtland Report, PBB 1987). Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development) merupakan komitmen global dimana proses pembangunan tidak semata-mata mengeksploitasi alam secara maksimal demi mengejar kebutuhan masa kini saja, tetapi juga internalisasi konsep dan pola pembangunan yang memperdulikan kelestarian lingkungan dan sosial serta dampak yang lain bagi generasi masa depan. Unsur visi ini sangat strategis dan senada dengan komitmen global tentang *climate change*.

2. Misi

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021, maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran

dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Setiap unsur visi dijabarkan ke dalam tiap misi, sebagai berikut :

MISI	UNSUR VISI	PENJABARAN
Misi 1	Mandiri	Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan
Misi 2	Mandiri	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat
Misi 3	Sejahtera	Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan
Misi 4	Sejahtera	Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul Karimah, berlandasan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban
Misi 5	Berkelanjutan	Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait 5 misi utama Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Misi 1: Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipasif dan Transparan.

Salah satu tolok ukur terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah Indeks Good Governance dan Indeks Reformasi Birokrasi. Misi I Kabupaten Sidoarjo difokuskan untuk pencapaian tujuan diatas, dengan menetapkan 2 sasaran yakni Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi; .

Misi 2: Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk mencapai Misi II ditetapkan 1 Tujuan dan 2 Sasaran dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing. Untuk mencapai hal tersebut dapat dicapai melalui 2 sasaran yaitu Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat; Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

Misi 3: Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

Misi III Kabupaten Sidoarjo terfokus terhadap pelayanan dasar khususnya pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator utama sebagai tolok ukur keberhasilan Misi III. Berdasarkan 3 indeks pembentuk IPM, Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan secara representatif menggambarkan pencapaian IPM pada Misi III. Selain itu sasaran diarahkan terhadap pendidikan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Misi 4: Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban.

Perspektif Misi IV lebih diarahkan terhadap peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat, yang menggunakan tolok ukur capaian dengan menggunakan Indeks Kebahagiaan, Indeks Rasa Aman, Indeks

Resiko Bencana, dan Indeks Pembangunan Gender. Misi IV dapat dicapai dengan meningkatkan harmonisasi dan keamanan sosial.

Misi 5: Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Misi terakhir adalah terfokus terhadap peningkatan infrastruktur sebagai penunjang ekonomi, namun tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan

Menindak lanjuti terhadap 5 Misi Kabupaten Sidoarjo yang mendukung tercapainya Visi Kabupaten Sidoarjo 2016-2021, maka berikut ini merupakan kerangka arsitektur Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo 2016 - 2021 sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar misi dalam pencapaian visi, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel I.1

Kerangka Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021

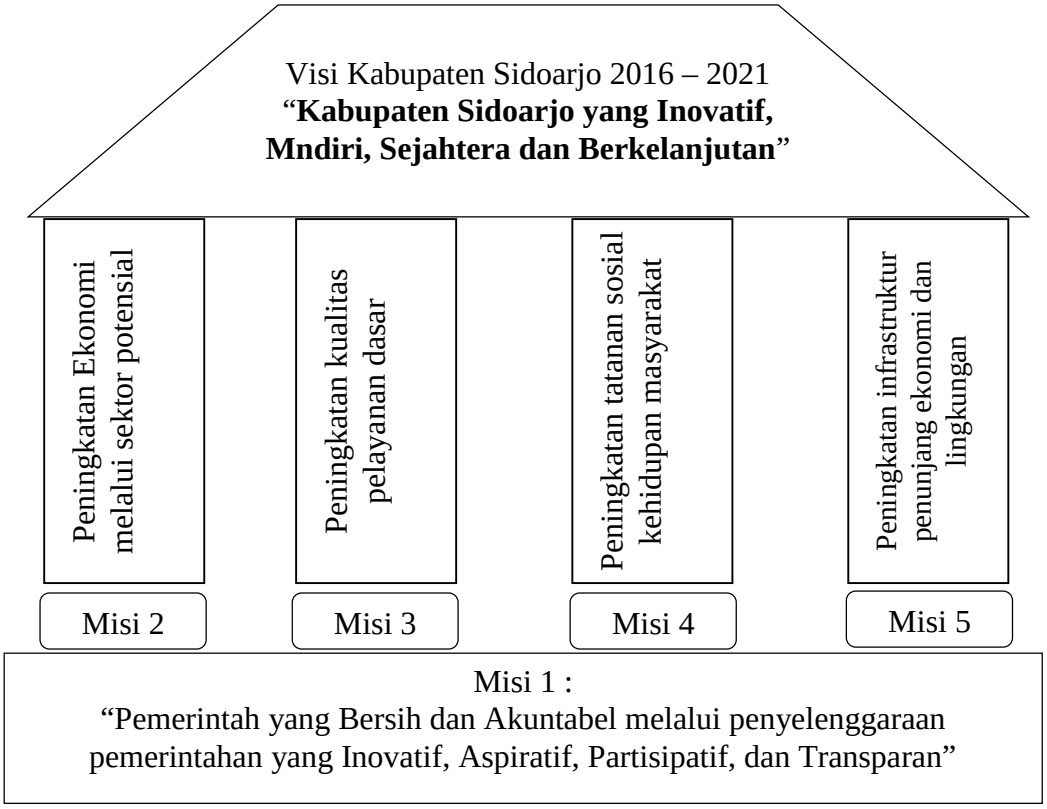

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

C. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Sidoarjo terletak diantara dua sungai besar yaitu sungai Porong (47 Km) dan sungai Surabaya (32,5 Km), sehingga terkenal dengan sebutan “Kota Delta”. Kabupaten Sidoarjo, secara astronomis terletak di antara 7,3° – 7,5° LS (Lintang Selatan) dan antara 112,5° - 112,9° BT (Bujur Timur). Sementara secara geografis, Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
2. Sebelah Timur : Selat Madura
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto.

Kabupaten Sidoarjo memiliki luas wilayah sebesar 714.243 km2 terbagi menjadi 18 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Jabon dengan luas wilayah sebesar 11,34 persen terhadap luas wilayah kabupaten secara keseluruhan. Diikuti oleh Kecamatan Sedati yang memiliki luas sebesar 11,12 persen terhadap luas wilayah kabupaten.

Tabel I.2

Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase
1	Tarik	36,06	5,05
2	Prambon	34,23	4,79
3	Krembung	29,55	4,14
4	Porong	29,82	4,18
5	Jabon	81,00	11,34
6	Tanggulangin	32,29	4,52
7	Candi	40,67	5,69
8	Tulangan	31,21	4,37
9	Wonoayu	33,92	4,75

10	Sukodono	32,68	4,58
11	Sidoarjo	62,56	8,76
12	Buduran	41,03	5,74
13	Sedati	79,43	11,12
14	Waru	30,32	4,25
15	Gedangan	24,06	3,37
16	Taman	31,54	4,42
17	Krian	32,50	4,55
18	Balongbendo	31,40	4,40
Jumlah		**714,24**	**100,00**

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2020

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 Desa dan 31 Kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (*rural area)* dan desa perkotaan (*urban area*).

Tabel I.3

Desa dan Kelurahan per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Sidoarjo	10	14
2.	Buduran	15	-
3.	Candi	24	-
4.	Porong	13	6
5.	Krembung	19	-
6.	Tulangan	22	-
7.	Tanggulangin	19	-
8.	Jabon	15	-
9.	Krian	19	3
10.	Balongbendo	20	-
11.	Wonoayu	23	-
12.	Tarik	20	-

13.	Prambon	20	-
14.	Taman	16	8
15.	Waru	17	-
16.	Gedangan	15	-
17.	Sedati	16	-
18.	Sukodono	19	-
	JUMLAH	**322**	**31**

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Grafik I.1

Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Wilayah Kabupaten Sidoarjo berada pada ketinggian 0-25 mdpl dan terbagi atas tiga kelas, yaitu :

- 0-3 meter, merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin/payau, berada di sebelah timur
- 3-10 meter, merupakan daerah bagian tengah yang berair tawar.
- 10-25 meter, terletak di daerah bagian barat

Sepanjang tahun 2020, Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo mencatat suhu tertinggi di Kabupaten Sidoarjo mencapai 35,6°C,

terjadi di bulan Oktober. Sementara suhu terendah terjadi di bulan Juli, sebesar 19,1°C dengan kelembaban rata-rata sebesar 74,9 persen. Sementara itu, bersumber dari lokasi penakar hujan yang terdapat di 30 titik berbeda yang tersebar di semua kecamatan di Sidoarjo, diketahui bahwa selama Januari - Desember 2020 terdapat 174 hari hujan. Curah hujan dan jumlah hari hujan relatif tinggi selama Januari - Mei, tercatat sebanyak 113 hari hujan dengan curah hujan tertinggi sebesar 527,5 mm di bulan Februari. Curah hujan turun secara signifikan mulai bulan Juni sampai dengan Oktober, tercatat hanya 19 hari hujan dalam 5 bulan

Tabel I.4

Suhu dan Kelembapan per Bulan di Tahun 2020

Bulan	Suhu (°C)			Kelembapan (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	24,6	28,4	35,0	56,0	81,2	97,0
Februari	23,0	27,7	34,2	60,0	84,6	98,0
Maret	24,0	28,2	33,9	52,0	82,7	98,0
April	23,7	28,6	33,6	57,0	81,7	97,0
Mei	23,0	28,5	33,2	58,0	81,6	98,0
Juni	22,8	27,7	32,9	50,0	78,0	96,0
Juli	19,1	27,3	32,6	41,0	74,9	92,0
Agustus	21,6	27,5	33,0	48,0	74,6	93,0
September	22,3	28,9	34,5	44,0	69,8	85,0
Oktober	23,0	29,2	35,6	39,0	71,8	98,0
Nopember	23,5	29,1	34,8	46,0	76,1	98,0
Desember	23,3	27,2	34,6	55,0	84,5	99,0

Sumber Data : Sidoarjo Dalam Angka 2020

Tabel I.5

Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari per Bulan di Thn 2020

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (day)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	319,7	23	59,5
Februari	527,5	23	60,2
Maret	234,2	24	65,3
April	392,2	25	74,9
Mei	398,9	18	75,2
Juni	44,0	5	84,1
Juli	2,3	4	89,3
Agustus	24,3	3	94,0
September	0,0	0	99,0
Oktober	54,1	7	76,4
Nopember	154,1	15	67,4
Desember	657,1	27	43,0

Sumber Data : Sidoarjo Dalam Angka 2020

2. Gambaran Umum Demografis

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan perkembangan penduduk di tahun 2011, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 1.984.635 jiwa, sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 2.033.764 jiwa.

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :

Grafik I.2

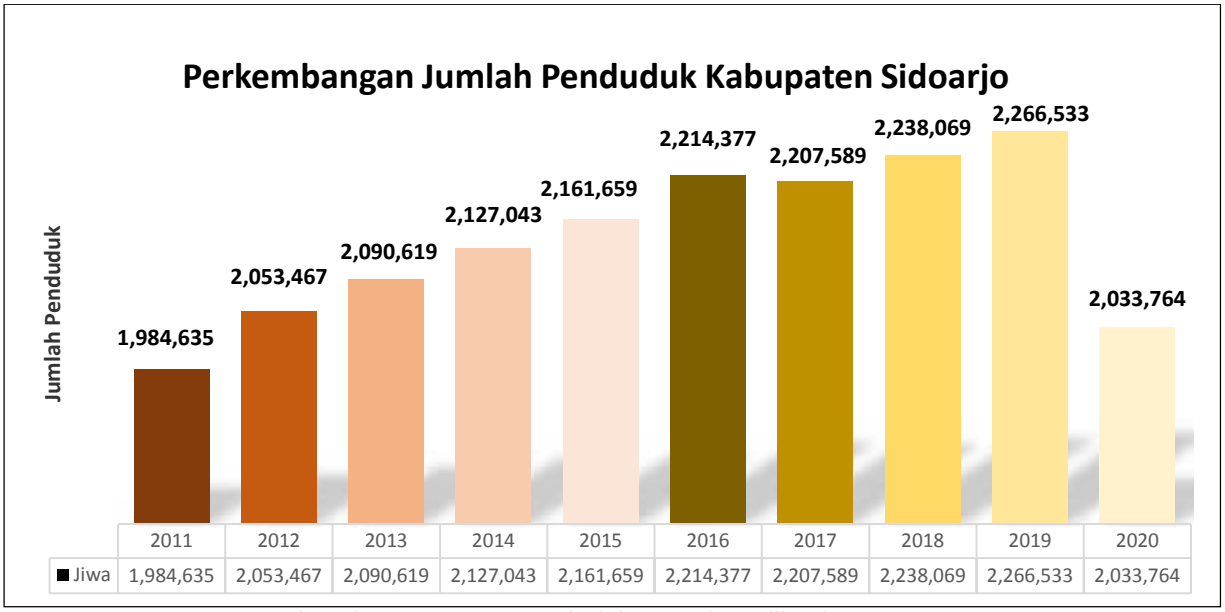

Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Perkembangan penduduk pada tahun 2020 mengalami koreksi melalui pembersihan database Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Setelah dilakukan konsolidasi dan penyandingan database, sehingga jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 terkoreksi menjadi 2.033.764 jiwa penduduk.

Jumlah penduduk per Kecamatan, beserta laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.6

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km2
Tarik	69.189	(0,04)	3,40%	1.918,72
Prambon	79.952	(0,06)	3,93%	2.335,73
Krembung	69.887	(0,08)	3,44%	2.365,04

Porong	73.446	(0,14)	3,61%	2.462,98
Jabon	56.266	(0,08)	2,77%	694,64
Tanggulangin	89.804	(0,16)	4,42%	2.781,17
Candi	153.423	(0,09)	7,54%	3.772,39
Tulangan	102.339	(0,05)	5,03%	3.279,05
Wonoayu	85.526	(0,06)	4,21%	2.523,17
Sukodono	121.897	(0,08)	5,99%	3.728,86
Sidoarjo	201.115	(0,12)	9,89%	3.214,75
Buduran	98.910	(0,09)	4,85%	2.405,80
Sedati	96.636	(0,14)	4,75%	1.216,62
Waru	200.774	(0,17)	9,87%	6.621,17
Gedangan	120.003	(0,11)	5,90%	4.987,66
Taman	207.817	(0,12)	10,22%	6.588,93
Krian	130.730	(0,07)	6,44%	4.028,62
Balongbendo	76.050	(0,05)	3,74%	2.421,97
JUMLAH	**2.033.764**	**(0,10)**	**100,00%**	**2.847,33**

Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Dari tabel tersebut terlihat bahwa berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan, kecamatan Waru memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 201.115 jiwa atau 9,89%, sedangkan kecamatan Jabon memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 56.266 jiwa atau 2,77%. Jumlah Kepala Keluarga (KK) dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.7

Jumlah Kepala Keluarga (KK) Per Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	KK LAKI-LAKI	KK PEREMPUAN	JUMLAH
1	TARIK	19.210	3.404	22.614
2	PRAMBON	22.036	4.195	26.231
3	KREMBUNG	19.162	3.368	22.530
4	PORONG	19.764	4.128	23.892
5	JABON	15.146	3.021	18.167
6	TANGGULANGIN	23.850	4.069	27.919

7	CANDI	40.575	7.055	47.630
8	SIDOARJO	52.038	11.193	63.231
9	TULANGAN	28.155	5.431	33.586
10	WONOAYU	23.351	4.016	27.367
11	KRIAN	34.910	6.749	41.659
12	BALONGBENDO	20.844	3.900	24.744
13	TAMAN	54.880	11.355	66.235
14	SUKODONO	32.548	5.168	37.716
15	BUDURAN	26.030	4.750	30.780
16	GEDANGAN	32.000	5.218	37.218
17	SEDATI	25.712	4.875	30.587
18	WARU	52.674	12.245	64.919
T O T A L		**542.885**	**104.140**	**647.025**

Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Jumlah penduduk per Kecamatan menurut jenis kelamin berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel I.8

Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TARIK	34.830	34.359	69.189
2	PRAMBON	40.397	39.555	79.952
3	KREMBUNG	35.024	34.863	69.887
4	PORONG	37.102	36.344	73.446
5	JABON	28.274	27.992	56.266
6	TANGGULANGIN	45.097	44.707	89.804
7	CANDI	76.872	76.551	153.423
8	SIDOARJO	100.000	101.115	201.115
9	TULANGAN	51.423	50.916	102.339
10	WONOAYU	43.109	42.417	85.526
11	KRIAN	66.413	64.317	130.730
12	BALONGBENDO	38.449	37.601	76.050
13	TAMAN	104.755	103.062	207.817
14	SUKODONO	61.833	60.064	121.897
15	BUDURAN	49.910	49.000	98.910
16	GEDANGAN	60.286	59.717	120.003

17	SEDATI	48.821	47.815	96.636
18	WARU	99.953	100.821	200.774
	T O T A L	**1.022.548**	**1.011.216**	**2.033.764**

Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Sedangkan apabila dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, terbanyak adalah penduduk laki-laki yaitu 1.022.548 jiwa atau 50,28%, sedangkan penduduk perempuan yaitu 1.011.216 jiwa atau 49,72%. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui tabel dan grafik berikut :

Grafik I.3

Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Sedangkan berdasarkan struktur usia penduduk Kabupaten Sidoarjo sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda yaitu 15 tahun samai dengan 19 tahun. Hal ini terlihat pada grafik berikut.

Grafik I.4

Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2020

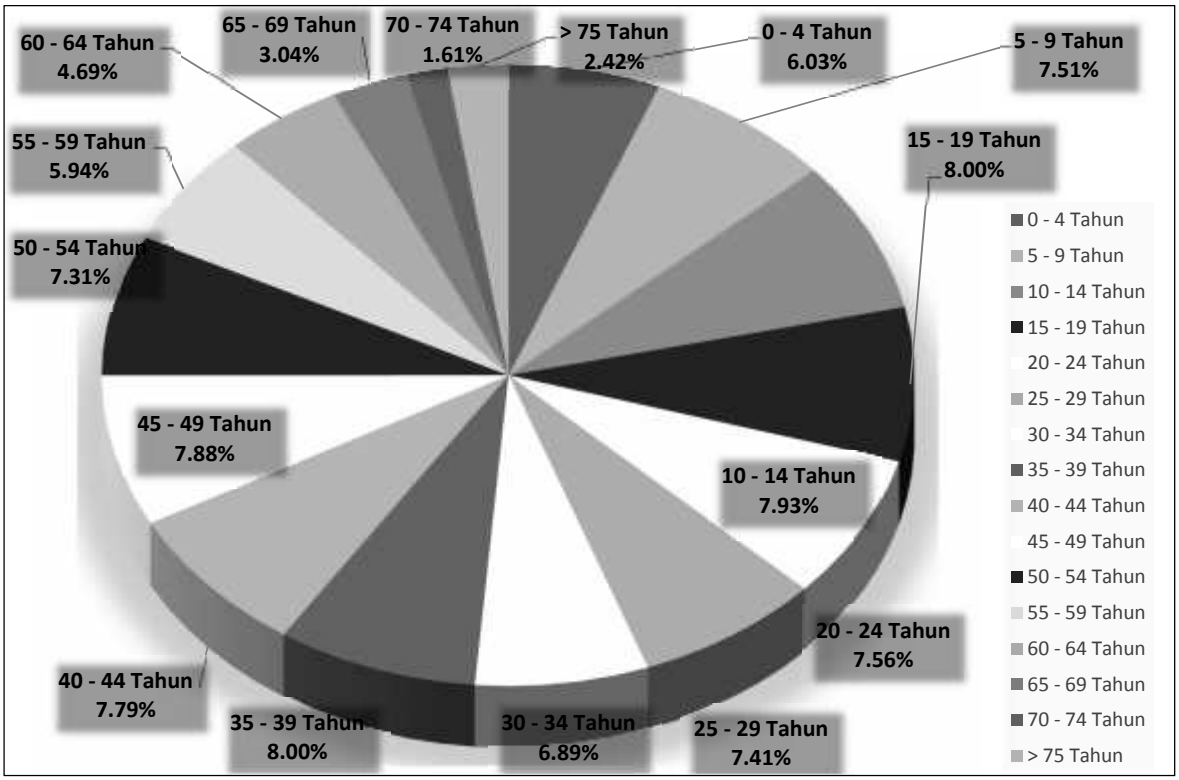

Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Tabel I.9

Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	0-4	63.703	58.934	122.637
2.	5-9	78.832	73.831	152.663
3.	10-14	83.399	77.919	161.318
4.	15-19	84.004	78.791	162.795
5.	20-24	78.213	75.501	153.714
6.	25-29	76.534	74.137	150.671
7.	30-34	71.090	68.943	140.033
8.	35-39	81.037	81.627	162.664
9.	40-44	77.345	81.097	158.442
10.	45-49	77.427	82.760	160.187
11.	50-54	73.300	75.310	148.610
12.	55-59	58.374	62.394	120.768
13.	60-64	48.478	46.929	95.407

14.	65-69	32.586	29.239	61.825
15.	70-74	15.475	17.303	32.778
16.	> 75	22.611	26.641	49.252
	JUMLAH	**1.022.408**	**1.011.356**	**2.033.764**

Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Sebagian besar penduduk Kabupaten Sidoarjo memiliki kualifikasi pendidikan Lulusan SMA Sederajat, yaitu sebanyak 599.248 jiwa. Komposisi penduduk menurut pendidikan tersajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel I.10

Penduduk Per Kecamatan Menurut Pendidikan Tahun 2020

NO	NAMA KECAMATAN	TDK/ BLM SEKOLAH	BLM TAMAT SD/ SEDERAJAT	TAMAT SD/ SEDERAJAT	SLTP/ SEDERAJAT	SLTA/ SEDERAJAT	D-I/ II	AKADEMI/ D-III/ SARJANA MUDA	D-IV/ S-I	S-II	S-III
1.	TARIK	14.000	4.984	16.359	13.390	17.673	145	496	2.067	72	3
2.	PRAMBON	14.197	6.588	18.477	14.201	22.597	180	690	2.930	88	4
3.	KREMBUNG	13.414	6.562	13.825	12.630	20.042	174	677	2.473	87	3
4.	PORONG	20.476	1.794	15.643	12.682	19.207	121	623	2.775	120	5
5.	JABON	12.605	2.980	13.945	10.911	13.584	108	449	1.630	49	5
6.	TANGGULANGIN	19.958	5.489	17.070	15.417	25.717	187	1.024	4.737	201	4
7.	CANDI	31.829	14.202	25.530	21.222	44.841	469	2.632	12.031	627	40
8.	SIDOARJO	44.243	13.853	27.411	24.501	58.968	825	4.811	24.910	1.523	70
9.	TULANGAN	19.302	9.500	18.719	17.054	31.518	217	1.119	4.747	161	2
10.	WONOAYU	21.176	4.322	20.446	13.367	21.721	184	760	3.474	131	5
11.	KRIAN	27.335	11.420	25.297	20.737	37.012	349	1.645	6.879	248	8
12.	BALONGBENDO	18.086	4.660	16.246	13.794	19.762	174	600	2.643	84	1
13.	TAMAN	36.331	20.240	30.543	28.769	68.332	1219	4.200	17.018	1.076	87
14.	SUKODONO	25.096	9.503	19.120	17.342	38.261	515	2.041	9.519	437	25
15.	BUDURAN	19.340	8.982	12.972	14.106	31.061	365	1.884	9.401	578	21
16.	GEDANGAN	29.664	6.875	16.815	16.547	36.505	428	2.205	10.373	563	28
17.	SEDATI	19.950	7.264	15.429	13.056	30.326	358	1.840	7.734	652	27
18.	WARU	42.105	15.550	23.441	25.481	62.121	674	4.438	24.993	1.856	95
TOTAL		**429.107**	**154.768**	**347.288**	**305.207**	**599.248**	**6.692**	**32.134**	**150.334**	**8.553**	**433**

Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Sedangkan untuk komposisi penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.11

Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2020

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	615.678	45.	USTADZ/MUBALIGH	113
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	118.096	46.	JURU MASAK	30
3	PELAJAR/MAHASISWA	325.217	47.	PROMOTOR ACARA	0
4	PENSIUNAN	15.685	48.	ANGGOTA DPR RI	3
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	27.382	49.	ANGGOTA DPD RI	1
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	13.915	50.	ANGGOTA BPK	1
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	4.655	51.	PRESIDEN	0
8	PERDAGANGAN	17.764	52.	WAKIL PRESIDEN	0
9	PETANI/PEKEBUN	41.640	53.	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0
10	PETERNAK	48	54.	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	0
11	NELAYAN/PERIKANAN	787	55.	DUTA BESAR	1
12	INDUSTRI	166	56.	GUBERNUR	0
13	KONSTRUKSI	192	57.	WAKIL GUBERNUR	0
14	TRANSPORTASI	189	58.	BUPATI	1
15	KARYAWAN SWASTA	718.225	59.	WAKIL BUPATI	0
16	KARYAWAN BUMN	5.685	60.	WALIKOTA	0
17	KARYAWAN BUMD	562	61.	WAKIL WALIKOTA	0
18	KARYAWAN HONORER	689	62.	ANGGOTA DPRD PROP.	1
19	BURUH HARIAN LEPAS	2.759	63.	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	14
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1.966	64.	DOSEN	2.627
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	64	65.	GURU	20.728
22	BURUH PETERNAKAN	17	66.	PILOT	42
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	326	67.	PENGACARA	126

24	TUKANG CUKUR	20	68.	NOTARIS	85
25	TUKANG LISTRIK	65	69.	ARSITEK	41
26	TUKANG BATU	1.046	70.	AKUNTAN	16
27	TUKANG KAYU	212	71.	KONSULTAN	69
28	TUKANG SOL SEPATU	26	72.	DOKTER	1.361
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	102	73.	BIDAN	1.274
30	TUKANG JAHIT	429	74.	PERAWAT	2.334
31	TUKANG GIGI	4	75.	APOTEKER	183
32	PENATA RIAS	48	76.	PSIKIATER/PSIKOLOG	20
33	PENATA BUSANA	6	77.	PENYIAR TELEVISI	1
34	PENATA RAMBUT	36	78.	PENYIAR RADIO	4
35	MEKANIK	240	79.	PELAUT	245
36	SENIMAN	72	80.	PENELITI	7
37	TABIB	18	81.	SOPIR	3.445
38	PARAJI	3	82.	PIALANG	6
39	PERANCANG BUSANA	9	83.	PARANORMAL	10
40	PENTERJEMAH	6	84.	PEDAGANG	13.434
41	IMAM MASJID	5	85.	PERANGKAT DESA	2.442
42	PENDETA	131	86.	KEPALA DESA	219
43	PASTOR	4	87.	BIARAWAN/BIARAWATI	8
44	WARTAWAN	155	88.	WIRASWASTA	70.280
			89.	PEKERJAAN LAINNYA	248
				JUMLAH	**2,033,764**

Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mata pencaharian terbesar adalah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta, sebanyak 718.225 orang. Posisi kedua adalah penduduk yang bekerja sebagai wiraswasta, yaitu sebanyak 70.280 orang, sedangkan posisi ketiga petani/pekebun sebanyak 41.640 orang. Sedangkan yang berkutat pada bisnis perdagangan sebanyak 17.764 orang, dan pedagang sebanyak 13.434 orang.

3. Kondisi Perekonomian

Kondisi ekonomi daerah diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB diukur berdasarkan perhitungan 17 (tujuh belas) sektor usaha yang dominan di masyarakat. Rincian PDRB per sektor usaha release terakhir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, yaitu pada tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel I.12

PDRB KABUPATEN SIDOARJO Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)

NO	SEKTOR	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.431,85	2.628,50
2	Pertambangan dan Penggalian	123,90	110,22
3	Industri Pengolahan	100.918,68	72.546,48
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.666,70	1.018,39
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	129,32	110,15
6	Konstruksi	17.121,36	12.221,16
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	31.599,83	20.734,15
8	Transportasi dan Pergudangan	14.604,92	6.469,62
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.733,72	4.653,71
10	Informasi dan Komunikasi	7.618,70	6.739,92
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.451,70	1.604,28
12	Real Estate	1.958,76	1.385,90
13	Jasa Perusahaan	316,76	207,84
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.798,25	2.242,46
15	Jasa Pendidikan	2.471,63	1.685,81
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	679,76	497,07
17	Jasa Lainnya	614,83	449,64
	TOTAL	**197.240,69**	**135.305,32**

Sumber data : Sidoarjo Dalam Angka 2020

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 berdasarkan ADHK dan ADHB terdapat sektor yang menonjol memberikan sumbangan paling besar terhadap PDRB yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Berikut *share* PDRB berdasarkan ADHK Kabupaten Sidoarjo per sektor, sebagaimana grafik :

Grafik I.5

***Share* PDRB Berdasarkan ADHK**

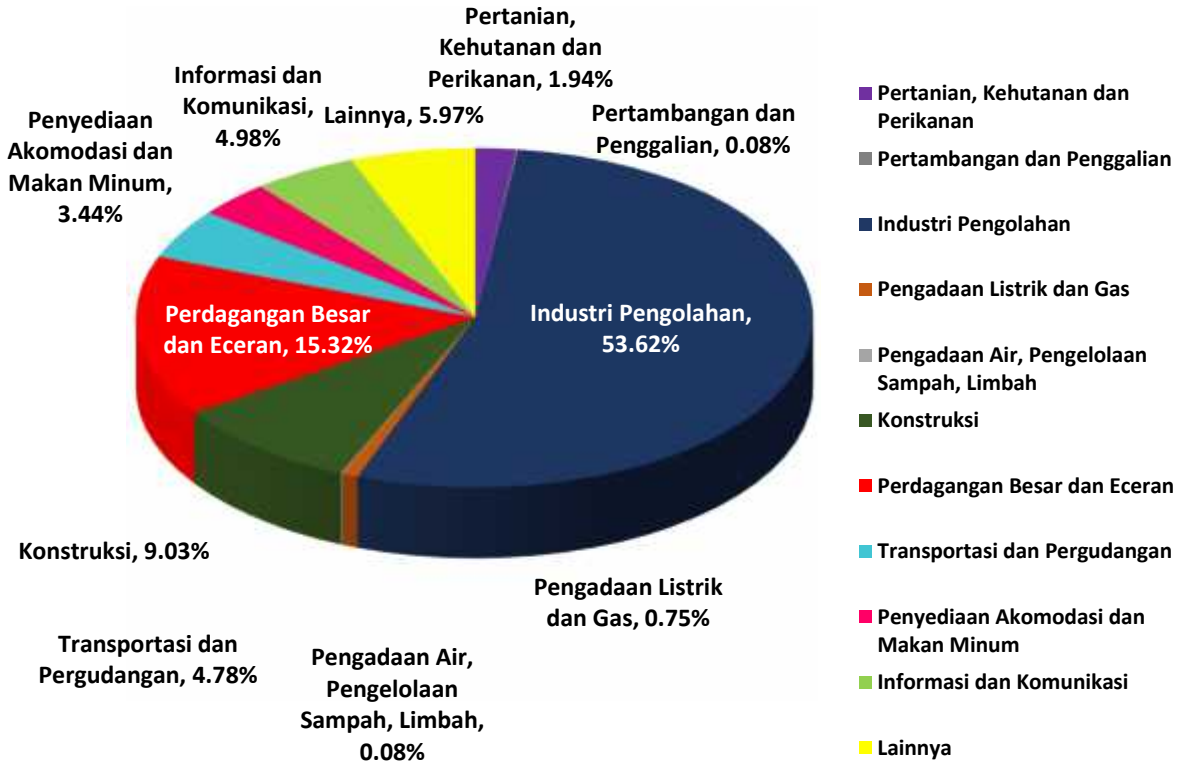

Sumber data : Sidoarjo Dalam Angka 2020

D. Sumber Daya PNS

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Tahun 2020 sebanyak 11.279 orang yang terdiri dari, sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	JABATAN STRUKTURAL YANG HARUS ADA	JABATAN STRUKTURAL YANG ADA	NON STRUKTURAL (STAF)	JABATAN FUNGSIONAL	CPNS	JUMLAH PEGAWAI
1	SEKRETARIAT DAERAH	41	33	120	10	11	178
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	18	16	50	12	0	78
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14	9	20	1	0	30
4	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	16	14	55	1	0	70
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14	10	63	1	2	76
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16	15	46	0	4	65
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21	21	24	9	3	57
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	14	12	47	1	1	61
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	21	16	32	4	3	55
10	DINAS KESEHATAN	50	41	265	1.112	89	1.507
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20	16	40	6	10	72
12	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	15	12	28	1	6	47
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	23	17	272	2	8	299
14	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	26	22	63	55	5	145
15	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	24	18	118	4	3	143
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17	16	28	2	0	46
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	27	21	516	5.166	500	6.203
18	DINAS PERHUBUNGAN	21	15	56	17	3	91
19	DINAS PERIKANAN	15	13	30	1	3	47
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	18	15	151	12	1	179
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	14	13	16	8	0	37
22	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	23	21	37	1	1	60
23	DINAS SOSIAL	16	16	19	1	0	36
24	DINAS TENAGA KERJA	14	11	14	8	1	34

25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19	18	19	1	0	38
26	INSPEKTORAT	9	8	21	35	10	74
27	KECAMATAN BALONGBENDO	9	8	19	1	1	29
28	KECAMATAN BUDURAN	9	7	17	1	1	26
29	KECAMATAN CANDI	9	6	21	1	0	28
30	KECAMATAN GEDANGAN	9	9	15	1	0	25
31	KECAMATAN JABON	9	8	12	1	1	22
32	KECAMATAN KREMBUNG	9	9	18	1	1	29
33	KECAMATAN KRIAN	24	12	23	0	3	38
34	KECAMATAN PORONG	39	13	28	1	2	44
35	KECAMATAN PRAMBON	9	7	24	1	3	35
36	KECAMATAN SEDATI	9	8	21	1	2	32
37	KECAMATAN SIDOARJO	79	49	59	1	0	109
38	KECAMATAN SUKODONO	9	6	17	1	2	26
39	KECAMATAN TAMAN	49	25	34	1	0	59
40	KECAMATAN TANGGULANGIN	9	9	20	1	1	31
41	KECAMATAN TARIK	9	6	21	1	3	31
42	KECAMATAN TULANGAN	9	9	24	1	2	36
43	KECAMATAN WARU	9	8	22	1	1	32
44	KECAMATAN WONOAYU	9	7	20	1	0	28
45	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	29	27	168	480	17	692
46	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13	10	47	47	1	105
47	SEKRETARIAT DPRD	15	14	40	4	2	60
48	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	16	15	16	1	0	32
	JUMLAH						**11.279**

Sumber Data : Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)

E. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Sidoarjo, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah antara lain berupa :

1) Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.
2) Mendorong pembangunan di sembilan program unggulan daerah, dengan memprioritaskan pada sektor-sektor yang paling potensial guna mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat secara layak.

3) Memberikan layanan masyarakat secara profesional untuk mencapai pelayanan prima.
4) Menfasilitasi pembangunan infrastruktur guna mendorong peningkatan pembangunan yang proporsional, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
5) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana-prasarana pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan perkapita guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6) Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan gender dan pengamalan nilai-nilai agama diiringi dengan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai dasar negara secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7) Mewujudkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang aman, tentram, dan tenggang rasa guna terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif.
8) Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, santun, dan menjunjung tinggi nilainilai dan etika bermasyarakat.
9) Penegakan supremasi hukum di segala bidang.

Target dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tahun	Target Pendapatan (Rp.)	Realisasi Pendapatan (Rp.)	%
2016	Rp. 3.389.966.737.239,00	Rp. 3.668.041.957.746,70	108,20%
2017	Rp. 4.029.066.902.057,03	Rp. 4.045.685.362.112,53	100,41%
2018	Rp. 4.124.471.103.455,83	Rp. 4.332.577.984.768,01	105,05%
2019	Rp. 4.394.906.478.896,00	Rp. 4.444.626.346.624,69	101,13%
2020	Rp. 4.058.099.090.414,00	Rp. 4.422.599.399.218,15	108,98%

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2016 s.d 2019 Audited BPK, sedangkan untuk Tahun 2020 Unaudited BPK cutt off Data Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 per tanggal 28 Februari 2021

Grafik I.6

Perkembangan Pendapatan Kabupaten Sidoarjo

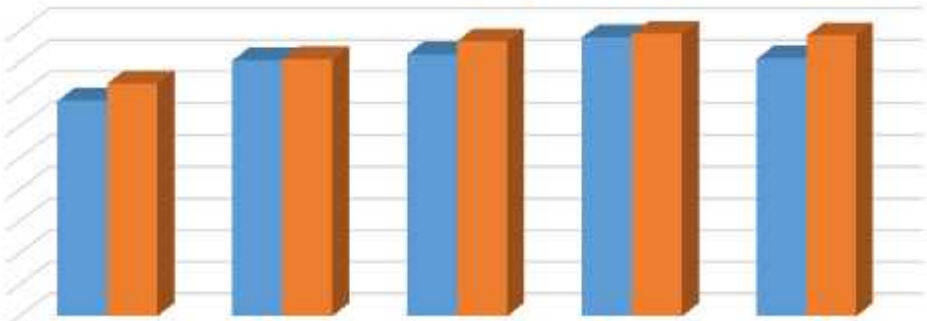

	2016	2017	2018	2019	2020
Target	Rp3,389,966,737,2	Rp4,029,066,902,0	Rp4,124,471,103,4	Rp4,394,906,478,8	Rp4,058,099,090,4
Realisasi	Rp3,668,041,957,7	Rp4,045,685,362,1	Rp4,332,577,984,7	Rp4,444,626,346,6	Rp4,422,599,399,2

Sumber Data : Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo

sedangkan untuk Tahun 2020 Unaudited BPK cutt off Data Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 per tanggal 28 Februari 2021

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PENDAPATAN			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.531.360.832.030,00	1.809.832.433.911,15	118,18%
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.694.744.640.648,00	1.711.271.242.511,00	100,98%
1.3.	LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH	831.993.617.736,00	901.495.722.796,00	108,35%
	JUMLAH PENDAPATAN	**4.058.099.090.414,00**	**4.422.599.399.218,15**	**108,98%**

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK cutt off Data Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 per tanggal 28 Februari 2021

Realisasi seluruh pendapatan daerah pada tahun 2020 sebesar Rp.4.422.599.399.218,15 atau 108,98% dari target / anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.4.058.099.090.414,00.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2020 secara umum tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2020 sebesar Rp.1.809.832.433.911,15 atau tercapai sebesar 118,18% dari seluruh target PAD sebesar Rp.1.531.360.832.030,00.

Rincian realisasi dan target PAD tahun 2020 adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN ASLI DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1.	Pajak Daerah	849.455.000.000,00	929.261.529.986,45	109,40%
1.1.2.	Retribusi Daerah	55.980.517.525,00	58.931.135.490,00	105,27%
1.1.3.	Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	37.626.054.550,00	37.626.054.550,00	100,00%
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	588.299.259.955,00	784.013.713.884,70	133,27%
	JUMLAH	**1.531.360.832.030,00**	**1.809.832.433.911,15**	**118,18%**

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK cutt off Data Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 per tanggal 28 Februari 2021

b. Pajak Daerah

Pajak daerah tahun 2020 realisasinya tercapai sebesar Rp.929.261.529.986,45 atau 109,40% dari seluruh target penerimaan pajak daerah.

JENIS / OBYEK PAJAK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pajak Daerah	**849.455.000.000,00**	**929.261.529.986,45**	**109,40%**
Pajak Hotel	9.700.000.000,00	11.104.965.643,00	114,48%
Pajak Restoran	62.000.000.000,00	64.616.576.015,00	104,22%
Pajak Hiburan	2.730.000.000,00	2.814.119.899,00	103,08%
Pajak Reklame	14.000.000.000,00	14.690.375.957,00	104,93%
Pajak Penerangan Jalan	313.000.000.000,00	305.298.678.427,45	97,54%
Pajak Parkir	15.000.000.000,00	15.821.168.400,00	105,47%
Pajak Air Tanah	2.025.000.000,00	2.575.219.356,00	127,17%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	211.000.000.000,00	229.810.879.995,00	108,92%

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	220.000.000.000,00	282.529.546.294,00	128,42%

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK cutt off Data Rekonsiliasi Pajak Daerah Tahun 2020 per tanggal 28 Februari 2021

c. Retribusi Daerah

Retribusi daerah tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.59.931.135.490,00 atau tercapai 105,27% dari seluruh target retribusi daerah yang ditetapkan. Seluruh jenis retribusi realisasinya terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK RETRIBUSI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Retribusi Daerah	**55.980.517.525,00**	**58.931.135.490,00**	**105,27%**
Retribusi Jasa Umum	26.389.800.000,00	28.668.170.054,00	108,63%
Retribusi Jasa Usaha	7.784.538.250,00	3.975.864.077,00	51,07%
Retribusi Perizinan Tertentu	21.806.179.275,00	26.287.101.359,00	120,55%

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK cutt off Data Rekonsiliasi Retribusi Daerah Tahun 2020 per tanggal 28 Februari 2021

d. Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pendapatan hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp.37.626.054.550,00 dan terealisasi sebesar Rp.37.626.054.550,00 atau tercapai sebesar 100,00%.

JENIS / OBYEK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD			
Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta"	13.339.252.970,00	13.339.252.970,00	**100,00%**
PD Aneka Usaha "Delta Grafika"	342.131.732,00	342.131.732,00	**100,00%**
BPR "Delta Artha"	6.103.157.878,00	6.103.157.878,00	**100,00%**
Bank Jatim	17.841.511.970,00	17.841.511.970,00	**100,00%**
JUMLAH	**37.626.054.550,00**	**37.626.054.550,00**	**100,00%**

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK cutt off Data Rekonsiliasi Hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2020 per tanggal 28 Februari 2021

e. Penerimaan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan lain–lain PAD tahun 2020 sebesar Rp.784.013.713.884,70 atau tercapai 133,27%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp.588.299.259.955,00.

JENIS / OBYEK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Secara Tunai atau Angsuran Cicilan	396.371.500,00	1.538.252.711,00	388,08%
Penerimaan Jasa Giro	5.138.501.606,00	5.446.634.576,28	106,00%
Pendapatan Bunga Deposito	52.065.944.716,00	49.998.533.959,19	96,03%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	11.492.260,00	14.730.260,00	128,18%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	330.193.840,00	1.071.215.269,60	324,42%
Pendapatan Denda Pajak	1.263.216.561,00	1.545.535.986,00	122,35%
Pendapatan Denda Retribusi	185.344.502,00	325.741.443,00	175,75%
Pendapatan Dari Pengembalian	4.219.647.068,00	**8.516.791.911,87**	201,84%
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	188.000.000,00	151.447.243,00	80,56%
Pendapatan Dari Sewa Aset Pemda (Rumah/Gedung/Tanah/Lahan)	3.898.130.000,00	6.542.073.743,00	167,83%
Pendapatan Dari Kesepakatan dan Kerjasama	608.848.832,00	758.797.604,00	124,63%
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	519.993.569.070,00	707.529.334.050,32	136,07%
Penjualan Hasil Perikanan	0,00	0,00	0,00%
Penjualan Hasil Raskin	0,00	0,00	0,00%
Penjualan Hasil Pasar Murah	0,00	0,00	0,00%
Penerimaan Lain-lain	0,00	91.004.127,44	0,00%
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati		483.621.000,00	0,00%
Dana BOS Reguler	0,00	0,00	0,00%
Pendapatan denda dari sewa aset pemda dari kesepakatan & kerjasama	0,00	0,00	0,00%
Pendapatan dari klaim asuransi	0,00	0,00	0,00%
Pendapatan dari piutang	0,00	0,00	0,00%
JUMLAH	**588.299.259.955,00**	**784.013.713.884,70**	**133,27%**

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK Data Rekonsiliasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 cutt off per tanggal 28 Februari 2021

f. Pendapatan Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.1.711.271.242.511,00 atau 100,98% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.694.744.640.648,00. Rincian target dan realisasi pendapatan dana perimbangan adalah sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Dana Perimbangan			
Bagi Hasil Pajak	122.763.886.000,00	138.962.730.155,00	113,20%
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	20.435.463.000,00	34.434.218.411,00	168,50%
Dana Alokasi Umum	1.157.958.587.000,00	1.149.801.473.000,00	99,30%
Dana Alokasi Khusus	59.298.215.000,00	42.884.335.429,00	72,32%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	334.288.489.648,00	345.188.485.516,00	103,26%
JUMLAH	**1.694.744.640.648,00**	**1.711.271.242.511,00**	**100,98%**

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK Data Rekonsiliasi Pendapatan Dana Perimbangan Tahun 2020 cutt off per tanggal 28 Februari 2021

g. **Lain – Lain Pendapatan Yang Sah**

Realisasi atas Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**831.993.617.736,00**	**901.495.722.796,00**	**108,35%**
Pendapatan hibah dari Pemerintah	**0,00**	**3.158.648.500,00**	
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	**264.780.496.236,00**	**339.339.055.996,00**	**128,16%**
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	**264.780.496.236,00**	**339.339.055.996,00**	**128,16%**
Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi	**0,00**	**0,00**	
Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota Surabaya			
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khsusus	**387.744.706.000,00**	**386.155.714.800,00**	**99,59%**
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	**13.004.515.500,00**	**13.004.515.500,00**	**100,00%**

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK Data Rekonsiliasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2020 cutt off per tanggal 28 Februari 2021

F. Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada periode tahun 2016 - 2021 melanjutkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran untuk belanja aparatur, sehingga trend kedepan komposisinya untuk pelayanan publik semakin bertambah besar. Selain itu untuk belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis lebih didorong kepada pengeluaran yang bersifat *cost recovery* dan menjadi faktor pendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat untuk melakukan investasi, sehingga nantinya belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis tidak lagi membebani belanja daerah, tetapi sebaliknya akan menjadikan sebagai pendapatan daerah.

Arah pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2016 - 2021 diprioritaskan untuk mendanai program - program berdasarkan prioritasnya. Program prioritas sebagaimana dimaksud adalah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kebijakan alokasi anggaran Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 - 2021 secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Target dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tahun	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
2016	Rp. 3.957.737.172.284,80	Rp. 3.651.619.251.558,26	92,27%
2017	Rp. 4.613.059.104.900,67	Rp. 3.748.313.122.059,10	81,25%
2018	Rp. 5.005.097.845.031,35	Rp. 4.188.537.810.911,10	83,69%
2019	Rp. 5.423.124.488.516,28	Rp. 4.344.722.393.986,67	80,11%
2020	Rp. 5.182.074.462.157,57	Rp. 4.441.673.370.394,65	85,71%

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2016 s.d 2019 Audited BPK, sedangkan untuk Tahun 2020 Unaudited BPK Data Rekonsiliasi Belanja Daerah Tahun 2020 cutt off per tanggal 28 Februari 2021

Grafik I.7

Perkembangan Belanja Kabupaten Sidoarjo

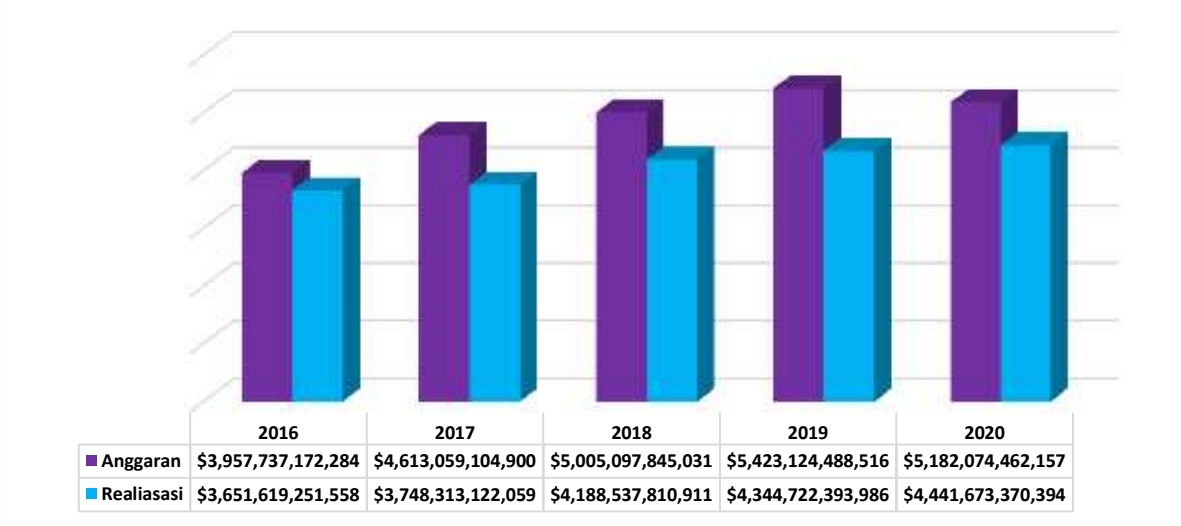

Sumber Data : Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo sedangkan untuk Tahun 2020 Unaudited BPK Data Rekonsiliasi Belanja Daerah Tahun 2020 cutt off per tanggal 28 Februari 2021

Target belanja daerah untuk tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.5.182.074.462.157,57, dari target tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp.4.441.673.370.394,65 atau tercapai sebesar 85,71%, dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2	BELANJA DAERAH			
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.619.724.799.549,81	2.349.232.579.995,94	*89,67%*
2.2.	BELANJA LANGSUNG	2.562.349.662.607,76	2.092.440.790.398,71	*81,66%*
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**5.182.074.462.157,57**	**4.441.673.370.394,65**	***85,71%***

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK Data Rekonsiliasi Belanja Daerah Tahun 2020 cutt off per tanggal 28 Februari 2021

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.2.349.232.579.995,94 atau 89,67% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.619.724.799.549,81.

Rincian realisasi belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2.1.	**Belanja Tidak Langsung**			
2.1.1	Belanja Pegawai	1.403.510.590.886,30	1.286.795.633.705,61	*91,68%*
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi	250.000.000,00	0,00	*0,00%*
2.1.4	Belanja Hibah	290.233.862.550,00	258.000.874.222,00	*88,89%*
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	92.385.453.000,00	86.331.775.000,00	*93,45%*
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	92.771.858.152,00	92.531.238.338,00	*99,74%*
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	500.265.955.180,18	493.492.244.936,60	*98,65%*
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	240.307.079.781,33	132.080.813.793,73	*54,96%*
	JUMLAH	**2.619.724.799.549,81**	**2.349.232.579.995,94**	***89,67%***

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK Data Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 cutt off per tanggal 28 Februari 2021

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.2.092.440.790.398,71 atau 81,66% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.2.562.349.662.607,76.

Rincian realisasi belanja langsung adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2.2.	BELANJA LANGSUNG			
2.2.1.	Belanja Pegawai	293.025.497.180,60	274.664.603.103,64	*93,73%*
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.497.967.754.184,95	1.298.523.315.895,60	*86,69%*
2.2.3.	Belanja Modal	771.356.411.242,21	519.252.871.399,47	*67,32%*
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		**2.562.349.662.607,76**	**2.092.440.790.398,71**	**81,66%**

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK Data Rekonsiliasi Belanja Langsung Tahun 2020 cutt off per tanggal 28 Februari 2021

c. Target Dan Realisasi Belanja Menurut Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan kebijakan umum belanja dan dalam rangka mencapai sasaran program dan kegiatan tahun 2020, rincian realisasi Total Belanja Tidak Langsung sebagaimana dalam Tabel I.13, sedangkan realisasi Total Belanja Langsung sebagaimana dalam Tabel I.14 menurut organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel I.13

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020

No.	OPD	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	758.601.108.154,00	701.355.444.755,00	92,45%
2	Dinas Kesehatan	155.433.921.690,14	148.302.360.981,00	95,41%
3	Rumah Sakit Umum Daerah	50.458.641.247,00	47.434.915.554,00	94,01%
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	17.025.653.827,86	15.232.285.023,00	89,47%
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta karya dan Tata Ruang	8.623.746.316,00	7.541.160.598,00	87,45%
6	Satuan Polisi Pamong Praja	12.716.001.614,00	11.545.730.564,00	90,80%
7	Dinas Sosial	5.875.251.730,00	5.237.210.320,00	89,14%
8	Dinas Tenaga Kerja	6.393.669.956,00	5.228.167.368,00	81,77%
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	5.738.907.002,00	5.280.872.672,00	92,02%

	Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana			
10	Dinas Pangan dan Pertanian	24.243.951.653,00	19.436.142.082,00	80,17%
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	29.281.425.838,00	27.507.596.314,00	93,94%
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.268.652.052,00	6.586.749.995,00	90,62%
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.433.737.154,00	5.716.741.653,00	88,86%
14	Dinas Perhubungan	12.125.148.392,00	10.849.943.612,00	89,48%
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.653.290.622,00	6.912.315.584,00	90,32%
16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5.546.123.420,00	4.941.523.556,00	89,10%
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.003.140.740,00	7.545.776.157,00	94,29%
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	8.153.644.034,50	7.318.793.212,00	89,76%
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.642.449.012,00	5.188.750.665,00	91,96%
20	Dinas Perikanan	6.072.240.816,00	5.419.545.451,00	89,25%
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.457.674.024,00	19.957.320.202,00	93,01%
22	Inspektorat	12.292.315.482,00	11.397.538.919,00	92,72%
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.440.722.730,00	7.720.102.926,00	91,46%
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.935.459.040,00	9.947.143.172,00	90,96%
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	28.267.082.720,00	22.566.276.194,00	79,83%
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	1.216.214.208.663,51	1.062.436.946.290,33	87,36%
27	Badan Kepegawaian Daerah	8.882.253.132,00	7.991.983.666,00	89,98%
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.924.147.916,00	9.295.705.893,00	93,67%
29	Sekretariat Daerah	26.894.223.388,00	24.884.963.436,00	92,53%
30	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2.259.674.897,80	1.167.013.060,00	51,65%
31	Sekretariat DPRD	7.974.738.598,00	7.114.674.061,00	89,22%
32	DPRD	28.626.600.000,00	26.847.017.998,00	93,78%
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.539.491.698,00	4.537.041.338,00	81,90%
34	Kecamatan Sidoarjo	15.666.628.793,50	14.385.861.048,00	91,82%
35	Kecamatan Candi	4.228.352.618,00	3.546.378.322,00	83,87%
36	Kecamatan Buduran	3.936.909.930,00	3.289.694.624,00	83,56%
37	Kecamatan Wonoayu	4.137.322.436,00	3.415.366.496,00	82,55%
38	Kecamatan Krian	5.220.026.750,00	4.422.259.716,61	84,72%
39	Kecamatan Porong	5.644.966.008,00	4.827.972.606,00	85,53%
40	Kecamatan Krembung	4.071.528.252,00	3.579.536.954,00	87,92%
41	Kecamatan Jabon	3.095.596.644,00	2.685.098.532,00	86,74%
42	Kecamatan Balongbendo	3.778.573.398,00	3.406.521.577,00	90,15%
43	Kecamatan Tarik	3.587.917.176,00	3.067.938.424,00	85,51%
44	Kecamatan Taman	8.877.971.656,00	8.028.164.835,00	90,43%
45	Kecamatan Waru	4.257.250.894,00	3.437.988.358,00	80,76%
46	Kecamatan Gedangan	3.724.901.160,00	3.126.001.198,00	83,92%

47	Kecamatan Sedati	3.731.678.370,00	3.340.533.921,00	89,52%
48	Kecamatan Tanggulangin	3.986.455.876,00	3.545.233.894,00	88,93%
49	Kecamatan Tulangan	4.712.819.300,00	4.146.740.090,00	87,99%
50	Kecamatan Prambon	4.013.061.422,50	3.481.978.355,00	86,77%
51	Kecamatan Sukodono	4.053.541.306,00	3.053.557.774,00	75,33%
	J u m l a h	**2.619.724.799.549,81**	**2.349.232.579.995,94**	**89,67%**

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK Data Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung OPD Tahun 2020 cutt off per tanggal 28 Februari 2021

Tabel I.14

Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020

No.	OPD	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	418.976.328.110,00	399.550.252.274,00	95,36%
2	Dinas Kesehatan	336.245.035.610,24	273.115.591.194,16	81,23%
3	Rumah Sakit Umum Daerah	574.895.657.671,75	549.718.408.774,55	95,62%
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	252.022.707.095,00	121.370.618.592,00	48,16%
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta karya dan Tata Ruang	207.699.965.194,00	135.743.983.660,00	65,36%
6	Satuan Polisi Pamong Praja	21.107.040.645,00	19.118.346.139,00	90,58%
7	Dinas Sosial	33.101.625.209,00	30.865.343.923,00	93,24%
8	Dinas Tenaga Kerja	8.404.101.810,00	7.333.421.791,00	87,26%
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	18.458.272.824,00	16.410.383.556,00	88,91%
10	Dinas Pangan dan Pertanian	16.824.201.785,00	14.897.721.062,00	88,55%
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	174.411.520.989,00	136.549.732.237,00	78,29%
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.782.787.100,00	9.801.219.545,00	90,90%
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.832.953.530,00	10.671.190.679,00	67,40%
14	Dinas Perhubungan	39.377.326.185,00	28.349.656.250,00	71,99%
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.042.179.532,00	24.260.644.674,00	93,16%
16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5.469.983.620,00	4.864.772.869,00	88,94%
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.330.769.490,00	7.126.258.320,00	85,54%
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	17.435.771.829,00	12.915.106.246,00	74,07%
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.681.065.351,00	5.143.022.089,00	90,53%
20	Dinas Perikanan	39.682.100.390,00	38.444.731.844,00	96,88%
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.173.513.699,77	27.041.997.449,00	84,05%
22	Inspektorat	6.269.890.250,00	4.754.032.832,00	75,82%
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.942.017.161,00	11.261.403.519,00	87,01%
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.009.563.206,00	9.064.276.656,00	90,56%
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	9.893.695.167,00	8.913.168.034,00	90,09%
26	Badan Kepegawaian Daerah	8.852.578.865,00	7.635.090.699,00	86,25%

27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.819.806.874,00	12.929.217.854,00	81,73%
28	Sekretariat Daerah	41.541.608.299,00	33.442.290.012,00	80,50%
29	Sekretariat DPRD	92.285.134.614,00	48.957.192.658,00	53,05%
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.561.386.200,00	7.612.753.712,00	79,62%
31	Kecamatan Sidoarjo	20.338.084.482,00	18.297.566.836,00	89,97%
32	Kecamatan Candi	1.986.435.023,00	1.770.735.417,00	89,14%
33	Kecamatan Buduran	2.673.193.550,00	2.409.288.077,00	90,13%
34	Kecamatan Wonoayu	1.766.360.500,00	1.607.681.274,00	91,02%
35	Kecamatan Krian	8.678.750.710,00	7.010.263.620,00	80,78%
36	Kecamatan Porong	12.592.630.733,00	7.034.656.169,00	55,86%
37	Kecamatan Krembung	1.910.370.774,00	1.546.397.682,00	80,95%
38	Kecamatan Jabon	2.607.201.574,00	2.104.292.770,00	80,71%
39	Kecamatan Balongbendo	1.982.416.850,00	1.712.316.705,00	86,38%
40	Kecamatan Tarik	1.947.205.200,00	1.525.481.850,00	78,34%
41	Kecamatan Taman	14.972.721.566,00	13.540.819.776,00	90,44%
42	Kecamatan Waru	4.761.729.670,00	2.972.225.723,00	62,42%
43	Kecamatan Gedangan	2.253.632.065,00	2.051.624.596,00	91,04%
44	Kecamatan Sedati	2.524.324.440,00	2.142.096.904,00	84,86%
45	Kecamatan Tanggulangin	2.169.382.750,00	1.851.619.342,00	85,35%
46	Kecamatan Tulangan	1.975.046.300,00	1.715.292.337,00	86,85%
47	Kecamatan Prambon	2.342.220.635,00	1.951.926.003,00	83,34%
48	Kecamatan Sukodono	4.737.367.480,00	3.334.676.174,00	70,39%
	J u m l a h	**2.562.349.662.607,76**	**2.092.440.790.398,71**	**81,66%**

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK Data Rekonsiliasi Belanja Langsung OPD Tahun 2020 cutt off per tanggal 28 Februari 2021

G. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SILPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah.

Total anggaran pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 sebesar Rp.1.123.975.371.743,57. Nilai sejumlah itu akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran tahun berjalan sebesar Rp.(1.106.146.273.715,82).

Realisasi pembiayaan netto tahun 2020 sebesar Rp.1.125.220.244.892,32 dan yang dianggarkan sebesar Rp.1.123.975.371.743,57. Realisasi pembiayaan netto tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp.1.131.115.244.892,32 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.5.895.000.000,-.

Struktur Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH (KURANG) (Rp)	%
Surplus/Defisit	**(1.123.975.371.743,57)**	**(19.073.971.176,50)**	**(1.104.901.400.567,07)**	**1,70%**
Penerimaan Pembiayaan Daerah	**1.136.075.371.743,57**	**1.131.115.244.892,32**		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.128.475.371.743,57	1.128.475.371.743,57	0,00	100,00%
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	7.600.000.000,00	2.639.873.148,75	4.960.126.851,25	34,74%
Pengeluaran Pembiayaan daerah	**12.100.000.000,00**	**5.895.000.000,00**	**6.205.000.000,00**	**48,72%**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.100.000.000,00	5.895.000.000,00	6.205.000.000,00	48,72%
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	100,00%
Badan Usaha Swasta				
Pembiayaan Netto	**1.123.975.371.743,57**	**1.125.220.244.892,32**	**(1.244.873.148,75)**	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**0,00**	**1.106.146.273.715,82**	**(1.106.146.273.715,82)**	

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK Data Rekonsiliasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 cutt off per tanggal 28 Februari 2021

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.5.365.589.395.000,00 bertambah/ (berkurang) sejumlah (Rp.199.256.751.025,43) sehingga menjadi Rp.5.166.332.643.974,57 sebagaimana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :	
a. Semula	Rp.4.536.589.395.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp.494.232.122.769,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.4.042.357.272.231,007
2. Belanja :	
a. Semula	Rp.5.365.589.395.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp.199.256.751.025,43)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.5.166.332.643.974,57
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp.1.123.975.371.743,57)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp.842.800.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.293.275.371.743,57
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.1.136.075.371.743,57

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.13.800.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.1.700.000.000,00)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.12.100.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.1.123.975.371.743,57

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0,00

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dimaksud, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.1.810.100.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.278.739.167.970,00)
Jumlah pendapatan asli daerah	Rp.1.531.360.832.030,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.1.838.280.187.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.159.277.364.535,00)
Jumlah dana perimbangan	Rp.1.679.002.822.465,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.888.209.208.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.56.215.590.264,00)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.831.993.617.736,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.1.097.573.532.103,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.248.118.532.103,00)
Jumlah pajak daerah	Rp.849.455.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.78.017.764.225,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.22.037.246.700,00)
Jumlah retribusi daerah	Rp.55.980.517.525,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.36.786.467.300,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.839.587.250,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.37.626.054.550,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.597.722.236.372,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.9.422.976.417,00)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.588.299.259.955,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil bukan Pajak

1. Semula	Rp.142.527.502.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.671.847.000,00
Jumlah dana bagi hasil	Rp.143.199.349.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.1.277.152.178.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.119.193.591.000,00)
Jumlah dana alokasi umum	Rp.1.157.958.587.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.418.600.507.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.40.755.620.535,00)
Jumlah dana alokasi khusus	Rp.377.844.886.465,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.144.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.22.463.900.000,00
Jumlah pendapatan hibah	Rp.166.463.900.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya

1. Semula	Rp.386.200.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.121.419.503.764,00)
Jumlah dana bagi hasil pajak	Rp.264.780.496.236,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.358.009.208.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.29.735.498.000,00
Jumlah dana bagi hasil pajak	Rp.387.744.706.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang	Rp.13.004.515.500,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.13.004.515.500,00

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.2.434.906.588.507,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.184.818.211.042,81
Jumlah belanja tidak langsung	Rp.2.619.724.799.549,81

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.2.930.682.806.493,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.384.074.962.068,24)
Jumlah belanja langsung	Rp.2.546.607.844.424,76

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp.1.495.920.153.471,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.92.409.562.584,70)
Jumlah belanja pegawai	Rp.1.403.510.590.886,30

b. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.250.000.000,00
Jumlah belanja hibah	Rp.250.000.000,00

c. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.268.804.171.550,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.21.429.691.000,00
Jumlah belanja hibah	Rp.290.233.862.550,00

d. Belanja bantuan sosial

1. Semula	Rp.73.432.005.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.18.953.448.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial	Rp.92.385.453.000,00

e. Belanja bagi hasil Kepada Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa

1. Semula	Rp.119.787.436.032,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.27.015.577.880,00)
Jumlah belanja bagi hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp.92.771.858.152,00

f. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1. Semula	Rp.466.962.822.454,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.33.303.132.726,18
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.500.265.955.180,18

g. Belanja tidak terduga

1. Semula	Rp.10.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.230.307.079.781,33
Jumlah belanja tidak terduga	Rp.240.307.079.781,33

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.260.252.645.826,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.17.031.033.171,60
Jumlah belanja pegawai	Rp.277.283.678.997,60

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.1.359.063.292.596,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.138.904.461.588,95
Jumlah belanja barang dan jasa	Rp.1.497.967.754.184,95

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.1.311.366.868.071,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.540.010.456.828,79)
Jumlah belanja modal	Rp.771.356.411.242,21

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.842.800.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.293.275.371.743,57
Jumlah penerimaan	Rp.1.136.075.371.743,57

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.13.800.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.1.700.000.000,00)
Jumlah pengeluaran	Rp.12.100.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1. Semula	Rp.835.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.293.475.371.743,57
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya	Rp.1.128.475.371.743,57

b. Pencairan dana cadangan

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pencairan dana cadangan	Rp.0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang Dipisahkan	Rp.0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah	Rp.0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp.0,00

f. Penerimaan piutang daerah

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah penerimaan piutang daerah	Rp.0,00

g. Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir

1. Semula	Rp.7.800.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.200.000.000,00)
Jumlah penerimaan pengembalian dana bergulir	Rp.7.600.000.000,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan	Rp.0,00

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.13.800.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.1.700.000.000,00)
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	Rp.12.100.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pembayaran pokok utang	Rp.0,00

d. Pemberian pinjaman daerah

a. Semula	Rp.0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pembayaran pokok utang	Rp.0,00

Tema pembangunan Tahun 2020 adalah Percepatan Pembangunan Ekonomi melalui Akselerasi Sektor – Sektor Potensial Daerah, dimana Prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2020 dijabarkan dalam 59 program prioritas, sebagai berikut :

Tema dan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	1. Program pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal 2. Program peningkatan mutu dan relevansi layanan pendidikan 3. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 4. Program pendidikan sekolah dasar 5. Program pendidikan sekolah menengah pertama 6. Program perluasan dan aksesibilitas Pendidikan 7. Program Penyediaan Dana BOSREG 8. Program pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca
2. Meningkatkan inovasi, kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah	
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	
4. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujutkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman,	

demokratis, berbudaya dan agamis	9. Program pelayanan kesehatan masyarakat
5. Optimalisasi pembangunan system infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	10. Program pengembangan sumber daya kesehatan 11. Program upaya kesehatan masyaraka 12. Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM 13. Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta Pendapatan Pasar rakyat 14. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan pedagang informal 15. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 16. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Garam 17. Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan 18. Program Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 19. Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Hasil Hewan 20. Peningkatan Ketahanan pangan daerah 21. Program Pengembangan Objek, promosi, dan usaha pariwisata 22. Program Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro 23. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 24. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

	25. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 26. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 27. Program peningkatan keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 28. Program Penetapan Pajak Daerah 29. Program Pengendalian Pajak Daerah 30. Program pengelolaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera 31. Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 32. Program peningkatan pelayanan pada badan layanan umum daerah 33. Program Pengelolaan, Fasilitasi dan Implementasi Teknologi Informatika 34. Program Peningkatan Kualitas Layanan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 35. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan 36. Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan irigasi, pematusan dan pengendalian Banjir 37. Program pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman 38. Program penataan bangunan 39. Program peningkatan pelayanan angkutan 40. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 41. Program Pemberdayan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya

	42. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 43. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 44. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 45. Program peningkatan kesempatan kerja dan penyelenggaraan transmigrasi 46. Program pengembangan dan perlindungan ketenagakerjaan 47. Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 48. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 49. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 50. Pogram Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan hubungan antar lembaga 51. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 52. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penerangan jalan dan lingkungan 53. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 54. Program Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 55. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 56. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 57. Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN 58. Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

	59. Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan.

Sumber Data : RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU), merupakan ukuran capaain kinerja tertinggi dari tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 terdapat 10 IKU, yang meliputi antara lain sebagai berikut :

1. Indek Good Governace

   Indikator ini digunakan untuk memastikan berjalannya pemerintahan yang baik dan transparan sebagai prinsip pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Indeks Reformasi Birokrasi

   Indikator ini digunakan untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mencapai *good and clean governance*
3. Pertumbuhan Ekonomi

   Indikator ini digunakan untuk mngukur proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu
4. Indeks GINI

   Indikator ini digunakan untuk menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

   Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup

6. Indeks Kebahagiaan

   Indikator ini digunakan untuk menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia.

7. Indeks Infrastruktur

   Indikator ini digunakan untuk mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur

8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

   Indikator ini digunakan untuk mengetahui gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu

9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

   Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten

10. Tingkat Kemiskinan

    Indikator ini digunanakan untuk mengetahui keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar

Untuk pengukuran capaian IKU tersebut di atas, realisasi kinerja di Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE DATA	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
			2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
1	Indeks Good Governance	Poin	N/A	65,35	65,35	66,31	63,96	67,33	69,19	69,32	74,24	69,55	77,78
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	N/A	C	C	B	B	B	B	B	B	B	B*)
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,24	5,51	5,51	5,63	5,80	5,65	6,02	5,67	5,99	1,4-2,5	-3,69*)
4	Indeks Gini	Poin	0,35	0,37	0,37	0,37	0,34	0,37	0,35	0,37	0,31	0,343-0,35	0,31*)
5	Tingkat Kemiskinan	%	6,44	6,39	6,39	6,38	6,23	6,37	5,69	6,36	5,32	7,16-8,58	5,59
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,3	6,12	6,12	5,93	4,97	5,74	4,73	5,56	4,72	5,82-6,47	10,97
7	Indeks Infrastruktur	Poin	1,402	1,406	1,406	1,41	1,41	1,414	1,419	1,418	1,417	1,422	1,348
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	77,43	78,17	78,17	78,61	78,70	78,84	79,50	79,51	80,05	78,84-79,5	80,29
9	Indeks Kebahagiaan	Poin	N/A	77,11	77,11	77,65	78,58	78,23	79,37	79,83	80,28	80,47	71,60
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	49,47	49,26	49,26	50,01	48,79	51,01	55,1	52,01	61,03	53,01	65,30

*) Angka belum direlease oleh instansi terkait

Dari realisasi IKU tersebut di atas, bahwa dari capaian 10 IKU, terdapat 2 IKU yang capaiannya masih belum optimal, adapun penjelasan terkait dengan ketercapaian IKU tersebut, akan dijelaskan sebagaimana berikut :

1. Indeks Good Governance

Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021
N/A	65,35	65,35	66,31	63,96	67,33	69,19	69,32	74,24	69,55	77,78	70,76

Untuk memastikan berjalannya pemerintahan yang baik dan transparan sebagai prinsip pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan penilaian kinerja pemerintahan dengan mengukur indeks good governance. Tujuan menghitung indeks good governance adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang lebih akurat tentang kapasitas Pemda
2. Menjadi informasi bagi Pemda dalam mengukur daya saing dan keunggulan daerah
3. Menjadi salah satu bentuk dari pertanggung jawaban (akuntabilitas) Pemerintah Daerah terhadap stakeholders di daerah
4. Menjadi informasi bagi pihak swasta dalam membangun kerjasama dan atau kerjasama di daerah
5. Menjadi salah satu indikasi makro keberhasilan pembangunan yang dapat dikomparasi dengan daerah lainya

Berikut perkembangan Indeks Good Governance di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik

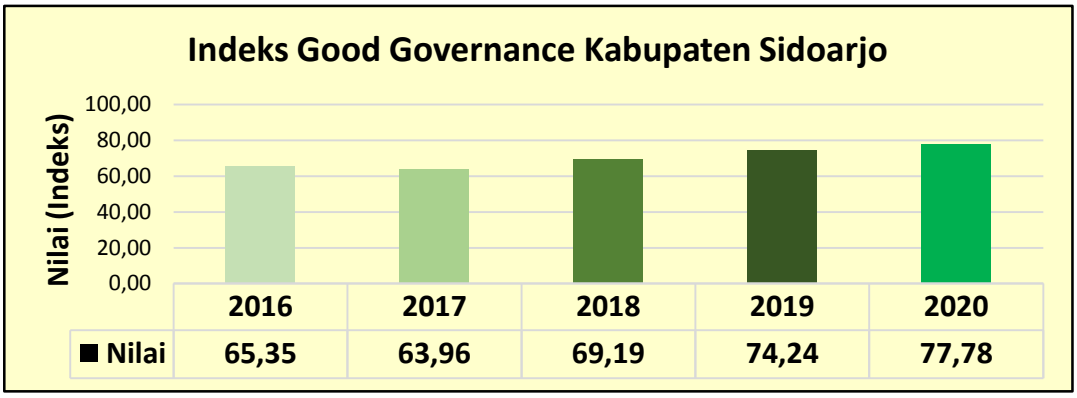

Sumber Data : Laporan Hasil Pengukuran Indeks Good Governance Bappeda

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa Indeks Good Governance Kabupaten Sidoarjo selalu meningkat dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo sudah lebih akuntabel, efektif dan efisien.

Nilai Indeks Good Governance 77.78 di tahun 2020 menggambarkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Baik. Berikut range / skala kategori dari Indeks Good Governance, sebagai berikut :

Nilai	Kategori
40.00 – 59.99	Buruk
60.00 – 79.99	Baik
80.00 – 100.00	Sangat Baik

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021
N/A	C	C	B	B	B	B	B	B	B	B*)	B

*) Angka belum direlase oleh Kementerian PAN dan RB

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mencapai *good and clean governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut delapan area perubahan, yang meliputi :

1. Organisasi
2. Tata Laksana
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
4. Peraturan Perundang – Undangan
5. Pengawasan
6. Akuntabilitas
7. Pelayanan Publik
8. Budaya Kerja Aparatur

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Berikut perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik

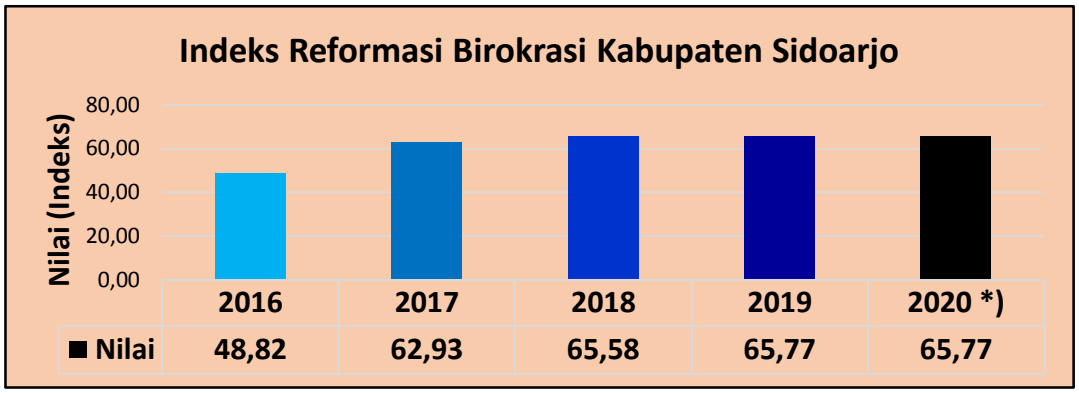

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian PAN RB

Untuk penilaian Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2020 masih dalam tahap evaluasi, sehingga belum didapatkan hasilnya, namun seiring dengan meningkatnya hasil evaluasi akuntabilitas, pelayanan publik, integritas dan indeks profesionalitas, diharapkan mampu meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Kabupaten Sidoarjo.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021
5,24	5,51	5,51	5,63	5,80	5,65	6,02	5,67	5,99	1,4-2,5	-3,69	5,85

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) suatu

daerah. Perkembangan PDRB di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ADHK 2010 mengalami fase peningkatan, dimana dipengaruhi terutama oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik

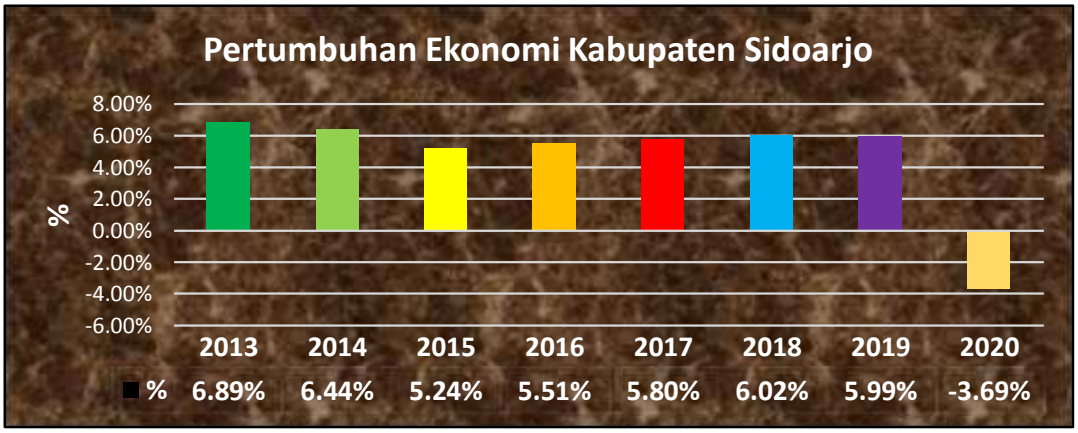

Sumber Data : Sidoarjo Dalam Angka 2020

Untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengalami penurunan yang tajam akibat dari dampak masa pandemi covid-19. Upaya pemulihan ekonomi melalui kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) dengan pemberian bunga yang kecil diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

4. Indeks GINI

Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021
0.35	0.37	0.37	0.37	0.34	0.37	0.35	0.37	0.31	0.343-0.35	0.31*)	0.37

*) Angka belum direlease oleh Badan Pusat Statistik

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Berikut perkembangan Disparitas (Indeks GINI) di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik

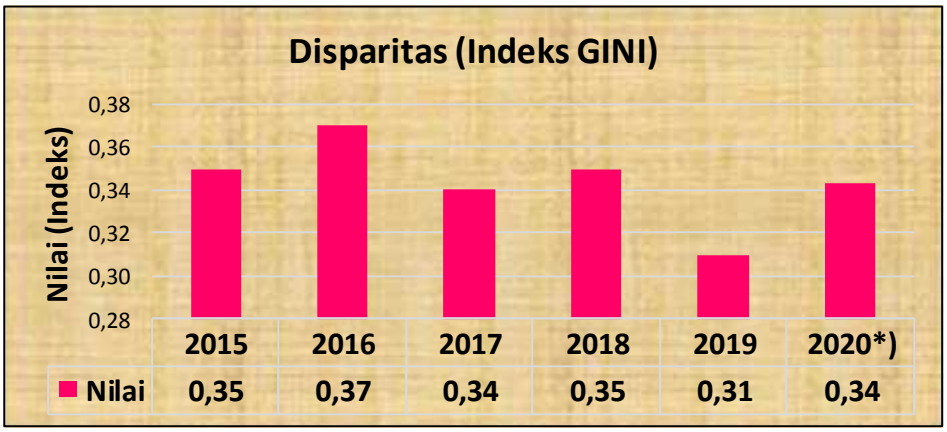

Sumber Data : Sidoarjo Dalam Angka 2020

Untuk indeks gini di tahun 2020 masih dalam proses survey oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, belum direlease ke publik, sehingga masih menggunakan angka capaian di tahun 2019.

Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1, atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, tinggi jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36.

Perkembangan Indeks GINI di Kabupaten Sidoarjo masih berada dalam kisaran rendah. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Indeks GINI Provinsi Jawa Timur yang bernilai 0.39, maka capaian Indeks GINI Kabupaten Sidoarjo masih dalam proporsi yang lebih baik.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021
77,43	78,17	78,17	78,61	78,80	78,84	79,50	79,51	80,05	78,84-79,5	80,29	80,57

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and helaty life*)
   Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
   Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :
   a. Harapan Lama Sekolah (HLS)
   b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
3. Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)
   Dimensi ini dicerminkan oleh PDRB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik

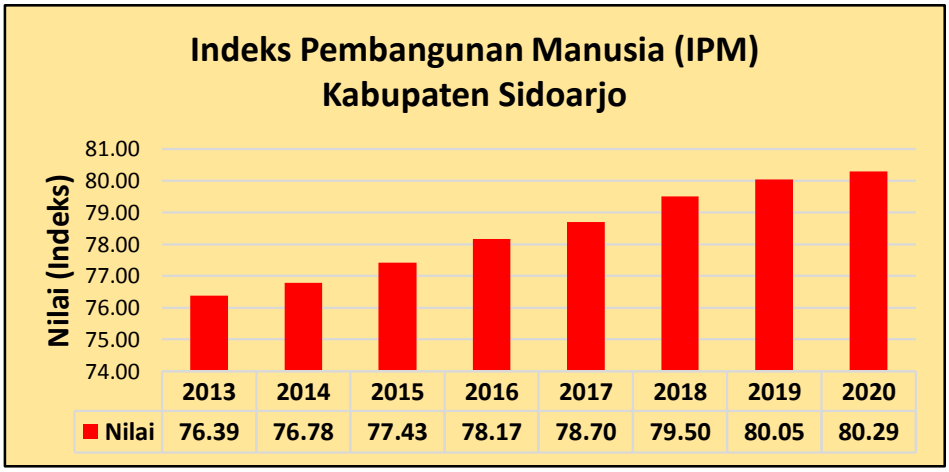

Sumber Data : Sidoarjo Dalam Angka 2020

Komponen – komponen yang mempengaruhi perhitungan IPM di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR	SKOR
- Angka Harapan Hidup (tahun)	74,04
- Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,93
- Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,50
- Pengeluaran perkapita riiel disesuaikan (Rp.000)	14.609

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2020

Untuk indeks pembangunan manusia Kabupaten Sidoarjo di tahun 2020 meningkat dari tahun 2019, dan Kabupaten Sidoarjo masuk ke dalam 10 (sepuluh) Kabupaten dengan IPM tertinggi Nasional, serta menempati peringkat pertama untuk IPM Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Besar IPM di Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sekaligus mengungguli capaian IPM Provinsi Jawa Timur.

6. Indeks Kebahagiaan

Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021
N/A	77,11	77,11	77,65	78,58	78,23	79,37	79,83	80,28	80,47	71,60	81,14

Indeks kebahagiaan (IKH) merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia. Indeks kebahagiaan (IKH) merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap :

1) kesehatan,
2) pendidikan,
3) pekerjaan,
4) pendapatan rumah tangga,
5) keharmonisan keluarga,
6) ketersediaan waktu luang,
7) hubungan sosial,
8) kondisi rumah dan aset,
9) keadaan lingkungan, dan
10) kondisi keamanan.

Indeks Kebahagiaan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan mengukur kebahagiaan dengan menggunakan formulasi perhitungan Indeks Kebahagian (IKH). Pengukuran indeks kebahagiaan (IKH) ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menginformasikan tafsiran indeks kebahagiaan (IKH) penduduk Kabupaten Sidoarjo baik secara umum maupun indeks kebahagiaan menurut kondisi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan keharmonisan keluarga.
2. Menginformasikan tafsiran indeks kebahagiaan (IKH) penduduk Kabupaten Sidoarjo menurut variabel hubungan sosial, lingkungan, ketersediaan waktu luang, kondisi rumah dan aset, serta kondisi keamanan.
3. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan indeks kebahagiaan penduduk Kabupaten Sidoarjo

Berikut perkembangan Indeks Kebahagiaan di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik

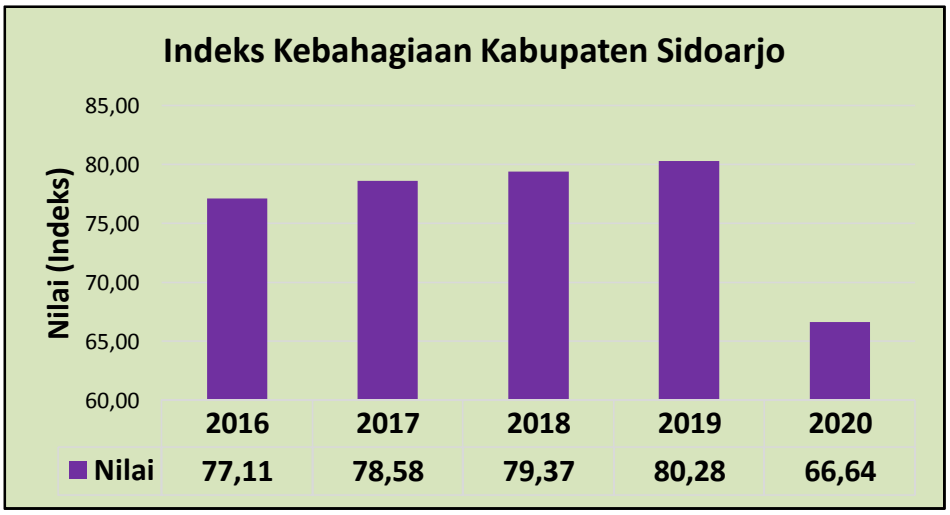

Sumber Data : Laporan Hasil Pengukuran Indeks Kebahagiaan Bappeda

Indeks kebahagiaan Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 adalah 71.60, indeks tersebut di tahun 2020 memang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang merubah kebiasaan hidup dari sebelumnya atau Adaptasi Kebiasaan Baru (ABK).

7. Indeks Infrastruktur

Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021
1,402	1,406	1,406	1,41	1,41	1,414	1,419	1,418	1,417	1,422	1,348	1,426

Indeks pengukuran infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, bendungan, pasar, rusunawa dan jalan kereta api.

Manfaat dari pengukuran indeks infrastruktur ini adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan, kelayakan, dan pelayanan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Berikut perkembangan Indeks Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik

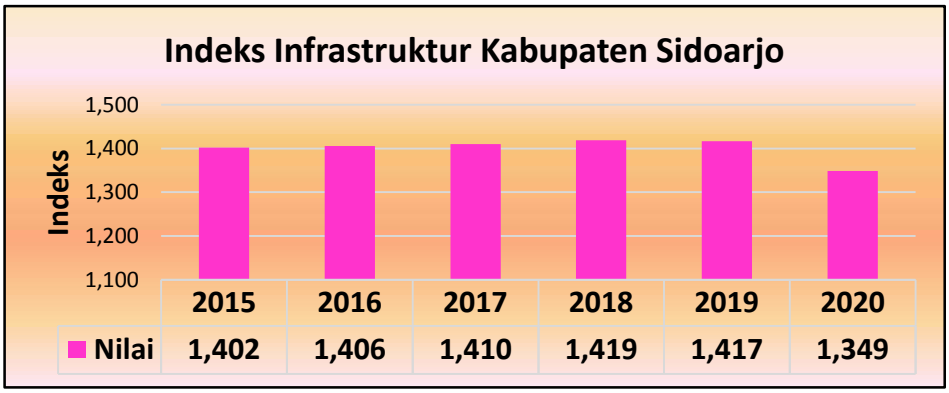

Sumber Data : Laporan Hasil Pengukuran Indeks Infrastruktur Bappeda

Untuk indeks infrastruktur di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan anggaran untuk infrastruktur dialokasikan untuk percepatan penanganan covid-19. Peningkatan indeks infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo adalah karena adanya peningkatan pembangunan infrastruktur, yang meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pengelolaan sampah, transportasi, perhubungan, telekomunikasi dan informatika, jalan, jembatan, pengendalian banjir, rusunawa, dan gedung terpadu pemerintahan.

8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021
49,47	49,26	49,26	50,01	48,79	51,01	55,10	52,01	61,03	53,01	65,30	54,26

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, indeks kualitas lingkungan hidup dapat membantu dalam penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan sebagaimana diindikasikan oleh angka indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kesadaran masyarakat awam sehingga indeks dapat menjadi alat penggerak bagi keterlibatan publik.

Capaian indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sidoarjo selalu meningkat setiap tahunnya, yang mencerminkan bahwa kualitas dan penataan lingkungan hidup di Kabupaten Sidoarjo sudah semakin terkendali.

Adapun perkembangan nilai/skor IKLH setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik

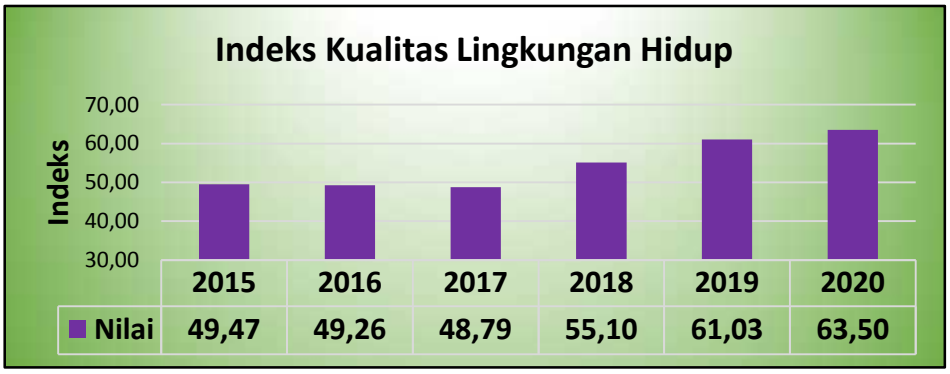

Sumber Data : Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DLHK

Komponen – komponen yang mempengaruhi perhitungan IKLH di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Indikator IKLH Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR	SKOR
- Indeks Kualitas Air	51,52
- Indeks Kualitas Udara	85,14
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi	52,26

Sumber : Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DLHK

9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021
6,3	6,12	6,12	5,93	4,97	5,74	4,73	5,56	4,72	5,82-6,47	10,97	5,19

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya. Berikut grafik perkembangan tingkat pengangguran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

Grafik

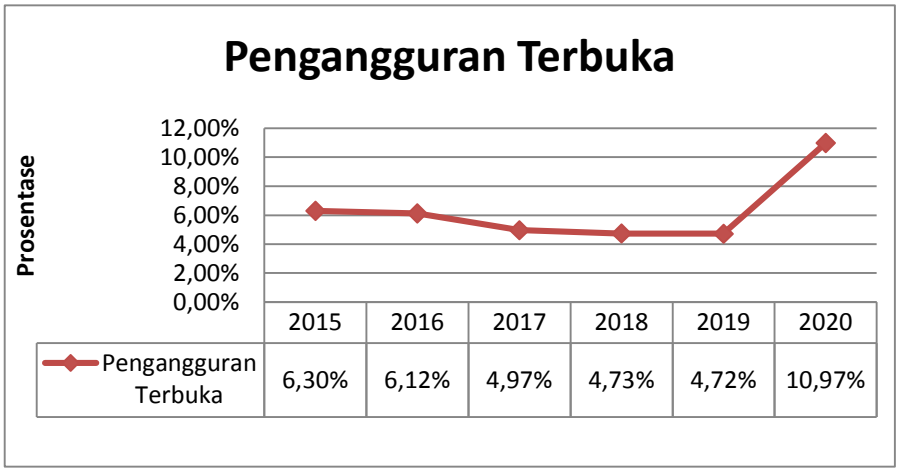

Sumber Data : Sidoarjo Dalam Angka 2020

Mencermati dari grafik di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka menunjukkan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 sudah menunjukkan penurunan, namun meningkaat secara drastis di tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Namun telah dilaksanakan upaya pemulihan ekonomi masa pandemi covid-19 untuk mengatasi makin banyaknya perusahaan yang memutuskan hubungan kerja karyawannya.

Upaya – upaya yang dilakukan untuk menekan angka pengangguran terbuka, antara lain :

1. Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi baik yang bersertifikasi maupun yang berorientasi pada membuka lapangan usaha secara mandiri.
2. Menyelenggarakan Bursa Kerja, baik Bursa Kerja Terbuka maupun Bursa Kerja Khusus.
3. Menjalin hubungan industrial yang kondusif guna mengurangi angka pemutusan hubungan kerja, dengan membuat perjanjian kepada perusahaan yang mengalami kesulitan dalam membayar gaji karyawannya, untuk kembali memperkerjakan karyawan yang di-PHK apabila kondisi keuangan perusahaan sudah membaik.

10. Tingkat Kemiskinan

Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021
6,44	6,39	6,39	6,38	6,23	6,37	5,69	6,36	5,32	7,16-8,58	5,59	6,34

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Kabupaten Sidoarjo memiliki trend penurunan tingkat kemiskinan setiap tahunnya, persentase kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo juga masih di bawah persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Meskipun terjadi peningkatan angka kemiskinan di tahun 2020, namun kenaikannya tidak terlalu besar, meskipun ada masa pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi seperti pemberian bantuan sosial mampu menekan resiko tingginya angka kemiskinan pada masa pandemi covid.

Dari total penduduk Sidoarjo Tahun 2020 sebesar 2.033.764 jiwa, sebanyak 5,59 persen nya merupakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (miskin/ sangat miskin).

Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo terlihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik
Tingkat Kemiskinan

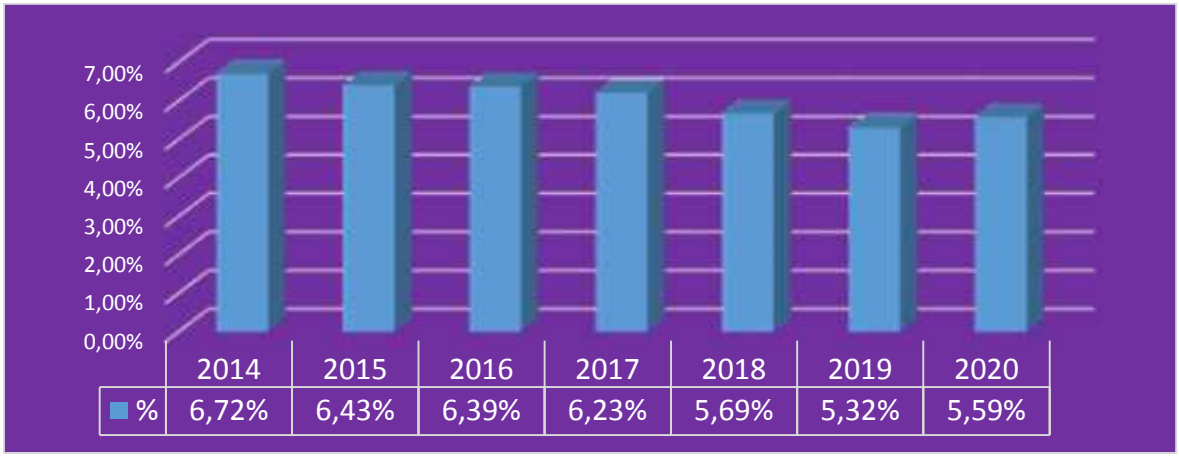

Sumber Data : Sidoarjo Dalam Angka 2020

B. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PER URUSAN PEMERINTAHAN

1. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Pemerintahan Daerah. Urusan Wajib yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2020, yaitu terdiri dari :

Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata	Angka Harapan Lama Sekolah	14,25	14,34	100,63	14,35	14,75	102,79	14,45	14,93	103,32
	Rata - Rata Lama Sekolah	10,75	10,23	95,16	10,75	10,24	95,25	10,80	10,50	97,22

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Sumber Data: BPS Provinsi Jawa Timur

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 14,45, maka capaian kinerja tahun 2020 sebesar 14,93 artinya telah mencapai target. Dan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 14,75, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 14,55, maka progres capaian kinerja tahun 2020 sudah melampaui target, hal ini diupayakan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara umum dan secara khusus kepada pemangku kepentingan pendidikan termasuk kepada lembaga sekolah, madrasah dan lembaga-lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan (pendidikan informal) untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan. Dengan realisasi angka 14,93 tahun tersebut dapat diartikan bahwa anak-anak usia 7 tahun di Kabupaten Sidoarjo memiliki peluang untuk bisa menamatkan pendidikan mereka hingga lulus Diploma II.

2. Rata – Rata Lama Sekolah

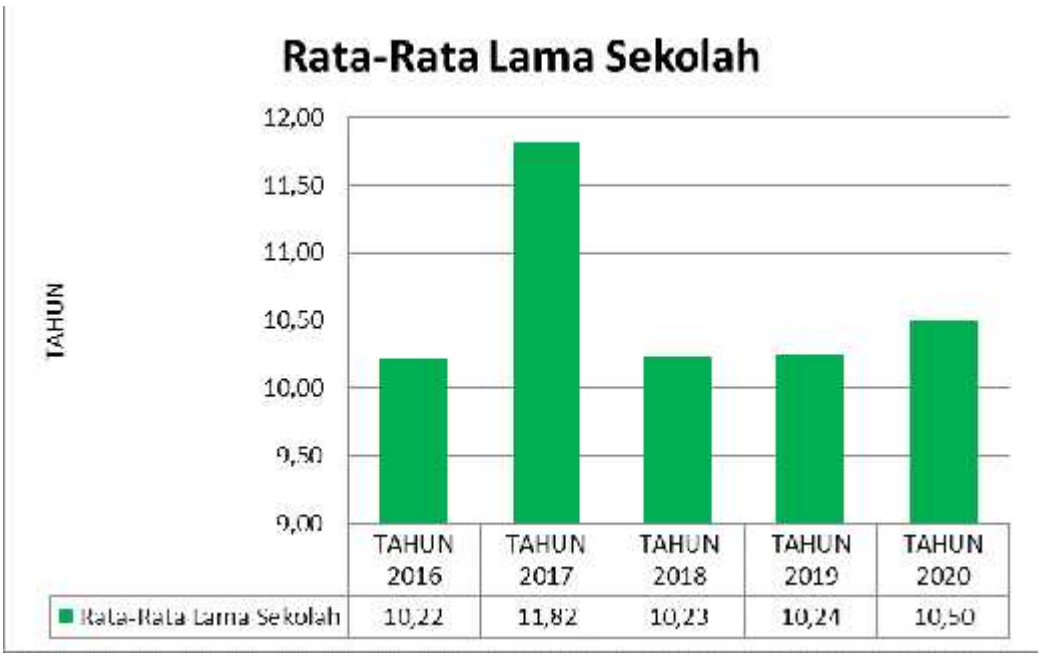

Sumber Data: BPS Provinsi Jawa Timur

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 sudah pada arah mencapai target yang ditetapkan. Dan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 97,22% dari target, hal ini diupayakan dengan memberikan aksesibilitas yang seluas-luasnya tentang layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat tentang pembiayaan sekolah gratis setingkat Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun untuk Sekolah Negeri. Dengan realisasi angka 10,50 tahun tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo rata-rata usia 25 tahun keatas sebagian besar telah mengenyam pendidikan kelas X (SMA Kelas I) hingga kelas XI (SMA Kelas II).

a. Realisasi Kinerja Sasaran Urusan Pendidikan

Sampai denganTahun 2020 kinerja tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan Dasar

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALIS ASI	%	TARGET	REALI SASI	%
Rata-Rata Nilai UN SD/MI	8.30	8.39	101.08	8.35	8.57	102.63	*)	*)	*)
Rata-Rata Nilai UN SMP/MTs	6.87	5.16	75.10	6.87	5.64	82.10	*)	*)	*)
Persentase SD yang terakreditasi A	70.17%	74.21%	105.76	72.11%	73.56%	102.01	73,41%	73,64%	100,31
Persentase SMP yang terakreditasi A	65.63%	66.67%	101.58	70.09%	64.91%	92.61	73.66%	66,67%	90,51
Persentase Guru/Pendidik yang telah bersertifikasi	47.75%	54.83%	114.83%	47.85%	55.85%	116.72%	47,90%	54,55%	113,88
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	92.50%	92.80%	100.32	92.67%	93.47%	100.86	92,89%	95,72%	103,05

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96.54%	98.35%	101.87	96.98%	99.21%	102.30	97,43%	99,29%	101,91
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	78.99%	84.03%	106.38	79.34%	84.15%	106.06	79,71%	84,42%	105,91
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	107.93%	107.97 %	100.04	108.26%	108.98%	100.67	108,64%	109,96 %	101,21
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	98.97%	99.01%	100.04	99.21%	99.28%	100.07	99,45%	99,46%	100,01

Keterangan :

*) : Berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19), untuk Ujian Nasional Tingkat SD/MI, SMP/MTs tidak dilaksanakan sehingga target dan realisasi tidak diukur.

Sumber Data : Laporan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI dan SMP/MTs Tahun Ajaran 2018/2019 Provinsi Jawa Timur

1. **Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi**

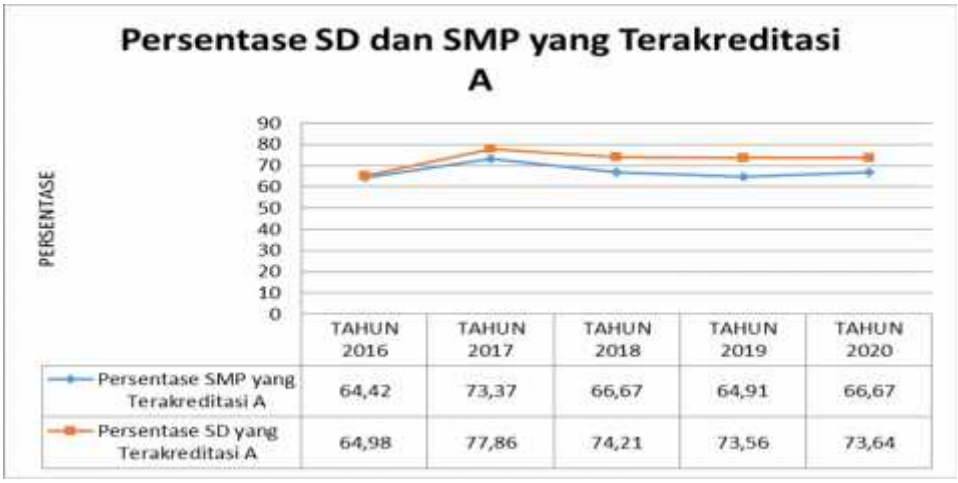

	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
Persentase SMP yang Terakreditasi A	64,42	73,37	66,67	64,91	66,67
Persentase SD yang Terakreditasi A	64,98	77,86	74,21	73,56	73,64

Sumber Data: dapo.kemdikbud.go.id

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 yang ditetapkan untuk Persentase SD yang terakreditasi A sebesar 73,41% terealisasi sebesar 73,64%, dengan angka ketercapaian 100,31%. Untuk SMP target yang ditetapkan sebesar 73,66% terealisasi sebesar 66,67% dengan angka ketercapaian 90,51% perhitungan realisasi tersebut merupakan perhitungan dari Sekolah SMP Negeri dan SMP Swasta, untuk 44 Sekolah SMP Negeri di kabupaten sidoarjo sudah terakreditasi A, sedangkan untuk lembaga swasta belum seluruhnya terakreditasi A dikarenakan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan akreditasi dan aadanya pendirian sekolah SMP swasta baru. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan.

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan persentase SD dan SMP yang terakreditasi A yaitu: Peningkatan pemenuhan standar nasional pendidikan berupa :

1. Peningkatan sarana prasarana gedung sekolah/ruang kelas dan ruang penunjang lainnya.
2. Peningkatan standar proses/standar kelulusan berupa kegiatan-kegiatan penunjang evaluasi latihan Ujian Sekolah berupa Try Out.
3. Peningkatan standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan memberikan tambahan kesejahteraan untuk Guru Tidak Tetap dan

Pegawai Tidak Tetap dan memberikan bantuan kesejahteraan kepada lembaga swasta untuk guru swasta.

2. Guru/pendidik yang telah bersertifikasi

Sumber Data: dapo.kemdikbud.go.id

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 47,90, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target sebesar 54,55. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100,86%, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga pendidik/Guru berstatus PNS pensiun sebanyak 399 orang.
2. CPNS baru sejumlah 499 orang, tidak secara otomatis mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).
3. Alokasi peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan ditentukan oleh kementerian pendidikan.
4. Persyaratan peserta PPG berdasarkan dari hasil kelulusan uji kompetensi guru dan kuota.

3. **Angka Partisipasi Kasar (APK)**

	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
APK PAUD	92,18	92,78	92,80	93,47	95,72
APK SD/MI	107,12	107,71	107,97	108,98	109,96
APK SMP/MTs	98,51	98,85	99,01	99,28	99,46

Sumber Data: Dapodik dan Data Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 APK PAUD sebesar 92,89, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target 95,72 dan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 93,47, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan. Sedang untuk tingkat SD/Mi apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 APK SD/ Mi sebesar 108,64 , maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target 109,96 dan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 108,98, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan. Sedang untuk tingkat SMP/Mts apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 APK SMP/Mts sebesar 99,45 , maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target 99,46 dan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 99,28 maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan.

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

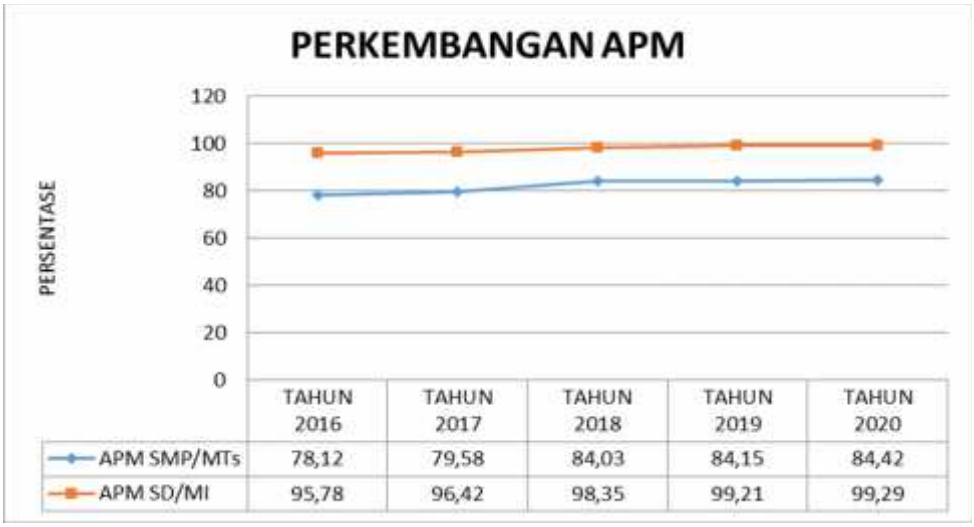

	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
APM SMP/MTs	78,12	79,58	84,03	84,15	84,42
APM SD/MI	95,78	96,42	98,35	99,21	99,29

Sumber Data: Dapodik dan Data Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 tingkat SD/ MI sebesar 97,43 maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target sebesar 99,28 dan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 99,21, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan. Sedang untuk tingkat SMP/Mts target 2020 sebesar 79,71 maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target sebesar 88,42 dan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 84,15 maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan adalah alat atau sarana untuk mencapai Tujuan Sasaran, Untuk mencapai sasaran Urusan Pendikan, yaitu sasaran Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan Dasar dengan indikator seperti tersebut diatas didukung dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran sebesar Rp.6.468.939.125,- dan terealisasi sebesar Rp.4.670.206.486,- atau 72,19%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	PERSENTASE
Rata - Rata Nilai UN SD/MI	*)	*)	*)
APM SD/MI	97,43%	99,29%	101,91
APK SD/MI	108,64%	109,96%	101,21
Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SD	1: 20	1 :20	100
Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa untuk jenjang SD	1 : 28	1 : 28	100
Persentase bangunan ruang kelas SD kategori baik.	95,25 %	97,54%	100,40

Keterangan :

- *) : Berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19), untuk Ujian Nasional Tingkat SD/MI, SMP/MTs tidak dilaksanakan sehingga target dan realisasi tidak diukur.
- Sesuai Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, pasal 17 dinyatakan rasio minimal jumlah pendidik terhadap peserta didik untuk jenjang SD 1:20 sedangkan realisasi di tahun 2020 1:20, hal tersebut menunjukkan bahwa layanan guru terhadap siswa secara umum tercapai.

Program tersebut didukung oleh 7 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Fasilitasi implementasi kurikulum SD	a. Jumlah guru ABK yang difasilitasi b. Jumlah pendidik yang difasilitasi	a. 0 Guru b. 400 Guru	a. 0 Guru b. 400 Guru	a. 0 b. 100	22.475.050	151.984.595	68,32
Penyelenggaraan evaluasi sekolah pendidikan tingkat SD/MI	a. Sistem Informasi PPDB yang dikelola b. Jumlah peserta pelatihan penyusunan naskah evaluasi c. Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Sekolah tingkat SD/MI d. Jumlah Siswa Tingkat VI Yang mengikuti Try Out SD/MI	a. 1 Sistem b. 1200 Orang c. 0 Siswa d. 0 Siswa	a. 1 Sistem b. 1065 Orang c. 0 Siswa d. 0 Siswa	a. 100 b. 88,75 c. 0 d. 0	886.072.150	511.007.000	57,67
Pembinaan dan penyelenggaraan teknis SD	a. Jumlah lomba yang diikuti b. Jumlah peserta yang	a. 3 Lomba b. 1500 Orang	a. 3 Lomba b. 1449 Orang	a. 100,00 b. 96,60 c. 100,00	433.887.300	243.171.991	56,04

	mengikuti lomba c. Jumlah siswa SDN berprestasi yang menerima beasiswa	c. 10 Siswa	c. 10 Siswa				
Pengembangan sarana dan parasarana Bidang Pendidikan (DAK)	a. Jumlah sekolah yang mendapat bantuan DAK b. Biaya Operasional Pendampingan	a. 8 Sekolah b. 12 Bulan	a. 8 Sekolah b. 12 Bulan	a. 100 b. 100	3.571.111.000	3.570.023.400	99,97
Pengembangan sarana dan parasarana Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (Non DAK)	a. Jenis sarana prasarana SD yang diadakan b. Jumlah sarana prasarana SD yang diadakan c. Jumlah dokumen prioritas pengembangan SD yang disusun d. Jumlah lembaga (kondisi ruang kelas) yang direhab e. Jumlah lembaga (kondisi ruang kelas) yang dibangun	a. 1 Jenis b. 1 Jenis c. 0 Dokumen d. 0 lembaga e. 0 lembaga	a. 1 Jenis b. 1 Jenis c. 0 Dokumen d. 0 lembaga e. 0 lembaga	a. 100 b. 100 c. 0 d. 0 e. 0	1.208.349.000	168.585.000	13,95
Penyelenggaraan akreditasi pendidikan Sekolah Dasar	a. Jumlah satuan pendidikan Dasar yang terakreditasi b. Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang dimonev	a. 20 sekolah b. 20 sekolah	a. 20 sekolah b. 20 sekolah	a. 100 b. 100	118.624.000	21.240.500	17,91
Penyelenggaraan pelayanan perijinan bidang pendidikan Sekolah Dasar	a. Jumlah lembaga pendidikan Sekolah Dasar yang dilayani perijinannya	a. 30 lembaga	a. 30 lembaga	a. 100	7.785.625	4.194.000	53,87

<u>Permasalahan</u> :

1. Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan evaluasi sekolah pendidikan tingkat SD/MI sebesar 57,67% dikarenakan kegiatan Ujian Nasional dibatalkan berdasarkan SE Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 dan penyerapan anggaran hanya untuk kegiatan penyusunan kisi-kisi soal Ulangan Tengah Semester dan Ulangan Akhir Semester.
2. Kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan teknis mengikuti jadwal Propinsi dan Pusat yang sebelumnya diberitahukan ditunda pelaksanaannya diakibatkan adanya pandemi Corona Virus Desease (Covid-19). Propinsi dan Pusat tidak menyelenggarakan kegiatan lomba yang berjenjang sehingga Kabupaten menyesuaikan.
3. Untuk kegiatan fasilitasi implementasi kurikulum SD pada sub kegiatan pengembangan sekolah model hanya dilaksanakan di dalam ruangan tidak

melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah model diakibatkan adanya pandemi Corona Virus Desease (Covid).

4. Kegiatan Penyelenggaraan akreditasi pendidikan sekolah Dasar mengalami penundaan sehubungan dengan Penyebaran Corona Virus Desease (Covid).
5. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan (Non DAK) yang berupa kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah dianggarkan setelah Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) sehingga pelaksanaan terbatas waktunya.

Solusi :

1. Kegiatan dilaksanakan secara Daring atau melalui teleconference
2. Untuk kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah yang belum bisa dilaksanakan di tahun 2020 akan kami anggarkan kembali di tahun 2021, sehingga target dapat tercapai dengan maksimal.

2. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran sebesar Rp.9.370.693.080,- dan terealisasi sebesar Rp.8.887.732.468,- atau 94,85%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	PERSENTASE
Rata - Rata Nilai UN SMP/MTs	*)	*)	*)
APM SMP/MTs	79,71%	84,42%	105,91
APK SMP/MTs	99,45%	99,46%	100,01
Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SMP	1: 20	1 : 19	105,26
Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa untuk jenjang SMP	1 : 32	1 : 29	110,34
Persentase bangunan ruang kelas SMP kategori baik.	95,39%	94,08%	98,63

Keterangan :

- *) : Berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19), untuk Ujian Nasional Tingkat SD/MI, SMP/MTs tidak dilaksanakan sehingga target dan realisasi tidak diukur.
- Sesuai Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, pasal 17 dinyatakan rasio minimal jumlah pendidik terhadap peserta didik untuk jenjang SMP 1:20 sedangkan realisasi di tahun 2020 1:19, hal tersebut menunjukkan bahwa layanan guru terhadap siswa secara umum tercapai.

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Fasilitasi implementasi kurikulum SMP	a. Jumlah guru ABK yang difasilitasi b. Jumlah pendidik yang difasilitasi	a. 0 Guru b. 200 Guru	a. 0 Guru b. 200 Guru	a. 0,00 b. 100	155.750.000	124.100.000	79,68
Penyelenggaraan evaluasi sekolah pendidikan tingkat SMP/MTs	a. Sistem Informasi PPDB yang dikelola b. Jumlah peserta pelatihan penyusunan naskah evaluasi c. Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Sekolah tingkat SMP/MTs d. Jumlah Siswa Tingkat IX Yang mengikuti Try Out SMP/MTs	a. 1 Sistem b. 800 Orang c. 0 Siswa d. 0 Siswa	a. 1 Sistem b. 800 Orang c. 0 Siswa d. 0 Siswa	a. 100 b. 100 c. 0 d. 0	758.587.221.251	587.221.251	77,44
Pembinaan dan penyelenggaraan teknis SMP	a. Jumlah lomba yang diikuti b. Jumlah peserta yang mengikuti lomba c. Jumlah siswa SMPN berprestasi yang menerima beasiswa	a. 3 Lomba b. 1500 Orang c. 0 Siswa	a. 3 Lomba b. 885 Orang c. 0 Siswa	a. 100 b. 59,00 c. 0	176.650.000	121.815.000	68,96
Pendampingan penyelenggaraan sarana prasarana sekolah	a. Jumlah lembaga yang dibina b. Jumlah lembaga yang memenuhi standarisasi	a. 44 Lembaga b. 44 Lembaga	a. 44 Lembaga b. 44 Lembaga	a. 100 b. 100	69.156.900	58.671.217	84,81
Pengembangan sarana dan parasarana Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Non DAK)	a. Jenis sarana prasarana SMP yang diadakan b. Jumlah dokumen prioritas pengembangan SMP yang disusun c. Jumlah sarana prasarana SMP yang diadakan d. Jumlah lembaga (kondisi ruang kelas) yang direhab e. Jumlah lembaga (kondisi ruang kelas) yang dibangun	a. 2 Jenis b. 0 Dokumen c. 6001 unit d. 0 lembaga e. 0 lembaga	a. 2 Jenis b. 0 Dokumen c. 6001 unit d. 0 lembaga e. 0 lembaga	a. 100 b. 0 c. 100 d. 0 e. 0	6.209.880.000	6.006.697.000	96,73

<u>Permasalahan</u> :

1. Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan evaluasi sekolah pendidikan tingkat SMP/MTs sebesar 77,44% dikarenakan kegiatan Ujian Nasional dibatalkan berdasarkan SE Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 dan penyerapan anggaran

hanya untuk kegiatan penyusunan kisi-kisi soal Ulangan Tengah Semester dan Ulangan Akhir Semester.

2. Kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan teknis mengikuti jadwal Propinsi dan Pusat yang sebelumnya diberitahukan ditunda pelaksanaannya diakibatkan adanya pandemi Corona Virus Desease (Covid-19). Propinsi dan Pusat tidak menyelenggarakan kegiatan lomba yang berjenjang sehingga Kabupaten menyesuaikan.
3. Untuk kegiatan fasilitasi implementasi kurikulum SMP hanya dilaksanakan secara daring.

Solusi :

Kegiatan dilaksanakan secara Daring atau melalui teleconference

3. Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dengan anggaran sebesar Rp.1.828.822.150,- dan terealisasi sebesar Rp.1.484.949.475,- atau 81,20%, Dengan indikator kinerja yaitu:

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	PERSENTASE
APK PAUD	92,89%	95,72%	103,05
Persentase PAUD yang telah terakreditasi	35%	38,73%	110,66
Persentase pendidikan non formal yang memenuhi standart	30%	6,67%	22,23

Permasalahan :

Kegiatan akreditasi di tahun 2020 ditunda pelaksanaannya dikarenakan adanya Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19).

Solusi :

Tahun 2020 sebanyak 314 lembaga TK sudah upload dokumen tetapi belum bisa divisitasi.

Program tersebut didukung oleh 7 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pembinaan penyelenggaraan pendidikan masyarakat	a. Jumlah lembaga pendidikan masyarakat yang dibina	a. 45 Lembaga	a. 24 Lembaga	a. 53,33	402.255.900	279.085.900	69,38

	b. Jumlah tenga pendidik lembaga masyarakat yang dibina	b. 100 orang	b. 81 orang	b. 81,00			
Pembinaan penyelenggaraan PAUD	a. Jumlah PAUD yang difasilitasi akreditasinya b. Jumlah tenaga pendidik PAUD yang dibina c. Jumlah Lomba yang diselenggarakan	a. 0 Lembaga b. 150 Tenaga Pendidik c. 4 Lomba	a. 0 Lembaga b. 150 Tenaga Pendidik c. 4 Lomba	a. 0 b. 100 c. 100	79.257.000	57.660.800	72,75
Penyelenggaraan perizinan lembaga PAUD	a. Jumlah lembaga PAUD yang diproses perizinannya	a. 150 Lembaga	a. 150 Lembaga	a. 100	28.031.100	23.947.200	85,43
Pembinaan penyelenggaraan TK	a. Jumlah TK yang difasilitasi akreditasinya b. Jumlah tenaga pendidik TK yang dibina c. Jumlah Lomba yang diselenggarakan	a. 0 Lembaga b. 0 Tenaga pendidik c. 0 Lomba	a. 0 Lembaga b. 0 Tenaga pendidik c. 0 Lomba	a. 0 b. 0 c. 0	203.341.300	170.641.678	83,66
Penyelenggaraan perizinan lembaga TK	a. Jumlah lembaga TK yang diproses perizinannya	a. 200 Lembaga	a. 200 Lembaga	a. 00,00%	21.623.000	19.403.000	89,73
Penyelenggaraan dan Operasional UPT SKB	a. Biaya Operasional SKB b. Jumlah tenaga terampil yang dibina c. Jumlah mitra program yang bekerjasama	a. 12 Bulan b. 500 Orang c. 4 Program	a. 12 Bulan b. 500 Orang c. 4 Program	a. 100 b. 100 c. 100	905.076.060	752.568.107	83,15
Penyelenggaraan perijinan lembaga pendidikan masyarakat	a. Jumlah lembaga pendidikan masyarakat yang diproses perijinannya	a. 42 Lembaga	a. 42 Lembaga	a. 100	9.985.790	9.535.790	95.49

4.Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran sebesar Rp.136.111.121.230,- dan terealisasi sebesar Rp.131.885.194.065,- atau 96,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	PERSENTASE
Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4	97,87%	98,04%	100,17
Persentase guru/tenaga pendidik yang berkualifikasi ahli	47,90%	54,55%	113,88

Permasalahan :

1. Di tahun 2020 tenaga pendidik PNS yang pension sebanyak 399 orang, tergantikan dengan CPNS tahun 2019 sebanyak 499 orang dan tidak secara langsung dapat mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), alokasi peserta PPG ditentukan oleh kementerian pendidikan dan kebudayan republik indonesia, dan persyaratan peserta PPG berdasarkan dari hasil kompetensi guru dan kuota. Sehingga tenaga pendidik yang bersertifikasi berkurang.

Solusi :

Di tahun 2021 berusaha memenuhi target ketercapaian tenaga pendidik yang bersertifikasi dengan memberikan informasi terkait pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penyelenggaraan administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD	a. Jumlah pendidik yang difasilitasi berdasarkan kompetensinya b. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan SD yang terlayani proses administrasinya c. Jumlah GTT dan PTT SD yang diberikan Honor	a. 200 Pendidik b. 400 Orang c. 2852 Orang	a. 200 Pendidik b. 400 Orang c. 2820 Orang	a. 100 b. 100 c. 98,88	121.811.385.280	118.328.883.821	97,14
Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD	a. Jumlah Dokumen analisa kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan SD yang disusun b. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan SD yang dimonev	a. 0 Dokumen b. 0 Orang	a. 0 Dokumen b. 0 Orang	a. 0 b. 0	4.050.000	4.050.000	100

Pembinaan dan sertifikasi tenaga pendidik	a. Jumlah guru yang diberi penghargaan b. Jumlah guru yang bersertifikat pendidik	a. 0 Orang b. 1200 Orang	a. 0 Orang b. 675 Orang	a. 0 b. 56,25	147.678.250	65.642.250	44,45
Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP	a. Jumlah Dokumen analisa kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan SMP yang disusun b. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan SMP yang dimonev c. Jumlah tenaga pendidik SMPN yang menerima beasiswa pascasarjana	a. 0 Dokumen b. 0 Orang c. 0 Orang	a. 0 Dokumen b. 0 Orang c. 0 Orang	a. 0 b. 0 c. 0	1.860.000	1.621.200	87,16
Penyelenggaraan administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP	a. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan SMP yang terlayani proses administrasinya b. Jumlah pendidik yang difasilitasi berdasarkan kompetensinya c. Jumlah GTT dan PTT SMP yang diberikan Honor	a. 0 Orang b. 0 Orang c. 320 GTT dan PTT	a. 0 Orang b. 0 Orang c. 310 GTT dan PTT	a. 0 b. 0 c. 96,88	14.146.147.000	13.484.996.794	95,33

5. Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp.620.087.680,- dan terealisasi sebesar Rp.583.000.000,- atau 94,02%, Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	PERSENTASE
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pengelolaan dan pelayanan pendidikan	97	92,24	94,85%

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pengembangan penyelenggaraan pendidikan	a. Jumlah sekolah sulit terjangkau yang diintervensi program	a. 11 Sekolah	a. 11 Sekolah	a. 100	571.000.000	535.800.000	93,84
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah jaringan IT dan ICT satuan pendidikan yang terhubungkan	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	a. 0	49.087.680	47.200.000	96,15

6. Program Perluasan dan Aksesbilitas Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp.84.141.293.020,- dan terealisasi sebesar Rp.80.640.395.747,- atau 95,84%.

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penyediaan Dana BOSDA SD dan SMP Negeri	a. Jumlah Lembaga SDN yang dapat BOSDA b. Jumlah Lembaga SMPN yang dapat BOSDA	a. 466 SDN b. 46 SMPN	a. 466 SDN b. 46 SMPN	a. 100 b. 100	81.494.744.000	78.510.378.925	96,34
Pengelolaan operasioanl UPTD Pelayanan Anak Tuna Rungu, Tuna Wicara dan Autis Kab. Sidoarjo	a. Biaya Operasional Kantor	a. 12 Bulan	a. 12 Bulan	a. 100	2.222.784.100	1.867.612.722	84,02
Pelatihan Manajemen dan peningkatan kompetensi bagi siswa dan guru	a. Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang difasilitasi	a. 300 Pendidik	a. 300 Pendidik	a. 100	59.927.600	59.927.600	100
Sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan BOS, BKSM dan BPP	a. Jumlah satuan pendidikan yang mengikuti sosialisasi BOS, BKSM b. Jumlah tim Manajemen BOS Sekolah yang dibina c. Jumlah bendahara BOS dan BKSM yang dibina	a. 1500 Lembaga b. 0 Orang c. 800 Orang	a. 1212 Lembaga b. 0 Orang c. 542 Orang	a. 80,80 b. 0 c. 67,75	363.837.320	202.476.500	55,65

Permasalahan :

Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pelaksanaan BOS diselenggarakan secara daring menunjuk pada Surat Edaran Bupati Nomor : 443/2434/438.5.2/2020 tanggal 31 Maret 2020 bahwa kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat banyak untuk sementara tidak diperbolehkan dikarenakan Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19).

Solusi :

Kegiatan diselenggarakan secara Daring atau melalui Zoom Meeting.

7. **Program Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Regional (BOSREG)** dengan anggaran sebesar Rp.175.779.347.615,- dan terealisasi sebesar Rp.167.763.845.774,- atau 95,44%.

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOSREG)	a. Jumlah Lembaga SDN yang dapat BOSDA b. Jumlah Lembaga SMPN yang dapat BOSDA	a. 466 SDN b. 46 SMPN	a. 466 SDN b. 46 SMPN	a. 100 b. 100	175.779.347.615	167.763.845.774	95,44

Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Realisasi Kinerja Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	AHH (Angka Harapan Hidup)	-	73,82	100	-	73,98	100	73,82	74,04	100,29

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 sudah mencapai target, hal ini menunjukkan bahwa program-program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dikatakan cukup berhasil. Perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan dapat dirasakan hasilnya, sehingga berdampak pada semakin naiknya Angka Harapan Hidup (AHH) dari tahun ke tahun masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 juga mengalami peningkatan. Kondisi ini mencerminkan tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Sidoarjo ke arah yang lebih baik.

Perbandingan capaian AHH Provinsi Jawa Timur dan capaian AHH Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada grafik 1 dibawah ini.

Grafik

Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo dan Propinsi Jawa Timur

Tahun 2016 - 2020

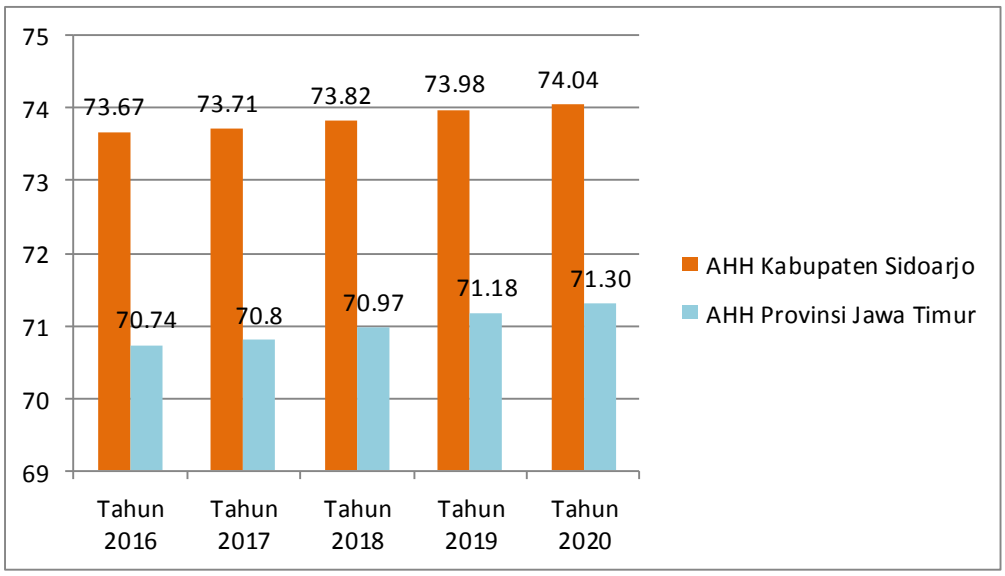

Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik diatas menjelaskan bahwa jika dibanding dengan AHH Provinsi Jawa Timur, AHH Kabupaten Sidoarjo jauh lebih baik. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo.

b. Realisasi Kinerja Sasaran

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Persentase Keluarga Sehat (KS)

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
Persentase Keluarga Sehat (KS)	16	17	106,25	17	22	129,41	20	23,67	118,35

Grafik

Persentase Keluarga Sehat (KS) Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2016 – 2020

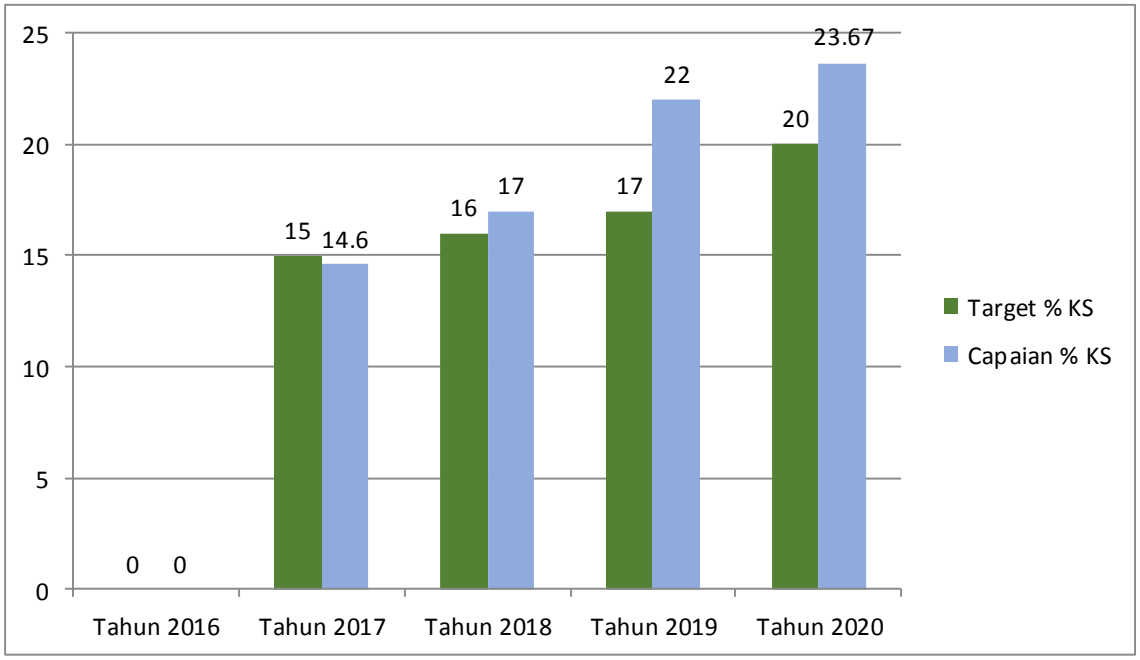

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja dengan indikator Persentase Keluarga Sehat (KS) tahun 2020 sudah mencapai target, hal ini dikarenakan adanya keberhasilan dan kesinambungan program-program lainnya, juga karena adanya program KOPIPU (Konseling Dari Pintu Ke Pintu), yang terintegrasi dengan program KS, yang akhirnya ikut mendongkrak kunjungan ke keluarga rawan.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 kunjungan difokuskan kepada peningkatan status kesehatan keluarga dengan melalui kunjungan intervensi lanjut.

Apabila dibandingkan dengan capaian nasional (18%) dan provinsi (18%), maka capaian KS Kabupaten Sidoarjo (23,67%) diatas capaian nasional dan provinsi. Ini dikarenakan :

- Adanya peran/ kerjasama lintas sektor, dalam hal ini organisasi masyarakat dan kader
- Dukungan anggaran untuk kunjungan intervensi.

Permasalahan :

1. Permasalahan masih sama dengan permasalahan di tahun 2019, yaitu masalah di aplikasi PIS PK milik pusdatin. Bahwa aplikasi sering eror/ *trouble,* sehingga proses entri terhambat.
2. Karena adanya pergantian penanggungjawab program tanpa orientasi program, sehingga menyebabkan pelaksanaan program kurang berjalan secara berkesinambungan.

Solusi :

1. Solusi terhadap seringnya *trouble* pada aplikasi belum dapat dilakukan, karena aplikasi langsung berpusat pada pusdatin kementrian kesehatan.
2. Sebelum pergantian penanggungjawab program, seyogyanya dilaksanakan orientasi terlebih dahulu terhadap program, sehingga program dapat berjalan berkesinambungan.

Sasaran 2: Rata-Rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Puskesmas

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
Rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Puskesmas	80	82,45	103	80	83,68	104,6	83	84,79	102,15

Grafik

Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Puskesmas

Tahun 2016 – 2020

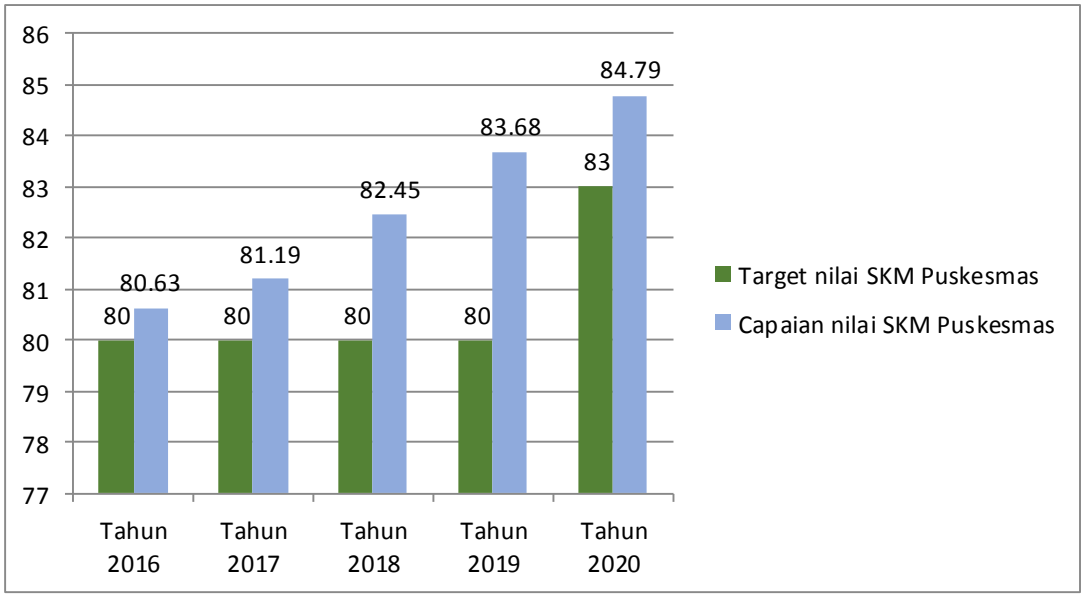

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan 26 puskesmas telah terakreditasi, sehingga terjadi peningkatan mutu layanan. Selain itu karena adanya dukungan anggaran sehingga sarpras di puskesmas tercukupi dan kualitas layanan menjadi lebih baik.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya komitmen pihak terkait untuk meningkatkan mutu layanan.

Permasalahan :

1. Rasio jumlah penduduk dan jumlah puskesmas yang masih belum sesuai standar, sehingga kualitas pelayanan belum bisa optimal.

Solusi :

1. Pembangunan puskesmas baru.

Secara umum, tidak ada perubahan target pada setiap program dan kegiatan di Dinas Kesehatan. Hal ini dikarenakan :

1. Sebagian besar program-program kesehatan adalah program berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Program Dinas Kesehatan merupakan program standar pelayanan minimal
3. Indikator kegiatan adalah indikator outcame (keluaran) bukan indikator output (langsung)

c. Program dan Kegiatan

1. **Program Upaya Kesehatan Masyarakat** dengan anggaran sebesar Rp.31.601.241.702,- dan terealisasi sebesar Rp.21.943.295.882,- atau 69,44%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE (%)
AKI	71,2/100.000 KH	53,10/ 100.000 KH	134
AKB	6,5/1.000 KH	3,8 / 1.000 KH	171
Persentase Balita Stunting	24,2%	8,8%	275
Persentase usia lanjut yang sehat	53%	71,97%	135,79
Persentase desa siaga aktif Purnama Mandiri	50%	54%	108

Jika disandingkan dengan realisasi anggaran, capaian kinerja dari program ini tidak terdapat masalah berarti. Program-program tetap dapat dilaksanakan dan tetap tercapai melebihi target yang ditetapkan meskipun realisasi anggaran tidak terserap maksimal. Hal ini dikarenakan program-program yang dicapai disini adalah program non fisik, hasil kegiatannya tidak bisa diukur secara kuantitatif. Dan sebagian besar kegiatan program sifatnya pemberdayaan masyarakat, yaitu adanya keterlibatan masyarakat, sehingga keberadaan anggaran bukan satu-satunya alat untuk mencapai keberhasilan program. Contoh kegiatan posyandu. Ada atau tidak ada anggaran kegiatan posyandu tetap harus berjalan. Anggaran kesehatan lebih bersifat suportif (pendukung kegiatan).

Selain itu, karena pandemi, banyak kegiatan dilakukan secara daring, sehingga anggaran-anggaran seperti konsumsi dan bantuan transport tidak terserap. Padahal banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya pertemuan lintas program dan lintas sektor. Sehingga anggaran tidak terserap maksimal, namun kegiatan tetap dilaksanakan.

Permasalahan:

1. Keterbatasan SDM, sehingga kegiatan kurang maksimal dijalankan.
2. Adanya pandemi covid-19 berdampak pada rendahnya cakupan pelayanan kesehatan mulai sasaran ibu hamil sampai dengan anak sekolah.
3. Adanya peran ganda (*double job*) tenaga di fasyankes (puskesmas), misal petugas gizi merangkap sebagai petugas perencanaan, sehingga program yang dijalankan kurang optimal.

Solusi:

1. Memaksimalkan tenaga yang ada dan memaksimalkan pemberdayaan masyarakat
2. Kegiatan dilaksanakan secara daring dan memaksimalkan media sosial yang ada untuk pemantauan pelayanan kesehatan mulai dari sasaran ibu hamil sampai dengan anak sekolah. Jika ada kasus/ permasalahan baru dilakukan kunjungan rumah.
3. Posyandu zona hijau tetap dilaksanakan dengan memperbanyak frekuensi dan mengurangi sasaran, serta mengaktifkan dasawisma.

Program tersebut didukung oleh 13 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Perbaikan gizi masyarakat	Jumlah neonatus yang di SHK	11.700	2.910	24,87	1.244.109.500	628.607.764	50,53
	Persentase bayi 0-6 bln yg mendpt ASI ekslusif	66,5%	64%	96,24			
	Prevalensi ibu hamil anemia	< 30%	12,8%	> 100			
	Persentase ibu hamil yg mendpt	91,7%	96,59%	105,33			

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	tablet tambah darah (90 tablet)						
	Persentase remaja putri yg mendapat tablet tambah darah	82%	67,7%	82,56			
Pembinaan Kesehatan kerja dan olah raga	Prosentase CJH (calon jamaah haji) pembinaan & pemeriksaan kebugaran	70%	85,8%	122,57	22.471.500	21.600.000	96,12
	Prosentase anak sekolah kelas 4, 5, 6 SD yg mendptkan pemeriksaan kebugaran	70%	19,84%	28,34			
Pengembangan media promosi sadar hidup sehat	Prosentase Program Prioritas yang promosikan	100%	100%	100	649.712.500	466.968.400	71,87
	Persentase desa siaga aktif madya yang dibina	24%	54,18%	225,75			
Peningkatan kesehatan keluarga	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	96,06%	96,06	1.328.876.400	1.092.557.054	82,22
	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan sesuai standar	100%	95,94%	95,94			
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan yankes sesuai standar	100%	98,28%	98,28			
	Persentase balita mendapat yankes sesuai standar	100%	94,20%	94,20			
	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	84,98%	84,98			

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Persentase remaja putri/ catin yg mendapat pelayanan konseling kesehatan reproduksi	100%	86%	86			
	Persentase penduduk umur 60 th keatas mendptkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	74,09%	74,09			
Peningkatan Perilaku hidup sehat	Persentase Rumah tangga ber PHBS	68%	61,80%	90,88	604.537.700	202.884.250	33,56
Penyelenggaraan penyehatan massyarakat pekerja dan olahraga	Jmh Kelompok Pekerja Informal Yg Mendpt Layanan kesehatan kerja	26	26	100	31.500.000	31.500.000	100
Penyelenggaran penyehatan lingkungan dan masyarakat	Jumlah Desa yang sudah dilakukan pemicuan	330	200	60,6	447.569.880	324.906.033	72,59
	Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak jamban sehat	88%	94,2%	107			
	Persentase Sarana Air Minum Yang di Inspeksi Sanitasi (diperiksa lab)	100%	79,3%	79,3			
Pemberian tambahan nutrisi	Jumlah paket nutrisi yang disediakan	5	5	100	3.739.927.008	2.701.081.540	72,22
	Jumlah lansia mendapatkan paket nutrisi	50	50	100			
	Jumlah Balita BGM mendapatkan paket nutrisi	150	150	100			
	Jumlah KLB gizi buruk mendapatkan	20	20	100			

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	paket nutrisi						
	Jumlah anak sekolah mendapatkan paket nutrisi	180	180	100			
	Jumlah Bumil/Bufas mendapatkan paket nutrisi	100	100	100			
Fasilitasi dan monev persalinan (DAK)	Jumlah RTK yang Disediakan	3	3	100	3.220.137.000	3.098.727.602	96,23
	Jumlah Bumil/ Bulin/Neonatus Normal yang difasilitasi Jampersal	50	10	20			
	Jumlah Bumil/ Bulin/Neonatus Risti yang difasilitasi Jampersal	400	400	100			
Upaya kesehatan masyarakat BOK Kabupaten (DAK)	Jumlah Kegiatan intervensi keluarga dan gizi masyarakat yang dilaksanakan	11	6	54,54	552.112.900	291.948.400	52,88
	Jumlah Kegiatan intervensi kesehatan lingkungan,kesehatan kerja dan olahraga yang dilaksanakan	6	6	100			
	Jumlah Kegiatan intervensi promosi kesehatan yang dilaksanakan	5	5	100			
Dukungan manajemen BOK Kabupaten dan JAMPERSAL (DAK)	Jumlah Puskesmas menyusun perencanaan BOK	26	26	100%	67.529.000	57.873.800	85,70
	Jumlah Puskesmas dilakukan pembinaan dan monev	26	26	100%			
Pelayanan kesehatan stunting (DAK)	Jumlah regulasi penurunan stunting yang disusun	1	1	100	750.000.000	353.016.000	47,07

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Jumlah rencana aksi Daerah yang disusun	2	2	100			
	Jumlah Koordinasi Konvergensi LP/LS yang dilaksanakan	1	1	100			
	Jumlah Monitoring dan evaluasi yang dilakukan	2	2	100			
	Jumlah Orientasi strategi/komunikasi perubahan perilaku	6	5	83,33			
	Jumlah penguatan, penggerakan pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitive	3	3	100			
Pelayanan kesehatan baik promotif/preventif, maupun kuratif/rehabilitatatif (DBHCHT)	Jumlah balita stunting mendapatkan PMT	30	30	100	923.ss869.358	818.102.455	88,55

2. **Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit** dengan anggaran sebesar Rp.7.054.972.060,- dan terealisasi sebesar Rp.5.680.730.153,- atau 80,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE (%)
1. Persentase Desa/Kel UCI	90%	96,60%	107,33
2. Persentase penduduk > 15 Th dengan Hipertensi	23,5%	13,50%	55,74
3. Persentase orang terinfeksi HIV positif mendptkan ARV	90%	77,30%	85,88
4. Angka keberhasilan pengobatan TB	93%	91,10%	97,95

Permasalahan:

1. Adanya pandemi covid, sasaran imunisasi enggan datang ke posyandu
2. Untuk capaian angka keberhasilan pengobatan TB, permasalahan yang muncul adalah banyaknya pasien TB yang berobat ke RS DO (*Drop Out*). Selain itu pasien TB yang berobat ke RS tidak dilakukan investigasi kontak.
3. Penjangkauan ke kelompok populasi resiko penularan HIV, seperti asrama, pondok pesantren, perusahaan, dan lapas) masih belum berjalan maksimal.

Solusi:

1. Kunjungan rumah dan *sweeping* sasaran imunisasi
2. Pelaksanaan KIE terkait TB di RS diperkuat.
3. Puskesmas selaku pemegang wilayah kerja bertanggungjawab dan berkomitmen kuat terhadap pencapaian program TB.
4. Penjangkauan ke kelompok populasi resiko penularan (asrama, pondok pesantren, perusahaan, dan lapas) secara bertahap bekerja sama dengan Lintas Program.

Program tersebut didukung oleh 7 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pembinaan dan pelayanan pencegahan, pengendalian penyakit menular	Persentase orang dg TB mendpt pelayanan TB sesuai standar	100%	33,98%	33,98	1.090.546.760	878.669.890	80,57
	Persentase CFR DBD	<1	1,4	< 100			
	IR DBD per 100.000	<47	6,5	> 100			
	RFT penderita kusta	90	88,88	98,75			
	Prosentase Bumil yang di skrining Hepatitis B	90%	80%	88,88			
	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendpt pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	61,92%	61,92			
Pembinaan surveilance dan imunisasi	Persentase Jamaah Haji Yang Diperiksa Dan Diimunisasi	100%	100%	100	945.108.600	819.600.021	86,72

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Persentase Penyakit Menular Wabah Dilakukan Surveilance	100%	100%	100			
	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	93,5%	100,61%	107.6			
	Persentase KLB Ditangani Kurang dari 24 Jam	100%	100%	100			
Pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan napza	Persentase penderita ODGJ Berat mendpt pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	97,81%	97,81	15.200.000	15.200.000	100
Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan indra	Persentase desa/kel yg melaksanakan POSBINDU PTM	50%	199%	199	48.750.000	48.750.000	100
	Jumlah POSBINDU yg dimonev	120	120	100			
	Persentase penduduk umur 15 sd 59 th mendptkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	57,18%	57,18			
	Persentase penderita Hipertensi mendpt pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	42,16%	42,16			
	Persentase penderita Diabetes mendpt pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	78,46%	78,46			
Operasional KPAD	Terpenuhi biaya operasional KPAD	100%	100	100	228.598.600	202.709.642	88,67
Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit (Penugasan DAK)	Jumlah cartridge yang disediakan	19	19	100	4.070.679.000	3.410.968.000	83,79
	Jumlah alat dan bahan pengendalian penyakit yang disediakan	7	6	85,7			

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit BOK Kabupaten (DAK)	Jumlah upaya P2P yang dilaksanakan	19	14	73,68	656.089.100	304.832.600	46,46
	Jumlah Upaya upaya PTM yang dilaksanakan	11	10	90,9			
	Jumlah kegiatan surveillance dan imunisasi yang dilaksanakan	7	4	57,14			

3. **Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat.** dengan anggaran sebesar Rp.81.204.163.595,- dan terealisasi sebesar Rp.63.529.224.538,- atau 78,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE (%)
Persentase FKTL yang memenuhi akreditasi	70%	86%	122,85
Persentase keluarga yang disurvey KS	20%	23,67%	118,35
Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan	90%	90,51%	90,92
Persentase Penyehat tradisional yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Pengobat Tradisional)	16%	19%	118,75
Persentase Puskesmas dengan akreditasi minimal dasar	100%	100%	100

Permasalahan:

1. Masih ada 2 RS yang belum melaksanakan akreditasi. Namun dalam masa pandemi ini diijinkan untuk RS yang belum akreditasi, tidak berproses akreditasi. Ini berdasarkan SE Kemenkes nomor HK.02.01/Menkes/455/2020.
2. Terkait masalah program jaminan kesehatan, yang menjadi kendala selama ini adalah tidak semua penduduk Kabupaten Sidoarjo memiliki NIK, seperti ODGJ dan orang-orang yang tinggal di panti.
3. Ketidaksamaan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) antara Dinsos dan Dukcapil.
4. Untuk program penyehat tradisional, kendala yang dihadapi adalah tidak semua penyehat tradisional mau mengurus STPT. Alasannya karena sulitnya

mencari rekomendasi dari asosiasi terkait dan berbayar. Selain itu belum terbentuknya tim Binwasda Kabupaten yang melibatkan lintas sektor, karena anggaran te*refocusing*.

Solusi:

1. Untuk masalah akreditasi RS, tetap men*support* agar RS yang belum terakreditasi agar berproses untuk persiapan akreditasi.
2. Harusnya ada kebijakan dari Pemerintah Daerah agar semua penduduk memiliki NIK.
3. Data Dinsos dan Dukcapil harusnya terintegrasi.
4. Untuk program Penyehatan Tradisional, sosialisasi terus digalakkan dan bekerjasama dengan asosiasi.
5. Pemberian kelonggaran pengurusan STPT tanpa rekomendasi dengan melampirkan keterangan tidak mampu.

Program tersebut didukung oleh 7 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pembinaan pelayanan kesehatan primer	Jumlah evaluasi Keluarga sehat	1	1	100	2.542.252.600	2.435.549.902	95,80
	Jumlah FKTP dimonev	26	26	100			
	Jmh Puskesmas yg difasilitasi pengajuan akreditasi	0	0	0			
Fasilitasi pelayanan kesehatan ponkesdes	Jumlah tenaga perawat ponkesdes yg difasilitasi	125	125	100	5.070.700.000	5.025.989.500	99,12
Pembinaan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah FKTL dimonev	28	28	100	9.690.113.422	5.136.743.174	53,01
	Presentase krisis kesehatan yang dilayani kesehatannya	100%	100%	100			
Fasilitasi & monev penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100	57.110.871.795	45.903.474.962	80,38
Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	Jumlah penyehat tradisional dimonev	100	93	93	108.906.000	91.868.500	84,36
	Jumlah kelompok asuhan mandiri yang dibentuk	50	93	186			

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Jumlah Penyehat tradisional di fasilitasi dalam rangka mendapatkan STPT	20	21	105			
Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemda dan atau pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (DBHCHT)	Jumlah jiwa yang dibayar preminya	2.778	12.778	100	5.631.702.778	4.935.598.500	87,64
Akreditasi FKTP (DAK)	Jumlah FKTP yang diakreditasi	16	-		1.049.617.000	0	0,0

4. **Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan** dengan anggaran sebesar Rp.100.210.968.634,- dan terealisasi sebesar Rp.80.760.512.758,- atau 80,59%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE (%)
Persentase PIRT yang mendapatkan sertifikat (ijin edar)	100%	100%	100
Persentase ketersediaan obat dan vaksin	100%	100%	100
Persentase nakes yang memiliki ijin praktek	100%	207%	207
Persentase puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standar	100%	100%	100

Capaian kinerja atas program ini tercapai 100% bahkan lebih. Namun demikian tetap ada permasalahan yang tetap ada solusinya.

<u>Permasalahan:</u>

1. Keterbatasan SDM dengan beban kerja yang banyak.
2. Ketersediaan obat dan vaksin selalu 100% terpenuhi. Namun demikian, dalam proses pengadaannya yang secara *epurchasing*, ada beberapa barang yang persediaannya terbatas.

3. Beberapa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada saat PAK, sehingga waktu terbatas.

Solusi:

1. Penambahan jumlah SDM sesuai dengan kualifikasi.
2. Perencanaan ulang yang baik dan matang utamanya terkait pengadaan, sehingga tidak perlu PAK, dan sehingga waktu pelaksanaan bisa lebih longgar.

Program tersebut didukung oleh 14 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Monitoring Legalitas sarana kefarmasian & makmin	Jumlah rekomendasi, sertifikat kefarmasian dan makmin yang diterbitkan	660	495	75	141.891.600	129.088.254	90,98
Monitoring Legalitas tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yg diterbitkan ijin prakteknya	1000	2.070	207	96.580.490	88.075.350	91,19
	Jumlah FASKES yg dimonev utk validasi tenaga kesehatan	29	29	100			
Pembinaan dan pengembangan SDM tenaga kesehatan	Jumlah nakes yg mengikuti rakor / bimtek / sosialisasi	200	236	118	21.794.458.955	20.034.413.009	91,92
	Jumlah SIM (Sistem Informasi Manajemen) Nakes yg dikelola	2	3	150			
	Jumlah Rumpun Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Seleksi Tingkat Kabupaten Dan Provinsi	9	0	0			
Pembinaan, Pengawasan & Legalitas alat kesehatan & PKRT di sarana produksi distribusi & fasilitas kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pembinaan, pengendalian & pengawasan terhadap mutu alkes	40	33	82,5	17.790.000	17.647.500	99,20
Penyediaaan & pengeloaan alkes di Puskesmas	Jumlah Puskesmas menyediakan alkes sesuai standar	26	26	100	13.208.602.935	9.446.126.186	71,51

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penyediaan biaya operasional UPT Instalasi Farmasi	Jumlah keg operasional rutin	8	8	100	1.354.610.500	1.251.782.255	92,41
	Jumlah paket pemeliharaan yg dilaksanakan	3	3	100			
Penyediaan obat & BMHP(Baham Medis Habis Pakai)	Prosentase Jumlah Jenis obat BMHP yg disediakan	115	115	100	25.632.687.000	24.870.481.493	97,03
Kegiatan penyediaan obat dan BMHP (DAK)	Jumlah jenis obat/BMHP yang disediakan	80	80	100	3.645.466.000	3.261.538.770	89,47
Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS (DBHCHT)	Jumlah sarana kesehatan dipelihara	1	1	100	3.644.948.800	3.180.835.565	87,27
	Jumlah alat kesehatan yang disediakan	244	242	99,18			
Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar	Jumlah sarana lain yang disediakan	512	328	64	16.520.516.380	13.067.451.899	79,10
Kalibrasi alkes puskesmas (DAK)	Jumlah alkes yang dikalibrasi	124	124	100	75.000.000	74.503.000	99,34
Pengawasan obat dan makanan (DAK)	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan pengawasan farmasi	29	0	0	267.632.000	32.300.000	12,07
	Jumlah kegiatan pengawasan makanan	7	6	85,7			
Distribusi obar dan E-logistik (DAK)	Jumlah puskesmas yang mendapat distribusi obat	26	26	100	123.938.000	119.890.000	96,73

5. **Program Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas.** dengan anggaran sebesar Rp.108.232.907.111,64,- dan terealisasi sebesar Rp.94.271.709.868,16,- atau 87,10%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
26 puskesmas terakreditasi	26	26	100%

Urusan Kesehatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 tercantum dalam misi ke-3 (tiga) yaitu: “Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan“ dengan tujuan misi adalah “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia” dan indikator tujuannya adalah “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”. Sedangkan sasaran dari misi ke-3 (tiga) untuk urusan kesehatan sesuai dengan RPJMD tahun 2016–2021 adalah “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat“ dengan indikator sasarannya “Angka Harapan Hidup”. Urusan kesehatan ini dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan Perangkat Puskesmasnya dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk menunjang tercapainya Angka Harapan Hidup yang menjadi indikator sasarannya, RSUD melaksanakan Program pembangunan untuk urusan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya pada tahun 2020 yaitu Program Peningkatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah yang didukung oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat optimalisasi pelayanan kesehatan, pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo lebih kepada tindakan kuratif dan rehabilitatif.

RSUD Kabupaten Sidoarjo menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yaitu sistem yang diterapkan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo sebagai Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibiltas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Di mana RSUD dengan pola BLUD mengelola hasil pendapatannya sendiri untuk menjalankan operasionalnya, yang bertujuan untuk terwujudnya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan

terwujudnya kemandirian RSUD dalam keuangan dan investasi. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator keberhasilan kinerja sebagai berikut:

a. Realisasi Kinerja Tujuan

Sampai dengan tahun 2020, kinerja jangka menengah yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut:

Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit bertaraf Internasional	Status Akreditasi Internasional	Paripurna	Paripurna	100	Paripurna	Paripurna	100	Progres Menuju Status Akreditasi Internasional	Progres Menuju Status Akreditasi Internasional	100

Status Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan yang diberikan kepada Rumah Sakit oleh badan yang berwenang dalam hal ini Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk memenuhi standar pelayanan dengan tingkat kelulusan yang telah ditentukan.

RSUD Kabupaten Sidoarjo telah memperoleh status akreditasi “Paripurna” sejak tahun 2016 hingga 2019. Akan tetapi, pada tahun 2020 indikator Status Akreditasi Rumah Sakit dengan target awal “Terakreditasi Internasional” pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 diubah menjadi “Progres Menuju Status Akreditasi Internasional” dikarenakan kegiatan akreditasi yang diselenggarakan oleh KARS harus ditunda pelaksanaannya akibat adanya Pandemi Covid-19 sesuai Surat Edaran Kemenkes RI Nomor YM.02.02/VI/3099/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit. Oleh karena itu, kegiatan akreditasi di RSUD Kabupaten Sidoarjo rencananya akan dilaksanakan di tahun 2021.

Meskipun dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan kegiatan akreditasi rumah sakit di tahun 2020, RSUD Kabupaten Sidoarjo tetap melaksanakan beberapa kegiatan untuk menuju Status Akreditasi Internasional antara lain:

1) Melaksanakan rapat koordinasi kelompok kerja (Pokja) akreditasi;
2) Melaksanakan review dan revisi dokumen akreditasi;

3) Mengunggah dokumen ke aplikasi Sismadak (Sistem Manajemen Data Akreditasi);
4) Rutin melakukan bimbingan akreditasi dengan KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) secara daring.

b. Realisasi Kinerja Sasaran

Sampai dengan tahun 2020 kinerja tahunan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran: Meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan	1. Status Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	100%	Paripurna	Paripurna	100%	Progres Menuju Status Akreditasi Internasional	Progres Menuju Status Akreditasi Internasional	100%
	2. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	A	B	0%	A	A	100%	A	A	100%
	3. Persentase Pasien Keluar Hidup	95%	93,91%	98,9%	96%	93,7%	97,6%	93%	93,41%	100,44%

1. Status Akreditasi Rumah Sakit

Pada tahun 2016-2019, RSUD Kabupaten Sidoarjo telah mencapai target status akreditasi Paripurna. Akan tetapi, pada tahun 2020 indikator Status Akreditasi Rumah Sakit dengan target awal “Terakreditasi Internasional” pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 diubah menjadi “Progres Menuju Status Akreditasi Internasional” dikarenakan kegiatan akreditasi rumah sakit yang diselenggarakan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) harus ditunda pelaksanaannya di tahun 2020 akibat adanya Pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kemenkes RI Nomor YM.02.02/VI/3099/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit. Oleh karena itu,

kegiatan akreditasi di RSUD Kabupaten Sidoarjo rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Meskipun dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan kegiatan akreditasi rumah sakit pada tahun 2020, RSUD Kabupaten Sidoarjo tetap melaksanakan beberapa kegiatan untuk menuju Status Akreditasi Internasional, antara lain:

1) Melaksanakan rapat koordinasi kelompok kerja (Pokja) akreditasi;
2) Melaksanakan review dan revisi dokumen akreditasi;
3) Mengunggah dokumen ke aplikasi Sismadak (Sistem Manajemen Data Akreditasi);
4) Rutin melakukan bimbingan akreditasi dengan KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) secara daring.

2. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) RSUD Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan dengan merujuk pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian ini dilakukan terhadap sembilan unsur pelayanan yaitu persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya / tarif, spesifikasi produk pelayanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan pada 25 unit pelayanan / instalasi yang dinilai.

Pada tahun 2020, SKM RSUD Kabupaten Sidoarjo telah mencapai target karena memperoleh predikat A (Sangat Baik) dengan nilai 90,771. Nilai SKM RSUD Kabupaten Sidoarjo di tahun 2020 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mendapatkan nilai 90,303. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin puas dengan pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo.

3. Persentase Pasien Keluar Hidup

Persentase Pasien Keluar Hidup merupakan indikator kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo hasil Reviu Renstra pada Tahun 2017. Indikator ini menggambarkan

jumlah pasien keluar hidup yang dirawat inap di RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam waktu 1 (satu) tahun. Perhitungan indikator ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah pasien keluar hidup dengan jumlah pasien masuk rawat inap dikalikan 100%.

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2019 indikator Persentase Pasien Keluar Hidup belum pernah mencapai target. Oleh karena itu, berdasarkan hasil Reviu Renstra pada tahun 2020, target indikator Persentase Pasien Keluar Hidup tahun 2020 yang semula 97% diubah menjadi 93% dikarenakan realisasinya tidak pernah mencapai target sejak tahun 2017 dan disesuaikan dengan realisasi tiga tahun terakhir.

Pada tahun 2020, indikator Persentase Pasien Keluar Hidup sudah mencapai target dengan realisasi sebesar 93,41% dari target 93%. Hasil ini diperoleh dari jumlah pasien keluar hidup sebanyak 31.196 orang dibandingkan dengan jumlah pasien masuk rawat inap sebanyak 33.396 orang, sehingga diperoleh hasil perhitungan Persentase Pasien Keluar Hidup sebesar 93,41%. Jumlah pasien dalam perhitungan indikator ini sudah termasuk pasien Covid-19.

Meskipun telah mencapai target tahun 2020, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Persentase Pasien Keluar Hidup antara lain:

1. Optimalisasi layanan Gedung Hemodialisis 4 lantai dengan kapasitas 100 tempat tidur serta optimalisasi layanan Central Sterile Services Department (CSSD) dan Laundry;
2. Penggunaan alat-alat kesehatan yang berteknologi canggih untuk menunjang pelayanan seperti USG 4D (Ultrasonografi), Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), Echokardiografi, dan Elektroensefalogram (EEG); dan CT-Scan 128 Slices; dan MRI 3 tesla.
3. Pengembangan dan optimalisasi layanan Cathlab, Home Care Service, Instalasi Pelayanan Intensif Terpadu (IPIT), Laparoscopy, Endoscopy, Klinik Estetika, layanan Stroke Unit, layanan Geriatri, dan Pain Center;
4. Monitoring yang berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan sesuai dengan standar (Panduan Pelayanan Klinik, Clinical Pathway, Daftar Obat Medik dan Audit Medik);
5. Optimalisasi PPI (Pengendalian dan Pencegahan Infeksi), K3RS (Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit), dan PPRA (Program Pengendalian Resistensi Antimikroba);
6. Pembangunan Gedung Radioterapi Onkologi Terpadu.
7. Kesiapan RSUD Kabupaten Sidoarjo sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19 antara lain:
   a) Menerapkan zonasi Covid-19 di RSUD Kabupaten Sidoarjo yang meliputi :
      - Zonasi merah untuk pelayanan pasien Covid-19
      - Zonasi kuning untuk pelayanan pasien non Covid-19

b) Pelayanan Rawat Jalan dengan Konsep Kluster (Asuhan Keperawatan, Periksa Dokter, Layanan Farmasi, Laboratorium, Radiologi, Rehabilitasi di Satu Area);
c) Pelayanan Covid-19 di IGD, Maternal Neonatal, Kamar Operasi, Hemodialisis, Radiologi, Laboratorium, Kamar Jenazah;
d) Mobilisasi SDM untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di Ruang Isolasi Covid-19;
e) Menyediakan Ruang Isolasi yang Cukup dengan Standar Ruang Isolasi Khusus (Tekanan Negatif – Hepafilter), ICU dan Ruang Isolasi Biasa;
f) Menyediakan Ruangan Khusus One Day Care (ODC) dan Tindakan Elektif.

c. Program dan Kegiatan

RSUD Kabupaten Sidoarjo menerapkan pola pengelolaan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yaitu sistem yang diterapkan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo sebagai Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. RSUD Kabupaten Sidoarjo hanya memiliki 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah dan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan didukung pemenuhan sarana dan prasarana, SDM, SIM, dan Tata Kelola.

Program Peningkatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah dengan anggaran sebesar Rp.574.895.657.671,75 dan terealisasi sebesar Rp.549.718.408.774,55 atau tercapai 95,62%. Program tersebut memiliki 22 indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian
1	Persentase elemen penilaian akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi	≥95%	92,36%	97,22%
2	Persentase indikator SPM Bidang Pelayanan Medis yang mencapai target	85%	78,6%	92,47%
3	Bed Occupancy Rate (BOR)	70-85%	60,8%	90,8%
4	Average Length of Stay (ALOS)	3-5 hari	3,9 hari	100%

No	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian
5	Turn Over Interval (TOI)	1-3 hari	2,4 hari	100%
6	Bed Turn Over (BTO)	40-50 kali	60,6 kali	89,4%
7	Net Death Rate (NDR)	≤45 ‰	44,6 ‰	100%
8	Gross Death Rate (GDR)	≤70 ‰	77,6 ‰	92,4%
9	Persentase indikator SPM Bidang Penunjang Medis dan Non Medis yang mencapai target	95%	77,78%	81,87%
10	Persentase terlaksananya evaluasi Standar Asuhan Keperawatan	100%	100%	100%
11	Persentase indikator SPM Bagian Perencanaan dan Pemasaran yang mencapai target	95%	100%	100%
12	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100%	83,33%	83,33%
13	Persentase KSO baru di bidang pelayanan kesehatan yang diselesaikan	18%	14,89%	82,72%
14	Persentase KSO baru di bidang non pelayanan kesehatan yang diselesaikan	27%	0%	0%
15	Persentase indikator SPM Bagian SDM dan Diklit yang mencapai target	95%	80%	84,21%
16	Persentase terlaksananya pengukuran parameter akreditasi rumah sakit pendidikan yang memenuhi standar akreditasi	90%	100%	100%
17	Presentase diselesaikannya penelitian dalam Karya Tulis Ilmiah	80%	90%	100%
18	Persentase indikator SPM Bagian Keuangan yang mencapai target	95%	100%	100%
19	Persentase tercapainya indikator keuangan sesuai standar	100%	87,5%	87,5%
20	Ketepatan Waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%
21	Persentase indikator SPM Bagian Umum yang mencapai target	95%	88,89%	93,57%
22	Persentase keluhan pelanggan (Number of complain)	0,02%	0,018%	100%

Pada umumnya, indikator kinerja program RSUD Kabupaten Sidoarjo sudah mencapai target. Namun, untuk indikator yang tidak mencapai target dengan capaian <95% dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Persentase elemen penilaian akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi

   Indikator ini tidak mencapai target dikarenakan pada tahun 2020 tidak dilakukan penilaian akreditasi oleh KARS akibat adanya pandemi Covid-19. Sehingga menggunakan nilai dari survei verifikasi akreditasi tahun 2019

yakni 92,36%. Penilaian akreditasi rencananya akan dilaksanakan di tahun 2021.

2) Persentase indikator SPM Bidang Pelayanan Medis yang mencapai target

Indikator ini tidak mencapai target dikarenakan beberapa indikator SPM di unit pelayanan / instalasi tidak mencapai target antara lain:

(a) SPM Pelayanan Gawat Darurat yang tdiak mencapai target yaitu kematian pasien ≤24 jam di Gawat Darurat, hal ini dikarenakan kondisi pasien pra rujukan yang datang sudah dalam kondisi kritis.

(b) SPM Pelayanan Rawat Inap yang tidak mencapai target yaitu jam visite dokter spesialis, tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian, dan kematian pasien >48 jam

(c) SPM Pelayanan Persalinan dan Perinatologi yang tidak mencapai target yaitu kejadian kematian ibu karena persalinan akibat sepsis, kemampuan menanggapi BBLR 1.500-2.500 gr dan pertolongan persalinan melalui seksio cesaria

(d) SPM Pelayanan Intensif tidak mencapai target yaitu 100% perawat minimal D3 dan ≥50 perawat dengan sertifikat Perawat mahir ICU/ setara D4. Indikator ini tidak memenuhi target dikarenakan pelatihan mahir harus menunggu penjadwalan dari Sub Bagian Pengembangan SDM.

(e) SPM Pelayanan Rekam Medik yang tidak mencapai target yaitu kelengkapan pengisian rekam medis dan informed concent.

3) Bed Occupancy Rate (BOR)

Indikator BOR tidak mencapai target dikarenakan nilainya berada di bawah standar yakni terealisasi 60,8% dari standar 70-85% yang berarti bahwa tingkat pemanfaatan tempat tidur di RSUD Kabupaten Sidoarjo rendah. Pada masa pandemi Covid-19, jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit mengalami penurunan dikarenakan pasien mengalami ketakutan yang

tinggi untuk berkunjung ke rumah sakit. Selain itu, adanya isu yang beredar bahwa pasien akan didiagnosis Covid-19 jika berobat ke rumah sakit menyebabkan pasien enggan berobat ke RSUD Kabupaten Sidoarjo.

4) Bed Turn Over (BTO)

Indikator BTO tidak mencapai target dikarenakan nilainya melebihi standar yakni terealisasi 60,6 kali dari standar 40-50 kali yang berarti bahwa rata-rata pemakaian tempat tidur di RSUD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 sebanyak 61 kali. Tingginya angka BTO dikarenakan banyaknya jumlah pasien yang menggunakan tempat tidur dengan jeda tempat tidur kosong yang singkat.

5) Gross Death Rate (GDR)

Indikator GDR tidak mencapai target dikarenakan nilainya melebihi standar yakni 77,6 ‰ dari standar ≤70 ‰. GDR yang tinggi disebabkan oleh kondisi pasien pra rujukan yang datang sudah dalam kondisi kritis. Selain itu, RSUD Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu dari 7 (tujuh) pusat rujukan regional di Jawa Timur misalnya pasien dari wilayah Pasuruan dan Mojokerto. Pasien yang masuk ke RSUD Kabupaten Sidoarjo tidak murni berasal dari Kabupaten Sidoarjo saja, namun juga berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo. Sehingga, jumlah pasien meninggal dalam perhitungan GDR juga bisa berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo.

6) Persentase indikator SPM Bidang Penunjang Medis dan Non Medis yang mencapai target

Indikator ini tidak mencapai target dikarenakan beberapa indikator SPM di unit pelayanan / instalasi tidak mencapai target antara lain:

(a) SPM Pelayanan Farmasi yang tidak mencapai target yaitu waktu tunggu pelayanan obat jadi dan racikan, tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat, dan penulisan resep sesuai formularium. Belum tercapainya target tersebut karena masih ada kendala teknis terkait penggunaan aplikasi e-Resep baik dari user maupun sistem.

(b) SPM Pelayanan Ambulance / Kereta Jenazah yang tidak mencapai target yaitu kecepatan memberikan pelayanan ambulance / kereta jenazah di rumah sakit masih memberlakukan pengiriman jenazah dengan sistem petugas on call.

(c) SPM Pelayanan Gizi tidak mencapai target yaitu tidak adanya kejadian kesalahan dalam pemberian diet. Hal ini dikarenakan beberapa tenaga ahli gizi terkena Covid-19 sehingga ahli gizi yang bertugas mempunyai beban kerja berlebih daripada biasanya.

(d) SPM Pelayanan Transfusi Darah tidak mencapai target dikarenakan adanya kejadian reaksi transfusi yang tidak dapat diidentifikasi sebelumnya sehingga sulit untuk dilakukan antisipasi, misalnya reaksi non hemolitic / reaksi alergi terhadap darah donor.

(e) SPM Pelayanan Laundry yang tidak mencapai target yaitu ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap. Hal ini dikarenakan pengiriman linen kotor hanya dilakukan sekali dalam sehari sedangkan permintaan linen bersih sebanyak dua kali sehari, selain itu jumlah linen yang tersedia juga belum sesuai standar.

7) Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu

Indikator ini tidak mencapai target dikarenakan:

(a) DPA PAK Tahun 2020 telah disahkan pada tanggal 05 November 2020, namun secara SPM sub bagian perencanaan target dalam pencapaian adalah bulan Oktober. Keterlambatan penyusunan dokumen dikarenakan keterlambatan proses verifikasi APBD.

(b) Dokumen Review Renstra Tahun 2020 telah diserahkan ke Bappeda Kab. Sidoarjo pada bulan Desember 2020, namun secara SPM Sub Bagian Perencanaan target pencapaian adalah pada bulan Oktober, keterlambatan penyelesaian dokumen karena adanya proses penyesuaian peraturan baru.

8) Persentase KSO baru di bidang pelayanan kesehatan yang diselesaikan

Indikator ini tidak mencapai target dikarenakan pada masa pandemi Covid-19 proses kerja sama dengan perusahaan terkendala pada pertemuan langsung sehingga komunikasi dan koordinasi hanya terbatas melalui daring dan membutuhkan waktu yang lebih lama.

9) Persentase KSO baru di bidang non pelayanan kesehatan yang diselesaikan

Sama dengan KSO di bidang pelayanan kesehatan, indikator ini tidak mencapai target dikarenakan pada masa pandemi Covid-19 proses kerja sama dengan perusahaan terkendala pada pertemuan langsung sehingga komunikasi dan koordinasi hanya terbatas melalui daring dan membutuhkan waktu lebih lama.

10) Persentase tercapainya indikator keuangan sesuai standar

Indikator ini tidak mencapai target dikarenakan terdapat satu indikator keuangan yang belum sesuai standar yaitu Solvabilitas Ratio. Solvabilitas Ratio tidak mencapai target (realisasi 4,77% dari target 4,64%) dikarenakan besaran kewajiban jasa pelayanan atau besaran utang jasa pelayanan diperoleh dengan estimasi. Estimasi ini dilakukan karena harus menunggu perhitungan klaim tagihan piutang pihak ketiga, setelah itu baru dapat dilakukan perhitungan jasa pelayanan.

11) Persentase indikator SPM Bagian Umum yang mencapai target

Persentase indikator SPM Bagian Umum tidak mencapai target karena terdapat satu indikator SPM Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit yang tidak mencapai target yakni pelayanan kalibrasi untuk alat laboratorium dan alat ukur. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kalibrasi dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga alat harus dikirim ke pelaksana kalibrasi tersebut sedangkan alat masih digunakan untuk pelayanan (faktor eksternal).

Program tersebut didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan didukung pemenuhan sarana dan prasarana, SDM, SIM, dan Tata Kelola. dengan 53 indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian
1.	Persentase elemen penilaian pokja di bidang pelayanan medis yang memenuhi standar	≥95%	91,08%	95,87%
2.	Persentase elemen penilaian pokja di bidang pelayanan keperawatan yang memenuhi standar	≥95%	92,29%	97,15%
3.	Persentase elemen penilaian pokja di bidang pelayanan manajemen yang memenuhi standar	≥95%	94,31%	99,27%
4.	Persentase indikator SPM jenis pelayanan gawat darurat yang mencapai target	85%	87,5%	100%
5.	Persentase indikator SPM pelayanan rawat jalan yang mencapai target	85%	85,7%	100%
6.	Persentase indikator SPM pelayanan rekam medis yang mencapai target	85%	50%	58,82%
7.	Persentase perolehan pasien baru (Customer Acquisition)	2%	4,2%	100%
8.	Persentase perolehan pasien lama (Customer Loyalty)	75%	57,9%	77,20%
9.	Kepatuhan dalam pengisian Clinical Pathway (CP)	70%	70 %	100%
10.	Persentase komponen Laporan Analisa Rawat Inap yang telah dilaporkan secara berkala	100%	100%	100%
11.	Persentase indikator SPM pelayanan rawat inap yang mencapai target	85%	76,9%	90,47%
12.	Persentase indikator SPM pelayanan bedah sentral yang mencapai target	85%	85,7%	100%
13.	Persentase indikator SPM pelayanan persalinan, perinatologi dan KB yang mencapai target	85%	70%	82,35%
14.	Persentase indikator SPM pelayanan intensif yang mencapai target	85%	66,7%	78,47%
15.	Persentase indikator SPM pelayanan GAKIN yang mencapai target	85%	100%	100%
16.	Persentase indikator SPM pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yang mencapai target	85%	100%	100%
17.	Persentase indikator SPM pelayanan radiologi yang mencapai target	95%	100%	100%
18.	Persentase indikator SPM pelayanan Laboratorium Patologi Klinik yang mencapai target	95%	100%	100%
19.	Persentase indikator SPM pelayanan Rehabilitasi Medik yang mencapai target	95%	100%	100%
20.	Persentase indikator SPM pelayanan Farmasi yang mencapai target	95%	20%	21,05%
21.	Persentase indikator SPM pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi yang mencapai target	95%	100%	100%
22.	Persentase indikator SPM pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah yang mencapai target	95%	66,67%	70,18%
23.	Persentase indikator SPM pelayanan Pemulasaran Jenazah yang mencapai target	95%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian
24.	Persentase indikator SPM pelayanan Gizi yang mencapai target	95%	66,67%	70,18%
25.	Persentase indikator SPM pelayanan Transfusi Darah yang mencapai target	95%	50%	52,63%
26.	Persentase indikator SPM pelayanan Laundry yang mencapai target	95%	50%	52,63%
27.	Evaluasi SAK (Standar Asuhan Keperawatan) Rawat Jalan dan Khusus	4 kali	4 kali	100%
28.	Evaluasi SAK (Standar Asuhan Keperawatan) Rawat Inap	4 kali	4 kali	100%
29.	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan yang mencapai target	95%	100%	100%
30.	Persentase dokumen perencanaan yang telah disusun	100%	100%	100%
31.	Jumlah perusahaan yang diprospek untuk bekerjasama dibidang pelayanan kesehatan	18 perusahaan	32 perusahaan	100%
32.	Jumlah perusahaan yang diprospek untuk bekerjasama dibidang non pelayanan kesehatan	22 perusahaan	30 perusahaan	100%
33.	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Administrasi SDM yang mencapai target	95%	100%	100%
34.	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Pengembangan SDM yang mencapai target	95%	0%	0%
35.	Persentase pegawai mendapat minimal 1 pelatihan dalam setahun	60%	43,2%	72%
36.	Persentase parameter akreditasi rumah sakit pendidikan yang diukur	100%	100%	100%
37.	Persentase penelitian yang berhasil diselesaikan	100%	100%	100%
38.	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi yang mencapai target	95%	100%	100%
39.	Sales Growth Rate (SGR)	6,45%	40,72%	100%
40.	Cost Recovery Ratio (CRR)	116%	151,57%	100%
41.	Tingkat Kemandirian BLUD	101%	107,16%	100%
42.	Average Collection Periode	76,94 hari	53 hari	100%
43.	Current Ratio	324,14%	729,27%	100%
44.	Cash Ratio	49,62%	484,27%	100%
45.	Solvabilitas Ratio	4,64%	4,77%	97,27%
46.	Quick Ratio	282,19%	686,77%	100%
47.	Persentase laporan keuangan yang telah disusun	100%	100%	100%
48.	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Pendapatan yang mencapai target	95%	100%	100%
49.	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Anggaran dan Belanja yang mencapai target	95%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian
50.	Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga yang mencapai target	95%	100%	100%
51.	Persentase indikator SPM pelayanan Pengelolaan Limbah yang mencapai target	95%	100%	100%
52.	Persentase indikator SPM pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit yang mencapai target	95%	83,33%	87,72%
53.	Penyusunan laporan number of complain	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				90,63 %

Dari 53 indikator kinerja kegiatan tersebut, terdapat 17 indikator yang tidak mencapai target yaitu:

1) Persentase elemen penilaian pokja di bidang pelayanan medis yang memenuhi standar
2) Persentase elemen penilaian pokja di bidang pelayanan keperawatan yang memenuhi standar
3) Persentase elemen penilaian pokja di bidang pelayanan manajemen yang memenuhi standar
4) Persentase indikator SPM pelayanan rekam medis yang mencapai target
5) Persentase perolehan pasien lama (Customer Loyalty)
6) Persentase indikator SPM pelayanan rawat inap yang mencapai target
7) Persentase indikator SPM pelayanan persalinan, perinatologi dan KB yang mencapai target
8) Persentase indikator SPM pelayanan intensif yang mencapai target
9) Persentase indikator SPM pelayanan Farmasi yang mencapai target
10) Persentase indikator SPM pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah yang mencapai target
11) Persentase indikator SPM pelayanan Gizi yang mencapai target
12) Persentase indikator SPM pelayanan Transfusi Darah yang mencapai target
13) Persentase indikator SPM pelayanan Laundry yang mencapai target
14) Persentase indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Pengembangan SDM yang mencapai target

15) Persentase pegawai mendapat minimal 1 pelatihan dalam setahun
16) Solvabilitas Ratio
17) Persentase indikator SPM pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit yang mencapai target.

Meskipun demikian, tidak tercapainya beberapa indikator kegiatan tersebut tidak mempengaruhi kinerja kegiatan di RSUD Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan karena rata-rata indikator kinerja kegiatannya sudah tercapai 90,63%.

Cost Recovery Rate (CRR) RSUD Kabupaten Sidoarjo

Cost Recovery Rate (CRR) digunakan untuk mengukur kontribusi pendapatan operasional terhadap belanja operasional pelayanan. Selain itu, CRR dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pendapatan rumah sakit mampu membiayai kegiatan operasional pelayanan termasuk gaji pegawai rumah sakit. Indikator ini mencerminkan efisiensi penggunaan dana operasional rumah sakit dalam melayani pasien. Bila CRR di atas 100% maka CRR-nya baik.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2019	107,7%	114,88%	107%	>100%
2020	116%	151,57%	131%	>100%

Sumber data: Bagian Keuangan RSUD Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa CRR RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 dan 2020 berada di atas nilai 100%. Hal ini berarti bahwa RSUD Kabupaten Sidoarjo mampu untuk membiayai kegiatan operasional pelayanan termasuk gaji pegawai rumah sakit.

Bila dibandingkan dengan CRR tahun 2019, CRR tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 36,69%, hal ini dikarenakan adanya peningkatan pendapatan yang berasal dari klaim biaya perawatan pasien Covid-19 ke Kementerian Kesehatan.

Meksipun demikian, perlu dilakukan evaluasi biaya pada setiap unit agar dapat dilakukan pengendalian dan efisiensi biaya, sehingga pendapatan yang diperoleh dapat

membiayai semua kegiatan yang ada. Dengan harapan bahwa semua biaya yang dikeluarkan bisa untuk menghasilkan pendapatan dan dapat mengurangi atau menghilangkan biaya yang tidak perlu.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Realisasi Kinerja Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	2018			2019			2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur secara lebih memadai	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	85,00%	93,06%	109,48%	87%	91,48%	105,14%	90%	82%	91,11%
	Prosentase kecukupan kebutuhan air irigasi	84%	85,73%	102,06%	85%	83%	97%	86%	85,38%	99,28%
	Prosentase luasan genangan/ banjir tertangani	64%	55,00%	85,94%	65%	53.3%	82%	67%	61,61%	91,96%
	Prosentase bangunan yang ber-IMB	61%	53,00%	86,89%	-	-	-	-	-	-
	Prosentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	60%	55,00%	91,67%	-	-	-	-	-	-

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 tidak mencapai target, hal ini dikarenakan Adanya beberapa paket pekerjaan di bidang jalan dan jembatan yang tidak dapat dikerjakan dikarenakan waktunya sangat mendesak. Paket pekerjaannya adalah pembangunan penahan jalan. Untuk itu, sudah kami anggarkan kembali di tahun 2021.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya refocusing kegiatan, sehingga beberapa paket pekerjaan fisik terkait pembangunan dan pemeliharaan tertunda.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. untuk Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap ada kenaikan 3% dari target 2020
b. untuk Prosentase kecukupan kebutuhan air irigasi ada kenaikan 1% dari target 2020.
c. untuk Prosentase luasan genangan/ banjir tertangani ada kenaikan 3% dari target 2020.

b. Realisasi Kinerja Sasaran

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur ke-PU-an, dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2018			2019			2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	85,00%	93,06%	109,48%	87%	91,48%	105,14%	90%	82%	91,11%
Prosentase kecukupan kebutuhan air irigasi	84%	85,73%	102,06%	85%	83%	97%	86%	85,38%	99,28%
Prosentase luasan genangan/ banjir tertangani	64%	55,00%	85,94%	65%	53.3%	82%	67%	61,61%	91,96%
Prosentase bangunan yang ber-IMB	61%	53,00%	86,89%	-	-	-	-	-	-
Prosentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	60%	55,00%	91,67%	-	-	-	-	-	-

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 tidak mencapai target, hal ini dikarenakan Adanya beberapa paket pekerjaan di bidang jalan dan jembatan yang tidak dapat dikerjakan dikarenakan waktunya sangat mendesak. Paket pekerjaannya adalah pembangunan penahan jalan. Untuk itu, sudah kami anggarkan kembali di tahun 2021.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya refocusing kegiatan, sehingga beberapa paket pekerjaan fisik terkait pembangunan dan pemeliharaan tertunda.

a. untuk Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap ada kenaikan 3% dari target 2020

b. untuk Prosentase kecukupan kebutuhan air irigasi ada kenaikan 1% dari target 2020.
c. untuk Prosentase luasan genangan/ banjir tertangani ada kenaikan 3% dari target 2020.

Permasalahan :

1. Dengan adanya wabah covid19, beberapa paket pekerjaan terkait pembangunan, normalisasi saluran pematusan dan pengendalian banjir terkena pengurangan anggaran. Hal tersebut menyebabkan beberapa saluran mengalami penangguhan. Sehingga pekerjaan fisik yang ada harus segera dilaksanakan untuk menangani genangan yang ada di Kabupaten Sidoarjo
2. Adanya beberapa paket pekerjaan di bidang jalan dan jembatan yang tidak dapat dikerjakan dikarenakan waktunya sangat mendesak.

Solusi :

1. Mempercepat proses pengadaan dengan menambah tenaga pengadaan barang dan jasa
2. Sudah kami anggarkan kembali di tahun 2021, sehingga paket pekerjaan di tahun 2020 dapat terealisasikan

c. Program dan Kegiatan

1. **Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaaan** dengan anggaran sebesar Rp.186.136.974.854,- dan terealisasi sebesar Rp.69.819.056.412,- atau 37,51%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase panjang jalan kabupaten yang dipelihara	9%	7,2%	80%
Persentase pemanfaatan jalan dan jembatan yang berijin	100%	0%	0%
Persentase panjang jalan kabupaten yang dibangun	1,75%	1,4%	80%
Persentase panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan	1,87%	1,4%	75%
Persentase panjang bagian-bagian jalan kabupaten yang dibangun	0,27%	0%	0%

Persentrase jalan penghubung pusat kegiatan baru	100%	0%	0%

Permasalahan:

1. Untuk kegiatan terkait penahan jalan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan waktu nya mendesak, yakni dikarenakan pengesahan DPA Perubahan 2020 yang mendekati akhir tahun.
2. Untuk Pembebasan Lahan Frontage Road Waru buduran, Pembebasan kurang dr 5 Ha, sehingga tidak diperlukan lagi Penetapan Lokasi dari provinsi, sehingga prosesnya cukup di notaris

Solusi:

1. Dianggarkan kembali di tahun 2021
2. Mempercepat pengadaan di notaries

Pada saat refocusing 2020 anggaran untuk Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan sebesar 526.431.303.625 menjadi 173.175.374.050 atau berkurang - 67,15%

Program tersebut didukung oleh 10 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pembangunan jalan	Jumlah panjang jalan yang dibangun	4793 m	893 m	18,63%	30,011,071,410.00	7,500,849,500.00	24.99
Pembangunan bagian-bagian jalan	Jumlah jembatan dan gorong-gorong kabupaten yang dibangun	1	1	100%	4,087,788,003.00	2,183,799,083.00	53.42
Pembebasan jalan	Luas Lahan yang dibebaskan untuk jalan kabupaten	5666 m2	0 %	0 %	78,836,277,183.00	14,514,311,400.00	18.41
Peningkatan jalan	Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan	11.186,06 m	6.267 m	56,02%	59,600,145,258.00	39,341,837,687.00	66.01
Pembangunan jembatan	Jumlah jembatan dan gorong-gorong kabupaten yang dibangun	1	1	100%	2,419,011,200.00	1,745,779,984.00	72.17
Peningkatan jembatan	Jumlah jembatan dan gorong-gorong kabupaten yang ditingkatkan	1	1	100%	874,763,800.00	423,307,871.00	48.39
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang direhabilkitasi/ dipelihara	58.234 m	34.833 m	80%	9,489,524,000.00	3,940,783,213.00	41.53
Rehabilitasi/pemeliharaan bagian-bagian jalan	Panjang saluran yang direhabilitasi/ dipelihara	0	0	0%	150,000,000.00	0.00	0.00

Rehabilitasi/pemelihaaran jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi/ dipekihara	1	1	100%	657,144,000.00	168,387,674.00	25.62
Pengendalian dan pemanfatan jalan dan jembatan	Jumlah rekomendasi ijin	0	0	0%	11,250,000.00	0.00	0.00

Proggres Frontage Road Waru - Buduran

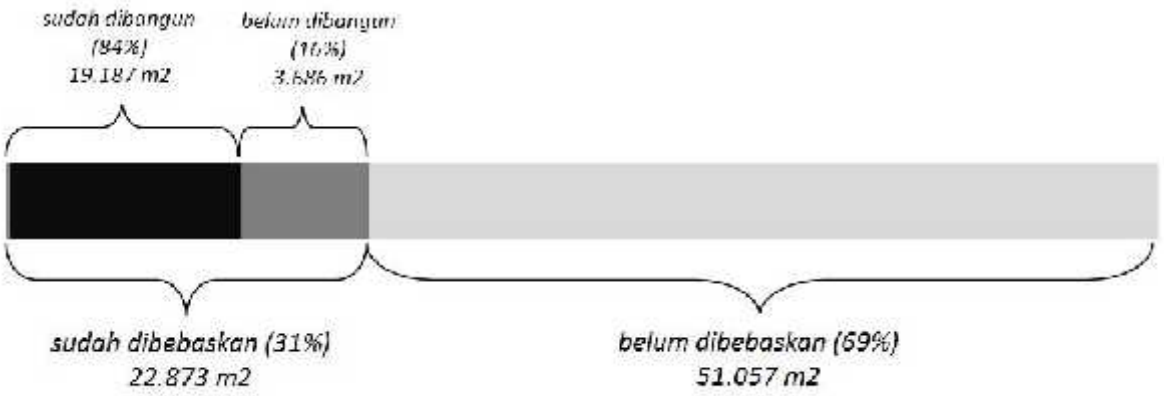

REKAPITULASI KONDISI JALAN
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2020

No	Kecamatan	Panjang Ruas (km)	Kemantapan (%)	
			Mantap	Tidak Mantap
1	Balongbendo	46.82	96.80	3.20
2	Krian	79.60	97.49	2.51
3	Taman	34.83	95.41	4.59
4	Sukodono	51.46	92.69	7.31
5	Waru	36.56	96.72	3.28
6	Gedangan	48.59	94.06	5.94
7	Sedati	33.23	86.07	13.93
8	Candi	67.80	93.92	6.08
9	Wonoayu	53.10	99.72	0.28
10	Tarik	54.92	93.44	6.56
11	Tulangan	76.20	96.06	3.94
12	Krembung	53.13	91.56	8.44
13	Prambon	63.24	90.67	9.33
14	Porong	47.40	100.00	0.00
15	Tanggulangin	71.26	93.59	6.41
16	Jabon	77.85	92.81	7.19
17	Sidoarjo	50.06	98.94	1.06
18	Buduran	57.36	95.41	4.59
	Jalan kota	12.02	99.11	0.89
Total		**1015.416**	**94.86**	**5.14**

2. **Program Pembangunan, Peningkatan, pemeliharaan Jaringan irigasi, Pematusan dan Pengendalian Banjir** dengan anggaran sebesar Rp.54.342.503.858,- dan terealisasi sebesar Rp.43.611.517.509 atau 80,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase jaringan irigasi yang dibangun/ ditingkatkan dan dipelihara	87%	87%	100 %
Persentase saluran pematusan yang dibangun/ ditingkatkan dan dipelihara	25%	25%	100 %
Persentase pemenuhan sarpras pengendalian banjir	65%	65%	100 %
Persentase pembinaan dan penyuluhan di kecamatan	0%	0%	0 %
Prosentase asset pengairan yang tertangani	0%	%	0 %

Permasalahan:

Adanya bencana nasional wabah covid 19, menyebabkan penyesuaian angggaran sehingga pada pelaksanaannya, mendahulukan program/ kegiatan prioritas

Solusi:

Percepatan proses pengadaan untuk kegiatan yang tidak terdampak refocusing

Pada saat refocusing 2020 anggaran untuk Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan irigasi, pematusan dan pengendalian Banjir sebesar 72.179.351.773 menjadi 23.713.329.020 atau berkurang -67,15%

Program tersebut didukung oleh 8 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pembangunan dan pemeliharaan irigasi	Jumlah panjang saluran irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	5209 m	5209 m	100%	14,646,225,618.00	10,554,168,211.00	72.06

	dan dipelihara						
Pembangunan dan pemeliharaan pematusan	a.Jumlah sarpras penanganan banjir yang diadakan b.Jumlah sarpras penanganan banjir yang di0perasikan c.Jumlah sarpras penanganan banjir yang berfungsi dengan baik d.Jumlah tenaga penjaga rumah pompa dan busem yang tersedia	a.0 unit b.32 unit c.32 unit d. 14 orang	a.0 unit b.32 unit c.32 unit d. 14 orang	a.0% b. 100% c. 100% d. 100%	34,839,601,149.00	29,715,393,373.00	85.29
Pengadaan, operasional dan pemeliharaan sarpras pengendalian banjir	a. Panjang saluran pematusan yang dibangun/ ditingkatkan b. panjang saluran pematusan yang dipelihara	a. 2710 m b. 25100 m	a. 2710 m b. 25100 m	a. 100% b. 100%	3,429,632,691.00	2,222,273,880.00	64.80
Operasional jaringan irigasi	Tenaga juru, PPA Penjaga Dam/ bending	144 orang	144 orang	100%	1,238,812,400.00	974,535,387.00	78.67
Pemberdayaan petani pemakai air	GHIPPA yang telah dibina	1 GHIPPA	1 GHIPPA	100%	83,132,000.00	47,250,368.00	56.84
Penyelenggaraan penyuluh bidang pengairan	Penyuluhan terkait pengendalian asset sempadan	0 kecamatan	0 kecamatan	0%	0.00	0.00	0.00
Pengelolaan dan penataan aset pengairan	Panjang sempadan yang sesuai ketentuan	1964 m	1964 m	100%	3,000,000.00	0.00	0.00
Pengelolaan database aset pengairan	a. Aset pengairan yang dikelola	a. 2 Lokasi b. 2 Jenis	a. 2 Lokasi b. 2 Jenis	a. 100% b. 100%	102,100,000.00	97,896,290.00	95.88

	b.Variable asset pengairan dalam database						

REKAPITULASI KONDISI SALURAN
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2020

No.	Nama Saluran	Baku Sawah Kabupaten (Ha)	Panjang (m)	Panjang Saluran Baik	B	S	RR	RB
1	Sal. Sek. Kedunguling Kiri	335	4,465	3,126	70	10	20	0
2	Sal. Sek. Durung		2,552	1,786	70	10	20	0
3	Sal. Sek. Sumokali		3,780	3,213	85	5	5	5
4	Sal. Sek. Bligo		3,473	2,778	80	10	5	5
5	Sal. Sek. Kedunguling Kanan	671	4,717	3,066	65	15	10	10
6	Sal. Sek. Balepanjang		4,262	2,983	70	10	15	5
7	Sal. Sek. Gelam		2,701	1,756	65	5	25	5
8	Sal. Sek. Pagerwojo		2,300	1,495	65	10	20	5
9	Sal. Sek. Purboyo III	384	1,225	919	75	5	10	10
10	Sal. Sek. Purboyo IIIA		2,200	1,430	65	5	20	10
11	Sal. Sek. Purboyo IIIB		10,100	8,080	80	10	10	0
12	Sal. Sek. Gedangan	56	815	652	80	5	10	5
13	Sal. Sek. Kedungturi	15	4,800	3,600	75	5	5	15
14	Sal. Sek. Ketegan		5,300	3,445	65	20	5	10
15	Sal. Sek. Bandilan		5,100	3,570	70	15	5	10
16	Sal. Sek. Gedangrowo	349	23,673	14,204	60	15	5	20
17	Sal. Sek. Bringin	140	8,500	5,525	65	15	5	15
18	Sal. Sek. Kedungcangkring	233	8,050	5,233	65	15	5	15
19	Sal. Sek. Kemasan I	226	14,500	10,150	70	15	5	10
20	Sal. Sek. Kemasan II	217	10,500	6,300	60	15	5	20
21	Sal. Sek. Putat	339	4000	2,400	60	25	15	0
	Jumlah	**2965**	**127,013**	**85,710**				

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Capain Kinerja Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan Tata Ruag	Prosentase terfasilitasinya permasalahan pertanahan dan Pengadaan Tanah sesuai prosedur	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Prosentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	61	158,34	259,6	63	136	216	65	49,83	76,66
	Persentase peningkatan rumah layak huni		395			501		30	30	100
	Persentase Prasarana Sanitasi yang disediakan sesuai target		417.665		91	93	102	94,5	95,9	100
	Persentase prasarana air bersih yang disediakan sesuai target		137.094 4,01%		3.5	139.141 4,07%	116	5	5,49	100
	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh		249.85 79,95%		67	218.63 69,96%	133	208,63 Ha 66,76% 67-0,24	20,99 Ha 0,029	
Terwujudnya bangunan pemerintah yang layak fungsi	Prosentase bangunan gedung negara yang layak fungsi				30	29,27	97,59	43	42,14	98
Terwujudnya bangunan gedung yang berijin	Prosentase bangunan yang ber-IMB	61%	61% 281.918	100	63% 341.538	148% 438.388	128,4	64,5	64,5	100

Secara garis besar indikator kinerja yang ada pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai realiasi yang selalu meningkat. Secara rinci atas capaian kinerja Tujuan diuraikan dalam target dan capaian kinerja sasaran.

b. Realisasi Kinerja Sasaran

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1:

Meningkatnya efektifitas pemanfaatan ruang

Dengan Target dan Capaian Kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1) Prosentase terfasilitasinya permasalahan pertanahan dan Pengadaan Tanah sesuai prosedur	100	100	100	100%	80	80	100	100	100
2) Prosentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang				63%	136	216	65	49,83	76,66

1) Prosentase terfasilitasinya permasalahan pertanahan dan Pengadaan Tanah sesuai prosedur

Untuk kegiatan pengadaan tanah pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan banyaknya usulan atau pengajuan dari beberapa OPD lain yang membutuhkan.

Uraian	2018	2019	2020
Pengadaan Tanah	3	2	1

Prosentase terfasilitasinya permasalahan pertanahan dan Pengadaan Tanah sesuai prosedur : Perubahan pada target Pengadaan Tanah yang terletak di Kecamatan Taman untuk Perluasan Puskesmas Trosobo, sebelumnya sudah diusulkan

untuk ditiadakan dikarenakan lahan yang diminta oleh pihak Puskesmas Trosobo merupakan tanah Hibah, sehingga proses pengadaan tanah 1 lokasi tidak dapat dilanjutkan. Selain itu, juga diusulkan untuk penghapusan atau dialihkannya anggaran pada kegiatan Pencegahan Permasalahan yang di dalamnya terdapat kegiatan sosialisasi, sedangkan terdapat larangan berkerumun karena adanya covid-19. Akan tetapi sampai pada akhir tahun, anggaran tersebut belum terhapus. Sehingga target dan anggaran tetap tertulis 5 kecamatan.

2) **Prosentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang**

Terjadi penurunan pemanfaatam lahan sesuai dengan rencana tata ruang, dari 200 Ha pada tahun 2019 menjadi 60 Ha pada tahun 2020 (dengan besaran target yang berbeda), Hal tersebut dikarenakan adanya Refocussing anggaran terkait Covid-19 yang seharusnya dilakukan penyesuaian target belum dilakukan, sehinggan realisasi tercapai 30% dari target yang ada. Untuk target yang belum tercapai akan dianggarkan padatahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Uraian	2018	2019	2020
Target	60 Ha	120 Ha	200 Ha
Realisasi	**95 Ha**	**200 Ha**	**60 Ha**

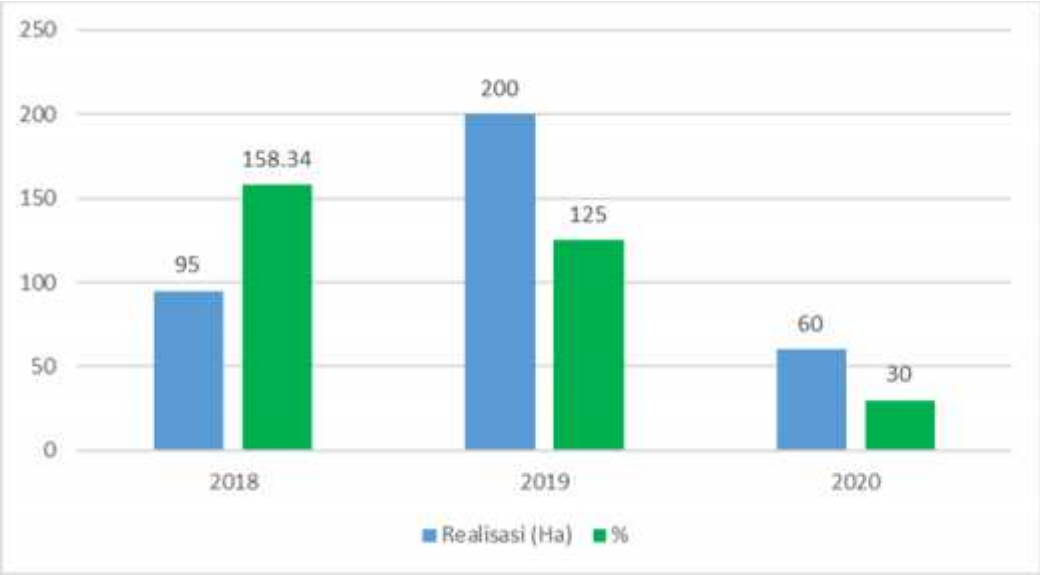

Meski demikian masih terdapat perkembangan pertumbuhan bangunan tidak sejalan dengan Dokumen RTRW. Selain itu minimnya antusias pengembang perumahan untuk menyerahkan PSU, serta dokumen Renja PAK yang disahkan cukup lama, sehingga penyerapan jasa konsultansi di akhir tahun kurang optimal.

Sasaran 2:

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kebutuhan dasar dan kualitas lingkungan yang sehat

Dengan Target dan Capaian Kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase peningkatan rumah layak huni	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Prasarana Sanitasi yang disediakan sesuai target	94,01	94,01	100	94,21	93	99	94,5	95,9	101
Persentase prasarana air bersih yang disediakan sesuai target	0,7	2	286	3,5	4,07	116	5	5,49	110
Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	0,34	0,33	97	0,28	0,04	17	0,24	0,29	120

1) Persentase peningkatan rumah layak huni

Sampai Tahun 2017 kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni selain memperoleh bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) juga memperoleh bantuan dari APBD Propinsi yang dilaksanakan oleh KODIM dan dana Corporation Social Responbility (CSR). Dengan Jumlah rumah sebanyak 443.360 unit, telah dilakukan rehabilitasi sebanyak 442.857 unit rumah tinggal, atau sekitar 99,89% dari jumlah keseluruhan rumah tinggal di Kabupaten Sidoarjo. Pada awal Tahun 2019, adanya pengalihan peningkatan RTLH dari BPMPKB ke P2CKTR terdapat 503 unit RTLH yang direalisasikan mulai tahun 2019.

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target Perbaikan (RTLH)				**100**	**100**	**30**
Realisasi perbaikan RTLH (unit)	159	229	280	395	106	104

Pada Tahun 2020 telah dilakukan realisasi peningkatan rumah layak huni di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 104 Unit dengan APBD 30 unit rumah dan dana APBN program BSPS sebanyak 74 unit rumah. Keberhasilan peningkatan rumah layak huni ini telah banyak dilakukan oleh kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat,

2) Persentase Prasarana Sanitasi yang disediakan sesuai target

Rumah Tangga yang bersanitasi sehat pada Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 berjumlah 468.010 KK. Terdapat kenaikan jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi sehat sebesar 3.405 KK pada Tahun 2019.

Uraian	2017	2018	2019	2020
Target RT		**3.305**	**3.450**	**3.374**
RT bersanitasi sehat	415.057	417.665	421.070	468.010

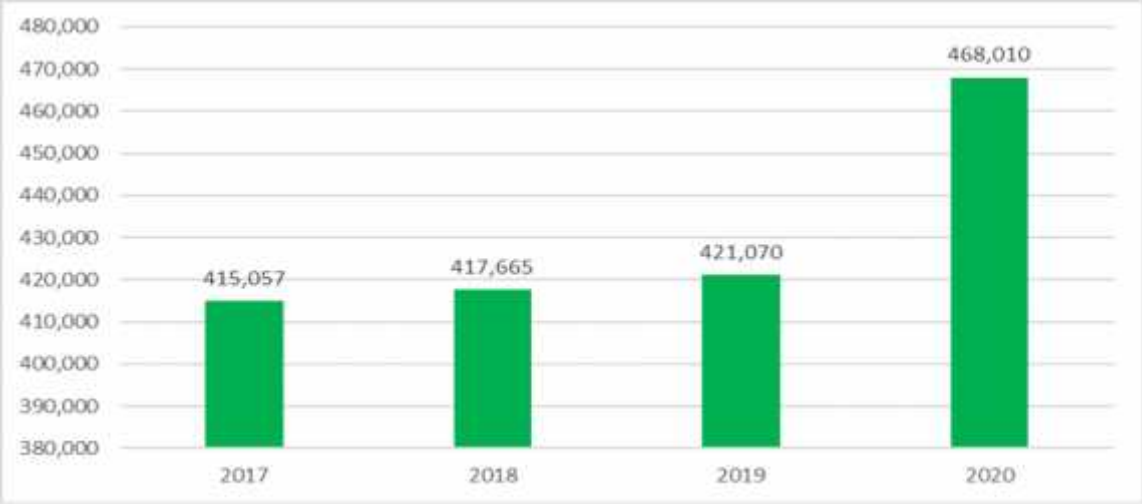

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Sidaorjo keseluruhan sebesar 2.033.764 Jiwa (SIAK Dispendukcapil, Desember 2020) atau 406.753 KK, maka 95,4% penduduk Kabupaten Sidoarjo bersanitasi sehat.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga ber sanitasi sehat, antara lain:

- Pembangunan jamban sehat di wilayah tidak padat penduduk
- Pembangunan IPAL Komunal di wilayah padat penduduk

3) Persentase prasarana air bersih yang disediakan sesuai target

Untuk tahun 2020 jumlah masyarakat yang terlayani sarana air bersih perpipaan yang dibangun oleh PDAM sebesar 151.493 SR dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar 7.898 SR dengan capaian sebesar 5,49% dari target kewajiban OPD sebesar 10% (RISPAM Kabupaten Sidoarjo). Pada awal Tahun 2020 OPD mempunyai target 1.276 Unit, namun terjadi Refocussing anggaran terkait Covid menjadi 676 unit.

Uraian	2017	2018	2019	2020
Target SR	**200**	**760**	**430**	**676**
PEMDA	3.001	4.624	6.671	7.898
PDAM	134.897	137.094	138.128	151.493

SR pengguna air bersih (TOTAL)	137.898	141.718	144.799	159.391

**SR = Sambungan Rumah*

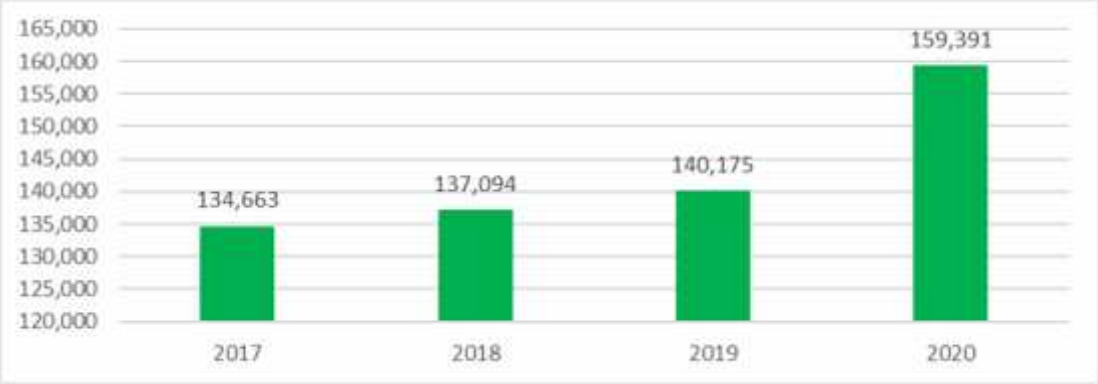

Dapat diketahui bahwa cakupan pelayanan air bersih perpipaan oleh KPSPAM (Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum) di bawah cakupan pelayanan PDAM. Namun dari masing-masing pelayanan baik PDAM maupun Pemda Kabupaten Sidoarjo selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah penduduk terlayani yang cukup signifikan. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Sidaorjo keseluruhan sebesar 2.033.764 Jiwa atau 406.753 KK, maka 32,5% penduduk Kabupaten Sidoarjo terlayani air bersih.

4) Persentase penurunan luasan kawasan kumuh

Hingga tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui SK Bupati No.188/452/404.1.3.2/2015 tanggal 27 April 2015 tentang kawasan permukiman kumuh Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa Luasan kawasan kumuh adalah 301,08 Ha dari luas keseluruhan Kabupaten Sidoarjo 71.424 Ha.

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target						
Luas Kawasan Kumuh (Ha)	301,08	300,03	298,98	249,85	31,22	20,99

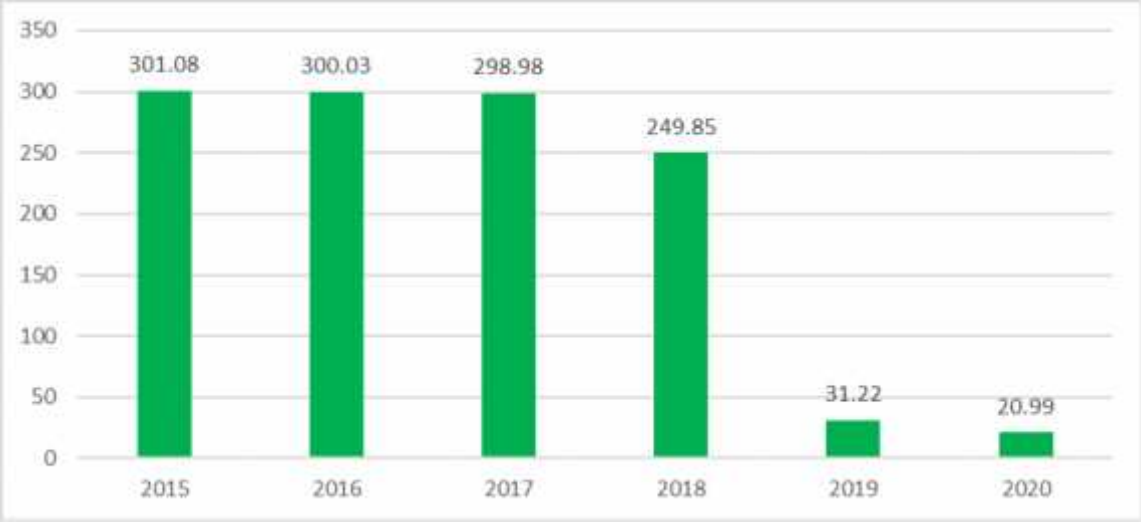

Pada Tahun 2020 terjadi penurunan luas kawasan kumuh sebesar 20,99 Ha dari keseluruhan luasan kawasan kumuh 301,08 Ha. Maka akumulasi luasan kawasan kumuh dari tahun 2015 sampai 2020 sebesar 280,09 Ha.

KECAMATAN	ID LOKASI LINGKUNGAN	LUAS KUMUH pada SK (Ha)	NILAI KEKUMUHAN			PENGURANGAN KUMUH s/d AKIR (Ha)	LUAS KUMUH AKHIR 2020 (Ha)	STATUS KUMUH
			BASELINE 2018	AKHIR 2019	AKHIR 2020			
1 KEDUNGPANDAN	RT015-RW005	4,98	43	42	41	0,00	4,98	KUMUH RINGAN
KEDUNGPANDAN	RT016-RW005	3,59	45	43	42	0,00	3,59	KUMUH RINGAN
2 PLIMBSAN	RT001-RW001	2,70	34	34	34	0,00	2,70	KUMUH RINGAN
3 TAMBAK KALISOGO	RT007-RW004	2,60	30	30	25	0,00	2,60	KUMUH RINGAN
TAMBAK KALISOGO	RT008-RW004	1,71	40	40	35	0,00	1,71	KUMUH RINGAN
TAMBAK KALISOGO	RT009-RW005	2,00	33	33	28	0,00	2,00	KUMUH RINGAN
TAMBAK KALISOGO	RT010-RW005	0,90	30	30	25	0,00	0,90	KUMUH RINGAN
4 SUMBERREJO	RT011-RW003	3,21	21	21	18	3,21	0,00	TIDAK KUMUH
SUMBERREJO	RT012-RW003	3,27	18	17	17	3,27	0,00	TIDAK KUMUH
SUMBERREJO	RT013-RW003	1,10	18	17	17	1,10	0,00	TIDAK KUMUH
SUMBERREJO	RT014-RW004	1,47	22	21	18	1,47	0,00	TIDAK KUMUH
5 SEMAMBUNG	RT001-RW002	1,80	18	18	18	1,80	0,00	TIDAK KUMUH
SEMAMBUNG	RT002-RW002	1,80	21	21	18	1,80	0,00	TIDAK KUMUH
SEMAMBUNG	RT003-RW002	0,75	20	20	18	0,75	0,00	TIDAK KUMUH
SEMAMBUNG	RT004-RW002	1,50	28	28	28	0,00	1,50	KUMUH RINGAN
SEMAMBUNG	RT005-RW002	1,01	36	36	36	0,00	1,01	KUMUH RINGAN
TOTAL		43,39					20,99	

Sumber : BAPPEDA, 2020

Untuk mendukung indikator sasaran tersebut di atas, didukung dengan indikator program yang memberikan konstribusi atas sasaran diatas yaitu:

- Masyarakat bersanitasi sehat
- Masyarakat pengguna air bersih

Secara garis besar indikator kinerja yang ada pada sasaran **Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kebutuhan dasar dan kualitas lingkungan yang sehat** mempunyai realiasi yang selalu meningkat. Meskipun beberapa indikator ada yang belum mencapai target tahunan terkait anggaran yang terbatas.

Permasalahan:

Pada dasarnya tidak dijumpai permasalajan yang signifikan, namun terjadinya Pandemi Covid—19 mengharuskan dilakukan Refocussing anggaran sehingga berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan termasuk kegiatan yang dilakukan bertahap menyesuaikan anggaran yang tersedianya.

Solusi:

Beberapa kegiatan yang terdampak refocussing anggaran, sebagian sudah dilakukan penganggaran kembali pada PAK 2020, namun ada juga yang dianggarkan kembali pada Tahun 2021 mengingat keterbatasan waktu paska pengesahan PAK 2020.

Sasaran 3:
Meningkatnya bangunan pemerintah yang layak fungsi.

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Prosentase bangunan gedung negara yang layak fungsi	30	29,27	97.59	43	42,14	98

Bangunan Gedung yang layak fungsi dimaksudkan adalah bangunan yang dibangun dan memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan. Dalam hal ini Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki peran dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi gedung pemerintah yang telah diajukan oleh OPD

lain sesuai dengan ketentuan (dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00). Selain itu Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang juga memfasilitasi pelayanan pengajuan SLF (Sertifikat Laik Fungsi).

Sasaran 4:

Meningkatnya bangunan gedung yang berijin

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Prosentase bangunan yang ber-IMB		281.918		63	128,4	203,8	64,5	64,5	100

Di tahun 2019 bangunan ber IMB sebesar 438.388 lebih banyak apabila dibandingkan dengan bangunan ber IMB di tahun 2018 sebanyak 281.918, dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 156.470 bangunan yang ber IMB. Kenaikan bangunan ber IMB disebabkan :

a. Kesadaran masyarakat akan perijinan bangunan.
b. Adanya ketentuan yang mengharuskan bangunan ber-IMB untuk pengajuan ke Bank.
c. Kemudahan pelayanan perijinan berbasis Informasi Teknologi / IT.

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target					**341,538**	**409,845**
Bangunan ber-IMB	183.025	277.999	280.409	281.918	438.388	439.611

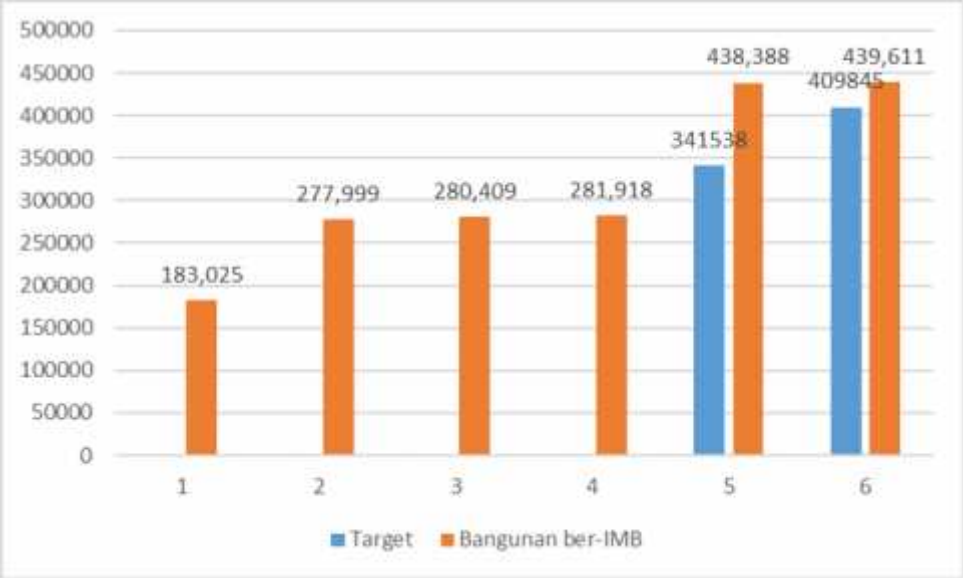

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah bangunan ber IMB adalah :

a. Masih banyak pengajuan IMB yang tidak sesuai kondisi di lapangan
b. Perkembangan pertumbuhan bangunan tidak sejalan dengan RTRW

Sedangkan apabila diperbandingkan dengan target di tahun 2019 sebanyak 438.388 bangunan, maka tercapai sekitar 100%.

Permasalahan :

1. Subyek data masih banyak yang belum tahu terkait pemberlakuan perda No. 4 Tahun 2012 Tentang IMB di wilayah kabupaten Sidoarjo.
2. Maraknya pembangunan-pembangunan tanpa memiliki IMB.
3. Belum tersedianya data base tenaga kerja terampil tersertifikasi.

Solusi:

1. Bekerjasama dengan instansi terkait guna melakukan kegiatan sosoalisasi Perda No.4 Tahun 2012 Tentang IMB.
2. Melakukan pemberian teguran 1,2,3, penyegelan dan pembongkaran bangunan yang tidak ber-IMB.
3. Permintaan data rekanan pada asosiasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan OPD Penerbit IUJK.

c. Program dan Kegiatan

1. Dalam mendukung capaian sasaran **Meningkatnya bangunan pemerintah yang layak fungsi** dengan indikator Prosentase bangunan gedung negara yang layak fungsi didukung dengan **Program Penataan Bangunan** dengan anggaran sebesar Rp.136.714.780.383,- dan terealisasi sebesar Rp.88.760.954.525,- atau 64,92%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Prosentase bangunan gedung negara yang layak fungsi	43%	42,14%	98%

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Penyusunan Petunjuk teknis dan perencanaan teknis tata bangunan	Jumlah perencanaan teknis tata bangunan yang disususn sesuai ketentuan teknis tata bangunan	57 Dokumen	57 Dokumen	100%
Pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor lintas SKPD	Jumlah gedung/kantor Pemerintah Daerah yang terbangun/	100 Bangunan	97 Bangunan	97%
Pengawasan/ pengendalian teknis	Jumlah pengawasan/pengendalian teknis	300 Orang	300 Orang	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Penyusunan Petunjuk teknis dan perencanaan teknis tata bangunan	643.324.170,00	611.729.384,00	95,09
Pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor lintas SKPD	135.023.427.671,00	87.165.818.141,00	64,56
Pengawasan/pengendalian teknis	138.300.000,00	123.540.000,00	89,33

Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat (DBHCHT)	909.728.542,00	859.867.000,00	94,52

2. Dalam mendukung capaian sasaran **Meningkatnya bangunan gedung yang berijin** dengan indikator Prosentase bangunan yang ber-IMB didukung dengan **Program Pengawasan Bangunan** dengan anggaran sebesar Rp.1.199.913.360,- dan terealisasi sebesar Rp.1.058.368.882,- atau 88,2%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Prosentase bangunan yang ber-IMB	63%	63%	100%

Permasalahan:

1. Subyek data masih banyak yang belum tahu terkait pemberlakuan perda No. 4 Tahun 2012 Tentang IMB di wilayah kabupaten Sidoarjo.
2. Maraknya pembangunan-pembangunan tanpa memiliki IMB.
3. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum mempunyai peta per wilayah/Kecamatan dan data base terhadap rumah yang seharusnya ber IMB dan permasalahan yang berhubungan dengan IMB rumah yang dihuni

Solusi:

1. Melakukan inventarisasi/ indentifikasi/ pemetaan dan penyusunan/ membangun data base terhadap rumah yang harus/ wajib ber IMB
2. Bekerjasama dengan instansi terkait guna melakukan kegiatan sosoalisasi Perda No.4 Tahun 2012 Tentang IMB.
3. Melakukan pemberian teguran 1,2,3, penyegelan dan pembongkaran bangunan yang tidak ber-IMB.
4. Permintaan data rekanan pada asosiasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan OPD Penerbit IUJK.

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi	Jumlah Pembinaan terhadap pengusaha jasa konstruksi	100 Orang 90 Sertifikat	50 sertifikat	55,55%
	Jumlah pekerja terampil yang tersertifikasi			
Pendataan dan evaluasi bangunan	Jumlah bangunan yang terdata dan yang dievaluasi perijinannya	500 Bangunan	500 Bangunan	100%
Operasional pengawasan bangunan	Jumlah bangunan yang sesuai dengan IMB yang diterbitkan	450 Bangunan	723 Bangunan	160,67%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi	180.951.160,00	147.796.660,00	81,68
Pendataan dan evaluasi bangunan	209.500.000,00	198.637.500,00	94,82
Operasional pengawasan bangunan	809.462.200,00	711.934.722,00	87,95

3. Dalam mendukung capaian sasaran **Meningkatnya efektifitas pemanfaatan ruang** dengan indikator 1) Prosentase terfasilitasinya permasalahan pertanahan dan Pengadaan Tanah sesuai prosedur dan 2) Prosentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang didukung dengan **Program Penataan Ruang, Pengadaan Tanah, dan Fasilitasi Permasalahan Pertanahan** dengan anggaran sebesar Rp.9.716.415.300,- dan terealisasi sebesar Rp.8.507.014.321,- atau 87,55%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Prosentase terfasilitasinya permasalahan pertanahan dan Pengadaan Tanah sesuai prosedur	100	100	100
Prosentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	65%	49,83	76,66

Permasalahan:

1. Minimnya antusias pengembang perumahan untuk menyerahkan PSU ke Pemeerintah Daerah
2. Dokumen PAK dalam proses pengesahan cukup lama, dan OPD baru dapat melaksanakan mulai Bulan November Tahun 2020, sehingga terdapat beberapa proses pelaksanaan kegiatan yang terhambat ataupun tidak selesai.

Solusi:

1. Memberikan informasi terkait dengan adanya fasilitas penyelesaian pertanahan, serta melakukan kordinasi secara internal maupun eksternal yaitu dengan BPN dan pihak lain yang terkait untuk pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang harus dianggarkan kembali pada Tahun 2021, akibat dampak Refocussing anggaran dan kurang waktu pengerjaan PAK.

Program tersebut didukung oleh 7 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Fasilitasi Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Perangkat Daerah	Prosentase permasalahan pertanahan yang ditangani / difasilitasi	2 lokasi	1 lokasi	100%
Pencegahan permasalahan Pertanahan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan permasalahan pertanahan	5 Kecamatan	1 kecamatan	20%
Penyusunan dokumen database penanganan pertanahan	Tersedianya dokumen penanganan pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	Terselesaikannya permasalahan pertanahan	5 Kasus	0 kasus	0%
Penyusunan rencana tata ruang teknis kota	Jumlah dokumen rencana teknis tata ruang	200 Ha	60 Ha	30%
Pemanfaatan ruang teknis kota	Jumlah rekomendasi teknis pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan teknis	82 Dokumen	82 Dokumen	100%

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah kecamatan sasaran pelaksanaan pengendalian tata ruang	4 Kecamatan	4 Kecamatan	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Fasilitasi Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Perangkat Daerah	8.115.400.000,00	7.129.860.455,00	87,86
Pencegahan permasalahan Pertanahan	85.517.500,00	13.476.000,00	15,76
Penyusunan dokumen database penanganan pertanahan	53.450.000,00	50.162.000,00	93,85
fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	72.750.000,00	0,00	-
Penyusunan rencana tata ruang teknis kota	452.957.800,00	411.252.600,00	90,79
Pemanfaatan ruang teknis kota	419.320.000,00	412.096.000,00	98,28
Pengendalian pemanfaatan ruang	517.020.000,00	490.167.266,00	94,81

4. Dalam mendukung capaian sasaran **Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kebutuhan dasar dan kualitas lingkungan yang sehat** didukung dengan **Program Pembangunan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman** dengan anggaran sebesar Rp.56.765.805.488,- dan terealisasi sebesar Rp.34.934.410.341,- atau 61,54%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Persentase peningkatan rumah layak huni	100 %	100 %	100 %
Persentase Prasarana Sanitasi yang disediakan sesuai target	94,5 %	95,9 %	101 %
Persentase prasarana air bersih yang disediakan sesuai target	5 %	5,49 %	110 %
Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	0,24 %	0,029 %	12 %

Permasalahan:

1. Adanya Refocussing Aggaran terkait Covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan harus ditunda, sehingga dalam pelaksanaan pencapaian target sedikit terhambat.
2. Pengembalian anggaran Refocussing pada PAK 2020 dirasa kurang efektif, mengingat Dokumen PAK dalam proses pengesahan cukup lama, dan OPD baru dapat melaksanakan mulai Bulan November Tahun 2020.

Solusi:

Beberapa kegiatan yang kurang maksimal dalam pencapaian targetnya akan dianggarkan kembali pada Tahun 2021.

Program tersebut didukung oleh 15 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Monev penyediaan prasarana permukiman	jumlah sarana dan prasarana permukiman yang dimonev	250 Orang	0	0
Monev Penyediaan Prasarana Sanitasi dan Air Bersih	Jumlah warga yang memiliki sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih yang dimonev	250 Orang	0	0
Pembangunan sarana dan prasarana Pemukiman (termasuk DAK, RSH, Pencegahan dan Penanganan Kawasan Kumuh dan Pemukiman Nelayan)	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki sarana prasarana Permukiman yang sehat	288 Paket	288 Paket	100
Pemeliharaan prasarana permukiman	Panjang jalan lingkungan yang dipelihara	0	0	0
	Jumlah saluran drainase yang dipelihara	0	0	0
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi	Jumlah Sambungan rumah yang terpasang air bersih	15 Paket	15 paket	100
	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sanitasi yang sehat	58 Paket		
Rehab Rumah Tidak Layak Huni	KK yang memiliki rumah layak huni	30 Rumah	30 rumah	100
Operasional dan pemeliharaan	Jumlah bangunan yang mendapatkan layanan	864 Bangunan	1860	215,3

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
pengelolahaan air limbah domestik	pengelolaan lumpur tinja			
Monev penyediaan prasarana perumahan	Jumlah sarana prasarana perumahan yang dimonev	0	0	0
Operasional Pelayanan permakaman	Jumlah retribusi pelayanan pemakaman	100 %	100 %	100
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Pemakaman	6 Paket	6 paket	100
Operasional pengelolaan rusunawa	Prosentase operasional Rusunawa yang dipelihara dan dilaksanakan	960 Hunian	960 Hunian	100
Pembangunan/Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Perumahan	Jumlah dan jenis sarana prasarana utilitas yang dibangun	35 Paket	35 paket	100
Pembinaan tata lingkungan perumahan	Jumlah perumahan yang mendapat pembinaan tata lingkungan	200 Orang	0	0
Perencanaan Teknis Prasarana perumahan	Jumlah dokumen perencanaan teknis prasarana perumahan	4 Dokumen	3 dokumen	75

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Monev penyediaan prasarana permukiman	324.030.000,00	51.030.000,00	15,75
Monev Penyediaan Prasarana Sanitasi dan Air Bersih	116.850.000,00	107.991.632,00	92,42
Pembangunan sarana dan prasarana Pemukiman (termasuk DAK, RSH, Pencegahan dan Penanganan Kawasan Kumuh dan Pemukiman Nelayan)	4.923.464.478,00	3.994.297.261,00	81,13
Pemeliharaan prasarana permukiman	789.054.800,00	191.243.315,00	24,24
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi	5.711.139.285,00	1.976.490.593,00	34,61

KEGIATAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Rehab Rumah Tidak Layak Huni	591.177.720,00	490.588.672,00	82,98
Operasional dan pemeliharaan pengelolahaan air limbah domestik	990.783.700,00	813.307.604,00	82,09
Monev penyediaan prasarana perumahan	64.697.000,00	56.372.000,00	87,13
Operasional Pelayanan permakaman	1.493.746.600,00	1.361.987.732,00	91,18
Operasional pengelolaan rusunawa	6.700.369.820,00	6.055.427.436,00	90,37
Pembangunan/Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Perumahan	34.980.779.285,00	19.758.615.096,00	56,48
Pembinaan tata lingkungan perumahan	0,00	0,00	-
Perencanaan Teknis Prasarana perumahan	79.712.800,00	77.059.000,00	96,67
Penyuluh dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	0,00	0,00	-
Kegiatan penyediaan/pemeliharaan saluran air, sanitasi dan air bersih (DBHCHT)	0,00	0,00	-

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Realisasi Kinerja Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Terwujudnya Sidoarjo yang aman tertib dan tentram	Indeks Rasa Aman	71,35	71,67	100,45	72,44	72,44	100	73,89	73,77	99,84	75,37	76,01	100,85	76,18	76,03	99,80

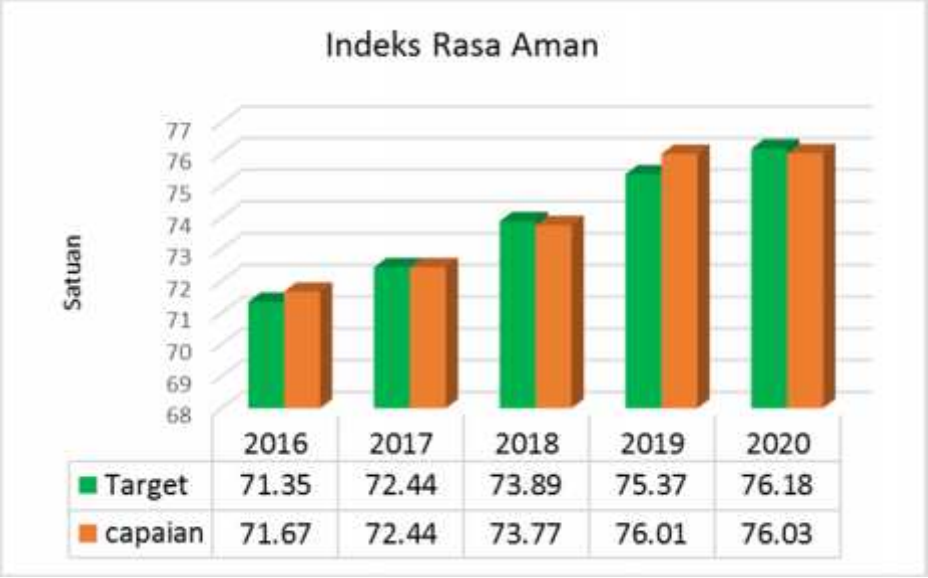

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 tidak tercapai, Capaian kinerja yang tidak sepenuhnya optimal dikarenakan pada tahun

2020 adalah tahun politik dengan terselenggaranya pilihan Kepala Daerah dan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Sidoarjo sangat mempengaruhi hasil survei terhadap indeks rasa aman yang ada di kabupaten Sidoarjo, disamping itu pandemi covid 19 masih menjadi tantangan besar bagi warga Sidoarjo sampai dengan penghujung Tahun 2020. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya penanganan covid 19 dengan berbagai macam kebijakan strategis seperti pemberlakuan PSBB, New Normal , PPKM serta edukasi 3M (Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) terus dilakukan untuk menekan penyebaran virus tersebut.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 pada angka stagnasi, capaian angka tersebut sudah cukup baik sebagai ukuran tingkat rasa aman/nyaman/ketentraman yang dirasakan warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari.

b. Realisasi Kinerja Sasaran

Untuk mencapai Tujuan tersebut diatas sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat, dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Rasio jumlah anggota linmas terhadap Jumlah RT	1 : 0,86	1 : 0,86	100	1 : 0,90	1 :0,90	100	1 :0,95	1 :0,95	100	1 : 1	1 : 1	100	1 :1,1	1 : 1,1	100
Persentase pos kamling aktif	nA	nA	nA	nA	nA	nA	30 %	30 %	100	32 %	32 %	100	32 %	32 %	100

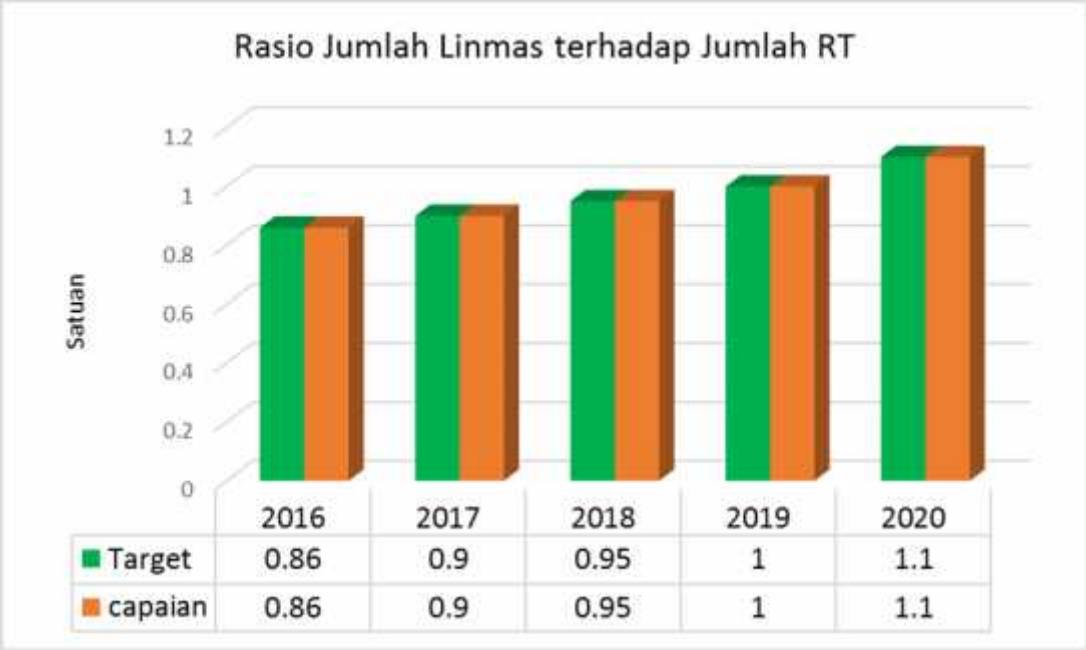

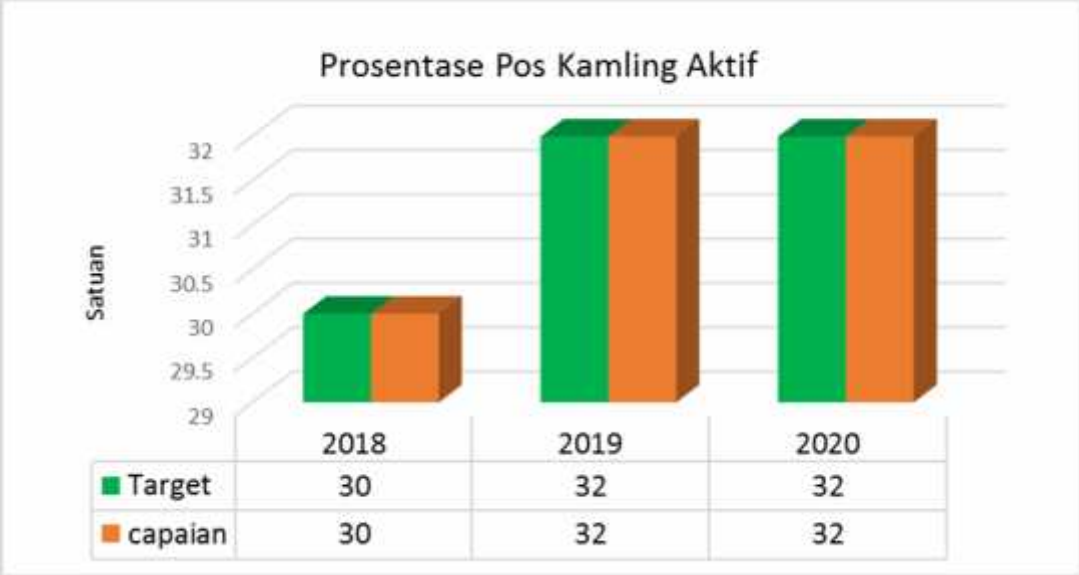

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 tercapai, hal ini dikarenakan pembinaan kolektif dan pelatihan satlinmas seperti simulasi pengamanan pemilu dan simulasi tanggap bencana dan Optimalisasi pengerahan kepada masyarakat berkaitan tentang urgensi keberadaan satlinmas dan pos kamling.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan hal ini dikarenakan Optimalisasi masing-masing Kegiatan dengan memaksimalkan keberadaan Koordinator Lapangan (KORLAP) yang membawahi beberapa kecamatan

Apabila dibandingkan dengan proyeksi target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 92,15 % dari target, melalui upaya sosialisasi terhadap warga masyarakat perihal urgensi satlinmas dalam pengendalian keamanan lingkungan, ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan tanggap bencana. Sasaran sosialisasi ditujukan pada Desa/Kelurahan yang masih minim jumlah personil satlinmasnya.

Permasalahan :

1. Keterbatasan personil dan SDM pada bidang Linmas pada aspek koordinator lapangan sehingga kurang memadai untuk intensitas koordinasi, sosialisasi dan mobilisasi linmas di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo .
2. Rendahnya minat masyarakat terhadap linmas sehingga menyulitkan proses perekrutan
3. Pemerintah desa/kelurahan masih banyak belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan linmas.
4. Rata – rata personil anggota linmas sudah lanjut usia.

Solusi :

1. Optimalisasi fungsi koordinator lapangan dalam pengaturan kegiatan sosialisasi dan mobilisasi linmas *;*
2. Optimalisasi fungsi pembinaan baik terhadap personil linmas dan masyarakat pada umumnya perihal fungsi linmas.

Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran 1 didukung dengan program dan kegiatan sbb : Program Perlindungan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.529.223.730,- dan terealisasi sebesar Rp.481.223.137,- atau 90,93% dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Rasio jumlah anggota linmas terhadap Jumlah RT	1 : 1,1	1 : 1,1	100%
Persentase pos kamling aktif	32%	32%	100%

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pengerahan dan pengendalian satuan linmas	Jumlah anggota Satlinmas yang aktif	500 Orang	500 Orang	100	146.321.730,00	143.263.605,00	97,91
Pembinaan operasional dan pengembangan satuan linmas	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti pembinaan	200 personil	200 personil	100	184.832.000,00	181.264.742,00	98,07
Pembinaan operasional dan pengembangan satuan linmas	Jumlah Satlinmas yang dibina	300 orang	300 orang	100	198.070.000,00	197.772.895,00	99,85

C. Sasaran 2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan daerah, dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani	100%	100%	100%
Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan	100%	100%	100%

Ruang Lingkup penegakan peraturan perundang – undangan daerah salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadinya pelanggaran peraturan daerah dengan langkah penindakan represif yustisial.

Bentuk pelaksanaannya diimplementasikan dengan penyelenggaraan Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi pelaku pelanggaran peraturan daerah.

Jumlah penyelesaian pelanggaran peraturan daerah melalui proses sidang tipiring pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Rekap Data Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pelanggar Protokol Kesehatan yang Bertempat Di GOR Sidoarjo Tahun 2020

No	Tanggal	Lokasi Sidang Tpiring	Jumlah Pelanggar Keseluruhan		Pelanggar yang mengikuti sidang		Pelanggar yang hadir sidang namun belum membayar denda	Jumlah Pelanggar yang tidak hadir sidang (verstek)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(7)	(9)
1	14 September 2020	Depan Poslantas Waru Jl. Raya Waru Sidoarjo	27	Orang	27	Orang	-	-
		Taman Asean Jl. Raya Pagerwojo Buduran	35	Orang	35	Orang	-	-
2	15 September 2020	Depan Ruko Square Garden Sidodadi	60	Orang	60	Orang	-	-
3	17 September 2020	Lapangan Tennis Graha Tirta Waru	105	Orang	105	Orang	-	-
4	21 September 2020	Kantor Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman	8	Orang	8	Orang	-	-
5	24 September 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	789	Orang	488	Orang	-	301 orang
6	1 Oktober 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	719	Orang	419	Orang	-	300 orang
7	8 Oktober 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	387	Orang	173	Orang	-	214 orang
8	15 Oktober 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	367	Orang	188	Orang	-	179 orang
9	22 Oktober 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	704	Orang	323	Orang	-	381 orang
10	5 November 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	912	Orang	442	Orang	-	470 orang
11	12 November 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	509	Orang	196	Orang	-	313 orang
12	19 November 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	574	Orang	247	Orang	-	327 orang
13	26 November 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	618	Orang	288	Orang	-	330 orang
14	3 Desember 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	562	Orang	284	Orang	-	278 orang
15	17 Desember 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	128	Orang	47	Orang	-	81 orang

16	14 Januari 2021	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	595	Orang	287	Orang	-	308 orang
17	28 Januari 2021	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	2,376	Orang	1,347	Orang	9 orang	1.020 orang
18	4 Pebruari 2021	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	1,333	Orang	653	Orang	21 orang	680 orang
Jumlah Pelanggar			**10,808**	**Orang**	**5,617**	**Orang**	**30 orang**	**5,182 orang**

Realisasi Penyerapan Anggaran Yang Digunakan, sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
1.	BBM, Giat Covid 19	52.500.000,00	52.485.519,00
2.	Perjalanan dinas dalam daerah, Giat Covid 19	400.800.000,00	400.630.000,00
3.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	637.000.000,00	480.100.000,00
4.	Nasi Kotak, Giat Covid 19	825.480.000,00	824.340.000,00
5.	Bantuan Transport, Polres- Covid 19	615.000.000,00	614.250.000,00
6.	Bantuan Transport, TNI Polri terkait penanganan covid 19	3.600.000.000,00	1.558.525.000,00
7.	Bantuan Transport TNI Covid 19	427.500.000,00	427.500.000,00
		6.558.280.000,00	**4.357.830.519,00**
		SALDO	**2.200.449.481,00**

Dasar Hukum yang digunakan dalam penanggulangan penyebaran covid-19 yang dijadikan acuan penindakan, antara lain :

1. Perda No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan Perda No 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
2. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Covid 19 di kabupaten Sidoarjo.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
4. Keputusan Gubernur Jawa timur Nomor : 188/7/KPTSP/013/2013 tanggal 9 Januari 2021 tentang PPKM untuk pengendalian penyebaran corona virus Disease 2019.

5. Peraturan Gubernur Jawa timur Nomor : 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019
6. Surat Edaran Nomor 440/189/438.1.1.3/2021 tanggal 10 Januari 2021 tentang PPKM untuk pengendalian dan penyebaran corona virus disease 2019.

Kegiatan operasi yustisi gabungan antara Polresta, kodim dan Satpol PP di laksanakan dalam rangka penerapan PSBB dan PPKM dan menekan pelanggaran protokol kesehatan serta penyebaran covid-19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo dimana dalam kegatan operasi yustisi dan gabungan tersebut dikenakan sanksi/denda serta penyitaan kartu identitas/KTP, bahwa masyarakat yang kedapatan melanggar protokol kesehatan akan melaksanakan sidang tipiring bertempat di GOR Indoor Sidoarjo Disamping melaksanakan operasi gabungan, Satpol PP juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang terjaring tidak menggunakan masker untuk selalu menggunakan masker setiap keluar rumah serta pengelola usaha selalu mentaati peraturan protokol kesehatan (3M).

Permasalahan :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan (3M).
2. Pelanggaran peraturan daerah hanya diberikan sanksi denda, tidak diterapkan sanksi kurungan.

Solusi :

1. Optimalisasi fungsi pengawasan, upaya preventif dan pembinaan berkaitan dengan pencegahan potensi pelanggaran perda .
2. Optimalisasi dan koordinasi dengan Instansi pendukung {Kejaksaan, Pengadilan Negeri (dalam penyelenggaraan siding)}

Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran 2 didukung dengan program dan kegiatan sbb : Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.948.500.300,- dan terealisasi sebesar Rp.913.690.338,- atau 96,33 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah peserta pembinaan penegakan peraturan daerah	200	200	100	437.413.510,00	423.328.794,00	96,78
Fasilitasi penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah	Persentase penanganan kasus pelanggaran peraturan daerah yang difasilitasi	100%	100%	100	511.086.790,00	488.752.297,00	95,63

D. Realisasi Kinerja Sasaran 2

Untuk mencapai sasaran 2 didukung dengan program dan kegiatan sbb : Program Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.13.574.965.700,- dan terealisasi sebesar Rp.13.060.474.499,- atau 96,21 %, dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Jumlah titik lokasi yang dilakukan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	45	46	102%
Jumlah personil yang ditugaskan dalam upacara HUT dan Jambore	75	0	0%
Jumlah asset yang diamankan	3	3	100%

Penindakan terhadap gangguan tibumtranmas pada tahun 2020 fokus utamanya masih sama dengan tahun 2019 yaitu penertiban keberadaan bangunan liar dan sterilisasi lokasi dari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini guna mendukung program-program yang dilakukan instansi/OPD teknis seperti pengendalian banjir, penataan parkir dan estetika kota.

Sebagai upaya lanjutan dari tahun sebelumnya, konsentrasi penertiban PKL terfokus pada Jl, Raya Gajah Mada, Jl. Raden Patah dan Jl. Sisingamangaraja. sepanjang Jl. Raya Waru dan Jl. Raya Porong, Jl. Raya Gading Fajar, Sepanjang Taman Pinang dan Pondok Jati serta area Gor dan Jl. Raden Patah. Khususnya upaya sterilisasi PKL yaitu memindahkan PKL ke tempat relokasi di lahan eks makam cina. Sedangkan penertiban bangli dilakukan di Jl. Raya Sumorame, Candi.

Pada tahun 2020 fokus kegiatan operasi dititikberatkan pada operasi protokol kesehatan dalam upaya pencegahan, penyebaran Covid -19 dimana kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk patroli bersama berskala besar yang dilakukan oleh Satpol PP bersama dengan Dinas Perhubungan, Polresta Sidoarjo dan Kodim 0186 dengan sasaran pedagang atau pemilik lapak yang melanggar ketentuan PSBB serta masyarakat yang

berkunjung ke warung – warung/rumah makan dengan makan ditempat (tidak dibungkus atau dibawa pulang) dan masyarakat yang beraktifitas diluar tanpa menggunakan masker, serta masyarakat yang beraktifitas diluar penetapan jam malam, terhadap para pelanggar

dilakukan penindakan dengan cara kerja sosial sebagai upaya pembinaan dan menulis surat pernyataan untuk tidak mengulangi, Kegiatan patroli bersama berskala besar akan tetap dilakukan dengan penekanan penegakan PSBB melalui penindakan dan pemberian sanksi terhadap para pelanggar peraturan terkait pelaksanaan PSBB di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Permasalahan :

Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk turut menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan ketidakpatuhan pelaku usaha non formal dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama pada titik-titik lokasi yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum.

Solusi :

Peningkatan intensitas dan optimalisasi penjagaan patrol dan penjagaan di titik – titik lokasi rawan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga tibumtranmas.

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah titik lokasi yang dilakukan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	45	46	102	11.861.486.900	11.411.936.546	96,21
Penyelenggaraan dan partisipasi personil pengendali ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah personil yang ditugaskan dalam upacara HUT dan Jambore	75	0	100	45.000.000	0	0
Pengamanan kegiatan dan asset daerah	Jumlah asset yang diamankan	3	3	100	1.668.478.800	1.633.449.556	97,90

a. Realisasi Kinerja Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALI SA SI	%	TARGET	REALI SA SI	%	TARGET	REALI SA SI	%
Mening katkan pence gahan terha dap potensi konflik yang terjadi di masya rakat	Persentase potensi konflik yang dapat dicegah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Mening katkan partisi pasi masya rakat dalam menggunakan hak politik nya	Persentase partisipasi masyara kat dalam PEMILU (Pilkada, Pilgub, Pilpres dan Pileg)	75%	77%	102.67 %	80%	83%	103.75 %	85%	71.61%	84%

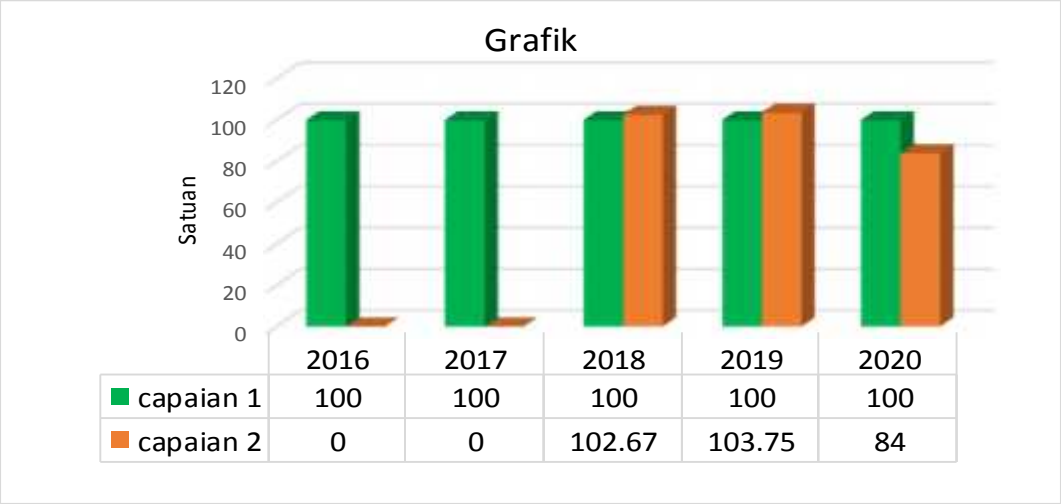

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase potensi konflik yang dapat dicegah mencapai 100% dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan, hal ini dikarenakan bahwa Kabupaten Sidoarjo aman terkendali tanpa ada konflik, hal ini dikarenakan potensi konflik yang terjadi dapat dicegah dan ditangani secara cepat dan tanggap sehingga tidak sampai terjadi konflik.

Pada capaian Indikator kinerja Persentase partisipasi masyarakat dalam PEMILU (Pilkada, Pilgub, Pilpres dan Pileg) mencapai 84% dikategorikan sedang, hal ini menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Sidoarjo sudah banyak yang faham akan kesadaran dalam memilih atau partisipasi Pilkada.

b. Realisasi Kinerja Sasaran

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya pencegahan terhadap potensi konflik yang terjadi di masyarakat

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REA LISASI	%	TARGET	REA LI SASI	%
Persenta se potensi konflik yang dapat dicegah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

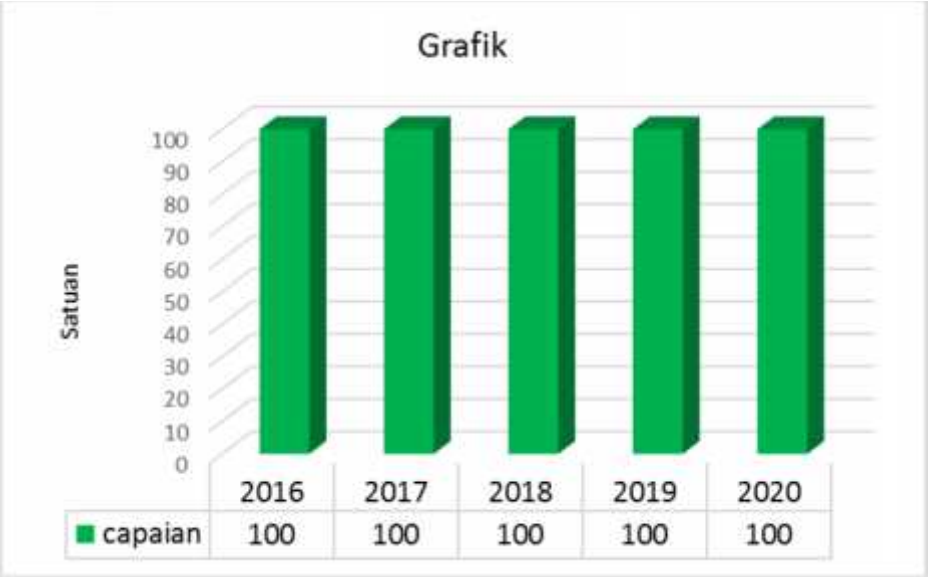

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan bahwa Kabupaten Sidoarjo aman terkendali tanpa ada konflik, hal ini dikarenakan potensi konflik yang terjadi dapat dicegah dan ditangani secara cepat dan tanggap sehingga tidak sampai terjadi konflik

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 tidak mengalami perubahan, hal ini dikarenakan bahwa Kabupaten Sidoarjo aman terkendali tanpa ada konflik, hal ini dikarenakan potensi konflik yang terjadi dapat dicegah dan ditangani secara cepat dan tanggap sehingga tidak sampai terjadi konflik.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 100% dari target, hal ini menandakan bahwa program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada sasaran 1 mencapai target sesuai yang diharapkan

Permasalahan :

Adanya refocusing anggaran dan pembatasan pengumpulan masa / peserta sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat

Solusi :

Membuat KAK lebih detail dan disesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid-19

Adapun laporan kegiatan pada tabel berikut :

No	URAIAN	Tempat
1	Unjuk Rasa menuntut Sdr. Andy Hendro Wijaya sekarang juga Usut TPPU (Tindak pidana pencucian Uang)	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Jl. Raya Juanda
2	Kecelakaan antara Kereta api Mutiara Timur (dari arah Utara/Sby) dgn mobil minibus jenis Expander Nopol W 1277 VF yg dikemudikan oleh Sdr. Hamsun d.a Ds. Putat Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo	perlintasan rel KA jl. Raya Tanggulangin Ds. Kali Tengah Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo
3	Hujan Deras disertai dengan Angin Kencang sehingga mengakibatkan atap Rusunawa Kodam V/Brw bagian barat terangkat sebagian. Aksi Unras lanjutan oleh F-SP, RTMM, KSPSI yang diikuti sekitar 100 orang, sebagai Koorlap Sdr. Roni, Sdr Hery, Sdr Sugiono.	Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo

4	Adapun tuntutan Aksi Unras sbb : A. Karyawan menuntut pekerjakan kembali 26 Karyawan yang telah di PHK tanpa sebab/sepihak. B. Kesepakatan yang telah disepakati oleh management PT. PMI (PT. Putra Mandiri Intipack), pada tanggal 29 September 2019 dengan buruh agar di penuhi. C. Agar pihak perusahaan menjalankan PB.	PT. PMI (PT. Putra Mandiri Intipack), Ds. Watesari Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo
5	Unras oleh SP/SB yg tergabung dalam SARBUMUSI (Sarikat Buruh Muslimin Indonesia) diikuti sekitar 600 orang penanggung jawab Sdr. Kujairi (Ketua Sarbumusi Sidoarjo), diikuti sekitar 600 orang penanggung jawab Sdr. Kujairi (Ketua Sarbumusi Sidoarjo), dalam rangka mengawal proses penegakan hukum ketenagakerjaan yang ada di Disnaker Kab Sidoarjo, yaitu atas permasalahan di PT. Hair Star Indonesia, PT. Aneka Pratama Plastindo, PT Toya Indo Manunggal & PT Sinar Rajawali Spring dan perkara-perkara lainnya, dg tuntutan : Tegakan keadilan kepada para buruh sesuai hukum ketenagakerjaan.	Pendopo Sidoarjo Jl. Cokro Negoro No. 1 Kab. Sidoarjo
6	Aksi unjuk rasa oleh LSM GMBI (Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) yang diikuti sekitar 65 orang dengan korlap Sdr. Brewok, Prayit, Joko Samudro dan Sdr. Jadok. ➢ Tuntutan dari LSM-GMBI kabupaten Sidoarjo Sebagai berikut : 1. Gerakan moral sebagai bentuk. 2. Setia kepada Pancasila dalam mendorong DPRD Kabupaten Sidoarjo agar segera merekomendasikan kepada DPR RI untuk tidak merubah Pancasila dan menghentikan RUU HIP (Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila) Unjukrasa Warga Ds. Candipari Kec Porong yg diikuti 30 orang, pemilik Toko Pracangan menolak pembangunan Indomart di Ds Candipari Kec Porong, Korlap Ibu Ida Aksi Unras oleh karyawan PT. Toya Indo Manunggal, PT. Hair Star Indonesia, PT. Aneka Pratama Plastindo dan PT. Sinar Rajawali Spring yang tergabung dalam	Depan kantor DPRD Sidoarjo Jalan Sultan Agung no 39 Kabupaten Sidoarjo

	Sp / SB Sarbumusi (sarikat buruh muslim Indonesia) diikuti sekitar 500 orang penanggung jawab H. Kujari (Ketua Sarbumusi Jatim)	
7	Unjuk rasa buruh -+ 200 massa aksi yang tergabung dalam DPC SARBUMUSI Kab. Sidoarjo dengan penanggungjawab Sdr. H. Kujairi (Ketua DPC SARBUMUSI SIDOARJO) 081334399646. Adapun yg menjadi tuntutan : 1. Penyelesaian permasalahan terkait pihak perusahaan melakukan PHK (Pemutusan	Desa Candipari Kec Porong Kab Sidoarjo
8	Hubungan Kerja) secara sepihak terhitung tanggal 23 Maret 2020 terhadap 329 orang karyawan PKWTT tergabung didalam Basis Sarbumusi (Sarekat Buruh Muslimin Indonesia). 2. Terkait pembayaran upah dan THR (Tunjangan Hari Raya) dibawah ketentuan perundang - undangan yg sampai saat ini belum ada kesepakatan dengan management.	Polda Jatim Jl. A Yani Surabaya
9	Unras oleh karyawan PT. Hair Star Indonesia, yg tergabung dalam SP / SB Sarbumusi (sarikat buruh muslim Indonesia) diikuti sekitar 150 orang, penanggung jawab H. Kujaari (Ketua Sarbumusi Sidiarjo). Adapun tuntutan sebagai berikut : ➢ Meminta PT. Hair Star Indonesia membayar pesangon karyawan yg di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak. ➢ Agar pihak managemant PT. Hair Star Indonesia membayarkan THR (Tunjangan Hari Raya) dibawah ketentuan perundang - undangan dan menolak karyawan di PHK. dst	PT. Hair Star, Ds. Wedi Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo

Sasaran 2: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REA LISA SI	%	TARGET	REA LISA SI	%	TAR GET	REALI SASI	%
Persentase partisipasi masyarakat dalam PEMILU (Pilkada, Pilgub, Pilpres dan Pileg)	75%	64.69%	86%	80%	82.9%	103%	85%	71,61%	84%

Tahun 2020 merupakan tahun pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Terkait hal tersebut serta mendasari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo pada tanggal 9 Desember 2020. Pada tahapan persiapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo, telah dialokasikan anggaran melalui dana hibah daerah melalui NPHD (Nota Penandatanganan Dana Hibah) , dengan rincian sebagai berikut

No	Instansi	Besaran Anggaran	*Addendum* NPHD
1	KPU	75.996.690.550	900/775/438.6.5/2020 dan 672/KU.07/3515/KPUKab/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020
2	BAWASLU	18.439.954.000	900/776/438.6.5/2020 dan 187/K.JI24/HK.01.00/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020
3	Polresta	3.643.863.000	900/1009/438.5.5/2020 dan NPHD/2233/VII/HUK.8.1/2020 tanggal 23 Juli 2020
4	Kodim 0816	773.984.200	900/984/438.5.5/2020 dan NPHD/790/VII/HUK.8.1/2020 tanggal 24 Juli 2020

Hasil penetapan TPS dan DPT setelah tahapan Coklit pada tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020 dan ditetapkan sebagaimana berita acara nomor : 426/PL.02.I-BA/3515/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dengan hasil penetapan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jml Linmas	DPT		
					L	P	L+P
1	Balongbendo	20	132	264	26.916	26.699	53.615
2	Buduran	15	167	334	32.127	33.081	65.208
3	Candi	24	261	522	51.058	53.915	104.973
4	Gedangan	15	207	414	40.628	42.873	83.501
5	Jabon	15	99	198	19.006	19.536	38.542
6	Krembung	19	125	250	24.614	25.291	49.905
7	Krian	22	221	442	44.104	44.566	88.670
8	Porong	16	124	248	24.204	24.544	48.748
9	Prambon	20	139	278	27.835	28.114	55.949
10	Sedati	16	165	330	32.695	33.471	66.166
11	Sidoarjo	24	361	722	69.137	72.149	141.286
12	Sukodono	19	208	416	40.180	40.769	80.949
13	Taman	24	365	730	70.743	72.680	143.423
14	Tanggulangin	18	152	304	31.043	31.778	62.831
15	Tarik	20	122	244	24.529	24.543	49.072
16	Tulangan	22	175	350	34.391	35.523	69.914
17	Waru	17	363	726	70.008	73.227	143.235
18	Wonoayu	23	145	290	29.282	29.618	58.900
TOTAL		**349**	**3.531**	**7.062**	**692.500**	**712.387**	**1.404.887**

Adapun penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 s.d. 2024, sebagaimana hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor : 366/PL.02.3-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020, adalah sebagai beikut :

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Nomor Urut Pasangan Calon
1	BAMBANG HARYO S & H. MOH. TAUFIQULBAR, M.Si	Partai Gerindra (7), Partai Golkar (4), PKS (4), PPP (1), Partai Demokrat (2)	1
2	AHMAD MUHDLOR & SUBANDI, S.H	PKB (16)	2
3	H. KELANA APRILIANTO, S.E & Dr. DWI ASTUTIK, S.Ag., M.Si	PDI-P (9), PAN (5)	3

Hasil penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo berjumlah 1.413.729 pemilih, dari jumlah DPT tersebut, jumlah partisipannya mencapai 1.012.420 pemilih (71.61%) dari total pemilih sebanyak 1.413.729, prosentasi tingkat partisipan tersebut dapat di kategorikan MEMORI SERAH TERIMA JABATAN PENJABAT BUPATI SIDOARJO 105 pada tingkat baik, dan telah mengalami tingkat partisipan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2015, yaitu dengan partisipasi masyarakat sebesar 55.69%, adapun tingkat partisipan dan jumlah suara yang sah sebagai berikut : Perbandingan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2020

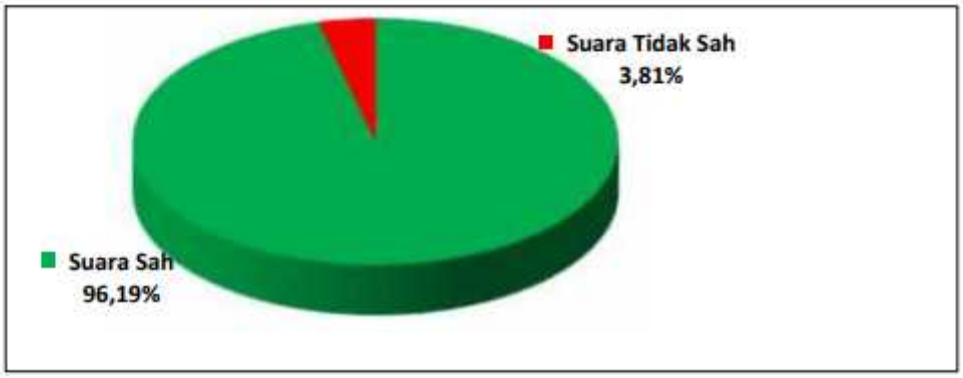

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2020

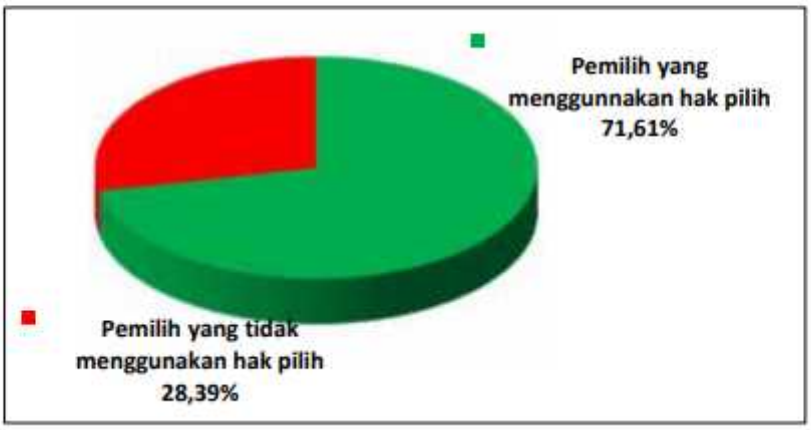

Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi masyarakat dan penyelenggara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo memberikan penghargaan berupa kambing kepada TPS, PPS

dan PPK dengan partisipasi tertinggi sebagai berikut : MEMORI SERAH TERIMA JABATAN PENJABAT BUPATI SIDOARJO 106 1. Tingkat TPS : - Juara 1 TPS 7 Kupang Kec. Jabon dengan prosentase 96.85%; - Juara 2 TPS 2 Rejeni Kec. Krembung dengan prosentase 95.30 %; - Juara 3 TPS 6 Bulang Kec. Prambon dengan prosentase 95.02%. 2. Tingkat PPS : - Juara 1 PPS Kedung Sumur Kec. Krembung dengan prosentase 90.61%; - Juara 2 PPS Plumbon Kec. Porong dengan prosentase 89.58%; - Juara 3 PPS Tambakrejo Kec. Krembung dengan prosentase 89.24%. 3. Tingkat PPK : - Juara 1 PPK Krembung dengan prosentase 84.54 %; - Juara 2 PPK Jabon dengan prosentase 82.87 %; - Juara 3 PPK Tarik dengan prosentase 81.98 %. Secara umum penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2020 secara umum berlangsung dengan lancar, tertib dan aman. Beberapa persoalan teknis yang terjadi di lapangan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini tidak terlepas dari hasil koordinasi antara pihak Pemerintah Daerah Kab. Sidoarjo dengan pihak penyelenggara baik Komisi Pemilihan Umum Kab. Sidoarjo dan Bawaslu Kab. Sidoarjo, aparat keamanan dan instansi terkait lainnya, yang telah berjalan efektif dan berkesinambunangan sehingga mampu mendorong dan menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2020. Adanya perubahan aturan terkait teknis/tata cara di seluruh tahapan lanjutan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 khususnya pada tahapan kampanye dan pemungutan suara yang dilaksanakan guna mencegah penyebaran Covid-19 serta menangulangi munculnya cluster Pilkada Serentak Tahun 2020, mampu dilaksanakan, diterapkan dan dipatuhi baik oleh penyelenggara maupun masyarakat mampu memupus kekhawatiran munculnya cluster Pilkada di Kabupaten Sidoarjo. MEMORI SERAH TERIMA JABATAN PENJABAT BUPATI SIDOARJO 107 Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2020 awalnya dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020, namun dikarenakan ada penyesuaian tahapan akibat adanya Bencana Non-Alam Covid-19 Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Dalam pelaksanaannya seluruh tahapan berjalan lancar dan tidak ada kejadian menonjol khususnya pada tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan Suara baik tingkat kecamatan dan kabupaten. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor : 155/PL.02.4-Kpt/3515/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.30 WIB bertempat di Aula KPU

Kab. Sidoarjo. Berikut rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2020 :

Nomor Urut dan Nama Calon		Suara Sah	Prosentase
1	BAMBANG HARYO S & H. MOH. TAUFIQULBAR, M.Si	373.516	38.35 %
2	AHMAD MUHDLOR & SUBANDI, S.H	387.766	39.81 %
3	H. KELANA APRILIANTO, S.E & Dr. DWI ASTUTIK, S.Ag., M.Si	212.594	21.82 %
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2+3)		973.876	
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		38.544	

Permasalahan :

Adanya refocusing anggaran dan pembatasan pengumpulan masa / peserta sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat

Solusi :

Membuat KAK lebih detail dan disesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid-19

c. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp.4.212.682.200,- dan terealisasi sebesar Rp.3.361.210.000,- atau 79,79%, hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran dan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga banyak anggaran program yang tidak terserap.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah secara dini	100%	100%	100%
Persentase konflik yang berhasil ditangani	100%	100%	100%

   Permasalahan :

   Tidak adanya peta rawan konflik, sehingga kita sedikit kesulitan dalam mencegah dan menangani potensi konflik yang terjadi

   Solusi :

   Membuat peta rawan konflik dan menambah personil yang memadai khusunya di bidang intelegent

Program tersebut didukung oleh tiga (3) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pembinaan dan fasilitasi pencegahan konflik	Persentase laporan deteksi dini potensi konflik yang tepat waktu	100%	100%	100%	1.005.855.600	768.730.000	76,63%
Penyelenggaraan penanggulangan konflik	Jumlah konflik yang tertangani	100%	100%	100%	3.128.581.000	2.564.955.000	81,98%
Deteksi Dini Terhadap Bahaya Radikalisme	Persentase laporan deteksi dini bahaya radikalisme yang tepat waktu	100%	100%	100%	78.245.600	27.525.000	35,18%

Pada kegiatan Pembinaan dan fasilitasi pencegahan konflik , pencapaian anggaran 76,63% dan kegiatan Deteksi Dini Terhadap Bahaya Radikalisme pencapaian anggaran 35,18% , hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran dan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga banyak anggaran kegiatan yang tidak terserap.

2. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.545.417.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.124.198.069,- atau 72,74 %. Hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran, masa pandemik dan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga anggaran program yang tidak terserap.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Jumlah Kader Wawasan Kebangsaan	100 Orang	100 Orang	100%

Kategori Kabupaten Peduli HAM	90%	90%	100%

Permasalahan:

Adanya pandemi Covid, kegiatan kurang maksimal

Solusi:

Membuat KAK lebih detail dan disesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid-19

Program tersebut didukung oleh dua (2) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan	a. Jumlah peserta sosialisasi Wasbang	100 orang	100 orang	100%	1.263.577.800	959.565.000	75,94%
	b. Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan Korp musik kebangsaan	40 Orang	40 Orang	100%			
	c. Jumlah peserta diklat Bela Negara	100 Orang	100 Orang	100%			
Kegiatan Pembinaan Pembauran dan Hak Azasi Manusia	a. Jumlah peserta pembinaan HAM	100 Orang	100 Orang	100%	281.839.600	164.633.069	58.41%
	b. Jumlah peserta sosialisasi terkait pembauran etnis	17 etnis	17 etnis	100%			

Pada kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan, pencapaian anggaran 75,94% dan kegiatan Pembinaan Pembauran dan Hak Azasi Manusia 58,41% , hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran dan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga banyak anggaran kegiatan yang tidak terserap.

3. Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga dengan anggaran sebesar Rp.898.649.300,- dan terealisasi sebesar Rp.679.292.600,- atau 75,59%. Hal ini disebabkan karena adanya masa pandemi dan pembatasan kegiatan masyarakat dan adanya refocusing anggaran sehingga anggaran program banyak yang tidak terserap.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya	85%	71,61	84%

Pada capaian Indikator kinerja Persentase partisipasi masyarakat dalam PEMILU (Pilkada, Pilgub, Pilpres dan Pileg) mencapai 84% dikategorikan sedang, hal ini menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Sidoarjo sudah banyak yang faham akan kesadaran dalam memilih atau partisipasi Pilkada.

Permasalahan :

Adanya refocusing anggaran dan pembatasan pengumpulan masa / peserta sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat

Solusi:

Membuat KAK lebih detail dan disesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid-19

Program tersebut didukung oleh dua (2) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Kegiatan Pembinaan Budaya Politik	a. Jumlah peserta sosialisasi partisipasi politik b. Jumlah Monev perkembangan politik c. Jumlah proposal Parpol yang diverifikasi dan memenuhi ketentuan	600 Orang 12 Laporan 9 Proposal	500 Orang 12 Laporan 9 Proposal	83 % 100 % 100 %	702.378.200	542.173.700	77,19 %
Kegiatan Pembinaan Hubungan Antar Lembaga	a. Jumlah Ormas yang di update b. Jumlah aktivitas dalam rangka menjaga harmonisasi Hubungan Antar Lembaga c. Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi	336 Ormas 3 Kegiatan 15 Proposal	336 Ormas 3 Kegiatan 15 Proposal	100 % 100 % 100 %	196.271.100	137.118.900	69,86 %

Pada kegiatan Kegiatan Pembinaan Budaya Politik , pencapaian anggaran 77,19% dan kegiatan Kegiatan Pembinaan Hubungan Antar Lembaga 69,86% , hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran dan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga banyak anggaran kegiatan yang tidak terserap.

d. Realisasi Kinerja Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kapasitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sidoarjo	131.65	128.6	102.3	122.67	117.95	103.85	113.70	112.82	100.77

*Rumus menghitung capaian kinerja minimaze (semakin turun semakin baik) = $\frac{Rencana-(realisasi-rencana)}{rencana} x\ 100\%$

Gambar Skor IRB Kab. Sidoarjo Tahun 2017 – 2020

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu dari skor IRB 117.95 turun menjadi 112.82, yang artinya resiko bencana di Kabupaten Sidoarjo semakin rendah.

Apabila dibandingkan dengan standart Nasional dengan target 30% selama 5 (lima) tahun, maka capaian kinerja tahun 2020 sudah memenuhi standart Nasional.

Pada Tahun 2019 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo adalah 117,95 mengalami penurunan tidak signifikan karena terkendala program dan kegiatan di Dinas/Instansi di rekofusing untuk penanganan pandemi Covid-19, dengan demikian hasil Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 adalah 112,82.

Secara umum perhitungan Indeks Risiko Bencana seperti yang tertera dalam grafik diatas didasarkan pada rumus umum Risiko Bencana, yang terdiri dari tiga kompenen utama, yakni ancaman, kerentanan dan kapasitas. Dari tiga komponen diatas, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan representasi dari komponene kapasitas. Dengan asumsi bahwa jika kapasitasnya meningkat maka risiko bencana akan menurun. Dengan kata lain bahwa semakin tinggi skor IKD yang mewakili komponen kapasitas, maka skor Indeks Risiko Bencana akan menurun. Secara grafis, rumus Indeks Risiko Bencana sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

$Disaster\ Risk = \frac{Hazard\ (H) x\ Vulnerable\ (V)}{Capacity\ (C)}$	Hazard / Ancaman : Ancaman / Potensi Bencana yang terjadi di sebuah daerah (sesuai UU 24/2007 ada 13 jenis ancaman bencana di Indonesia)
$Resiko\ Bencana = \frac{Ancaman\ x\ Kerentanan}{Kapasitas}$	Vulnerable / Kerentanan : kondisi atau kejadian yang dapat menimbulkan bahaya / ancaman bahkan bencana yang terdiri dari kerentanan fisik, sosial,ekonomi, lingkungan dan politik
	Capacity / Kapasitas : Intensitas Kemampuan Komunitas / Masyarakat dalam menghadapi ancaman dan atau bencana yang berwujud Ketangguhan

Gambar Komponen IRB

Indeks Kapasitas di peroleh berdasarkan tingkat ketahanan daerah pada suatu waktu. Tingkat Ketahanan Daerah bernilai sama untuk seluruh kawasan pada suatu kabupaten/kota yang merupakan lingkup kawasan terendah kajian kapasitas ini. Oleh karenanya penghitungan Tingkat Ketahanan Daerah dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan Peta Ancaman Bencana pada daerah yang sama. Indeks Kapasitas diperoleh dengan melaksanakan diskusi terfokus kepada beberapa pelaku / stakeholder penanggulangan bencana pada suatu daerah.

Terdapat 7 (tujuh) fokus prioritas utama yang dikembangkan dalam penyusunan IKD antara lain :

a. Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan
b. Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu
c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik
d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana
f. Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana
g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Hasil pengukuran IKD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 tidak mengalami penurunan yang signifikan hal tersebut dapat dilihat pada tabel pengukuran IKD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Perhitungan IKD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH	SKOR
1	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.85	0.68	SEDANG	2.1996
2	Pengkajian Resiko dan Perencanaan Terpadu	0.60			
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.84			
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.95			

5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.62			
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.60			
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.68			

Sumber : Laporan Akhir Pengukuran IRB Kab. Sidoarjo Tahun 2020

Gambar Tren Skor IKD Kab. Sidoarjo 2017-2020

Dari hasil perhitungan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 mengambarkan secara jelas bahwa perbandingan Perhitungan IKD Tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan 0,3 poin, tahun 2019 0,65 ponit dan tahun 2020 0,68 poin.

b. Realisasi Kinerja Sasaran

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran : Peningkatan Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana sesuai SPM

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo)	45%	32,87%	73	45%	35,31%	78,46	50%	41.54%	83.08
Persentase Penurunan Indeks Resiko Bencana	131.65	128.6	102.3	122.67	117.95	103.85	113.70	112.82	100.77

Gambar Capaian Penanganan Kebakaran dalam Waktu Tanggap
Tahun 2016-2020

Gambar Persentase Penurunan IRB Kab. Sidoarjo
Tahun 2017-2020

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan.

Untuk perbandingan dengan target tahun 2021, belum dapat dilaksanakan dikarenakan pengukuran IRB dilaksanakan dalam periode 1 (saty) tahun sekali yaitu pada akhir tahun.

Apabila dibandingkan dengan standart Nasional dengan target 30% dalam waktu 5 (lima) tahun, maka capaian kinerja tahun 2020 sudah memenuhi standart Nasional.

Di dalam dokumen Kebijakan Strategis Penanggulangan Bencana (JakStra) Tahun 2015 – 2019 menetapkan bahwa ; Sasaran Strategis Pembangunan Nasional adalah menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi. Sedang Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2015-2019 Bidang Kebencanaan adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Permasalahan dalam mencapai IKU Tahun 2020 :

1. Belum maksimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dikarenakan re-focusing anggaran sebagai prioritas penanganan pandemi Covid-19;
2. Kuantitas dan kualitas sumber-daya manusia terbatas ;
3. Fasilitas / sarana prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran yang terbatas;
4. Logistik dan peralatan yang masih terbatas dan belum dapat hadir pada waktu dan tempat dibutuhkan;
5. Terbatasnya jumlah pos pemadam kebakaran tidak sebanding dengan luasnya cakupan wilayah yang rawan bencana dan kebakaran yang harus dilayani dengan akses terbatas;
6. Beberapa kejadian kebakaran terjadi pada lokasi yang sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran sehingga mempengaruhi waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran;
7. Kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur kebencanaan dan pemadam kebakaran belum terpenuhi dikarenakan tidak adanya anggaran diklat/pelatihan.

Solusi:

1. Dukungan anggaran / pendanaan untuk efektifitas penyelenggaran Penanggulangan Bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bencana dan Kebakaran;
2. Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD Kabupaten Sidoarjo;
3. Optimalisasi Fungsi Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana;
4. Pembentukan dan Penguatan Forum PRB;
5. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah;
6. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana dan kebakaran lintas lembaga;
7. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kebakaran melalui sosialisasi, edukasi dan komunikasi aktif (diklat, pelatihan, dsb.)
8. Sertifikasi Personil Penanggulangan Bencana untuk Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana;
9. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan di wilayah / daerah rawan bencana

c. Program dan Kegiatan

1. Program pencegahan dini, Kesiapsiagaan, tanggap darurat dan manajemen logistik kebencanaan dengan anggaran sebesar Rp.2.319.740.100 ,- dan terealisasi sebesar Rp.1.826.300.671,- atau 78,73%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
a. Persentase pelayanan informasi rawan bencana;	80%*	80%	100%
b. Persentase logistik kebencanaan yang tersalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%

*Keterangan : Indikator Persentase pelayanan informasi rawan bencana dihitung berdasarkan Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi dibandingkan Jumlah seluruh penduduk di kawasan rawan bencana;

Permasalahan:

1. Keterbatasan SDM Penanganan bencana;
2. Adanya re-focusing anggaran penanggulangan bencana sebagai prioritas penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo;
3. Belum maksimalnya peningkatan kapasitas komunitas / masyarakat dikarenakan adanya pembatasan sosial berskala besar dalam situasi pandemi Covid-19;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana

Solusi:

1. Melaksanakan peningkatan kapasitas BPBD dan SDM, dengan indikator:
   - Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparat BPBD dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana dan Penanaganan bencana
   - Menambah personel rescue dan tenaga operator kendaraan dan peralatan komunikasi HT karena terdapat 3 frekwensi yang dikelola.
   - Penegasan tupoksi rescue secara kontraktual harus jelas berada di Bidang apa untuk percepatan peningkatan kapasitas pelayanan penanganan bencana.
2. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanganan bencana, dengan indikator :
   - Tingkat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
   - Jumlah terwujudnya desa tangguh bencana
   - Tingkat interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara telaporan, terpadu, dan menyeluruh, dengan indikator :
   - Tingkat kesiapsiagaan menghadapi bencana
   - Tingkat koordinasi penanganan kedaruratan
   - Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
   - Tingkat ketersediaan dan distribusi logistik

Program tersebut didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penyusunan database dan informasi potensi bencana	Jumlah jenis informasi potensi bencana dan data potensi/ancaman bencana yang terupdate	4 jenis	4 jenis	100	82.050.000	55.345.530	67,45
Koordinasi Penyusunan kebijakan, pembinaan dan monev pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana	0 orang *(re-focusing)*	N/A	N/A	199.407.600	120.445.000	60,4
Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bencana	a. Jumlah sarana prasaran kebencanaan yang diadakan b. Jumlah sarana prasaran kebencanaan yang dipelihara	a. 36 unit b. 4 unit	a. 36 unit b. 4 unit	100	133.525.800	114.332.300	85,63
Koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dan manajemen logistik kebencanaan	Jumlah peserta koordinasi pelaksanaan tanggap darurat	60 orang	40 orang	67	7.500.000	3.275.000	43,67
Kegiatan operasional tanggap darurat dan manajemen logistik kebencanaan	a. Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan b. Jumlah CTPS yang tersalurkan	a. 100% b. 124 unit	a. 100% b. 124 unit	a. 100 b. 100	1.785.206.700	1.518.702.900	85
Pengadaan logistik penanggulangan bencana	Jumlah logistik yang disalurkan	2000 bungkus	0	0	112.050.000	14.199.941	12,67

Dari tabel di atas, dapat dilihat terdapat serapan kegiatan dan anggaran paling kecil terdapat pada kegiatan Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan dengan serapan dibawah 80%. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan penyampaian informasi pencegahan bencana melalui sosialisasi kepada masyarakat di kawasan rawan bencana. Hal yang sama juga terjadi pada anggaran konsumsi rapat dikarenakan kegiatan rapat dan koordinasi dilaksanakan dalam jaringan (daring);
2. Pada kegiatan Pengadaan Logistik terdapat belanja yang tidak diserap yaitu Nasi bungkus dan pengadaan air bersih dikarenakan belum adanya Status Tanggap Darurat Bencana;
3. Beberapa anggaran di re-focusing untuk penanganan Covid-19;

2. Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp.8.422.677.980,- dan terealisasi sebesar Rp.7.409.744.311,- atau 87,97%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase wilayah Kabupaten yang sudah mempunyai pos PMK	30%	27,7%	92,2%
Persentase satuan petugas PMK yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi	50%	33,33%	60%
Persentase mobil PMK dengan kondisi layak fungsi	70%	70%	100%

Permasalahan:

1. Tidak terdapat anggaran untuk Diklat / Pelatihan
2. Terbatasnya jumlah Pos, Sarana dan SDM pada bidang Pemadam Kebakaran

Solusi:

1. Membuat usulan anggaran untuk diklat / pelatihan pasukan Pemadam Kebakaran;
2. Mengupayakan terbentuknya unit pos pemadam kebakaran baru dengan melibatkan dunia usaha;
3. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran melalui sosialisasi, edukasi dan pelatihan

Program tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pengadaan dan Pembinaan SDM Pemadam Kebakaran	Jumlah THL pemadam kebakaran	114 orang	114 orang	100	4.207.574.640	4.201.031.744	99,84
Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran	a. Jumlah sarpras pencegahan bahaya kebakaran yang diadakan; b. Jumlah sarpras pencegahan bahaya kebakaran yang dipelihara	a. 12 paket b. 16 unit	a. 11 paket b. 27 unit	a. 91,7 b. 168	4.207.040.200	3.201.414.767	76,10
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Jumlah Bangunan/Gedung yang dilakukan pemeriksaan berkala sistem proteksi kebakaran (dalam WR)	100%	100%	100	8.063.140	7.297.800	90,51

Pada Tahun Anggaran 2020, Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran didukung oleh 5 (lima) kegiatan. Akan tetapi dikarenakan adanya pandemi Covid-19, dilakukan re-focusing anggaran pada 2 (dua) kegiatan sehingga hanya tersisa 3 (tiga) kegiatan pendukung. Meskipun demikian, kinerja pelayanan penanggulangan kebakaran tetap berjalan meskipun tidak terdapat anggaran penunjang.

Secara umum, kendala dan permasalahan pada pelayanan penanggulangan kebakaran adalah sebagai berikut :

i. Banyaknya perusahaan yang terlambat atau tidak membayar retribusi dikarenakan pandemi Covid-19;
ii. Tidak terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran dikarenakan adanya PSBB sehingga anggaran di re focusing;
iii. Kegiatan koordinasi dan rapat dilaksanakan secara daring sehingga belanja konsumsi rapat dan perjalanan dinas tidak terserap maksimal

3. Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan anggaran sebesar Rp.1.005.229.800,- dan terealisasi sebesar Rp.797.459.700,- atau 79,33%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
a. Persentase korban bencana yang terehabilitasi	100%	100%	100
b. Persentase bantuan pasca bencana yang terealisasi berdasarkan laporan Jitupasna	100%	100%	100

Program tersebut didukung oleh 5 (lima) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penyiapan sumberdaya untuk rehabilitasi pasca bencana	Jumlah personil relawan yang dibina / dilatih	0	0	N/A	84.636.000	4.994.000	5,9
Pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan trauma healing pasca bencana	100%	100%	100	309.600.000	260.918.000	84,28
Penyusunan laporan pasca	Persentase kejadian bencana	100%	100%	100	71.348.500	63.604.200	89,15

bencana	yang dilakukan Jitupasna						
Koordinasi pemulihan pasca bencana	Jumlah peserta rapat koordinasi pasca bencana	80 orang	160 orang	200	26.789.800	16.707.500	62,37
Pelaksanaan rekonstruksi pascabencana	Jumlah bahan baku bangunan yang disalurkan	100%	100%	100	512.855.500	451.236.000	88

Permasalahan:

1. Belanja makanan dan minuman rapat, Belanja cetak dan Penggandaan tidak terealisasi karena dari pihak penyedia kurang bersedia untuk menerima mekanisme pembayaran non tunai;
2. Tidak terlaksanakan pelatihan relawan dikarenakan adanya PSBB;
3. Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada pelaksanaan kegiatan rapat dan koordinasi sehingga dilaksanakan dalam jaringan (daring);

Solusi:

1. Melakukan penyesuaian target dan anggaran apabila terdapat perubahan anggaran, terutama bila terdapat re-focusing;
2. Penyerapan anggaran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

Urusan Sosial

Urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Realisasi Kinerja Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah Dinas Sosial yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan startegis adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Menurunnya jumlah penduduk miskin	Persentase penurunan PMKS terhadap jumlah penduduk	1,90	1,89	100,53	1,87	1,83	102,14	1,84	2,23	82,51

Target Penurunan PMKS terhadap jumlah penduduk dari Indikator Kinerja Tahun 2020 adalah 1,84% dan target tersebut adalah target yang tertera dalam Renstra OPD Dinas Sosial sebelum adanya Pandemi Covid-19. Dengan adanya Pandemi Covid-19 sudah di usulkan perubahan target melalui surat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, tembusan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo dengan nomor surat 460/2487/438.5.6/2020 tanggal 6 Oktober 2020, sebesar 2,23%.

b. Realisasi Kinerja Sasaran

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan Dinas Sosial yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase Penurunan PMKS terhadap penduduk	1,90	1,89	100,53	1,87	1,83	102,14	1,84	2,23	82,51

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 tidak mencapai target, hal ini dikarenakan jumlah PMKS semakin meningkat dengan adanya pandemi covid-19.

Target Penurunan PMKS terhadap jumlah penduduk dari Indikator Kinerja Tahun 2020 adalah 1,84% dan target tersebut adalah target yang tertera dalam Renstra OPD Dinas Sosial sebelum adanya Pandemi Covid-19. Dengan adanya Pandemi Covid-19 sudah di usulkan perubahan target melalui surat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, tembusan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo dengan nomor surat 460/2487/438.5.6/2020 tanggal 6 Oktober 2020, sebesar 2,23%.

Sehingga apabila dibandingkan dengan target awal 1,84% realisasi 2,23%, dengan capaian kinerja 82,51% dan jumlah PMKS mengalami kenaikan 0,39% sedangkan bila dibandingkan dengan usulan target yang baru 2,23% dan

realisasi 2,23% dengan capaian kinerja 100%. Dikarenakan dengan adanya kenaikan jumlah PMKS, OPD Dinas Sosial belum bisa mengcover seluruh PMKS.

c. Program dan Kegiatan

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dengan anggaran sebesar Rp.23.038.015.650,- dan terealisasi sebesar Rp.21.771.497.375,- atau 94,50%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase Fakir Miskin yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya	87 %	81 %	81 %
Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	60 %	60 %	100 %

Program tersebut didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang dilatih	270	220	81,48
Fasilitasi dan Monev Bantuan Pangan APBN	Jumlah penerima Bantuan Sosial Pangan APBN yang di monev	97.350	97.350	100
Pengadaan Rastra APBD	Jumlah fakir miskin penerima bantuan sosial pangan APBD	50.000	50.000	100
Peningkatan Kualitas Kelebagaan sosial dan PSKS lainnya	Jumlah PSKS yang dibina	10	10	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	983.418.500,-	714.972.400,-	72,70
Fasilitasi dan Monev Bantuan Pangan APBN	109.141.000,-	101.053.000,-	92,59

Pengadaan Rastra APBD	20.777.825.400,-	19.878.010.620,-	95,67
Pembinaan Yayasan Panti Asuhan	28.965.350,-	27.305.350,-	94,27
Peningkatan Kualitas Kelebagaan sosial dan PSKS lainnya	1.138.665.400,-	1.050.156.005,-	92,23

Pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, selain kegiatan pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin sebagai upaya untuk penurunan PMKS pada tahun 2020 juga terdapat kegiatan untuk penanganan covid-19 antara lain :

a. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Daerah sebanyak 5.000 KPM setiap bulannya
b. Bantuan Sembako sebanyak 135.572 KRT

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp.2.418.731.200,- dan realisasi sebesar Rp.2.049.092.697,- atau 84,72%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase tuna sosial yang terlayani	120	120	100
Persentase Penyandang Disabilitas yabg terlayani	20	20	100
Persentase anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani	250	250	100
Persentase PMKS yang terlayani	100%	100%	100

Program tersebut didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang di bina	20	20	100
	Jumlah Penyandang Disabilitas yang di monev	20	20	100
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Tuna Sosial	Jumlah PMKS yang di bina	120	120	100
	Jumlah PMKS yang di monev	120	120	100

Pembinaan dan Pelayanan Sosial bagi Anak dan Lansia	Jumlah anak dan lansia penyandang masalah kesejahteraan sosial yang di bina	250 anak	250 anak	100
	Jumlah anak dan lansia penyandang masalah kesejahteraan sosial yang di monev	250 anak	250 anak	100
Peningkatan kualitas pelayanan sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	900	675	75
	Persentase sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial yang layak fungsi	1	1	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas	68.026.800,-	65.633.400,-	96,48
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Tuna Sosial	352.883.200,-	255.773.684,-	72,48
Pembinaan dan Pelayanan Sosial bagi Anak dan Lansia	74.528.000,-	45.351.900,-	60,85
Peningkatan kualitas pelayanan sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial	1.923.293.200,-	1.682.333.713,-	87,47

Pada Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, kegiatan lebih focus pada penanganan PMKS kegiatan tersebut adalah :

a. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas sebanyak 20 orang.
b. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Tuna Sosial sebanyak 120 orang.
c. Pembinaan dan Pelayanan Sosial bagi Anak dan Lansia sebanyak 250 anak.
d. Peningkatan kualitas pelayanan sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial 1 shelter/liponsos dengan klien sejumlah 75 orang setiap bulan.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp.4.882.311.340,- dan terealisasi sebesar Rp.4.836.554.920,- atau 99,06 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase korban bencana alam yang tertangani	100%	100%	100
Persentase korban bencana sosial yang tertangani	100%	100%	100
Persentase penduduk miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	80 %	76,72	95,9

Program tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah peserta sosialisasi JKMM	0	0	0
	Jumlah Rekomendasi SKTM bagi masyarakat miskin	1.565	1.565	100
Perlindungan sosial korban bencana alam	Jumlah personil TAGANA yang di bina	50	50	100
	Pemeliharaan sarana prasarana bencana alam	7	7	100
	Jumlah korban bencana alam yang di tangani	2.238	2.238	100
Perlindungan sosial korban bencana sosial	Pemeliharaan sarana prasarana korban bencana sosial	1	1	100
	Jumlah korban bencana sosial yang di tangani	59.372	59.372	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial	168.828.840,-	148.644.920,-	88,04
Perlindungan sosial korban bencana alam	218.482.500,-	211.657.500,-	96,88
Perlindungan sosial korban bencana sosial	4.495.000.000,-	4.476.252.500,-	99,06

Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, difokuskan pada kegiatan penanganan covid-19 sebagai bagian dari bencana sosial kegiatannya berupa :

a. Pemberian nasi kotak pasien dalam pengawasan (PDP) Covid – 19 sebanyak 806.954 kotak.
b. Bantuan tunai pengganti permakanan PDP Covid-19 sebanyak 502 orang.
c. Bantuan permakanan untuk ruang isolasi pasien OTG sebanyak 258 orang.
d. Bantuan tunai korban PHK sebanyak 5.000 orang.
e. Bantuan sembako korban banjir sebanyak 754 KK.

Urusan Ketenagakerjaaan

Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Realisasi Kinerja Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah Dinas Tenaga Kerja yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	5,74	4,73	5,56	4,72	6,30	10,97

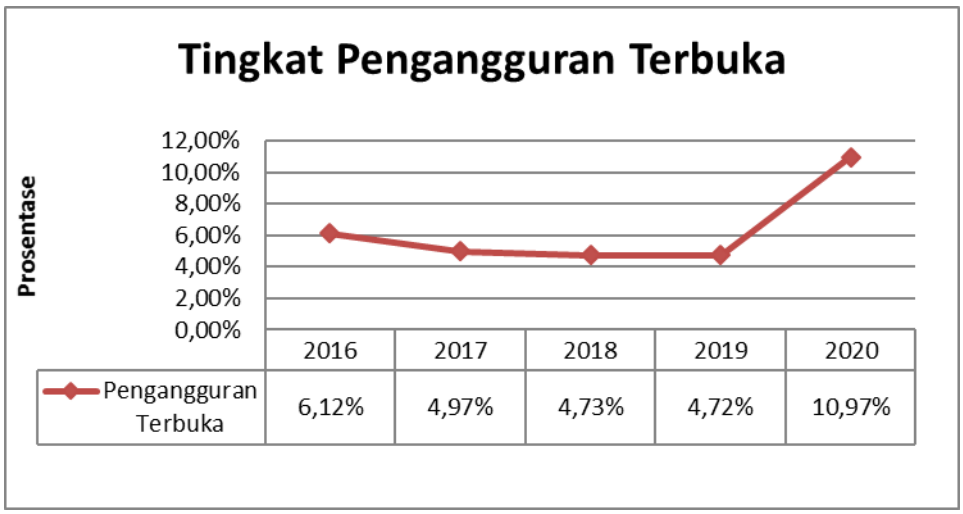

Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka 4,72%, namun pada tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 berdampak pada stabilitas perusahaan sehingga terjadi PHK besar-besaran dan banyak perusahaan untuk tida menerima karyawan baru sehingga banyak lulusan SMA dan SMK yang tidak dapat terserap pada Dunia kerja. Pada Tahun 2020 data PHK yang terlaporkan pada Dinas Tenaga Kerja sebanyak 13.438 orang. Namun pemerintah daerah terus berupaya sehingga dengan pendekatan persuasif pada perusahaan maka sebanyak 5.677 orang telah dipekerjakan kembali, 5.000 korban PHK lainnya mendapat bantuan langsung tunai melalui Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

b. Sasaran

Untuk mendukung target tujuan tersebut diatas ditetapkan **sasaran urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan** dengan target kinerja sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET *)	REALISASI	%
Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja	60	61,33	102,22	65	70,88	109,05	70	76	108,57	45	51,36	114,13

*)Target tersebut diatas adalah target penyesuaian pandemi Covid-19

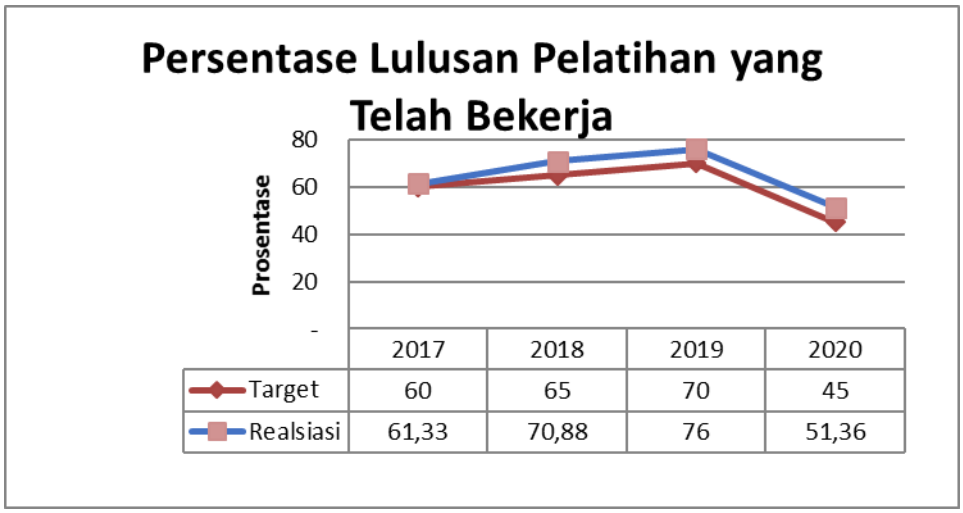

Pada grafik di atas, dapat dijelaskan terjadi tren peningkatan lulusan pelatihan yang telah bekerja. Pada tahun 2019 capaian telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 76 persen atau 290 orang dari 384 orang peserta pelatihan. Pada tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan penetrasi peserta pelatihan yang bekerja menurun, dari target masa pandemi sebesar 45% tercapai 51,36% atau 265 orang peserta pelatihan telah bekerja dari 516 total peserta pelatihan.

Sasaran 2: Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET *)	REALISASI	%
Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan	61	62,18	101,93	63	61,99	98,40	65	71,8	110,4	50	51,61	103,22
Persentase pencari kerja yang telah membuka usaha secara mandiri	3	4,21	140,33	5	5,26	102,2	6	6,75	112,5	5	8	160

*)Target tersebut diatas adalah target penyesuaian pandemi Covid-19

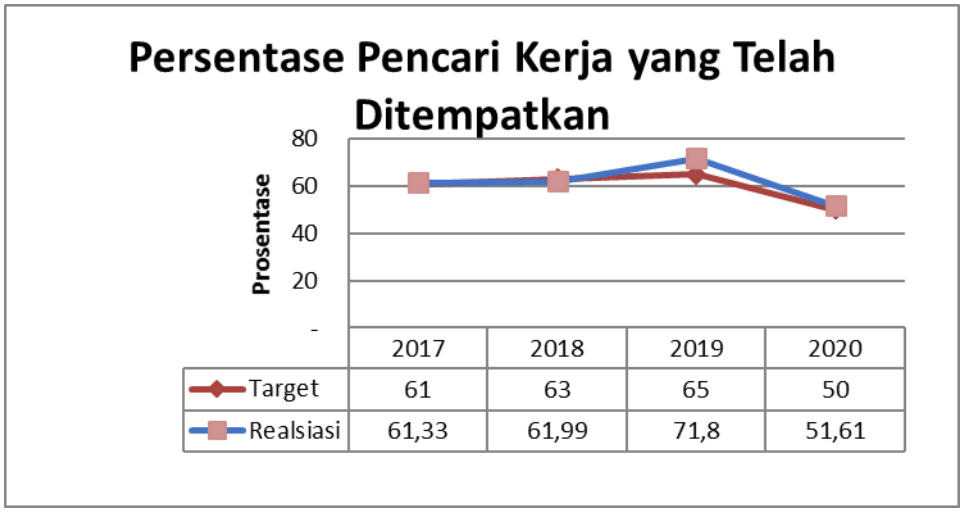

Pada grafik di atas, dapat dijelaskan terjadi tren peningkatan penempatan kerja dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan penempatan kerja yang cukup tinggi yaitu sebesar 71,8 persen atau 9.978 orang dari 13.893 pencari kerja dan telah melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan tren dari realisasi menjadi 51,61 persen. Hal ini merupakan beberapa perusahaan tidak menerima karyawan bahkan beberapa perusahaan melakuka pengurangan karyawan. Hal ini dibuktikan tingginya PHK di Kabupaten Sidoarjo. Namun realisasi telah mencapai dari target masa pandemi Covid yang telah ditetapkan sebesar 50%.

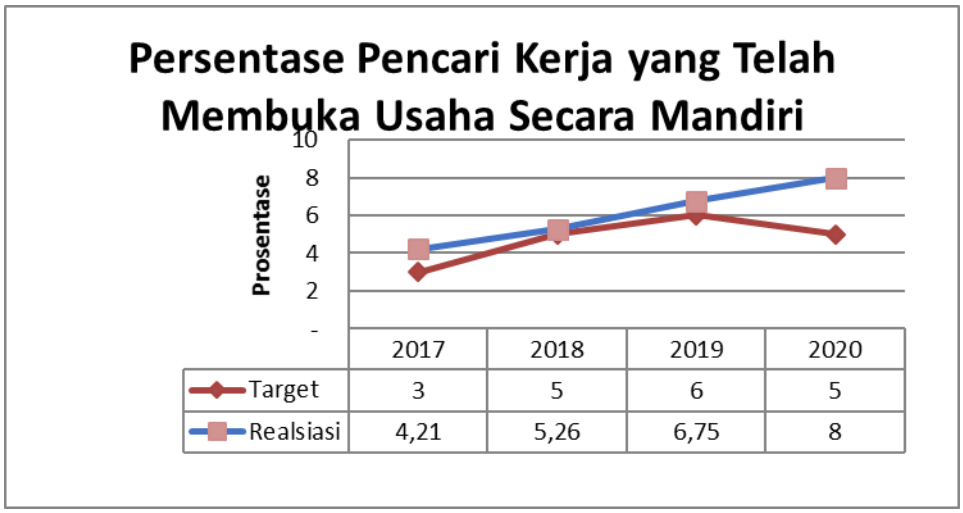

Pada grafik di atas, dapat dijelaskan pada tahun 2019 telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 6,75 persen atau 27 orang dari 400 orang peserta pelatihan berbasis wirausaha dari target 6 persen dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan persentase menjadi 8 persen atau 2 orang dari 25 peserta pelatihan.

Sasaran 3: Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif.

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET *)	REALISASI	%
Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB)	9	9,52	105,78	10	9,62	96,15	11	19,6	178,18	10	25	250

*)Target tersebut diatas adalah target penyesuaian pandemi Covid-19

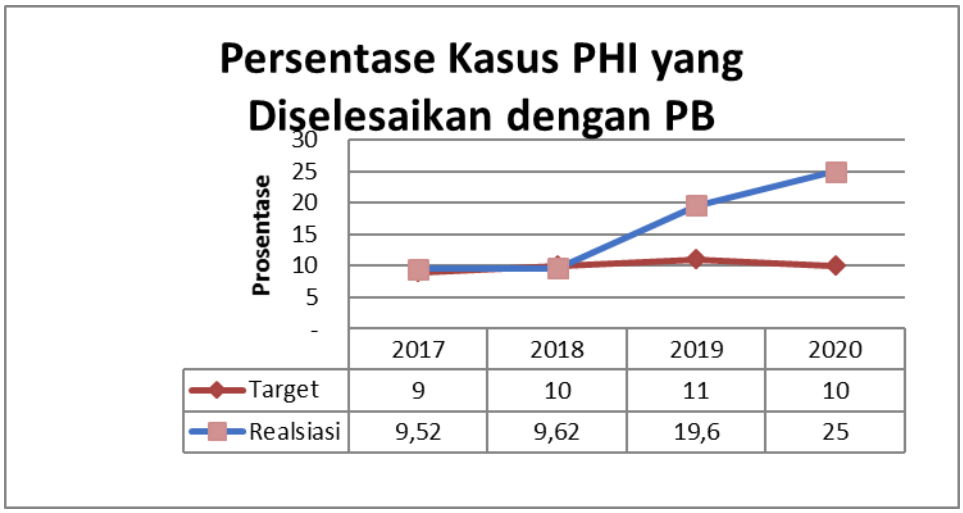

Pada grafik di atas, dapat dijelaskan terjadi tren peningkatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 19,6 persen atau 20 PB dari 102 dan pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah perselisihan hubungan industrial menjadi 148 namun yang terselesaikan dengan PB sebanyak 37 kasus perselisihan hubungan industrial yang dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja. Namun dengan banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial tersebut, semua perselisihan hubungan industrial dapat tertangani atau diselesaikan selain selesai melalui PB (Perjanjian Bersama) juga diselesaikan dengan anjuran tertulis oleh Mediator Hubungan Industrial.

c. Program dan Kegiatan

1. **Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja** dengan anggaran sebesar Rp.2.959.810.980,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.825.787.510,00 atau 95,47%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020 *)	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase lembaga pelatihan tenaga kerja yang terakreditasi	15%	36,67%	244,47%
Persentase lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan / kompetensi	50%	80,91%	161,82%

*)Target tersebut diatas adalah target penyesuaian pandemi Covid-19

Pada Tahun 2020, terget dari Lembaga pelatihan yang terakgreditasi sebesar 15% dan telah tercapai 36,67% atau 22 Lembaga pelatihan kerja dari 60 lembaga yang terakreditasi. Hal ini merupakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan diharapkan Lembaga Pelatihan di Kabupaten Sidoarjo mampu bersaing dan menjadi penyelenggara pelatihan Kartu Prakerja. Dan lulusan pelatihan yang telah mengikuti uji kompetensi sebesar 80,91% melebihi target yang telah ditatapkan atau 301 peserta yang lulus uji kompetensi dari 372 peserta uji kompetensi. Hal ini menunjukkan tekat yang kuat dari pencari kerja dalam mendapatkan kompetensi sesuai dengan minat dan bakat.

Program tersebut didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020 *)	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan	196 orang	196 orang	100%
Monev TKI pendamping TKWNAP	Persentase tenaga kerja pendamping yang telah menerima alih teknologi dari TKA	50%	75%	150%
Pembinaan, monitoring dan evaluasi lembaga pelatihan tenaga kerja	jumlah lembaga pelatihan yang mendapatkan sosialisasi	40 lembaga	40 lembaga	100%
	jumlah lembaga pelatihan yang dimonev	40 lembaga	40 lembaga	100%
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan	320 orang	320 orang	100%

*)Target tersebut diatas adalah target penyesuaian pandemi Covid-19

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2020 (Rp)	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi	950.000.000,00	891.911.500,00	93,89%
Monev TKI pendamping TKWNAP	900.000,00	900.000,00	100%
Pembinaan, monitoring dan evaluasi lembaga pelatihan tenaga kerja	117.631.200,00	92.385.200,00	78,54%
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	1.891.279.780,00	1.840.590.810,00	97,32%

2. **Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penyelenggaraan Transmigrasi** dengan anggaran sebesar Rp.475.422.555,00 dan terealisasi sebesar Rp.393.575.316,00 atau 82,78%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
persentase pencari kerja yang telah difasilitasi penempatannya	50%	51,61%	103,22%
Persentase peserta bimtek TKMT & kewirausahaan yang telah membuka usaha	5%	8%	160%
persentase transmigran yang berhasil (bekerja sendiri/membuka lapangan usaha atau ke orang lain)	80%	100%	120%

*)Target tersebut diatas adalah target penyesuaian pandemi Covid-19

Pada tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 kegiatan bursa kerja diselenggarakan satu kali dengan jumlah perusahaan terbatas mengikuti standard protokol Covid-19 dari target penempatan 50 persen tercapai 51,61 persen atau 1809 dari 3505 pencari kerja.

Persentase peserta Bimbingan teknis kewirausahaan dari 25 peserta pelatihan, terdapat 2 peserta yang telah membuka usaha sehingga tercapai 8%.

Data pesentase transmigran yang telah berhasil dilaksanakan komunikasi secara daring dengan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan Bapak Ardiansyah dan Kepala Unit Permukiman Transmigrasi Parudongka Kecamatan Raute Kabupaten Konawe Selatan Bapak Ainalludin SH, dari 3 KK transmgiran Asal Sidoarjo seluruhnya telah mandiri.

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Penyiapan tenaga kerja mandiri terdidik	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tenaga kerja mandiri dan terdidik	25 orang	25 orang	100%
Penyelenggaraan Transmigrasi	Jumlah lokasi tujuan transmigrasi yang telah dimonitoring dan evaluasi	1 lokasi	1 lokasi	100%
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	350 orang	352 orang	100,57%
Penyelenggaraan Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	350 orang	352 orang	100,57%

*)Target tersebut diatas adalah target penyesuaian pandemi Covid-19

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Penyiapan tenaga kerja mandiri terdidik	79.979.930,00	73.537.100,00	91,94%
Penyelenggaraan Transmigrasi	2.604.000,00	2.550.000,00	97,93%
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	236.217.425,00	189.345.000,00	80,16%
Penyelenggaraan Bursa Kerja	145.978.700,00	118.360.716,00	81,08%
Sosialisasi regulasi perlindungan TKI	10.642.500,00	9.782.500,00	91,92%

3. **Program Pengembangan dan Perlindungan Ketenagakerjaan** dengan anggaran sebesar Rp.1.393.438.220,00 dan terealisasi sebesar Rp.935.436.627,00 atau 98,9%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020 *)	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi penyelesaiannya melalui Perjanjian Bersama (PB)	10%	25%	250%
Persentase perusahaan yang memiliki LKS Bipartit	22%	26%	118,18%
Persentase perusahaan yang menerapkan fasilitas kesejahteraan pekerja	35%	36,6%	104,57%

*)Target tersebut diatas adalah target penyesuaian pandemi Covid-19

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020 *)	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pembinaan dan monitoring fasilitas kesejahteraan pekerja	Jumlah peserta sosialisasi kesejahteraan sosial tenaga kerja	30 orang	30 orang	100%
	Persentase tenaga kerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	62%	65,6%	105,81%
Pembinaan Kelembagaan, dan sarana hubungan industrial	Jumlah lembaga kerjasama bipartite yang aktif	118 LKS	174 LKS	147,46%
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diproses	100%	100%	100%
Pembinaan Persyaratan kerja	Persentase perusahaan yang melaksanakan syarat kerja sesuai ketentuan	75%	96,3%	128,4%
	Jumlah peserta sosialisasi persyaratan kerja	30 Orang	30 Orang	100%

*)Target tersebut diatas adalah target penyesuaian pandemi Covid-19

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Pembinaan dan monitoring fasilitas kesejahteraan pekerja	398.870.000,00	377.572.727,00	94,66
Pembinaan Kelembagaan, dan sarana hubungan industrial	338.689.000,00	326.808.200,00	96,49
Pembinaan persyaratan kerja	12.591.000,00	12.591.000,00	100,00
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	643.288.220,00	218.464.700,00	33,96

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Realisasi Kinerja Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkat kan Perekonomian Masyara kat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menuju Desa Maju	Persentase Desa maju	23,60%	12,73%	53,94%	27,33%	32,92%	120,45%	31,68%	42,55%	134,31%

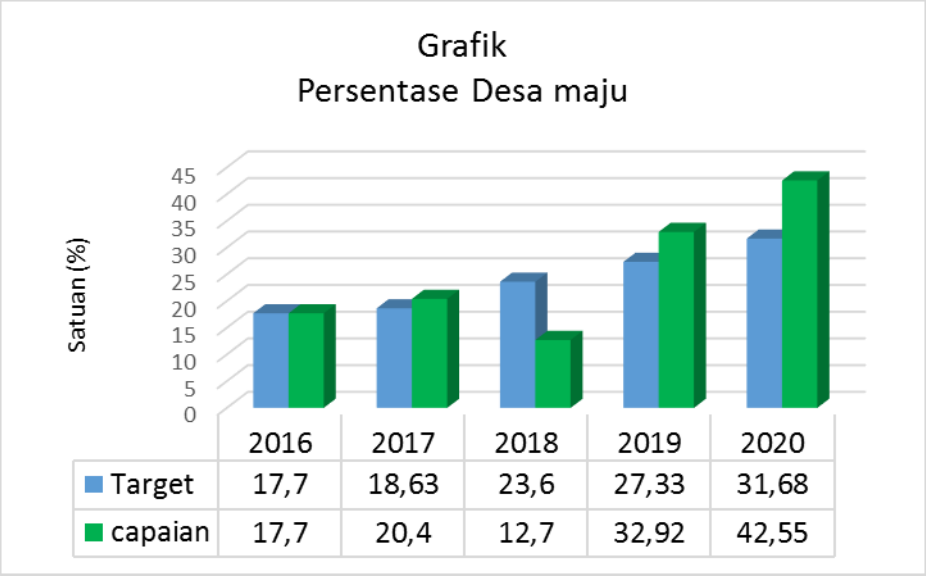

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan target tahun 2020 sebesar 31,68% atau 102 Desa dengan capaian sebesar 137 desa atau 42,55% dari jumlah desa keseluruhan yaitu sebanyak 322 desa

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan capaian tahun 2019 persentase desa maju sebesar 32,92% yaitu 106 desa, maka capaian kinerja tahun 2020 terdapat peningkatan sebanyak 31 desa atau 9,63%

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 116,09% dari target tahun 2021 sebesar 36,65%, hal ini diupayakan dengan meningkatkan status desa ke desa maju dan desa mandiri dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap desa.

TREND STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA UPDATE IDM

No.	Status Desa	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%
1.	Desa Mandiri	0 desa	0%	0 desa	0%	0 desa	0%	2 Desa	0,62%	2 Desa	0,62%
2.	Desa Maju	57 desa	17,70 %	66 desa	20,49%	41 Desa	12,73 %	106 Desa	32,92%	137 Desa	42,55%
3.	Desa Berkembang	189 desa	58,70 %	207 desa	64,29%	278 Desa	86,34%	211 Desa	65,53%	180 Desa	55,90%
4.	Desa Tertinggal	71 desa	22,05 %	48 desa	14,91%	1 Desa	0,31%	2 Desa	0,62%	2 Desa	0,62%
5.	Desa Sangat Tertinggal	5 desa	1,55 %	1 desa	0,31%	2 Desa	0,62%	1 Desa	0,31%	1 Desa	0,31%
	JUMLAH DESA	322 Desa		322 Desa		322 Desa		322 Desa		322 Desa	

Dari tabel tersebut diatas dapat disampaikan bahwa di Kabupaten Sidoarjo masih terdapat 2 Desa dengan status Tertinggal yaitu Desa Reno Kenongo Kecamatan Porong dan Desa Besuki Kecamatan Jabon. Sedangkan Desa Kedungbendo kecamatan Tanggulangin dengan status Desa Sangat Tertinggal. Ketiga desa tersebut merupakan desa yang terdampak Lumpur Lapindo, namun demikian secara administrasi desa tersebut masih ada dan mendapatkan dana operasional yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Retribusi dan Cukai.

Pembaruhan data IDM, desa melakukan pembaruhan melalui aplikasi website http://idm.kemendesa.go.id dengan didampingi oleh TPP P3MD (Tim Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa), kemudian akan diverifikasi berjenjang dari Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi. Setelah itu dari hasil pembaruhan tersebut kemendesa mengeluarkan Surat Keputusan hasil data IDM.

b. Realisasi Kinerja Sasaran

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

Indikator kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
	Target	Realisasi	%	Target	Reali sasi	%	Target	Reali sasi	%
1. Persentase Desa dengan Nilai IDM (Indek Desa Membangun) minimal kategori Berkembang	68,32%	99,07%	145,01%	69,88%	99,07%	141,77%	71,43%	99,07%	138,70%
2. Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan UPPKS Mandiri	23%	19%	82,61%	31%	31,22%	100,71%	32%	34,93%	109,16%
3. Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan UED-SP Mandiri	21%	21,54%	102,57%	27%	26,92%	99,70%	28%	31,30%	111,78%
4. Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan P3EL Mandiri	20%	15,88%	79,40%	26%	26,18%	100,69%	25%	28,97%	115,88%
5. Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan BUMDES Mandiri	20%	5,56%	27,80%	24%	24,46%	101,92%	25%	26,26%	105,04%

Grafik
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

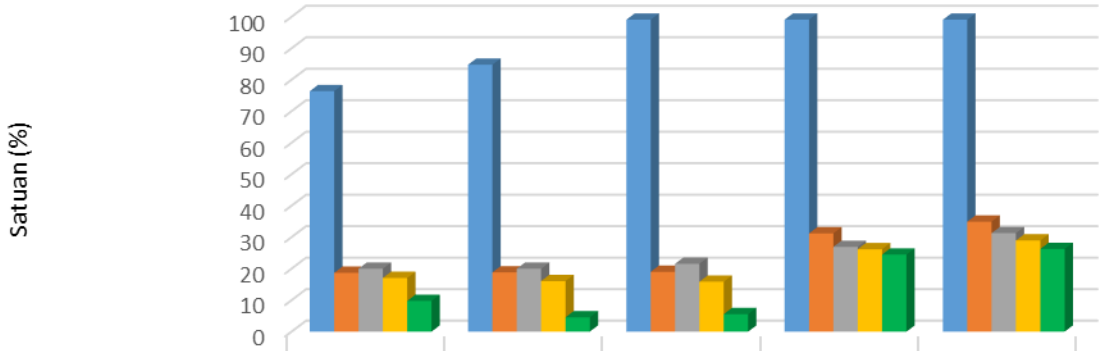

	2016	2017	2018	2019	2020
IDM Berkembang	76,4	84,78	99,07	99,07	99,07
UPPKS Mandiri	18,69	18,84	19	31,22	34,93
UED-SP Mandiri	20	20	21,54	26,92	31,3
P3EL Mandiri	17,07	16,06	15,88	26,18	28,97
Bumdes Mandiri	9,76	4,55	5,56	24,46	26,26

- **Persentase Desa dengan Nilai IDM (Indek Desa Membangun) minimal kategori Berkembang**

  Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan realisasi tahun 2020 sebesar 99,07% yaitu 319 desa atau tercapai 138,70% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 sebesar 71,43%

  Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 tidak mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan capaian tahun 2019 sebesar 99,07% yaitu 319 desa

  Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 137,50% dari target tahun 2021 sebesar 72,05%, hal ini diupayakan dengan melakukan koordinasi TPP P3MD (Tim Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap pemerintahan desa dalam pembaruan data IDM 2021.

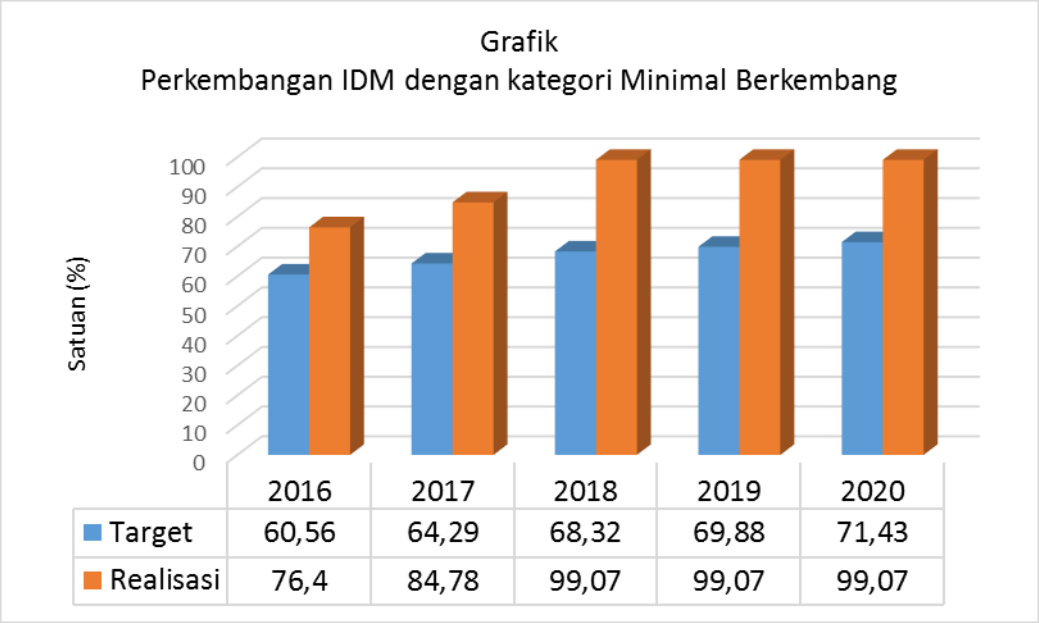

- **Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) Mandiri**

  Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan realisasi tahun 2020 sebesar 34,93% dari 229 lembaga usaha yaitu 80 lembaga atau tercapai 109,16% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 sebesar 32%

  Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan capaian tahun 2019 sebesar 31,22% atau 69 lembaga atau meningkat sebesar 3,71% atau sebanyak 11 lembaga usaha di tahun 2020

  Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 89,56% dari target tahun 2021 sebesar 39%, hal ini diupayakan dengan melakukan pembinaan terhadap Lembaga Ekonomi UPPKS

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah UPPKS	%	Jumlah UPPKS	%	Jumlah UPPKS	%	Jumlah UPPKS	%	Jumlah UPPKS	%
UPPKS Mandiri	37	18,69	39	18,84	42	19,00	69	31,22	80	34,93
UPPKS Berkembang	63	31,82	65	31,40	71	32,13	90	40,72	92	40,17
UPPKS Dasar	98	49,49	103	49,76	108	48,87	68	30,77	57	24,89
	198		207		221		221		229	

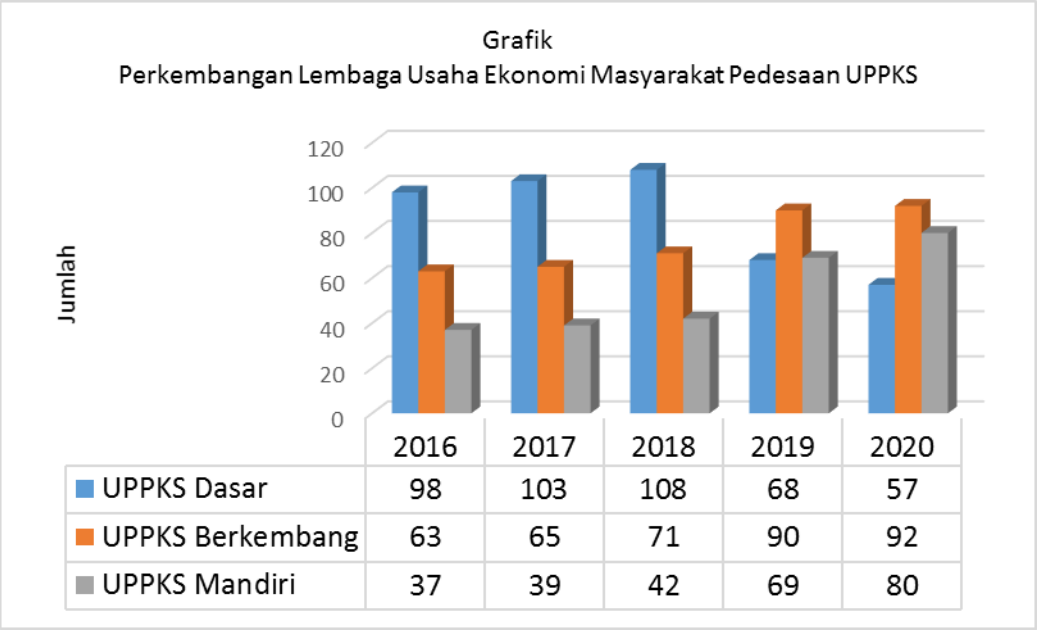

- **Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan UED-SP (Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam) Mandiri**

  Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan realisasi tahun 2020 sebesar 31,30% dari 131 lembaga usaha yaitu 41 lembaga atau tercapai 111,78% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 sebesar 28%

  Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan capaian tahun 2019 sebesar 26,92% atau 35 lembaga atau meningkat sebesar 4,38% atau sebanyak 6 lembaga usaha di tahun 2020

  Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 94,85% dari target tahun 2021 sebesar 33%, hal ini diupayakan dengan melakukan pembinaan terhadap Lembaga Ekonomi UED-SP

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah UED-SP	%	Jumlah UED-SP	%	Jumlah UED-SP	%	Jumlah UED-SP	%	Jumlah UED-SP	%
UED-SP Mandiri	26	20,00	26	20,00	28	21,54	35	26,92	41	31,30
UED-SP Berkembang	44	33,85	44	33,85	45	34,62	57	43,85	57	43,51

UED-SP Dasar	60	46,15	60	46,15	57	43,85	39	30,00	33	25,19
	130		130		130		130		131	

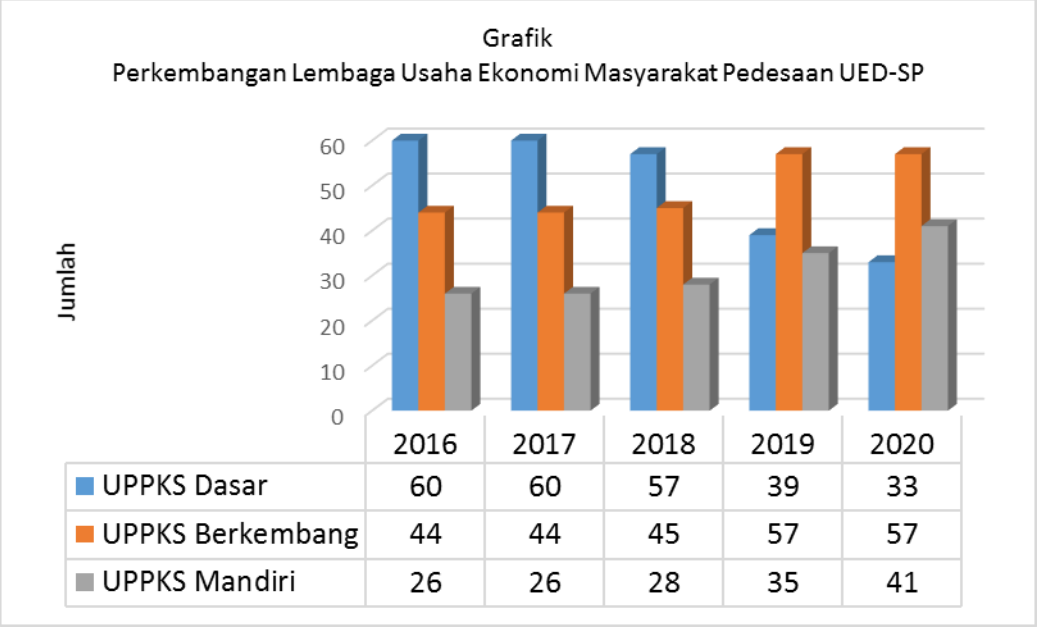

- **Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan P3EL (Program Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal) Mandiri**

  Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan realisasi tahun 2020 sebesar 28,97% dari 252 lembaga usaha yaitu 73 lembaga atau tercapai 115,88% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 sebesar 25%

  Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan capaian tahun 2019 sebesar 26,18% atau 61 lembaga atau meningkat sebesar 2,79% atau sebanyak 12 lembaga usaha di tahun 2020

  Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 90,53% dari target tahun 2021 sebesar 32%, hal ini diupayakan dengan melakukan pembinaan terhadap Lembaga Ekonomi P3EL

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah P3EL	%	Jumlah P3EL	%	Jumlah P3EL	%	Jumlah P3EL	%	Jumlah P3EL	%
P3EL Mandiri	35	17,07	35	16,05	37	15,88	61	26,18	73	28,97
P3EL Berkembang	57	27,81	57	26,15	60	25,75	90	38,63	94	37,30
P3EL Dasar	113	55,12	126	57,80	136	58,37	102	43,78	85	33,73
	205		218		233		233		252	

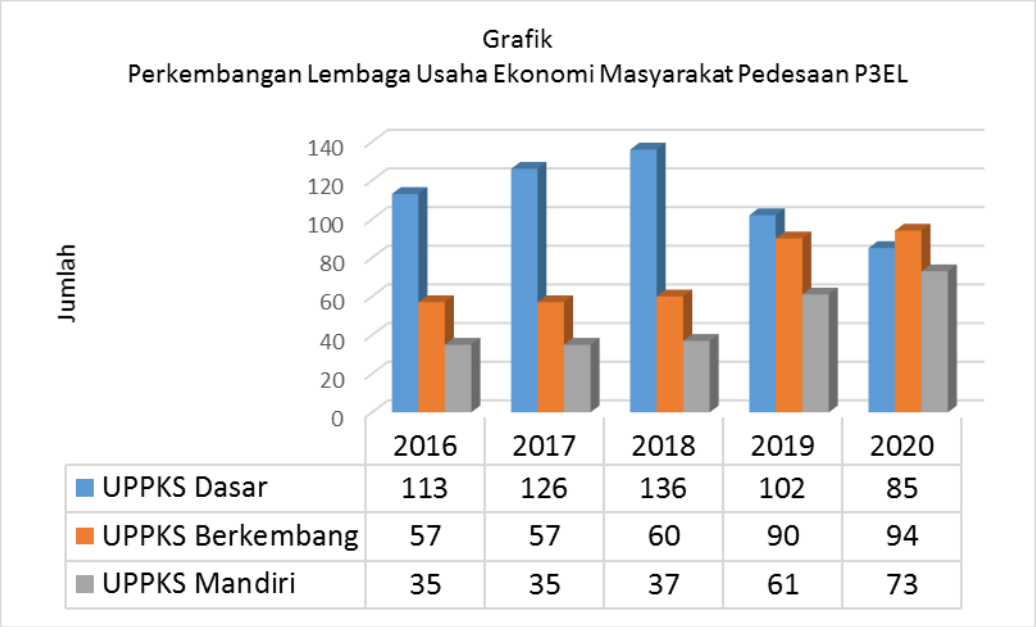

- **Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Mandiri**

  Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan realisasi tahun 2020 sebesar 26,26% dari 179 lembaga usaha yaitu 47 lembaga atau tercapai 105,04% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 sebesar 25%

  Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan capaian tahun 2019 sebesar 24,46% atau 34 lembaga atau meningkat sebesar 1,8% atau sebanyak 13 lembaga usaha di tahun 2020

  Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 93,78% dari target tahun 2021 sebesar 28%, hal ini diupayakan dengan melakukan fasilitasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi dalam pengembangan Bumdes dan melakukan

pelatihan kepada Bumdes, memberika sosialisasi aplikasi Bumdes untuk pengembangan Bumdes.

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah BUMDES	%	Jumlah BUMDES	%	Jumlah BUMDES	%	Jumlah BUMDES	%	Jumlah BUMDES	%
BUMDES Mandiri	4	9,76	4	4,55	6	5,56	34	24,46	45	25,14
BUMDES Berkembang	10	24,39	10	11,36	33	30,56	33	23,74	46	25,70
BUMDES Dasar	27	65,85	74	84,09	69	63,89	72	51,80	88	49,16
	41		88		108		139		179	

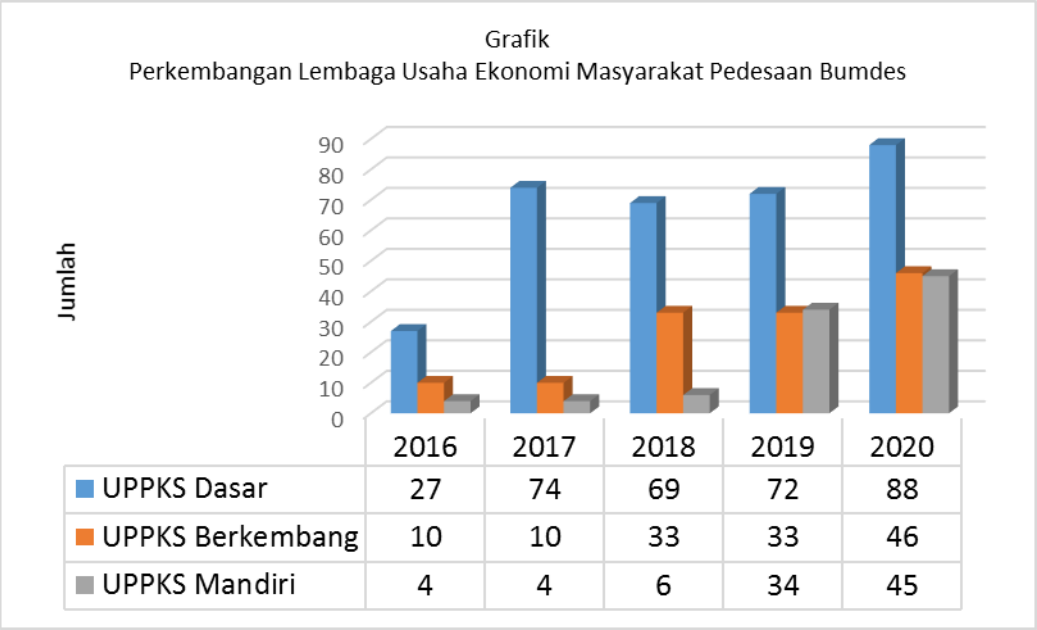

Pengertian kriteria Bumdes yang sesuai dengan penjelasan renstra yaitu :

Bumdes Dasar yaitu Bumdes yang baru dan sudah terbentuk, tetapi belum ada Surat Keputusan

Bumdes Berkembang yaitu Bumdes yang sudah terbentuk dan sudah ada Surat Keputusan, tetapi kurang dalam SDM dan sarana prasarana

Bumdes Mandiri yaitu Bumdes yang sudah terbentuk, sudah ada Surat Keputusan dan SDM dan sarana prasarana memadai

Permasalahan :

Tidak ada kendala yang berarti dalam capaian realisasi kinerja tujuan dan realisasi kinerja sasaran OPD

Solusi :

Untuk optimalisasi kedepannya, berupaya meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor guna capaian realisasi dari target berikutnya

c. Program dan Kegiatan

Program pembangunan untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** dengan anggaran sebesar Rp.1.201.048.650,- dan terealisasi sebesar Rp.998.049.138,- atau 83,10%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase Lembaga / Organisasi Masyarakat Desa / Kelurahan yang mempunyai peran aktif dalam pembangunan Desa / Kelurahan	95%	94,03%	98,98%

Permasalahan :

Tidak ada kendala yang berarti dalam capaian realisasi kinerja tujuan dan realisasi kinerja sasaran OPD

Solusi :

Untuk optimalisasi kedepannya, melakukan monitoring dan evaluasi guna capaian realisasi dari target berikutnya

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Peningkatan peran TP-PKK	Jumlah Kegiatan TP-PKK yang difasilitasi	8 kegiatan	5 kegiatan	62,5 %	619.102.150	446.261.718	72,08
Peningkatan Keberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina	368 lembaga	368 lembaga	100%	512.958.300	483.424.220	94,24

	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dimonev	10.853 lembaga	10.818 lembaga	99,67 %			
Peningkatan Keberdayan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa	Jumlah Kelompok Sosial Budaya Masyarakat Desa yang difasilitasi	0	0	0%	68.988.200	68.363.200	99,09
	Jumlah kegiatan kelompok sosial budaya yang diselenggarakan atau difasilitasi	1 kegiatan	0 kegiatan	0%			
	Jumlah Kelompok Sosial Budaya Masyarakat Desa yang dimonev	353 kelompok	353 kelompok	100%			

2. **Program peningkatan keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat** dengan anggaran sebesar Rp.344.574.280,- dan terealisasi sebesar Rp.331.915.280,- atau 96,33%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan UPPKS Berkembang	40%	40,17%	100,44%
Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan UED-SP Berkembang	43%	43,51%	101,19%
Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan P3EL Berkembang	37%	37,30%	100,82%
Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan Bumdes Berkembang	26%	29,05%	111,73%

Permasalahan :

Tidak ada kendala yang berarti dalam capaian realisasi kinerja tujuan dan realisasi kinerja sasaran OPD

Solusi :

Untuk optimalisasi kedepannya, melakukan koordinasi dengan TPP P3MD (Tim Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk melakukan monitoring dan evaluasi lembaga ekonomi guna capaian realisasi dari target berikutnya

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Peningkatan keberdayaan lembaga usaha ekonomi masyarakat	Jumlah Lembaga Keuangan Masyarakat yang dibina	0 lembaga	0 lembaga	0%	112.025.000	109.765.000	97,98
	Jumlah Lembaga Keuangan Masyarakat yang dimonev	4 lembaga	4 lembaga	100%			
Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	0 kelompok	0 kelompok	0%	31.375.000	30.175.000	96,18
	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang dibina	150 lembaga	150 lembaga	100%			
Pemanfaatan sumber daya pedesaan	Jumlah Peserta Inovasi Masyarakat yang difasilitasi	80 kelompok	32 kelompok	40%	82.464.880	74.855.880	90,77
	Jumlah Kerjasama antar desa yang difasilitasi	1 kerjasama	0 kerjasama	0%			
Peningkatan kapasitas pendamping masyarakat	Jumlah Program Instansi Pemerintah lain yang difasilitasi	1 program	1 program	100%	118.709.400	117.119.400	98,66
	Jumlah pendamping masyarakat yang dibina	148 orang	148 orang	100%			

3. **Program Pembinaan Pemerintahan Desa** dengan anggaran sebesar Rp.2.020.125.780,- dan terealisasi sebesar Rp.1.668.959.980,- atau 82,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi pemerintah Desa sesuai ketentuan	95%	95%	100%

<u>Permasalahan :</u>

Tidak ada kendala yang berarti dalam capaian realisasi kinerja tujuan dan realisasi kinerja sasaran OPD

Solusi :

Untuk optimalisasi kedepannya, dengan memberikan himbauan/intruksi yang lebih kepada pemerintah desa terkait waktu pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa guna capaian realisasi dari target berikutnya

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah penyelenggara pemerintah desa yang dibina	322 desa	322 desa	100%	1.368.128.280	1.075.862.480	78,64
	Jumlah Penyelenggara Pemerintah yang Dimonev	322 desa	322 desa	100%			
Pembinaan Kelembagaan Desa dan Fasilitasi Musdes	Jumlah Musrenbang Desa yang difasilitasi	322 desa	322 desa	100%	153.750.000	149.113.500	96,98
	Jumlah lembaga BPD yang dibina	322 desa	322 desa	100%			
	Jumlah lembaga BPD yang dimonev	322 lembaga	322 lembaga	100%			
Pembinaan administrasi pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Desa yang difasilitasi dan dimonev	322 dokumen	322 dokumen	100%	498.247.500	443.984.000	89,11
	Jumlah Dokumen Pelaporan Desa yang difasilitasi dan dimonev	322 dokumen	322 dokumen	100%			
	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	1 sistem informasi desa	1 sistem informasi desa	100%			

4. **Program Pembinaan Keuangan, Aset dan Kekayaan Desa** dengan anggaran sebesar Rp.3.605.000.260,- dan terealisasi sebesar Rp.651.866.024,- atau 18,08%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase desa yang menyusun tatakelola keuangan aset dan kekayaan sesuai ketentuan	90%	31,19%	34,66%

Permasalahan:

1. Sering terjadinya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset desa yang membuat bingung di tingkat pemerintahan desa
2. Kualitas aparatur pemerintahan desa yang masih kurang bisa menangani permasalahan terkait aplikasi pengelolaan keuangan dan aset desa
3. Anggaran baru ditetapkan dalam PAPD 2020, sehingga kewajiban iuran bpjs baru terbayarkan bulan Juli sampai Desember 2020
4. Masih banyaknya desa yang belum menyelesaikan pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang Rincian kekayaan dan aset desa yang mengakibatkan rendahnya realisasi yang didapatkan dari target yang telah di rencanakan

Solusi:

1. Penetapan regulasi yang lebih sederhana dan seharusnya bisa mempermudah pemerintahan desa dalam menerapkan setiap perubahan aturan secara tepat dan baik
2. Lebih bisa memilih dalam hal penempatan perangkat sesuai tupoksi dan beban kerja yang di berikan
3. Terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait Peraturan Kepala Desa yang dimaksud agar bisa di selesaikan pada tahun berikutnya

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pembinaan Penyelenggaraan Keuangan Desa	Jumlah Sistem Informasi yang Dikelola	1 Siskeudes	1 Siskeudes	100%	3.452.241.800	546.792.564	15,84
	Jumlah Pengelola Keuangan Desa yang Dibina	322 desa	0 desa	0%			
	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Desa yang Dimonev	322 dokumen	320 dokumen	99,38 %			
Pembinaan Penyelenggaraan Kekayaan dan Aset Desa	Jumlah Pengelola Kekayaan dan Aset Desa yang Dibina dan dimonev	322 desa	322 desa	100%	152.758.460	105.073.460	68,78
	Jumlah Dokumen Kekayaan dan Aset Desa yang Difasilitasi	12 dokumen	12 dokumen	100%			

	Jumlah Sistem Informasi yang Dikelola	1 sistem pengelolaan asset desa	1 sistem pengelolaan asset desa	100%			

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Realisasi Kinerja Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

TUJUAN	TAHUN 2018				TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Mewujudkan pengarusutamaan gender yang berkeadilan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	94,45	93,33	98,81%	94,55	93,79	99,20%	94,65	94,13	99,45 %

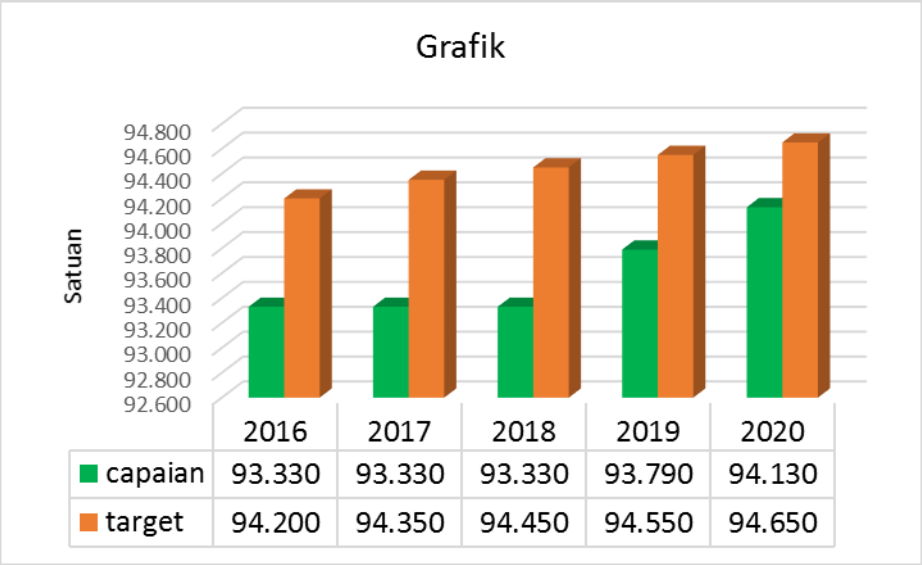

Sumber Data BPS

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja IPG tahun 2020 sebesar 94,13 , maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai 99,10% dari target 94,75 tidak mencapai target , hal ini dikarenakan ada beberapa hal terkait :

- Proporsi Penduduk L = 50,25 P= 49,75
- Angka Harapan Hidup L=71,89 P=75,66
- Harapan Lama Sekolah L=14,80 P=14,66
- Rata-rata Lama Sekolah L= 10,78 P= 9,71
- Pengeluaran Per Kapita L= 19,67 P=13,64
- IPM Menurut Gender L= 83,66 P= 78,08 , namun demikian Kabupaten Sidoarjo sudah berkinerja dengan capaian diatas 90%.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 93,79, maka capaian kinerja tahun 2020 sebesar 94,13 sudah mengalami kenaikan 0,1 %.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 97,92% dari target, hal ini diupayakan dengan pengoptimalan program pemberdayaan perempuan dalam peningkatan pendapatan perkapita

Apabila dibandingkan dengan standart Nasional dengan target , maka capaian kinerja Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 sudah memenuhi standart Nasional, hal ini dikarenakan realisasi Nasional sebesar 91,06 sedangkan Kabupaten Sidoarjo 94,13.

b. Realisasi Kinerja Sasaran

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

2. Meningkatnya Kesetaraan Gender serta perlindungan Perempuan dan Anak

Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	64,7	64,46	99,63%	64,75	67,13	103,68%	64,8	67,13	103,6%
Presentase kasus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

<u>Permasalahan :</u>

1. Program : Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
   - Masih kurang kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan kepada masyarakat, lembaga, dan OPD terkait karena adanya kekhawatiran

resiko terpapar covid. Layanan berlaih secara online dikarenakan menghindari tatap muka

- Belum semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memahami tentang Pengarusutamaan Gender
- Belum semua OPD di dalam penganggaran kegiatan responsive gender
- Sering terjadinya mutase pejabat di OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menangani Pengarusutamaan Gender
- Belum adanya regulasi terkait pelaksanaan KLA di Kabupaten Sidoarjo
- Masih belum maksimalnya peran OPD, yang tergabung dalam gugus tugas KLA Kabupaten Sidoarjo
- Kurangnnya peran swasta, media masa dan masyarakat serta keluarga dalam upaya pemenuhan hak anak dalam bentuk program kegiatan maupun penyediaan sarana dan prasarana fisik
- Pengembangan Kecamatan dan Desa / Kelurahan Layak Anak sudah dilaksanakan di 18 Kecamatan, namun respon dari kecamatan belum maksimal
- Pelaksanaan pembentukan sekolah ramah anak yang telah diinisiasi / dibentuk oleh dinas Pendidikan dan kebudayaan, Puskesmas / Klinik layak anak yang telah diinisiasi / dibentuk oleh Dinas Kesehatan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta Pondok Pesantren Ramah Anak belum terpantau secara khusus
- Belum maksimalnya pembentukan Lembaga dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung Kabupaten Sidoarjo menjadi layak anak
- Pelaksanaan Kabupaten / Kota Layak Anak yang terus berkembang
- Kurangnya tenaga psikologi klinis dalam trauma healing korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Keterbatasan masyarakat dalam melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak selama mas pandemic covid 19

Solusi :

1. Program : Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
    - Pembentukan PATBM di tingkat desa dan kecamatan bisa bertambah
    - Meningkatkan penguatan kapasitas jaringan kepada Dinas OPD, instansi vertical, LSM organisasi dan pemerhati perempuan dan anak
    - Membuat MOU dengan pihak sekolah
    - Mengusulkan SK Bupati tentang pembentukan Tim Teknis Analisis dan Penganggaran responsive gender kabupaten Sidoarjo

- Mengusulkan pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di semua OPD dengan diterbitkannya SK Kepala OPD
- Regulasi terkait KLA telah diinisiasi sejak tahun anggaran 2018
- Peran OPD yang tergabung dalam gugus tugas KLA Kabupaten Sidoarjo perlu terus ditingkatkan
- Peningkatan peran swasta dan organisasi masyarakat serta keluarga dalam upaya pemenuhan hak anak
- Pemantapan ke kecamatan terkait kepastian pembentukan Gugus Tugas Kecamatandan Desa / Kelurahan Layak Anak
- Sekolah ramah anak yang telah diinisiasi / dibentuk oleh dinas Pendidikan dan kebudayaan perlu terus dipantau / dimonitoring dan dievaluasi
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan puskesmas ramah anak sebagaimana dasar / regulasi yang ada
- Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan pondok pesantren perlu dimonitor agar pelaksanaan nya sesuai dengan regulasi yang ramah anak
- Penyediaan sarana / prasarana RBRA baik indoor maupun outdoor di tingkat Kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan sampai ke wilayah terkecil yaitu RT/RW perlu dilaksanakan dengan cara pemetaan dan usulan program
- Pembentukan PKSAI dan APSAI diupayakan tahun 2021 guna memperkuat pelaksanaan KLA di Kabupaten Sidoarjo
- Penyesuaian pelaksanaan kegiatan kabupaten / kota layak anak yang terus berkembang
- Meningkatkan pelayanan yang lebih cepat oleh petugas UPTD PPA sehingga permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak segera tertangani secara maksimal dengan membuat pelaporan secara online (Webs)
- Melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan yang sudah ada

c. Program dan Kegiatan

1. **Program Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** dengan anggaran sebesar Rp.1.885.716.739,- dan terealisasi sebesar Rp.1.634.843.646,- atau 87,80 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Prosentase Lembaga / organisasi yang melaksanakan kebijakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	42,90 %	67,83 %	158,11%
Prosentase Lembaga / organisasi yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak	19,31 %	95,12 %	492,59%
Prosentase Lembaga / organisasi yang melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak	44,19 %	96,38 %	218,10%
Prosentase Kasus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang tertangani	100 %	93,93 %	93,93%

Permasalahan:

1. Masih kurang kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan kepada masyarakat, lembaga, dan OPD terkait karena adanya kekhawatiran resiko terpapar covid. Layanan berlaih secara online dikarenakan menghindari tatap muka
2. Belum semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memahami tentang Pengarusutamaan Gender
3. Belum semua OPD di dalam penganggaran kegiatan responsive gender
4. Sering terjadinya mutase pejabat di OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menangani Pengarusutamaan Gender
5. Belum adanya regulasi terkait pelaksanaan KLA di Kabupaten Sidoarjo
6. Masih belum maksimalnya peran OPD, yang tergabung dalam gugus tugas KLA Kabupaten Sidoarjo

7. Kurangnnya peran swasta, media masa dan masyarakat serta keluarga dalam upaya pemenuhan hak anak dalam bentuk program kegiatan maupun penyediaan sarana dan prasarana fisik
8. Pengembangan Kecamatan dan Desa / Kelurahan Layak Anak sudah dilaksanakan di 18 Kecamatan, namun respon dari kecamatan belum maksimal
9. Pelaksanaan pembentukan sekolah ramah anak yang telah diinisiasi / dibentuk oleh dinas Pendidikan dan kebudayaan, Puskesmas / Klinik layak anak yang telah diinisiasi / dibentuk oleh Dinas Kesehatan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta Pondok Pesantren Ramah Anak belum terpantau secara khusus
10. Belum maksimalnya pembentukan Lembaga dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung Kabupaten Sidoarjo menjadi layak anak
11. Pelaksanaan Kabupaten / Kota Layak Anak yang terus berkembang
12. Kurangnya tenaga psikologi klinis dalam trauma healing korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
13. Keterbatasan masyarakat dalam melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak selama mas pandemic covid 19.

Solusi:

1. Pembentukan PATBM di tingkat desa dan kecamatan bisa bertambah
2. Meningkatkan penguatan kapasitas jaringan kepada Dinas OPD, instansi vertical, LSM organisasi dan pemerhati perempuan dan anak
3. Membuat MOU dengan pihak sekolah
4. Mengusulkan SK Bupati tentang pembentukan Tim Teknis Analisis dan Penganggaran responsive gender kabupaten Sidoarjo
5. Mengusulkan pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di semua OPD dengan diterbitkannya SK Kepala OPD
6. Regulasi terkait KLA telah diinisiasi sejak tahun anggaran 2018
7. Peran OPD yang tergabung dalam gugus tugas KLA Kabupaten Sidoarjo perlu terus ditingkatkan
8. Peningkatan peran swasta dan organisasi masyarakat serta keluarga dalam upaya pemenuhan hak anak
9. Pemantapan ke kecamatan terkait kepastian pembentukan Gugus Tugas Kecamatandan Desa / Kelurahan Layak Anak

10. Sekolah ramah anak yang telah diinisiasi / dibentuk oleh dinas Pendidikan dan kebudayaan perlu terus dipantau / dimonitoring dan dievaluasi
11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan puskesmas ramah anak sebagaimana dasar / regulasi yang ada
12. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan pondok pesantren perlu dimonitor agar pelaksanaan nya sesuai dengan regulasi yang ramah anak
13. Penyediaan sarana / prasarana RBRA baik indoor maupun outdoor di tingkat Kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan sampai ke wilayah terkecil yaitu RT/RW perlu dilaksanakan dengan cara pemetaan dan usulan program
14. Pembentukan PKSAI dan APSAI diupayakan tahun 2021 guna memperkuat pelaksanaan KLA di Kabupaten Sidoarjo
15. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan kabupaten / kota layak anak yang terus berkembang
16. Meningkatkan pelayanan yang lebih cepat oleh petugas UPTD PPA sehingga permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak segera tertangani secara maksimal dengan membuat pelaporan secara online (Webs)
17. Melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan yang sudah ada

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALI SASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Advokasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi Pengarus Utamaaan Gender	Jumlah instansi / Lembaga yang dibina PUG	185	185	100 %	384.894.400	261.091.295	67,83%
Pembinaan dan pelatihan keterampilan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	-	-	-	399.602.075	333.985.675	83,55 %

kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (dana cukai)							
Advokasi, koordinasi pembinaan dan evaluasi pemenuhan hak anak	Jumlah Lembaga pemenuhan hak anak yang diadvokasi dan dibina	260 lembaga	260 lembaga	100 %	309.287.600	294.182.250	95 %
	Jumlah Kecamatan, Desa / kelurahan menuju layak anak yang diadvokasi dan dibina	238 lembaga	238 lembaga	100 %			
Advokasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi perlindungan khusus anak	Jumlah Lembaga perlindungan perempuan dan anak yang diadvokasi dan dibina	87 lembaga	87 lembaga	100 %	77.000.900	74.210.900SS	96 %
	Jumlah rekomendasi tindak lanjut peningkatan perlindungan perempuan dan anak	10 rekomendasi	11 rekomendasi	110 %			

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlidungan Anak dan Keluarga Berencana dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Realisasi Kinerja Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

TUJUAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019					TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya pengendalian penduduk melalui pengoptimalan pencapaian keluarga berencana	TFR (Total Fertility Rate)	2,18	1,81	83,03%	2,06	1,978	96,02%	2,02	1,978	97,92%

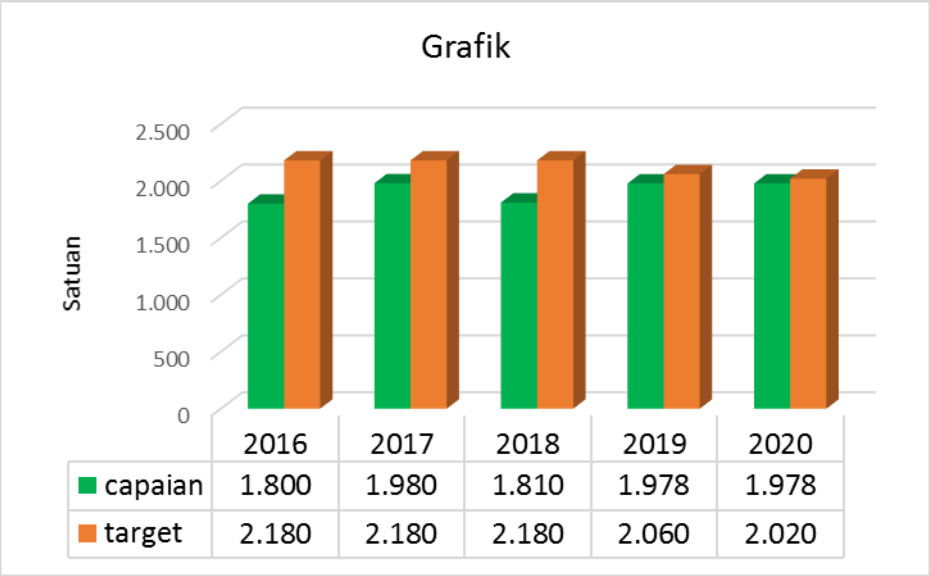

Daftar Grafik Capaian dan Target TFR

Sumber Data : BPS dan Penghitungan sendiri

Apabila dibandingkan dengan target TFR tahun 2020 sebesar 2,02, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai 1,978 atau 97,92 % sudah mencapai target, hal ini dikarenakan prosentase lebih sedikit artinya capaian kinerjanya lebih baik dalam artian wanita usia 15 - 49 melahirkan anak Antara 1 - 2
anak. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 1,978, maka capaian kinerja tahun 2020 sementara masih sama capaian kinerjanya dikarenakan belum di publikasikan Badan Pusat Statistik (BPS)
Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 97,92% dari target, hal ini diupayakan dengan pengoptimalan program Bangga Kencana
Apabila dibandingkan dengan standart Nasional dengan target 2,6, maka capaian kinerja tahun 2020 sudah memenuhi standart Nasional, hal ini dikarenakan untuk mencapai TFR yang ditargetkan Jawa Timur menerapkan adanya pemberdayaan perempuan dalam bidang perekonomian.

b. Realisasi Kinerja Sasaran

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Pencapaian Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Penduduk

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase PUS yang ikut KB	81,43 %	81,55 %	100	81,55 %	81,58 %	100	81,61 %	79 %	97
Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan	0,45 %	0,26%	57,78%	0,4 %	0,59%	147,5%	0,35 %	0,69 %	197 %
Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki institusi Masyarakat Pedesaan	72 %	71,04%	98,67%	73 %	75,37%	103,25%	74 %	75,71 %	102 %

(IMP) yang mandiri									
CBR (Crude Birth Rate)	16,8	13,796	82,12 %	16,4	12,98	79,15%	16	12,98	81,13 %

Permasalahan :

1. Program : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
    - Keterbatasan dalam melaksanakan sosialisasi dan advokasi sehingga kegiatan tersebut hanya melalui daring WA Group
    - Perubahan pola pelayanan KB dalam era pandemic antara lain :
        a. Calon ekseptor harus melalui rapid test dengan biaya mandiri
        b. Keterbatasan alat pelindung diri untuk tim medis
    - Rasa ketakutan masyarakat untuk datang ke faskes KB karena pandemi
2. Program : Pengendalian Penduduk
    - Belum disusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten
    - Kurangya pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
    - Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh isu-isu kependudukan
    - Ketersediaan data dan informasi kependudukan yang sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada di segala tingkatan
    - Kurangnya pengembangan dalam pengelolaan data dan informasi kependudukan sebagai bahan pembuatan perencanaan dan kebijakan dalam pengendalian kependudukan
    - Terbatasnya keterpaduan dan sinkronisasi data antar Lembaga atau instansi terkait

Solusi :

1. Program : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
    - Evaluasi dan monev untuk petugas KB sesuai wilayah masing masih secara berkala
    - Tersedianya biaya anggaran Rapid dan APD (Hazmet bagi Tim Medis untuk pelayanan KB tahun anggaran 2021
    - Sosialisasi Pelayanan KB era pandemic melalui jejaring di lini lapangan dari petugas dari Petugas KB, PPPKBD, dan Sub PPKBD

2. Program : Pengendalian Penduduk
    - Membuat perencanaan untuk Menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten
    - Menyusun Langkah-langkah strategis untuk pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
    - Menyusun strategi untuk meningkatkan indek pemahaman masyarakat terhadap isu-isu kependudukan
    - Menyusun Langkah – Langkah strategis untuk menciptakan suatu bank data kependudukan di segala tingkatan yang update sesuai dengan kondisi dan realita
    - Menciptakan inovasi dan ide kreatif dalam pengelolaan data kependudukan agar selalu update dan berkelanjutan secara online
    - Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi sumber data yang update dengan berbagai lintas sector yang terkait dengan kependudukan di segala tingkatan secara terus menerus dan berkesinambungan

c. Program dan Kegiatan

1. **Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera** dengan anggaran sebesar Rp.12.864.487.599,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.669.006.925,- atau 90,71%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase Pencapaian Peserta KB Baru	80	110,65	138 %
Persentase pencapaian KB aktif	100	112	112 %
Persentase Kelompok Bina Keluarga Mandiri	73	73	100 %
Persentase PPKBD yang aktif	85,5	85,67	101 %

Permasalahan:

1. Keterbatasan dalam melaksanakan sosialisasi dan advokasi sehingga kegiatan tersebut hanya melalui daring WA Group
2. Perubahan pola pelayanan KB dalam era pandemic antara lain :
    - Calon ekseptor harus melalui rapid test dengan biaya mandiri
    - Keterbatasan alat pelindung diri untuk tim medis
3. Rasa ketakutan masyarakat untuk datang ke faskes KB karena pandemic

Solusi:

1. Evaluasi dan monev untuk petugas KB sesuai wilayah masing masih secara berkala
2. Tersedianya biaya anggaran Rapid dan APD (Hazmet bagi Tim Medis untuk pelayanan KB tahun anggaran 2021
3. Sosialisasi Pelayanan KB era pandemic melalui jejaring di lini lapangan dari petugas dari Petugas KB, PPPKBD, dan Sub PPKBD

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Peningkatan kualitas ketahanan keluarga	Jumlah IMP yang dibina	349	349	100 %	8.233.081.400	8.225.124.250	99.9
	Jumlah kelompok Bina Keluarga yang dibina	100	100	100			
Pembinaan pelayanan KB (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan	160	78	49 %	11.107.088.083	7.016.937.850	63 %
Pembinaan Kesehatan reproduksi remaja	Jumlah peserta sosialisasi Kesehatan reproduksi remaja	1080	1080	100 %	97.368.000	78.382.000	81 %
	Jumlah peserta Sosialisasi Pencegahan HIV AIDS	1080	1080	100 %			
Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah peserta KB yang terlayani	140.967	83.902	60%	276.040.000	40.402.000	14,64 %
	Jumlah petugas KB yang dibina	300	300	100 %			
	Jumlah peserta KB yang dimonitor dan dilaporkan	1.343.821	1.138.571	85 %			
	Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan	0	0	0			

Advokasi dan KIE	Jumlah jenis Media KIE						
	Jumlah PUS Unmeetneet yang mengikuti KIE dan KIP						

2. **Program Pengendalian Penduduk** dengan anggaran sebesar Rp.1.193.895.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.125.682.650,- atau 94,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan	7	5	71 %

Permasalahan:

1. Belum disusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten
2. Kurangya pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh isu-isu kependudukan
4. Ketersediaan data dan informasi kependudukan yang sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada di segala tingkatan
5. Kurangnya pengembangan dalam pengelolaan data dan informasi kependudukan sebagai bahan pembuatan perencanaan dan kebijakan dalam pengendalian kependudukan
6. Terbatasnya keterpaduan dan sinkronisasi data antar Lembaga atau instansi terkait

Solusi:

1. Membuat perencanaan untuk Menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten
2. Menyusun Langkah-langkah strategis untuk pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
3. Menyusun strategi untuk meningkatkan indek pemahaman masyarakat terhadap isu-isu kependudukan

4. Menyusun Langkah – Langkah strategis untuk menciptakan suatu bank data kependudukan di segala tingkatan yang update sesuai dengan kondisi dan realita
5. Menciptakan inovasi dan ide kreatif dalam pengelolaan data kependudukan agar selalu update dan berkelanjutan secara online
6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi sumber data yang update dengan berbagai lintas sector yang terkait dengan kependudukan di segala tingkatan secara terus menerus dan berkesinambungan

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pengendalian penduduk	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan	44,44%	44,44%	100%	1.193.895.500	1.125.682.650	94,29%
Pengolahan data kependudukan	Jumlah Data kependudukan yang terupdate	50 %	50%	100%	959.646.900	894.092.350	93,17%
Penyusunan Analisa Kebijakan Kependudukan	Jumlah Dokumen analisa kebijakan pengendalian penduduk Jumlah lembaga siaga kependudukan	4 Dokumen 48 lembaga	4 Dokumen 48 lembaga	100 % 100%	234.248.100	331.590.300	98,87%

Urusan Pangan

Urusan pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Realisasi Kinerja Sasaran dan Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan yang telah dicapai berdasarkan tujuan dan juga sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatkan ketahanan pangan daerah	1.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	87,9	88,3	100,5 %	88,4	89,30	101 %	88,9	89,7	100, 90%
	2.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	89,77	88,72	98,8%	89,45	89,41	100 %	89,49	89,87	100, 42%

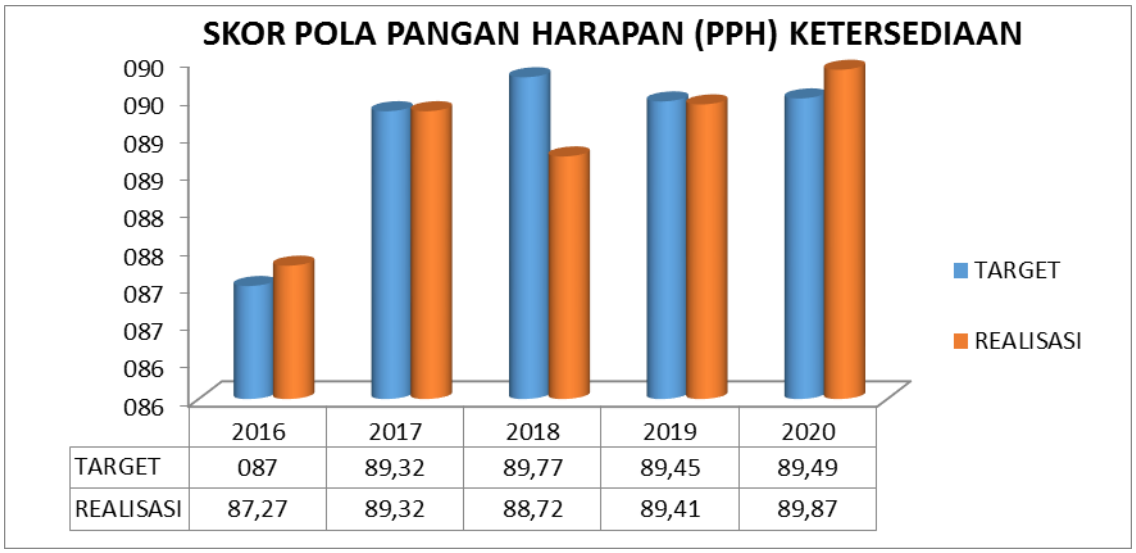

	2016	2017	2018	2019	2020
TARGET	087	89,32	89,77	89,45	89,49
REALISASI	87,27	89,32	88,72	89,41	89,87

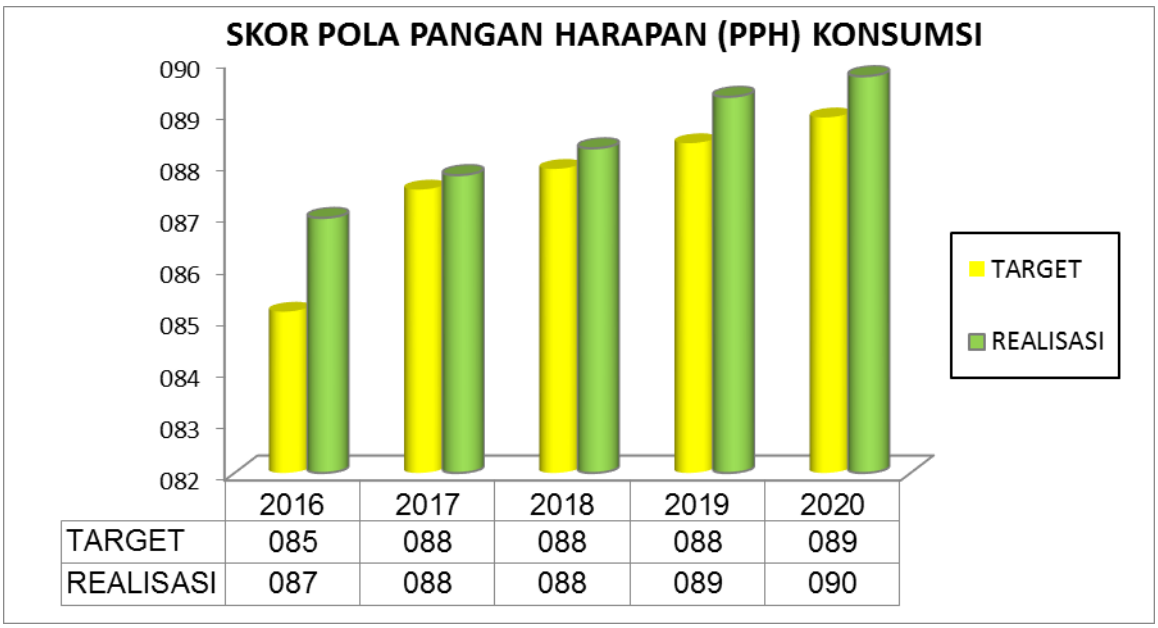

	2016	2017	2018	2019	2020
TARGET	085	088	088	088	089
REALISASI	087	088	088	089	090

1). Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan.

Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat dari kecukupan gizinya, baik energi dan protein, juga dinilai dari sisi keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi Neraca Bahan Makanan (NBM). Keberagaman pangan akan

mendukung pencapaian keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan.

Dalam perhitungan dan pencapaian skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan dihitung berdasarkan produksi, cadangan dan pasokan pangan dari daerah lain yang dituangkan dalam Neraca Bahan Makan (NBM).

Skor PPH tingkat ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2020 menunjukkan skor 89,87, apabila dibandingkan dengan mengalami peningkatan sebesar 0,8% dari skor 89,41. hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di kabupaten Sidoarjo sudah cukup beragam

Perkembangan realisasi pola pangan harapan ketersediaan tahun 2020 terlihat pada data berikut :

PERKEMBANGAN POLA PANGAN HARAPAN (PPH)

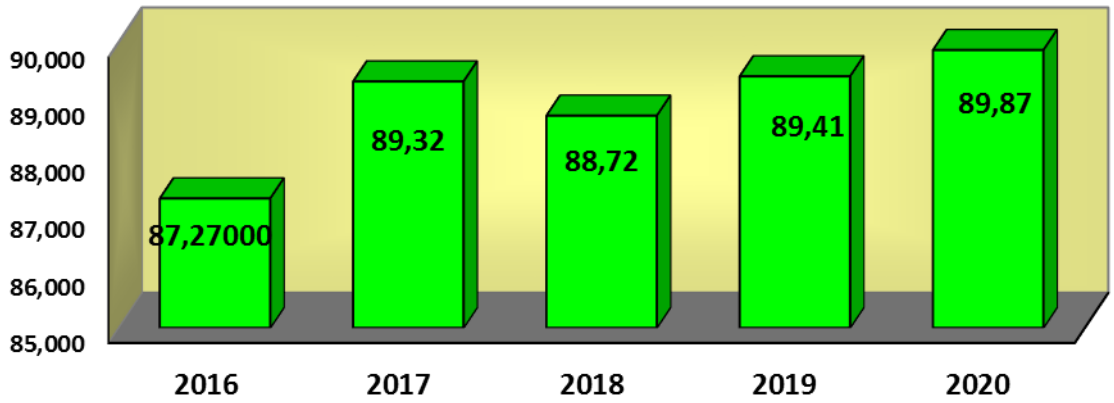

POLA PANGAN HARAPAN KETERSEDIAAN KABUPATEN SIDOARJO

No.	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	Ketersediaan energi ideal (kkal/kap/hari)	% aktual	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks (Ideal)	GAP SKOR AKE
1.	Padi-padian	1.167	1.200	47,17	48,6	0,5	24,3	2,0	25,0	(0,7)
2.	Umbi-	23	144	0,92	0,9	0,5	0,5	0,5	2,5	(2,0)

	umbian									
3.	Pangan Hewani	326	288	13,16	13,6	2,0	27,1	24,0	24,0	3,1
4.	Minyak dan Lemak	519	240	20,99	21,6	0,5	10,8	5,0	5,0	5,8
5.	Buah/biji berminyak	90	72	3,65	3,8	0,5	1,9	1,0	1,0	0,9
6.	Kacang-kacangan	88	120	3,55	3,7	2,0	7,3	7,3	10,0	(2,7)
7.	Gula	140	120	5,67	5,8	0,5	2,9	2,5	2,5	0,4
8.	Sayuran dan buah	121	144	4,90	5,1	5,0	25,3	25,3	30,0	(4,7)
9	Lain-Lain	-	72	-	-		-	-	-	
	Jumlah	**2.474**	**3.400**	**100,00**	**103,11**		**102,2**	**89,87**	**100,0**	

*) Sumber Data : hasil olah data & survey pihak ke tiga

2). Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi

Adalah nilai capaian yang mencerminkan tingkat konsumsi pangan masyarakat dibanding tingkat konsumsi pangan ideal yang memenuhi kaidah pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Kondisi ini dapat dilihat dari aspek kuantitatif dan kualitatif. Dari aspek kuantitatif digunakan untuk mengetahui cukup tidaknya jumlah konsumsi pangan yang dikonsumsi, sedang kualitatif digunakan untuk mengetahui keseimbangan gizi dari aneka ragam pangan yang dikonsumsi penduduk.

Perkembangan realisasi pola pangan harapan konsumsi tahun 2020 terlihat pada data berikut :

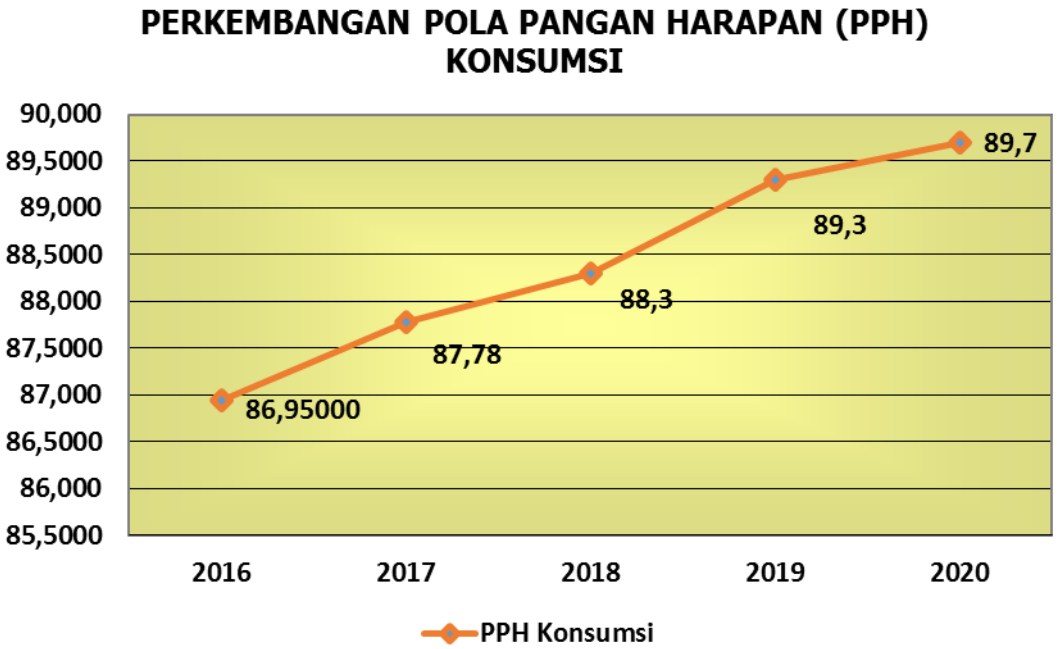

Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari Skor PPH Konsumsi. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Capaian Skor PPH Konsumsi pada tahun 2020 sebesar 89,7 , apabila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,4%, adapun skor PPH 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

SKOR PPH KONSUMSI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)									
		Berat Konsumsi Pangan (g/kapita/ hari)	Kalori	%	% AKE	Bobot*	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Gap Skor AKE dan Skor Maksimal	Skor PPH
No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=5x6	(8)	(9)	(10)	(1)
1.	Padi-padian	242.2	941.7	43.5	43.8	0.5	21.7	21.9	25.0	-3.1	21.9
2.	Umbi-umbian	58.9	58.2	2.7	2.7	0.5	1.3	1.4	2.5	-1.1	1.4
3.	Pangan Hewani	239.9	377.8	17.4	17.6	2.0	34.9	35.1	24.0	0.0	24.0

4.	Minyak dan Lemak	48.4	435.6	20.1	20.3	0.5	10.1	10.1	5.0	0.0	5.0
5.	Buah/Biji Berminyak	7.6	40.9	1.9	1.9	0.5	0.9	1.0	1.0	0.0	1.0
6.	Kacang-kacangan	31.9	84.1	3.9	3.9	2.0	7.8	7.8	10.0	-2.2	7.8
7.	Gula	22.2	81.3	3.8	3.8	0.5	1.9	1.9	2.5	-0.6	1.9
8.	Sayur dan Buah	381.5	115.2	5.3	5.4	5.0	26.6	26.8	30.0	-3.2	26.8
9.	Lain-lain	221.0	32.2	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Total		2167.1	100.0	101.9	0.0	95.0	96.8	100.0		89.7

Sumber Data : hasil olah data & survey pihak ke tiga

Ket :
(1) Jumlah kelompok pangan yang dikonsumsi dalam satuan gram/kapita/hari
(2) Kalori yang dihasilkan dari kelompok pangan yang dikonsumsi dalam satuan kkal/kapita/hari
(3) Persentase sumbangan kalori kelompok pangan pada kolom (1) terhadap total jumlah kalori yang dikonsumsi (2167,1 kkal.kapita/hari)
(4) Persentase sumbangan kalori kelompok pangan terhadap tingkat konsumsi kalori ideal 2150 kkal/kapita/hari
(5) Bobot merupkaan tetapan yang ditetapkan oleh pemerintah dnegan mengacu kepada FAO-RAPA merupakan faktor pengali untuk angka pada kolom (5)
(6) Skor Aktual merupakan %AKE (kolom 5) dikalikan bobot (kolom 6)
(7) Skor maksimal merupakan skor maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah untuk skor aktual. Jika angka pada kolom (7) melebihi skor maksimal, maka yang dimasukkan ke dalam perhitungan skor PPH adalah skor maksimal. Akan tetapi jika angka pada kolom (7) (skor aktual) kurang dari skor maksimal, maka yang dimasukkan ke dalam skor PPH adalah skor aktual
(8) Kesenjangan antara skor maksimal dengan skor aktual. Jika kelompok pangan mempunyai nilai positif artinya kelebihan konsumsi kalori dari kelompok pangan, sedangkan jika negatif artinya skor aktual lebih rendah dari skor maksimal dan menyebabkan pencapaian skor PPH tidak maksimal
(9) Skor PPH untuk masing-masing kelompok pangan. Penjumlah pada kolom ini merupakan skor PPH konsumsi

Untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi didukung dengan program sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah** dengan anggaran sebesar Rp.761.243.620,00 dan terealisasi sebesar Rp.726.781.455,00 atau 95,47%

   Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Persentase
Prosentase pangan segar yang aman dikonsumsi	83,7%	85%	100
Prosentase Peningkatan cadangan pangan	0,23%	0,23%	100
Tingkat konsumsi beras	240 Gram/kapita/ hari	239,02 Gram/kapita/ hari	99,59
Indikator Fluktuasi harga (constant of variant)	11	8,11	135,6

Tingkat konsumsi beras masyarakat Sidoarjo tahun 2020 sebanyak 239,02 gram/kapita/hari lebih rendah dari tingkat konsumsi ideal berdasarkan PEPRES No. 22 Tahun 2009 sebesar 275 gram/kapita/hari hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sidoarjo sangat ideal dalam mengkonsumsi beras.

Fluktuasi harga (constant of variant) merupakan gambaran dari stabilitas harga pangan pokok. Harga dinyatakan stabil apabila gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang 25 % dari kondisi normal. Fluktuasi harga (constant of variant) di Kabupaten Sidoarjo sebesar 8,11, hal ini menunjukkan bahwa harga pangan pokok cukup stabil.

Pada umumnya tidak terjadi masalah yang signifikan, permasalahan yang timbul dapat diselesaikan pada tahun berjalan, Namun ke depan untuk mengoptimalkan kinerja akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Koordinasi teknis yang lebih insentif dengan pengelola pemilik selep (rice miling unit) serta gapoktan/poktan untuk pembelian gabah
2. Koordinasi setiap indikasi harga akan naik dan mencermati pergerakan harga pangan yang dilakukan enumerator

3. Sosialisasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi , Seimbang dan aman pada setiap kesempatan pada pelaksanaan kegiatan.
4. Sosialisasi hasil uji keamanan pangan segar dilakukan setiap ada kegiatan

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan yaitu :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan daerah	Jumlah ketersediaan cadangan pangan daerah/masyarakat	61.663,30 ton	93847,9 ton	152	Rp 197.440.000	Rp 190.523.000	96,5
2	Peningkatan distribusi pangan daerah	Prosentase CV yang kurang dari angka 15	55,6%	88,88%	159	Rp 80.105.800	Rp 71.307.296	89,02
3	Kewaspadaan dan penanganan rawan pangan	Prosentase penanganan rawan pangan	0,95%	1,02%	107	Rp 53.070.000	Rp 53.040.000	99,94
4	Peningkatan keamanan pangan	Jumlah sampel yang diuji	90 buah	90 buah	100	Rp 64.530.000	Rp 64.020.000	99,21
5	Pemberdayaan pekarangan pangan	Persentase rumah yang memanfaatkan lahan pekarangan	20%	25%	125	Rp 304.127.140	Rp 294.275.639	96,76
6	Pengembangan konsumsi pangan	Jumlah olahan berbahan pangan lokal yang dikembangkan	2 buah	5 buah	250	Rp 61.970.680	Rp 53.615.520	86,52

Kegiatan pengembangan konsumsi pangan realisasi keuangannya 86,52% sedangkan capaian indikator kinerjanya 250% hal ini disebabkan karena pada masa pandemi Covid 19 pertemuan dan pelatihan dilaksanakan melalui

webminar sehingga anggaran yang dialokasikan ke konsumsi pertemuan berkurang.

Urusan Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Realisasi Kinerja Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Tujuan DLHK yang tertuang dalam Renstra SKPD adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan sampai dengan Tahun 2020 kinerja yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Tujuan	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET *)	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	51,29	49,59	97	52,29	49,05	94	49,05	51,52	105
	Indeks Kualitas Udara	85,79	85,04	99	86,79	86,26	99	86,26	85,14	99
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi	24,72	36,77	149	25,72	51,09	199	31,04	52,26	168

*) Target tersebut diatas adalah target penyesuaian pada saat Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 tanggal 23 Juni 2020 karena adanya Refocusing Anggaran atas dampak Covid 19, target semula menurut Renstra antara lain :

Indeks Kualitas Air semula 53,29 menjadi 49,05 ; Indeks Kualitas Udara semula 87,79 menjadi 86,26 ; Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi semula 26,72 menjadi 31,04

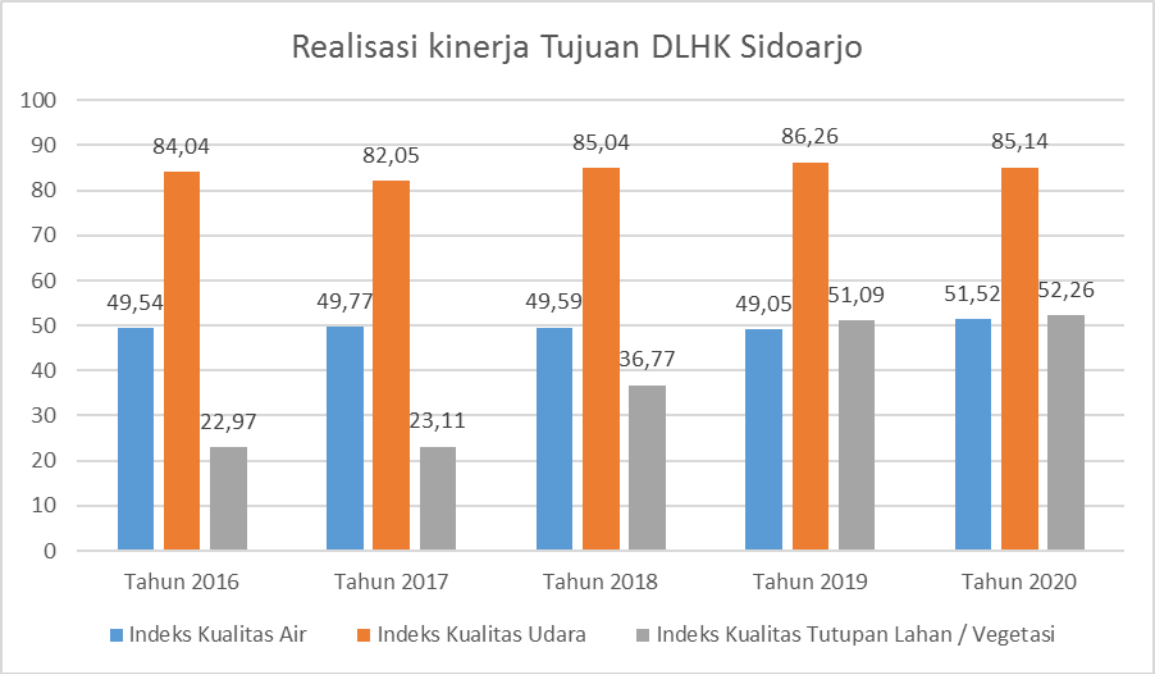

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka realisasi capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi (IKTL) tahun 2020 melebihi target, hal ini dikarenakan terdapat penyesuaian target (*refocusing target*) sehubungan dengan adanya penyesuaian anggaran akibat adanya Pandemi Covid-19 serta evaluasi terhadap realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Namun, pada kenyataannya realisasi capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi (IKTL) Tahun 2020 meningkat cukup signifikan sehingga melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) tidak mencapai target karena terdapat kesalahan teknis di luar dugaan yakni adanya 1 (satu) sampel pemantauan di kawasan permukiman pada Tahap II yang hilang saat akan diambil sampelnya oleh UPTD Laboratorium Lingkungan.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka realisasi capaian kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan selain terdapat kesalahan teknis yang telah dijelaskan di atas,

kemungkinan terdapat peningkatan aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo karena adanya peningkatan jumlah timbulan sampah akibat Covid-19 dan perlu diketahui bahwa pengambilan sampel kualitas udara ambien secara passive sampler untuk perhitungan IKU dilaksanakan pada bulan Juli dan bulan September tahun 2020 yang mana pelaksanaan PSBB sudah selesai dan sudah berlaku New Normal di Kabupaten Sidoarjo sehingga terjadi peningkatan aktivitas kendaraan bermotor kembali sehingga menyebabkan peningkatan pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor. Sedangkan realisasi capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami peningkatan karena penurunan aktivitas usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Sidoarjo termasuk pengurangan jumlah tenaga kerjanya akibat adanya pandemi Covid-19 menyebabkan volume air limbah yang dibuang ke air badan air juga berkurang dan adanya penurunan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo sebagai dampak dari penyebaran wabah Covid-19 dimana sumber pencemar air badan air tertinggi adalah dari kegiatan rumah tangga, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi (IKTL) tahun 2020 juga mengalami peningkatan karena pada Tahun 2020 hasil Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan dihitung melalui metode analisis citra satelit tutupan lahan secara menyeluruh di Kabupaten Sidoarjo serta ada pendetailan tutupan lahan di wilayah SSWP II Kabupaten Sidoarjo. Namun demikian, kedepannya masih akan dilakukan penambahan Ruang Terbuka Hijau terutama peningkatan penghijauan yang berfungsi sebagai produksi biomassa.

Apabila dibandingkan dengan (1) Capaian Indeks Kualitas Air Provinsi Jawa Timur (56,13) maka capaian kinerja tahun 2020 (51,52) belum memenuhi capaian ; (2) Capaian Indeks Kualitas Udara Provinsi Jawa Timur (84,59) maka capaian kinerja tahun 2020 (85,14) sudah melebihi capaian ; (3) Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi Provinsi Provinsi Jawa Timur (62,06) maka capaian kinerja tahun 2020 (52,26) belum memenuhi capaian.

b. Realisasi Kinerja Sasaran

Sasaran Urusan bidang Lingkungan Hidup Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air	25 %	28,18 %	113	28 %	43 %	154	43 %	46 %	107
Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO_2 dan NO_2 sesuai Baku Mutu Udara	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100

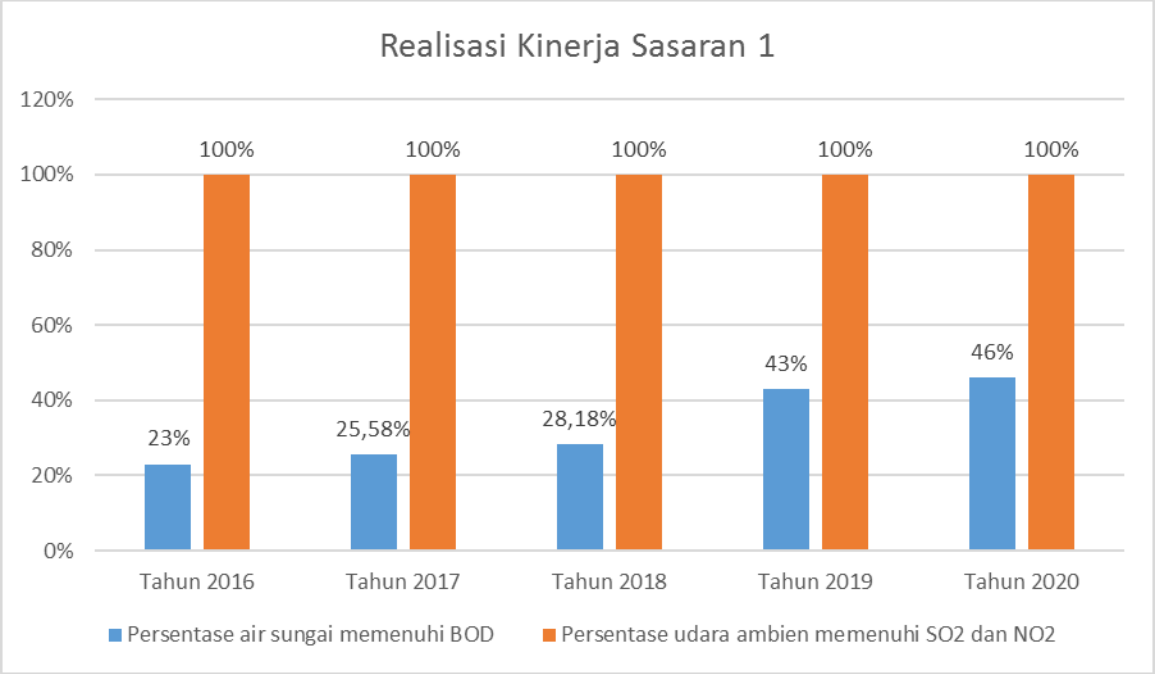

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 (1) Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air ; (2) Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO_2 dan NO_2 sesuai Baku Mutu Udara melebihi target.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja realisasi Tahun 2020 (1) Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air ; (2) Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO_2 dan NO_2 sesuai Baku Mutu Udara tahun 2020 mengalami peningkatan.

Terdapat masalah dalam pencapaian target kinerja antara lain

a. Keterbatasan SDM dan sarpras pendukung dalam pengawasan PPA
b. Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas
c. Aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai
d. Alih fungsi lahan
e. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam PPA
f. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam PPA
g. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder dalam PPA
h. Lemahnya penegakan hukum terhadap pencemaran air
i. Keterbatasan SDM dan sarpras pendukung dalam pengawasan PPU
j. Alih fungsi lahan tidak diiringi proporsi RTH
k. Peningkatan jumlah industri dan kegiatan usaha
l. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor
m. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam PPU
n. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam PPU, pengelolaan sampah dan penghijauan
o. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder dalam PPU
p. Lemahnya penegakan hukum dalam pengawasan terhadap emisi kendaraan bermotor

Namun demikian sudah dapat teratasi / diselesaikan. Untuk optimalisasi kedepannya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pemantauan air badan air
b. Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air
c. Penerbitan IPAL
d. Monitoring IPAL Komunal
e. Sosialisasi bagi masyarakat di sepanjang sungai
f. Sosialisasi bagi pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan air limbah
g. Bintek Pengelolaan Limbah Industri dan Kegiatan Lainnya
h. Pengawasan dalam upaya pengendalian pencemaran air
i. Tindak lanjut pengaduan pencemaran air
j. Pengelolaan sampah terutama di pinggiran sungai
k. Pembangunan taman di sempadan sungai
l. Menyediakan TPS untuk mengurangi pembuangan sampah ke badan air
m. Sosialisasi Adaptasi Perubahan iklim
n. Penghijauan pada median dan pinggir jalan
o. Pengawasan dalam upaya pengendalian pencemaran udara
p. Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor
q. Pemantauan kualitas udara saat Car Free Day
r. Monitoring kualitas udara ambien
s. Menggalakkan pelaku usaha dalam penyediaan RTH
t. Pendampingan Desa Berseri dan Program kampung Iklim

Sasaran 2: Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase sampah yang terkelola	62,28 %	62,25 %	100	64,28 %	66 %	103	72,28 %	67 %	93
Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	1,67 %	1,04	62	1,67 %	1,05 %	63	1,2 %	1,06 %	88
Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi	78 %	78 %	100	80 %	80 %	100	82 %	82 %	100

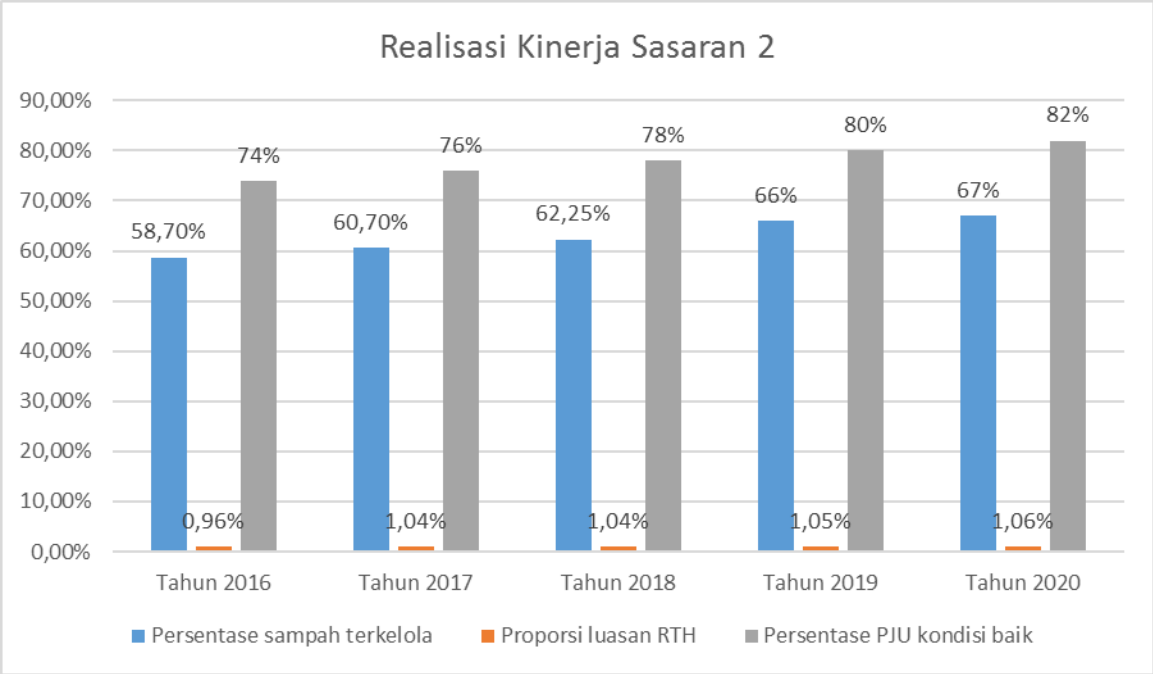

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja realisasi tahun 2020 (1) Persentase sampah yang terkelola; (2) Proporsi luasan RTH terhadap

baku Rencana luas RTH dalam Masterplan belum melebihi target sedangkan (3) Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi mencapai target.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja realisasi Tahun 2020 (1) Persentase sampah yang terkelola; (2) Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan ; (3) Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi mengalami peningkatan.

Permasalahan :

a. Memenuhi kebutuhan tenaga pengolah (pemilah dan pengompos) dari penduduk setempat masih kesulitan karena penduduk setempat memilih bekerja dari perusahaan daripada bekerja mengolah sampah
b. Dukungan dari Pemerintah Desa masih beragam, ada yang mempunyai komitmen tinggi dan rendah sehingga penganggaran APBDes tidak maksimal dalam penanganan sampah
c. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai regulasi yang tidak mudah memberikan bantuan peralatan kepada TPST di desa karena harus melalui dana hibah yang prosesnya lama. Pos dana hibah itu sendiri tidak ada di DPA OPD teknis terkait
d. Pengolahan sampah pada TPST di tingkat desa belum menggunakan teknologi yang bisa mendukung pengolahan sampah maksimal. Saat ini masih dilakukan pengolahan sampah manual sehingga membutuhkan tenaga kerja yang banyak padahal biaya untuk gaji pekerja tersebut tidak mencukupi
e. Legalitas lahan dari proses fasum perumahan yang masih belum diserahkan
f. Belum adanya anggaran pembelian lahan baru untuk pengadaan tanah RTH
g. Cuaca ekstrem / saat musim hujan yang menyebabkan lampu PJU Padam
h. Umur lampu PJU yang sudah lama yang menyebabkan sparepart lampu PJU rusak

i. Laporan pengaduan masyarakat yang terlambat melaporkan kerusakan PJU ke DLHK

Solusi :

a. DLHK Sidoarjo sebagai instruktur teknis secara rutin melakukan pelatihan pengolahan sampah dari TPST ke TPST
b. Memotivasi para KSM yang bertanggung jawab pelaksanaan manajerial operasi TPST
c. Melaksanakan koordinasi dengan kecamatan sebagai pemegang kewenangan secara bersama-sama mencari solusi terhadap kendala pengolahan / penanganan sampah di wilayah kecamatan
d. Melaksanakan sosialisasi pengolahan sampah pada TPST di tingkat desa dengan teknologi yang dapat mendukung pengolahan sampah maksimal
e. Melakukan koordinasi dengan Tim Aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Bappeda terkait penyerahan fasum perumahan
f. Mengusulkan anggaran pembelian lahan baru untuk pengadaan tanah RTH serta Berkoordinasi ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengelola lahan / aset-aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal
g. Memperbaiki lampu PJU yang padam
h. Mengganti sparepart lampu PJU yang rusak
i. Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang masuk

c. Program dan Kegiatan

Atas sasaran urusan bidang Lingkungan Hidup yaitu Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara Didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran** dengan anggaran sebesar Rp.1.847.503.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.514.786.123,00 atau 82%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA RENSTRA	INDIKATOR KINERJA REVIU RENSTRA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah	Persentase Rekomtek Izin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	1,53 %	1,74 %	114 %
Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3	Persentase Rekomtek Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan	3,55 %	3,66 %	103 %
Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	Persentase pelaporan dokumen lingkungan	14,22 %	18,15 %	128 %
Persentase ketersediaan informasi pemantauan kualitas lingkungan	Persentase ketersediaan informasi pemantauan kualitas lingkungan	31 %	30 %	97 %
	Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO^2 dan NO^2	47 %	66,67 %	142 %
	Persentase pemantauan air badan air yang mengalami peningkatan kualitas BOD	41 %	53,64 %	131 %

Terdapat masalah dalam pencapaian target kinerja antara lain

a. Kurangnya personil teknis Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran;
b. Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai (seperti : laptop/PC, *printer portable*, dan kendaraan operasional dinas);
c. Kuranganya pemahaman pelaku usaha dalam penyusunan pelaporan dokumen lingkungan hidup dan periode pemantauan kualitas lingkungan hidup;
d. Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya Pembatasan Sosial untuk mengurangi penyebaran Covid-19;
e. Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada berkurangnya perusahaan yang mengajukan permohonan Rekomtek Izin Pengelolaan Limbah B3 sehingga menyebabkan jumlah Rekomendasi Teknis Izin yang diterbitkan belum memenuhi target yang telah ditentukan;
f. Kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka penerbitan Rekomtek Izin Pembuangan Air Limbah kurang dapat dilaksanakan secara maksimal karena tidak dapat melihat secara langsung sumber air limbah yang akan diolah di IPAL.

Namun demikian sudah dapat teratasi / diselesaikan. Untuk optimalisasi kedepannya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Sudah mengusulkan penambahan personil teknis bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran dan akan dipenuhi 1 (satu) orang personil (CPNS) penelaah dampak lingkungan di Seksi Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak pada Tahun 2020, sedangkan untuk Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 serta Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan untuk sementara memaksimalkan SDM yang ada;

b. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana (seperti laptop/PC dan *printer portable*) yang ada, sedangkan jika kekurangan kendaraan dinas untuk sementara meminjam kendaraan operasional bidang lain;

c. Merencanakan kegiatan bintek penyusunan pelaporan dokumen lingkungan hidup bagi pelaku usaha yang belum pernah mengikuti bintek dan yang belum memahami penyusunan pelaporan dokumen lingkungan hidup. Namun pelaksanaan bintek dapat direalisasikan kembali menunggu status kedaruratan wabah pandemi Covid-19 selesai;

d. Mengarahkan bawahan untuk tetap berupaya melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan secara optimal;

e. Mengarahkan bawahan untuk tetap melaksanakan kegiatan penerbitan Rekomtek Izin secara optimal dan selalu melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemohon (penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) serta verifikasi lapangan dilaksanakan di Kantor DLHK melalui pembahasan dengan menunjukkan video pengelolaan limbah B3;

f. Mengarahkan bawahan untuk tetap melaksanakan kegiatan penerbitan Rekomtek Izin Pembuangan Air Limbah secara optimal dan selalu melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemohon (penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) serta verifikasi lapangan dilaksanakan di Kantor DLHK melalui pembahasan dengan menunjukkan video atau paparan pengelolaan air limbah

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Koordinasi pelaksanaan teknis dokumen lingkungan	Jumlah pelaku usaha dan kegiatan yang melaporkan	400 Pelaku usaha dan kegiatan	511 Pelaku usaha dan kegiatan	128	Rp 190.791.600 ,00	Rp 188.695.084 ,00	99

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	pelaksanaan dokumen lingkungan						
	Jumlah laporan pelaksanaan dokumen lingkungan	400 Laporan	511 Laporan	128			
Penyusunan Kajian Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak	Jumlah Kajian Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak yang telah disusun	1 Kajian	1 Kajian	100	Rp 101.100.000,00	Rp 99.187.000,00	98
Koordinasi pelaksanaan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak	Nilai Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sidoarjo	89	89	100	Rp 414.215.600,00	Rp 395.194.176,00	95
	Persentase keterisian Tabel IKPLHD Kabupaten Sidoarjo	89 %	89 %	100			

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pelaksanaan teknis pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3	100 Pelaku usaha dan Kegiatan	103 Pelaku usaha dan kegiatan	103	Rp 373.791.600,00	Rp 326.515.883,00	87
	Jumlah Rekomtek Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan	100 Rekomtek	103 Rekomtek	103			
Pelaksanaan teknis Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah informasi pemantauan kualitas lingkungan yang tersedia	580 Data	554 Data	96	Rp 613.185.000,00	Rp 365.386.600,00	60
	Jumlah pemantauan air badan air yang mengalami peningkatan kualitas BOD	58 Pemantauan	59 Pemantauan	102			
	Jumlah pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2	135 Pemantauan	96 Pemantauan	71			

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pelaksanaan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan	Jumlah pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah	43 Pelaku usaha dan Kegiatan	49 Pelaku usaha dan kegiatan	114	Rp 154.419.900,00	Rp 139.807.380,00	91
	Jumlah Rekomtek Izin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	43 Pelaku usaha dan Kegiatan	49 Pelaku usaha dan kegiatan	114			
	Prosentase pencemaran yang dapat ditanggulangi dan / atau dipulihkan fungsi lingkungan hidup	100 %	100 %	100			

2. **Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup** dengan anggaran sebesar Rp.2.306.776.390,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.888.864.442,00 atau 82%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA RENSTRA	INDIKATOR KINERJA REVIU RENSTRA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSEN TASE
Prosentase pelaku usaha dan kegiatan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup dengan tepat	Persentase pengawasan pelaku usaha dan kegiatan	2,5 %	2,98 %	119 %
Prosentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang diselesaikan	Persentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang ditangani	100 %	100 %	100 %
Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup	Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup	2,5 %	2,5 %	100 %

Terdapat masalah dalam pencapaian target kinerja antara lain :

1. Karena adanya pandemic covid 19, target awal yang semula 3,1 % diturunkan menjadi 2,5 % karena terbatasnya kegiatan pengawasan langsung di lapangan, namun selama pandemic covid 19 berlangsung pengawasan secara tidak langsung dilakukan secara intensif, sehingga target dapat tercapai.
2. Penanganan pengaduan telah tercapai 100% diselesaikan dan ditangani.
3. Prosentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup telah terpenuhi

Namun demikian sudah dapat teratasi / diselesaikan. Untuk optimalisasi kedepannya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pengawasan dilakukan secara tidak langsung dengan mengirimkan form pengawasan tidak langsung kepada pada penanggunng jawab usaha/ kegiatan. Selain itu kegiatan pengawasan SKPL dilakukan dengan cara presentasi.
2. Penanganan pengaduan selama masa pandemic covid 19 dilakukan dengan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti pihak apparat desa serta OPD terkait
3. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kelompok masyarakat peduli lingkungan dilaksanakan secara daring, dan berkoordinasi melalui rapat-rapat menggunakan media daring.

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pengawasan dan implementasi dokumen dan penaatan lingkungan	Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup	2,5 %	2,98 %	119	Rp 354.503.200,00	Rp 268.171.967,00	76

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Jumlah pengawasan pelaku usaha dan/ atau kegiatan	100 Pengawasan	84 pengawasan	84			
	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengawasan lingkungan hidup	100 Peserta	100 peserta	100			
Peningkatan peran serta masyarakat melalui Desa Berseri dan Sekolah Adiwiyata	Jumlah Kelembagaan Pokmas yang dibina	40 Kelembagaan	41 kelembagaan	103	Rp 194.828.000,00	Rp 183.098.849,00	94
Peningkatan peran serta masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah kader lingkungan yang telah dibentuk	40 Kader	41 kader	103	Rp 65.850.000,00	Rp 62.027.100,00	94

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penanganan kasus dan penyuluhan terkait penegakan hukum lingkungan hidup	Prosentase penegakan hukum lingkungan hidup yang tertangani	100 %	100 %	100	Rp 69.350.000,00	Rp 53.946.550,00	78
Penanganan pengaduan masyarakat dan sosialisasi tata cara pengaduan terkait pengelolaan lingkungan hidup	Prosentase pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan hidup yang tertangani	100 %	100 %	100	Rp 219.670.800,00	Rp 163.363.296,00	74
Peningkatan pelayanan laboratorium dan uji lab	Jumlah sarpras laboratorium yang diadakan	55 Jenis	52 Jenis	95	Rp 1.402.574.390,00	Rp 1.158.256.680,00	83
	Jumlah sarpras laboratorium yang dipelihara	27 Jenis	26 Jenis	96			
	Persentase layanan uji lab yang difasilitasi	100 %	100 %	100			

3. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** dengan anggaran sebesar Rp.40.083.242.187,00 dan terealisasi sebesar Rp.26.723.521.226,00 atau 67%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA RENSTRA	INDIKATOR KINERJA REVIU RENSTRA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase volume sampah yang terlayani di TPA dan TPST	Persentase volume sampah yang terlayani di TPA dan TPST	72,28 %	67 %	93 %
	Persentase penduduk yang terlayani pengangkutan sampah	43 %	43,08 %	100 %
	Persentase berat sampah yang terlayani pengangkutan	43 %	43,08 %	100 %
	Persentase penduduk yang terlayani oleh TPST	26 %	24,58 %	95 %

Terdapat masalah dalam pencapaian target kinerja antara lain :

a) Ada beberapa indisipliner yang dilakukan oleh beberapa personil;

b) Beberapa kegiatan tidak terlaksana dikarenakan adanya pandemi Covid-19;

c) Kurangnya sarpras angkutan sampah.

Namun demikian sudah dapat teratasi / diselesaikan. Untuk optimalisasi kedepannya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Pembinaan personil secara berkala;

b) Mengalihkan anggaran untuk membantu penanganan pencegahan Covid-19;

c) Memaksimalkan peralatan yang ada guna memaksimalkan tugas.

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penyelenggaraan kebersihan permukiman, jalan, saluran dan selokan	Ruas Jalan Kabupaten yang bersih	274 Ruas Jalan	242 Ruas Jalan	88	Rp 8.797.390.435,00	Rp 8.227.347.600,00	94
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana angkutan sampah	Jumlah angkutan sampah yang beroperasional	114 Unit	114 Unit	100	Rp 9.610.251.400,00	Rp 8.084.195.161,00	84
	Jumlah angkutan sampah yang dipelihara	114 Unit	114 Unit	100			
	Volume sampah yang telayani di TPA dan TPST	1.960.000 m^3	1.934.196 m^3	99			
	Jumlah berat sampah yang terlayani pengangkutan sampah per tahun	190.000.000 Kg	187.610.000 Kg	99			
	Jumlah penduduk yang terlayani pengangkutan sampah	975.000 Orang	886.752 Orang	91			

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penyediaan sarpras pengolahan/ angkutan sampah	Jumlah sarpras angkutan sampah yang diadakan	38 Unit	38 Unit	100	Rp 6.610.943.200,00	Rp 4.629.857.283,00	70
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase desa / kelurahan yang telah memiliki TPST	33 %	26,1 %	79	Rp 1.410.932.400,00	Rp 832.122.580,00	59
	Jumlah penduduk yang terlayani oleh TPST	600.000 Orang	557.118 Orang	93			
	Persentase tenaga kebersihan yang difasilitasi protokol kesehatan	100 %	100 %	100			
	Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola TPST	116 Kelompok	92 Kelompok	79			
Operasional dan Pemeliharaan TPA	Jumlah sarpras TPA yang tersedia	17 Jenis	17 Jenis	100	Rp 12.516.322.852,00	Rp 3.920.561.669,00	31
	Jumlah sarpras TPA yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	100			
	Jumlah sampah yang tertampung	500 Ton	514 Ton	103			

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pengelolaan operasional UPTD	Jumlah kebutuhan UPTD TPA yang terpenuhi	30 Jenis	30 Jenis	100	Rp 1.137.401.900,00	Rp 1.029.436.933,00	91
	Persentase tenaga kebersihan yang difasilitasi protokol kesehatan	100 %	100 %	100			

4. **Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penerangan jalan dan lingkungan** dengan anggaran sebesar Rp.125.805.558.389,00 dan terealisasi sebesar Rp.102.939.561.896,00 atau 82%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA RENSTRA	INDIKATOR KINERJA REVIU RENSTRA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Luas RTH yang dikelola	Luas RTH yang dikelola	28 Ha	26,58 Ha	95 %
Persentase PJU yang terpasang dalam kondisi baik	Persentase PJU yang terpasang dalam kondisi baik	82 %	82 %	100 %

Permasalahan:

a) Pemeliharaan tanaman akibat musim kering membutuhkan penyiraman intensif.

b) Membutuhkan ketersediaan lahan untuk perluasan RTH Taman

c) Pemeliharaan PJU pada musim hujan menjadi lebih intensif

Solusi:

a) Memerlukan upaya tambahan dan sosialisasi petugas taman dalam pemeliharaan RTH taman.

b) Penyediaan lahan RTH dari pihak aset diperlukan untuk perluasan taman

c) Mengoptimalkan Tim PJU untuk perbaikan lampu dan pengadaan sarpras PJU

Program tersebut didukung oleh 7 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pertamanan	Jumlah sarpras pertamanan yang diadakan	34 Jenis	34 Jenis	100	Rp 9.820.466.400,00	Rp 9.124.077.388,00	93
	Jumlah sarpras pertamanan yang dipelihara	140 Unit	140 Unit	100			
Pembangunan/ revitalisasi RTH	Luasan RTH yang dibangun / direvitalisasi	1,5 Ha	0,19 Ha	13	Rp 7.482.160.200,00	Rp 2.741.687.633,00	37
Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri (DBHCHT)	Jumlah sarana prasarana yang diadakan	2 Jenis	1 Jenis	50	Rp 1.497.800.799,00	Rp 437.326.218,00	29
Pemeliharaan RTH	Jumlah tanaman di RTH yang dipelihara	75 Jenis	75 Jenis	100	Rp 2.479.159.917,00	Rp 1.923.643.649,00	78
	Jumlah tanaman di RTH yang diadakan	21 Jenis	21 Jenis	100			
	Persentase tenaga pertamanan yang difasilitasi protokol kesehatan	100 %	100 %	100			

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penyediaan dan pemeliharaan sarparsa keindahan kota	Jumlah sarpras keindahan kota yang diadakan	14 Jenis	13 Jenis	93	Rp 1.590.477.520,00	Rp 1.273.513.761,00	80
	Jumlah sarpras keindahan kota yang dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	100			
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait penebangan/ perampingan pohon	100 %	100 %	100			
Pembangunan penerangan jalan umum	Jumlah titik PJU yang terbangun	1715 Titik	1255 Titik	73	Rp 27.383.764.960,00	Rp 16.717.528.793,00	61
Pemeliharaan penerangan jalan umum	Jumlah titik PJU yang dipelihara	31092 Titik	31092 Titik	100	Rp 75.551.728.593,00	Rp 70.721.784.454,00	94

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

A. REALISASI KINERJA TUJUAN

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016 (%)		TAHUN 2017 (%)		TAHUN 2018 (%)		TAHUN 2019 (%)		TAHUN 2020 (%)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan mewujudkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	T8	80,02	79	84,43	81	85,17	82	84,99	83	86,29

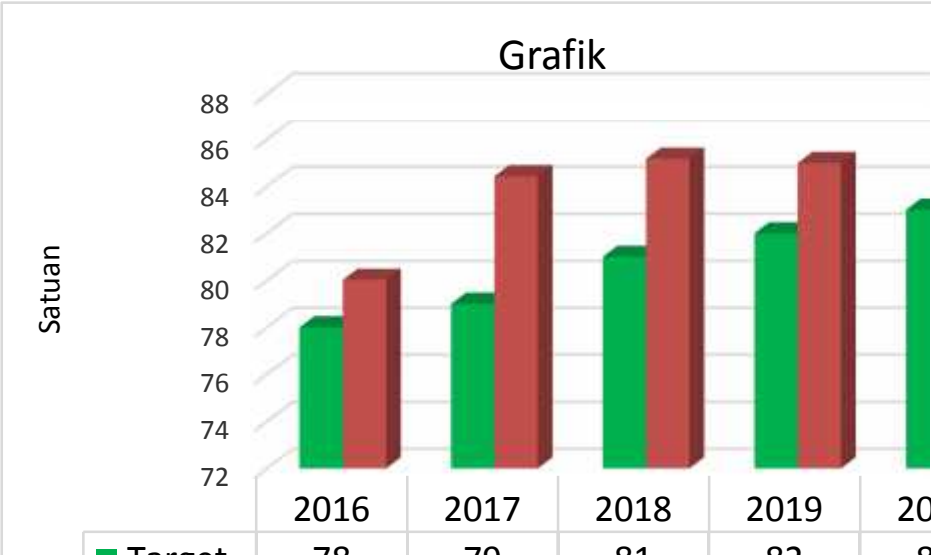

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target hal ini dikarenakan adanya :

1. Pelayanan administrasi kependudukan secara Prima kepada masyaraka, dengan cara peningkatan sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitasnya, serta pengembangan teknologi informasi.
2. Meningkakan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dengan cara sosialisasi administrasi kependudukan dan kerjasama dengan *stakeholter*.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya beberapa inovasi , antara lain pelayanan Peduli Dilan, peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana

Apabila dibandingkan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 1,21.% dari target, hal ini diupayakan dengan ‘

1. Penambahan personal /pegawai non PNS sebagai operator dan *customer service.*
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
3. Penyuluhan/sosialisasi tentang prosedur, kegunaan dan syarat-syarat pengurusan Akta Kelahiran lebih ditingkatkan serta dilaksanakan secara berkesinambungan melalui WEB Dukcapil dan Medsos.
4. Layanan Administrasi Kependuduka selama pandemi Covit-19 dengan “PLAVON DUKCAPIL”, yaitu pelayanan VIA Hotline/WA Dukcapil (layanan tanpa tatap muka)

B. Realisasi Kinerja Sasaran.

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil yang sesuai dengan data kependudukan

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

NDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2016 (%)		TAHUN 2017 (%)		TAHUN 2018 (%)		TAHUN 2019 (%)		TAHUN 2020 (%)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Prosentase penduduk yang ber-KTP elektron	78	82,37	85	84,01	90	90,5	95	95,79	100 %	97,80
2. Prosentase penduduk berKartu Keluarga (KK)	95	95,80	97	98,03	99	-99,2	100	99,22	100 %	100
3. Prosentase penduduk berakta kelahiran jumlah penduduk usia 0-18 tahun	70	74	80	80,01	90	89,34	100	91,59	100%	93.80

C. Realisasi Kinerja Sasaran.

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil yang sesuai dengan data kependudukan

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

NDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2016 (%)		TAHUN 2017 (%)		TAHUN 2018 (%)		TAHUN 2019 (%)		TAHUN 2020 (%)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Prosentase penduduk yang ber-KTP elektron	78	82,37	85	84,01	90	90,5	95	95,79	100 %	97,80
2. Prosentase penduduk berKartu Keluarga (KK)	95	95,80	97	98,03	99	-99,2	100	99,22	100 %	100

3. Prosentase penduduk berakta kelahiran jumlah penduduk usia 0-18 tahun	70	74	80	80,01	90	89,34	100	91,59	100%	93.80

Capaian Indikator Kinerja tersebut diatas didukung dengan capaian Indikator Kinerja di tingkat OPD (Renstra) dan ditingkat Program yaitu antara lain:

1. Kepemilikan KTP elektronik

Kepemilikan KTP bukan saja merupakan pemenuhan hak perorangan tetapi juga untuk keperluan tertib administrasi kependudukan.

Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut grafik perkembangan kepemilikan KTP-el :

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari grafik di atas dapat dilihat Jumlah penduduk wajib KTP-el pada tahun 2020 adalah 1.532,096 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1.498.409 jiwa atau sekitar 97,80 %. Persentase penduduk yang memiliki KTP-el pada tahun 2020 ada kenaikan sebesar 2,01 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki KTP –el terjadi penurunan sebesar 10,31% atau sejumalh 172.169 jiwa. Penurunan ini dikarenakan pada tahun 2020 mengalami koreksi data melalui pembersihan database Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Setelah dilakukan konsolidasi dan penyandingan database, sehingga jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 terkoreksi menjadi 2.033.764 jiwa.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 tidak mencapai target. Kepemilikan KTP elektronik targetnya 100%, sedangkan capaian masih 97,80 %, hal ini dikarenakan beberapa hal , antara lain :

1. Terbatasnya nomor antrian online dan tidak stabilnya jaringan SIAK.
2. Kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat mengenai pengurusan dokumen admindukcapil
3. Kurang sempurnanya sistem antrian online yang mudah diakses masyarakat.
4. Terganggunya jaringan SIAK antar kecamatan, sehingga menghambat pelayanan.
5. Kurang luasnya jangkauan dan frekuensi sosialiasi pengurusan dokumen admindukcapil pada masyarakat
6. Masih ditemukan biro jasa/calo yang justru memberikan info yang keliru pada masayrakat

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut yaitu:

1) Melakukan distribusi Blangko KTP-el dan penuntasan pencetakan KTP-el secara merata pada 18 Kecamatan, MPP dan Kantor Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo.

2) Melakukan pemeliharaan peralatan pendukung SIAK dan jaringan secara rutin, memastikan aplikasi SIAK berjalan lancar dan normal..
3) Menambah kuota nomor antrian online sesuai kebutuhan masyarakat dan menambah kapasitas bandwith.
4) Memperbanyak jumlah media informasi
5) Menyempurnakan sistem antrian online melalui pengembangan aplikasi
6) Memperbaiki jaringan antar Kecamatan secara berkala.
7) Memperluas jangkauan dan frekuensi sosialisasi sampai ke desa
8) Inovasi pelayanan "PEDULI DILAN", memberikan pelayanan yang optimal dalam kepengurusan data penduduk bagi masyarakat Sidoarjo. Salah satu bentuk pelayanan itu diwujudkan pemkab melalui program Jemput Bola Terpadu (JBT) Peduli Disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan Lansia (Dilan). Program ini ditujukan bagi para warga Sidoarjo dalam kategori lansia atau penyandang disabilitas yang masih belum memiliki kartu identitas (e-KTP).

2. Kepemilikan Kartu Keluarga

Masing-masing keluarga perlu memiliki Kartu Keluarga untuk mendukung data kependudukan terutama bagi anggota keluarga yang belum wajib ber-KTP-el. Perkembangan keluarga yang memiliki Kartu Keluarga seperti terlihat pada grafik berikut ini :

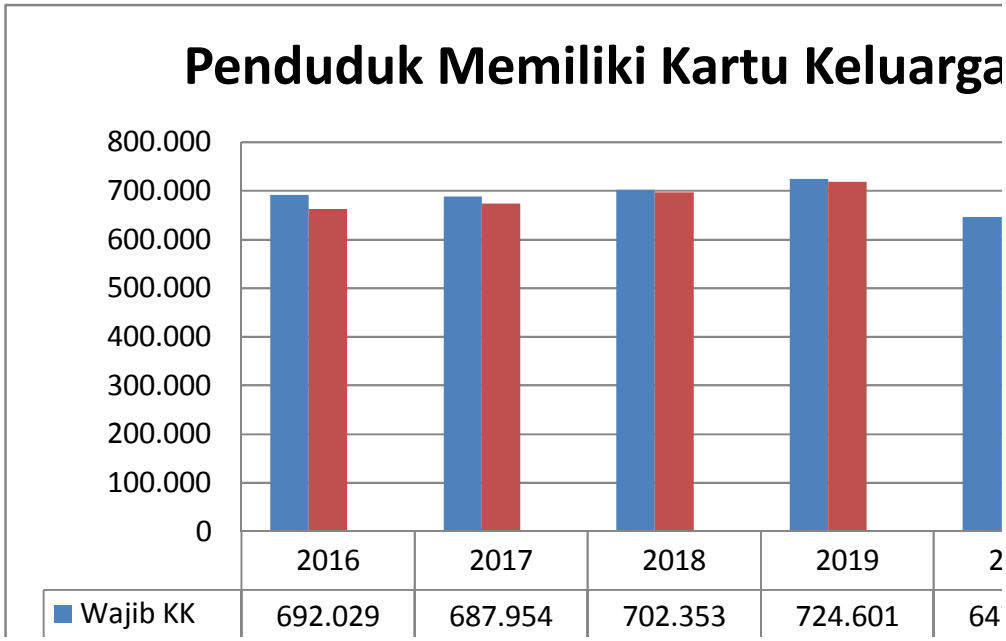

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari grafik di atas dapat dilihat jumlah wajib KK turun dari tahun sebelumnya sebanyak 10,70 % atau sejumlah 77.576 KK, sedangkan jumlah penduduk yang memiliki KK juga turun dari tahun sebelumnya sebesar 10,01 % atau sejumlah 71.952 KK. Penurunan ini dikarenakan pada tahun 2020 mengalami koreksi data melalui pembersihan database Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Setelah dilakukan konsolidasi dan penyandingan database, sehingga jumlah KK di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 terkoreksi menjadi 647.025 KK

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan pemeliharaan peralatan pendukung SIAK dan jaringan secara rutin, memastikan aplikasi SIAK berjalan lancar dan normal..
2. Menambah kuota nomor antrian online sesuai kebutuhan masyarakat dan menambah kapasitas bandwith.

3. Memperbanyak jumlah media informasi. Selama Pandemi covit-19 siaran langsung melalui Radio (Suara Sidorjo).
4. Menyempurnakan sistem antrian online melalui pengembangan aplikasi “Plavon Dukcapil.”
5. Memperluas jangkauan dan frekuensi sosialisasi sampai ke desa.
6. Membuka ruang konsultasi bagi masyarakat, baik secara langsung maupun daring

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan,

Peningkatan penduduk yang memiliki KK ini disebabkan adanya upaya sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan paket layananan KK, KTP, KIA dan Dokumen Akta Pencatatan Capil. . (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta perkawinan, akta perceraian)
2. Konsistensi pelaksanaan sosialisasi di bidang admindukcapil dalam mendukung kesadaran masyarakat .akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) melalui siaran radio Suara Sidoarjo.
3. Bimbingan teknis bagi SDM Operator SIAK Kecamatan dan Dispendukcapil dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, selama Pandemi Covid-19 Bintek dilakukan dengan Zoometing.

3. Kepemilikan Akta Kelahiran

Untuk meregistrasi penduduk yang baru lahir maka perlu diterbitkan Akta Kelahiran bagi seluruh penduduk di Kabupaten Sidoarjo.

sampai dengan tahun 2020 penduduk yang memiliki akta kelahiran sebanyak 1.039.993 orang atau 51,14 % dari jumlah penduduk, ada kenaikan jumlah penduduk yg memiliki Akta Kelahiran dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,02 %, dimana

penduduk yg memiliki Akta kelahiran pada tahun 2019 sebesar 45,12 % Orang. Kenaikan jumlah tersebut dapat disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk mengurus Akta Kelahiran, adanya kemudahan paket layanan dokumen Kependudukan dan pelayanan secara Online "PLAVON DUKCAPIL".

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan untuk kepemilikan akta kelahiran anak pada penduduk usia 0 s.d 18 th pada tahun 2020 adalah sebesar 477.291 orang dari jumlah penduduk usia 0 s.d 18 th sebanyak 508.838 orang atau 93,80 %.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 (100 %) , maka capaian kinerja tahun 2020 tidak mencapai target, hal ini dikarenakan :

1. Terbatasnya nomor antrian online dan tidak stabilnya jaringan SIAK
2. Kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat mengenai pengurusan dokumen admindukcapil .
3. Kurang sempurnanya sistem antrian online yang mudah diakses masyarakat
4. Terganggunya jaringan SIAK antar kecamatan, sehingga menghambat pelayanan.

5. Kurang luasnya jangkauan dan frekuensi sosialiasi pengurusan dokumen admindukcapil pada masyarakat
6. Masih ditemukan biro jasa/calo yang justru memberikan info yang keliru pada masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan 2,21 %. hal ini dikarenakan :

1. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan paket layananan Dokumen Akta Pencatatan Capil.
2. Konsistensi pelaksanaan sosialisasi di bidang admindukcapil dalam mendukung kesadaran masyarakat .akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) melalui siaran radio Suara Sidoarjo.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
4. Era Pandemi Covid 19 bulan Maret 2020, semua layanan Dukcapil melalui Plavon Dukcapil Online dan Antrian Online (SAE CAPIL), dengan 520 no antrian/hari, baik di Kantor Dukcapil maupun di Mini MPP Kecamatan Sukodono (beroperasional tmt 6 Juli 2020)

Sasaran 2. Meningkatnya kuaiitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

NDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2016 (%)		TAHUN 2017 (%)		TAHUN 2018 (%)		TAHUN 2019 (%)		TAHUN 2020 (%)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	78	80,02	79	84,43	81	85,17	82	84,99	83	86,29

Pada tahun 2020 juga telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. IKM yang didapatkan setelah survei adalah sebesar 86,29 yang termasuk dalam mutu pelayanan kategori B dengan kategori kinerja :"Baik"..

Berikut grafik perkembangan capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

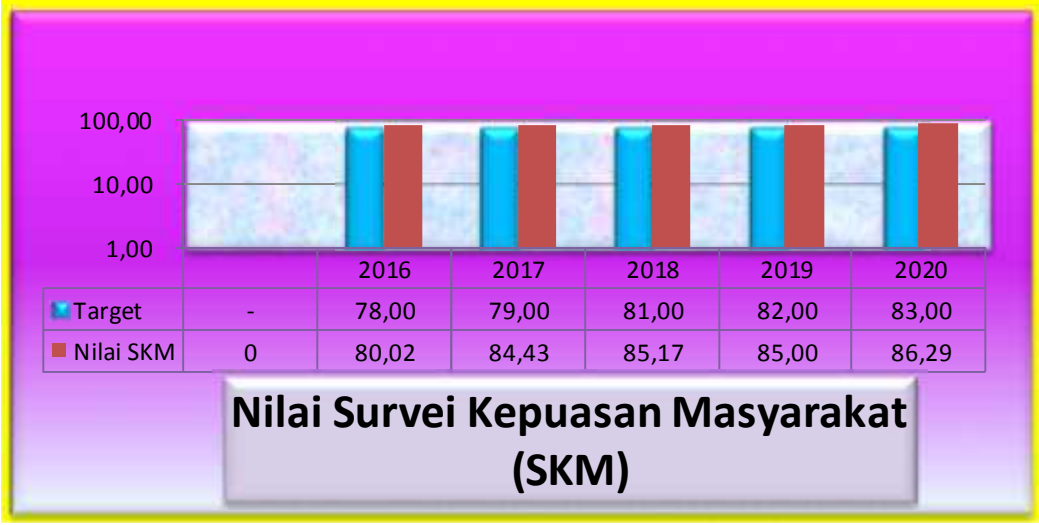

		2016	2017	2018	2019	2020
Target	-	78,00	79,00	81,00	82,00	83,00
Nilai SKM	0	80,02	84,43	85,17	85,00	86,29

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 , maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan :

1. Manajemen Perubahan, meliputi : pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, Road Map Reformasi Birokasi, Pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi, Perubahan pola pikir dan perubahan budaya kerja.
2. Deregulasi kebijakan, UU no.24 tahun 2013, Peraturan Pemerintah no 40 Tahun 2019, Perpres no.96 Tahun 2018.
3. Penataan dan penguatan organisasi (Permendagri no.14 Tahun 2020)

4. Penataan tata laksana : monev SOP 2020, Penyederhanaan persyaratan dan percepatan jangka waktu Layanan, tertanggal 5 Mei 2020, GISA (Gerakan Indonesia Sadar Addministrasi Kependudukan)
5. Penataan manajemen SDM ; bintek ADM dan Pejabat Bidang PIAK bulan Agustus 2020, bintek operator SIAK bulan Nopember 2020, bintek SAKIP Desember 2020.
6. Penguatan akuntabilitas : Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, LAKIP-LKPJ.
7. Penguatan Pengawasan : gratifikasi, SPIP, pengaduan masyarakat, Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistle Blowing System), benturan kepentingan, pembangunan zoona integrtas.
8. Peningkatan pelayanan publik : standar pelayanan, budaya pelaynan prima, pengelolaan pengaduan, Survey kepuasan masyarakat, pemanfaatan teknologi (Pemanfaatan Plavon Dukcapil & Sae Capil),
9. Inovasi "DUKCAPIL GO DIGITAL"
    a. Era Pandemi Covid 19 bulan Maret 2020, semua layanan Dukcapil melalui Plavon Dukcapil Online dan Antrian Online (SAE CAPIL), baik di Kantor Dukcapil dan Mini MPP Kec. Sukodono (6Juli 2020).
    b. Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk 9 layanan Dukcapil, yaitu: KK, Biodata penduduk, Surat pindah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak.
    c. Dokumen kependudukan dengan format digital (TTE), tidak memerlukan layanan legalisir, sesuai Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Adminduk.
    d. Penerbitan dan pencetakan dokumen 9 layanan Dukcapil dengan format digital (TTE), sudah memakai kertas HVS A4 80 gram sejak tanggal 1 Juli 2020. Khusus KK bisa dicetak secara mandiri/Kecamatan/Dukcapil.
    e. Layanan Antar Dokumen Kerja sama dengan Kantor Pos tgl 20 Mei 2020, untuk Surat Pindah, KK dan KIA bisa diantar ke rumah masing-masing.
    f. Sudah dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 8 OPD untuk pemanfaatan akses NIK dengan DWH Terpusat Ditjen Dukcapil Kemendagri, khusus Pelayanan Publik & Kesehatan.
    g. Bantuan 1 Unit Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dari Pemprop Jatim, Jumat tgl 24 Juli 2020 oleh Gubernur Jatim dan pengadaan ADM APBD 2020 2 unit.
10. Monev secara berkelanjutan untuk perbaikan layanan Adminduk Capil

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 1,21.% dari target, hal ini diupayakan dengan :

1. Peningkatan sarana prasarana, meliputi : peningkatan fasilitas pelayanan on line, pengadaan sarana prasarana, rehap ruang pelayanan, penyediaan sarana pelayanan mobile, pengadaan sarana penunjang pelayanan on line, pemeliharaan peralatan aplikasi online,
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ((SDM), meliputi :
   a. Peningkatan disiplin pegawai dengan cara :monitoring/ evaluasi kinerja secara berkala, pemberian reward dan punichment ;
   b. Peningkatan kapasitas pegawai dengan cara pengadaan bintek SIAK dan SAKIP, pengiriman bintek dan diklat, pelaksanaan studi banding, monev hasil bintek / diklat.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Dengan anggaran sebesar Rp. 1.618.232.960 dan realisasi sebesar Rp. **1.397.823.033,00** atau **86,38** %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Persentase (%)
1. Persentase layanan kepemilikan KTP-EL yang sesuai ketentuan;	100 %	100 %	100
2. Persentase layanan kepemilikan KK yang sesuai ketentuan;	100 %	100 %	100
3. Persentase pelayanan pindah datang / keluar yang dapat diselesaikan tepat waktu d	100 %	100 %	100
4. Persentase desa / kelurahan yang rentan pendataan administrasi kependudukan	7 desa/kel	7 desa/kel	100

Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi pada Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk, sebagai berikut :

1. Terbatasnya nomor antrian online dan tidak stabilnya jaringan SIAK.

2. Kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat mengenai pengurusan dokumen admindukcapil .
3. Terbatasnya lembaga yang bekerjasama dalam memanfaatkan data kependudukan.
4. Kurang sempurnanya sistem antrian online yang mudah diakses masyarakat.
5. Terganggunya jaringan SIAK antar kecamatan, sehingga menghambat pelayanan.
6. Kurang luasnya jangkauan dan frekuensi sosialiasi pengurusan dokumen admindukcapil pada masyarakat .
7. Masih banyaknya praktek biro jasa/calo yang justru memberikan info yang keliru pada masayrakat
8. Masih ditemukan data kependudukan di Lembaga lain yang tidak valid dalam pelayanan publik .

Solusi

1. Menambah kuota nomor antrian online sesuai kebutuhan masyarakat dan menambah kapasitas bandwith.
2. Memperbanyak jumlah media informasi.
3. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain
4. Menyempurnakan sistem antrian online melalui pengembangan aplikasi. Memperbaiki jaringan antar Kecamatan secara berkala.
5. Memperluas jangkauan dan frekuensi sosialisasi sampai ke desa.
6. Membuka ruang konsultasi bagi masyarakat, baik secara langsung maupun daring
7. Menambah Perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan data kependudukan dengan lembaga lain.

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan, yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1. Pelayanan Identitas Penduduk	Persentase pelayanan identitas penduduk (KTP-EL, KK) yang dapat diproses	100 %	100 %	100	1.524.782.360	1.309.894.234	85,91
2. Pelayanan Administrasi Pindah Datang/Keluar Penduduk;	Persentase Pelayanan Pindah datang yang diproses; Persentase Pelayanan Pindah keluar yang diproses	100 % 100%	100 % 100 %	100 100	43.400.600	42.938.799	98,94
KEGIATAN	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET Tahun 2020**	**REALISASI Tahun 2020**	**%**	**PAGU ANGGARAN**	**REALISASI ANGGARAN**	**%**
3. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Desa / Kelurahan lokasi pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan.	7 Desa/Kel	7 Desa/Kel	100	50.050.000	44.990.000	89,89

2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil.

Dengan anggaran sebesar Rp. 245.357.800,00 dan realisasi sebesar Rp. 223.261.610,00 atau 90,99 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Perse ntase (%)
1. Persentase Pelayanan Akta Kelahiran yang dapat diproses.	100 %	100 %	100
2. Persentase Pelayanan Pencatatan perkawinan yang dapat diproses;	100 %	100 %	100
3. Persentase Pelayanan Pencatatan perceraian yang dapat diproses.	100 %	100 %	100
4. Persentase pelayanan perubahan status anak yang dapat diproses; Persentase Pelayanan pewarganegaraan yang dapat diproses.	100 %	100 %	100
5. Persentase pelayanan Akte Kematian yang dapat diproses	100 %	100 %	100

Permasalahan :

1. Terbatasnya nomor antrian online dan tidak stabilnya jaringan SIAK
2. Kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat mengenai pengurusan dokumen admindukcapil

3. Terbatasnya lembaga yang bekerjasama dalam membantu masyarakat mengurus akta2 pencatatan sipil.
4. Kurang sempurnanya sistem antrian online yang mudah diakses masyarakat
5. Terganggunya jaringan SIAK antar kecamatan, sehingga menghambat pelayanan
6. Kurang luasnya jangkauan dan frekuensi sosialiasi pengurusan dokumen admindukcapil pada masyarakat
7. Masih banyaknya praktek biro jasa/calo yang justru memberikan info yang keliru pada masayrakat
8. Masih ditemukan data kependudukan di Lembaga lain yang tidak valid dalam pelayanan publik

Solusi

1. Menambah kuota nomor antrian online sesuai kebutuhan masyarakat dan menambah kapasitas bandwith.
2. Memperbanyak jumlah media informasi
3. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain
4. Menyempurnakan sistem antrian online melalui pengembangan aplikasi
5. Memperbaiki jaringan antar Kecamatan secara berkala.
6. Memperluas jangkauan dan frekuensi sosialisasi sampai ke desa
7. Membuka ruang konsultasi bagi masyarakat, baik secara langsung maupun daring
8. Menambah Perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan data kependudukan dengan lembaga lain

Program tersebut didukung oleh kegiatan, yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1. Pelayanan administrasi akte kelahiran	Persentase Pelayanan Akta Kelahiran yang dapat diproses	100 %	100 %	100	124.013.700	112.644.750,00	90,83
2. Pelayanan administrasi	Persentase Pelayanan Pencatatan perkawinan yang dapat diproses;	100 %	100 %	100	21.034.100	16.676.500	79,28

perkawinan dan perceraian	Persentase Pelayanan Pencatatan perceraian yang dapat diproses	100 %	100 %	100			
3. Pelayanan Perubahan status Anak, pewarganegaraan, akta kematian	Persentase pelayanan perubahan status anak yang dapat diproses; Persentase Pelayanan pewarganegaraan yang dapat diproses; Persentase pelayanan Akte Kematian yang dapat diproses	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 100 100	100.310.000	93.940.360	93,65

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Dengan anggaran sebesar Rp. 924.994.760,00 dan realisasi sebesar Rp.872.619.366,00 atau **94,34**%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Perse ntase (%)
1. Prosentase pelayanan kebutuhan data kependudukan yang tepat waktu; Prosentase Sarpras SIAK yang layak fungsi.	100% 100 %	100 % 100 %	100 100
2. Persentase laporan data kependudukan rutin yang disusun tepat waktu.	100 %	100 %	100
3. Jumlah peserta Bimtek pengelola SIAK;	50 orang	50 orang	100
4. Jumlah SOP terkait manajemen SIAK yang disusun.	4 SOP	4 SOP	100
5. Jumlah sarpras SIAK yang tersedia;	9 paket	9 paket	100
6. Jumlah sarpras SIAK yang dipelihara	9 paket	9 paket	100

Permasalahan :

1. Terganggunya jaringan SIAK antar kecamatan, sehingga menghambat pelayanan

Solusi

1. Memperbaiki jaringan antar Kecamatan secara berkala.

Program tersebut didukung oleh kegiatan, yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1. Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Prosentase pelayanan kebutuhan data kependudukan yang tepat waktu; Prosentase Sarpras SIAK yang layak fungsi	100 % 100 %	100 % 100 %	100 100	5.100.000	0	0
2. Kegiatan Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Jumlah peserta Bimtek pengelola SIAK; Jumlah SOP terkait manajemen SIAK yang disusun	50 orang 4 SOP	50 orang 4 SOP	100 100	17.966.760	16.291.710,	90,68

3. Kegiatan Pengembangan sistem administrasi kependudukan	Jumlah sarpras SIAK yang tersedia; Jumlah sarpras SIAK yang dipelihara	9 Paket 9 Paket	9 Paket 9 Paket	100 100	856.327.656	856.327.656	94,94

4. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

Dengan anggaran sebesar Rp. **828.821.050,00** dan terealisasi sebesar Rp.**694.909.537,00** atau **83,84** %..

Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Persentase (%)
1. Jumlah peserta sosialisasi administrasi kependudukan dan catatan sipil;	150 orang	150 orang	100 %
2. Frekuensi sosialisasi administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diselenggarakan;	3 Kali	3 Kali	100%
3. Jumlah media penyebaran informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tersedia;	5 jenis	5 jenis	100%
4. Jumlah rekomendasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dihasilkan	8 inovasi	8 inovasi	100%
5. Jumlah Kerjasama (MoU) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dihasilkan;	4 MoU	4 MoU	100 %
6. Frekuensi operasi yustisi yang dilaksanakan	8 Kali	8 Kali	100 %
7. Jumlah institusi pengguna data kependudukan	4 institusi	4 institusi	100 %

Permasalahan :

- Kegiatan Yustisi tidak bisa terrealisasi;
- Penggadaan yang kurang dari realisasi

Solusi :

1. Dengan adanya Wabah Covid -19, maka kegiatan yustisi yang semula direncanakan tidak bisa dilaksanakan karna menghindari krumunan, mencegah penularan Covid-19 dimana kegiatan ini dilaksanakan Tim Opearsi Yustisi yang mengundang banyak orang dari unsul Pol PP, Polsek, Koramil dan pihak Perangkat desa setempat, sedangkan lokusnya atau sasaranya adalah kecamatan.

2. Penggandaan/ Foto Copy yang tidak memenuhi target dikarenakan estimasi anggaran karena menyesuaikan kegiatan yang telah dilaksanakan memperbanyak jumlah media informasi

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan, yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1. Kegiatan Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Jumlah peserta sosialisasi administrasi kependudukan dan catatan sipil;	2650 orang	150 orang	5.6	821.506.050	693.708.037,	84,44
	2. Frekuensi sosialisasi administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diselenggarakan;	29 Kali	3 Kali	10.34			
	3. Jumlah media penyebaran informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tersedia;	3 jenis	5 jenis	166.67			
	4. Jumlah rekomendasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dihasilkan	5 inovasi	8 inovasi	160			
2. Kegiatan Kerjasama administrasi kependudukan dan pencatatann sipil serta Operasi Yustisi	1. Jumlah Kerjasama (MoU) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dihasilkan;	4 MoU	4 MoU	100	3.760.000	0	0
	2. Frekuensi operasi yustisi yang dilaksanakan	8 Kali	0 Kali	0			
3. Kegiatan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	1. Jumlah institusi pengguna data kependudukan	4 institusi	4 institusi	100	3.555.000	1.201.500	33,80

Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Target dan capaian Kinerja Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN. 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALI SASI	%
Meningkatkan kuantitias, kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	82	79.28	96,66	83	90	108	90	89,47	0,53
	Tingkat pelayanan jalan	70	96	137	75	96	128	83	13	15

Pada Indikator kinerja Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan tahun 2020 tdari target 90% hanya dapat terealisasi 89,47 % penurunan tersebut hanya 0,053 sehingga masih bisa di . Indikator tingkat pelayanan jalan mengalami penurunan yang deratis dari target 83% hanya teralisasi sebesar 13% hal ini di sebabkan karenan pada saat pandemi covid angkutan umum tidak ada yang melaksanakan uji kendaraan bermotor.

b. Atas Target dan capaian Kinerja Sasaran

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan atas tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

(1) **Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan**, dengan capaian indikator kinerja sasaran yaitu Indek

survey kepuasan masyarakat layanan publik bidang perhubungan yaitu,sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALI SASI	%
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	82	79.28	96,66	83	90	108	84	75,26	89

Capaian kinerja tahun 2020 tidak mencapai target yang di tetapkan yaitu 84 dengan realisasi 75,26 dengan prosentase capaian yaitu 89 %. Hal ini dikarenakan

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 19 %, hal ini dikarenakan anggaran lebih di fokuskan pada penanggulangan covid 19, di tutupnya layanan uji kendaraan bermotor dan menurunnya mobilitas masyarakat karena di terapkannya Pembatasan Sosial berskala Besar(PSBB)

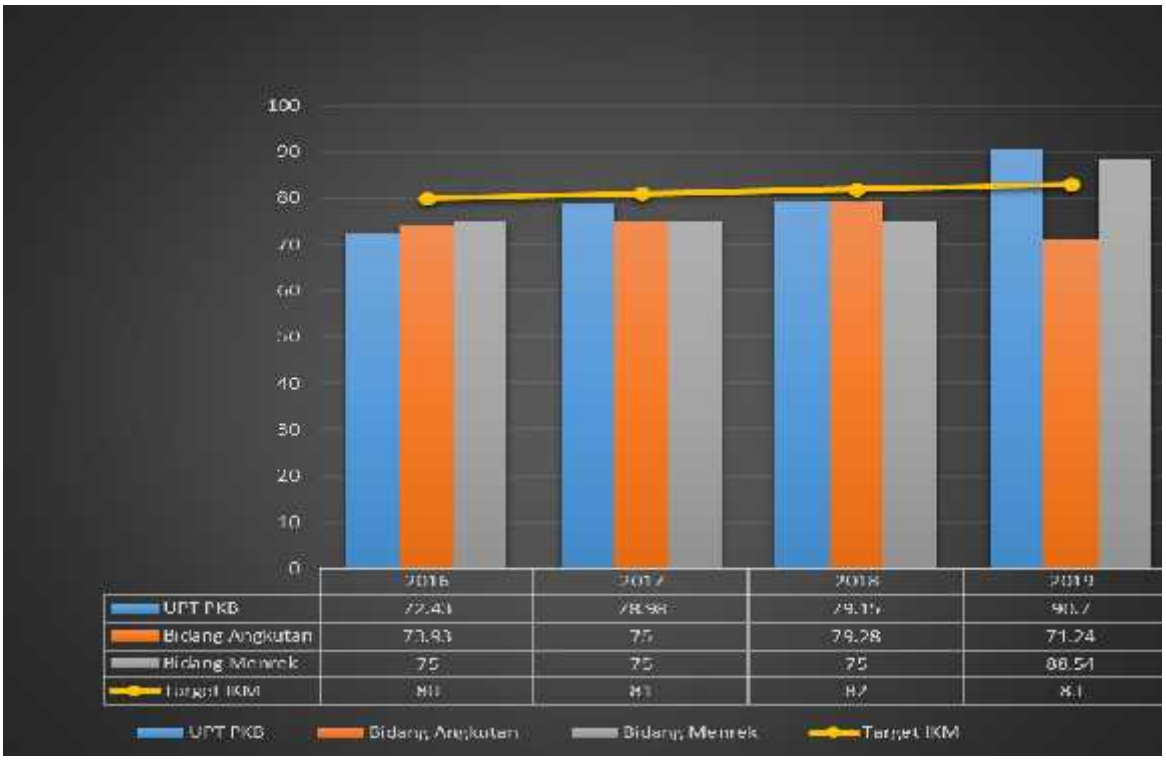

Tabel di bawah ini adalah nilai IKM untuk 4 Unit layanan yang di laksanakan Oleh dinas Perhubungan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

TABEL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS PERHUBUNGAN

Tahun	Unit Kerja	Indeks IKM	Target IKM	Kriteria
2017	UPT. PKB	78,98	81	Baik
	Bidang. Angkutan	75	81	Baik
	Bidang. Menrek	75	81	Baik
2018	UPT. PKB	79,15	82	Baik
	Bidang. Angkutan	79,28	82	Baik
	Bidang. Menrek	75	81	Baik
2019	UPT. PKB	90,7	83	Baik
	Bidang. Angkutan	78,19	83	Baik
	Bidang. Menrek	88,54	83	Baik
	UPT Terminal	71,24	83	Baik
	Sekretariat	80,67	83	Baik
2020	UPT Terminal	66,04	84	Kurang Baik
	UPT PKB	76,66	84	Baik
	Bidang Angkutan	78,23	84	Baik
	Bidang Menrek	79,2	84	Baik
	Sekretariat	88,34	84	Sangat Baik

Survey Kepuasan Masyrakat (SKM) dilaksanakan oleh PT CEMERLANG STATISTIKA INDONESIA, bergerak di bidang jasa kunsultan Survey Kepuasan masyarakat. Berdasarkan analisa yang telah di lakukan terdapat hal penting yang dapat di simpulkan dari hasil survei kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) Pelayanan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. IKM UPT PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor)

Secara umum seluruh mutu unsur pelayanan publik di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan kategori " Baik " Walaupun terjadi penurunan capaian pada tahun 2020 sebesar 14 persen . Hal tersebut dikarenakan kebijakan untuk menutup unit layanan uji kendaraan bermotor selama masa PSBB untuk menghindari penyebaran virus covid 19 sehingga terjadi penumpukan antrian pada saat layanan di buka. Hal tersebut menjadikan banyak keluhan penguna layanan karena antrian yang panjang untuk penjadwalan waktu uji.

b. IKM PELAYANAN TERMINAL

Survey kepuasan Masyarakat pada terminal tipe C yang terdiri dari Terminal Porong, Terminal Krian, Terminal Sukodono dan Terminal Taman pada tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo sebesar 66,04 dengan kategori " Kurang Baik dan terjadi penurunan 5.2 poin dari tahun 2019 hal ini di sebabkan menurunnya animo masyarakat dalam mengunakan angkutan

umum dan tidak adanya bangunan fisik terminal di Terminal Sukodono dan Taman. Berikut ini adalah grafik nilai ikm pada UPT Terminal

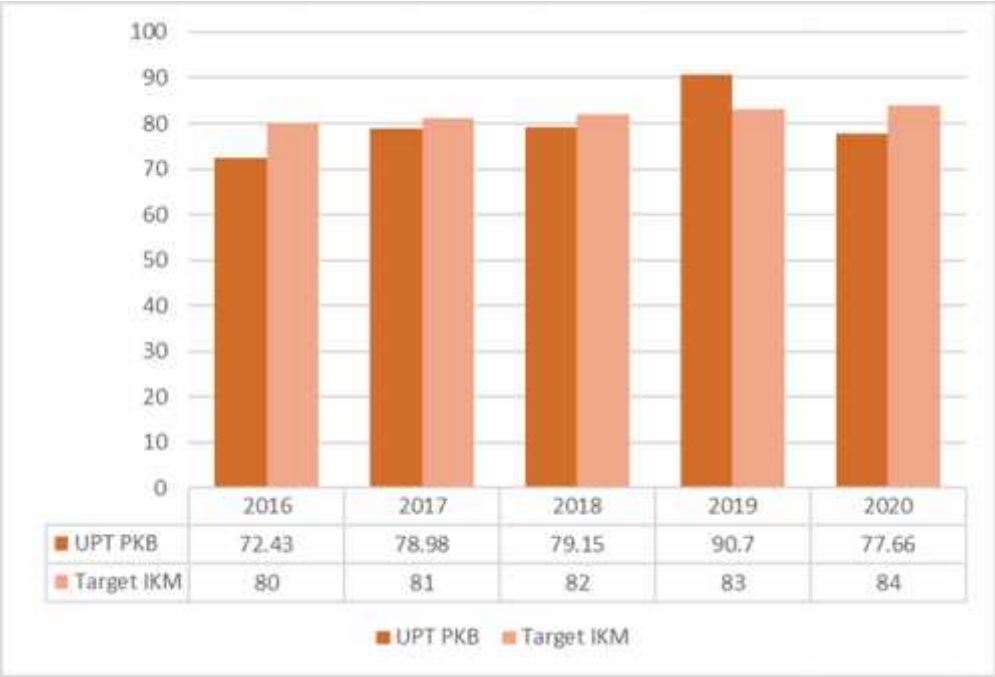

c. IKM Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (Rekomendasi Andalalin)

Nilai IKM Rekomendasi Andalalin tahun 2020 mengalami penurunan di bandingkan dengan tahun 2019 sebesar 9,34 point tetapi masih dalam kategori baik. Penurunan tersebut diakibatkan karena rapat pembahasan rekomendasi Andalalin yang mengunakan zoom meeting masih di anggap kurang efektif oleh penguna layanan.

Berikut adalah grafik rekomendasi andalalin di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 - 2020

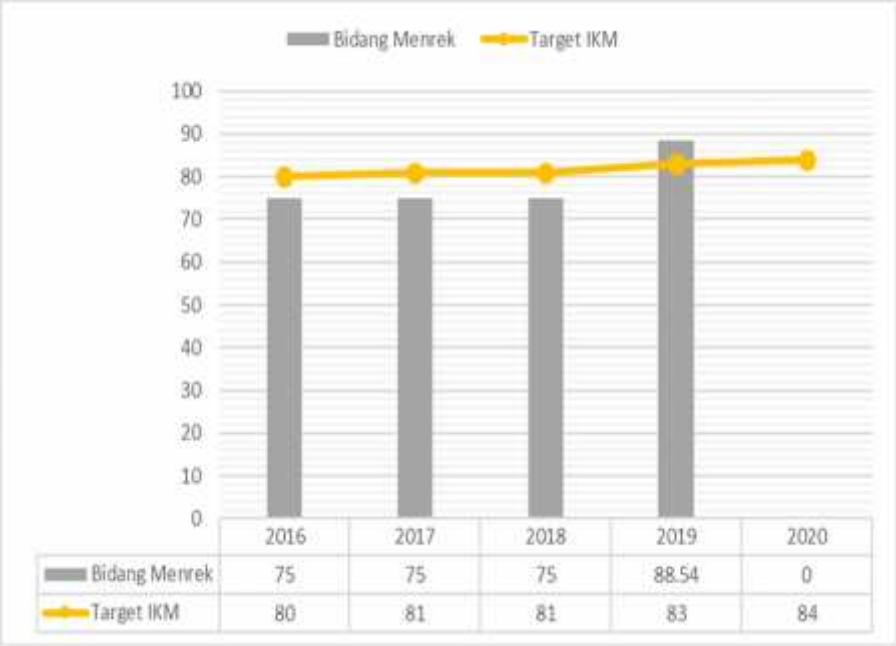

d. IKM PELAYANAN IJIN TRAYEK

Nilai IKM untuk ijin Trayek pada tahun 2020 mengalami penurunan bila di bandingkan dengan 2019 hal ini di sebabkan karena Dinas Perhubungan hanya sebagai rekomendator sedangkan untuk pembayaran retribusi ada di Badan Perijinan Daerah sehingga masyarakat beranggapan perijin trayek masih berbelit-belit.

(2) Sasaran 2: Terwujudnya keselamatan lalu lintas angkutan darat

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Prosentase keselamatan angkutan darat di Sidoarjo	70	96	26	75	96	21	83	96	13

Yang dimaksud dengan keselamatan angkutan darat berdasarkan PP 37 TH 2017 Tentang Keselamatan Lalu lintas dan angkutan jalan adalah Suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang di sebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/lingkungan. Adapun capain kinerja sasaran realisasi mengalami peningkatan hanya pada tahun 2020 sama dengan tahun lalu namun masih diatas target yang di tetapkan dari target 83 % terealisasi 96 %

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut diatas didukung dengan indikator sebagai berikut:

1) **Tingkat Pelayanan Jalan (Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor)**

   Indikator ini merepresentasikan tingginya tingkat pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir.

   Berikut laporan jumlah kendaraan yang melaksanakan uji sampai pada tahun 2019 :

	2017	2018	2019	2020		
KBWU	44688	39748	40180	51236		
Lulus Uji	42449	37406	38906	49477		
Tidak Lulus	2239	1342	1274	1759		

Dari tabel di atas menunjukkan pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan dari tahun 2019 sebesar 0.41 yaitu dari 96,83% menjadi 96, 57%. Ppeppnurunan prosentase capaian tersebut tidak signifikan dan masih dapat di kategorikkan sama dengan tahun 2019. Jadi dapat saya simpulkan bahwa prosentase capaian antara tahun 2019 dan 2020 adalah sama.

Berikut upaya dalam meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, antara lain adalah :

- Melakukan kalibrasi alat uji secara berkala, memelihara serta merevitalisasi alat untuk menjaga dan meningkatkan kapabilitas setiap komponen alat uji.
- Menambah pos *drive thru* yang diperuntukkan bagi pemohon yang datang melakukan uji atas nama pribadi yang diberikan *privilege* yaitu mendaftar dan melaksanakan pengujian di hari yang sama.
- Menganti Buku Uji manjadi Smart cart
- Pendaftaran Uji Online
- Pembayaran dengan uang elektronik

2) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan

Indikator ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyediakan/mendukung Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak sebagai bentuk upaya peningkatan keselamatan dan kenyamanan pelayanan jalan kepada masyarakat. Adapun definisi Sarana adalah segala sesuatu yang di pakai sebagai alat untuk mewujudkan keselamatan jalan sedangkan prasarana (infrastruktur) adalah penunjang terlaksananya keselamatan jalan.

Kecukupan Jumlah alat kelengkapan Jalan yang berfungsi dengan baik dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat Sidoarjo dalam berlalulintas dan mengurang titik - titik kemacetan di

wilayah Kabupaten Sidoarjo. Adapun alat perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, meliputi :

1) Alat pemberi isyarat ;
2) Rambu lalu lintas;
3) Marka jalan;
4) Alat pengendali pemakai jalan,terdiri dari alat pembatas kecepatan, alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.

Berikut Perkembangan Data Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi antara lain :

No	Alat Perlengkapan Jalan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Jumlah
1.	**Pengadaan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas)**						
a.	Traffic Light	3 Lokasi	-	2 Lokasi		-	5 Lokasi
	Traffic light Over Pass	-	-	-	6 Lokasi	-	6 Lokasi
	Traffic light ATCS	-	-	4 lokasi	6 Lokasi	-	10 Lokasi
b.	Pengadaan Paku Jalan	283 Unit	-	-	-	-	283 Lokasi
c.	Warning Light/ Flashing Light	4 Lokasi	4 Lokasi	28 Lokasi	29 lokasi	6	71Lokasi
d.	Pelican Crossing	-	2 Lokasi	3 Lokasi	3 lokasi	2	10 Lokasi
2.	**Pengadaan RPPJ / Rambu Jalan**		-	-	-	-	-
a.	Rambu Peringatan Larangan dan Perintah	102 Unit	19 Unit	-	-	50	171 Lokasi
b.	Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan	33 Unit	-	-	-	-	33 Unit
	- RPPJ elektronik	-	-	3 Unit	-	-	3 unit

	- Rambu lalulintas tiang F	-	-	-		-	-
	- Rambu Tiang biasa	-	100 Unit	150 Unit	100 Unit	-	350 Unit
3.	**Pengecatan marka Jalan**		-	-	-	-	-
a.	Dana APBD	1,175 m2	1,175 m2	12.203 m2	492,78 m2	-	507.333 m2
b.1	Dana DAK	260,75 m2	260,75 m2	-	-	-	521.5 m2
b.2	Speed Trap (pita kejut)	221,70 m2	221,70 m2	-	127,50 m	-	570.9 m2
4.	**Revitalisasi Guardrill**	3 titik	3 titik	-	-	-	6 Titik
5.	**Cermin tikung**	-	20 Unit	10 Unit	15 Unit	6	51 Unit
6.	**Rambu papan himbauan parker**	-	20 Unit	-	-	-	20 Unit
7.	**Pengadaan Mobil Sky walker**	-	-	1 Unit	-	-	1 Unit
8.	**Pengadaan moil derek**	-	-	1 Unit	-	-	-
9.	**Pengadaan mobil Uji keliling**	-	-	1 Unit	-	-	-
10.	**EWS perlintasan KA**	-	-	-	6 lokasi	-	-

a. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan dengan anggaran sebesar Rp.7.454.517.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.154.555.252,00, atau 82,56%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Prosentase Masyarakat yang merasa puas dengan pelanyanan Angkutan Umum,	80 %	80 %	100%

Permasalahan:

1. Tidak bisa dilaksanakan kegiatan mudik gratis dikarenakan adanya pandemi covid -19
2. Untuk Tenaga Non ASN Petugas Penjaga Perlintasan KA yang dilakukan saat ini sebayak 88 orang karena jalur tengah belum dioperasionalkan selama 24 jam

Solusi:

Anggaran untuk pelaksanaan mudik gratis telah di refocusing untuk kegiatan penanganan penanggulangan penyebaran covid-19

Program tersebut didukung oleh Anggaran APBD kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
a. Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan	a.Jumlah Penumpang yang terangkut dan teroganisir mudik gratis b.Jumlah Peserta pemilihan sopir/pengemudi Angkutan umum teladan	50 Orang	0	%	3.601.926.300	2.753.410.500	76 %
b. eningkatan pelayanan dan Pembinaan Usaha Angkutan Sungai,Kereta Api dan Udara	a.Jumlah alat kelengkapan operasional perlintasan kereta api b.Jumlah Petugas penjaga palang pintu perlintasan KA c.Jumlah Pegusaha angkutan Sungai yang mengikuti pembinaan teknis pelayanan d.Jumlah titik perlintasan KA yang dikelola	2 macam 96 Orang 50 Orang 15 Titik	2 macam 88 Orang 50 Orang 15 Titik	100% 92% 100% 100%	3.852.591.300	3.401.144.752	88%

2. Program Pengembangan Sarana dan Prasaran Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp.8.382.560.885,- dan terealisasi sebesar Rp.2.477.744.712,- atau 29,56%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Prosentase Sarana Prasarana Perhubungan Yang berfungsi dengan baik	80 %	30 %	37,5 %

Permasalahan:

1. Tidak bisa dilaksanakan kegiatan mudik gratis dikarenakan adanya pandemi covid -19
2. Adanya pergeseran / Refocusing / Relokasi anggaran kepenanganan Covid 19

Solusi:

1. Anggaran untuk pelaksanaan mudik gratis telah di refocusing untuk kegiatan
   penanganan penanggulangan penyebaran covid-19
2. Sebagian dilaksanakan diPAK 2020

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Jenis Sarpras Perhubungan yang terbangun	4 Jenis	4 Jenis	100%	6.470.087.043	1.441.329.973	22,28 %
Pengoperasian/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Jenis Sarpras Perhubungan yang terpelihara	6 Jenis	6 Jenis	100%	1.912.473.840	1.036.444.739	54,19%
TOTAL :					8.382.560.885,00	2.477.744.712,00	29,56

3. Program Penyusunan kebijakan Tekni, Norma, Standart Prosedur dan Sistem Informasi Bidang Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp.1.257.011.180,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.070.998.244,00 atau 85,20%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Prosentase rekomendasi andalallin yang digunakan untuk kebijakan peningkatan layanan kapasitas jalan	100%	100%	100%

Permasalahan:

Untuk kegiatan pengoperasian area traffic control system tidak terealisasi karena honorarium tenaga teknis untuk Ijazah SMA di DPA seharusnya 6 orang yang terealisasinya hanya ada 5 orang dan kekurangan gaji untuk tenaga ATCS selama 10 bulan yang belum terbayarkan.

Solusi:

Melakukan kegiatan pengoperasian area traffic control system dengan memaksilkan sumber daya manusia yang ada dan akan dipenuhi di tahun berikutnya.

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penyusunan dokumen teknis perencanaan manajemen lalu lintas	Jumlah dokumen teknis yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100	488.260.060,00	425.624.080,00	87,17

Pengoperasian Sarana Traffiq Cone Sistem	Jumlah rekomendasi andalalin yang dikeluarkan	12 Rekomendasi	21 Rekomendasi	100	613.501.100,00	495.624.080,00	80,84
Penyusunan dokumen teknis perencanaan dan sosialisasi/ rekayasa lalulintas	Jumlah titik lokasi simpang yang dikendalikan	3 Titik	3 Titik	100 %	155.250.000,00	149.415.694,00	96

4. Program Evaluasi pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas dengan anggaran sebesar Rp.17.451.287.170,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.747.009.920,00 atau 84.50 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Jumlah titik potensi parkir yang dikelola	85%	83%	98%
Jumlah Kegiatan Sosialisasi	4 Kegiatan	1 Kegiatan	0,25
Terwujudnya keselamatan angkutan jalan	100 %	100 %	100%

Permasalahan:

1. Kegiatan Sosialisasi tidak bisa dilaksanakan karena semua anggaran refocusing ke Anggaran Penanganan Covid
2. Kegiatan Sosialisasi berpotensi menimbulkan *kerumunan* di tengah pandemi corona, sehingga *tidak*
3. *diperkenankan* kegiatan tersebut untuk dilaksanakan
4. Belum terlaksananya sistem E-Parkir sehingga berpengaruh terhadap serapan anggaran sosialisasi dan honor
5. satgas E-Parkir
6. 4 Pandemi covid menyebabkan kegiatan operasi tidak dapat di laksanakan

Solusi:

1. Segera dilaksanakannya E-Parkir sebagai pengganti sistem parkir berlangganan
2. Melaksanakan tugas PAM PSBB dan Penyekatan

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penyelenggaraan operasi lalulintas	30				3.699.819.200,00	2.993.565.513,00	80,91
Pelayanann Pengujian kendaraan bermotor					3.814.428.170,00	3.382.137.621,00	88,67
Pengelolaan terminal tipe c	Jumlah Terminal tipe C yang dikelola	6 Terminal	4Terminal	67%	1.320.720.200	1.272.318.055	96,34
Pengelolaan parkir berlangganan	Jumlah titik potensi parkir yang dikelola	85%	83%	98%	8.526.300.600	7,056,342,231	82,76
Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang diadakan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	0.25	90.019.000	42.646.500	47,37
Total :					17.451.287.170,00	14.747.009.920,00	84,50

Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

SASARAN RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatknya ketersediaan teknologi informasi publik menuju Sidoarjo *Smartcity*	Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo	2,6	3,13	120,38	2,65	3,13	118,11

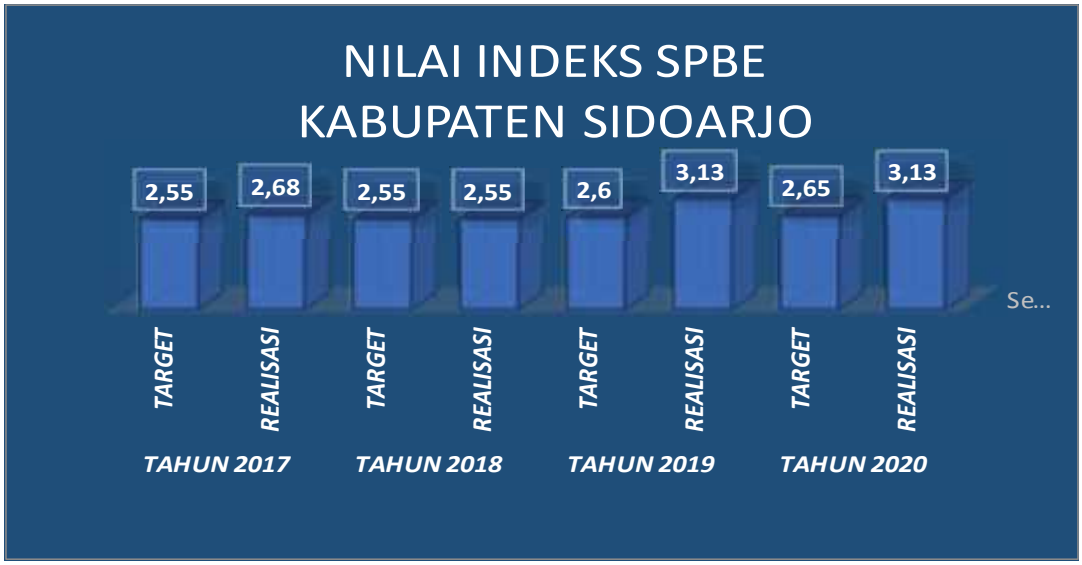

Hasil Capaian Indeks SPBE pada tahun 2020 masih sama pada tahun 2019, hasil yang diraih Yaitu **3,13** dengan predikat **Baik.** Evaluasi hasil ini dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Karena Pada tahun 2020 Evalusi SPBE secara nasional dilakukan random dan Kabupaten Sidoarjo tidak masuk dalam daftar penilaian evaluasi SPBE maka hasil yang didapatkan masih sama dengan Tahun 2019, disarankan oleh Evaluator Kemenpan-RB agar Kabupaten Sidoarjo mempersiapkan diri melakukan evaluasi mandiri di Tahun 2021 dengan komponen penilaian yang baru sehingga diharapkan nantinya akan mendapat hasil yang lebih baik.

Berikut Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek :

NILAI INDEKS SPBE, DOMAIN DAN ASPEK

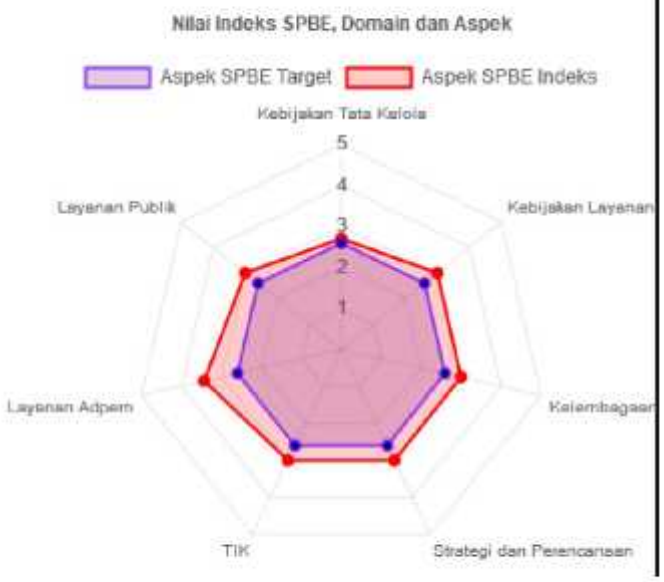

Nama Instansi
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

K/L/D	:	Kabupaten
Daerah	:	Jawa Timur
Indeks SPBE	:	**3.13**
Predikat SPBE	:	Baik
Domain Kebijakan SPBE	:	**2.88**
➥ Kebijakan Tata Kelola SPBE	:	2.71
➥ Kebijakan Layanan SPBE	:	3.00
Domain Tata Kelola	:	**3.00**
➥ Kelembagaan	:	3.00
➥ Strategi dan Perencanaan	:	3.00
➥ TIK	:	3.00
Domain Layanan SPBE	:	**3.27**
➥ Administrasi Pemerintahan	:	3.43
➥ Pelayanan Publik	:	3.00

Sumber: http://spbe.go.id/moneval

b. Sasaran

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase jaringan OPD dan kecamatan terintegrasi	47	52,08	110	58	68 ,75	118,53	70	89,6	128	81	110	135,8
Persentase Jaringan Desa/Kelurahan terintegrasi	0	0	0	24	0	0	44	0	0	64	0	0
Persentase aplikasi OPD berbasis e-gov yang terintegrasi							60	60	100	80	80	100

Digambarkan dalam Grafik :

Sampai dengan Tahun 2020 Realisasi Kinerja yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 3 Indikator Kinerja :

1. Persentase jaringan OPD dan kecamatan terintegrasi;
2. Persentase Jaringan Desa/Kelurahan terintegrasi;
3. Persentase aplikasi OPD berbasis e-gov yang terintegrasi.

1. Telah mencapai target yang ditentukan,selama tahun 2020, kinerja kami mengalami peningkatan, walaupun Pandemi COVID-19 kami berusaha untuk bekerja seoptimal mungkin. Total Jaringan Koneksi Fiber Optik telah terbangun sepanjang **150 km**. baik Kabel Udara maupun kabel tanam. Pada Tahun 2020 ini kami melakukan percepatan untuk jaringan seluruh OPD. Di Tahun 2020 ini juga kami melakukan pemasangan Jaringan untuk membantu pengendalian banjir di Kepajaran Mlirip Tarik, disamping itu untuk melihat pengelolaan sampah di TPA Jabon dan membantu untuk pembelajaran secara daring di SMP Negeri 4 Sidoarjo, SMP Negeri 5 Sidoarjo, SD Negeri Kupang 4 Kalialo Jabon. Sehingga kinerja kami melampaui target yang ditetapkan**, target yang ditetapkan 81% realisasi kinerja kami 110%**.

Berikut Peta FO Connection Delta Ring Kabupaten Sidoarjo :

Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan menggunakan koneksi Fiber Optik telah terbangun sepanjang 150,00 km baik menggunakan Kabel Udara maupun Kabel Tanam.

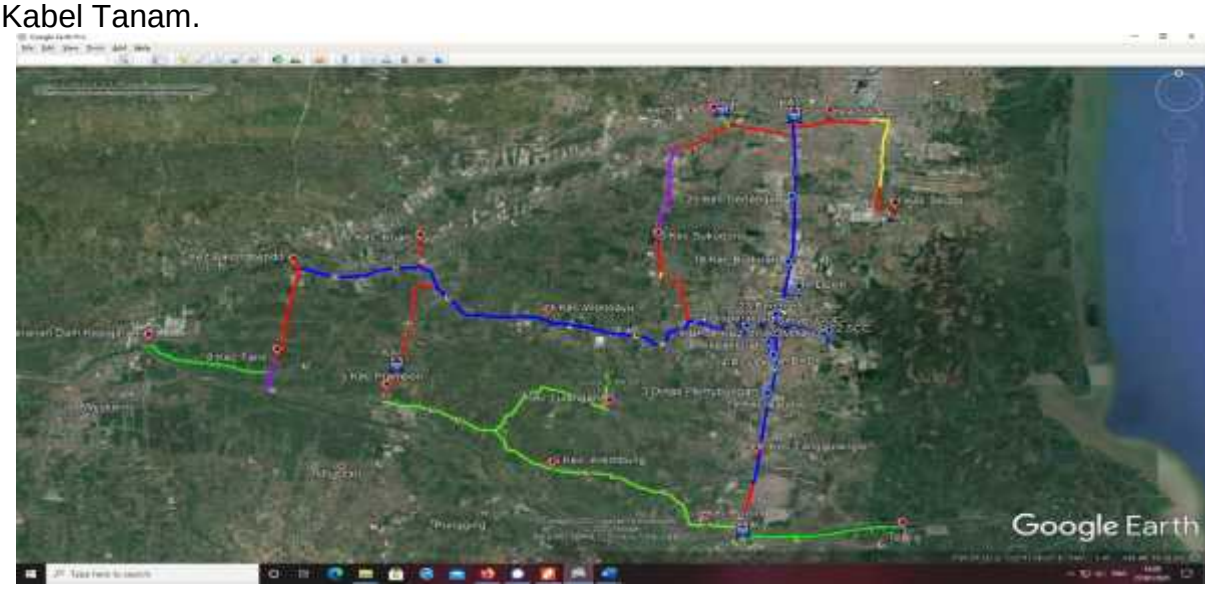

2017 – Penggelaran FO Sepanjang 2,00 km

1. Data Center Pendopo
2. Sekretariat Daerah
3. Sekretariat DPRD
4. Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
6. Dinas Perikanan
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas PU Bina Marga dan SDA
9. Dinas PU Cipta Karya
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

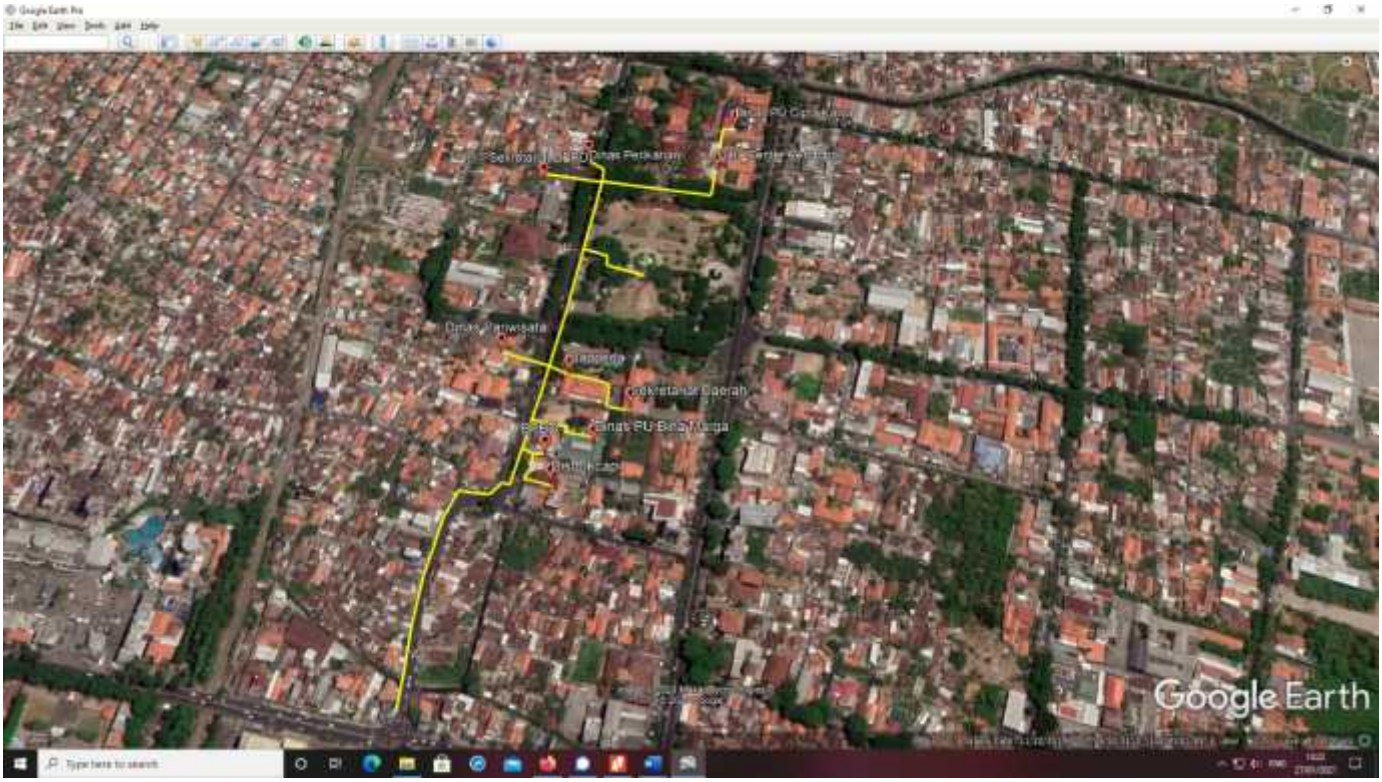

2018 - Penggelaran FO Sepanjang 38,00 km

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Badan Kepegawaian Daerah
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Badan Pelayanan Pajak Daerah
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Dinas Pangan dan Pertanian

7. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
10. Dinas Kesehatan
11. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Tenaga Kerja
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
16. Inspektorat Daerah
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Satuan Polisi Pamong Praja
19. RSUD Sidoarjo
20. Mall Pelayanan Publik
21. Kecamatan Candi
22. Kecamatan Sidoarjo
23. Kecamatan Buduran
24. Kecamatan Gedangan

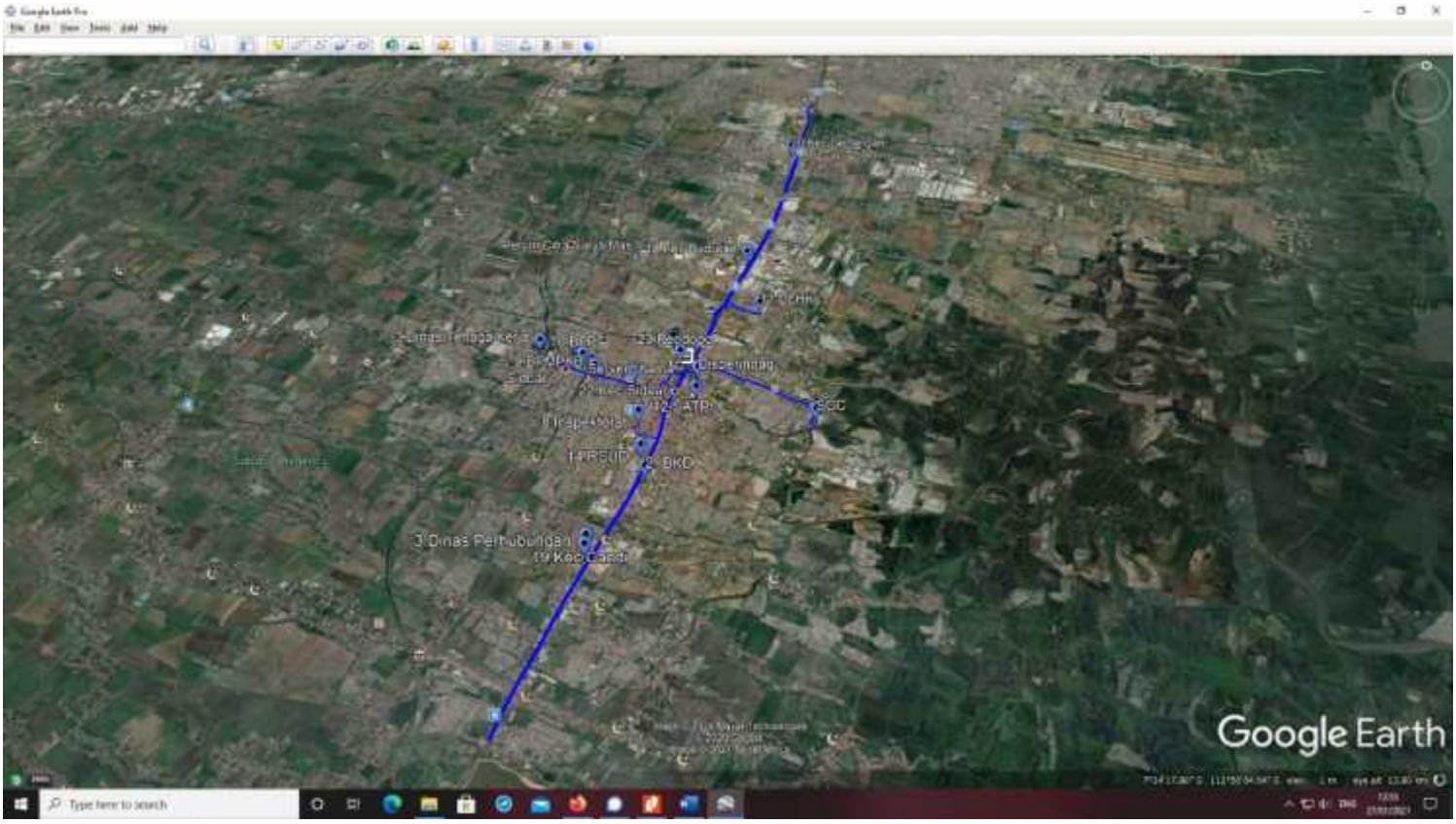

2019 - Penggelaran FO Sepanjang 70,00 km

1. Kecamatan Wonoayu
2. Kecamatan Krian
3. Kecamatan Balongbendo
4. Kecamatan Tarik
5. Kecamatan Prambon
6. Kecamatan Sukodono
7. Kecamatan Waru
8. Kecamatan Sedati
9. Kecamatan Tanggulangin
10. UPT Perpustakaan Krian
11. Puskesmas Sidoarjo

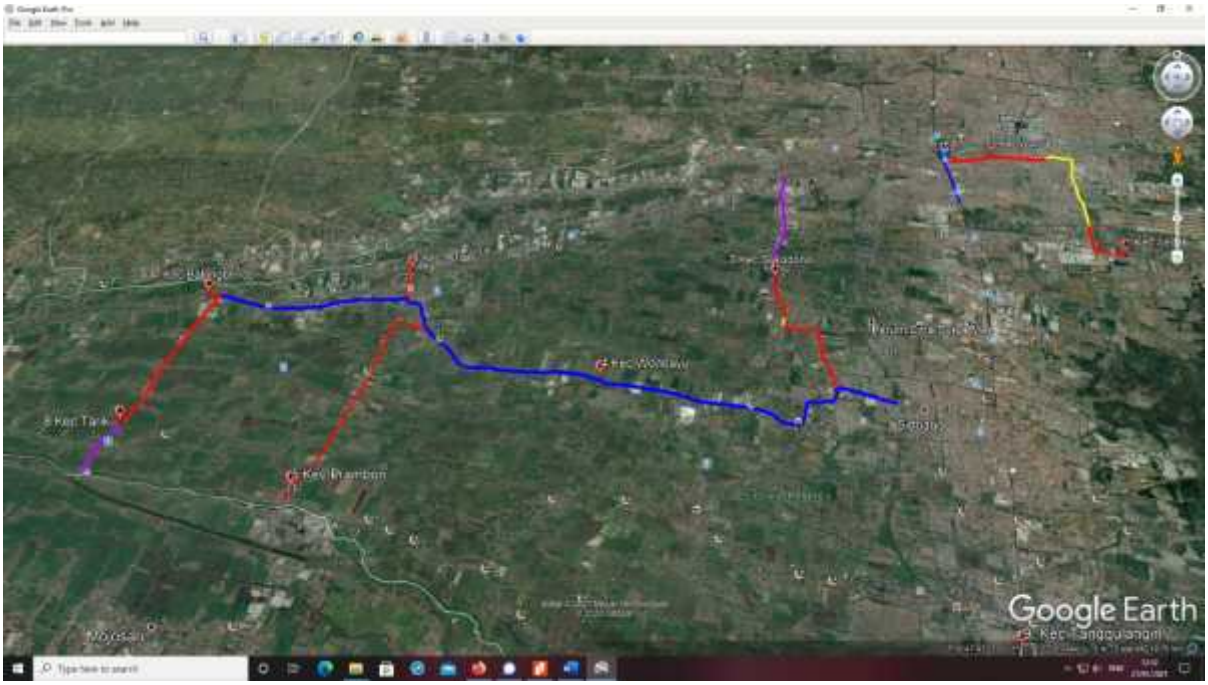

2020 - Penggelaran FO Sepanjang 40,00 km

2. Kecamatan Jabon
3. Kecamatan Porong
4. Kecamatan Krembung
5. Kecamatan Tulangan
6. Kecamatan Taman
7. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon
8. Pintu Air Kepajaran Mlirip Tarik
9. SMP Negeri 4 Sidoarjo
10. SMP Negeri 5 Sidoarjo
11. SD Negeri Kupang 4 Kalialo Jabon

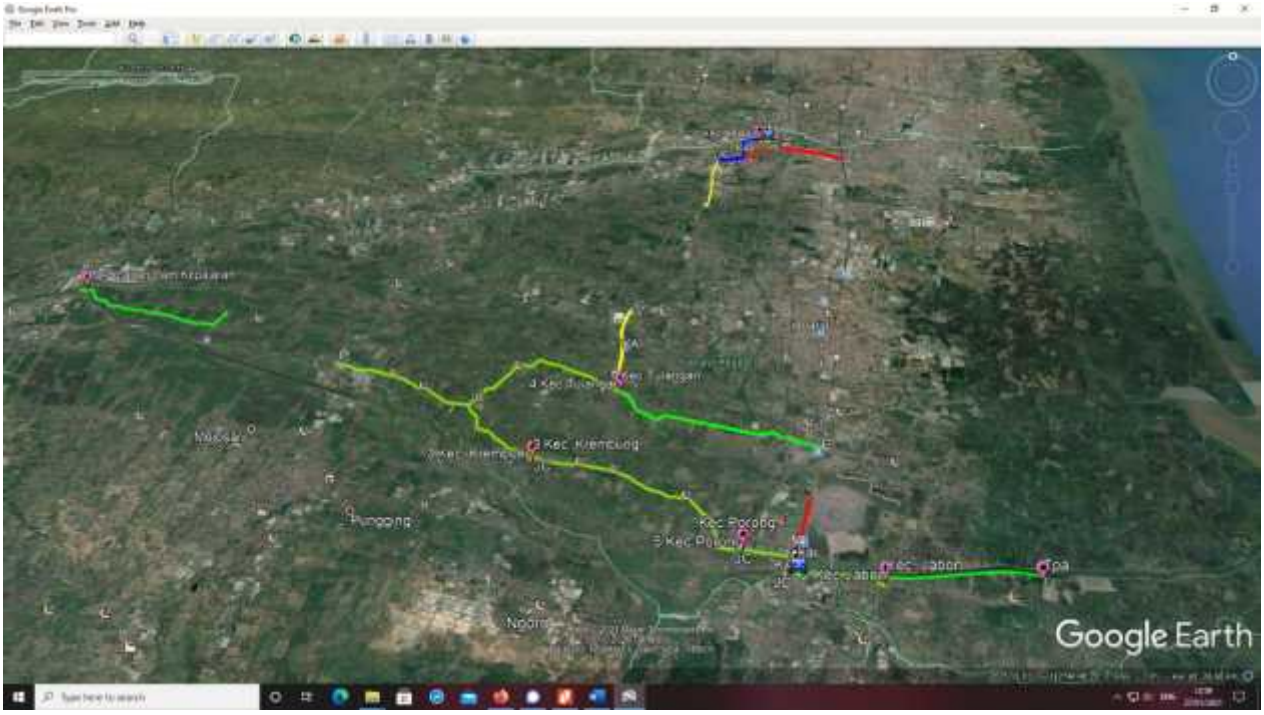

Bandwidth Internet yang cukup memadai di OPD
BKD

Dishub

Inspektorat

RSUD

Kecamatan Wonoayu

Kecamatan Jabon

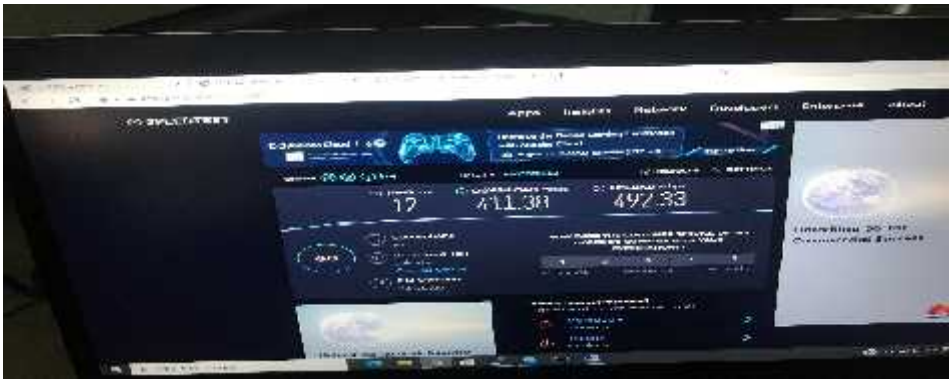

Pada tahun 2020 ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo juga tetap melakukan Monitoring dan Evaluasi Aplikasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo walaupun Pandemi COVID-19, Monitoring dan Evaluasi dilakukan bukan hanya untuk melihat apakah Aplikasi itu aktif atau tidak, namun melihat proses bisnis dari suatu aplikasi disamping itu kami juga telah menerbitkan Perbup No 46 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola TIK menuju SMARTCITY di Kabupaten SIdoarjo, pasal 9 ayat (1) menyatakan “Setiap penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan wajib terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika”, maka bersama ini kami beritahukan bahwa kami telah menyediakan form isian aplikasi Bispro di alamat http://bispro.sidoarjokab.go.id . Berikut aplikasi yang Dinas Komunikasi dan Informatika MONEV dari Tahun 2017-2020. Dari target yang ditetapkan

Tahun 2017, 24 Aplikasi terdiri dari:

No	Nama Aplikasi	Jenis Aplikasi (Internal/eksternal)	Platform (web/destop/android)	Instansi
1	SIKOOLING	ekternal		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	SIPPADU	eksternal		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Berkas Mlaku Dhewe (BMW) di Kecamatan Sukodono	eksternal	website	Kecamatan Krian
4	P3M (pusat pelayanan pengaduan masyarakat	ekternal		Dinas Komunikasi dan Informasi
5	RDS (Regional Development System)	internal		Badan Perencanaan pembangunan Daerah
6	E-MUSRENBANG	internal		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	SIGAP (Sidoarjo Tanggap)	eksternal		Badan Penanggulanan Bencana Daerah
8	SIPETEK (Sistem Pelayanan Terpadu Kecamatan)	ekternal		Kecamatan Buduran
9	CEPET MULEH	ekternal		Kecamatan Tulangan
10	e-Reklame	ekternal		Kecamatan Tulangan
11	Aplikasi e-Monkas	ekternal		Badan Pelayanan Pajak Daerah
12	Aplikasi e-PBB	ekternal		Badan Pelayanan Pajak Daerah
13	Aplikasi Simporda	eksternal		Badan Pelayanan Pajak Daerah
14	E-SPTPD	ekternal		Badan Pelayanan Pajak Daerah
15	SIAP TARIK (Sistem Informasi Antrian Puskesmas)	ekternal		Puskesmas Tarik
16	CUTI ONLINE	internal		Badan Kepegawaian Daerah
17	E-KINERJA / SKP Online	internal		Badan Kepegawaian Daerah
18	SIPJAKI			Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
19	EKRAV (Ekonomi Kreatif)			Bappeda (Badan perencanaan pembangunan daerah)
20	INKAM RS	internal		Rumah Sakit Umum Daerah

21	REMICS	internal		Rumah Sakit Umum Daerah
22	SANTRI	eksternal		Rumah Sakit Umum Daerah
23	E-PERPUS	ekternal		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor	internal		Dinas Perhubungan

Tahun 2018, 39 Aplikasi terdiri dari :

No	Nama Aplikasi	Jenis Aplikasi (Internal/eksternal)	Platform (we/destop/android)	Instansi
1	Sistem Informasi Surat Menyurat / E-Surat	internal	website	Bagian Umum Setda Kab. Sidoarjo
2	Pengaduan Online DLHK	ekternal	website	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
3	Sidoarjo Cegah Kematian Ibu dan Anak / Si Cantik	ekternal	website	Dinas Kesehatan
4	Rumah Sidoarjo	ekternal	website	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Sistem Informasi Online Kamar Operasi / SIOKO	internal	website	Rumah Sakit Umum Daerah
6	Dataku	ekternal	website	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Sistem Informasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (SKPL)	ekternal	website	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
8	Sistem Informasi Pelayanan Pos Kesehatan Ikan Terpadu / POSIKANDU	ekternal	website	Dinas Perikanan
9	SISDA / STARDA	ekternal	website	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10	Integrasi aplikasi KGB dengan aplikasi SIM Gaji	internal	website	Badan Kepegawaian Daerah
11	Tukuo	ekternal	website	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
12	Tata Kelola Surat dengan Aplikasi / Takesi	internal	website	Kecamatan Taman
13	E-PATEN	ekternal	website	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
14	Apliaksi TPP Berbasis Web	internal	website	Bagian Umum Setda Kab. Sidoarjo
15	Tata Ruang & Advise Plan	internal	website	Bagan Perencanaan Pembangunan Daerah
16	E- Parlemen	internal	website	Sekretariat DPRD

17	Registrasi Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS, Pengembangan Sipekat dan Pengembangan SKP	internal	website	Badan Kepegawaian Daerah
18	Berkas Mlaku Dhewe (BMW) di Kecamatan Krian	ekternal	website	Kecamatan Krian
19	Rencana Operasional Program Kegiatan (ROPK)	internal	website	bagian Pembangunan Setda Kab. Sidoarjo
20	Elektronik Rencana Pelaksanaan Pengadaan / E-RPP / SIMPUL	internal	website	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
21	Sistem Informasi Kearsipan / SEMAR	internal	website	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	E-Dagulir	ekternal	website	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
23	E-BPHTB	ekternal	website	Badan Pelayanan Pajak Daerah
24	Aplikasi Arsip	internal	website	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
25	Web Investasi	ekternal	website	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26	Aplikasi SKPL Online	internal	website	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
27	Aplikasi Santri Andoid	ekternal	website	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
28	SEMeS	internal	website	Rumah Sakit Umum Daerah
29	SI-IPIN (Sistem Informasi Ijin Penelitian Online) atau SIDALI (Sistem Rekomendasi Penelitian)	ekternal		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30	SMI Layanan atau E-Sedot Tinja	ekternal		dinas perumahan dan permukiman
31	Aplikasi Antrian	ekternal		BPBD
32	Tanda Tangan Digital	internal		BPBD
33	Dashboard Pajak	internal		BPBD
34	SIDIRA (Sidoarjo Information Digital Library)	ekternal		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
35	Smart Visitor	ekternal		Bagian Umum Setda Kab. Sidoarjo
36	integrasi aplikasi KGB dengan aplikasi SIM Gaji	internal		Bagian Umum Setda Kab. Sidoarjo
37	Pengajuan TPP (Tunjangan Penghasilan) dan uang makan	internal		Bagian Umum Setda Kab. Sidoarjo

38	Aplikasi Antrian Online	ekternal		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
39	e-kliping	ekternal		Kominfo

Tahun 2019, 29 Aplikasi terdiri dari :

No	Nama Aplikasi	Keterangan	Jenis Aplikasi (Internal/eksternal)	Platform (we/destop/android)
1	Aplikasi Sikada	Baru	Internal	Web
2	E-surat (Disposisi)	Lanjutan 2018	Internal	Web, Android
3	Sipraja (E-paten)	Lanjutan 2020	eksternal	Web
4	SiBUTIK + video edukasi	baru	internal	Web, Android
5	Aplikasi Sistem Kearsipan E-Disposisi		internal	web, android
6	Pengembangan Software Aplikasi Si Cantik Di kabupaten Sidoarjo dari Dinas Kesehatan	lanjutan	eksternal	
7	STARDA / SISDA	Lanjutan 2018	ekternal	web
8	Mapping tanah	Baru	Internal	Web, Android
9	Sistem informasi pelaporan kerusakan gedung banguanan pemerintah	Baru (paparan)	internal	web
10	Aplikasi SIPEJANTAN (Sistem pelayanan Jabon Tanggap Beriman) replikasi BMW	replikasi BMW kec jabon	ekternal	web
11	Aplikasi BMW Taman	replikasi BMW kec taman	eksternal	web
12	Aplikasi Perolehan Tiket Mudik dengan sistem online	baru	eksternal	web
13	Aplikasi Sakip untuk internal Dinas kesehatan danUPTD pukesmas	lanjutan	internal	web
14	Aplikasi Bursa Kerja Online	Baru	eksternal	web
15	Elektronik Rencana Pelaksanaan Pengadaan / E-RPP / SIMPUL	lanjutan 2018	internal	website
16	Aplikasi Informasi Produk Unggulan Tanggulangin/ I Pro U Tang)	Baru	eksternal	website

17	Aplikasi SIMPKK	Baru	eksternal	website
18	Permohonan pengajuan penempatan ke server kominfo aplikasi Dapodik, Bos, Pendataan guru	lanjutan	internal	website
19	Aplikasi si abon/ sistem informasi antrian pukesmas prambon	baru	ekternal	website/android
20	Aplikasi Surat Ijin Praktek Online	Baru	ekternal	Website
21	Aplikasi Elektronik Tax Clearence	baru	eksternal	Website dan android
22	Aplikasi Media Informasi kehadiran Pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Baru	internal	Web base
23	Aplikasi SIKDA Generik	Pengembangan dari punya pusat	internal	Web Base
24	Aplikasi Data Koperasi dan Usaha Mikro(Dalwaskop)	Pengembangan tahun 2018	ekternal	Web base
25	Aplikasi E-Dupak	Baru	internal dinkes	Web Base
26	Aplikasi ijin penelitian online	Baru	eksternal	Web Base
27	Aplikasi Arsip	Pengembangan tahun 2018	internal	web base/android
28	Aplikasi Sidali	Pengembangan tahun 2018	eksternal	web base
29	Aplikasi Antrian pada MPP	Pengembangan tahun 2018	ekternal	Web base

Tahun 2020, 35 Aplikasi terdiri dari :

No	Nama Aplikasi	Keterangan	Jenis Aplikasi (Internal/eksternal)	Platform (we/destop /android)	Penempatan server	data berbagi pakai atau tdk	OPD yang mengelolah
1	Bos	lanjutan	internal	web	kominfo		Dispendik
2	Aplikasi SIKSDA	Pengembangan	internal	web	BPKAD		BPKAD
3	Aplikasi Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai	baru	internal	web			Dispendik
4	Aplikasi database perusahaan Eksport import (INDAGO)	baru	eksternal	web	dummy (kominfo)		Disperindag

5	Aplikasi Lestari	Baru	eksternal	web+android	kominfo		Perkim
6	antrian sukodono	baru	eksternal	web	kominfo		Kec.Sukodono
7	econsulting	baru	internal	web	kominfo	simpeg,ekinerja	inpsktorat
8	aplikasi elabkd	baru	internal	web+android	kominfo		BKD
9	aplikasi pengawasan	baru	internal	Web	kominfo		inspektorat
10	SITABUR-KP	baru	eksternal	Web			panperta
11	Aplikasi SISDUR	baru	eksternal	Web			bappeda
12	Aplikasi E-Kenda	baru	internal	Web, android	kominfo		bag.pembangunan
13	Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Pengangkutan Sampah (SIPPAS)	baru	internal	Web, android	kominfo		DLHK
14	Aplikasi SIKD	baru	internal	web	kominfo	ebuddy	Perpusip
15	Aplikasi Laporan Bulanan Puskesmas	baru	internal				dinkes
16	Aplikasi Pendataan Penduduk Non Permanen Berbasis Web (LADEN)	baru	internal	web	kominfo		kec.waru
17	Aplikasi Penerapan Sistem Informasi Road Inventory APILL dishub	baru	eksternal	web			Dishub
18	Pengembangan aplikasi Sipekat	pengembangan (penambahan fitur proses administrasi pensiun)	internal	web			BKD
19	Sistem Informasi Manajemen Perangkat Desa	baru	internal		dummy kominfo		PMD
20	smart city	baru	internal dan eksternal	web	kominfo		Kominfo

21	Aplikasi DITAKOPUM	pengembangan (penambahan/mengembangkan fitur-fitur pada aplikasi yang tadinya bernama DALWASKOP dan UM sekarang diganti dengan nama DITAKOPUM)	eksternal	web	kominfo		dinkop
22	Pengembangan Aplikasi Tukuo	Pengembangan	eksternal	web	kominfo		dinkop
23	Bahan Pokok / Siskaperbapo	baru	eksternal	web	dummy kominfo		disperindag
24	Aplikasi Toko Swalayan	baru	ekternal	web	dummy kominfo		disperindag
25	E-DAREN (dispenduk)	baru					Dispendukcapil
26	SIKS-SDA	baru	web				dinsos
27	Mental baja (redirect)	baru	internal	web	sever di lpse		pbj
28	DLHK Care (pengaduan dlhk)	baru	ekternal	web			DLHK
29	dekranasda	baru		web			disperindag
30	Inlislite	baru		web			perpusip
31	aplikasi ekinerja				kominfo	portal data kinerja, dwh, ebuddy, bispro,sinop	Kominfo, BKD
32	aplikasi ebudy				kominfo	simpeg, ekinerja	Kominfo, Bag.Organisasi
33	aplikasi sinop	baru	internal	web	BKD (redirect)	simpeg,ekinerja	BKD, Kominfo
34	aplikasi datawarehouse	baru	internal	web	kominfo	portal data kinerja, dwh, ebuddy, bispro	BKD, Kominfo
35	apliksi bispro	baru	internal	web	kominfo	portal data kinerja, dwh, ebuddy, bispro	Kominfo

Sasaran 2: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informasi publik	77	81,23	105	79	84,17	106,54	81	88,34	109,06

Berdasarkan pengukuran pada tiga unsur kepuasaan masyarakat (SKM) terhadap layanan keterukaan dan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 termasuk dalam kategori **Sangat Baik (A)** dengan nilai konversi SKM gabungan sebesar **88,34**. Perhitungan tersebut dinilai dari tiga variabel yaitu Layanan Informasi Publik *Helpdesk* (*face to face*) dengan nilai konversi SKM sebesar 81,77; kualitas informasi *e-government* dengan nilai konversi SKM sebesar 88,66; kualitas informasi publik dengan nilai konversi SKM sebesar 94,59.

Pengelolaan Komunikasi Publik

Untuk meningkatkan hubungan dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat diperlukan suatu media informasi dan komunikasi, bentuk media/sarana komunikasi yang tersedia, antara lain:

1. Media komunikasi secara online melalui alamat website http://ppid.sidoarjokab.go.id .

2. KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

   Media komunikasi tersebut bertujuan menunjang kelancaran komunikasi antar anggota dan pengurus kelompok informasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna informasi yang ada.

3. P3M (Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat)

   Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) berfungsi menerima, melaporkan dan menindaklanjuti pengelolaan pengaduan. Media komunikasinya dapat diakses secara online melalui alamat website http://p3m.sidoarjokab.go.id .

4. LAPOR! SPAN

   LAPOR! diinisiasikan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus interaksinya dengan pemerintah dalam rangka pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik. Saat ini LAPOR! SPAN Dibawah KEMENPAN-RB, dan awal tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo lewat Dinas Komunikasi dan Informatika mengimplementasikan LAPOR! kepada masyarakat.

   Pada Tahun 2020 total pengaduan sebesar : 587 Pengaduan

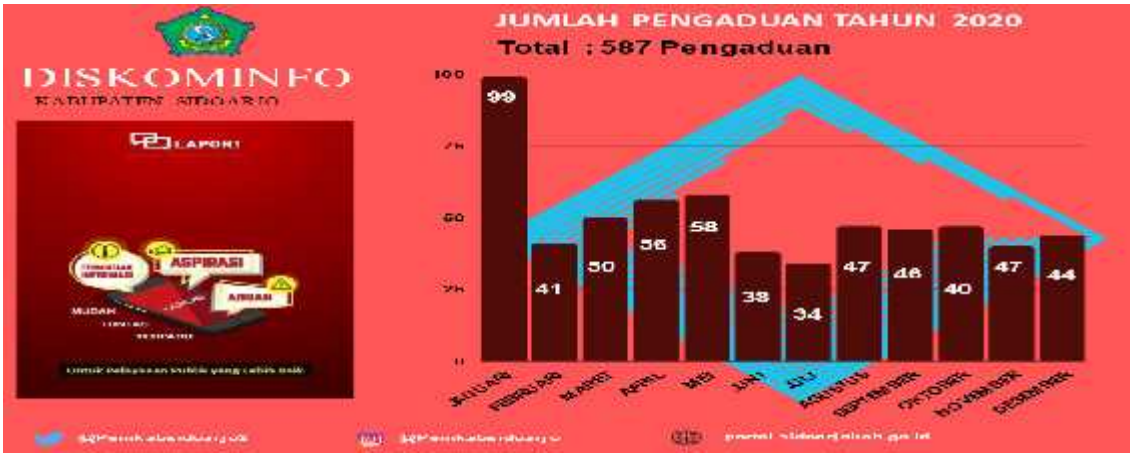
DISKOMINFO
KABUPATEN SIDOARJO
LAPOR!
ASPIRASI
ADUAN
JUMLAH PENGADUAN TAHUN 2020
Total : 587 Pengaduan
99
41
50
56
58
38
34
47
46
40
47
44
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

DISKOMINFO
KABUPATEN SIDOARJO
LAPOR!
TAHUN 2020
JANUARI
APRIL
MEI
JUNI
MARET
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
@Pemkabsidoarjo2
@Pemkabsidoarjo
portal.sidoarjokab.go.id

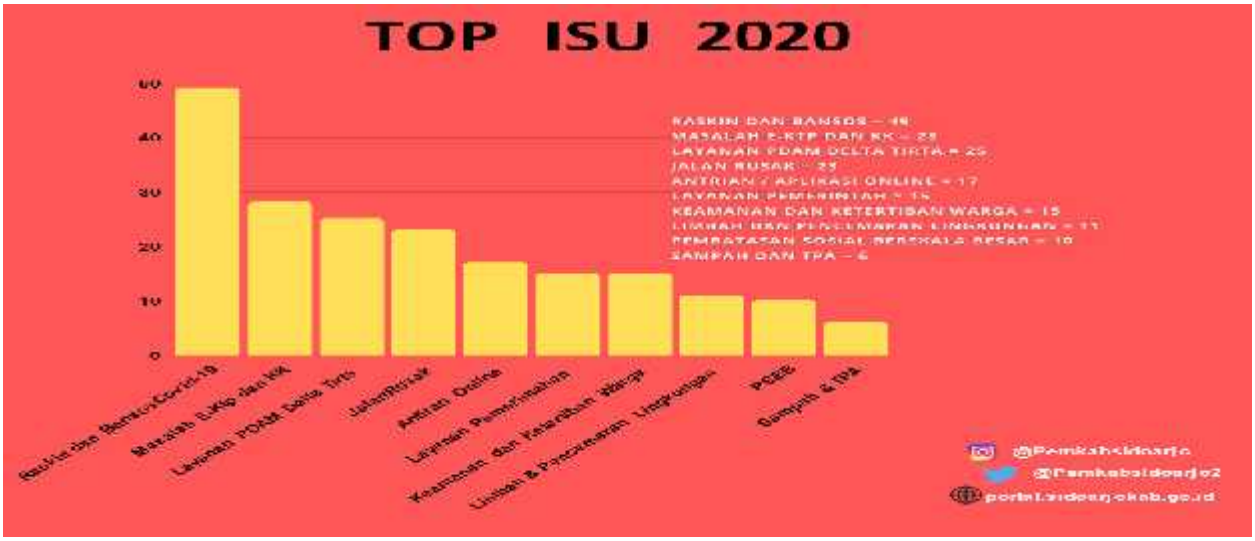
TOP ISU 2020
60
40
30
20
10
0
Kesehatan dan Bansos/Covid-19
Masalah E-Ktp dan KK
Layanan PDAM Delta Tirta
Jalan Rusak
Antrian Online
Layanan Pemerintahan
Keamanan dan Ketertiban Warga
Limbah & Pencemaran Lingkungan
PGRS
Sampah & TPA
KASKIN DAN BANSOS – 48
MASALAH E-KTP DAN KK – 28
LAYANAN PDAM DELTA TIRTA = 25
JALAN RUSAK – 23
ANTRIAN / APLIKASI ONLINE = 17
LAYANAN PEMERINTAH = 15
KEAMANAN DAN KETERTIBAN WARGA = 15
LIMBAH DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN = 11
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR = 10
SAMPAH DAN TPA – 6
@Pemkabsidoarjo
@Pemkabsidoarjo2
portal.sidoarjokab.go.id

5. Media Center

Media Center merupakan lembaga strategis dalam mempublikasikan berbagai program kerja, kegiatan dan himbauan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat.

Didalam mengelola media center saat ini banyak mengalami beberapa kendala diantaranya media center yang kurang maksimal karena tempat/ruangan, fasilitas kurang memadai dan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat media.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi media center sebenarnya sebagai media komunikasi publik, adalah sebagai berikut :

a. Ruangan yang representatif sebagai ruangan media komunikasi publik bukan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat media saja namun dapat digunakan untuk masyarakat bukan media;
b. Fasilitas media center memadai ;
c. Tersedianya data-data yang diperlukan oleh masyarakat

6. Media Pers

Keberadaan Media Pers yang bermitra/bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dibawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 69, diantaranya adalah:

a. Media Cetak Harian : 13;
b. Media Cetak Mingguan/Tabloid : 22;
c. Media Online : 17;
d. Media elektronik (TV/Radio) : 17.

Disamping media tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika mengkoordinasi Radio LPPL (Suara Sidoarjo), tugas Suara Sidoarjo menyampaikan pesan kepada masyarakat atas keberhasilan pembangunan Sidoarjo.

Bentuk Kerjasama/kemitraan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan media massa sebagai berikut:

1. Pembinaan Insan Pers;
2. Jumpa Pers;
3. Advetorial;
4. Study Komparatif Insan Pers

7. Klipping dan Majalah

Dalam mendokumentasi berita harian dari berbagai media massa kami melakukan Klipping ”Sidoarjo Hari Ini”, di samping itu juga Dinas Komunikasi dan Informatika juga
menerbitkan majalah ”Gema Delta” kedua media ini memberikan informasi mengenai hal-hal yang tejadi di Sidoarjo dan Pembangunan Sidoarjo yang lebih baik. Kedua media ini diberikan kepada Semua OPD di Sidoarjo.

c. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Kualitas Layanan data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). dengan anggaran sebesar Rp.16.244.877.630,00 dan terealisasi sebesar Rp.15.726.019.106,00 atau 96,81%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase jaringan FO yang dibangun	81%	110%	135,80%

Program tersebut didukung oleh Enam (6) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Perencanaan, Pengembangan Infrastruktur TIK	a. a. Prosentase infrastruktur yang dibangun; b. Prosentase kebutuhan bandwith yang terpenuhi	85,71% 72,22%	85,71% 72,22%	100% 100%
Peningkatan Sarpras dan infrastruktur TIK data center dan comment center	a. Persentase tingkat aksesbilitas data center b. Persentase Pengelolaan command center yang dapat berjalan dengan baik	99,718% 99,43%	99,718% 99,43%	100% 100%
Pengelolaaan data dan integrasi sistem informatika	a. Prosentase database OPD yang terintegrasi b. Prosentase Sistem Informasi yang terintegrasi	17% 17%	17% 17%	100% 100%
Monitoring dan Evaluasi	Persentase aplikasi layanan publik OPD yang memanfaatkan database terintegrasi	30%	40,17%	133,9%
Pengawasan dan pengendalian Infrastruktur TIK	Prosentase keamanan Infrastruktur TIK yang dipantau	99%	100%	100%
Perencanaan dan implementasi Persandian dan Keamanan TIK	a. Persentase SOP persandian dan keamanan yang disusun b. Persentase keamanan TIK yang terpasang	66,67% 80%	66,67% 100%	100% 125%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Perencanaan, Pengembangan Infrastruktur TIK	1.120.907.945,00	750.426.784,00	66,95
Peningkatan Sarpras dan infrastruktur TIK data center dan comment center	14.872.843.605,00	14.743.865.878,00	99,13
Pengelolaaan data dan integrasi sistem informatika	125.750.000,00	119.771.000,00	95,25
Monitoring dan Evaluasi	9.176.080,00	3.686.080,00	40,17
Pengawasan dan pengendalian Infrastruktur TIK	61.200.000,00	60.200.000,00	98,37
Perencanaan dan implementasi Persandian dan Keamanan TIK	55.000.000,00	48.070.000,00	87,40

Pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi prosentase realisasi anggaran hanya 40,17% hal ini dikarenakan adanya Refocusing anggaran sebesar 83,06% sehingga penyerapan tidak optimal.

2. Program Pengelolaan, Fasilitasi dan Implementasi Teknologi informatika. dengan anggaran sebesar Rp. 1.333.979.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.216.800.092,00 atau 91,22%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase aplikasi OPD berbasis e-gov yang terintegrasi dengan data center	80%	80%	100%

Program tersebut didukung oleh Enam (6) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Monitoring dan evaluasi kebijakan E-Gov	Persentase Penyusunan Dokumen Penilaian SPBE	45%	40,85%	90,77%
Pengelolaan Fasilitasi Aplikasi Teknologi Informatika	Persentase aplikasi OPD yg dapat difasilitasi	80%	80%	100%
Pengelolaan, Fasilitasi dan Implementasi Pendaftaran Layanan Elektrtonik	Persentase aplikasi OPD yang terdaftar secara elektronik	80%	105,06%	131,32%
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	persentase aplikasi yang dapat terintegrasi	80%	80%	100%
Perumusan kebijakan tata kelola e-gov	Persentase Jumlah kebijakan yang dihasilkan	80%	94,55%	118%
Pengembangan dan pengelolaan website	Persentase website OPD dan layanan yang dihasilkan	80%	150%	187,5%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Monitoring dan evaluasi kebijakan E-Gov	47.000.000,00	36.745.660,00	78,18
Pengelolaan Fasilitasi Aplikasi Teknologi Informatika	32.400.000,00	19.440.000,00	60,00
Pengelolaan, Fasilitasi dan Implementasi Pendaftaran Layanan Elektrtonik	769.215.600,00	705.384.200,00	91,70
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	52.950.300,00	46.510.750,00	87,84
Perumusan kebijakan tata kelola e-gov	381.363.200,00	360.589.482,00	94,55
Pengembangan dan pengelolaan website	51.050.000,00	48.130.000,00	94,28

Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan E-Gov terealisasi sebesar 78, 18% disamping terkena Refocusing Anggaran karena Pandemi COVID-19 sebesar 57,29%, Pengelolaan Fasilitasi Aplikasi Teknologi Informatika hanya teralisasi

sebesar 60% hal ini dikarenakan adanya Refocusing anggaran sebesar 40,35%, sehingga dua pekerjaan itu tidak dapat dilakukan secara optimal.

3. Program Pelayanan Informasi, pemberitaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat. dengan anggaran sebesar Rp. 5.988.899.620,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.229.144.860,00 atau 87,31%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi	81	85,421	105,46%

Program tersebut didukung oleh Tiga (3) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pengelolaan informasi dan opini publik	Presentase konten berita yang dibuat dan dipublikasi	72%	72%	100%
Penyediaan media dan kemitraan komunikasi publik	Persentase humas dan lembaga yang bermitra dengan DISKOMINFO	90%	90%	100%
Layanan Informasi publik	a. Persentase pengaduan masyarakat yg ditindak lanjuti b. Persentase KIM yang dibina	76% 80%	87% 80%	114,47% 100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Layanan Informasi Publik	2.572.024.640,00	2.232.132.984,00	86,79
Pengelolaan Informasi dan Opini Publik	94.041.280,00	85.216.342,00	90,62
Penyediaan Media dan Kemitraan Komunikasi Publik	3.322.833.700,00	2.911.795.534,00	87,63

Urusan Penanaman Modal

Urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut:

a. Realisasi Kinerja Tujuan Dinas Penanaman Modal & PTSP

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan & penanaman modal	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82.80	86.245	104,16	83	87.843	105,83
Meningkatnya investasi daerah*)	Nilai realisasi investasi daerah	17.131.662.000.000	23.832.676.777.188	139,11	8.648.955.500.000	7.037.752.693.895	81,37

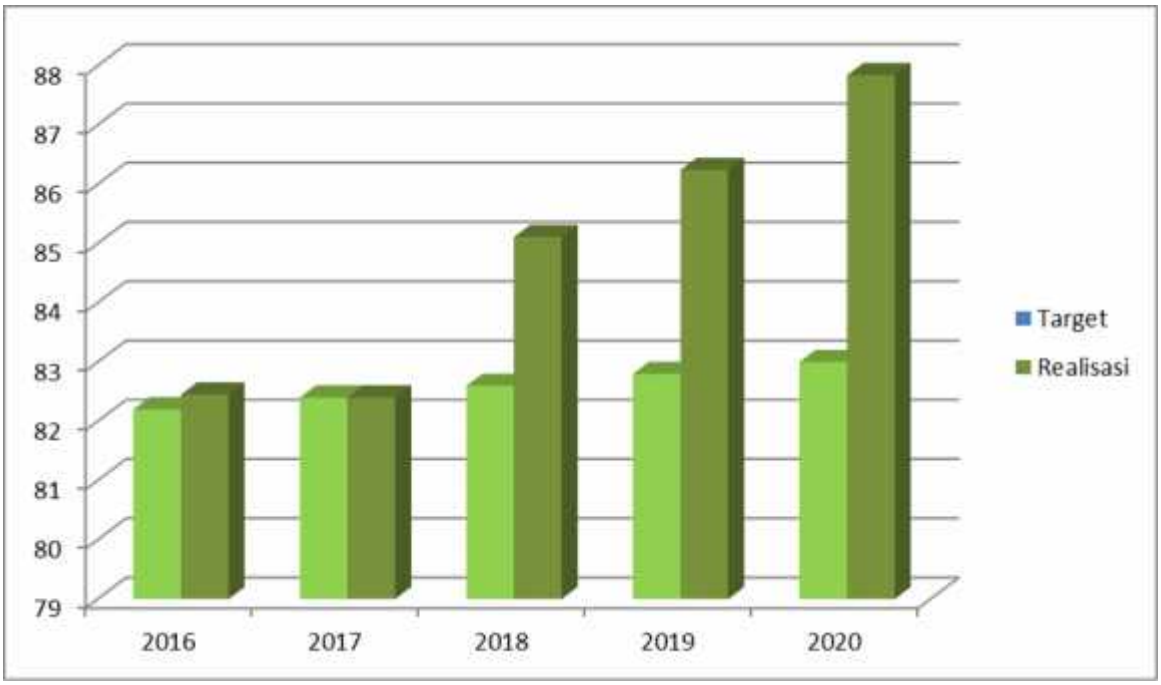

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target, berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja pada Survey Kepuasan Masyarakat telah mencapai 105,83 % dari target, namun demikian sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB Nomor 14 Tahun 2017 nilai SKM tahun 2019 sebesar 1.598 poin, dari poin 86,245 menjadi 87,843 dengan kategori Baik.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan pelayanan perijinan dan sarana prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

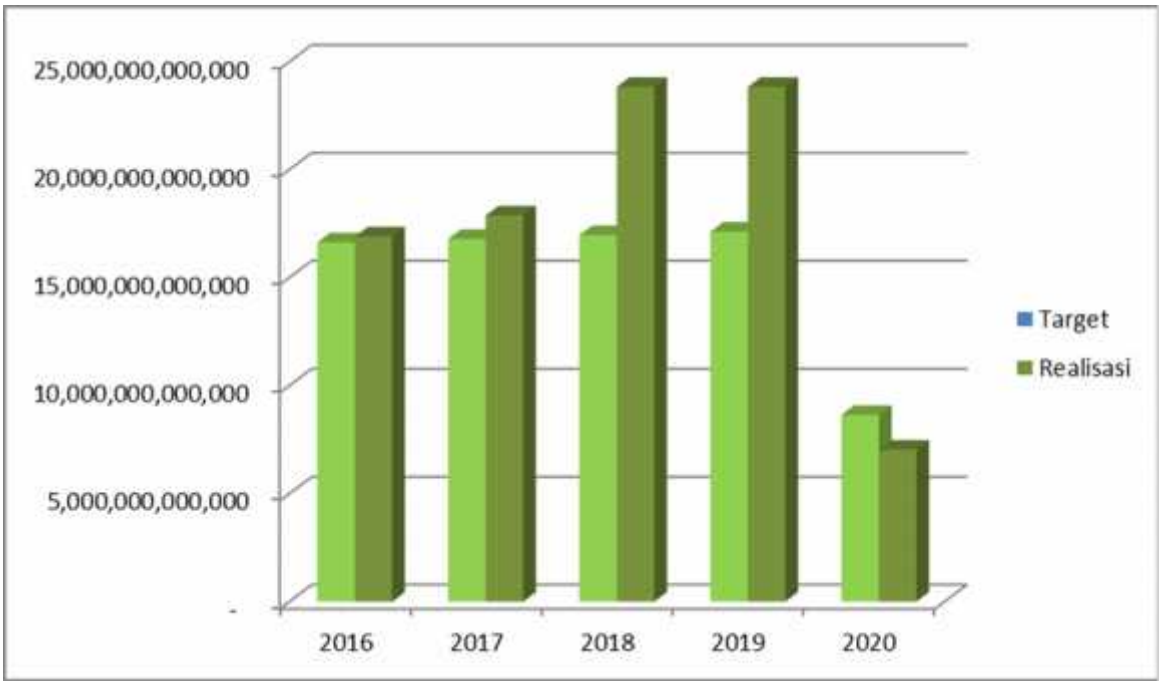

b. Realisasi Kinerja Sasaran urusan Penanaman Modal

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,60	85,11	100,04	82,80	86,245	104,16	83	87,843	105,83

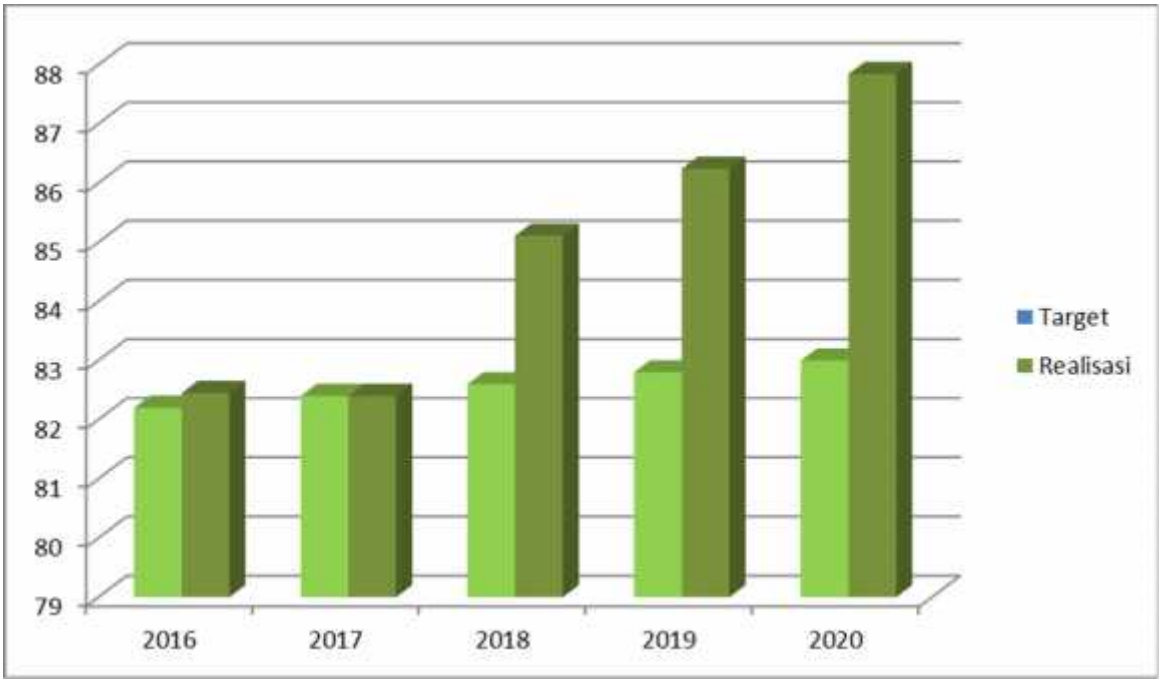

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target, dan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan prosedur dan mengurangi pelayanan tatap muka dan sarana prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah meningkat 101,85 % dari target, hal ini diupayakan dengan peningkatan kinerja DPMPTSP.

Permasalahan :

1. adanya pandemi COVID-19 sejak bulan Pebruari 2020 sehingga berdampak pada perekonomian dunia.

2. Tidak dapat memberikan informasi secara tatap muka, dimana hal ini sangat menyulitkan pemahaman bagi pelaku usaha yang tidak paham IT.

Solusi :

1. Melaksanakan pelayanan perijinan secara online
2. Informasi, konsultasi dan penyelesaian pengaduan dilaksanakan secara online

Sasaran 2: Meningkatnya Investasi Daerah

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Nilai realisasi investasi daerah	17.131.662.000.000	23.832.676.777.188	139,11	8.648.955.500.000	7.037.752.693.895	81,37

*) Atas target Tahun 2020 telah dilakukan penyesuaian karena Pandemi Covid 19, dari target Renstra sebesar Rp. 17.297.911.000.000 menjadi Rp. 8.648.955.500.000

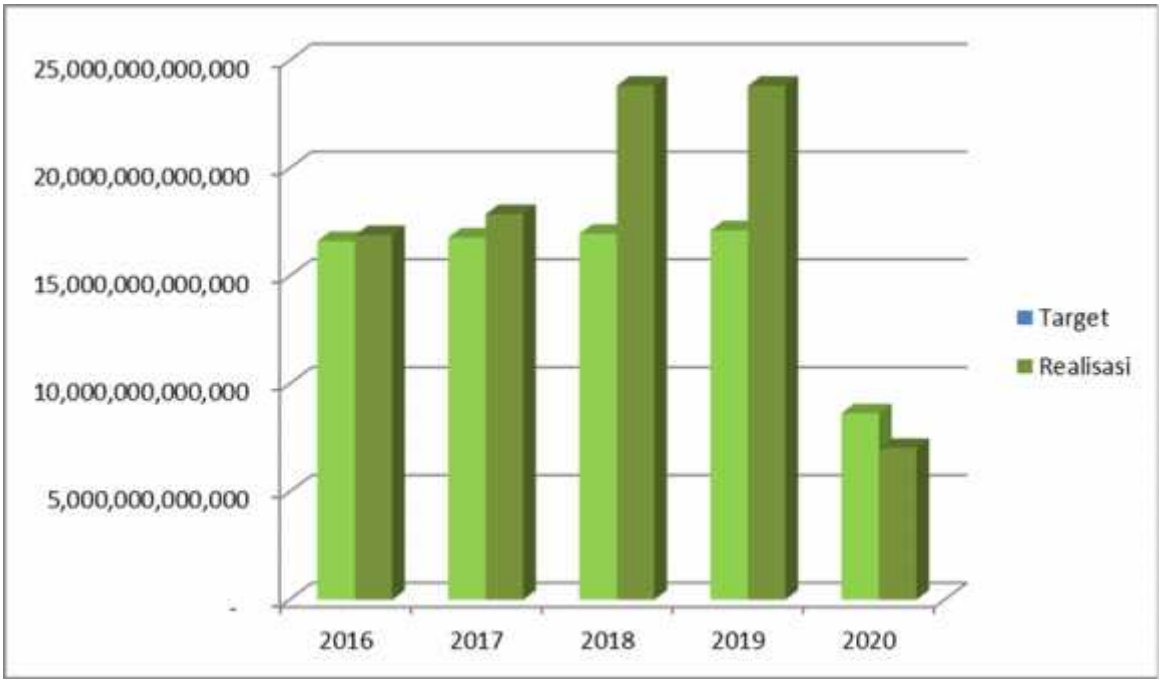

Capaian Kinerja tahun 2020 sebesar 81,37 % dari yang ditargetkan yang sudah dilakukan penyesuaian, namun demikian penyesuaian target yang dilakukan masih terlalu tinggi karena Pandemi Covid 19 masa waktunya uncontrollable

bahkan sampai dengan bulan Pebruari masih sepenuhnya belum teratasi dan masih mengganggu terhadap pertumbuhan ekonomi.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 tidak mencapai target, hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020 sehingga berdampak pada perekonomian dunia.

Permasalahan :

1. adanya pandemi COVID-19 sejak bulan Pebruari 2020 sehingga berdampak pada perekonomian dunia.
2. Tidak dapat memberikan informasi secara tatap muka, dimana hal ini sangat menyulitkan pemahaman bagi pelaku usaha yang tidak paham IT.

Solusi :

1. Peningkatan kualitas dan penambahan jumlah sarana prasarana penunjang pelayanan perijinan dan penanaman modal
2. Pengembangan dan optimalisasi pelayanan perijinan sehingga mempercepat waktu penyelesaian dan menghemat biaya
3. Mengintensifkan fungsi koordinasi & konsultasi di internal organisasi maupun OPD teknis terkait, sehingga proses pemberian pelayanan perijinan & penanaman modal menjadi lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku

c. Program dan Kegiatan

Atas Sasaran Urusan Penanaman Modal dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat didukung dengan :

1. Program meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dengan anggaran sebesar Rp.25.215.220.000 dan terealisasi sebesar Rp.19.235.220,- atau 76,28%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	83	87,843	105,83 %

Permasalahan:

1. adanya pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020 sehingga berdampak pada perekonomian dunia.
2. Tidak dapat memberikan informasi secara tatap muka, dimana hal ini sangat menyulitkan pemahaman bagi pelaku usaha yang tidak paham IT.

Solusi:

1. Melaksanakan pelayanan perijinan secara online
2. Informasi, konsultasi dan penyelesaian pengaduan dilaksanakan secara online

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1. Koordinasi & pelaksanaan pelayanan perijinan tertentu 1	- ∑ persetujuan pemenuhan komitmen yang diterbitkan - ∑ laporan persetujuan pemenuhan komitmen yang disusun	100 %	100 %	100	25.215.220	19.235.220	76,28
2. Koordinasi & pelaksanaan pelayanan perijinan usaha	- ∑ perijinan yang diterbitkan - ∑ laporan perijinan yang disusun	100 %	100 %	100	171.653.000	165.829.400	96,61

2. Program Peningkatan iklim investasi & realisasi investasi dengan anggaran sebesar Rp. 117.415.900 dan terealisasi sebesar Rp. 96.285.600 atau 89,13 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Nilai realisasi investasi daerah	8.648.955.500.00	7.037.752.693.895	81,37 %

Permasalahan:

1. adanya pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020 sehingga berdampak pada perekonomian dunia.
2. Perhitungan nilai investasi, yang semula perhitungan desentralisasi (dilakukan oleh Kabupaten/Kota), menjadi sentralisasi (dihitung langsung oleh BKPM RI) yang kemudian disampaikan ke DPMPTSP Provinsi Jawa Timur

Solusi:

1. Peningkatan kualitas dan penambahan jumlah sarana prasarana penunjang pelayanan perijinan dan penanaman modal
2. Pengembangan dan optimalisasi pelayanan perijinan sehingga mempercepat waktu penyelesaian dan menghemat biaya
3. Mengintensifkan fungsi koordinasi & konsultasi di internal organisasi maupun OPD teknis terkait, sehingga proses pemberian pelayanan perijinan & penanaman modal menjadi lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1. Pengelolaan data monev penanaman modal	- Perusahaan PMA & PMDN yang di monev - Perusahaan PMA & PMDN yang menyampaikan LKPM - Penagihan piutang retribusi yang dilakukan - Laporan pembinaan monitoring penanaman modal	39 perusahaan 50 perusahaan 50 kegiatan 10 laporan	41 perusahaan 152 perusahaan 61 kegiatan 10 laporan	105 % 304 % 122 % 100 %	17.364.900.	17.235.000	99,25
2. Koordinasi antar lembaga/ OPD dalam	Terselesaikannya permasalahan penanaman modal melalui	12 Kegiatan	19 Kegiatan	158	100.000.000	79.050.600	79,01

penyelesaian masalah pelaksanaan penanaman modal	koordinasi dengan lembaga OPD lain						

Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Urusan koperasi, usaha mikro. Kecil, dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

A. REALISASI KINERJA TUJUAN

Sampai dengan tahun 2020 kinerja yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase Pertumbuhan Koperasi yang Berkualitas	N/A	N/A	N/A	0,96%	0,96%	100%	1,14%	1,14%	100%	1,32%	1,37%	103%	1,50%	1,51%	100,97%
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang Mandiri	N/A	N/A	N/A	0,15%	0,15%	100%	0,17%	0,17%	100%	0,20%	0,23%	115%	0,24%	0,25%	104%

- **Pertumbuhan Koperasi yang Berkualitas**

  Pengembangan dan pemberdayaan koperasi memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pengembangan koperasi sebagai organisasi secara berkualitas akan berdampak pada kesejahteraan anggotanya dan kemanfaatan kepada masyarakat yaitu dapat meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat. Adapun grafik pertumbuhan koperasi berkualitas di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

Grafik Pertumbuhan Koperasi Berkualitas

Sumber : Dinas Koperasi dan UM

Sampai dengan tahun 2020, jumlah koperasi di Kabupaten Sidoarjo sebesar 1.470 koperasi. Pada tahun 2020, indeks pertumbuhan koperasi berkualitas ditargetkan sebesar 1,50% atau 507 koperasi. Realisasi indeks persentase pertumbuhan koperasi yang berkualitas di tahun 2020 tercapai sebesar 1,51% atau sebesar 511 koperasi. Hal ini menunjukan bahwa capaian indeks persentase pertumbuhan koperasi tercapai sebesar 100,97%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, maka terjadi pertumbuhan koperasi berkualitas sebesar 15 koperasi yaitu yang semula di tahun 2019 1,37% atau 496 koperasi, pada tahun 2020 meningkat menjadi 1,51% atau 511 koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi berkualitas di Kabupaten Sidoarjo tumbuh cukup baik.

- **Pertumbuhan Usaha Mikro yang Mandiri**

Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan dimasa krisis Usaha Mikro mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mendorong usaha mikro untuk terus tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. Usaha Mikro diharapkan semakin berperan dalam menekan angka pengangguran. Adapun grafik pertumbuhan usaha mikro mandiri di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

Grafik Pertumbuhan Usaha Mikro Mandiri

Sumber : Dinas Koperasi dan UM

Sampai dengan tahun 2020, jumlah usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo sebesar 176.425 usaha mikro. Pada tahun 2020, indeks pertumbuhan usaha mikro mandiri ditargetkan sebesar 1,75% atau 3.087 usaha mikro. Realisasi indeks persentase pertumbuhan usaha mikro mandiri di tahun 2020 tercapai sebesar 1,83% atau sebesar 3.228 usaha mikro. Hal ini menunjukan bahwa capaian indeks persentase pertumbuhan koperasi

tercapai sebesar 100,97%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, maka ada pertumbuhan usaha mikro sebesar 544 usaha mikro yaitu yang semula di tahun 2019 terdapat 0,23% atau 1.180 usaha mikro maka ditahun 2020 menjadi 0,25% atau 1.724 usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo cukup baik.

B. REALISASI KINERJA SASARAN

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, pada tahun 2020 adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
2. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran yaitu *Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas dan Usaha Mikro Yang Mandiri,* dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. Persentase Koperasi yang Berkualitas
2. Persentase Usaha Mikro yang Mandiri

Atas target dan capaian sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas

Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Parameter yang menjadi dasar koperasi berkualitas adalah apabila memenuhi 5 (lima) aspek yang terdiri dari :

1. Aspek Kelembagaan Koperasi, meliputi legalitas badan hokum aktif keanggotaan, kepengurusan, program kerja, standar operasional prosedur, standar operasional manajemen, peraturan khusus, rapat anggota dan karyawan, rasio peningkatan jumlah anggota serta persentase kehadiran dalam rapat anggota.
2. Aspek Usaha Koperasi, ditunjukkan dengan membaiknya keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi dalam hal rasa tanggungrenteng atau kemauan untuk berbagi resiko (*risk sharing*), tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, penambahan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan keuntungan.
3. Aspek Keuangan Koperasi, ditunjukkan dengan struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya sepert iprosentase pelunasan simpanan wajib dan prosenta sebesaran simpanan sukarela.
4. Aspek Manfaat Koperasi terhadap Anggota, ditunjukkan dengan meningkatkan penghasilan anggota, menawarkan barang dan jasa yang lebih murah, menumbuhkan motif berusaha yang berperi kemanusiaan, menumbuhkan sikap jujur danterbuka.
5. Aspek Manfaat Koperasi terhadap Masyarakat, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapabanyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.

Adapun capaian kinerja Persentase Koperasi yang Berkualitas adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Prosentase Koperasi yang Berkualitas	N/A	N/A	N/A	16,48%	16,48%	100%	18,15%	18,15%	100%	19,83%	20,31%	102%	20,50%	20,70%	100,97%

Grafik Persentase Koperasi Berkualitas

Target yang ditetapkan ditahun 2020 untuk indeks Presentase Koperasi yang Berkualitas adalah 20,5% atau sebesar 301 Koperasi dari 1.470 Koperasi. Realisasi tahun 2020 tercapai 20,70% atau 305 Koperasi, maka persentase koperasi yang berkualitas telah tercapai 100.97%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 maka koperasi berkualitas tercapai sebesar 20,31% atau 290 koperasi, sehingga ada peningkatan koperasi berkualitas sebesar 15 Koperasi.

Berdasarkan tabel/grafik, pencapaian kinerja, tahun 2020 mengalami peningkatan dan melampaui dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan adanya :

1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus maupun pengelola koperasi;
2. Peningkatan kinerja usaha koperasi melalui pelatihan manajemen usaha koperasi, melaksanakan penilaian kesehatan koperasi;
3. Pendampingan kepada koperasi yang tidak aktif dan bermasalah;
4. Penyediaan klinik konsultasi koperasi;
5. Monitoring dan evaluasi koperasi

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah koperasi yang berkualitas, antara lain :

1. Mengadakan Bimtek/Pelatihan bagi Pengurus Koperasi, pengawas koperasi serta anggota koperasi antara lain Bimtek Penguatan Kelembagaan, Diklat Manajemen Koperasi, Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan secara Elektronik, Peningkatan SDM Koperasi;
2. Pembinaan bagi Koperasi yang tidak aktif;
3. Melaksanakan Sosialisasi dan penyuluhan tentang perkoperasian, peraturan perundang-undangan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi ke Koperasi;
5. Melaksanakan Penilaian Kesehatan Koperasi

Permasalahan:

1. Masih terdapat koperasi yang tidak aktif dan belum dapat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai waktu yang ditentukan;
2. Belum ada sinkronisasi Data Koperasi antara Aplikasi DITAKOPUM dan Online Data System (ODS).

Solusi:

1. Melakukan Pembinaan dan pelatihan perkoperasian kepada Pengurus/Pengelola Koperasi baik secara daring/luring;
2. Melakukan pendampingan kepada koperasi yang tidak aktif;
3. Meningkatkan SDM pengelola data Koperasi agar melaksanakan updating data di DITAKOPUM maupun ODS sehingga data valid;

Secara garis besar Indeks koperasi berkualitas dapat dijabarkan dalam 2 (dua) indikator yaitu :

1) Koperasi Aktif

Koperasi yang aktif tentunya dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan telah memiliki legalitas yang lengkap dan jelas dari pemerintah seperti memiliki nomer induk koperasi (NIK), Surat Keputusan Anggaran Dasar oleh Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia oleh Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia serta melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Koperasi aktif mendukung parameter koperasi berkualitas dari sisi aspek badan usaha aktif. Adapun perkembangan koperasi aktif selama lima tahun terakhir, terlihat pada grafik berikut :

Grafik Koperasi Aktif dan Tidak Aktif

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah koperasi aktif yaitu sebesar 105 koperasi. Pada tahun 2019 jumlah koperasi aktif sebesar 1.310 koperasi sedangkan tahun 2020 jumlah koperasi aktif menjadi 1.205 koperasi. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid 19 yang mempengaruhi kinerja dan cash flow koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga selama pandemi covid 19 banyak koperasi yang tidak melakukan RAT.

2) Koperasi Sehat

Koperasi sehat adalah suatu kondisi koperasi yang usahanya memenuhi tujuh aspek penilaian kesehatan yaitu : Permodalan, Kualitas Aktiva produktif, Manajemen Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan pertumbuhan, Jati diri Koperasi.

Berdasarkan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi maka koperasi wajib dinilai kesehatannya setiap tahunnya. Adapun penilaian kesehatan koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut :

1. Permodalan
2. Kualitas Aktiva Produktif
3. Manajemen
4. Efisiensi
5. Likuiditas
6. Kemandirian dan Pertumbuhan
7. Jatidiri Koperasi

Koperasi sehat mendukung parameter koperasi berkualitas dari sisi aspek usaha koperasi, aspek keuangan koperasi, aspek manfaat koperasi terhadap anggota, aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat.

Perkembangan jumlah koperasi sehat selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik Koperasi Sehat

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Sasaran 2 : Meningkatnya Usaha Mikro yang Mandiri

Usaha Mikro Mandiri merupakan usaha yang berkemampuan berdiri sendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berinisiatif dan bekerja keras dalam mengurus dan mengembangkan organisasi usaha, menyediakan modal, menghitung resiko, mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkannya berdasarkan percaya kepada kemampuan diri sendiri.

Dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase Usaha Mikro yang Mandiri	N/A	N/A	N/A	0,50%	0,50%	100%	1,25%	1,25%	100%	1,50%	1,53%	102%	1,75%	1,83%	104,50%

Grafik Persentase Usaha Mikro Mandiri

Sumber : Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2020 sebanyak 176.425 usaha mikro. Realisasi Presentase Usaha Mikro yang mandiri tahun 2020 tercapai sebesar 1,83% atau 3.228 usaha mikro dari target yang ditetapkan 1,75% atau 3.087 usaha mikro maka capaian kinerja tahun 2020 telah tercapai sebesar 104,5%. Bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 sebesar 1,53% atau 2.684 maka realisasi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,3% atau sebesar 544 usaha mikro. Berdasarkan tabel/grafik pencapaian kinerja di tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini dapat tercapai melalui :

1. Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan bagi pelaku usaha mikro;
2. Pendampingan produk;
3. Pengadaan Pameran bagi pelaku usaha mikro;
4. Memfasilitasi pembiayaan permodalan bagi peaku usaha mikro.

Upaya yang telah dilakukan :

1. Adanya pembinaan secara online melalui kanal *youtube* Klinik Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Melaksanakan Sosialisasi Wira Usaha Baru;
3. Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo antara lain pelatihan pembuatan kue kering, pelatihan batik Sibori, pelatihankemasan produk (*packaging*), pelatihan olahan pangan, pelatihan kue basah, pelatihan pangan olahan pangan ringan dan packaging, pelatihan pembuatan ice cream, pelatihan menjahit dasar, pelatihan menjahit dasar, pelatihan *packaging* olahan pangan berbahan dasar kerang;
4. Memfasilitasi pameran untuk usaha mikro di Gladiol Convention Hall di Pekarungan Sukodono yang diikuti 80 Pelaku usaha mikro;

5. Bekerjasama dengan *International Council for Small Business (ICBS)*untukmelaksanakan pameran virtual dengan peserta 20 orang;
6. Melaksanakan kegiatan sedekah ilmu dari dan untuk pelaku usaha mikro, saling berbagi ilmu dan ketrampilan sehingga SDM pelaku usaha mikro bertambah;
7. Adanya pendampingan dan konsultasi bagi usaha mikro (Klinik Usaha Mikro) secara tatap muka maupun online melalui kanal*youtube* koperasi dan usaha mikro.

Permasalahan :

1. Banyak usaha mikro yang terkendala masalah pemasaran dan permodalan akibat pandemic covid 19;
2. Banyaknya usaha mikro yang masih belum menguasai teknologi ketika mengikuti pelatihan online yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UM.

Solusi :

1. Melakukan perubahan teknis pelaksanaan pembinaan yang semula kebih banyak secara langsung, saat ini mengarah dengan online/webinar;
2. Pembinaan secara tatap muka dilakukan dengan bertahap dengan mematuhi protokol kesehatan penanggulangan Covid 19;
3. Memfasilitasi adanya peluang usaha bagi pelaku usaha mikro melalui kemitraan dan promosi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
4. Penurunan suku bunga dagulir akibat Pandemi yang semula 6% menjadi 4% pertahun mulai bulan Mei 2020.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi** dengan anggaran sebesar Rp.694.262.850,- dan terealisasi sebesarRp. 621.473.860,-atau 89.52%.

   Dengan indikator kinerja yaitu:

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Persentase
Persentase Koperasi Aktif	82% (1205 Koperasi)	82% (1205 Koperasi)	100%

Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat.

Permasalahan:

1. Terjadinya pandemic Covid 19 berakibat menurunnya pendapatan anggota koperasi sehingga daya beli dan pemenuhan kewajiban anggota membuat volume usaha menurun sehingga mempengaruhi pendapatan koperasi;
2. Bertambahnya Koperasi tidak Aktif.

Solusi:

1. Melaksanakan pembinaan pendampingan koperasi baik secara online maupun offline;
2. Melaksanakan penyuluhan perkoperasian;
3. Menginventarisir koperasi yang tidak aktif untuk selanjutnya dilakukan pendampingan dan pembinaan;

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu:

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Kegiatan Pengembangan dan pembinaan kelembagaan koperasi	Jumlah anggota koperasi	232912	232914	100	202.433.850	182.289.060	90,05
	Jumlah SHU seluruh Koperasi	34	34	100			
	Jumlah Koperasi aktif	10	10	100			
	Jumlah Koperasi yang didirikan/disahkan	4	4	100			
Kegiatan Penyuluhan dan fasilitasi Advokasi Koperasi	Jumlah penyuluhan koperasi yang dilaksanakan	4	4	100	74.471.000	69.531.000	93,37
	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permasalahannya	2	2	100			
Peningkatan Kualitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK)	Meningkatnya Jumlah Anggota Koperasi	180	122	67,8	417.358.000	369.653.800	88,57

2. **Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro** dengan anggaran sebesar Rp. 1.681.876.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.566.442.900,-atau 93,14% dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase Koperasi Sehat	40,22 (591 Koperasi)	40,22 (591 Koperasi)	100%

Permasalahan:

1. Adanya pandemi covid sehingga pendampingan kurang optimal;
2. Banyak Pelaku usaha mikro yang terkendala pemasaran dan permodalan karena pandemic covid;
3. Tidak tercapainya target penyaluran dana bergulir karena pelaku usaha mikro banyak yang mempunyai kredit macet di bank lain sehingga tidak lolos BI Checking selain itu juga lamanya waktu pencairan dana bergulir.

Solusi:

1. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan secara daring dan tetap mentaati protokol kesehatan jika pembinaannya secara tatap muka;
2. Memfasilitasi melakukan pemasaran secara online(e-Tukuo) dan bekerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan pameran virtual;
3. Peralihan program dana bergulir yang penyalurannya melaluiBank Jatim menjadi Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) yang penyalurannya melalui Bank Delta Artha.

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu:

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Kegiatan Pembinaan pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi	Jumlah Koperasi dengan volume usaha meningkat	30	30	100	1.240.327.000	1.212.980.500	97,8
	Jumlah Koperasi Sehat	50	44	88			
Kegiatan Penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pelayanan pembiayaan dana bergulir	300	105	35	247.374.400	163.774.400	66,21
Kegiatan Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang mengikuti Sertifikasi	100	100	100	1.240.327.000	1.212.980.500	97,8
	Jumlah Usaha Mikro dengan volume usaha meningkat	100	100	100			

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja dan target serta realisasi anggaran terendah adalah kegiatan penyaluran dana bergulir, dengan indeks jumlah usaha mikro yang mendapat pelayanan pembiayaan dana bergulir di tahun 2020 target 300 terealisasi 105 sehingga hanya mencapai 35% dari target.Anggaran penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan usaha mikro dari pagu anggaran di tahun 2020 sebesar Rp. 247.374.400,- terealisasi Rp. 163.774.400 atau 66,21 %. Hal ini dikarenakan:

a) Adanya pandemic covid 19 yang membatasi untuk pertemeuan tatap muka maka ada kegiatan sosialisasi dagulir tidak dilaksanakan sehingga anggaran mamin tidak terserap.

b) Peralihan Program Dana bergulir yang penyalurannya oleh Bank Jatim menjadi Kredit Usaha Rakyat Daerah yang penyalurannya melalui Bank Delta Artha sehingga untuk kegiatan wawancara dan akad untuk kegiatan dagulir ditiadakan mengakibatkan anggaran tidak terserap.

3. Program **Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro** dengan anggaran sebesar Rp. 673.642.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 553.413.300,- atau 82,15 % dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Persentase
Persentase Koperasi yang memiliki derajat kepatuhan berkoperasi	14.18%	14.18%	100%
Persentase Usaha Mikro yang memiliki derajat kepatuhan usaha mikro	48.01%	18.01%	100%

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pembinaan dan Pengendalian Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang menerapkan aspek kepatuhan	100	100	100	288.222.100	213.796.800	74,18
Pembinaan dan Pengendalian Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang memiliki legalitas usaha	200	200	100	247.970.000	204.800.000	82,59
Penyusunan Database Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang terupdate	500/1000	500/1000	100	137.450.000	134.816.500	98,08

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja dan target semua teralisasi 100 % tetapi untuk realisasi anggaran terendah adalah Pembinaan dan Pengendalian Koperasi, Anggaran Pembinaan dan Pengendalian Usaha Koperasi Rp. 288.222.100 realisasinya Rp. 213.796.800,- atau 74,18 %. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada kegiatan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengelolaan (harga yang didapat dipasaran lebih rendah dari harga yang direncanakan).

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Realisasi Kinerja Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	%
1. Mendorong peran dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan	Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh ditingkat regional, nasional, dan Internasional	10	94	940	15	121	806	20	20	19	95
2. Meningkatnya prestasi olahraga ditingkat regional, nasional dan internasional	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional	140	282	198	150	166	110	155	75	73	97,33

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 dan target trend tahun sebelumnya, maka capaian kinerja tahun 2020 tidak mencapai target, hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19.

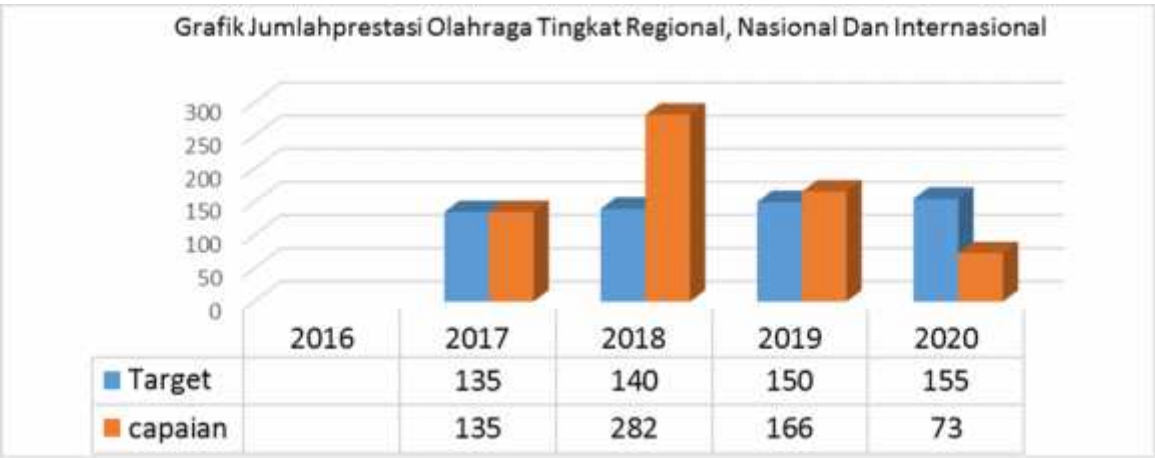

Sehubungan dengan Pandemi Covid 19 Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo telah mengajukan usulan perubahan target tujuan dari semula Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional menurut Renstra 155 prestasi menjadi 75 prestasi

Apabila didasarkan pada target usulan perubahan, capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 97,33%, dari target perubahan sebanyak 75 terealisasikan sebanyak 73 prestasi. seperti pada grafik dibawah ini

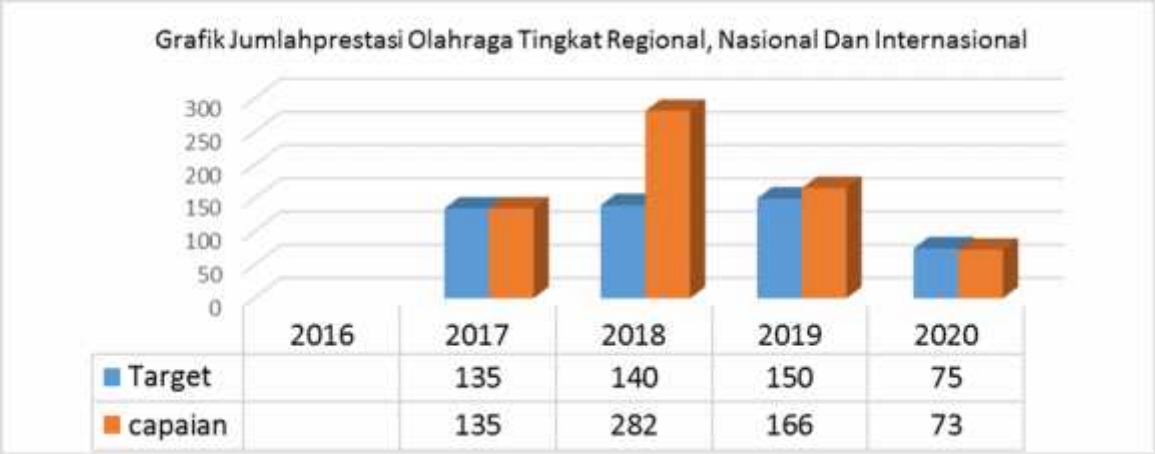

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 dan target trend tahun sebelumnya, maka capaian kinerja tahun 2020 tidak mencapai target, hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19.

b. Realisasi Kinerja Sasaran Urusan Pemuda

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya peran dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh ditingkat regional, nasional, dan internasional.	10 orang	94 orang	940	15 orang	121 orang	806	20 orang	19 orang	95

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 tidak mencapai target, dan di bandingkan dengn trend tahun sebelumnya mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 76% dari target, hal ini diupayakan dengan optimalisasi

kegiatan melalui mengikuti/ menyelenggarakan beberapa kegiatan yang masih dapat dilaksanakan dengan mengikuti prosedur Kesehatan yang berlaku

Permasalahan :

Adanya pandemi covid-19 sehingga dilakukan refocusing penyesuaian belanja daerah tahun anggaran 2020

Solusi :

Kedepan akan dilakukan optimalisasi kegiatan agar realisasi semakin meningkat.

c. Program dan Kegiatan Urusan Pemuda

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan anggaran sebesar Rp. 2.197.512.350 dan terealisasi sebesar Rp. 1.323.811.937,- atau 60,24%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh ditingkat regional, nasional, dan Internasional	20	19	95

Permasalahan:

Adanya pandemi covid-19 sehingga dilakukan refocusing penyesuaian belanja daerah tahun anggaran 2020.

Solusi:

Kedepan akan dilakukan optimalisasi kegiatan agar realisasi semakin meningkat

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERUBAHAN Tahun 2020	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah peserta bintek/ sosialisasi/ rakor kepemudaan	200 orang	50 orang	50 orang	100	23.257.800	13.320.400	57
	Jumlah organisasi pemuda yang dimonev	35 organisasi	5 organisasi	5 organisasi	100			
Fasilitasi kegiatan kepemudaan	Jumlah anggota paskibraka yang dibina	78 orang	10 orang	10 orang	100	1.751.075.350	910.915.996	52
	Jumlah even/ kegiatan pemuda yang difasilitasi	6 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	133			
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan KIE penanggulangan HIV/AIDS	150 orang	0	0	0			
Peningkatan kapasitas wawasan kepemudaan	Jumlah peserta bintek/sosialisasi wawasan kewirausahaan/ bahaya destruktif	200 orang	200 orang	200 orang	100	423.179.200	399.575.541	94
	Jumlah Pemuda yang mengikuti sosialisasi pemuda pelopor	160 orang	10 orang	18 orang	180			

Permasalahan:

Sehubungan dengan adanya pandemi covid-19 dan telah dilakukan refocusing anggaran, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo telah mengajukan perubahan target kinerja.

Solusi:

Kedepan akan dilakukan optimalisasi kegiatan agar realisasi semakin meningkat.

b. Realisasi Kinerja Sasaran Urusan Olahraga

Sasaran 2: Meningkatnya prestasi olahraga ditingkat regional, nasional dan internasional

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	%
Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional	140	282	198	150	166	110	155	75	73	97,33

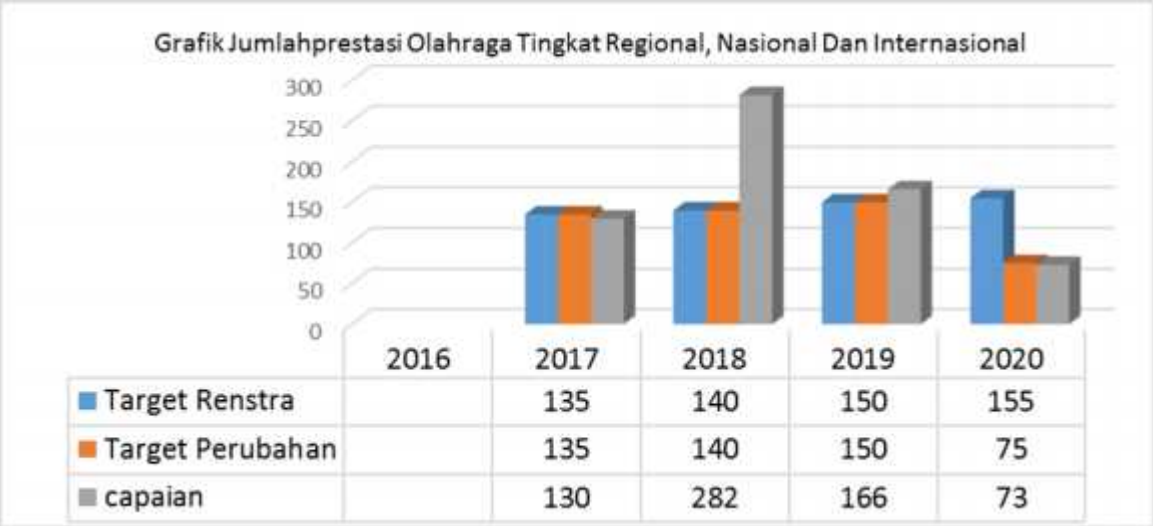

Apabila dibandingkan dengan target renstra tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 tidak mencapai target yaitu 48,38%, Apabila dibandingkan pada target usulan perubahan, capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 97,33%,

dari target perubahan sebanyak 75 terealisasikan sebanyak 73 prestasi hal ini dikarenakan dari efek pandemi covid-19.

Permasalahan :

Adanya pandemi covid-19 maka dilakukan refocusing anggaran serta kegiatan olahraga yang bersifat kelompok/beregu tidak dapat di laksanakan.

Solusi :

Kedepan untuk meningkatkan prestasi akan dilakukan optimalisasi kegiatan dengan memaksimalkan prestasi para atlet dari kegiatan yang masih dapat diselenggarakan
sesuai protokol kesehatan yang berlaku

1. Program Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Keolahragaan Urusan Olahraga

   Dengan anggaran sebesar Rp.8.428.381.380,- dan terealisasi sebesar Rp.5.971.026.907,- atau 70,8%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	TARGET PERUBAHAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Jumlah prestasi olahraga tingkat Regional, Nasional dan Internasional	155 prestasi	75 prestasi	73 prestasi	97,33

Permasalahan:

Sehubungan dengan adanya pandemi covid-19 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo mengajukan perubahan target program yang awalnya 155 prestasi menjadi 75 pretasi dengan capaian 73 prestasi. Penurunan target pada program dikarenakan adanya refocusing anggaran.

Solusi:

Tetap memfasilitasi beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk para atlet dengan tetap menerapkan protocol kesehatan yang berlaku.

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	TARGET Perubahan Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pembinaan dan fasilitasi lembaga dan pelaku olahraga prestasi	Jumlah pembinaan kepada pelaku keolahragaan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150	932.491.500	818.635.500	87
	Jumlah pelaku olahraga yang mendapat penghargaan	220 orang	20 orang	20 orang	100			
Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga lainnya yang berkembang di masyarakat	Jumlah even olahraga rekreasi dan olahraga lainnya yang diselenggarakan	4 event	3 event	4 event	133,33	1.704.966.300	227.765.300	13
Pembinaan dan penyelenggaraan / mengikuti kompetisi olahraga prestasi tingkat kabupaten, provinsi dan nasional	Jumlah even olahraga prestasi dan olahraga lainnya yang diselenggarakan	3	3	4	133,33	1.227.659.600	732.678.084	59
Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	6	6	6	100	4.563.263.980	4.191.948.023	

Permasalahan:

Sehubungan dengan adanya pandemi covid-19 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo mengajukan perubahan target kegiatan, penurunan target pada kegiatan keolahragaan dikarenakan adanya refocusing anggaran.

Solusi:

Optimalisasi terhadap kegiatan yang masih dapat berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku

2. Program Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Keolahragaan Urusan Olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 526.255.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 458.135.760,- atau 87 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Tingkat kepuasan pengunjung sarana keolahragaan	75,03%	90,299%	120
jumlah standart operasional procedure (SOP)	3	3	100

Permasalahan:

Dengan adanya pandemi covid-19 maka dilakukan penutupan fasilitas sarana keolahragaan sehingga kegiatan survey terhadap pengunjung sarana keolahragaan kurang maksimal.

Solusi:

Memaksimalkan hasil survey sebagai bahan evaluasi.

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	TARGET Perubahan Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pengelolaan fasilitas keolahragaan	Jumlah pengguna fasilitas keolahragaan	84.017 orang	28.837 orang	35.117 orang	150	526.255.000	458.135.760	87

Permasalahan:

Dengan adanya pandemi covid-19 maka Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo telah mengajukan perubahan target yang semula target jumlah pengguna fasilitas keolahragaan 84.017 orang menjadi 28.837 orang dengan realisasi 35.117 orang. Penurunan target dikarenakan telah dilakukan penutupan sementara fasilitas sarana keolahragaan selama pandemi covid-19.

Solusi:

Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas sarana prasarana keolahragaan agar terjaga keindahan dan keamanannya.

Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Urusan Kebudayaan merupakan Urusan wajib non dasar yang memiliki sasaran Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah dalam renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Di Tahun 2020 kinerja tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran 2: Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Jumlah seni dan budaya daerah yang dilestarikan	2 kelompok	2 kelompok	100	3 kelompok	3 kelompok	100	3 kelompok	3 kelompok	100

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 tidak mengalami perubahan. Upaya yang dilakukan untuk melestarikan tradisi antara lain :

1. Menyelenggarakan pentas seni budaya
2. Menyelenggarakan festival seni budaya
3. Mengadakan seminar, workshop, diskusi dan lain-lain tentang seni budaya
4. Memberikan penghargaan kepada seniman berprestasi

a. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan adalah alat atau sarana untuk mencapai Tujuan Sasaran, Untuk mencapai sasaran Urusan Kebudayaan, yaitu sasaran Meningkatnya Pelestariaan Seni dan Budaya Daerah didukung dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan** dengan anggaran sebesar Rp.13.577.600,- dan terealisasi sebesar Rp.13.225.600,- atau 97,41%. Di tahun 2020 ini untuk target indikator program tidak ada dikarenakan kegiatan mengalami Refocusing dengan menunjuk pada Surat Edaran Bupati Nomor : 443/2434/438.5.2/2020 tanggal 31 Maret 2020 bahwa kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat banyak untuk sementara tidak diperbolehkan dikarenakan Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19).

   Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	a. Jumlah seni dan budaya baru yang berhasil diidentifikasi b. Jumlah kelompok budaya yang dibina dan ditampilkan	a. 0 Jenis b. 0 Kelompok	a. 0 Jenis b. 0 Kelompok	a. 0 b. 0	13.577.600	13.225.000	97,41

Urusan Persandian

Urusan persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk **Persandian** yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah

Program Peningkatan Kualitas Layanan data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Program tersebut di atas dilakasanakan dan diarahkan untuk mencapai tutjuan dan sasaran urusan persandian yaitu Meningkatnya pengembangan implementasi teknologi informatika, dengan indikator dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2020, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TAR GET	REALIS ASI	%	TAR GET	REALI SASI	%	TARG ET	REALI SASI	%
Persentase jaringan OPD dan kecamatan terintegrasi	58	68 ,75	118,53	70	89,6	128	81	110	135,8

Sampai dengan Akhir Tahun 2020 DISKOMINFO sudah berhasil menyambungkan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan menggunakan koneksi **Fiber Optik telah terbangun sepanjang 150,00 km** baik menggunakan Kabel Udara maupun Kabel Tanam.

Tahun 2017 Penggelaran FO Sepanjang 2,00 km meliputi **:**

1. Data Center Pendopo,
2. Sekretariat Daerah,
3. Sekretariat DPRD,
4. Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata,
6. Dinas Perikanan,
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
8. Dinas PU Bina Marga dan SDA,
9. Dinas PU Cipta Karya,
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tahun 2018 Penggelaran FO Sepanjang 38,00 km meliputi :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Badan Kepegawaian Daerah
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Badan Pelayanan Pajak Daerah
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Dinas Pangan dan Pertanian
7. Dinas Penanaman Modal dan PTSP

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
10. Dinas Kesehatan
11. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Tenaga Kerja
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
16. Inspektorat Daerah
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Satuan Polisi Pamong Praja
19. RSUD Sidoarjo
20. Mall Pelayanan Publik
21. Kecamatan Candi
22. Kecamatan Sidoarjo
23. Kecamatan Buduran
24. Kecamatan Gedangan

Tahun 2019 Penggelaran FO Sepanjang 70,00 km meliputi :

1. Kecamatan Wonoayu
2. Kecamatan Krian
3. Kecamatan Balongbendo
4. Kecamatan Tarik
5. Kecamatan Prambon
6. Kecamatan Sukodono
7. Kecamatan Waru
8. Kecamatan Sedati
9. Kecamatan Tanggulangin
10. UPT Perpustakaan Krian
11. Puskesmas Sidoarjo

Tahun 2020 Penggelaran FO Sepanjang 40,00 km meliputi :

1. Kecamatan Jabon
2. Kecamatan Porong
3. Kecamatan Krembung
4. Kecamatan Tulangan
5. Kecamatan Taman
6. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon
7. Pintu Air Kepajaran Mlirip Tarik
8. SMP Negeri 4 Sidoarjo
9. SMP Negeri 5 Sidoarjo
10. SD Negeri Kupang 4 Kalialo Jabon

Dari Pembangunan Jaringan FO yang ditetapkan dalam RENSTRA selama 5 tahun DISKOMINFO melakukan percepatan diakhir tahun 2020 Semua OPD dan kecamatan telah terhubung jaringan FO DISKOMINFO, pada tahun 2020 karena adanya Pandemi COVID-19 kami juga membantu memfasilitasi
sekolah, agar pembelajaran daring dapat berjalan dengan lancar dan juga kami memfasilitasi internet untuk memantau Pintu Air untuk dapat pengendalian banjir. Pada tahun 2021 ini kami berencana untuk
memasang jaringan FO dibeberapa desa di Kecamatan Sidoarjo dan porong merujuk RENSTRA-KEMENKOMINFO bahwa jaringan internet harus dapat dinikmati sampai desa-desa, akan tetapi kami masih melakukan koordinasi lebih lanjut.

Sesuai dengan fungsi seksi keamanan informasi dan telekomunikasi terkait layanan keamanan informasi e-government, diperlukan kebijakan keamanan informasi yang mengatur norma, standard, prosedur dan kriteria pelaksanaan/inplementasi keamanan e-government di pemerintah kabupaten Sidoarjo agar implementasi keamanan informasi e-government dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak.

INDEKS KEAMANAN INFORMASI (KAMI)

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.

Bentuk evaluasi yang diterapkan dalam indeks KAMI dirancang untuk dapat digunakan oleh setiap organisasi dari berbagai tingkatan, ukuran, maupun tingkat kepentingan penggunaan TIK dalam mendukung terlaksananya bisnis proses yang ada. Data yang digunakan dalam evaluasi ini nantinya akan memberikan snapshot indeks kesiapan - dari aspek kelengkapan maupun kematangan - kerangka kerja keamanan informasi yang diterapkan dan dapat digunakan sebagai pembanding dalam rangka menyusun langkah perbaikan dan penetapan prioritasnya.

Alat evaluasi ini kemudian bisa digunakan secara berkala untuk mendapatkan gambaran perubahan kondisi keamanan informasi sebagai hasil dari program kerja yang dijalankan, sekaligus sebagai sarana untuk menyampaikan peningkatan kesiapan kepada pihak yang terkait (stakeholders).

Penggunaan dan publikasi hasil evaluasi Indeks KAMI menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan keamanan informasi di organisasi. Pertukaran informasi dan diskusi dengan organisasi sebagai bagian dari penggunaan alat evaluasi Indeks KAMI ini juga menciptakan alur komunikasi antar pengelola keamanan informasi di sektor swasta sehingga semua pihak dapat mengambil manfaat dari lesson learned yang sudah dilalui.

Petunjuk Penggunaan Alat Evaluasi Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) organisasi dapat menggunakan elat evaluasi ini untuk mendapatkan gambaran mengenai kematangan program kerja keamanan informasi yang dijalankannya. Evaluasi ini dianjurkan untuk dilakukan oleh pejabat yang secara langsung bertanggungjawab dan berwenang untuk mengelola keamanan informasi di seluruh cakupan instansinya.

Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di masing-masing area di bawah ini:

- Kategori Sistem Elektronik yang digunakan Instansi
- Tata Kelola Keamanan Informasi
- Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
- Kerangka Kerja Keamanan Informasi
- Pengelolaan Aset Informasi, dan
- Teknologi dan Keamanan Informasi

Hasil yang diraih oleh Kabupaten Sidoarjo untuk INDEKS KAMI Tahun 2020 adalah **C, Cukup** dengan Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar ISO 27001 (Sesuai Kategori) : **494**

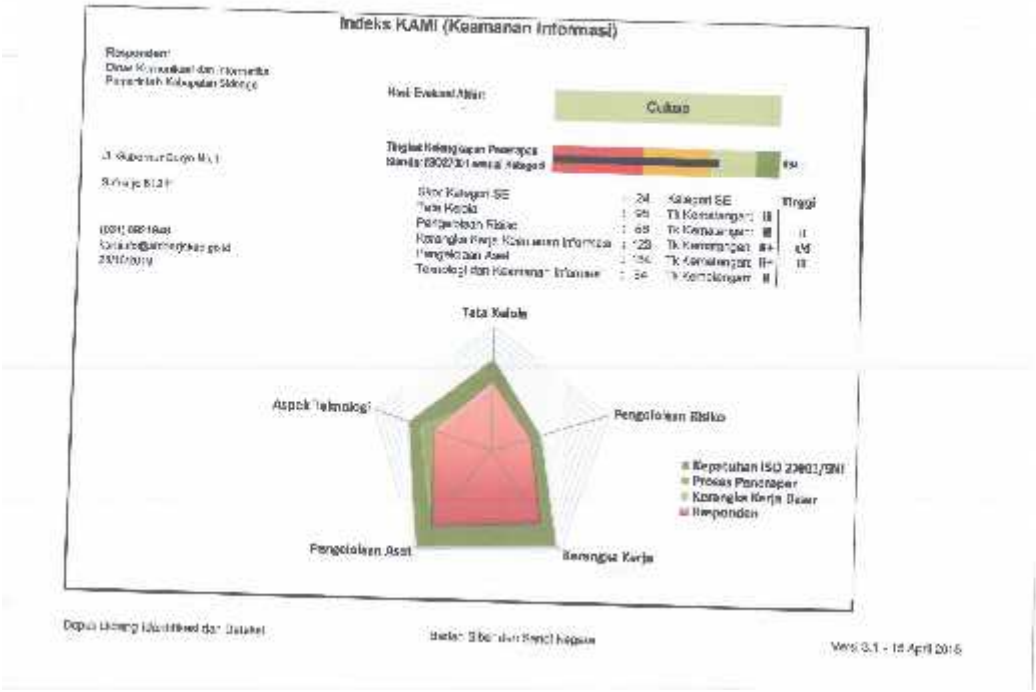

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran di urusan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 melaksanakan program Program Peningkatan Kualitas Layanan data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). dengan anggaran sebesar Rp. 20.290.225.628,40 dan terealisasi sebesar Rp. 19.744.874.106,00 atau 97,31%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase jaringan FO yang dibangun	58,1%	89,6%	154,22%

Program tersebut didukung oleh Enam (6) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Perencanaan, Pengembangan Infrastruktur TIK	a. Prosentase infrastruktur yang dibangun; b. Prosentase kebutuhan bandwith yang terpenuhi	85,71% 72,22%	85,71% 72,22%	100% 100%
Peningkatan Sarpras dan infrastruktur TIK data center dan comment center	a. Persentase tingkat aksesbilitas data center b. Persentase Pengelolaan command center yang dapat berjalan dengan baik	99,718% 99,43%	99,718% 99,43%	100% 100%
Pengelolaaan data dan integrasi sistem informatika	a. Prosentase database OPD yang terintegrasi b. Prosentase Sistem Informasi yang terintegrasi	17% 17%	17% 17%	100% 100%
Monitoring dan Evaluasi	Persentase aplikasi layanan publik OPD yang memanfaatkan database terintegrasi	30%	40,17%	133,9%
Pengawasan dan pengendalian Infrastruktur TIK	Prosentase keamanan Infrastruktur TIK yang dipantau	99%	100%	100%
Perencanaan dan implementasi Persandian dan Keamanan TIK	a. Persentase SOP persandian dan keamanan yang disusun b. Persentase keamanan TIK yang terpasang	66,67% 80%	66,67% 100%	100% 125%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Perencanaan, Pengembangan Infrastruktur TIK	1.623.368.732,00	1.460.718.653,00	89,98
Peningkatan Sarpras dan infrastruktur TIK data center dan comment center	18.069.142.399,40	17.785.805.283,00	98,43
Pengelolaaan data dan integrasi sistem informatika	57.678.400,00	54.310.400,00	94,16
Monitoring dan Evaluasi	3.661.780,00	3.245.780,00	88,64
Pengawasan dan pengendalian Infrastruktur TIK	266.712.300,00	228.950.000,00	85,84
Perencanaan dan implementasi Persandian dan Keamanan TIK	269.662.017,00	211.843.990,00	78,56

Urusan Statistik

Urusan statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk **urusan statistik** yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah Program Pengembangan data informasi statistik daerah.

Program tersebut di atas dilakasanakan dan diarahkan untuk mencapai tutjuan dan sasaran urusan statistik yaitu meningkatnya kualitas data statistik, dengan indikator dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2020, sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TAR GET	REA LISASI	%	TAR GET	REA LISASI	%	TAR GET	REALI SASI	%
Meningkat nya kualitas data statistik	Persentase data statistik yang diolah dan dianalisa	40	48	120	60	60	100	80	80	100

Dari target yang sudah disusun, Bidang Statistik mampu mencapai realisasi 100% karena target disusun secara terukur sehingga dapat terpenuhi 100%. Selain itu dokumen-dokumen statistik yang dihasilkan untuk dapat dipublikasikan. Mengingat data-data yang ada didalam dokumen tersebut digunakan oleh OPD/instansi terkait serta masyarakat di Kabupaten Sidoarjo baik untuk perencaan pembangunan maupun untuk keperluan lainnya. Terkait dengan kondisi pandemic COVID-19 saat ini ada beberapa kekurangan pada isi buku sehingga dilakukan beberapa penyesuaian, namun dokumen tersebut tetap bisa terbit sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan.

Dalam hal penyusunan dan pengumpulan dokumen statistik ini selain dilakukan secara mandiri oleh bidang statistik juga dilaksanakan Kerjasama dengan **Badan Pusat Statistik** dan pihak terkait. Data-data yang dihasilkan oleh bidang statistik digunakan untuk berbagai keperluan di antaranya penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tahun 2020 Bidang Statistik mengumpulkan dan mengolah sebanyak 20 dokumen meliputi :

a. Dokumen hasil publikasi BPS :
    1. Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2020
    2. Kecamatan Dalam Angka 2020
    3. PDRB menurut lapangan Usaha dan PDRB menurut pengeluaran
    4. Statistik Kesejahteraan Rakyat
    5. Statistik Daerah
    6. IPM

b. Dokumen yang dikerjasamakan dengan BPS atau pihak ketiga
    1. Analisa Data Proyeksi IKU
    2. Penyusunan dan pengumpulan data sectoral lanjutan(kecamatan)
    3. Penyusunan Indeks Harga Konsumen

c. Dokumen yang disusun mandiri :
   1. Indikator Tenaga Kerja
   2. Indikator Sosial
   3. Analisa Gender
   4. Indikator ekonomi
   5. ICOR
   6. Profil Pendidikan
   7. Profil Kesehatan
   8. Profil Perikanan
   9. Profil Desa
   10. Buku Saku Statistik
   11. Literasi Media

Berikut Dokumen Statistik Daerah yang disusun dan penjelasan singkat

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan penyusunan dokumen statistik daerah untuk mendukung informasi pembangunan. Berikut Dokumen- dokumen yang disusun diantaranya:

1. Indikator Ekonomi;
2. Indikator Sosial;
3. Indeks Harga Konsumen;
4. Indikator Tenaga Kerja;
5. Analisa Gender;
6. ICOR;
7. Sidoarjo Dalam Angka;
8. PDRB;
9. Indeks Pembangunan Manusia;
10. Kecamatan Dalam Angka;
11. Statistik Daerah;
12. Statistik Kesejahteraan Rakyat;
13. Data Sektoral Kecamatan;

14. Profil Desa;
15. Profil Kesehatan;
16. Profil Pendidikan;
17. Profil Perikanan;
18. Proyeksi Indikator Kinerja Utama (IKU);
19. Literasi Media;
20. Buku Saku.

1. **Indikator Ekonomi;**

   Berbagai indikator perekonomian sangat diperlukan mulai dari proses perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi dari seluruh program pembangunan yang dilaksanakan untuk lebih menjamin tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Beberapa indikator ekonomi yang disajikan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, IPM, Indeks Gini, dll.

2. **Indikator Sosial;**

   Publikasi ini memuat analisis deskriptif dari berbagai indikator sosial yang tersedia di Kabupaten Sidoarjo. Indikator sosial yang disajikan meliputi: kependudukan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, dan indikator sosial lainnya.

3. **Indeks Harga Konsumen;**

   Indeks Harga Konsumen merupakan penghitungan Inflasi, dimana hasil penghitungan inflasi Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan nilai Konsumsi Dasar adalah 2012 = 100 dengan acuan wilayah terdekat yaitu Kota Surabaya.

4. **Indikator Tenaga Kerja;**

   Informasi mengenai ketenagakerjaan merupakan hal penting yang dapat digunakan sebagai perencanaan dan evaluasi pembangunan baik di bidang ekonomi maupun bidang sosial, misalnya dapat memberikan gambaran tentang daya serap perekonomian terhadap pertumbuhan dan produktivitas tenaga kerja.

5. **Analisa Gender**

Analisa Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 disusun dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sudah berperspektif gender. Analisa Gender ini berisikan tentang informasi mengenai kondisi sosial demografi perempuan dan laki-laki serta penghitungan IPG Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019.

6. **ICOR (*Incremental Capital Output Ratio)***

Analisa ICOR Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 - 2019 ini berusaha melihat pengaruh investasi terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dapat ditentukan perkiraan investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditentukan. Data-data pendukung dalam analisa ini berasal dari beberapa sumber diantaranya adalah dari hasil survei maupun hasil publikasi yang telah ada dan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik serta data pendukung dari instansi terkait di Kabupaten Sidoarjo.

7. **Sidoarjo Dalam Angka**

Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2020 merupakan publikasi tahunan yang berupa kumpulan data dan secara komprehensif dari berbagai bidang/ sektor. Tujuan utama publikasi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara global keadaan Kabupaten Sidoarjo setiap tahun.

8. **PDRB**

Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini menyajikan angka-angka periodik, yang masing-masing disusun menurut lapangan usaha, baik atas dasar harga berlaku (*Curent Prices*) maupun atas dasar harga konstan (*Constant Prices*).

Penghitungan PDRB yang dilakukan melalui pendekatan lapangan usaha terdiri dari 17 sektor, yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan pengolahan; industri pengolahan; pengadaan listrik dan

gas; pengadaan air; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan obil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; real estate; jasa perusahaan; administasi pemerintahan, pertanahan, dam jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kesiatan sosial; dan jasa lainnya.

Menurut Pengeluaran

Penghitungan PDRB yang dilakukan melalui pendekatan pengeluaran dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumahtangga (PK-LNPRT), pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, dan ekspor dan impor serta jasa.

9. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

10. Kecamatan Dalam Angka

Kecamatan Dalam Angka 2020 merupakan publikasi tahunan yang berupa kumpulan data dan secara komprehensif dari berbagai bidang/ sektor. Tujuan utama publikasi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara global keadaan masing-masing kecamatan (18 Kecamatan) di Kabupaten Sidoarjo setiap tahun.

11. Statistik Daerah

Publikasi Statistik Daerah Kabupaten Sidoarjo 2020 berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar kondisi sosial-ekonomi di Sidoarjo yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Sidoarjo. **Berbeda**

dengan publikasi-publikasi yang sudah ada, publikasi ini lebih menekankan pada analisis.

Masing-masing tema tersebut dibahas terperinci disertai analisisnya, tidak hanya sekedar data.

12. Statistik Kesejahteraan Rakyat

Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019/2020 merupakan publikasi yang memuat berbagai indikator kesejahteraan seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas dan keluarga berencana,perumahan dan konsumsi rumah tangga.

Publikasi ini disajikan dalam bentuk angka persentase dari suatu populasi, berupa infografis dan tabel yang bersumber dari hasil pengumpulan data melalui kuesioner Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

13. Data Sektoral Lanjutan (Kecamatan)

Buku Data Statistik Sektoral ini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo hasil Survey Data Statistik Sektoral Lanjutan Tahun 2020.

Dengan penyusunan data statistik sektoral lanjutan (Kecamatan) Kabupaten Sidoarjo maka diharapkan dapat diketahui potensi pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dilihat dari berbagai sektor yang nantinya bisa digunakan sebagai data dalam menyusun kebijakan-kebijakan di Kabupaten Sidoarjo.

14. Profil Desa

Buku profil desa merupakan suatu gambaran menyeluruh tentang karakter Desa dari 18 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, yang bertujuan agar data-data yang ada di wilayah Desa di Kabupaten Sidoarjo dapat tersusun lebih baik, valid dan mudah dimengerti serta agar dapat memberikan manfaat terhadap semua pihak dalam upaya mendapatkan informasi mengenai data Desa di setiap wilayah Kecamatan untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Buku Profil Desa ini mencakup data-data dari 322 Desa dan 31 Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

15. **Profil Kesehatan**

Buku profil Kesehatan ini berisi mengenai data-data bidang Kesehatan yang ada di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Dengan mengetahui data kondisi Fasilitas, Sarana Prasarana , Tingkat kesehatan, Jenis Penyakit dll diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan di bidang Kesehatan.

16. **Profil Pendidikan**

Buku Profil Pendidikan ini merupakan kompilasi gambaran menyeluruh tentang Jumlah Sekolah, Kelas, guru dan Murid dari 18 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020. Tujuan dari penyusunan Profil Pendidikan ini dimaksudkan agar data Pendidikan dapat tersusun lebih baik, valid dan mudah di mengerti serta dapat memberikan manfaat terhadap semua pihak untuk kemajuan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.

17. **Profil Perikanan**

Pada buku ini dibahas mengenai profil Perikanan di Kabupaten Sidoarjo. Data usaha perikanan sangat dibutuhkan untuk mengetahui besarnya potensi dan seberapa besar produksi yang dihasilkan pada tahun ini. Data ini berguna bagi perencana dalam mengembangkan subsektor perikanan yaitu sebagai bahan perencanaan dan evaluasi. Data yang akan dibahas dalam buku ini bersumber dari Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

18. **Proyeksi Indikator Kinerja Utama (IKU);**

Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 dilakukan melalui surveimaupun hasil publikasi yang telah ada dan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik serta data pendukung dari instansi terkait di Kabupaten Sidoarjo.Kajianini diharapkan dapat memberikan gambaran maupun tafsiran hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 yang selanjutnya dapat menjadi alat ukur untuk mengevaluasi perumusan maupun

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

19. **Literasi Media;**

    Analisis Literasi Media Digital Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui survey. Dengan analisa ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai pengetahuan, pemahaman dan penerapan literasi media di kalangan pelajar dan mahasiswa, serta masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya dapat menjadi alat ukur mengevaluasi perumusan maupun pelaksanaan kebijakan mengenai media.

20. **Buku Saku.**

    Buku saku ini dibuat oleh Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan gambaran keadaan Kabupaten Sidoarjo secara ringkas yang tersaji dalam bentuk data. Adapun data-data yang tersaji merupakan dokumen yang di publikasikan selama tahun 2020 meliputi Data Pendidikan, Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Ketenagakerjaan, dll.

Untuk pelaksanaan penyusunan dokumen tersebut diatas dilaksanakan oleh Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo baik secara mandiri maupun dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo dan pihak lain.

Diharapkan informasi-informasi yang dihimpun tersebut dapat memberikan manfaat untuk peningkatan pembangunan Kabupaten Sidoarjo di masa mendatang.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran di urusan statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan program Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan anggaran sebesar Rp 621.393.170,00 dan terealisasi sebesar Rp 606.543.200,00 atau 97,61%, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	PERSENTASE
Persentase data statistik yang diolah dan di analisa	80%	80%	100%

Yang terdiri dari dua (2) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	PERSENTASE
Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Persentase elemen data yang disajikan	70%	70%	100%
Pengolahan, Updating dan analisis data statistik daerah	Persentase data yang diolah dan di analisa	80%	80%	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	PERSENTASE
Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	512.935.170,00	505.437.200,00	98,54
Pengolahan, Updating dan analisis data statistik daerah	108.458.000,00	101.106.000,00	93,22

Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan sistem tertib administrasi kearsipan	Prosentase arsip aktif yang terkelola dengan baik	10%	10%	100%	12%	16,3%	135,83%	15%	26,74%	178,26%

Sumber : Bidang Kearsipan

Catatan : Pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 masih dalam bentuk Kantor Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber : Bidang Kearsipan

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa Prosentase arsip aktif yang terkelola dengan baik tahun 2020 sebanyak 26,74%, total jumlah arsip aktif yang terkelola dengan baik sebanyak 1337 Berkas, total jumlah arsip aktif terkelola yang ada di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 5000 berkas sehingga Prosentase arsip aktif yang terkelola dengan baik tahun 2020 sebanyak 26,74%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 16,3%, maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 10,44% atau 64,05%. Sedang target tahun 2020 Prosentase arsip aktif yang terkelola dengan baik sebesar 15%, maka capaian target tahun 2020 sebesar 178,26%

b. Sasaran

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya tertib kearsipan dan layanan arsip.

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Prosentase lembaga yang menyelenggarakan kearsipan secara baku	20,04%	20,04%	100%	22,46%	22,46%	100%	25,12%	25,12%	100%

Untuk mengetahui Prosentase Lembaga yang menyelenggarakan kearsipan secara baku yaitu dengan mengetahui jumlah Lembaga yang menyelenggarakan kearsipan secara baku dibanding dengan jumlah lembaga yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yang dimaksud lembaga antara lain Lembaga terdiri dari SKPD, Kecamatan, Desa/ Kelurahan, BUMD, KPU Sidoarjo, Sekretariat KORPRI adalah dengan melihat kualitas tata kelola kearsipan di SKPD sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis sebagai berikut :

- Tata naskah
- Klasifikasi arsip

- Sarana prasarana
- SDM

Sumber : Bidang Kearsipan

Jumlah Lembaga yang telah menyelenggarakan kearsipan secara baku tahun 2020 sebanyak 104 Lembaga, total jumlah lembaga yang ada di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 414 Lembaga sehingga Prosentase Lembaga yang telah menyelenggarakan kearsipan secara baku tahun 2020 sebesar 25,12%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 93 lembaga, maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 11 lembaga atau 11,82%. Sedang target tahun 2020 Prosentase Lembaga yang telah menyelenggarakan kearsipan secara baku sebesar 25,12%, maka capaian target tahun 2020 sebesar 100%.

INDIKATOR KINERJA SASARAN 3 : PROSENTASE LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN KEARSIPAN SECARA BAKU

Berdasarkan tabel/ grafik, pencapaian kinerja di Tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan :

- meningkatnya pembinaan pengelolaan arsip
- pendampingan dan monitoring secara berkala mengenai arsip di Lembaga yang ada di Kabupaten Sidoarjo
- Mengadakan bintek kearsipan secara terus-menerus
- Mengadakan sosialisasi/ penyuluhan kearsipan

c. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengelolaan, Pelayanan Dan Dokumen Kearsipan** dengan anggaran sebesar Rp.647.889.131,- dan terealisasi sebesar Rp.632.209.857,- atau 97,58%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Jumlah lembaga yang telah menyelengarakan sistem kearsipan dengan standart yang di tentukan	104 Lembaga	104 Lembaga	100%
Presentase pelayanan kearsipan yang terpenuhi	100%	100%	100%

Sumber : Bidang Kearsipan

Berdasarkan hasil analisa tersebut, maka Program Pengelolaan, Pelayanan Dan Dokumen Kearsipan dapat disimpulkan *telah berhasil* karena dilihat dari realisasi dan capaian kegiatan maka kegiatan ini telah mecapai target yang telah ditentukan, kalau dilihat dari sisi realisasi anggaran terdapat sisa anggaran yang merupakan efisiensi dari penyerapan anggaran.

Upaya yang telah dilakukan :

1. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung
2. Mengadakan monev arsip secara berkesinambungan agar tertib arsip bisa dijalankan
3. Selalu berupaya melakukan koordinasi dengan pengelolaan arsip di semua OPD dan Desa/Kelurahan
4. Menggali atau mencari sumber bersejarah

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah	a. Jumlah arsip daerah yang didata dan ditata b. Jumlah arsip yang disusutkan	a. 5000 Berkas b. 200 Berkas	a. 5134 Berkas b. 274 Berkas	a. 102,68% b. 137%
Pengembangan sistem informasi kearsipan daerah	a. Jumlah lembaga yang dibina sistem informasi kearsipan (daerah)-nya b. Jumlah arsip yang dialihmediakan	a. 34 Lembaga b. 23 Dokumen	a. 48 Lembaga b. 23 Dokumen	a. 141% b. 100%
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	Jumlah Lembaga pengelola arsip yang di monev	27 Lembaga	27 Lembaga	100%
Pelayanan dan penerbitan naskah arsip	a. Jumlah penggunaan arsip yang dilayani	a. 30 Orang	a. 54 Orang	a. 180%
Penyediaan sarana pelayanan arsip dan dokumentasi	a. Jumlah sarana pelayanan kearsipan yang disediakan b. Jumlah pendokumentasian arsip	a. 1 Macam b. 25 dokumen	a. 1 Macam b. 25 dokumen	a. 100% b. 100%
Penyelenggaraan tata kearsipan	a. Jumlah lembaga pengelola arsip yang dibina	a. 16 Lembaga	a. 16 Lembaga	a. 100%

Sumber : Bidang Kearsipan

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah	Rp 133.385.150,00	Rp 131.178.906,00	98,35%
Pengembangan sistem informasi kearsipan daerah	Rp 38.830.000,00	Rp 38.586.000,00	99,37%
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	Rp 7.200.000,00	Rp 7.140.000,00	99,17%
Pelayanan dan penerbitan naskah arsip	Rp 88.939.600,00	Rp 87.698.352,00	98,60%
Penyediaan sarana pelayanan arsip dan dokumentasi	Rp 229.796.000,00	Rp 225.838.920,00	98,28%
Penyelenggaraan tata kearsipan	Rp 149.738.381,00	Rp 141.767.679,00	94,68%

Berdasarkan hasil capaian tersebut, maka Program Pengelolaan, Pelayanan Dan Dokumen Kearsipan dapat disimpulkan ***telah berhasil*** karena dilihat dari realisasi dan capaian kegiatan maka kegiatan ini telah melebihi target, kalau dilihat dari sisi realisasi anggaran terdapat sisa anggaran yang merupakan efisiensi dari penyerapan anggaran.

Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan gemar dan budaya baca masyarakat	Indeks Minat Baca Masyarakat	60	69	115%	69	71,42	103%	70	71,79	102,55

b. Sasaran

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya gemar dan budaya baca masyarakat.

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Indeks Minat Baca Masyarakat	60	69	115%	69	71,42	103%	70	71,79	102,55

Kajian Minat Baca Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 dengan Metode penentuan sampel.

Gemar membaca dapat diartikan sebagai kesukaan akan membaca, ada kecenderungan hati ingin membaca. Menurut Suhaenah Suparno **minat baca** seseorang diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah bacaan yang dibaca selain buku pelajaran (dalam Abdul Rahman, 2005:122). Dengan demikian minat baca seseorang berimbas kepada jumlah koleksi yang pernah dibaca yang bersangkutan (bukan buku pelajaran/modul/buku paket sekolah). Adapun koleksi bacaan yang dibaca bisa diperoleh dari mana pun juga.

Dalam pengembangan Indeks Minat Baca ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bekerjasama dengan pihak ketiga yang kompeten yakni PT. ICONESIA SOLUSI PRIORITAS

- Indeks minat baca masyarakat di Kabupaten Sidoarjo sebesar 71,79, masuk dalam kategori tinggi. Indeks ini meningkat dibandingkan tahun 2019
- Mayoritas Kecamatan telah memiliki indeks minat baca tinggi, hanya 4 Kecamatan saja indeks minat baca nya masuk pada kategori sedang, yaitu : Kecamatan Sukodono, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Prambon, dan Kecamatan Tulangan
- Indikator minat baca yang perlu mendapat perhatian karena indeksnya masuk pada kategori sedang adalah ketertarikan membaca dibandingkan bermain gadget/ bermedia sosial

- Indeks kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sebesar 59,79 dan masuk pada kategori sedang.
- Pengukuran Indeks kegemaran membaca adalah : Rutinitas untuk mendapatkan informasi secara online melalui membaca dan Rutinitas untuk mendapatkan informasi secara online melalui mengunduh.
- Secara segmen demografi (kelompok usia, pendidikan terakhir yang ditamatkan, dan pekerjaan), terdapat perbedaan yang signifikan pada indeks minat baca maupun Indeks kegemaran membaca sebagai berikut :
  - Masyarakat yang usianya lebih muda, cenderung memiliki indeks minat baca maupun Indeks kegemaran membaca yang lebih tinggi
  - Masyarakat dengan pendidikan terakhir perguruan tinggi (diploma/ sarjana) dan pascasarjana cenderung memiliki indeks minat baca maupun Indeks kegemaran membaca yang lebih tinggi
  - Masyarakat dengan pekerjaan mahasiswa, pelajar, wirausaha/ UMKM cenderung memiliki indeks minat baca maupun Indeks kegemaran membaca yang lebih tinggi.
- Jenis bacaan yang digemari oleh masyarakat Sidoarjo adalah :
  - Bacaan cetak : Koran dan Majalah
  - Bacaan online : Berita/ koran online dan komik
- 3 (tiga) genre bacaan fisik yang disukai masyarakat baik bacaan cetak maupun bacaan online, yaitu Agama, Hiburan, dan Kesehatan
- Mayoritas masyarakat Sidoarjo cenderung tidak pernah berkunjung ke tempat-tempat yang menyediakan bahan bacaan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Namun diantara tempat-tempat yang menyediakan bahan bacaan, tempat yang paling sering dikunjungi berikut aktivitas yang dilakukan adalah sebagai berikut :
  - Toko Buku (2,74%
  - Taman Bacaan Masyarakat (TBM)/ co-working place (2,24%)
  - Café/ warung/ restoran yang terdapat pojok baca (2%)

Perkembangan Indeks Minat Baca Masyarakat dari tahun 2016 s/d tahun 2020

Sumber : Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca

Target yang ditetapkan di tahun 2020 dalam RPJMD untuk indeks minat baca adalah 70. Realisasi Indeks Minat Baca Masyarakat tahun 2020 tercapai sebesar 71,79 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 71,42, maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,37 atau 0,52%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 70, maka capaian Indeks Minat Baca Masyarakat telah tercapai sebesar 102,55%.

Berdasarkan tabel/grafik, pencapaian kinerja di Tahun 2020 mengalami peningkatan dan melampaui dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan :

- Dilaksanakannya promosi/ sosialisasi melalui gerakan gemar membaca dengan mengadakan lomba mendongeng, lomba perpustakaan sekolah/desa/kelurahan
- membentuk perpustakaan percontohan di Desa/ Kelurahan
- sosialisasi pengelolaan perpustakaan di Desa/ Kelurahan maupun di masyarakat

- peningkatan kualitas SDM perpustakaan baik melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Minat Baca Masyarakat, antara lain :

(1) Mensosialisasikan Permendes No. 16 tahun 2018 tentang pemanfaatan dana desa untuk perpustakaan.
(2) Mensosialisikan UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan utamanya untuk pembudayaan literasi di sekolah
(3) Pembinaan dan memotivasi Kades/Kakel dan Kepala Sekolah untuk mengembangkan perpustakaan
(4) Mengadakan Bimtek/pelatihan untuk petugas pengelola perpustakaan desa dan sekolah
(5) Disahkannya Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang dapat mendorong semua stakeholder dalam pengembangan perpustakaan
(6) Mengadakan kegiatan - kegiatan yang melibatkan masyarakat dan mitra perpustakaan seperti :
    - Lomba mendongeng
    - Lomba perpustakaan sekolah/desa

Sasaran 2 : Meningkatnya Layanan Perpustakaan melalui peningkatan layanan perpustakaan kepada masyarakat yang dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perpustakaan

Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat/ pengunjung yang datang ke perpustakaan umum Kabupaten Sidoarjo, Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang dimiliki Pemkab. Sidoarjo. Penilaian SKM Layanan Perpustakaan yang dilakukan oleh lembaga independent dalam hal ini PT.

KOKEK dengan melakukan pembagian kuisioner kepada pengunjung mengenai layanan perpustakaan.

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Nilai SKM Layanan Perpustakaan	81,42	81,42	100	81,47	81,54	100,09	81,47	80,94	99,35	81,53	87,383	107,17%	81,56	90,091	110,45%

Sumber : Bidang Pengolahan, Layanan

Realisasi SKM Layanan perpustakaan tahun 2020 tercapai sebesar 90,091 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 87,38 maka realisasi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,71 atau 3,10%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 81,56, maka capaian SKM Layanan perpustakaan telah tercapai sebesar 110,45%.

INDIKATOR KINERJA SASARAN 2 : NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) LAYANAN PERPUSTAKAAN

Berdasarkan tabel/ grafik, pencapaian kinerja di Tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan :

- Peningkatan fasilitas perpustakaan berupa BOLAM (Bioskop Literasi Anak dan Masyarakat
- Peningkatan sarana prasarana yang mendukung layanan sirkulasi yang sudah terkomputerisasi
- Peningkatan sarana prasarana perpustakaan yang representatif berupa dekorasi interior Ruang Baca Anak yang lebih menarik
- Penambahan koleksi Buku yang berkualitas
- Adanya armada perpustakaan keliling (Mobil Perpustakaan Keliling) sebanyak 5 (lima) unit dan 18 Torpin (motor pintar)
- Perpustakaan Online/ dibukanya media jejaring sosial (internet) pada Perpustakaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo yakni dengan adanya SIDIRA (Sidoarjo Information Digital Library)

Upaya yang telah dilakukan :

1. Melaksanakan promosi/ sosialisasi kegiatan layanan perpustakaan lebih gencar melalui sosial media dan media cetak.
2. Meningkatkan inovasi layanan perpustakaan
3. Memaksimalkan dan menambah kebutuhan bahan pustaka bagi masyarakat

c. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca** dengan anggaran sebesar Rp.434.999.360,- dan terealisasi sebesar Rp.423.870.667,- atau 97,44 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Jumlah perpustakaan di Kabupaten Sidoarjo	928	928	100%

Berdasarkan hasil analisa tersebut, maka Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca dapat disimpulkan ***telah berhasil*** karena dilihat dari realisasi dan capaian kegiatan maka kegiatan ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kalau dilihat dari sisi realisasi anggaran terdapat sisa anggaran yang merupakan efisiensi dari penyerapan anggaran.

Upaya yang telah dilakukan :

1. Memberikan sosialisasi kepada para Kades/ Kakel dan Kasek tentang arti pentingnya keberadaan dan pengembangan perpustakaan dengan cara mengintensifkan pembinaan dan mensosialisasikan Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
2. Mengintensifkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan
3. Memasyarakatkan minat dan budaya baca melalui lomba mendongeng dan Lomba perpustakaan sekolah/ Desa/ Kelurahan

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
1. Pembinaan, stimulasi, supervisi dan pendataan perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina	35 perpustakaan	44 perpustakaan	125,71 %

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
2. Pengembangan Dan Pemasyarakatan/ Sosialisasi Perpustakaan	Jumlah perpustakaan baru	1 perpustakaan	1 perpustakaan	100 %
3. Pemasyarakatan dan pembuayaan gemar membaca	a. Jumlah survey gemar membaca	1	1	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pembinaan, Stimulasi, Supervisi Dan Pendataan Perpustakaan	Rp 162.948.260,00	Rp 160.820.046,00	98,69%
Pengembangan Dan Pemasyarakatan/Sosialisasi Perpustakaan	Rp 201.691.100,00	Rp 194.385.621,00	96,38%
Pemasyarakatan dan pembuayaan gemar membaca	Rp 66.300.000,00	Rp 64.945.000,00	97,96%

2. **Program Pengembangan Koleksi dan Pelayanan Perpustakaan** dengan anggaran sebesar Rp.2.384.755.194 dan terealisasi sebesar Rp.2.265.868.633 atau 95,01 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
a. Jumlah koleksi perpustakaan	100.000 Eks.	136.589 Eks	136,58 %
b. Jumlah pengunjung perpustakaan	100.000 Orang	111.604 orang	111,60 %

Upaya yang telah dilakukan :

1. Memberdayakan tenaga Non ASN untuk membantu pengolahan bahan Pustaka
2. Menambah Kapasitas internet
3. Mempromosikan layanan perpustakaan baik melalui media cetak maupun media social
4. Meningkatkan inovasi layanan perpustakaan
5. Memaksimalkan dan menambah kebutuhan bahan pustaka bagi masyarakat dengan melakukan survey kebutuhan bahan pustaka

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
a. Penyediaan dan pengolahan koleksi bahan pustaka	a. Jumlah koleksi yang dikeloa b. Jumlah koleksi yang diperbaiki	15.000 Eks. 300 Eksemplar	20.036 Eks 308 Eksemplar	133,57 % 102,6 %
b. Pengembangan koleksi bahan pustaka berkonten lokal	Jumlah Koleksi Muatan Local	151 Eksemplar	151 Eksemplar	100 %
c. Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan	a. Jumlah media publikasi dan informasi yang disediakan	6 jenis	6 jenis	100%
d. Pelestarian Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dialihmediakan	1 eksemplar	1 eksemplar	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Penyediaan dan pengolahan koleksi bahan pustaka	Rp 782.485.410,00	Rp 715.204.387,00	91,40%
Pengembangan koleksi bahan pustaka berkonten lokal	Rp 94.915.000,00	Rp 89.049.050,00	93,82%

Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan	Rp 1.254.954.784,00	Rp1.212.696.781,00	96,63%
Pelestarian Bahan Perpustakaan	Rp 252.400.000,00	Rp 248.918.415,00	98,62%

Berdasarkan hasil capaian tersebut, maka Program Pengembangan Koleksi dan Pelayanan Perpustakaan dapat disimpulkan ***telah berhasil*** karena dilihat dari realisasi dan capaian kegiatan maka kegiatan ini telah melebihi target, kalau dilihat dari sisi realisasi anggaran terdapat sisa anggaran yang merupakan efisiensi dari penyerapan anggaran.

2. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Realisasi Kinerja Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	Kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB	1,47%	1,47%	100%	1,40%	1,41%	100,71%	1,50%	1,56%	104%

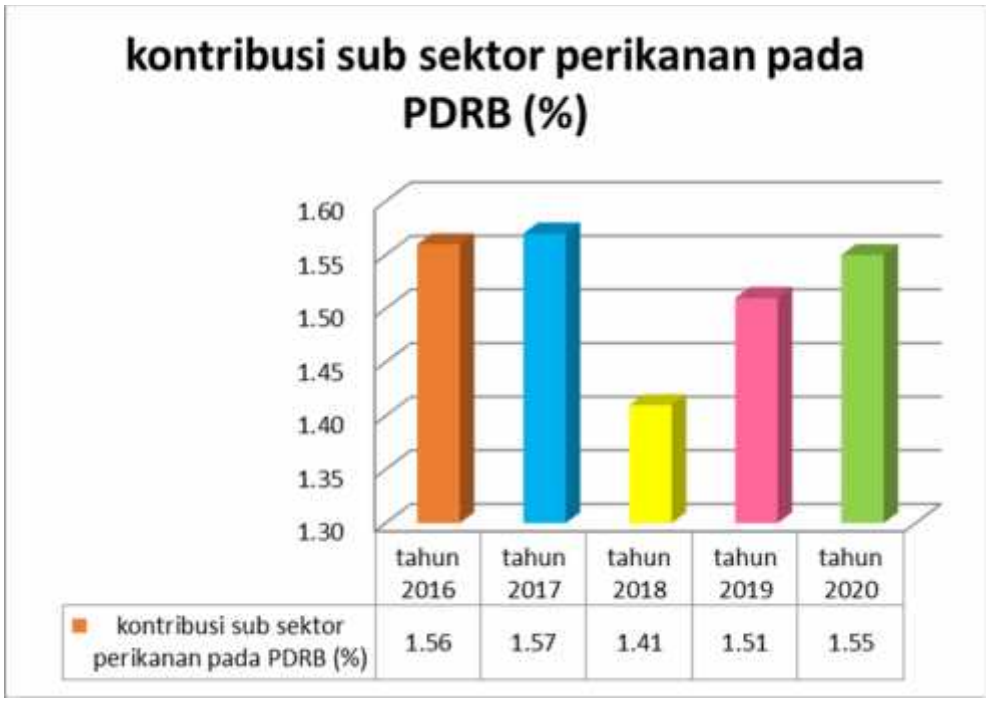

Angka pada tabel dan grafik diatas untuk indikator tujuan kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB adalah angka sementara karena data menunggu dirilis oleh BPS Kabupaten sidoarjo

capaian tahun 2020 adalah angka sementara, berdasarkan angka dari BPS kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB sebesar 1,56% karena sampai bulan Januari 2021 belum terima (data belum rilis dari BPS Kabupaten Sidoarjo) dari BPS Kab Sidoarjo namun demikian capaian berpotensi naik meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo pada kisaran -2,5%, hal tersebut dikarenakan para pelaku usaha sudah menggunakan teknologi tepat guna dan ada bibit unggul sehingga walaupun lahan

untuk kegiatan pertambakan berkurang tetapi produksi tetap melimpah selain itu mengadakan sosialisasi/ pelatihan CBIB dan CPIB serta wirausaha perikanan merangsang pembudidaya mengikuti pelatihan tersebut.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan , hal ini dikarenakan sebagian besar menggunakan teknologi tepat guna dan adanya bibit unggul sehingga walaupun lahan untuk kegiatan pertambakan berkurang tetapi produksi tetap melimpah serta sebagian besar pembudidaya telah menerapkan sosialisasi/ pelatihan CBIB dan CPIB serta wirausaha perikanan merangsang pembudidaya mengikuti pelatihan tersebut

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 104% dari target, hal ini diupayakan dengan menggunakan teknologi tepat guna dan ada bibit unggul sehingga walaupun lahan untuk kegiatan pertambakan berkurang tetapi produksi tetap melimpah ,mengadakan sosialisasi/ pelatihan CBIB dan CPIB

Adapun hal-hal yang harus dilakukan kedepannya serta wirausaha perikanan merangsang pembudidaya mengikuti pelatihan tersebut serta menjalin kemitraan dengan stake holder dan pihak terkait selain itu perlu diberikan stimulus seperti diberikan bantuan hibah , Penambahan fasilitas / sarpras perikanan , memberikan pendampingan dan wawasan perikanan kepada pembudidaya dan masyarakat sehingga mereka tertarik untuk bekerja di sektor perikanan, Pemberian akses permodalan dan pemberian pinjaman berupa kredit lunak dan diupayakan dengan pemberian teknologi tepat guna dan adanya bibit unggul

b. Realisasi Kinerja Sasaran

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan nelayan pembudidaya dan pengolah , untuk mencapai sasaran tersebut salah satunya dengan indikator dibawah ini dan dengan capaian indikator sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
prosentase peningkatan pendapatan nelayan	1%	1,02%	102%	0,5%	0,56%	112%
prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar	21.479.883 kg	21.493.180 kg	100,06%	21.479.900 kg	22.773.775 kg	101,36%

prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya air payau	76.236.179 kg	76.568.500 kg	100,43%	76.617.359 kg	78.750.800 kg	102,78%
nilai tambah produksi olahan hasil perikanan kerupuk udang	Rp. 60.000/kg	Rp. 62.500 kg	104,16%	Rp. 60.500 kg	Rp. 60.000/kg	99,17%
nilai tambah produksi olahan hasil perikanan bandeng asap	Rp. 128.000/kg	Rp. 132.500/kg	103,51%	Rp. 127.500 /kg	Rp. 127.000/kg	99,60%

Angka pada tabel diatas didapatkan dari data laporan statistic perikanan bulanan, triwulan dan tahunan yang meliputi : tangkap laut , PUD, budidaya serta data statistic olahan hasil perikanan dalam kurun waktu 1 tahun.

a. Persentase peningkatan pendapatan nelayan

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sidoarjo dimanfaatkan sebagian besar masyarakat setempat sebagai sumber mata pencaharian, salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan Nelayan adalah tingkat pendapatan nelayan. Pendapatan Nelayan merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya penangkapan yang benar – benar dikeluarkan baik per trip maupun pertahun atau disebut juga dengan Pendapatan per Tahun. Dari hasil realisasi pendapatan nelayan dari tahun ke tahun mulai tahun 2018 – 2020 terus mengalami peningkatan. Perkembangan Pendapatan Nelayan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

GRAFIK

PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN

Realisasi Peningkatan Pendapatan Nelayan tahun 2018 sebesar Rp. 30.040.860 sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp. 30.348.000 dan tahun 2020 sebesar Rp. 30.517.560 Dari hasil realisasi pendapatan nelayan dari tahun ke tahun mulai tahun 2018 – 2020 terus mengalami peningkatan.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan tersedianya alat tangkap sesuai kebutuhan, adanya hibah sapras, penebaran benih ikan di perairan umum, dilaksanakannya pembinaan / pelatihan kepada nelayan dan masyarakat berupa pelatihan penangkapan ikan yang ramah lingkungan, kelembagaan, kapasitas nelayan, diversifikasi hasil perikanan, penanganan ikan segar yang cepat, rapi dan bersih, Pemberian hibah sarana dan prasarana perikanan, Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, Pemberian permodalan kepada nelayan dengan menjalin kemitraan dengan pihak ketiga

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan hal ini dikarenakan sebagian besar para nelayan telah menerapkan pembinaan/ pelatihan berupa pelatihan penangkapan ikan yang ramah lingkungan, kelembagaan, kapasitas nelayan, diversifikasi hasil perikanan, penanganan ikan segar yang cepat, rapi dan bersih, Pemberian hibah sarana dan prasarana perikanan, Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, Pemberian permodalan kepada nelayan dengan menjalin kemitraan dengan pihak ketiga

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 112 % dari target, hal ini diupayakan dengan :

- tetap melaksanakan Penebaran benih ikan di perairan umum;
- Pembinaan / pelatihan kepada nelayan dan masyarakat berupa pelatihan penangkapan ikan yang ramah lingkungan, kelembagaan, kapasitas nelayan, diversifikasi hasil perikanan, penanganan ikan segar yang cepat, rapi dan bersih;
- Pemberian hibah sarana dan prasarana perikanan;
- Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- Pemberian permodalan kepada nelayan dengan menjalin kemitraan dengan pihak ketiga

a.1 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Laut dan PUD

Hasil Perikanan Laut meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat dari tahun 2018 realisasi melebihi target dengan kenaikan 162.400 Kg, sedangkan di tahun 2019 kenaikan sebesar 196.400 Kg, pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 124.100 Kg. Rincian lebih lanjut terkait Realisasi Perikanan Laut dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Perikanan Laut					
No	**Tahun**	**Target**	**Realisasi**	**Kenaikan**	**Persentase**
1.	2016	14.900.000 kg	14.908.760 kg	8.760 kg	0,058%
2.	2017	15,050,000 kg	15.057.400 kg	148.640 kg	0,99%
3.	2018	15.200.000 Kg	15.219.800 Kg	162.400 kg	1,07%
4.	2019	15.400.000 Kg	15.416.200 Kg	196.400 kg	1,29%
5.	2020	15. 600.000 Kg	15.540.300 Kg	124.100 kg	0,80 %

Realisasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan perikanan laut. Sedangkan realisasi tahun 2020 bila dibandingkan dengani target 2020 mengalami penurunan sebesar 59.700 kg . hal tersebut dikarenakan oleh terhambatnya aktivitas penjualan hasil tangkapan nelayan karena pandemi Covid-19.karena lock down di mana-mana sehingga banyak kapal yang tidak melaut.

Realisasi produksi perikanan umum daratan (PUD) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, produksi perikanan umum daratan (PUD) tahun 2018 sebesar 536.100 kg dan mengalami kenaikan sebesar 6.100 Kg, sedangkan tahun 2019

sebesar 547.800 kg mengalami kenaikan sebesar 11.700 kg, dan tahun 2020 sebesar 553.200 kg mengalami kenaikan sebesar 5.400 kg . Dapat dilihat dalam tabel Perikanan Umum Daratan (PUD) sebagai berikut :

Perikanan Umum Daratan (PUD)					
No	**Tahun**	**Target**	**Realisasi**	**Kenaikan**	**Persentase**
1.	2016	525.000 kg	525.050 kg	3.340 kg	0,64%
2.	2017	530.000 kg	530.000 kg	4.950 kg	0,94%
3.	2018	536.000 Kg	536.100 Kg	6.100 Kg	1,15%
4.	2019	543.000 Kg	547.800 Kg	11.700 Kg	2,18%
5.	2020	550.000 Kg	553.200 kg	5.400 kg	0,98%

Namun demikian masih ada beberapa masalah yang masih bisa di atasi dalam rangka optimalisasi ke depan yakni

Permasalahan :

- Nelayan melakukan penangkapan ikan waktunya tidak sama sehingga proses pendataan hasil tangkapan nelayan tidak dapat dilakukan secara maksimal
- Masih adanya nelayan menggunakan alat tangkap yang dilarang
- Adanya sarana prasarana perikanan tangkap yg rusak dapat mengganggu aktivitas nelayan

Dan itulah yang akan kami selesaikan dalam rangka mengatasi supaya kedepannya lebih optimal dengan solusi sebagai berikut :

- Melaksanakan pendataan hasil tangkap yang disesuaikan waktunya dengan datangnya nelayan dari laut serta memberikan logbook kepada nelayan agar selalu mencatat hasil tangkapannya didampingi penyuluh selain itu pendaatan statistic perikanan tangkap juga dilakukan melalui via whattshapp, telepon maupun fasilitas daring.
- Memasang papan larangan menangkap ikan yang dilarang di wilayah yang rawan penangkapan ikan serta melakukan pengawasan lingkungan perairan secara rutin / patroli.
- Diusulkan anggaran untuk dilakukan perbaikan sarana prasarana perikanan tangkap supaya lebih memahami permasalahan nelayan dan memotivasi mereka

serta memberikan wawasan atau ketrampilan baru yang bisa menambah penghasilan

b. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya Air Payau dan Air Tawar

Produksi perikanan budidaya di Kabupaten sidoarjo terdiri dari budidaya air payau dan budidaya air tawar . perkembangan produksi perikanan budidaya tahun 2018 dan 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

GRAFIK

PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN TAWAR

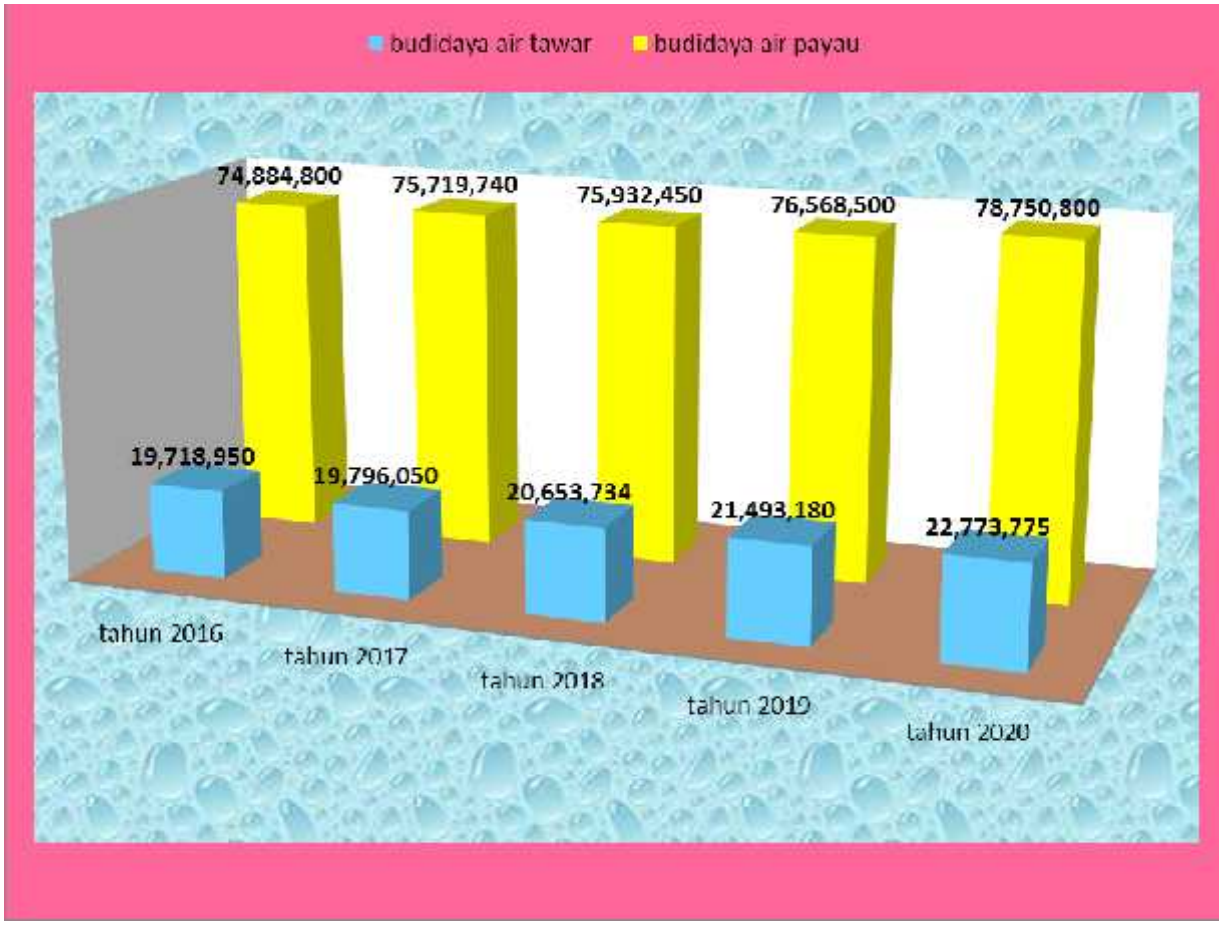

1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

Peningkatan produksi perikanan air tawar target di tahun 2020 sebesar 21.479.900 kg realisasi sebesar 22.135.975 kg dengan penambahan peningkatan produksi perikanan air tawar sebesar 642.795 kg sedangkan tahun 2019 peningkatan produksi perikanan air tawar target di tahun 2019 sebesar 21.479.883 kg, realisasi sebesar 21.493.180 kg dengan penambahan peningkatan produksi perikanan air tawar sebesar 839.446 kg.

Sedangkan di tahun 2018 target 20.389.932 kg, realisasi sebesar 20.653.734 kg dengan penambahan peningkatan produksi perikanan air tawar sebesar 857.684 kg.
Perkembangan peningkatan perikanan air tawar dari tahun 2018 – 2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Perikanan Budidaya Air Tawar					
No	Tahun	Target	Realisasi	Kenaikan	Persentase
1.	2016	18,186,396 kg	19,718,950 kg	1.586.950 kg	8,75%
2.	2017	18,691,970 kg	19.796.050 kg	77.100 kg	0,39%
3.	2018	20.389.932 Kg	20,653,734 Kg	857.684 Kg	4,33%
4.	2019	21.479.883 Kg	21.493.180 Kg	839.446 Kg	4,06%
5	2020	21.479.900 Kg	22.773.775 Kg	1.280.595 Kg	5,95%

Realisasi tahun 2018 terus meningkat dari tahun 2017 dan untuk tahun 2019 mengalami kenaikan realisasinya melebihi target 2019. Realisasi peningkatan perikanan air tawar di tahun 2019 sebesar 4,06% (realisasi 2019 – realisasi 2018) : realisasi 2018, melebihi target yang ditetapkan sebesar 4% (target 2019 –
Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan sudah banyak para pembudidaya yang menerapkan CBIB dan CPIB
Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan hal ini dikarenakan sudah banyak para pembudidaya yang menerapkan CBIB dan CPIB adanya penyediaan sarana prasarana budidaya yang menunjang aktivitas para pembudidaya serta pengawasan pemakaian OIKB (Obat Ikan Kimia dan Biologi), Penggunaan probiotik, sebagian pembudidaya telah menerapkan Pembinaan / pelatihan dari Dinas
Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 119 % dari target, hal ini diupayakan dengan :
Pemberian hibah kepada pembudidaya berupa kolam, benih, pakan dan pupuk;

Penyediaan sarana prasarana budidaya;

Pengawasan pemakaian OIKB (Obat Ikan Kimia dan Biologi);

Penerapan CBIB (Cara Budidaya Ikan Baik);

Penggunaan probiotik;

Pembinaan / pelathan terhadap pembudidaya air payau dan air tawar;

Layanan Posikandu (Pos kesehatan ikan terpadu) membantu pembudidaya dalam menangani permasalahan terhadap kesehatan ikan, pengambilan sampel residu (ikan / udang dan tanah), pelayanan vaksinasi, jasa konsultasi, maupun pusat informasi baik yang sifatnya aktif maupun pasif.

2. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau

Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari budidaya air payau dan budidaya air tawar. Target peningkatan perikanan air payau tahun 2019 sebesar 76.236.179 kg dengan realisasi 76.568.500 kg, sehingga mengalami penambahan realisasi sebesar 332.321 kg. Untuk tahun 2018 target perikanan air payau sebesar 75.877.437 kg dengan realisasi 75.932.450 kg, sehingga di tahun 2018 mengalami penambahan sebesar 55.013 kg. target peningkatan perikanan air payau pada tahun 2020 sebesar 76.617.359 kg dengan realisasi 79.819.030 kg sehingga mengalami penambahan realisasi sebesar 3.250.530 kg. Perkembangan peningkatan perikanan air payau dari tahun 2018 – 2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Perikanan Budidaya Air Payau					
No	**Tahun**	**Target**	**Realisasi**	**Kenaikan**	**Persentase**
1.	2016	75,311,057 kg	74,884,800 kg	426.257 kg	0,57%
2.	2017	75,574,645 kg	75,719,740 kg	834.940 kg	1,11%
3.	2018	75.877.437 Kg	75.932.450 Kg	212.710 Kg	0,28%
4.	2019	76.236.179 Kg	76.568.500 Kg	636.050 Kg	0,83%
5.	2020	76.617.359 Kg	78.750.800 Kg	2.182.300 kg	2,85%

Realisasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan produksi perikanan budidaya air payau. Realisasi peningkatan perikanan air payau di tahun 2018 sebesar 0,83% (realisasi 2019 – realisasi 2018) : realisasi 2018, melebihi target yang ditetapkan sebesar 0,4% (target 2019 – target 2018) : target 2018. Realisasi peningkatan perikanan air payau di tahun 2020 sebesar 2,85% (realisasi 2020-realisasi 2019) : realisasi 2019, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 0,5% (target 2020-target 2019): target 2019.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan sudah banyak para pembudidaya yang menerapkan CBIB dan CPIB

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan hal ini dikarenakan sudah banyak para pembudidaya yang menerapkan CBIB dan CPIB adanya penyediaan sarana prasarana budidaya yang menunjang aktivitas para pembudidaya serta pengawasan pemakaian OIKB (Obat Ikan Kimia dan Biologi), Penggunaan probiotik, sebagian pembudidaya telah menerapkan Pembinaan / pelatihan dari Dinas

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 570 % dari target, hal ini diupayakan dengan :

Pemberian hibah kepada pembudidaya berupa kolam, benih, pakan dan pupuk;

Penyediaan sarana prasarana budidaya;

Pengawasan pemakaian OIKB (Obat Ikan Kimia dan Biologi);

Penerapan CBIB (Cara Budidaya Ikan Baik);

Penggunaan probiotik;

Pembinaan / pelathan terhadap pembudidaya air payau dan air tawar;

Layanan Posikandu (Pos kesehatan ikan terpadu) membantu pembudidaya dalam menangani permasalahan terhadap kesehatan ikan, pengambilan sampel residu (ikan / udang dan tanah), pelayanan vaksinasi, jasa konsultasi, maupun pusat informasi baik yang sifatnya aktif maupun pasif.

Namun demikian masih ada beberapa masalah yang masih bisa di atasi dalam rangka optimalisasi ke depan yakni

Permasalahan :

- Berdasarkan pemantauan dengan penyuluh perikanan dan penyuluh bantu masih ada Pembudidaya masih belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB .
- Persebaran serangan penyakit ikan sangat cepat dan tidak dapat diprediksi
- Belum semua pembudidaya memahami tentang penggunaan obat ikan yang dilarang
- Menurunnya kualitas air sungai sebagai sumber air kolam/tambak yang dipengaruhi oleh pencemaran limbah industry dan limbah rumah tangga
- Sarana dan prasarana budidaya kurang memadai

Dan itulah yang akan kami selesaikan dalam rangka mengatasi supaya kedepannya lebih optimal dengan solusi sebagai berikut :

1. Bekerjasama dengan penyuluh perikanan dan penyuluh bantu melalui via telepon , wa dalam rangka pendampingan ke para pembudidaya dalam penerapan CBIB
2. Melaksanakan monev rutin terkait lingkungan budidaya , serangan penyakit , control managemen kualitas air .
3. Pengawasan OIKB
4. Melanjutkan kegiatan normalisasi saluran
5. Melanjutkan pembangunan plengsengan/bronjong
6. Pemberian layanan Posikandu Layanan Posikandu (Pos kesehatan ikan terpadu) membantu pembudidaya dalam menangani permasalahan terhadap kesehatan

ikan, pengambilan sampel residu (ikan / udang dan tanah), pelayanan vaksinasi, jasa konsultasi, maupun pusat informasi baik yang sifatnya aktif maupun pasif.

c. Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang / Prawn Crackers

Produk olahan hasil perikanan sudah beragam dari yang menggunakan nama lokal dengan bentuk yang spesifik sampai yang modern dengan formulasi khusus. Peluang usaha yang semakin terbuka untuk pasar produk olahan hasil perikanan memungkinkan setiap istri pembudidaya ikan atau istri nelayan terjun langsung menjadi pengolah dan pemasar produk olahan hasil perikanan. Di Kabupaten Sidoarjo salah satu komoditi unggulan budidaya adalah udang. Komoditi udang yang melimpah mendorong pelaku utama perikanan / pengolah hasil perikanan untuk menciptakan produk olahan perikanan yang bernilai ekonomis, salah satu produk unggulan berbahan baku udang adalah Kerupuk Udang / Prawn Crackers. Selain itu produk olahan hasil perikanan yang dapat dihasilkan / diproduksi dari bahan baku udang antara lain : nugget udang, bakso udang, petis, terasi, dan lain – lain Oleh karena itu udang menjadi salah satu indikator strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo

GRAFIK

NILAI TAMBAH PRODUKSI OLAHAN HASIL PERIKANAN KERUPUK UDANG

Nilai tambah (value added) merupakan pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Dalam proses pengolahan nilai tambah dapat didefinisikan sebagai

selisih antara nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan input lainnya termasuk tenaga kerja. Realisasi Nilai tambah produksi olahan hasil perikanan yang berupa krupuk udang tahun 2019 sebesar Rp. 62.500/kg dengan target sebesar Rp. 60.000/kg. Sedangkan di tahun 2018 realisasi nilai tambah produksi olahan hasil perikanan krupuk udang sebesar Rp. 60.000/kg dengan target sebesar Rp. 58.000/kg. Realisasi nilai tambah produksi olahan hasil perikanan kerupuk udang dari tahun 2018 – 2019 mengalami peningkatan, dapat dilihat dari tabel berikut ini

	Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang					
No	**Tahun**	**Target (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Kenaikan (Rp)**	**Penurunan**	**Persentase**
1.	2016	53.000 / kg	55.000 / Kg	2.000 / Kg		3,77%
2.	2017	56.000 / kg	58.000 / Kg	3.000 / Kg		5,45%
3.	2018	58.000 / Kg	60.000 / Kg	2.000 / Kg		3,44%
4.	2019	60.000 / Kg	62.500 / Kg	2.500 / Kg		4,16%
5.	2020	60.500/ Kg	60.000/Kg	-	2.500/ Kg	4%

Realisasi dari tahun 2018 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatannilai tambah produksi hasil olahan perikanan krupuk udang , sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan nilai tambah produksi olahan hasil perikanan kerupuk udang sebesar 2.500 /kg dibandingkan Realisasi nilai tambah produksi olahan hasil perikanan kerupuk udang di tahun 2019 sebesar 4,16% (realisasi 2019 – realisasi 2018) : realisasi 2018, melebihi target yang ditetapkan sebesar 0,034% (target 2019 – target 2018) : target 2018.hal tersebut dikarenakan adanya wabah pandemic covid dan PSBB yang berdampak pada jumlah produksi yang dihasilkan dan penjualan produk olahan hasil perikanan , pada masa pandemic covid -19 dan PSBB acara-acara ditiadakan kegiatan-kegiatan seremonial juga ditiadakan sehingga tidak ada pesanan/ tidak berproduksi, berproduksi jika ada pesanan yang mengakibatkan produksi olahan hasil perikanan turun dan omset turun.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 menurun dari target, hal ini dikarenakan pandemic covid-19 , yang mempengaruhi produksinya Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya wabah pandemic covid dan PSBB yang berdampak pada jumlah produksi yang dihasilkan dan

penjualan produk olahan hasil perikanan , pada masa pandemic covid -19 dan PSBB acara-acara ditiadakan kegiatan-kegiatan seremonial juga ditiadakan sehingga tidak ada pesanan/ tidak berproduksi, berproduksi jika ada pesanan yang mengakibatkan produksi olahan hasil perikanan turun dan omset turun.

Untuk produksi olahan hasil perikanan tahun 2020 mengalami penurunan dari target 2020 hal tersebut dikarenakan adanya wabah pandemic covid dan PSBB yang berdampak pada jumlah produksi yang dihasilkan dan penjualan produk olahan hasil perikanan , pada masa pandemic covid -19 dan PSBB acara-acara ditiadakan kegiatan-kegiatan seremonial juga ditiadakan sehingga tidak ada pesanan/ tidak berproduksi, berproduksi jika ada pesanan yang mengakibatkan produksi olahan hasil perikanan turun dan omset turun.

Berikut ini adalah rekapitulasi jumlah produksi olahan hasil perikanan yang diperoleh dari data rill berdasarkan monevdari lapangan dan merupakan data produksi olahan ikan :

REKAP DATA JUMLAH PRODUKSI OLAHAN HASIL PERIKANAN TAHUN 2020

NO	PRODUK OLAHAN HASIL PERIKANAN	TARGET	REALISASI			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Bandeng asap	9.500.000 kg	20.750	14.300	12.150	9.650
	Kerupuk ikan		190.100	175.600	153.700	105.700
	Kerupuk udang		250.900	230.000	223.125	119.100
	Nugget		5.270	4.250	3.000	3.000
	Bakso ikan		4.750	4.200	3.250	3.250
	Siomay ikan		3.700	3.900	2.750	2.600
	Bandeng presto		50.200	48.900	42.120	39.000
	Otak-otak ikan		43.150	39.500	35.250	29.200
	Bandeng crispy		35.500	22.000	12.000	10.500
	Dll(ikan asap ikan asin kerupuk kupang, terasi, petis sambal iksan/ udang, keripik ikan kerpik kulit ikan olahan ikan lainnya		2.016.191	1.733.250	1.322.855	1.593.300
	TOTAL		2.620.511	2.275.900	1.810.200	1.915.300
	TOTAL KESELURUHAN	8.621.911				

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 99,17% dari target, hal ini diupayakan dengan :

- Perlu pendampingan yang lebih intensif pada pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam kegiatan penanganan hasil perikanan.
- Mengusulkan penambahan anggaran untuk Memberikan bantuan bagi pengolah dan pemasar yang benar-benar terdampak covid-19.serta memberikan Pendampingan kepada para pengolah dan pemasar mensupport mereka agar tidak menyerah dengan kondisi ini dan tetap semangat berinovasi dan meningkatkan produksinya
- Pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat dan POKLAHSAR (kelompok pengolah dan pemasar);
- Menjaga Keamanan Produk Olahan Perikanan;
- Menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder;
- Temu bisnis antar pelaku usaha perikanan

d. Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap / Smoke Milkfish

Peluang usaha yang semakin terbuka untuk pasar produk olahan hasil perikanan memungkinkan setiap istri pembudidaya ikan atau nelayan terjun langsung menjadi pengolah dan pemasar produk olahan hasil perikanan. Di Kabupaten Sidoarjo selain memiliki komoditi unggulan yaitu Udang, juga terdapat komoditi produk unggulan berupa Bandeng. Produk olahan hasil perikanan unggulan berbahan baku bandeng yaitu bandeng asap, selain itu bandeng dapat diolah menjadi produk olahan hasil perikanan lainnya yaitu : otak – otak, bandeng presto, bandeng tanpa duri, siomay bandeng, nugget bandeng, bandeng tanpa duri frozen, bandeng sapit, bandeng bakar dan lain – lain. Di Kabupaten Sidoarjo hasil olahan perikanan yang menjadi produk unggulan adalah krupuk udang dan bandeng asap, krupuk udang Sidoarjo rasanya gurih dan tidak berbau karena bahannya dari udang segar dengan sentra produksi di wilayah Sidoarjo, Buduran, Candi.

GRAFIK

NILAI TAMBAH PRODUKSI OLAHAN HASIL PERIKANAN BANDENG ASAP

Nilai tambah (value added) merupakan pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Dalam proses pengolahan nilai tambah dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan input lainnya termasuk tenaga kerja. Realisasi Nilai tambah produksi olahan hasil perikanan yang berupa bandeng asap tahun 2019 sebesar Rp. 132.500/kg dengan target Rp. 128.000/kg. Sedangkan di tahun 2018 realisasi nilai tambah produksi hasil olahan perikanan bandeng asap sebesar Rp. 130.000/kg dengan target sebesar Rp. 125.000/kg. Realisasi nilai tambah produksi olahan hasil perikanan bandeng asap dari tahun 2018 – 2020 mengalami peningkatan, dapat dilihat dari tabel berikut ini

	Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap					
No	Tahun	Target	Realisasi	Kenaikan	Penurunan	Persentase
1.	2016	120.000/ kg	123.000/ Kg	3.000/ Kg		2,5%
2.	2017	123.000/ kg	125.000/ Kg	5.000/ Kg		4,06%
3.	2018	125.000 /Kg	130.000/ Kg	5.000/ Kg		4%
4.	2019	128.000 /Kg	132.500/ Kg	2.500/ Kg		1,92%
5	2020	127.500/ Kg	127.000/ Kg	-	5.500 /Kg	4,15%

Realisasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan nilai tambah produksi olahan hasil perikanan bandeng asap . Realisasi nilai tambah produksi hasil olahan perikanan Bandeng Asap tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5.500/ Kg bila dibandingkan Realisasi nilai tambah produksi hasil olahan perikanan kerupuk udang di tahun 2019 sebesar 1,92% (realisasi 2019 – realisasi 2018) : realisasi 2018, melebihi target yang ditetapkan sebesar 0,024% (target 2019 – target 2018) : target 2018.hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 ada peristiwa pandemic covid-19 yang mempengaruhi produksinya

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 menurun dari target, hal ini dikarenakan pandemic covid-19 , yang mempengaruhi produksinya Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya wabah pandemic covid dan PSBB yang berdampak pada jumlah produksi yang dihasilkan dan penjualan produk olahan hasil perikanan , pada masa pandemic covid -19 dan PSBB acara-acara ditiadakan kegiatan-kegiatan seremonial juga ditiadakan sehingga tidak ada pesanan/ tidak berproduksi, berproduksi jika ada pesanan yang mengakibatkan produksi olahan hasil perikanan turun dan omset turun.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 99,61% dari target, hal ini diupayakan dengan :

- Perlu pendampingan yang lebih intensif pada pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam kegiatan penanganan hasil perikanan.
- Mengusulkan penambahan anggaran untuk Memberikan bantuan bagi pengolah dan pemasar yang benar-benar terdampak covid-19.serta memberikan Pendampingan kepada para pengolah dan pemasar mensupport mereka agar tidak menyerah dengan kondisi ini dan tetap semangat berinovasi dan meningkatkan produksinya
- Pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat dan POKLAHSAR (kelompok pengolah dan pemasar);
- Menjaga Keamanan Produk Olahan Perikanan;
- Menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder;
- Temu bisnis antar pelaku usaha perikana

Namun demikian masih ada beberapa masalah yang masih bisa di atasi dalam rangka optimalisasi ke depan yakni

Permasalahan :

- Penanganan pasca hasil perikanan masih banyak yang tradisional belum sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) dan GMP (Good Manufacturing Product).
- Dikarenakan pandemic covid-19 dan PSBB para pengolah berproduksi jika ada pesanan jika tidak ada pesanan tidak berproduksi akibatnya omset menjadi turun

Dan itulah yang akan kami selesaikan dalam rangka mengatasi supaya kedepannya lebih optimal dengan solusi:

- Perlu pendampingan yang lebih intensif pada pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam kegiatan penanganan hasil perikanan.
- Mengusulkan penambahan anggaran untuk Memberikan bantuan bagi pengolah dan pemasar yang benar-benar terdampak covid-19.serta memberikan Pendampingan kepada para pengolah dan pemasar mensupport mereka agar tidak menyerah dengan kondisi ini dan tetap semangat berinovasi dan meningkatkan produksinya
- Pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat dan POKLAHSAR (kelompok pengolah dan pemasar);
- Menjaga Keamanan Produk Olahan Perikanan;
- Menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder;
- Temu bisnis antar pelaku usaha perikanan.

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo yakni meningkatnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah sesuai dengan yang diharapkan maka perlu didukung 3 program dan 10 kegiatan yakni sebagai berikut :

c. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dengan anggaran sebesar Rp. 36.890.147.856 dan terealisasi sebesar Rp. 35.975.060.427 ,- atau 97,52%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Produktivitas Perikanan Budidaya Bandeng			
Bandeng	2,240,54 kg/ha/th	2.250,01 kg/ha/th	100,42%
Udang	334,80 kg/ha/th	335,41 kg/ha/th	100,18%
Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1,4%	8,8%	628,5%

Berdasarkan tabel diatas bahwa indikator kinerja produktivitas perikanan budidaya komoditi bandeng dengan target 2,240,54 kg/ha/th terealisasi 2,250,01 kg/ha/th persentase capaian kinerja sebesar 100,42% , untuk komoditi udang dengan target 334,40 kg/ha/th terealisasi 335,41 kg/ha/th persentase capaian kinerja 100,18%

Namun demikian masih ada beberapa masalah yang masih bisa di atasi dalam rangka optimalisasi ke depan yakni

Permasalahan :

- Berdasarkan pemantauan dengan penyuluh perikanan dan penyuluh bantu masih ada Pembudidaya masih belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB .
- Persebaran serangan penyakit ikan sangat cepat dan tidak dapat diprediksi
- Belum semua pembudidaya memahami tentang penggunaan obat ikan yang dilarang
- Menurunnya kualitas air sungai sebagai sumber air kolam/tambak yang dipengaruhi oleh pencemaran limbah industry dan limbah rumah tangga
- Sarana dan prasarana budidaya kurang memadai

Dan itulah yang akan kami selesaikan dalam rangka mengatasi supaya kedepannya lebih optimal dengan solusi sebagai berikut :

1. Bekerjasama dengan penyuluh perikanan dan penyuluh bantu melalui via telepon , wa dalam rangka pendampingan ke para pembudidaya dalam penerapan CBIB
2. Melaksanakan monev rutin terkait lingkungan budidaya , serangan penyakit , control managemen kualitas air .
3. Pengawasan OIKB
4. Melanjutkan kegiatan normalisasi saluran
5. Melanjutkan pembangunan plengsengan/bronjong
6. Pemberian layanan Posikandu Layanan Posikandu (Pos kesehatan ikan terpadu) membantu pembudidaya dalam menangani permasalahan terhadap kesehatan ikan, pengambilan sampel residu (ikan / udang dan tanah), pelayanan vaksinasi, jasa konsultasi, maupun pusat informasi baik yang sifatnya aktif maupun pasif.

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pembinaan dan percontohan budidaya10	jumlah kelompok pembudidaya ikan yang menerapkan hasil pelatihan	25 kelompok	32 kelompok	
	Jumlah pembudidaya yang bersertifikat CBIB dan CPIB	25 orang	25 orang	100
Pengadaan sarpras budidaya dan pemasaran perikanan	Jumlah hasil tambak yang dijual di depo			
	Bandeng	3.611.107,5 kg	3.968.705 kg	109,9
	Udang	180. 144 kg	163.250 kg	90,62
	Jumlah benih yang ditebar sesuai kapasitas			
	Benur	300.120..000 ekor	302.530.000 ekor	100,80
	Nener	75.345.000 ekor	76.086.250 ekor	100,98
	Nila	75.623.738 ekor	79.605.934,1 ekor	105,26
	Jumlah sarana dan prasarana budidaya	30 paket	175 paket	583,3
	Jumlah sarana dan prasarana pemasaran	11 paket	44 paket	400
Fasilitasi BBI dan Tambak Dinas	Jumlah penjualan benih yang dihasilkan oleh	150.000 ekor	169.500 ekor	84,33

	BBI			
	Jumlah penjualan ikan yang dihasilkan oleh Tambak Dinas			
	Bandeng	9.250 kg	8989 kg	97,17
	Udang	700 kg	602 kg	86
Peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya	Prosentase sampel ikan yang lolos uji residu	100%	100%	100
	Jumlah jenis serangan penyakit pada ikan	5 jenis	5 jenis	100
	Jumlah sampel air tambak/ kolam yang memenuhi standar kualitas air budidaya	120 sampel	120 sampel	100

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pembinaan dan percontohan budidaya ikan	454.992.738	434.902.700	95,58
Pengadaan sarana dan prasarana budidaya dan pemasaran perikanan	35.289.040.718	34.437.795.511	97,59
Fasilitas Balai Benih Ikan (BBI) dan Tambak Dinas	915.335.600	882.902.320	96,46
Peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya	230.778.800	219.459.896	95,10

d. Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Garam dengan anggaran sebesar Rp. 324.106.180,- dan terealisasi sebesar Rp. 307.030.422 ,- atau 94,73%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Jumlah produksi perikanan tangkap laut	15.600.000 kg	15.540.300 kg	99,61
Jumlah produksi perikanan perairan umum daratan (PUD)	550.000 kg	553.200 kg	100,58

Namun demikian masih ada beberapa masalah yang masih bisa di atasi dalam rangka optimalisasi ke depan yakni

Permasalahan :

- Nelayan melakukan penangkapan ikan waktunya tidak sama sehingga proses pendataan hasil tangkapan nelayan tidak dapat dilakukan secara maksimal
- Masih adanya nelayan menggunakan alat tangkap yang dilarang
- Adanya sarana prasarana perikanan tangkap yg rusak dapat mengganggu aktivitas nelayan

Dan itulah yang akan kami selesaikan dalam rangka mengatasi supaya kedepannya lebih optimal dengan solusi sebagai berikut :

- Melaksanakan pendataan hasil tangkap yang disesuaikan waktunya dengan datangnya nelayan dari laut serta memberikan logbook kepada nelayan agar selalu mencatat hasil tangkapannya didampingi penyuluh selain itu pendaatan statistic perikanan tangkap juga dilakukan melalui via whattshapp, telepon maupun fasilitas daring.
- Memasang papan larangan menangkap ikan yang dilarang di wilayah yang rawan penangkapan ikan serta melakukan pengawasan lingkungan perairan secara rutin / patroli.
- Diusulkan anggaran untuk dilakukan perbaikan sarana prasarana perikanan tangkap supaya lebih memahami permasalahan nelayan dan memotivasi mereka serta memberikan wawasan atau ketrampilan baru yang bisa menambah penghasilan

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pemberdayaan kelompok nelayan , petambak garam dan masyarakat pengawas	Jumlah nelayan yang menerapkan hasil pelatihan	25 orang	25 orang	100%
	Jumlah petambak garam yang menerapkan hasil pelatihan	15 orang	15 orang	100%
	Jumlah masyarakat pengawas yang menerapkan hasil pelatihan	15 orang	15 orang	100%

Pengawasan dan pengelolaan sumberdaya perairan	Jumlah operasi pengawasan yang dilakukan	6 kali	6 kali	100%
	Jumlah bibit ikan yang ditebar	600.000 ekor	505.000 ekor	84,16%
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana perikanan tangkap yang diadakan dan dipelihara	2 unit	2 unit	100%
	Jumlah prasarana perikanan tangkap yang dibangun dan dipelihara	10 unit	10 unit	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pemberdayaan kelompok nelayan, petambak garam dan masyarakat pengawas	93.464.580	91.404.580	97,80
Pengawasan dan pengelolaan sumberdaya perairan	206.335.600	191.319.842	92,72
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	24.306.000	24.306.000	0,00

Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan anggaran sebesar Rp.564.600.075,- dan terealisasi sebesar Rp. 546.980.889 ,- atau 96,88%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Jumlah produksi olahan hasil perikanan	9.500.000 kg	8.621.912 kg	90,75

Jumlah kelompok pengolah dan pemasar yang mempunyai sertifikasi jaminan mutu	0 SKP	1 SKP	100

Namun demikian masih ada beberapa masalah yang masih bisa di atasi dalam rangka optimalisasi ke depan yakni

Permasalahan :

- Penanganan pasca hasil perikanan masih banyak yang tradisional belum sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) dan GMP (Good Manufacturing Product).
- Dikarenakan pandemic covid-19 dan PSBB para pengolah berproduksi jika ada pesanan jika tidak ada pesanan tidak berproduksi akibatnya omset menjadi turun

Dan itulah yang akan kami selesaikan dalam rangka mengatasi supaya kedepannya lebih optimal dengan solusi sebagai berikut

- Perlu pendampingan yang lebih intensif pada pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam kegiatan penanganan hasil perikanan.
- Mengusulkan penambahan anggaran untuk Memberikan bantuan bagi pengolah dan pemasar yang benar-benar terdampak covid-19.serta memberikan Pendampingan kepada para pengolah dan pemasar mensupport mereka agar tidak menyerah dengan kondisi ini dan tetap semangat berinovasi dan meningkatkan produksinya
- Pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat dan POKLAHSAR (kelompok pengolah dan pemasar);
- Menjaga Keamanan Produk Olahan Perikanan;
- Menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder;
- Temu bisnis antar pelaku usaha perikana

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pembinaan mutu dan diversifikasi produk perikanan	Jumlah diversifikasi olahan ikan yang dihasilkan	2 olahan hasil perikanan	2 olahan hasil perikanan	100%
	Jumlah olahan ikan yang memenuhi jaminan mutu	8 jenis olahan	6 jenis olahan	75%
Pelayanan usaha dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan yang terlayani	150 pelaku usaha	181 pelaku usaha	120,67
	Jumlah fasilitasi pemasaran hasil perikanan yang dilakukan	3 Kali	3 Kali	100%
	Jumlah bandeng kawak dengan berat > 5 kg	0	0	0
Pengelolaan Depo Ikan	Jumlah Ikan yang terjual	6.500.000 kg	6.592.680 kg	101,42

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pembinaan mutu dan diversifikasi produk perikanan	69.352.600	68.140.864	98,25
Pelayanan usaha dan pemasaran hasil perikanan	266.524.200	257.179.200	96,49
Pengelolaan Depo Ikan	228.723.275	221.660.825	96,91

Urusan Pertanian

Urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	1. padi	2.059.105,9	2.044.800	99,3%	2.059.312	1.982.761	96%	1.974.382	1.944.938	98,51%
	2. jagung	11.789,20	12.905	109,5%	11.790	21.475	182%	11.792	25.848	219,20%
	3. kacang hijau	15.705,60	21.455	136,6%	15.707	26.912	171%	10.742	14.341	133,50%
	4. kedelai	9.717,00	6.020	62,0%	9.718	6.157	63%	1.703	1.713	100,59%
	5. sawi	52.025,20	70.194	134,9%	52.030	73.379	141%	52.036	62.334	119,79%
	6. bayam	42.576,30	40.588	95,3%	42.576,30	51.619	121%	42.585	43.792	102,83%
	7. kangkung	43.321,30	46.809	108,1%	43.581	54.184	124%	43.330	50.392	116,30%
	8. tebu	2.946.093,6	3.257.662	110,6%	2.946.388	3.508.624	119%	2.946.683	3.233.461	109,73%
	9. daging	23.890.560	27.640.811	115,7%	24.129.466	29.611.672	123%	24.370.760	35.351.442	145,06%
	10. telur	2.634.085	2.647.150	100,5%	2.660.426	2.699.702	101%	2.687.030	2.729.155	101,57%
	11. susu	7.822.911	8.267.863	105,7%	7.901.140	9.754.309	123%	7.980.151	11.325.983	141,93%

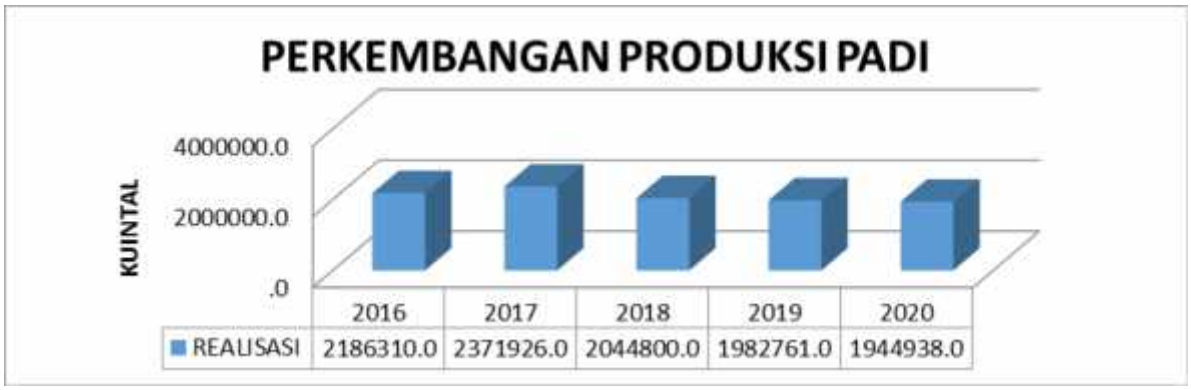
PERKEMBANGAN PRODUKSI PADI
KUINTAL
4000000.0
2000000.0
.0
2016 2017 2018 2019 2020
REALISASI 2186310.0 2371926.0 2044800.0 1982761.0 1944938.0

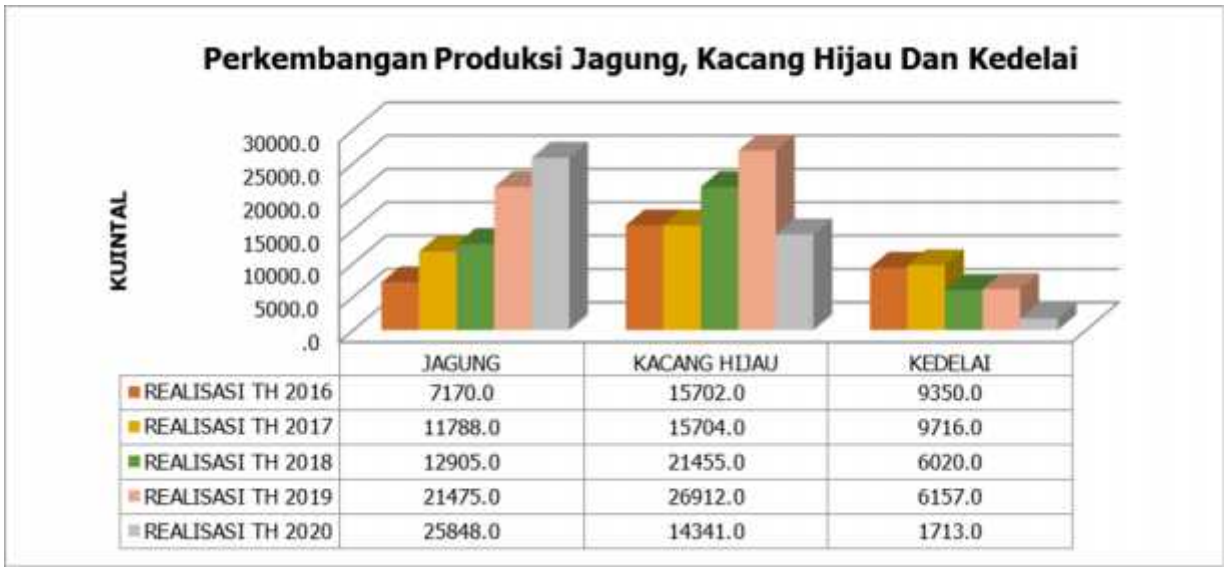
Perkembangan Produksi Jagung, Kacang Hijau Dan Kedelai
KUINTAL
30000.0
25000.0
20000.0
15000.0
10000.0
5000.0
.0
JAGUNG KACANG HIJAU KEDELAI
REALISASI TH 2016 7170.0 15702.0 9350.0
REALISASI TH 2017 11788.0 15704.0 9716.0
REALISASI TH 2018 12905.0 21455.0 6020.0
REALISASI TH 2019 21475.0 26912.0 6157.0
REALISASI TH 2020 25848.0 14341.0 1713.0

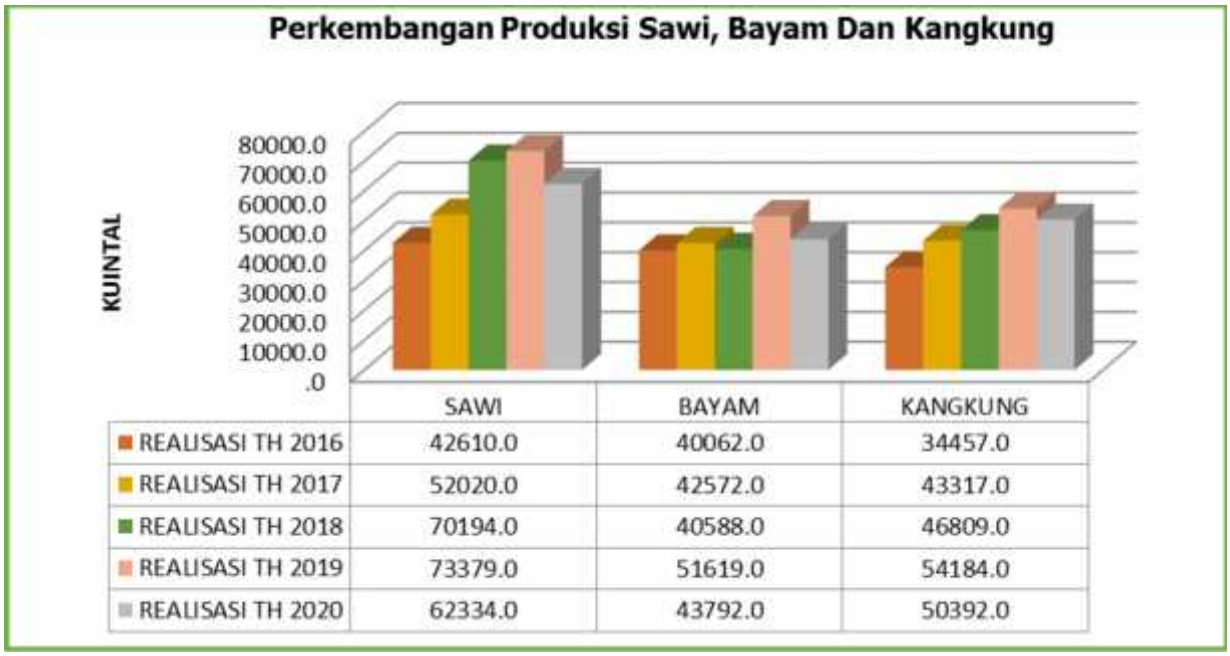
Perkembangan Produksi Sawi, Bayam Dan Kangkung
KUINTAL
80000.0
70000.0
60000.0
50000.0
40000.0
30000.0
20000.0
10000.0
.0
SAWI BAYAM KANGKUNG
REALISASI TH 2016 42610.0 40062.0 34457.0
REALISASI TH 2017 52020.0 42572.0 43317.0
REALISASI TH 2018 70194.0 40588.0 46809.0
REALISASI TH 2019 73379.0 51619.0 54184.0
REALISASI TH 2020 62334.0 43792.0 50392.0

Pada tahun 2020 kita mengetahui bersama terdapat masa pandemi Covid 19 sehingga terjadi refocusing anggaran terhadap seluruh OPD di Kabupaten Sidoarjo, demikian pula Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2020 total anggaran awal dinas sebesar Rp. 19.747.981.000,00 telah direfocusing sebesar Rp.2.923.779.215,00 menjadi Rp. 16.824.201.785,00. Hal ini berpengaruh pada penurunan target produksi pertanian.

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa produksi tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2020 rata-rata mengalami penurunan, hal ini karena musim hujan dan kemarau yang tidak dapat diprediksi sehingga mengakibatkan perubahan tata tanam dan pola tanam, yang mana biasanya pertanaman padi selesai bulan Desember tetapi mundur sampai bulan Januari sampai Februari hal ini berakibat pada pertanaman padi berikutnya terjadi pada musim kemarau yang mana terjadi kekurangan air dan terjadi serangan OPT yang cukup tinggi. Perubahan pola tanam tersebut juga berakibat pada pertanaman komoditas lain.

Komoditas jagung mengalami kenaikan sebesar 20,4 % atau sebanyak 4.373 Kw dari 21.475 kw menjadi 25.848 kw, hal ini disebabkan bertambahnya luas panen karena adanya peralihan tanam dari semula padi menjadi jagung. Selain itu, tahun 2020 banyak komoditas jagung yang dipanen dengan kondisi panen tua (bentuk pipilan) bukan jagung untuk konsumsi sayur. Dukungan yang diperoleh dari kegiatan APBN berupa bantuan benih unggul juga memberikan pengaruh peningkatan produksi tersebut. Apabila dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan pada tahun 2020 produksi jagung sudah mencapai target yang ditentukan.

Komoditas padi mengalami penurunan sebesar 37.823 kw atau 1,9% dari 1.982.761,00 Kw menjadi 1.944.938,00 Kw, hal ini disebabkan oleh luas lahan yang menurun, ketersediaan air yang kurang sehingga petani tidak bisa tanam padi, serta adanya serangan OPT yang menyebabkan puso atau gagal panen. Penurunan yang paling signifikan terjadi pada komoditas kedelai sebesar 72,2% atau sebanyak 4.444 Kw dari 6.157 Kw menjadi

1.713 Kw. Hal ini disebabkan banyak petani yang beralih menanam dari komoditas kedelai menjadi kacang hijau. Harga kedelai yang rendah dan pemeliharaan yang sulit disaat kondisi cuaca yang terjadi pada tahun 2020, menyebabkan petani beralih menanam kacang hijau.

Perkembangan produksi hortikultura pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat pada produksi sayuran sawi yang mengalami penurunan sebesar 15,1% dibanding tahun 2019 yaitu sekitar 11.045 kw. Produksi sayuran bayam tahun 2020 menurun sebesar 15,2% dibandingkan tahun 2019 yaitu sekitar 7.827 kw. Sedangkan pada sayuran kangkung menurun sebesar 7 % dibandingkan tahun 2019 yaitu sekitar 3.792 kw. Penurunan produksi tersebut selain karena kondisi iklim tahun 2020 yang kurang mendukung dan berkurangnya ketersediaan air di pertengahan tahun sehingga beberapa kecamatan tidak lagi menanam sayuran dan beralih ke palawija seperti kacang hijau dan hortikultura lainnya.

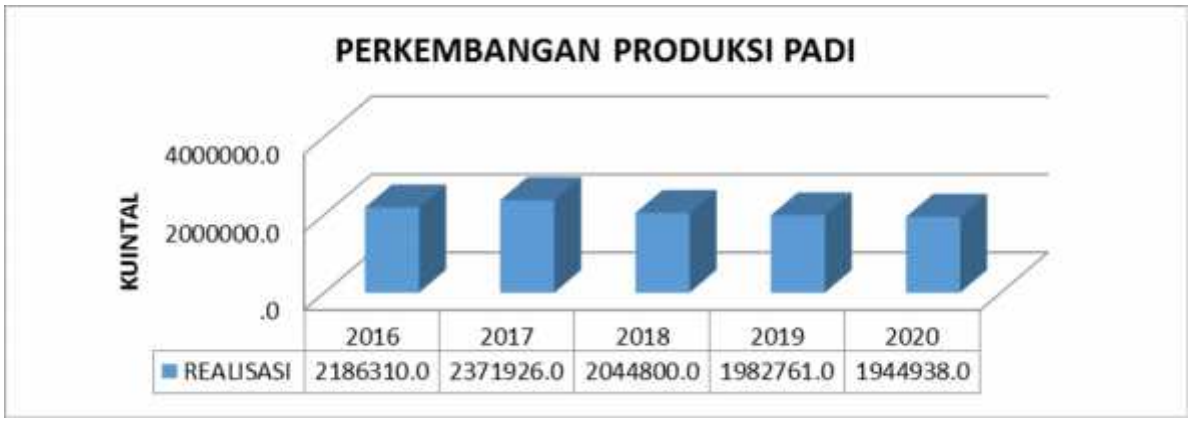

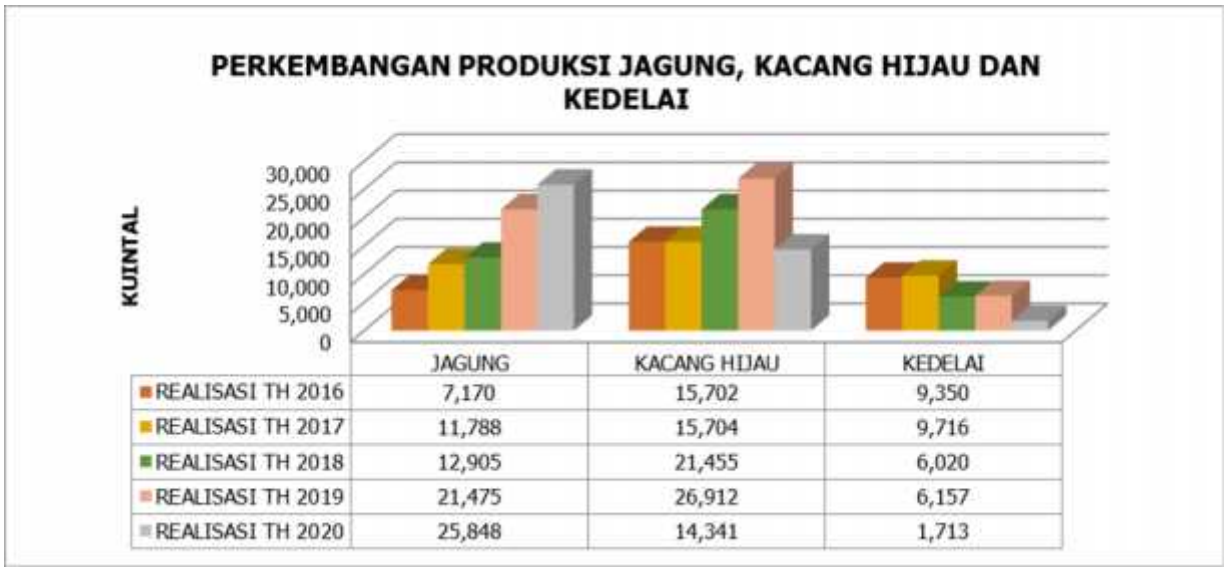
PERKEMBANGAN PRODUKSI JAGUNG, KACANG HIJAU DAN KEDELAI
KUINTAL
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
JAGUNG
KACANG HIJAU
KEDELAI
REALISASI TH 2016 7,170 15,702 9,350
REALISASI TH 2017 11,788 15,704 9,716
REALISASI TH 2018 12,905 21,455 6,020
REALISASI TH 2019 21,475 26,912 6,157
REALISASI TH 2020 25,848 14,341 1,713

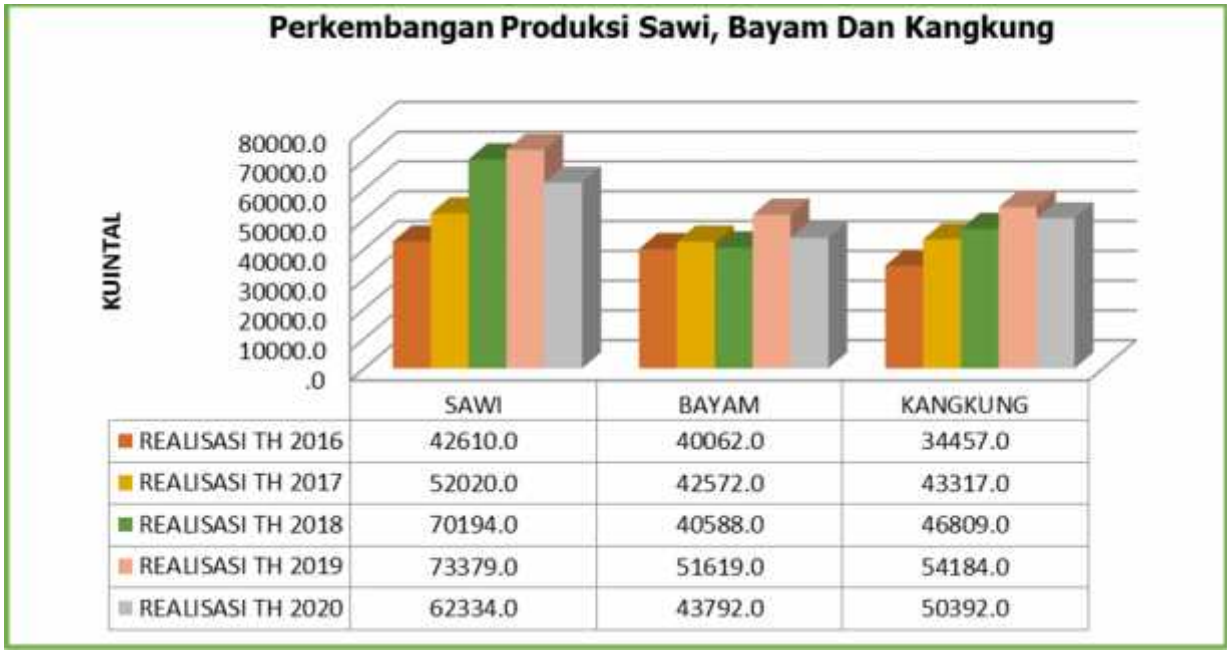
Perkembangan Produksi Sawi, Bayam Dan Kangkung
KUINTAL
80000.0
70000.0
60000.0
50000.0
40000.0
30000.0
20000.0
10000.0
.0
SAWI
BAYAM
KANGKUNG
REALISASI TH 2016 42610.0 40062.0 34457.0
REALISASI TH 2017 52020.0 42572.0 43317.0
REALISASI TH 2018 70194.0 40588.0 46809.0
REALISASI TH 2019 73379.0 51619.0 54184.0
REALISASI TH 2020 62334.0 43792.0 50392.0

GRAFIK PERKEMBANGAN PRODUKSI TEBU

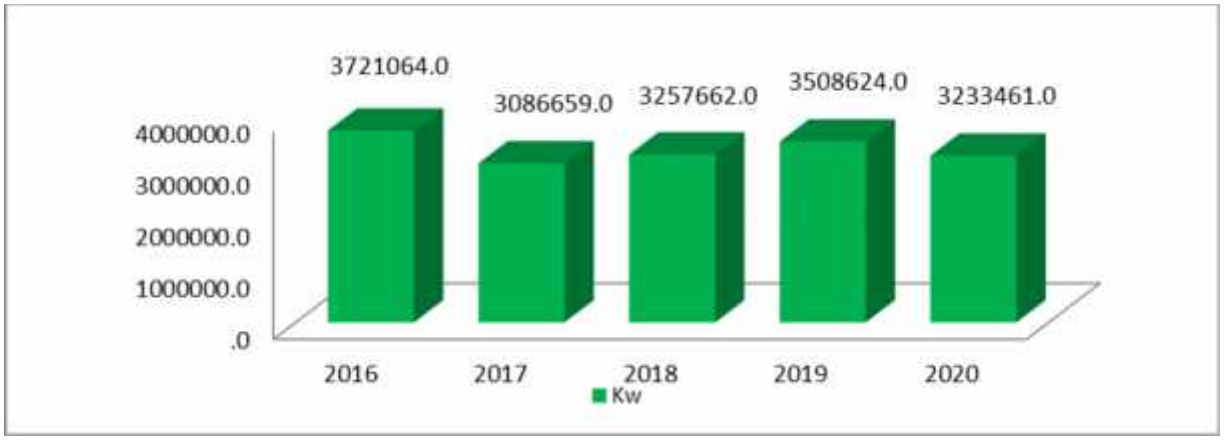

Perkembangan produksi perkebunan yaitu tanaman tebu pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebanyak 275.163 kw atau 7,8% . hal ini disebabkan karena banyak terjadi serangan tikus sehingga produksinya tidak dapat maksimal meskipun luas areal tanam bertambah seluas 19 ha dari 4.737 ha menjadi 4.746 ha.

Perkembangan produksi daging dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Produksi daging tahun 2020 sebesar 35.351.442 kg. Apabila dibandingkan dengan produksi tahun 2019 terjadi peningkatan produksi sebesar 19,4% atau 5.739.770 Kg. Hal ini disebabkan karena operasional

Rumah Potong Unggas (RPU) sehingga jumlah pemotongan ayam meningkat

Tabel. Realisasi Produksi Daging Tahun 2019 dan 2020

No	Jenis Ternak	Produksi Daging (Kg)		Pertumb.
		Tahun 2019	Tahun 2020	(%)
1	Sapi Potong	9.074.047	8.098.552	(11)
2	Kambing	3.382.714	2.954.436	(13)
3	Domba	29.016	29.328	1
4	Ayam Buras	2.829.286	2.827.540	(0)
5	Ayam Ras Petelur	361	110	(70)
6	Ayam Ras Pedaging	13.696.676	20.834.844	52
7	Itik	503.983	511.017	1
8	Entok	95.590	95.495	(0)
		29.611.672	35.351.322	

Ket : Pertumbuhan ( ) --> berarti minus dibandingkan tahun 2019
Sumber data : laporan petugas di lapang

Produksi daging sapi potong dan kambing menurun dari tahun sebelumnya karena adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan alur distribusi tidak optimal serta menurunya daya beli masyarakat sehingga terjadi kecenderungan beralih konsumsi ke daging ayam ras pedaging.

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

Produksi telur pada tahun 2020 sebesar 2.729.155 Kg, apabila dibandingkan dengan produksi telur 2019 sebesar 2.699.702 Kg terdapat peningkatan sebesar 29.453 kg atau 1,1%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan populasi ternak ayam ras petelur sebesar 2% atau sebanyak 1.033 ekor dari 49.272 ekor menjadi 50.305 ekor.

Perkembangan produksi susu dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

Produksi susu pada tahun 2020 sebanyak 11.325.983 liter, apabila dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebanyak 9.754.309 liter terdapat peningkatan sekitar 1.571.674 liter atau 16,1%. Produksi susu meningkat dan mencapai target dikarenakan adanya kontrol veteriner terhadap kewaspadaan penyakit hewan menular (lalu lintas hewan, mutu hasil produksi susu secara laboratorium dan biosecurty), Optimalisasi fungsi Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) yang sudah tersebar di 4 (empat) Kecamatan yaitu Porong, Krian, Taman dan Tarik

Dengan adanya program Gangrep (Gangguan Reproduksi) dan SIKOMANDAN (Sapi kerbau komoditas Andalan) sehingga sapi sehat, diinseminasi dan bunting kemudian beranak sehingga produksi susu juga meningkat. Selain itu melakukan perbaikan gizi pakan melalui pembinaan pembuatan pakan ternak secara sederhana sehingga mudah dilaksanakan.

Perkembangan produksi susu dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

b. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp.894.570.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.793.369.984,00 atau 88,69%

Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Persentase
Prosentase peningkatan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	0,10%	0,19%	190%

Produktifitas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Nama Komoditas	Produktivitas Tahun 2019 (Kw/Ha)	Produktivitas Tahun 2020 (Kw/Ha)	Selisih	%
1	2	3	4= 3-2	4/2 x 100%
Tanaman Pangan meliputi :				
1. padi	68,9	68,79	-0,11	-0,2%
2. jagung	66,9	82,85	15,95	23,8%
3. kacang hijau	14,7	18,96	4,26	29,0%
4. kedelai	17,1	16,47	-0,63	-3,7%
Hortikultura meliputi :				
1. sawi	101,07	105,12	4,04	4,0%
2. bayam	88,09	91,23	3,15	3,6%
3. kangkung	63,67	61,30	-2,37	-3,7%

Produktivitas tanaman pangan meliputi padi, jagung, kacang hijau dan kedelai. Produktivitas Padi dan kedelai mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya karena adanya serangan OPT yang menyebabkan puso atau gagal panen. Produktivitas hortikultura meliputi sawi, bayam dan kangkung. Produktivitas kangkung menurun karena kondisi iklim tahun 2020 yang kurang mendukung dan berkurangnya ketersediaan air di pertengahan tahun sehingga produktivitasnya kurang maksimal.

Untuk mengoptimalkan kinerja ke depannya akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengendalian OPT pada tanaman pangan maupun tanaman tebu secara swadaya oleh kelompok dengan didampingi oleh petugas pertanian (Penyuluh, mantri pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian.
2. Memberikan bantuan obat secara stimulan sesuai jenis serangan yang terjadi di lapangan.
3. Petugas pertanian di lapang melakukan pemantauan secara intensif, melaporkan kondisi puso serta mengamankan pertanaman padi lain di sekitar areal puso.

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan yaitu :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Pengembangan teknologi budidaya/bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura	Persentase lahan yang menggunakan bibit unggul	62%	62%	100	Rp 271.898.600	Rp 255.557.100	93,99
		Persentase luas areal tanam yang menggunakan teknologi tepat guna	66%	66%	100			
2	Penyusunan areal tanam dan penanganan pasca panen	Jumlah ubinan yang dilaksanakan	60 lokasi	60 lokasi	100	Rp 31.445.000	Rp 29.675.400	94,37
		Jumlah laporan data statistik pertanian	17 buah	17 buah	100			
		Prosentase menurunnya tingkat kehilangan hasil tanaman pangan	12,7%	12,7%	100			

3	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Prosentase lahan yang terkendali dari serangan hama dan penyakit pada tanaman pangan dan hortikultura	14%	19,15%	137	Rp 299.072.800	Rp 256.197.984	85,66
		Prosentase lahan tanaman yang terkendali dari serangan hama dan penyakit pada perkebunan	17%	32,54%	191,42			
4	Peningkatan produksi perkebunan	Persentase lahan yang menerapkan teknologi perkebunan tepat guna	27%	27%	100	Rp 292.154.000	Rp 251.939.500	86,24
		Prosentase lahan yang menggunakan bibit unggul	20%	23,63%	118			

Capaian indikator kinerja Prosentase lahan tanaman yang terkendali dari serangan hama dan penyakit pada perkebunan pada kegiatan Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) sebesar 89,47% hal ini dikarenakan banyaknya serangan OPT tikus.

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan dan Pemberdayaan Penyuluhan dengan anggaran sebesar Rp.2.676.703.940,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.266.062.651,00 atau 84,66%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Persentase
Prosentase kelompok tani yang naik kelas	2,3%	2,3%	100
Prosentase peningkatan kecukupan pemanfaatan sarana prasarana pertanian dan perkebunan	0%	1%	0

Jumlah Kelompok tani di kabupaten sidoarjo sebanyak 686 kelompok. Pada tahun 2020 sebanyak 16 kelompok tani yang naik Kelas. Kemampuan kelompok tani ditetapkan berdasarkan nilai yang

dicapai oleh masing-masing kelompok untuk lima aspek kemampuan kelompok, yakni kemampuan merencanakan, kemampuan mengorganisasikan, kemampuan melaksanakan kegiatan, kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan, kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani. Berdasarkan nilai tingkat kemampuan tersebut, masing-masing kelompok tani ditetapkan kelasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Kelas Kemampuan Kelompok Tani	Nilai Akhir	Keterangan
1	Kelas Pemula	≤ 245	merupakan kelas terbawah dan terendah
2	Kelas Lanjut	246 - 455	Kelompok tani sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas
3	Kelas Madya	456 – 700	kemampuan kelompok tani lebih tingggi dari kelas lanjut
4	Kelas Utama	701 – 1.000	Kelompok tani sudah berjalan dengan sendirinya atas dasar prakarsa dan swadaya sendiri

Permasalahan:

Adanya pengalihan anggaran baik sumber dana dari APBD maupun APBN yang rencananya untuk pengadaan alsintan dan sarana prasarana pertanian lainnya dialihkan untuk penanggulangan covid 19.

Solusi:

Mengusulkan kembali pengadaan alsintan maupun sarana prasarana pertanian lainnya pada tahun 2021 yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan petani dalam proses mekanisasi pertanian seiring dengan semakin sedikitnya tenaga kerja di sektor pertanian

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan yaitu :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Pengembangan sarana dan prasarana pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diadakan	18	18	100	Rp 700.946.900	Rp 649.221.163	92,62

		Prosentase lahan yang menggunakan sarana prasarana pertanian/perkebunan tepat guna	0	48	0			
2	Pemberdayaan petani pemakai air (HIPPA)	Prosentase peningkatan HIPPA yang direvitalisasi	5,76	5,76	100	Rp 13.240.000	Rp 13.180.000	99,55
		Prosentase areal tanam yang tercukupi air	0	82,25	0			
3	Sarana dan prasarana produksi dan usaha tani	Prosentase pendistribusian pupuk yang tepat sasaran	83	93	112	Rp 1.172.274.500	Rp 912.871.010	77,87
		Prosentase luas areal tanam yang tercukupi kebutuhan saprotannya	80	100	116			
		Luas areal pertanian/perkebunan yang tercover asuransi	240	567,82	416			
4	Pelatihan usaha agribisnis pertanian dan perkebunan	Prosentase petani yg menerapkan hasil pelatihan pertanian	0	0	0	Rp 26.235.000	Rp 26.215.000	99,92
5	Peningkatan kapasitas penyuluh dan petani	Prosentase petani menerapkan hasil diklat teknis	50	110	220	Rp 661.982.540	Rp 568.352.978	85,86
		prosentase programa penyuluhan yang diaplikasikan	60	65	108			
		Jumlah metode penyuluhan yang dikembangkan	2	3	150			
		Prosentase penyuluh yang mengikuti diklat teknis	4	0	0			
6	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani	Prosentase lembaga petani yang menerapkan anjuran teknologi	0	0	0	Rp 102.025.000	Rp 96.222.500	94,31

Persentase areal tanam yang tercukupi kebutuhan air" dikarenakan kegiatan revitalisasi hippa di refocusing karena adanya pandemi covid19, maka berdampak pada optimalisasi peran HIPPA dalam mengakomodir kebutuhan air kepada para petani. Dengan kata lain,

pada tahun 2020 tdk ada penambahan areal tanam yang tercukupi air atau 0%

3. Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Hasil Hewan dengan anggaran sebesar Rp. 1.456.665.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.352.003.543,00 atau 92,81%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Persentase
Prosentase peningkatan populasi ternak	0,5	0,61	122
Prosentase peningkatan produktivitas peternakan	0,5	0,97	194

Tabel Pertumbuhan Populasi Ternak

No	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)		Pertumb.
		Tahun 2019	Tahun 2020	(%)
1	Sapi Potong	13.782	14.590	6
2	Sapi Perah	5.490	5.909	8
3	Kambing	39.743	41.190	4
4	Domba	41.668	42.652	2
5	Ayam Buras	395.765	396.670	0
6	Ayam Ras Petelur	49.272	50.305	2
7	Ayam Ras Pedaging	351.211	353.104	1
8	Itik	273.299	273.730	0
9	Entok	5.936	6.011	1

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat rata-rata populasi ternak tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019. Produktivitas peternakan meliputi produksi daging, telur dan susu.

Tabel Pertumbuhan Produktivitas Peternakan

No	Jenis Ternak	Produksi Daging (Kg)		Pertumb.	Produksi Telur (Kg)		Pertumb.	Produksi Susu (Kg)		Pertumb.
		Tahun 2019	Tahun 2020	(%)	Tahun 2019	Tahun 2020	(%)	Tahun 2019	Tahun 2020	(%)
1	Sapi Potong	9.074.047	8.098.552	(11)						
2	Sapi Perah	-	-					9.744.391	11.315.815	16
5	Kambing	3.382.714	2.954.436	(13)				9.918	10.168	3
6	Domba	29.016	29.328	1						
7	Ayam Buras	2.829.286	2.827.540	(0)	226.159	227.349	1			
8	Ayam Ras Petelur	361	110	(70)	492.604	508.556	3			
9	Ayam Ras Pedaging	13.696.676	20.834.844	52						
10	Itik	503.983	511.017	1	1.952.990	1.963.525	1			
11	Entok	95.590	95.495	(0)	7.834	8.154	4			
14	Puyuh	-	-		20.116	21.569	7			
		29.611.672	35.351.322		2.699.703	2.729.154		9.754.309	11.325.983	

Untuk mengoptimalkan kinerja ke depan maka upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan pendampingan secara terus menerus sehingga input data pelaporan di dalam aplikasi iSIKHNAS dapat dilakukan secara tertib.
2. Segera mengkomunikasikan dengan pihak propinsi dan pusat apabila terjadi aplikasi error.

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan yaitu :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Pengembangan budidaya dan produksi peternakan	Prosentase ternak yang bunting	40	15,9	39,75	Rp 439.989.200	Rp 398.485.618	90,57
		Prosentase ternak yang melahirkan	25	14,02	56,08			
		Prosentase peternak yang menerapkan teknologi budidaya peternakan	100	60	60			

2	Pengembangan agribisnis peternakan	Prosentase pelaku usaha yang menerapkan hasil pelatihan agribisnis peternakan	0	0	0	Rp 7.516.600	Rp7.456.600	99,2
		Prosentase peningkatan jumlah pelanggan/pembeli	0	0	0			
3	Fasilitasi perijinan usaha pengembangan peternakan	Jumlah rekomendasi usaha peternakan yang dikeluarkan	0	0	0	Rp 9.160.000	Rp9.160.000	100
4	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (DBHCHT)	Prosentase peternak yang menerapkan hasil pelatihan bidang peternakan	20	60	300	Rp 137.277.000	Rp 122.105.700	88,95
5	Bantuan sarana produksi dan ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat (DBHCHT)	Prosentase Kelompok Penerima Hibah	8	8	100	Rp 862.723.000	Rp 814.795.625	94,44

Pada Kegiatan Pengembangan budidaya dan produksi peternakan indikator kinerja Prosentase ternak yang bunting dan Prosentase ternak yang melahirkan capaiannya di bawah 60%, belum mencapai target yang telah ditentukan hal ini dikarenakan petugas di lapangan kurang tertib dalam input data ke aplikasi iSIKHNAS, hal ini disebabkan beberapa hal antara lain aplikasi sering error. Indikator kinerja prosentase peternak yang menerapkan teknologi budidaya peternakan capaiannya 60% dari target yang telah ditentukan karena adanya pademi Covid-19 sehingga kegiatan pelatihan budidaya ternak tidak dapat dilaksanakan dan capaiannya tidak dapat maksimal.

Kegiatan pengembangan agribisnis peternakan tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengalihan anggaran untuk menanggulangan pademi Covid-19. Realisasi anggaran sebesar Rp. 7.456.600 digunakan untuk pembelian alat tulis kantor untuk

mendukung semua kegiatan dalam Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Hasil Hewan.

Anggaran Kegiatan Fasilitasi perijinan usaha pengembangan peternakan dialihkan untuk menanggulangan Covid-19. Realisasi anggaran sebesar Rp. 9.160.000 dilakukan sebelum adanya pandemi covid 19 untuk kegiatan sosialisasi namun pelaksanaannya belum maksimal.

4. Program Peningkatan Kualitas Produksi Peternakan dengan anggaran sebesar Rp.5.244.752.575,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.959.971.801,00 atau 94,57%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Persentase
Prosentase penurunan angka kejadian penyakit hewan	4%	4%	100
Prosentase produk pangan dan non pangan asal hewan yang asuh	50%	50%	100

Upaya – upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja kedepannya antara lain :

1. Melakukan KIE ke masyarakat tentang penanganan mutu produk hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).
2. Melakukan operasi bersama dengan aparat terkait untuk mentertibkan pemotongan illegal.
3. Menambah anggaran kegiatan
4. Penataan personil di tingkat Kecamatan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan/ternak	Prosentase hewan dan ternak yang diberi tindakan pencegahan	8	8	100	Rp 311.023.000	Rp 268.865.450	86,45
		Prosentase hewan/ternak sakit yang ditangani	8	8,1	101			
		Jumlah informasi yang disampaikan melalui sistem informasi cepat	8	8	100			
2	Pengawasan lalu lintas ternak dan peredaran obat hewan	Prosentase rekomendasi Surat Keterangan Kesehatan Hewan	90	67,5	75	Rp 7.905.000	Rp 7.905.000	100
		Prosentase cakupan lokasi pengawasan lalu lintas ternak	80	60	75			
		Prosentase pengawasan obat hewan pada produsen, distributor dan pemakai	100	80	80			
3	Pengawasan dan pengendalian bahan asal hewan	Jumlah rekomendasi dan SKPKBAH untuk produk pangan dan non pangan asal hewan	420	489	116	Rp 205.809.230	Rp 182.981.330	88,91
		prosentase produk pangan dan non pangan asal hewan yang diawasi	20	20	100			
4	Pengawasan penerapan sanitasi lingkungan dan kesejahteraan hewan	Prosentase tempat usaha yang menerapkan sanitasi lingkungan sesuai SNI	10	10	100	Rp 57.120.000	Rp 51.810.000	90,7
		Prosentase penerapan standar kesejahteraan hewan yang dipotong di RPH/RPU/TPU	30	29,96	99,87			
5	Operasional dan pelayanan laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan laboratorium kesmavet	96,64	90	93,13	Rp 350.555.360	Rp 342.155.058	97,6
		Prosentase sampel yang diuji	100	100	100			

	Veteriner	Jumlah pelanggan yang terlayani untuk pemeriksaan laboratorium	195	272	139			
6	Revitalisasi Pelayanan dan operasional RPH Krian dan RPH Prambon	Jumlah penerimaan retribusi pelayanan RPH Krian dan RPH Prambon	950220000	861769000	90,69	Rp 3.000.077.460	Rp 2.828.818.912	94,29
		Jumlah hewan yang dipotong	25518	13080	51,26			
		Penurunan jumlah pemotongan ternak sapi liar (diluar RPH)	35	49	140			
7	Pelayanan dan operasional RPU dan pasar hewan	jumlah hewan yang masuk ke pasar hewan	14112	7239	51,3	Rp 1.312.262.525	Rp 1.277.436.051	97,35
		Jumlah penerimaan retribusi pelayanan RPU dan pasar hewan	347.320.000	110.133.107	32			
		Jumlah hewan yang dipotong di RPU	180.000 ekor	128891 ekor	71,61			
		jumlah transaksi jual beli ternak	6910	352	5,09			

a. Pada Kegiatan Pengawasan lalu lintas ternak dan peredaran obat hewan indikator kinerjanya belum mencapai target karena beberapa hal antara lain ;

1. Indikator Prosentase rekomendasi Surat Keterangan Kesehatan Hewan realisasi 75% hal ini disebabkan permohonan SKKH berkurang karena pada masa pandemi pengiriman hewan hidup ke luar Provinsi berkurang. Surat SKKH yang dikeluarkan sebanyak 42 surat dari total target 60 surat.
2. Indikator Prosentase cakupan lokasi pengawasan lalu lintas ternak realisasi 75 % karena adanya pembatasan personil ke lapangan di masa pandemi dan adanya pengurangan anggaran untuk melakukan perjalanan dinas.
3. Indikator Prosentase pengawasan obat hewan pada produsen, distributor dan pemakai realisasi 80% karena kegiatan pengawasan hanya dilakukan pada tingkat pemakai obat hewan saja sedangkan kegiatan pengawasan pada produsen dan

distributor harus dilakukan bersama Kementerian atau Provinsi, sedangkan pada tahun 2020 tidak ada kegiatan.

b. Kegiatan Revitalisasi Pelayanan dan operasional RPH Krian dan RPH Prambon indikator kinerja Jumlah hewan yang dipotong belum mencapai target karena karena adanya wabah pademi covid 19 dan pembatasaan sosial berskala besar. Dinas telah mengusulkan perubahan target indikator menjadi 13.690 ekor namun belum diakomodir karena aplikasi sudah ditutup.

c. Pada kegiatan Pelayanan dan operasional RPU dan pasar hewan indikator kinerjanya belum mencapai target karena beberapa hal antara lain ;

1. Indikator jumlah hewan yang masuk ke pasar hewan capaiannya hanya 51,3% dari target 14.112 ekor terealisasi sebesar 7.239 ekor karena adanya wabah pademi covid 19 dan pembatasaan sosial berskala besar. Dinas telah mengusulkan perubahan target indikator menjadi 6.745 ekor namun belum diakomodir karena aplikasi sudah ditutup.
2. Indikator Jumlah penerimaan retribusi pelayanan RPU dan pasar hewan capaiannya 32% dari target Rp. 347.320.000 realisasi Rp. 110.133.107 Dinas telah mengusulkan perubahan target indikator menjadi Rp101.108.000,-, namun belum diakomodir karena aplikasi sudah ditutup.
3. Indikator Jumlah hewan yang dipotong di RPU tercapai sebesar 71,61% karena adanya kegiatan pemeliharaan ruang produksi selama 2 bulan sehingga operasional tidak dapat dilakukan. Dinas telah mengusulkan perubahan target indikator menjadi 75.000 ekor dari target awal sebesar 180.000 ekor, namun belum diakomodir karena aplikasi sudah ditutup. Apabila dibandingan perubahan target seharusnya capaian indikator sebesar 170%.

Indikator jumlah transaksi jual beli ternak belum mencapai target yang telah ditentukan karena adanya wabah pademi covid 19 dan pembatasaan sosial berskala besar sehingga daya beli masyarakat menurun dan lalu lintas pedagang ternak semakin terbatas.

Urusan Pariwisata

Urusan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Realisasi Kinerja Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020			
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	%
1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang didukung dengan pertumbuhan industri kreatif	Jumlah kunjungan wisatawan	1.867.290 orang	1.998.200 orang	107,01%	1.885.962 orang	870.060 orang	844.072 orang	97,01%

Sehubungan dengan Pandemi Covid 19 Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo telah mengajukan usulan perubahan Target tujuan dari semula jumlah kunjungan wisatawan menurut Renstra 1.885.962 orang menjadi 870.060 orang

Apabila didasarkan pada target usulan perubahan, capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 97,00%, dari target perubahan sebanyak 870.060 terealisasikan sebanyak 844.072 kunjungan wisatawan. seperti pada grafik dibawah ini :

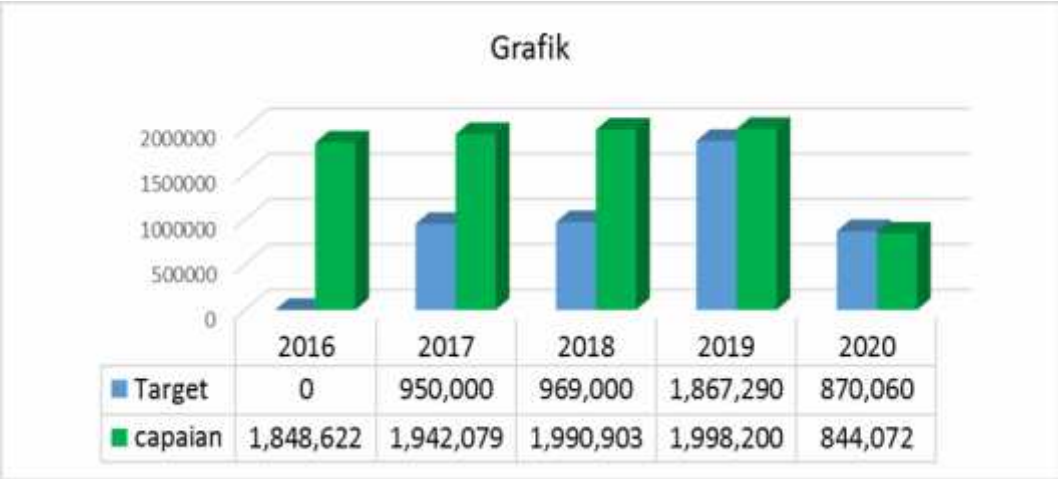

b. Realisasi Kinerja Sasaran Urusan Pariwisata

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	%
1.Jumlah kunjungan wisatawan	969.000 orang	1.990.903 orang	205,45 %	1.867.290 orang	1.998.200 orang	107,01%	1.885.962 orang	870.060 Orang	844.072 orang	97,01%
2.Jumlah industry / usaha kreatif pendukung sektor pariwisata	25 Organisasi	20 organisasi	80%	25 Organisasi	25 Organisasi	100%	30 Organisasi	30 Organisasi	30 Organisasi	100%
3.Jumlah destinasi / objek wisata	20 Obyek Wisata	20 Obyek Wisata	100%	22 Obyek Wisata	22 Obyek Wisata	100%	22 Obyek Wisata	22 Obyek Wisata	22 Obyek Wisata	100%
4.Rata-rata lama tinggal wisatawan	N/A	N/A	-	1 Hari	2 Hari	200%	1 Hari	1 Hari	2 Hari	200%

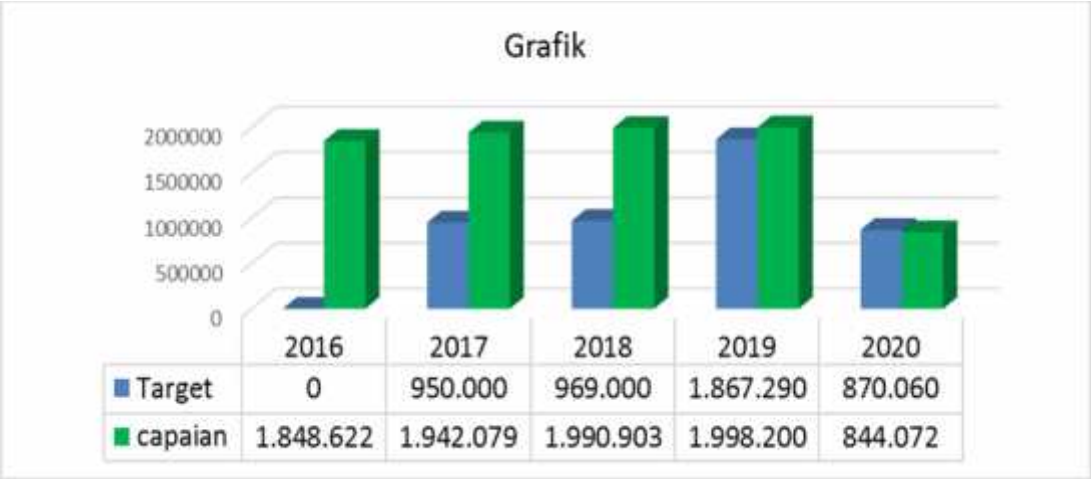

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 dan trend tahun sebelumnya, maka capaian kinerja tahun 2020 tidak mencapai target. Apabila didasarkan pada target usulan perubahan, capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 97,01% dari target perubahan sebanyak 870.060 terealisasikan sebanyak 844.072 kunjungan wisatawan. Realisasi kunjungan wisatawan tahun 2020 adalah sebanyak 844.072 pengunjung yang terdiri dari kunjungan hotel sebesar 260.808 pengunjung yaitu wisatawan mancanegara sebanyak 3.622 pengunjung dan wisatawan nusantara sebanyak 257.186 pengunjung. Serta kunjungan obyek wisata sebesar 583.264 pengunjung yaitu wisatawan mancanegara sebanyak 1.508 pengunjung dan wisatawan nusantara sebanyak 581.756 pengunjung. Penurunan Realisasi dikarenakan adanya pandemi covid-19.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan usaha untuk meningkatkan jumlah industri kreatif.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan peminat untuk mengikuti pelatihan industri/ usaha kreatif sektor pariwisata semakin meningkat.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 85,71% dari target, hal ini diupayakan dengan melakukan pelatihan terhadap pelaku usaha kreatif pendukung sektor pariwisata serta melakukan monitoring terhadap perkembangan industri / usaha kreatif pendukung sektor pariwisata.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan jumlah objek wisata di wilayah kabupaten telah mengalami perkembangan sehingga jumlah objek wisata meningkat.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 sama dengan tahun 2019, hal ini dikarenakan jumlah objek wisata yang dimonitor sama dengan tahun 2019 di karenakan adanya

pandemi covid -19 maka kegiatan monitoring terhadap objek wisata menjadi tidak maksimal.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 88% dari target, hal ini diupayakan dengan melakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana terhadap objek wisata serta meningkatkan promosi objek-objek wisata di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan jumlah wisatawan yang tinggal di Kabupaten Sidoarjo rata-rata lebih dari 1 hari. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 sama dengan tahun 2019, hal ini dikarenakan sejak bulan maret tahun 2020 adanya pandemi covid-19.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 200% dari target, hal ini diupayakan dengan melakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana terhadap objek wisata serta meningkatkan promosi objek-objek wisata di wilayah Kabupaten Sidoarjo guna menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Sidoarjo

Permasalahan :

Adanya pandemi covid-19 sehingga dilakukan refocusing anggaran

Solusi :

Untuk meningkatkan kegiatan tersebut maka kedepan akan dilakukan optimalisasi program dan kegiatan.

c. Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata

Dalam rangka mencapai sasaran urusan bidang pariwisata. sasaran pariwisata didukung dengan Program Program Pengembangan Objek, Promosi dan Usaha Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp.3.392.989.760,- dan terealisasi sebesar Rp.2.660.144.482,- atau 78,40%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE	PERSENTASE PERUBAHAN
Jumlah kunjungan wisata	1.885.962 orang	870.060 orang	844.072 orang	44,75% %	97,01%
Jumlah industri/ usaha kreatif pendukung sektor pariwisata	25	25	25	100%	100%

Sehubungan adanya Pandemi Covid 19 Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo telah mengajukan usulan perubahan Target program dari semula jumlah kunjungan wisatawan menurut Renstra 1.885.962 orang menjadi 870.060 orang

Apabila didasarkan pada target usulan perubahan, capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 97,00%, dari target perubahan sebanyak 870.060 terealisasikan sebanyak 844.072 kunjungan wisatawan. seperti pada grafik dibawah ini

Permasalahan:

Penutupan objek wisata dikarenakan adanya pandemi covid 19 sehingga terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan.

Solusi:

Melakukan update perkembangan covid 19 dengan cara memonitoring obyek wisata di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERUBAHAN Tahun 2020	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penyelenggaraan festival dan promosi wisata daerah	1. Jumlah peserta guk dan yuk	60 orang	30 orang	174 orang	580%	706.050.560	595.084.900	84,28%
	2. Jumlah festival dan gelar wisata daerah yang diselenggarakan/ diikuti	5 kegaiatan	-	2 Kegiatan	200%			
	3. Jenis media promosi wisata	6 jenis	6 jenis	8 jenis	133,33%			
Pengembangan objek wisata daerah	1. Jumlah obyek wisata yang dimonitor	24 objek wisata	24 obyek wisata	24 obyek wisata	100%	2.230.350.000	1.632.810.682	73,21%
	2. Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	1 obyek wisata	1 obyek wisata	1 obyek wisata	100%			
Pembinaan usaha pariwisata	1.Jumlah usaha pariwisata yang dimonev	10 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	100%	200.719.200	192.306.700	95,81%
	2.Jumlah industri kreatif yang dimonev	25 organisasi	5 organisasi	5 organisasi	100%			
	3. Jumlah peserta sosialisasi/ rakor pelaku usaha pariwisata	250 orang	75 orang	75 orang	100%			
Pembinaan pelaku usaha pariwisata (DAK)	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina	280 orang	80 orang	80 orang	100%	255.870.000	239.942.200	93,78%

Permasalahan:

Sehubungan dengan adanya pandemi covid-19 maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengajukan penurunan target kegiatan. Penurunan target dilakukan karena adanya refocusing anggaran

Solusi:

Kedepan akan melakukan optimalisasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan

Urusan Perindustrian

Urusan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

A. TUJUAN

Urusan Industri dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2020 adalah Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).

Agenda pembangunan Bidang Ekonomi sesuai dengan sasaran yang ada di RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 adalah ***"Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat"*** dengan indikator Pendapatan per Kapita. Untuk mendukung sasaran dan indikator RPJMD tersebut ditetapkan sasaran urusan/sasaran Renstra yaitu "***Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor - sektor unggulan***".

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

REALISASI KINERJA TAHUN 2020
BERDASARKAN TUJUAN

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan daya saing industri dan perdagangan dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	46,07%	46,12%	100,11	46,11%	46,62%	101,11	46.13%	47.80%	104%

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Sektor industri pengolahan Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 dalam Juta rupiah adalah sebagai berikut :

	2016	2017	2018	2019	2020
TARGET	45.98	46.01	46.07	46.11	46.13
CAPAIAN	46	46.08	46.12	46.62	47.8

Sumber : BPS**

PDRB sektor industri pengolahan pada tahun 2020 sebesar 47.80 persen atau meningkat sebesar 1.18 persen dari capaian tahun 2019. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan industri pengolahan dalam menopang pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 ini Kabupaten Sidoarjo antara lain melalui beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan program fasilitasi pemerintah dalam standardisasi produk dan peningkatan kompetensi pelaku usaha agar memiliki daya saing yang cukup besar.

Sektor industri pengolahan menunjukkan kontribusi yang besar pada PDRB. Nilai sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk industri pengolahan mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun 2016 s/d 2021. Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah Daerah dalam mendukung pertumbuhan industri khususnya Industri Pengolahan yang selalu mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Meskipun mengalami fluktuasi, akan tetapi dengan diimbangi peningkatan

pada sektor-sektor lainnya, sehingga dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan PDRB Daerah.

B. Sasaran

Untuk mendukung capaian sasaran RPJMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada urusan perdagangan menetapkan **sasaran strategis** dengan **Indikator Kinerja Utama** : **Meningkatnya daya saing sektor industri.**

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan sasaran yang diukur dengan indikator sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN SASARAN

TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET AWAL*)	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	%
Persentase pertumbuhan usaha industri	0.66	0.45	68,18	0.71	0,78	109,86	1.25%	0.86%	0.87%	101%
Persentase IKM yang terstandardisasi	0,2%	0,4%	200	0,4%	0,81	202,5	0.81%	0.53%	0.533%	101%

Atas target sasaran urusan tersebut diatas karena dampak Covid-19 sehingga dilakukan penyesuaian target dari target Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 050/3195/438.6.1/2020 Tanggal 8 Mei 2020 Perihal realokasi belanja daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Persentase Pertumbuhan Usaha Industri yang semula 1.25% disesuaikan menjadi 0.86%
2. Persentase IKM yang terstandarisasi yang semula 0.81% disesuaikan menjadi 0.53%

Pertumbuhan PDRB tersebut diwujudkan dalam peningkatan daya saing industri, diantaranya diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. **Pertumbuhan Jumlah Industri**

Atas target tahun 2020 telah dilakukan penyesuaian karena Pandemi Covid-19, dari target awal sebesar 1.25% menjadi 0.86%. Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2020, maka capaian kinerja Tahun 2020 mencapai 101%. Jumlah Industri Kecil Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sebanyak 17.159 unit. Jumlah ini meningkat 147 unit atau meningkat sebesar 0,87 persen dibandingkan dengan jumlah industri pada tahun 2019 yang sebanyak 17.073 unit.

Jenis Industri yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Sidoarjo utamanya adalah:

1. Kerupuk
2. Kulit dan Turunannya
3. Batik Tulis, Bordir & Aksesoris
4. Pengolahan Ikan, Produk Mamin lainnya
5. Industri logam

Perkembangan jumlah industri terlihat pada grafik berikut ini :

	2016	2017	2018	2019	2020
TARGET	16,700	16,800	16,950	17,000	17,100
CAPAIAN	16,770	16,891	16,966	17,073	17,159

Sumber : Bidang Perindustrian

Pada Tahun 2020, dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha industri terdapat upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan antara lain sebagai berikut :

1. Pelatihan dalam rangka untuk pengembangan IKM
2. Pelatihan skill dalam rangka peningkatan Sumber Daya Industri

2. Persentase IKM yang terstandarisasi

Atas target tahun 2020 telah dilakukan penyesuaian karena Pandemi Covid-19, dari target awal sebesar 0.81% menjadi 0.53%. Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2020, maka capaian kinerja Tahun 2020 mencapai 101%.

Sesuai dengan PP nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu juga sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing IKM juga agar mampu menembus pasar global serta dapat memenuhi permintaan sesuai dengan kebutuhan kosumen.

Jumlah Industri Kecil dan Mikro di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2020 yang telah terstandardisasi adalah sebagai berikut:

Jenis Standar/HKI	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SNI		2	1			
Barcode			5			
ISO 9001 : 2015			2			
Halal			6	4	23	20
Bimbingan Sertifikasi ISO			3			
Merk	25		81	22	50	52

PIRT	50					
Uji Nutrisi			6		2	16
Uji Produk sesuai parameter SNI			1			
HACCP			1		1	
Batik Mark			1			
Uji Tar & Nikotin				45		
HKI					67	
Manajemen Mutu						3
TOTAL	**75**	**2**	**107**	**71**	**143**	**91**

Pada Tahun 2020, dalam rangka mendukung IKM yang terstandarisasi terdapat upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan antara lain sebagai berikut :

1. Sosialisasi Standarisasi, HKI, dan Legalitas Usaha
2. Fasilitasi Standarisasi (Halal, Pendaftaran Merek, Uji Nutrisi, Bimbingan Sistem Manajemen Mutu)

Data perusahaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2018

Tahun	2017	2018	2019	2020
Jumlah IKM yang telah terstandardisasi	107	71	143	91
Total Jumlah IKM	16.891	16.966	17.073	17.159
Persentase IKM yang telah terstandardisasi	0,6%	0,4%	0,84%	0.533%

	2017	2018	2019	2020
TARGET	50	40	50	90
CAPAIAN	107	71	143	91

Sumber : Bidang Perindustrian

Dari daftar IKM diatas yang telah mendapatkan fasilitasi standardisasi melalui APBD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo, di dokumentasikan dalam *database* industri berdasarkan nama perusahaan dan alamat.

Aspek – aspek yang mempengaruhi standarisasi IKM, diantaranya :

1. Regulasi pemerintah yang harus mendukung IKM tersatandarisai
2. Kebutuhan pasar
3. Kebijakan perusahaan

Jumlah IKM yang telah terstandardisasi masih relatif kecil disebabkan oleh :

1. Kurangnya kesadaran IKM terhadap pentingnya standarisasi
2. Persyaratan yang diwajibkan memberatkan IKM dan kondisi di lapangan sulit menyesuaikan dengan kondisi yang ada

Upaya untuk meningkatkan standarisasi IKM diantaranya :

1. Meningkatkan kesadaran IKM mengenai pentingnya standardisasi
2. Pemberian insentif bagi IKM yang menerapkan standardisasi
3. Memberikan fasilitasi dan kemudahan dalam pengurusan standardisasi

C. Program dan Kegiatan

1. Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM dengan anggaran sebesar Rp.4.665.709.060,- dan terealisasi sebesar Rp.1.302.152.260,- atau 27.91%.

   Dengan indikator kinerja yaitu:

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase IKM yang difasilitasi standardisasi	90 orang	91 orang	100.1%

Pada Tahun 2020, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo telah memfasilitasi sebanyak 91 IKM, meliputi 52 merek, 20 sertifikasi halal, 16 uji nutrisi, 3 manajemen mutu.

Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM didukung oleh 3 kegiatan yaitu:

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Identifikasi permasalahan di Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika	Jumlah Permasalahan IKM Agro, Kimia, Logam, Mesin, Tekstil, Aneka, Alat Trasnportasi, Elektronika dan Telematika	130 IKM	130 IKM	100%
Pembinaan dan Pelatihan Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika	Jumlah IKM logam mesin tekstil aneka alat transportasi elektronika dan telematika yang di bina dan dilatih	16 Orang	16 Orang	100%
	Jumlah IKM logam mesin tekstil aneka alat transportasi elektronika dan telematika yang tumbuh dan berkembang	-	-	-
Pendampingan Standarisasi, Desain dan Promosi Produk IKM	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi standardisasi (SNI, Merk, Sertifikasi Halal, Ijin Edar, Dll)	65 IKM	91 IKM	140%
	Perbaikan Desain Produk IKM	-	-	-
	Promosi Produk Industri	25 IKM	25 IKM	100%
Pembinaan dan pelatihan industri agro dan kimia	Jumlah IKM Agro dan Kimia Yang dibina dan dilatih	-	-	-

	Jumlah Wirausaha Baru di Bidang Agro dan Kimia yang tumbuh dan berkembang	-	-	-
Pengembangan IHT dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi IKM serta pelatihan good manufacturing practices bagi industri hasil tembakau	Jumlah sampel pengujian nikotin dan tar	45 Sampel	45 Sampel	100%
Pemetaan industri hasil tembakau (DBHCHT)	Jumlah Industri Hasil Tembakau	50 IKM IHT	50 IKM IHT	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2020 (Rp)	REALISASI Tahun 2020 (Rp)	PERSENTASE %
Identifikasi permasalahan di Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika	116.000.000	111.212.500	95.87%
Pembinaan dan Pelatihan Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika	3.525.224.500	181.513.000	5.5%
Pendampingan Standarisasi, Desain dan Promosi Produk IKM	750.248.800	742.931.000	99,02%
Pembinaan dan pelatihan industri agro dan kimia	169.235.760	163.390.760	96.55%
Pengembangan IHT dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi IKM serta pelatihan good manufacturing practices bagi industri hasil tembakau (DBHCHT)	55.000.000	54.275.000	98.68%
Pemetaan industri hasil tembakau (DBHCHT)	50.000.000	48.830.000	97.66%

Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dengan target dan capain sebagai berikut:

REALISASI KINERJA TAHUN 2020
BERDASARKAN TUJUAN

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020			
		TARGET	REALISASI	%	TARGET AWAL	TARGET PENYESUAIAN	REALISASI	%
Meningkatkan daya saing industri dan perdagangan dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	16,25%	16,30%	100,3%	16,27%	15.32%	15.32%	100%

Karena Pandemi Covid-19 atas target tahun 2020 dilakukan penyesuaian dari yang sebelumnya menurt RPJMD dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo sebesar 16.27% menjadi 15.32% sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 050/3195/438.6.1/2020 Tanggal 8 Mei 2020 Perihal realokasi belanja daerah Tahun Anggaran 2020.

Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Sektor perdagangan Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 dalam Juta rupiah adalah sebagai berikut :

Sumber : BPS

Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan pada Tahun 2020 sebesar 15.32%. Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2021, maka progress capaian kinerja Tahun 2020 adalah 94.16%, hal ini diupayakan dengan Optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

D. REALISASI KINERJA SASARAN URUSAN PERDAGANGAN

Untuk mendukung capaian sasaran RPJMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada urusan perdagangan menetapkan **sasaran strategis** dengan **Indikator Kinerja Utama** :

1. **Meningkatnya daya saing sektor perdagangan**
2. **Meningkatnya layanan pasar rakyat**

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan sasaran yang diukur dengan indikator sebagai berikut:

REALISASI KINERJA TAHUN 2020
BERDASARKAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020			
	TARGET	REALISASI	%	TARGET AWAL	TARGET PENYESUAIAN	REALISASI	%
Nilai Ekspor Non Migas	$1.818.000	$1.818.590	101	$1.859.000.000	$500.000.000	$1.237.624	248%
Nilai ekspor perdagangan dalam negeri	Rp 23.000.000.000.000	Rp 23.832.580.166.842	103,62	Rp 2.750.000.000.000	Rp 750.000.000.000	Rp 855.472.353.200	114%
Persentase Pasar SNI	0	0	0	17%	5,3%	5.3%	100%

Sumber data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sidoarjo, 2020

Atas target sasaran urusan tersebut diatas karena dampak Covid-19 sehingga dilakukan penyesuaian target dari target Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 050/3195/438.6.1/2020 Tanggal 8 Mei 2020 Perihal realokasi belanja daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Target Nilai Ekspor Non Migas yang semula $1.859.000.000 disesuaikan menjadi $500.000.000
2. Target Nilai Ekspor Perdagangan Dalam Negeri yang semula Rp 2.750.000.000.000 disesuaikan menjadi Rp 750.000.000.000
3. Persentase Pasar SNI yang semula 17% disesuaikan menjadi 5.3%

1. Nilai Ekspor Non Migas

Realisasi Nilai Ekspor Non Migas Daerah Tahun 2020 sebesar US$1.237.624.295. Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2020, maka capaian kinerja Tahun 2020 mencapai 248% dari target yang telah ditetapkan sebesar US$500.000.000. Namun apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2019, maka capaian kinerja Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 32persen dibandingkan dengan Nilai Ekspor Non Migas Daerah tahun 2019 sebesar US$1.818.590.740,22.

Angka penurunan tersebut disebabkan oleh:

1. Adanya pandemi Covid-19 yang mendunia mempengaruhi kelancaran ekspor maupun impor.
2. Dengan adanya kebijakan beberapa Negara yang melakukan *lockdown*, keterbatasan bahan baku import mempengaruhi proses produksi.

Perkembangan nilai ekspor ditunjukkan oleh grafik berikut ini :

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja tersebut antara lain :

a. Meningkatkan dan mendorong kembali volume ekspor dengan memberikan pelatihan ekspor bagi UKM
b. Melaksanakan/program promosi produk-produk IKM dalam rangka peningkatan ekspor daerah
c. Pendampingan IKM dalam memperoleh KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) IKM

2. Nilai Ekspor Perdagangan Dalam Negeri (Volume Perdagangan)

Realisasi nilai ekspor perdagangan dalam negeri yang berhasil dicapai tahun 2020 sebesar Rp855.472.353.200. Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2020, maka capaian kinerja Tahun 2020 mencapai 114% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp750.000.000.000.Namun apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2019, maka capaian kinerja Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 96 persen dibandingkan dengan NilaiEkspor Perdagangan Dalam Negeri tahun 2019 sebesar Rp 23.832.580.166.842.

Penurunan ini disebabkan karena keterbatasan kegiatan promosi, misi dagang dan temu bisnis, serta menurunnya daya beli masyarakat. Serta penurunan perdagangan industri ritel, penurunan produksi usaha, dan penurunan pendapatan pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak pandemiCovid-19.

Perkembangan volume perdagangan terdapat pada grafik berikut ini :

	2016	2017	2018	2019	2020
Series 1	16,800,000.00	16,900,000.00	17,300,000.00	23,000,000.00	750,000.00
Series 2	18,218,829.00	16,908,099.00	17,885,626.00	23,832,580.00	855,000.00

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan volume perdagangan, antara lain :

1. Melalui promosi dengan memfasilitasi pameran lokal dan nasional, tahun 2020 event pameran/misi dagang sebanyak2 (dua) kali pameran.
2. Memfasilitasi legalitas usaha berupa rekomendasi pendirian toko swalayan
3. Memfasilitasi IKM untuk *Go* Ekspor

3. Persentase Pasar SNI

Jumlah pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 19 Pasar yang dikelola oleh 3 (tiga) UPTD yaitu UPTD Pasar Sidoarjo, UPTD Pasar Porong dan UPTD Pasar Taman.

Sesuai dengan sasaran Renstra SKPD periode 2016 - 2021 yaitu **Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat**dengan indikator kinerja **Persentase Pasar SNI** adalah pasar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Jumlah pedagang yang terdaftar
2. Ukuran luas ruang dagang
3. Jumlah pos
4. Zonasi
5. Area parkir
6. Area bongkar muat barang
7. Akses keluar masuk kendaraan
8. Lebar koridor
9. Kantor pengelola
10. Lokasi toilet dan kamar madi (terpisah antara laki2 dan perempuan)
11. Jumlah toilet pada satu lokasi
12. Tempat menyimpan bahan pangan basah
13. Tempat cuci tangan
14. Ruang menyusui
15. CCTV
16. Ruang peribadatan
17. Ruang bersama
18. Pos kesehatan
19. Pos keamanan
20. Area merokok
21. Ruang disenfektan
22. Area penghijauan
23. Tinggi anak tangga
24. Tinggi meja tempat berjualan
25. Akses untuk kursi roda
26. Jalur evakuasi
27. Tabung pemadam kebakaran
28. Hidran air
29. Pengujian kualitas air bersih
30. Pengujian limbah cair

31. Ketersediaan tempat sampah
32. Alat angkut sampah
33. TPS sementara
34. Pengelolaan sampah berdasarkan 3R
35. Sarana telekomunikasi
36. Informasi identitas pedagang
37. Informasi kisaran harga
38. Informasi zonasi pasar
39. Prosedur kerja / sop
40. Struktur pengelola
41. Jumlah pengelola
42. Pelaksanaan sidang tera/tera ulang
43. Program pengembangan dan aktivasi pasar
44. Program pemberdayaan komunitas pasar

Tabel Pemenuhan Kriteria SNI

No.	Kriteria Pemenuhan Target SNI Tahun	Jumlah Pasar	Rendah (10 Indikator)	Sedang (11-20 Indikator)	Tinggi (21-30 Indikator)	Potensi Sangat Tinggi (31-44 Indikator)
1	2016	16	1	11	4	0
2	2017	18	1	12	5	0
3	2018	19	0	12	5	2
4	2019	19	0	10	6	3
5	2020	19	0	10	6	3

Pemenuhan indikator pasarber-SNI dari Tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan yang dialokasikan melalui anggaran revitalisasi pasar dari APBD maupun APBN. Diharapkan tahun kedepannya pemenuhan kriteria Pasar SNI dengan parameter tinggi atau sekurang-kurangnya memenuhi 20-30 parameter dapat lebih dioptimalkan.

Dari 44 parameter kriteriapasar SNI untuk Kabupaten Sidoarjo pada 19 Pasar Rakyat di Tahun 2020 terdapat 1 pasar yang ditetapkan sebagai **Pasar SNI** yaitu **Pasar Sukodono**, dan 2 pasar lainnya yang berparameter sangat tinggi adalah Pasar Porong, dan Pasar Tulangan.

E. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capain sasaran Uruan tersebut diatas didukung dengan program dan kegiatan.

Sasaran pertama Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dengan indikator Nilai Ekspor Non Migas dan Nilai Ekspor Perdagangan Dalam Negeri didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan pedagang informal dengan anggaran sebesar Rp.5.796.034.030,- dan terealisasi sebesar Rp.5.732.775.259,-atau 98,91%. Dengan indikator kinerja yaitu:

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	PENYESUAIAN TARGET Tahun 2020 *)	REALISASI Tahun 2020	%
Nilai ekspor non migas	$1.859.000.000	US$ 500.000.000	US$1.237.624.295	248%
Nilai net ekspor perdagangan dalam negeri	Rp 2.750.000.000.000	Rp.750.000.000.000	Rp.855.472.353.200	114%

Atas target Renstra tahun 2020 telah dilakukan penyesuaian karena Pandemi Covid-19, dari target awal sebesar 1.25% menjadi 0.86% sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 050/3195/438.6.1/2020 Tanggal 8 Mei 2020 Perihal realokasi belanja daerah Tahun Anggaran 2020.

Ekspor non migas merupakan produk ekspor berupa hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan hasil pertambangan yang bukan berupa minyak bumidan gas.

Nilai net ekspor perdagangan dalam negeri adalah nilai Perdagangan Barang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kabupaten Sidoarjo yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.

Program tersebut didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Operasi pasar murah	Jumlah paket sembako yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah menjelang hari raya keagamaan	27.600 paket sembako	27.600 paket sembako	100%
	Stabilisasi Harga (Operasi Pasar)	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
Pembinaan pedagang informal	Jumlah pedagang informal yang di bina	-	-	-
	Pengelolaan sentra pedagang informal dalam kondisi baik	1 Sentra	1 Sentra	100%
Penyusunan Database UKM	Database mengenai jumlah dan tingkat keaktifan UKM	2 Unit	2 Unit	100%
Perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar	Jumlah UTTP yang telah bertanda tera dan tera ulang	7000 UTTP	9471 UTTP	103%
	Jumlah sosialisasi kemetrologian yang telah dilaksankan	-	-	-
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah IKM/ UKM yang difasilitasi misi dagang/ perluasan pangsa pasar	100 Orang	100 Orang	100%
Promosi produk-produk daerah	Jumlah fasilitasi promosi produk unggulan dan kerajinan baik di dalam negeri maupun di luar negeri	2 kali	2 kali	100%
Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat (DBHCHT)	Pemeliharaan Gedung Sentra Kuliner	1 paket	1 paket	100%

Kegiatan Pasar Murah merupakan salah satu *event* yang menjadi agenda rutin setiap tahunnya di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini dinilai penting untuk dilaksanakan dalam rangka upaya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting dan terpenuhinya kebutuhan sembako dengan baik.

Pada Tahun 2020, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo melaksanakan pembagian 27.600 paket sembako dengan pembagian sembako kepada masyarakat terdampak covid-19 sebanyak 24.600 paket dan 3.000 paket sembako untuk dijual kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun pelaksanaan kegiatan Pasar Murah adalah sebagai berikut :

1. Penjualan paket sembako murah dengan sistem kupon oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sidoarjo sebanyak 3.000 paket dengan harga Rp. 20.000,00 yang meliputi 2 kg gula, 1 liter minyak goreng, dan 2 pak mie kering;
2. Pembagian paket sembako murah dilakukan dengan tetap mematuhi protocol Kesehatan COVID-19, dengan adanya sistem kupon dan antrian sehingga *physical distancing* masih dilakukan.

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2019 (Rp)	REALISASI Tahun 2019 (Rp)	PERSENTASE %
Operasi pasar murah	3.982.930.000,00	3.976.860.000,00	99,85
Pembinaan pedagang informal	125.061.700,00	123.141.200,00	98,46
Penyusunan Database UKM	169.550.000,00	167.685.300,00	98,90
Perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar	133.414.430,00	121.251.200,00	90,88
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	414.619.900,00	406.584.900,00	98,06
Promosi produk-produk daerah	843.170.000,00	816.110.000,00	96,79
Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat (DBHCHT)	127.288.000,00	121.142.659,00	95,17

Sasaran kedua Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat dengan indikator kinerja Persentase Pasar SNI didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta Pendapatan Pasar rakyat dengan anggaran sebesar Rp.14.573.243.281,00,- dan terealisasi sebesar Rp.13.374.583.314 atau 91,77%.

Dengan indikator kinerja yaitu:

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
SKM terhadap layanan pasar	76,4 %	78%	102,09%

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan pasar dilakukan berdasarkan tersedianya lahan parkir yang luas, kebersihan area berjualan, kios dibagi berdasarkan jenis barang yang dijual, jalan masuk ke pasar bersih, keadaan pasar rakyat bersih dan tidak becek, rancangan gedung pasar rakyat menarik, pedagang berjualan sesuai dengan area yang telah ditetapkan, tersedianya mushola atau tempat beribadah, tersedianya toilet yang bersih, dan tersedianya pos keamanan di pasar rakyat, pasar rakyat berada dilokasi yang sangat strategis sehingga mudah dijangkau, produk yang dijual dipasar rakyat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kios – kios di pasar rakyat mudah di jangkau, pelayanan di pasar rakyat sangat memuaskan, kemudahan mendapatkan informasi produk yang dijual, dan ketersediaan kotak saran.

Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta Pendapatan Pasar rakyat didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu:

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pembangunan / Pemeliharaan Konstruksi bangunan pasar	Persentase pasar dalam kondisi baik	85%	85%	100%
Pendataan dan Peningkatan Pendapatan Pasar	Capaian retribusi pendapatan pasar	Rp16.100.000.000	Rp.16.129.045.426	100,18%
	Optimalisasi capaian retribusi pendapatan pasar	4 kali	4 kali	100%
Pengelolaan Pasar Tradisional Menuju Pasar Modern	Persentase peningkatan kualitas bangunan pasar dan sarana prasarana pasar	60%	60%	100%
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana serta Pengelolaan Persampahan Pasar	Persentase sarana prasarana dan persampahan pasar dalam kondisi baik	75%	75%	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2020 (Rp)	REALISASI Tahun 2020 (Rp)	PERSENTASE %
Pembangunan / Pemeliharaan Konstruksi bangunan pasar	4.875.808.521,00	4.308.530.570,00	88,37
Pendataan dan Peningkatan Pendapatan Pasar	442.350.000,00	392.459.150,00	88,72
Pengelolaan Pasar Tradisional menuju pasar Modern	487.359.500,00	480.203.850,00	98,53
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana serta Pengelolaan Persampahan Pasar	8.767.725.260,00	8.193.389.744,00	93,45

3. **UNSUR PENUNJANG**

Unsur Penunjang Sekretariat Daerah

Unsur penunjang sekretariat daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama dengan anggaran sebesar Rp.1.972.143.386,- dan terealisasi sebesar Rp.1.825.756.271,- atau 92,58%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan yang diterapkan	100%	100%	100%

Permasalahan:

1. Data yang Valid untuk rancangan rumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang diperlukan sulit diperoleh.
2. Adanya Refocusing anggaran sehingga terdapat kegiatan monev yang belum terlaksana.

Solusi:

1. Mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari berbagai pihak terkait kebijakan pemerintah ketertiban, kesbang dan perlindungan masyarakat dan otoda yang akan dibuat.
2. Melaksanakan evaluasi kinerja kecamatan yang dilaksanakan secara mandiri yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188/564/438.1.1.3/2021 tentang Kecamatan Berkinerja Terbaik.

Sebagaimana tabel data tersebut diatas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Naskah Kerjasama yang dihasilkan.

Terdapat 18 Naskah Kerjasama yang dihasilkan yaitu sebagai berikut :

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum
1	2	3
1	Kerja sama pembangunan daerah	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Januari 2020 Nomor: 415.4/1.438.1.1.1/2020 tentang Kerja sama pembangunan daerah
2	Pengelolaan Rekening Kas Desa di Kabupaten Sidoarjo	Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Bank Mandiri (Tbk) dengan PT BPR Deltha Artha tanggal 4 Maret 2020 Nomor: 415.4/02/438.1.1.1/2020 tentang Pengelolaan Rekening Kas Desa di Kabupaten Sidoarjo
3	Optimalisasi dan Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo tanggal 5 Maret 2020 Nomor: 415.43/3/438.1.1.1/2020 tentang Optimalisasi dan Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
4	Kerjasama Penyediaan Data Statistik di Kabupaten Sidoarjo	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan BPS Kabupaten Sidoarjo tanggal 5 Maret 2020 Nomor: 415.43/04/438.1.1.1/2020 tentang Kerjasama Penyediaan Data Statistik
5	Kerjasama Penanganan Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 29 April 2020 Nomor: 415.43/5/438.1.1.1/2020 tentang Kerjasama Penanganan Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

		dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo
6	Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas Brawijaya tanggal 29 April 2020 Nomor: 415.43/06/438.1.1.1/2020 tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo
7	Kerjasama Pembangunan Daerah	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pasmar 2 Korps Marinir TNI Angkatan Laut tanggal 3 Juni 2020 Nomor: 415.4/8/438.1.1.1/2020 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah
8	Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember tanggal 8 Juli 2020 Nomor: 415.43/9/438.1.1.1/2020 tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo
9	Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Sidoarjo	Perjanjian Kerjasama antara Dirjend Pajak, Dirjend Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 26 Agustus 2020 Nomor: 415.43/10/438.1.1.1/2020 tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Sidoarjo
10	Kerjasama Bidang Pertanahan melalui Pola Trijuang di Kabupaten Sidoarjo	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal Nomor: tentang Kerjasama Bidang Pertanahan melalui Pola Trijuang di Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Oktober 2020 Nomor: 415.43/11/438.1.1.1/2020
11	Kerjasama Pengembangan Pendidikan Polteknik Negeri Jember di Kabupaten Sidoarjo	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Politeknik Negeri Jember tanggal Nomor: tentang Kerjasama Pengembangan Pendidikan Polteknik Negeri Jember di Kabupaten Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu berupa Mini Mal Pelayanan Publik di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Oktober 2020 Nomor: 415.43/13/438.1.1.1/2020

12	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu berupa Mini Mal Pelayanan Publik di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepolisian Resor Kota Sidoarjo, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, KPP Wilayah Barat Sidoarjo, BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu berupa Mini Mal Pelayanan Publik di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 November 2020 Nomor: 415.43/14/438.1.1.1/2020
13	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu berupa Mini Mal Pelayanan Publik di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Cabang Sidoarjo, PT BPR Delta Artha, PT Pos Indonesia Cabang Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu berupa Mini Mal Pelayanan Publik di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 November 2020 Nomor: 415.43/15/438.1.1.1/2020
14	Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas Airlangga tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabidan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo tanggal 11 November 2020 Nomor: 415.43/16/438.1.1.1/2020
15	Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas Maarif Hasyim Latif tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo tanggal 23 November 2020 Nomor: 415.43/17/438.1.1.1/2020
16	Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas Negeri Surabaya tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo tanggal 2 Desember 2020 Nomor: 415.43/18/438.1.1.1/2020
17	Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo

18	Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Desember 2020 Nomor: 415.43/19/438.1.1.1/2020

2. Dokumen Rupabumi yang dihasilkan

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/334/438.1.1.3/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Tim Kerja Pembakuan Rupabumi di Kabupaten Sidoarjo melakukan pembakuan Rupabumi di 4 (empat) Kecamatan yakni Kecamatan Sukodono, Kecamatan Sedati, Kecamatan Gedangan, dan Kecamatan Krian. Adapun pembakuan rupabumi berisi tentang data dan informasi unsur-unsur rupabumi, hasil pemeriksaan terhadap pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi, Mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan nama Rupabumi, Mengusulkan hasil pemeriksaan nama rupabumi untuk dibakukan kepada Badan Informasi Geospasial melalui Tim Kerja Provinsi dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Dalam Negeri yang di tetapkan melalui Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/766/438.1.1.3/2020 tanggal 4 Desember tentang Nama Jalan dan Bangunan Gedung di Kabupaten Sidoarjo.

3. SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Mendasari Permedagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2020 Bagian Pemerintahan menghasilkan Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayaanan Minimal (SPM) dengan mengacu kepada peraturan yang menaungi pada masing masing urusan dasar yang meliputi: Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Urusan Sosial. Kegiatan penyusunan SPM di tetapkan melalui Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/18/438.1.1.3/2020 Tanggal 6 Januari 2020 tentang Tim Penerapan SPM 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

4. Dokumen hasil Pemasangan dan Monitoring serta Evaluasi (Monev) Pilar Batas di Kabupaten Sidoarjo .

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap 300 pilar batas yang dilaksanakan melalui anggaran tribulan I TA 2020 serta di lanjutkan Monitoring dan Evaluasi terhadap 600 pilar batas yang dilaksanakan melalui anggaran PAK Tahun 2020 di Tribulan IV.

5. Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

Pada Tahun Anggaran 2020 melalui Subbag Bina Pemerintahan Kecamatan belum bisa dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan di karenakan terjadi refocusing anggaran pada tribulan II sehingga pelaksanaannya diimplementasikan melalui evaluasi kinerja kecamatan yang dilaksanakan secara mandiri yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188/564/438.1.1.3/2021 tentang Kecamatan Berkinerja Terbaik.

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penyiapan rumusan bahan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan urusan pemerintah daerah serta pelayanan kedinasan Kepala Daerah	1. Jumlah laporan monev penyelenggaraan dan pemerintahan umum 2. Jumlah laporan monev standar pelayanan minimal	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100 100	132.010.965	123.483.315	93.54
Penguatan kapasitas dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan	Persentase kecamatan yang telah melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan kategori baik	100%	100%	100	999.438.501	947.090.258	94.76
Fasilitasi pelaksanaan Rupabumi	Jumlah kecamatan yang dilakukan inventarisasi data	2 kecamatan	2 kecamatan	100	248.470.000	241.570.473	97.22

	gasetir rupabumi unsur buatan						
Fasilitasi penegasan dan penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan	Jumlah laporan monev pemasangan pilar batas wilayah	1 dokumen	1 dokumen	100	238.171.500	227.646.818	95.58
Fasiliitasi kerjasama	Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam naskah Kerjasama	100%	100%	100	354.052.420	285.965.407	80.77

2. Program koordinasi kebijakan monitoring dan evaluasi bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp.9,776,601,570,- dan terealisasi sebesar Rp.7,934,210,359,- atau 81,16%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Jumlah kebijakan bidang kessos dan kemasy (pendidikan,kebudayaan,kesehatan,tenaga kerja,kesejahteraan sosial,transmigrasi,pengendalian)	100	100	100

Permasalahan:

Kebijakan pada masing masing sub bagian di bidang Kesejahteraan Rakyat masih ada yang belum dilaksanakan

Solusi:

1. Menyusun rumusan kebijakan makro
2. menentukan prioritas pembangunan bidang Kesejahteraan Rakyat
3. Membuat SK tim pelaksanaan program yang tertunda
4. mengagendakan rapat koordinasi dan evaluasi dengan instansi terkait
5. membuat rencana strategis dengan sinkronisasi OPD terkait bidang Kesejahteraan Rakyat

Program tersebut didukung oleh :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Perumusan kebijakan,koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesejahteraan sosial	Pembinaan dan bantuan sarana keagamaan	100	100	100	5,625,080,580	4,601,667,459	81,81
	Koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan monev bidang kesejahteraan sosial	100	100	100	1,051,139,740	354,925,300	33,77
	Koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan monev agama kemasyarakatan	100	100	100	3,100,381,250	2,977,617,600	96,04

Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan

Untuk mengukur efektivitas jalannya pemerintahan salah satunya diukur dengan sampai sejauh mana kelengkapan peraturan perundangan sebagai kelengkapan hukum setiap aktivitas yang dilaksanakan. Kelengkapan hukum tersebut adalah keberadaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang sesuai dengan kebutuhan.

Jumlah produk Hukum yang dihasilkan selama tahun 2014 s.d 2020 adalah sebagai berikut :

Produk Hukum Yang Dihasilkan

No	ProdukHukum		Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Peraturan Daerah	10	11	17	10	9	18	05
2	Peraturan Bupati	62	64	102	104	116	95	96
3	Keputusan Bupati	1.545	1.268	1.443	721	855	929	830

Sumber Data : Bagian Hukum Setda

Jumlah Permasalahan Hukum yang Diselesaikan

Untuk mengukur kepastian hukum dalam menjalankan Pemerintahan maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus tetap berusaha agar setiap permasalahan hukum/sengketa hukum yang dihadapi dapat segera terselesaikan. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat melalui jalur *Litigasi* (persidangan) maupun jalur *Non Litigasi* (di luar persidangan/ mediasi).

Jumlah sengketa hukum yang ditangani di tahun 2020 sebanyak 11 sengketa hukum, antara lain :

1. Gugatan PT. Bumi Kencana Sejahtera (Penggugat) melawan Bupati Sidoarjo(Tergugat) atas dikeluarkannya izin lokasi atas nama PT, Makmur Berkah Amanda Perkara Nomor : 39/G/2019/PTUN.Sby.
2. Gugatan Sdr. Dani Setiawan (Penggugat) melawan Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (Turut Tergugat I) perkara Nomor : 144/Pdt.G/2019/PN.Sda.
3. Gugatan Hj. Choirun Nisak, Dkk (Penggugat) melawan Kepala Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (Tergugat) perkara Nomor : 146/Pdt.G/2019/PN.Sda.
4. Gugatan Sdr. Ninik Chrestiana H dkk (Para Penggugat) melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tergugat) perkara Nomor : 101/G/LH/2019/PTUN.Sby.
5. Permohonan Sdr. Jaques Antonius Latuhihin Perkara Nomor 155/XI/KI/Prov.Jatim/PS/2019 melawan Atasan PPID Kabupaten Sidoarjo Kepada Komisi Informasi Publik Suarabaya.
6. Gugatan Sdr. Nasrulloh,SH (Penggugat) Perkara Nomor: 44/G/2020/PTUN.Sby melawan Ketua Panitia Pilkades Prasung Kecamatan Sidoarjo.
7. Perkara gugatan Sdr Muhammad Nasruloh Perkara Nomor 130 / Pdt.G / 2020 / PN.SDA Melawan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan .
8. Perkara gugatan Sdr. Ujang Kurniawan dkk Perkara Nomor 151 / Pdt.G / 2020 / PN.SDA Melawan Camat Gedangan.
9. Perkara Permohonan Uji Materi Pusat Studi Kebijakan Publik Dan Advokasi Sidoarjo (PUSAKA SIDOARJO) dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya Sdr. Fatihul Faizun,S.Sos perkara Nomor : 53 / P /HUM/ 2020 melawan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
10. Gugatan Sdr Pujanarko perkara nomor :145/G/2020/PTUN.Sby melawan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni.
11. Perkara gugatan Sdr Muhammad Nasruloh Perkara Nomor: 195 / G / 2020/PTUN.Sby Melawan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3. Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, Penanaman Modal dan BUMD dengan anggaran sebesar Rp866.647.090,- dan terealisasi sebesar Rp702.898.857,- atau 81,11 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase kebijakan daerah bidang perekonomian yang diterapkan dengan baik	100%	100%	100%

Permasalahan:

Kebijakan pada masing-masing sub bagian di bidang perekonomian masih belum terintegrasi

Solusi:

Membuat sistem pada bidang perekonomian agar kebijakan dari masing-masing sub bagian dapat terintegrasi

Program tersebut didukung oleh 8 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100	40.073.850,00	25.248.350,00	63,00
Monitoring dan evaluasi kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase hasil monev kebijakan daerah bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan yang ditindaklanjuti	80%	80%	100	65.900.000,00	55.551.000,00	84,30
Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Sumber Daya Alam, Pangan dan	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang sumber daya alam, pangan	3 laporan	5 laporan	167	49.850.000,00	31.885.500,00	63,96

Pertanian serta Perikanan	dan pertanian serta perikanan yang disusun						
Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu / tidak berpita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	Jumlah temuan merk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau tidak berpita cukai yang direkomendasikan untuk mendapatkan tindakan hukum	-	-	-	-	-	-
Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	Jumlah jenis media publikasi ketentuan terkait cukai yang digunakan	3 jenis	3 jenis	100	216.500.000,00	184.247.466,00	85,10
Operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal bersama dg Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yg diinisialisasi oleh Pemerintah Daerah	Persentase temuan merk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau tidak berpita yang direkomendasikan untuk mendapatkan tindakan hukum	100%	100%	100	3.500.000,00	2.905.000,00	83,00
Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Penanaman Modal dan BUMD	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan BUMD yang disusun	3 dokumen	9 dokumen	300	362.423.240,00	282.169.041,00	77,86
Monitoring dan evaluasi kebijakan	Persentase hasil monev kebijakan	80%	80%	100	128.400.000,00	120.892.500,00	94,15

Bidang Penanaman Modal dan BUMD	daerah bidang penanaman modal dan BUMD yang ditindaklanjuti						

Nilai SAKIP Kabupaten

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang berorientasi hasil, adalah dengan dilakukan suatu evaluasi terhadap implementasi SAKIP, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2020 masih belum direlease, sehingga masih menggunakan angka capaian di tahun 2019 yang memperoleh kategori **BB** (**Sangat Baik**). Hasil tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah yakni kategori **A (Memuaskan)**.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan implementasi SAKIP, antara lain :

- Menyempurnakan Aplikasi e-Kinerja sebagai mekanisme manajemen kinerja untuk mengukur kinerja individu, dan menjadi tools untuk keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi
- Meningkatkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan menyusun register resiko sampai dengan level Kegiatan dan membentuk Satgas SPIP ke seluruh OPD
- Peningkatan kualitas implementasi SAKIP OPD dengan merubah struktur penilaian SAKIP OPD, menjadi 95% komponen LKE SAKIP dan 5% komponen LKE SPIP
- Penguatan pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD melalui pengendalian secara elektronik melalui Aplikasi e-Kenda
- Optimalisasi Aplikasi e-Monev untuk evaluasi capaian kinerja Program dan Kegiatan
- Pendampingan dan Asistensi khusus untuk OPD yang Nilai SAKIP masih berada pada Nilai B dan pemberian reward berupa peningkatan kompetensi untuk OPD yang Nilai SAKIP sudah kategori A

Adapun yang masih menjadi catatan dan rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Kabupaten Sidoarjo, adalah :

- Penyusunan Struktur Organisasi masih belum menerapkan PBO / Organisasi yang berbasis kinerja
- Penyempurnaan atas penyusunan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan proses pencapaian kinerja pada OPD
- Mereviu atas penyusunan Indikator Kinerja Individu agar selaras dengan kinerja organisasi

Perkembangan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sebagaimana grafik :

Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data : LHE SAKIP Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebenarnya telah menerapkan Akuntabilitas Kinerja sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi, terutama pada aspek Performance Based Organization.

Dalam pembinaan akuntabilitas kinerja OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, terdapat peningkatan dengan bertambahnya OPD yang mendapatkan Nilai SAKIP A, yaitu 15 OPD, dan sudah tidak ada OPD yang mendapatkan Nilai SAKIP B, atau

di bawah rata – rata Nilai Kabupaten. Apabila digambarkan dalam grafik dapat dilihat sebagai berikut :

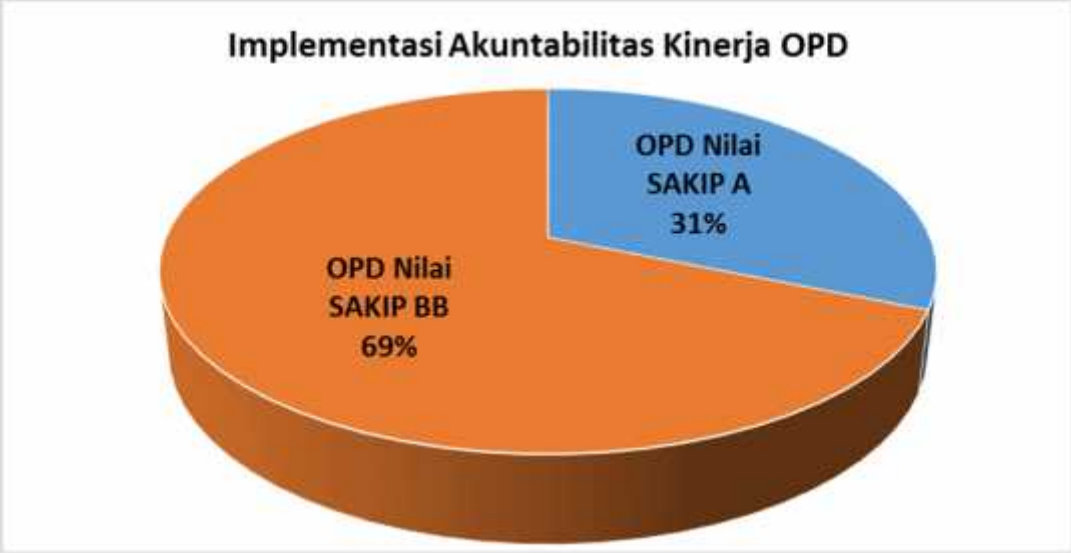

Status Kinerja LPPD

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hasil EKPPD kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 memperoleh nilai (score) 3,4866 dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST) dan menempati peringat ke-**2 (kedua)** tingkat Nasional. Kabupaten Sidoarjo sudah pernah mendapatkan penghargaan Samkarya Nugraha Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan melalui Menteri Dalam Negeri pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXI tahun 2017 yang diselenggarakan di Alun – Alun Kabupaten Sidoarjo, serta Satya Lancana Karya Bhakti Praja Nugraha oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tahun 2015. Sehubungan dengan telah berhasilnya Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penghargaan tersebut, maka Kabupaten Sidoarjo harus tetap dapat mempertahankan prestasi kebanggannya.

Hasil evaluasi di tahun 2019 memang mengalami penurunan secara peringkat, namun untuk secara nilai agregasi meningkat dan masih bertahan dengan status kinerja yang Sangat Tinggi (ST).

Berikut Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana grafik :

Perkembangan Hasil EKPPD Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data : Hasil EKPPD Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan grafik tersebut diatas, Nilai Hasil EKPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 walaupun secara peringkat turun, namun mengalami peningkatan dari 3.4108 menjadi 3.4866, namun masih berada pada kategori Sangat Tinggi (ST).

Peningkatan tersebut terutama dikarenakan angka capaian kinerja pada urusan pelayanan dasar yang mampu bersaing di Tingkat Nasional.

Sedangkan untuk hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2020 masih belum direlease oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga angka capaian masih menggunakan capaian di tahun 2019.

Implementasi Kebijakan Daerah Bidang Pembangunan

Untuk mewujudkan efektivitas pengendalian pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, maka dikembangkan sistem pengendalian pembangunan yang berbasis elektronik. Maksud pengembangan sistem ini adalah sebagai instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD.

Kebijakan tersebut disusun pada triwulan kedua (ke – 2) tahun anggaran 2020.

Adapun manfaat dari kebijakan tersebut, antara lain :

1. Sebagai instrumen pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian program pembangunan
2. Sebagai kontrol pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD agar dilaksanakan sesuai dengan target
3. Sebagai media bahan dan data untuk penyelesaian permasalahan pelaksanaan program pembangunan
4. Meminimalisir paket pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran
5. Meminimalisir terjadinya SILPA

Kebijakan Pengendalian Pembangunan berbasis elektronik tersebut telah diimplementasikan pada Aplikasi e-Kenda.

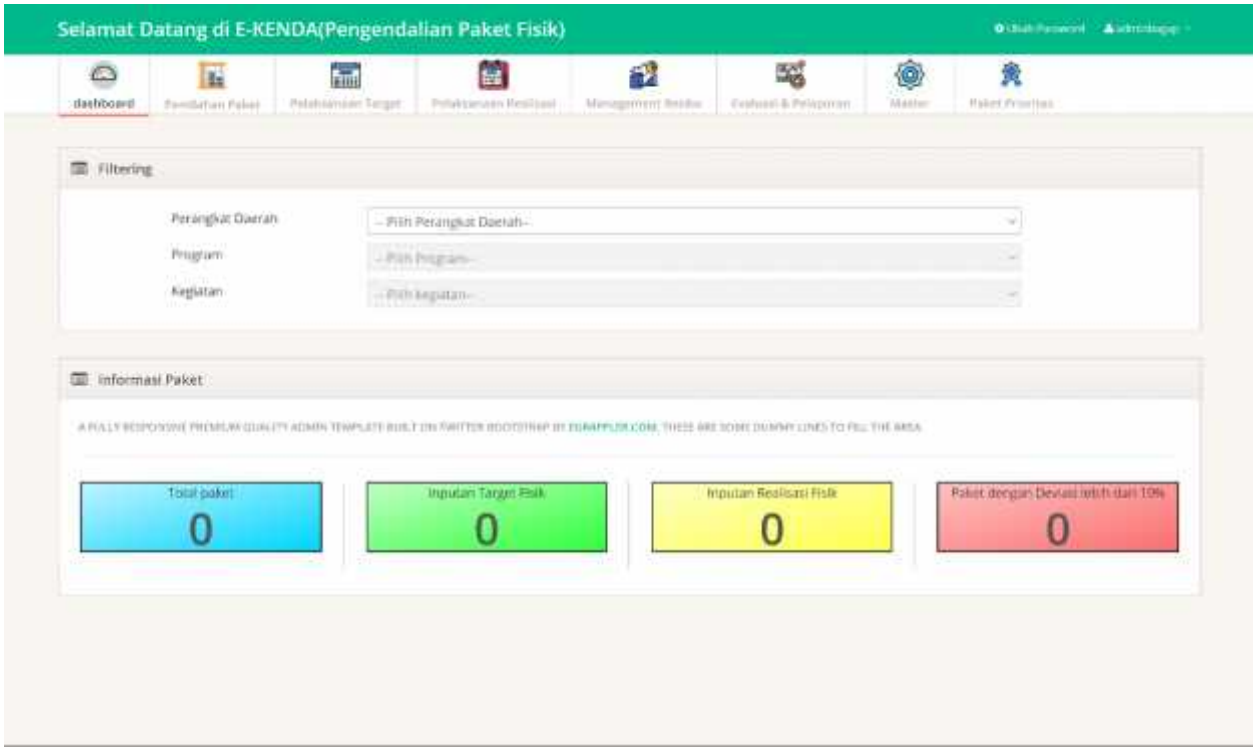

Melalui kebijakan ini setiap OPD dalam pelaksanaan paket pekerjaannya harus menggunakan instrumen pada aplikasi ini, yang juga telah memuat analisa resiko atas kemungkinan yang menjadi masalah / hambatan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020, maka rencana penyusunan kebijakan sebanyak 2 kebijakan, terealisasi 2 kebijakan sehingga capaian 100% dari target.

Untuk selanjutnya akan diupayakan untuk penguatan pemanfaatan pengendalian secara elektronik, sehingga menjadi tools penjamin keberhasian pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD.

IKU (Indikator Kinerja Utama) OPD yang mencapai target

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan OPD dalam mencapai target kinerjanya, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja OPD dengan melakukan pembandingan antara target dengan realisasi kinerja dari IKU (Indikator Kinerja Utama) seluruh OPD. IKU OPD dimaksud adalah IKU OPD yang menjadi prioritas pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Untuk mekanisme pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja telah diatur dalam Kamus Kinerja IKD sebagaimana Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/732/438.1.1.3/2019 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan angka, data, capaian dan pendukung yang telah dihimpun dapat disimpulkan bahwa terdapat 28 Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang belum memenuhi target, atau sekitar 28,28% dari 99 IKD yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021.

Rekapitulasi Capaian Kinerja IKD Tahun 2021

Status	Jumlah IKD	%
Tercapai	63	63,64%
Belum Tercapai	27	27,27%
Data Belum Release	9	9,09%
Total	99	100%

IKD yang belum memenuhi target tersebut antara lain, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Daerah	Target	Realisasi
1	PDRB Perkapita	86.801 juta	86.425 juta
2	Rata – Rata Lama Sekolah (RTLS)	10.8 tahun	10.5 tahun
3	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	16.27%	16.02%
4	Persentase jalan kondisi mantap	90%	82%
5	Persentase luas sawah yang terlayani irigasi	86%	85,38%
6	Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan	65%	61,61%
7	Indeks rasa aman	76,87	76,03
8	Pesentase kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se – Kabupaten Sidoarjo) sesuai SPM	50%	41,54%
9	Persentase penurunan PMKS terhadap penduduk	1,84%	2,23,%
10	Persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor	94,63%	89,03%
11	Indeks kualitas udara	86,26	85,14
12	Persentase sampah yang terkelola	72,28%	67,00%
13	Persentase penduduk yang ber-KTP elektronik	100%	97,8%
14	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun yang ber-akta kelahiran	100%	98,8%
15	Persentase usaha ekonomi masyarakat pedesaan BUMDES Mandiri	26%	25,14%
16	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut KB	81,61%	79%
17	Pesentase keselamatan angkutan darat	90%	89,1%
18	Persentase usaha mikro yang mandiri	2,25%	1,75%
19	Persentase koperasi yang berkualitas	21,5%	20,5%

20	Persentase pertumbuhan nilai investasi	1%	0,81%
21	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional	75 prestasi	73 prestasi
22	Jumlah seni dan budaya daerah yang dilestarikan	4 kelompok	3 kelompok
23	Jumlah kunjungan wisatawan	870.060 orang	844.071 orang
24	Produksi pertanian, perkebunan dan peternakan : Padi	2.059.518 kw	1.944.938 kw
25	Persentase OPD taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan	100%	79,17%
26	Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	99,745%	99,46%
27	Persentase penyelesaian produk hukum yang masuk dalam prolegda	72%	26%

Sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja, maka telah diupayakan dengan menyusun peraturan tentang Penilaian Kinerja OPD, yang didalamnya terdapat komposisi penilaian atas capaian kinerja OPD.

Permasalahan :

Kebijakan terkait implementasi pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan telah disusun berbasis elektronik, namun sehubungan dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) maka integrasi data mendapatkan kendala teknis

Solusi :

1. Menata kebutuhan dan sinkronisasi data untuk diimplementasikan ke Aplikasi
2. Menentukan standart pengisian register resiko yang dapat menjadi early warning sistem untuk program kegiatan yang tidak terselesaikan tepat waktu, beserta decission support sistem atau mekanisme pengambilan keputusan

4. **Program** Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp.1.268.766.145,- dan terealisasi sebesar Rp.1.248.906.996,- atau 98,43%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase Progress / Kemajuan Pengembangan Sistem Aplikasi RDS (Regional Development System)	100%	100%	100%
Persentase Program / Kegiatan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target	100%	81,25%	81,25%
Persentase Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Berkala) Yang Sesuai Ketentuan dan Disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%
Persentase Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Yang Ukuran Kinerjanya telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan Diatasnya	100%	100%	100%

   Permasalahan:

   1. Mekanisme monitoring, evaluasi dan pengendalian program pembangunan yang masih kurang efektif untuk memberikan kontrol atas pelaksanaan paket pekerjaan yang tidak terselesaikan tepat waktu
   2. Terdapat 8 (delapan) OPD yang Program Kegiatannya belum memenuhi target yang ditentukan di tahun 2020
   3. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2020 masih belum direlease oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga asumsi permasalahan masih berkutat pada SILPA yang terlalu tinggi.
   4. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 masih belum direlease oleh Kementerian PAN dan RB, sehingga orientasi peningkatan implementasi masih berkutat pada performance based organization.

Solusi:

1. Optimalisasi pemanfaatan Aplikasi e-Kenda dengan memfungsikan fitur – fitur yang ada serta pemenuhan data yang diperlukan, yang nanti akan menjadi instrumen monitoring, evaluasi dan pengendalian
2. Menyusun SSH, ASB dan HSPK yang sesuai kebutuhan pasar untuk meminimalisir kemungkinan tidak terserapnya program dan kegiatan
3. Integrasi program kegiatan OPD dengan IKK yang terdapat pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Menyusun rencana tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang nanti akan disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penyusunan pelaporan berkala daerah (LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Berkala)	Jumlah dokumen pelaporan kinerja daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	398,949,000.00	396,229,072.00	99.32
Fasilitasi penyusunan ukuran kinerja daerah	Persentase Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang telah dievaluasi ukuran kinerjanya	100%	100%	100%	413,252,900.00	403,422,400.00	97.62
Fasilitasi penyusunan kebijakan program dan kegiatan	Jumlah kebijakan penyusunan program / kegiatan perangkat daerah yang dihasilkan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	100%	143,234,200.00	136,726,084.00	95.46
	Jumlah sub sistem Aplikasi RDS (Regional Development System) yang dikembangkan	1 sub sistem	1 Sub Sistem	100%			
	Jumlah OPD yang memanfaatkan sistem aplikasi RDS (Regional	47 OPD	48 OPD	100%			

	Development System)						
Pengendalian kegiatan pembangunan daerah	Persentase OPD yang mempunyai nilai realisasi ≤ 90%	100%	83,33%	83,33 %	313,330,045.00	312,529,440.00	99.74

Implementasi Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang/Jasa

Untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, maka disusunlah peraturan Bupati Sidoarjo tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pengadaan Langsung Secara Elektronik.

Maksud dari disusunnya Perbup ini adalah sebagai pedoman bagi pelaku pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sidoarjo dalam proses pengadaan langsung yang dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi SPSE. Adapun manfaat dari pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik, antara lain :

1. Meminimalkan jumlah dokumen hardcopy yang perlu dicetak (print);
2. Proses yang dilaksanakan secara elektronik lebih lengkap dan runtut karena ada panduan dari aplikasi, sehingga dapat meminimalisir kesalahan proses;
3. Proses dan seluruh dokumen pengadaan terdokumentasi dalam server LPSE;
4. Proses pengadaan menjadi transparan karena diuumumkan secara luas melalui website LPSE;

Untuk selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Permasalahan :

1. Dalam penyusunan kebijakan daerah seringkali terbentur dengan cepatnya perubahan aturan yang menjadi acuan penyusunan, contohnya adalah perubahan Peraturan Menteri PUPR tentang pengadaan barang/jasa, yang pada tahun 2020 terjadi 2 (dua) kali perubahan
2. Dalam implementasi kebijakan menghadapi kesulitan yaitu banyak yang tidak melaksanakan dikarenakan tidak adanya sanksi akibat tidak diterapkannya kebijakan dimaksud

Solusi :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat serta melakukan peningkatan kompetensi bagi personil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa agar terus update dengan peraturan-peraturan yang baru;
2. Berkoordinasi dengan Inspektorat perihal sanksi bagi OPD yang tidak menerapkan kebijakan pengadaan barang/jasa;

5. Program Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp.2.575.185.304,00,- dan terealisasi sebesar Rp.2.129.806.091,- atau 82,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	KETERANGAN
Level Kematangan Organisasi PBJ	Level 4 pada 1 dari 9 variabel kematangan UKPBJ	Level 3 pada 8 dari 9 variabel kematangan UKPBJ	Tidak tercapi target tahun 2020

Permasalahan:

Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Beberapa kekurangan variabel dalam Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan LKPP yang menunjukkan UKPBJ Kabupaten Sidoarjo berada di level 3 antara lain :
   - Variabel Tugas dan Fungsi Kelembagaan

     Belum adanya sinergi antara pemangku kepentingan (OPD, Pengguna, Penyedia, APH dan pimpinan daerah) di Kabupaten Sidoarjo
   - Variabel Sistem Informasi

     Belum adanya aplikasi yang dapat mengelola database pengadaan barang/jasa menyebabkan pengelolaan database belum terintegrasi. Salah satu penyebabnya adalah tidak ada personil yang menangani pengembangan sistem informasi pada subbag LPSE.
2. Untuk variabel Perencanaan SDM seharusnya sudah masuk dalam kategori level 4, karena pada tahun 2020 UKPBJ Kab. Sidoarjo sudah memiliki 3 (tiga) orang Jabatan Fungsional yang dilantik pada bulan Desember. Kemudian pada tahun 2020 juga telah disusun Anjab dan ABK Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Tetapi dikarenakan ada koreksi bukti dokumen pendukung oleh LKPP, sehingga UKPBJ Kab. Sidoarjo belum mencapai level 4.

Solusi:

1. Berkoordinasi dengan LKPP perihal koreksi dokumen bukti pendukung CoE
2. Melakukan rekrutmen untuk tenaga pengembangan sistem aplikasi
3. Melakukan koordinasi secara terus menerus dan menyusun kebijakan yang dapat mendorong sinergi antara pemangku kepentingan

Program tersebut didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Fasilitasi dan pengelolaan LPSE	Persentase ketersediaan layanan LPSE secara online	80 %	80 %	100	890,963,124	774.059.543	86,88
Fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui bagian PBJ	1. Persentase paket pengadaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkiraan RUP	266	280	105,26	455.691.940	416.563.163	91,41
	2. Persentase penawaran peyedia yang memenuhi persyaratan dokumen pengadaan	128	65	59,78			
Pelaksanaan advokasi bidang pengadaan barang dan jasa	Terfasilitasinya permasalahan/pengaduan/sanggah pengadaan barang dan jasa	100 %	100 %	100	441.327.840	294.548.744	66,74
Pembinaan pengadaan barang dan jasa	Terwujudnya perencanaan dan pemilihan pengadaan barang dan jasa yang sesuai	95 %	90 %	90	787.202.400	644.634.641	81,89

6. Program Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.776.852.080,- dan terealisasi sebesar Rp689.612.501,- atau 88.77%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase perangkat daerah yang hasil evaluasi kelembagaannya ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Persentase Perangkat Daerah / unit kerja yang SKM nya berkategori baik	100%	100%	100%

Sebagaimana table diatas, semua target kinerja program pada Bagian organisasi telah tercapai 100%. Pada indikator Persentase perangkat daerah yang hasil evaluasi kelembagaannya ditindaklanjuti, telah dilakukan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah sebanyak 20 PD dan sudah selesai Raperbupnya dan telah ditindaklanjuti menjadi Perbup.

Pada indikator Persentase Perangkat Daerah / unit kerja yang SKMnya berkategori baik, Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Sidoarjo dengan nilai konversi **89,016 Kategori A (Sangat Baik)**. Nilai IKM tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan pada 48 Perangkat Daerah dan MPP Sidoarjo.

NO.	INSTANSI PELAYANAN PUBLIK	KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	
1	2	3	4	
1	SEKRETARIAT DAERAH	86.981	B	BAIK
2	SEKRETARIAT DPRD	82.444	B	BAIK
3	INSPEKTORAT	88.504	A	SANGAT BAIK
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	92.244	A	SANGAT BAIK
5	DINAS KESEHATAN	88.369	A	SANGAT BAIK

6	DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	85.605	B	BAIK
7	DINAS PERUMAHA, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DANTATA RUANG	87.033	B	BAIK
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	85.749	B	BAIK
9	DINAS SOSIAL	89.304	A	SANGAT BAIK
10	DINAS TENAGA KERJA	91.593	A	SANGAT BAIK
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	89.399	A	SANGAT BAIK
12	DINAS P3A KB	92.057	A	SANGAT BAIK
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	91.437	A	SANGAT BAIK
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	86.983	B	BAIK
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	86.299	B	BAIK
16	DINAS PERHUBUNGAN	90.534	A	SANGAT BAIK
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	85.421	B	BAIK
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	89.870	A	SANGAT BAIK
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	87.483	B	BAIK
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	90.299	A	SANGAT BAIK
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	90.091	A	SANGAT BAIK

NO.	INSTANSI PELAYANAN PUBLIK	KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	
22	DINAS PERIKANAN	85.967	B	BAIK
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	93.972	A	SANGAT BAIK
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	86.667	B	BAIK
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	88.923	A	SANGAT BAIK
26	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	87.538	B	BAIK
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	88.992	A	SANGAT BAIK
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	90.115	A	SANGAT BAIK
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	87.579	B	BAIK
30	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	90.239	A	SANGAT BAIK
31	MAL PELAYANAN PUBLIK	87.356	B	BAIK
32	Kecamatan Sidoarjo	88.726	A	SANGAT BAIK
33	Kecamatan Candi	85.430	B	BAIK
34	Kecamatan Buduran	91.462	A	SANGAT BAIK
35	Kecamatan Gedangan	89.072	A	SANGAT BAIK
36	Kecamatan Sedati	91.072	A	SANGAT BAIK
37	Kecamatan Waru	87.784	B	BAIK
38	Kecamatan Taman	89.636	A	SANGAT BAIK
39	Kecamatan Krian	92.592	A	SANGAT BAIK
40	Kecamatan Wonoayu	88.248	B	BAIK
41	Kecamatan Sukodono	89.223	A	SANGAT BAIK
42	Kecamatan Balongbendo	88.054	B	BAIK
43	Kecamatan Tarik	89.527	A	SANGAT BAIK

44	Kecamatan Tulangan	93.108	A	SANGAT BAIK
45	Kecamatan Prambon	88.430	A	SANGAT BAIK
46	Kecamatan Krembung	89.443	A	SANGAT BAIK
47	Kecamatan Tanggulangin	92.282	A	SANGAT BAIK
48	Kecamatan Jabon	90.067	A	SANGAT BAIK
49	Kecamatan Porong	92.595	A	SANGAT BAIK
	RATA-RATA KONVERSI	**89.016**	**A**	SANGAT BAIK

a. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Setiap tahunnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo diupayakan selalu meningkat, hal ini sesuai dengan kebijakan satu OPD satu Inovasi yang ditetapkan oleh Bapak Bupati Sidoarjo. Selain itu banyak pula inovasi di Kabupaten Sidoarjo yang pernah mendapatkan penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu SIPPADU Aplikasi Perijinan Terpadu (TOP 33), SIMANIES Aplikasi untuk mencegah kematian ibu melahirkan (TOP 99), dan SIPEKAT Aplikasi kenaikan pangkat paperless (TOP 99).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 111 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2020, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2020 mendapatkan nilai sebagai berikut :

Unit Pelayanan Yang di Sampling	Nilai (Indeks)	Konversi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,55	Pelayanan Prima (A)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,98	Baik (B)
Nilai Indeks rata-rata	**4,27**	**Sangat Baik (A-)**

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Tahun 2021

Pembangunan Mal Pelayanan Publik, Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta penerapan Kelompok Budaya Kerja (KBK) mendorong tercapainya kualitas pelayanan publik yang Sangat Baik. Diharapkan di tahun 2021 akan semakin banyak unit pelayanan yang mendapatkan sampling dan memiliki inovasi yang efektif, sehingga nilai Indeks Pelayanan Publik juga semakin meningkat.

Apabila dibandingkan dengan Indeks Pelayanan Publik di Tahun 2019 dengan nilai 4,16 maka terdapat peningkatan nilai sebesar 0,11. Hal ini membuktikan bahwa seluruh rekomendasi tahun 2019 sedang ditindaklanjuti secara bertahap di tahun 2020. Dan setiap tahunnya juga dilaksanakan evaluasi mandiri untuk penguatan peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing perangat daerah.

Pemerintah dalam beberapa regulasi juga menekankan pentingnya kepala daerah melakukan inovasi untuk mendorong efektivitas pelayanan publik, menciptakan nilai tambah, serta tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Berkaitan dengan hal itu, untuk mendorong tingkat daya saing dan optimalisasi otonomi daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, melalui Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri mengukur tingkat inovasi di suatu daerah, melalui indeks inovasi daerah.

Berdasarkan SK Mendagri Nomor 100-4672 Tahun 2020 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2020, didapati hasil indeks inovasi daerah tahun 2020 adalah 3,983 dengan predikat **Sangat Inovatif** dan urutan ke-29 dari 415 kabupaten se-Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat serius dilaksanakan. Secara berkelanjutan, seluruh perangkat daerah diintruksikan untuk memperbaiki kualitas layanan, melakukan penyederhanaan prosedur dan persyaratan serta memberikan jiwa hospitality yang ramah dan baik

b. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Oleh karena itu, untuk melaksanakan dan mengelola setiap 8 (delapan) area perubahan dalam reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada road map atau peta jalan reformasi birokrasi di Kabupaten Sidoarjo perlu di lakukan upaya-upaya strategis manajemen perubahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara komprehensif oleh seluruh pimpinan unit kerja dan aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pada tahun 2020 Indek Reformasi Birokrasi (IRB) hasil evaluasi oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum dirilis, sehingga nilai IRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 belum bisa dilaporkan.

Permasalahan:

Hampir tidak ada permasalahan berarti.

Upaya yang dilakukan:

Optimalisasi kegiatan yang sudah berjalan dengan lebih intensive melakukan pendampingan, Monev dan sosialisasi pada OPD.

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Monev kelembagaan, Anjab dan reformasi birokrasi	1. Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi kelembagaannya	100%	100%	100%	148.825.000	127.666.621	85
	2. Persentase Perangkat	100%	100%				

	Daerah yang memanfaatkan Anjab dan ABK 3. Nilai PMPRB	68	-				
Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SKM 2. Persentase Perangkat Daerah pelayanan yang menerapkan standar pelayanan dan SOP 3. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Kelompok Budaya Kerja	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	591.345.000	532.757.500	90%
Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	1. Persentase pegawai Sekretariat Daerah yang puas terhadap pelayanan kepegawaian 2. Persentase disiplin pegawai Sekretariat Daerah 3. Hasil	100% 100%	96,6% -	96,6% - 81%	36.682.080	29.188.380	79,57

	perjanjian kinerja individu dengan nilai diatas 90%	100%	81%				

Unsur Penunjang Sekretariat DPRD

Unsur penunjang sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Realisasi Kinerja Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel,inovatif dan transparan dan penyelesaian Produk Hukum yang Masuk Dalam Prolegda	Survey Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	74	82,481	111,46%	75	82,444	109,925%
	Prosentase penyelesaian produk hukum yang masuk dalam Prolegda	70	39,28	56,11%	72	26	36,11%

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 untuk survey kepuasan Anggota DPRD mencapai target, hal ini dikarenakan Sekretariat DPRD telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melayani dan mendukung tri fungsi DPRD.
Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan kenyamanan Anggota DPRD terhadap sarana dan prasarana kantor yang menurun.
Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 108,48% dari target, hal ini diupayakan dengan memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 untuk prosentase penyelesaian produk hukum yang masuk dalam Prolegda belum optimal, hal ini dikarenakan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagai fasilitator untuk penyelesaian produk hukum dan telah melaksanakan fungsi fasilitator dengan maksimal sedangkan kewenangan eksekutor tetap dipegang oleh Anggota DPRD.
Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya pertimbangan - pertimbangan teknis yang masih perlu dibahas lebih lanjut oleh pansus - pansus pembahasan Perda.
Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 35,62% dari target, hal ini diupayakan dengan memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.

b. Realisasi Kinerja Sasaran

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Survey Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	73	75,26	103,09%	74	82,481	111,46%	75	82,444	109,925%
Prosentase penyelesaian produk hukum yang masuk dalam Prolegda	68,02	43,56	64,04%	70	39,28	56,11%	72	26	36,11%

1) Nilai IKAD (Indeks Kepuasan Anggota DPRD)

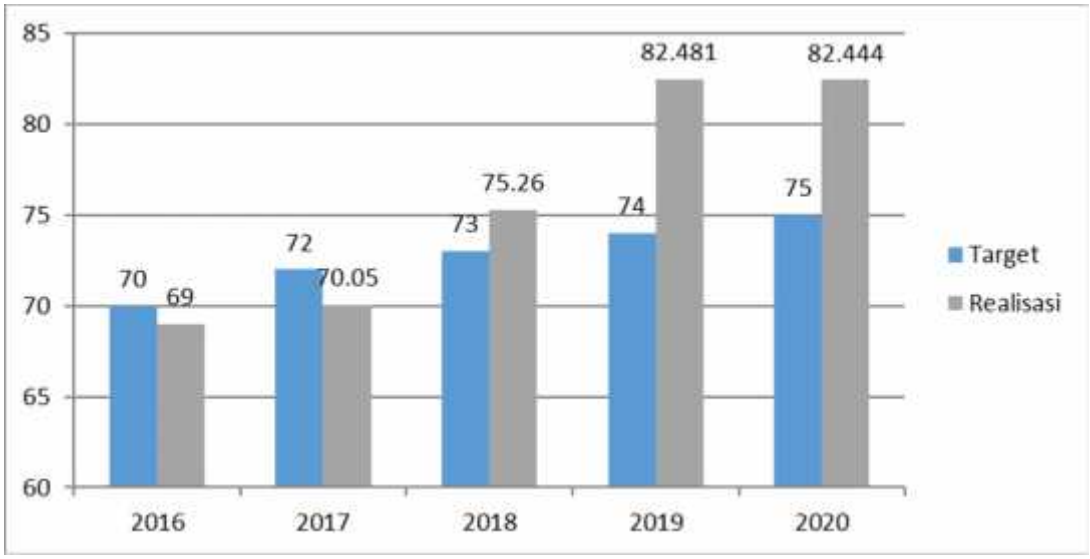

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 untuk survey kepuasan Anggota DPRD telah mencapai target, hal ini dikarenakan Sekretariat DPRD telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melayani dan mendukung Tri-fungsi DPRD (budgeting, controlling dan legeslatif).

Apabila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya selalu mencapai target.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 108,48% dari target. Sekretariat DPRD selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik, antara lain :

1. Selalu memberikan masukan agar Anggota DPRD dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Selalu memberikan pelayanan prima dan tak terbatas waktu untuk seluruh Anggota DPRD.
3. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana guna kenyamanan Anggota DPRD dalam bekerja.

Permasalahan :

1. Perlu perluasan kapasitas ruang rapat/ruang komisi untuk Anggota DPRD.
2. Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendampingi DPRD.
3. Perlu adanya media penghubung antara DPRD dengan masyarakat.
4. Perlu adanya tindak lanjut dalam penanganan kritik dan saran.

Solusi :

1. Melakukan penataan ruang rapat secara maksimal guna menunjang kelancaran pelayanan.
2. Memberikan pelatihan dan motivasi SDM unggul.
3. Meningkatkan penggunaan aplikasi media elektronik yang sudah ada.
4. Melakukan pengecekan data sehingga dapat mempercepat penyelesaian masalah.

2) Penyelesaian Produk Hukum Yang Masuk Dalam Prolegda

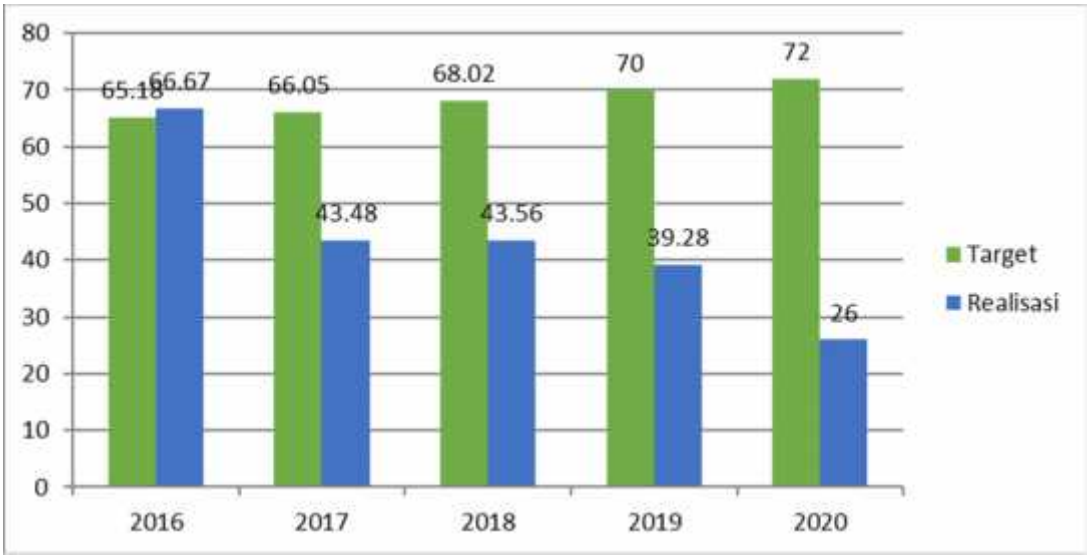

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 untuk prosentase penyelasaian produk hukum yang masuk dalam prolegda belum optimal, hal ini dikarenakan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagai fasilitator untuk penyelesaian produk hukum dan telah melaksanakan fungsi fasilitator dengan maksimal sedangkan kewenangan eksekutor tetap dipegang oleh Anggota DPRD.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya pertimbangan - pertimbangan teknis yang masih perlu dibahas lebih lanjut oleh pansus - pansus pembahasan Perda.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 35,62% dari target, hal ini diupayakan dengan memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.

Sekretariat DPRD terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, sesuai dengan prosedur pelayanan dan peraturan Perundang - Undangan serta dijalankan tepat waktu kepada para Anggota DPRD.

c. Program dan Kegiatan

1. **Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan** dengan anggaran sebesar Rp.40.995.292.898,- dan terealisasi sebesar Rp.21.414.989.994,- atau 52,24%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
a. Prosentase penyelenggaraan kegiatan dialog dan jaring aspirasi masyarakat	a. 84 %	a. 0 %	a. 0 %
b. Prosentase penyelenggaraan kegiatan Banggar, KUA, KUPA, APBD dan PAPBD	b. 100 %	b. 100 %	b. 100 %
c. Prosentase	c. 100 %	c. 100 %	c. 100 %

penyelenggaraan kegiatan BK, Komisi, dan Monev			

Permasalahan:

1. Kegiatan dialog tidak dapat terlaksana karena adanya pembatasan tatap muka selama Pandemi Covid-19.
2. Kegiatan reses tetap dilaksanakan dengan pembatasan jumlah audience yang diundang sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.
3. Kegiatan Banggar, BK, Komisi dan Monev tetap dilaksanakan tetapi memakai transportasi darat sehingga penyerapan anggaran dibawah target.

Solusi:

1. Kegiatan dialog dilaksanakan secara virtual.
2. Kegiatan reses dilaksanakan dengan meminimalkan jumlah audience yang diundang (-/+ 5 orang) sesuai protocol kesehatan.
3. Tetap melaksanakan kegiatan kunjungan kerja, konsultasi, koordinasi dan sidak sesuai protocol kesehatan dan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD.

Program tersebut didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Fasilitasi kegiatan dialog Anggota DPRD dengan pemangku kepentingan	Prosentase kebutuhan dialog Anggota DPRD dengan pemangku kepentingan yang telah difasilitasi	84 %	0 %	0 %
Failitasi kegiatan jaring aspirasi masyarakat	a. Jumlah kegiatan reses Anggota DPRD yang difasilitasi b. Prosentase laporan hasil reses Anggota DPRD yang telah dievaluasi	a. 300 kegiatan b. 100 %	a. 300 kegiatan b. 100 %	a. 100 % b. 100 %
Fasilitasi penyelenggaraan tugas banggar, KUA, KUPA, APBD dan PAPBD	Prosentase penyelenggaraan tugas Banggar, KUA, KUPA, APBD dan PAPBD yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %
Fasilitasi kegiatan Komisi dan Monev	a. Prosentase kegiatan komisi yang difasilitasi b. Prosentase penggunaan anggaran yang diawasi	a. 100 % b. 85 %	a. 100 % b. 85 %	a. 100 % b. 100 %

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Fasilitasi kegiatan dialog Anggota DPRD dengan pemangku kepentingan	Rp 529.835.000	Rp 0	0 %
Failitasi kegiatan jaring aspirasi masyarakat	Rp 1.726.635.000	Rp 254.846.900	14,76 %
Fasilitasi penyelenggaraan tugas banggar, KUA, KUPA, APBD dan PAPBD	Rp 9.155.000.000	Rp 4.322.707.177	47,22 %
Fasilitasi kegiatan BK, Komisi dan Monev	Rp 29.583.822.898	Rp 16.837.435.917	56,91 %

2. **Fasilitasi Persidangan dan Perundang-Undangan** dengan anggaran sebesar Rp.27.134.897.651,- dan terealisasi sebesar Rp.12.425.272.010 atau 45,79%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
a. Prosentase Perda dan produk hukum lainnya yang dibahas, disusun dan ditetapkan oleh DPRD b. Prosentase persidangan dan rapat-rapat DPRD yang difasilitasi	a. 84 % b. 100 %	a. 84 % b. 100 %	a. 100 % b. 100 %

Permasalahan:

1. Untuk rapat Paripurna, Pimpinan DPRD meminta untuk tetap dilaksanakan secara tatap muka.
2. Perda dan kode etik DPRD masih dalam proses penyusunan dan pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Kehormatan (BK) DPRD.
3. Volume undangan untuk Pimpinan DPRD menurun.

Solusi:

1. Rapat Paripurna tetap dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dengan meminimalkan jumlah audience dan dilaksanakan di 3 tempat/gedung (Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Diskominfo).

2. Memfasilitasi penyusunan, pembahasan serta penetapan Perda dan kode etik DPRD secara maksimal.

Program tersebut didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat	Prosentase penyelenggaraan rapat-rapat DPRD yang memenuhi SOP/ketentuan	84 %	84 %	100%
Penyelenggaran Kehumasan	Prosentase kegiatan Anggota DPRD yang difasilitasi media kehumasan	84 %	84 %	100%
Fasilitasi pembahasan Rancangan Perda dan Produk Hukum Lainnya	Prosentase kebutuhan pembahasan penyusunan produk hukum daerah yang difasilitasi	84 %	84 %	100 %
Penyelenggaraan dokumentasi produk hukum	Prosentase produk hukum daerah yang telah didokumentasikan	84 %	84 %	100%
Fasilitasi kunjungan kerja Bamus, Bapemperda dan Pansus	Prosentase kunjungan kerja Bamus, Bapemperda dan Pansus yang difasilitasi	100 %	100 %	100%
Fasilitasi kegiatan keprotokolan Pimpinan DPRD	Prosentase kegiatan Pimpinan DPRD yang difasilitasi oleh protokoler	100 %	100 %	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat	Rp 489.500.000	Rp 115.820.000	23,66 %
Penyelenggaran Kehumasan	Rp 1.232.995.200	Rp 1.005.030.000	85,57 %
Fasilitasi pembahasan Rancangan Perda dan Produk Hukum Lainnya	Rp 2.004.805.000	Rp 506.869.500	25,28 %

Penyelenggaraan dokumentasi produk hukum	Rp 62.975.000	Rp 2.373700	3,77 %
Fasilitasi kunjungan kerja Bamus, Bapemperda dan Pansus	Rp 7.259.800.000	Rp 4.696.187.052	64,69 %
Fasilitasi kegiatan keprotokolan Pimpinan DPRD	Rp 16.084.804.451	Rp 6.048.991.758	37,61 %

3. **Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp.6.692.177.990 dan terealisasi sebesar Rp.1.617.897.660 atau 24,18%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
a. Tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti Peningkatan Kapasitas DPRD	a. 85 %	a. 35,94 %	a. 30,55 %
b. Meningkatnya kesehatan Anggota DPRD	b. 50 orang	b. 50 orang	b. 100 %

Permasalahan:

1. Volume undangan kegiatan bimbingan teknis DPRD berkurang dikarenakan Pandemi Covid-19.
2. Test swap/rapid test dilakukan secara mandiri.

Solusi:

Anggaran kegiatan bimbingan teknis DPRD dikurangi didalam DPPA TA. 2020

Program tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti General Medical Check Up	50 orang	50 orang	100 %
Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas	85 %	35,94 %	30,55 %

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD	Rp 865.065.000	Rp 296.242.500	34,25 %
Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp 5.827.112.900	Rp 1.321.655.160	22,68 %

Unsur Penunjang Pengawasan

Unsur penunjang pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Realisasi KinerjaTujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui optimalisasi pengendalian internal	Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo	Ter definisi	Ter definisi	Ter definisi	Ter definisi	Ter definisi	Ter definisi
	Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo	BB	A	BB	BB	A	*)
	Opini Atas Audit BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	*)

<u>Indikator : Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo</u>

Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dari level berkembang menjadi terdefinisi, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai serta telah diimplementasikan pada seluruh kegiatan. Pada tahun 2019 telah dilakukan *self assessment* atas maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan nilai 3,7273 dan pada tahun yang sama BPKP Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan *quality assurance* (QA) Nomor : SP-1354/D3/04/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan nilai 3,0909 dengan nilai perubahan 0,6364. Namun sampai akhir tahun 2020 penetapan atas maturitas penyelenggaraan SPIP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diusulkan oleh BPKP Provinsi Jawa Timur kepada BPKP Pusat Jakarta masih belum turun.

Indikator : Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo

Capaian kinerja pada Indikator ini menunjukan tren positif, mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 capaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan konsistensi dan keseriusan pemerintah kabupaten Sidoarjo dalam mengelola sistem akuntabilitas kinerja.

Indikator : Opini Atas Audit BPK

Pada indikator ini menunjukan bahwa kurun waktu 5 (lima) tahun predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) telah diraih Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Predikat WTP berarti informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern telah dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan dalam tataran wajar.

b. Realisasi Kinerja Sasaran

Untuk mendukung target tujuan tersebut diatas ditetapkan sasaran dengan target kinerja sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	63,82%	100% (47/47)	100%	100% (48/48)	100%	100% (48/48)
	2. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinis (Skor 3,09)	Terdefinisi	Terdefinis (Skor 3,09)
	3.Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan ekternal yang ditindaklanjuti	99,00%	94,24% (589/625)	94,24%	99,88% (844/845)	96%	100% (930/930)
	4.Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan nspektorat Kabupaten Sidoarjo yang itindaklanjuti	99,65%	72,18% (558/773)	72,18%	89,82% (600/668)	75%	75% (123/164)
	5.Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100%	100% (45 kasus)	100%	91,18% (31/34)	100%	100% (144/144)

Indikator : Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B

Pada indikator ini tren positif sudah terlihat mulai tahun 2017, dari target 55,31% realisasi 91,48% begitu juga tahun-tahun berikutnya menunjukan kenaikan baik pada realisasi maupun capaian kinerjanya. Ini berarti nilai SAKIP OPD yang minimal B dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Realisasi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

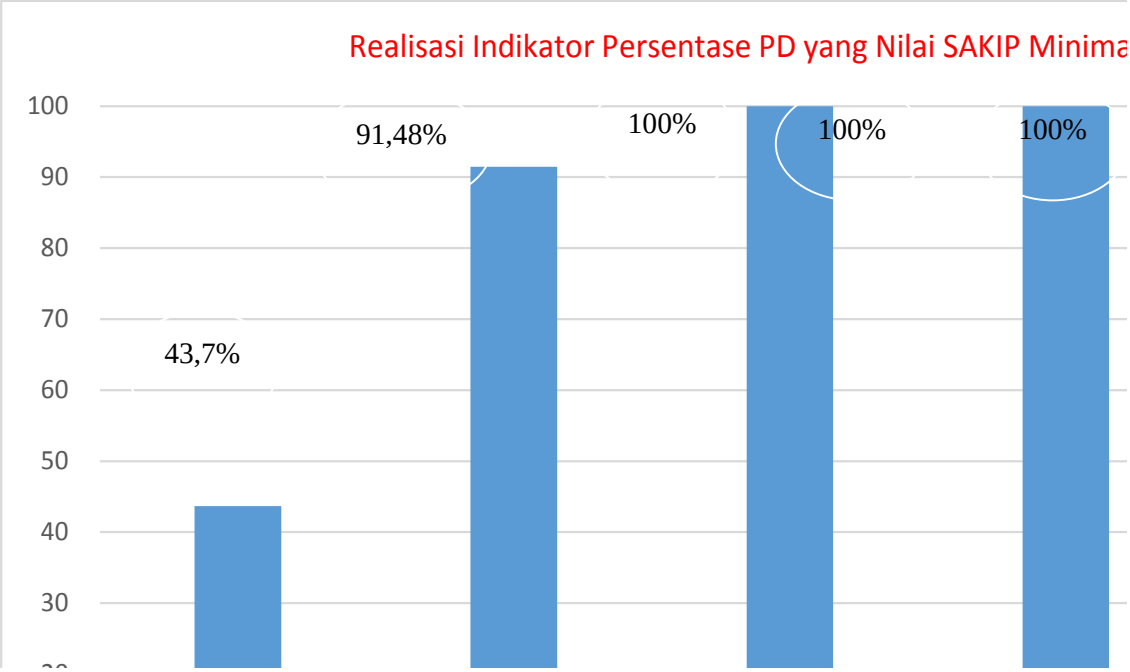

Upaya peningkatan nilai SAKIP OPD terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, salah satu upaya yang dilakukan adalah pendampingan secara khusus kepada 8 (delapan) OPD bernilai B pada tahun 2019. Dan upaya tersebut membuahkan hasil terbukti pada tahun 2020 tidak ada OPD yang bernilai B, artinya nilai SAKIP OPD meningkat dari minimal B pada tahun 2019 menjadi minimal BB pada tahun 2020.

***Indikator :* Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi**

Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian maturitas SPIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dari level berkembang menjadi terdefinisi, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai serta telah diimplementasikan pada seluruh kegiatan. Pada tahun 2019 telah dilakukan *self assessment* atas maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo dengan nilai 3,7273 dan pada tahun yang sama BPKP Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan *quality assurance* (QA) Nomor : SP-1354/D3/04/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan nilai 3,0909 dengan nilai perubahan 0,6364. Namun sampai akhir tahun 2020 penetapan atas maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diusulkan oleh BPKP Provinsi Jawa Timur kepada BPKP Pusat Jakarta masih belum turun.

Walaupun penetapan atas maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diusulkan oleh BPKP Provinsi Jawa Timur belum ditetapkan oleh BPKP Pusat Jakarta, upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan maturitas SPIP terus dilakukan, Pemerintah kabupaten Sidoarjo terus memotivasi agar antusias OPD meningkat dalam memitigasi risiko baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Upaya membangkitkan semangat OPD dalam memitigasi risiko dilakukan dengan jalan asistensi, konsulting, dan monitoring. Pada tahun 2020 upaya tersebut ditingkatkan dengan memasukan nilai SPIP OPD pada penilaian SAKIP, sehingga penilain SAKIP OPD pada tahun 2020 menggunakan komposisi sebagai berikut :

1. Nilai LKE SAKIP dengan bobot 95%
2. Nilai SPIP (hasil penilaian risiko OPD) dengan bobot 5%

Upaya tersebut berhasil memicu OPD untuk melakukan penilaian risiko dengan tingkat pengumpulan 100% (48 OPD).

Indikator : Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan ekternal yang ditindaklanjuti

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tren tindak lanjut atas rekomendasi BPK dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, hanya pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,62% dibanding tahun 2017, hal ini disebabkan 36 rekomendasi masih dalam proses verifikasi oleh BPK dan sudah terselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 persentase tindak lanjut telah mencapai sesuai target yang diharapkan, dari jumlah komulatif rekomendasi BPK sebanyak 930 rekomendasi telah ditindaklanjuti seluruhnya pada tahun 2020 sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 100%.

Indikator : **Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti**

Rata-rata capaian kinerja pada indikator ini sebesar 93,42% dengan kategori **berhasil**, namun pada tahun 2017 dan 2018 capaian kinerja dibawah 80% hal ini disebabkan jadwal pemeriksaan ada pada akhir tahun sehingga proses tindaklanjut tidak cukup waktu pada tahun berjalan. Upaya perbaikan penjadwalan dan teknik pemeriksaan telah dilakukan dan dapat dilihat kurun waktu 2 tahun yaitu tahun 2019 dan 2020 capaian kinerja telah mencapai lebih dari 100%. Pada tahun 2019 dari 668 rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 600 rekomendasi dengan capaian 124,44% dari target yang tetapkan sebesar 72,18% (482 rekomendasi) realisasi 89,82% (600 rekomendasi). Pada tahun 2020 juga menunjukan tren positif dari 164 rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 123 rekomendasi dengan tingkat capaian 100% dari target yang ditetapkan 75% (123 rekomendasi) realisasi 75% (123 rekomendasi).

Indikator : **Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti**

Keseriusan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani kasus/pengaduan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja indikator kinerja ini. Mulai tahun 2016 sampai tahun 2020, rata-rata capaian kinerja sebesar 98,24% dengan kategori **berhasil**. Pada tahun 2020 realisasi indikator ini mengalami kenaikan 0,12% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2019 kasus/pengaduan yang masuk APIP sebanyak 34 kasus/pengaduan dan yang selesai ditindaklanjuti 31 kasus/pengaduan dengan tingkat capaian 91,18%, hal ini disebabkan kasus/pengaduan masuk akhir bulan Desember 2019 sehingga tidak cukup waktu untuk menindaklanjuti dan proses tindak lanjut dilanjutkan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 kasus/pengaduan yang masuk ke APIP naik secara drastis sebanyak 144 kasus/pengaduan (termasuk 3 kasus/pengaduan tahun 2019 yang belum selesai ditindaklanjuti) dan seluruh kasus/pengaduan yang masuk tahun ini selesai ditindaklanjuti seluruhnya dengan tingkat capaian kinerja 100%.

c. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pada tahun 2020 anggaran biaya program ini sebesar Rp.1.070.921.300,- dan terealisasi sebesar Rp.929.450.000,- dengan persentase serapan sebesar 86,79%.

Adapun indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100%	100% (48/48)	100%
Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinis (Skor 3,09)	100%
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan ekternal yang ditindaklanjuti	96%	100% (930/930)	104,17%
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti	75%	75% (123/164)	100%
Persentase pengaduan/kasus yang diselesaikan	100%	100% (144/144)	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 5 indikator program rata-rata capaian kinerja 100,83% dan dapat dikatakan **sangat berhasil**,

Program tersebut didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan capaian kinerja sebagai berikut :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah laporan evaluasi yang disusun	76 Laporan	76 Laporan	100%
	Jumlah laporan hasil reviu yang disusun	65 Laporan	77 Laporan	118,5%

	Jumlah laporan hasil audit yang disusun	18 Laporan	18 Laporan	100%
	Jumlah laporan hasil riktu yang disusun	75 Laporan	75 Laporan	100%
	Jumlah laporan hasil consulting yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Jumlah Laporan hasil penilaian ZI yang disusun	8 Laporan	8 Laporan	100%
	Jumlah laporan hasil sosialisasi yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	100%
	Jumah laporan monitoring yang disusun	87 Laporan	87 Laporan	100%

Dari tabel capaian kinerja kegiatan tersebut di atas, 8 indikator kinerja capaian rata-rata 102,31% dengan kategori **sangat berhasil**.

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Rp. 1.070.921.300,-	Rp. 929.450.000,-	86.79%

Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan

Unsur penunjang perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Tujuan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah Bappeda Kab. Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALI SASI	%
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)	3,89	3,89	100	5,34	5,34	100	-	-	-

Keterangan :

Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021, maka diperlukan pula peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan capaian Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Indikator ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah untuk mempersiapkan dokumen perencanaan dengan baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan.

Maka pada Tahun 2020 Bappeda Kabupaten Sidoarjo mengikuti kompetisi dalam rangka Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), yaitu kompetisi yang diadakan oleh BAPPENAS dalam rangka mengukur tingkat konsistensi dokumen perencanaan, inovasi dan capaian pembangunan daerah. Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Daerah yang sudah berhasil menyusun perencanaan dan berbagai inovasi serta terobosan dalam perencanaan pembangunan.

Tahapan penilaian dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) ini terdiri dari Penilaian dokumen perencanaan; Verifikasi lapangan dan wawancara serta Presentasi.

Sesuai Pedoman Umum Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dari Bappeprov Jatim tahun 2020 bahwa nilai PPD dihitung melalui berbagai tahap yaitu sebagai berikut :

1. Penilaian tahap I adalah Penilaian Perencanaan dan Pelaksanaan RKPD Kabupaten dan Kota oleh Tim Provinsi.

2. Penilaian Tahap II adalah tahap Presentasi dan Wawancara oleh Tim Provinsi
3. Penilaian Tahap III adalah tahap Penilaian Dokumen dan Pencapaian RKPD Kabupaten dan Kota oleh Tim Pusat
4. Penilaian Tahap IV adalah tahap Presentasi dan Wawancara oleh Tim Pusat

Namun sampai dengan saat ini, kami belum menerima jawaban atas Surat Permohonan Nilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020 untuk Kabupaten Sidoarjo dari pihak Bappeda Provinsi Jawa Timur sesuai surat Permohonan kami No. 050/703/438.6.1/2021 tanggal 11 Februari 2021.
Untuk mendukung tujuan prioritas RPJMD maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

b. Sasaran

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALI SASI	%
Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik	95	96,4	101,47	97	100	103,09	98	100	102,04
Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	60	60,87	101,45	65	61	93,85	70	69.79	99,70
Persentase Program Pembangunan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian hasil (*outcame*) > 76 %	85	93,72	110,26	87	97,92	112,55	90	100	111,11
Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	45	64,45	143,22	50	72,54	145,08	55	44	80,00

Permasalahan:

Pada dasarnya tidak dijumpai permasalahan yang signifikan yang menghambat/menjadi kendala capaian sasaran, namun demikian terdapat hal yang kami ungkapkan yaitu sebagai berikut :

3. Indikator : Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik

Definisi Operasional dokumen Perencanaan PD yang berkualitas baik sesuai Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Dokumen Renja disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu
b. Berisikan Program dan Kegiatan yang memuat Tupoksi SKPD

c. Memuat indikator kinerja yang terukur, lokasi program, tahun pelaksanaan dan sumber dana yang diperlukan
d. Terdapat keselarasan antara Renstra dan RPJMD
e. Terdapat keselarasan antara Renja, RKPD dan KUA-PPAS serta RAPBD.

Rincian Perangkat Daerah yang Menyusun dokumen Perencanaan dengan Kualitas Baik adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah PD	Sesuai	Capaian
1	Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	48	48	100%
2	Berisikan Program dan Kegiatan dokumen yang memuat Tupoksi PD	48	48	100%
3	Memuat Indikator kinerja yang terukur, lokasi program, tahun pelaksanaan dan sumber dana yang diperlukan	48	48	100%
4	Terdapat keselarasan antara Renstra dan RPJMD	48	48	100%
5	Terdapat keselarasan antara Renja dan RKPD	48	48	100%
	Rata-rata Capaian	**48**	**48**	**100%**

Saat ini seluruh dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 telah menunjukkan keselarasan **100%**. Keselarasan dokumen Perencanaan dan Penganggaran ini dikarenakan telah terakomodirnya seluruh system perencanaan dan penganggaran dalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dimana dalam aplikasi tersebut terdiri dari Dokumen Renja, Program Kegiatan serta sub kegiatanPD, Indikator kinerja yang terukur dalam Renstra, serta Data RPJMD Kabupaten Sidoarjo.

4. **Indikator : Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD**

   Usulan Musrenbang 18 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun Anggaran 2020 berjumlah 2.519 usulan sedangkan yang dapat diakomordir dalam RKPD adalah sebanyak 1.758 usulan atau sebesar **69.79%** dari total usulan yang ada sesuai rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Usulan Kegiatan		
		Diusulkan	Diterima	Ditolak
1	KECAMATAN BALONGBENDO	182	110	72
2	KECAMATAN BUDURAN	50	33	17
3	KECAMATAN CANDI	65	59	6
4	KECAMATAN GEDANGAN	84	63	21
5	KECAMATAN JABON	154	118	36

6	KECAMATAN KREMBUNG	100	62	38
7	KECAMATAN KRIAN	217	157	60
8	KECAMATAN PORONG	114	94	20
9	KECAMATAN PRAMBON	133	83	50
10	KECAMATAN SEDATI	92	61	31
11	KECAMATAN SIDOARJO	495	312	183
12	KECAMATAN SUKODONO	86	72	14
13	KECAMATAN TAMAN	199	127	72
14	KECAMATAN TANGGULANGIN	130	108	22
15	KECAMATAN TARIK	112	85	27
16	KECAMATAN TULANGAN	73	58	15
17	KECAMATAN WARU	109	54	55
18	KECAMATAN WONOAYU	124	102	22
TOTAL		**2.519**	**1.758**	**761**

Belum dapat diakomordirnya seluruh usulan dari 18 kecamatan dikarenakan masih terdapatnya usulan Musrenbang RKPD yang diusulkan bukan merupakan kewenangan Kabupaten, tetapi kewenangan desa, provinsi maupun pusat serta masih terdapatnya usulan yang tidak berbasis kebutuhan isu-isu starategis wilayah setempat.

5. **Indikator : Persentase Program Pembangunan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian hasil (*outcame*) > 76%**

   Sesuai data dari aplikasi e-Monev dalam sistem RDS terkait Capaian realisasi Perangkat Daerah sampai dengan TW 4 tahun 2020 yang telah disampaikan oleh Perangkat Daerah dan telah dilakukan evaluasi oleh Bappeda, capaian realisasi aseluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai ≥ 76% dengan rincian sebagai berikut :

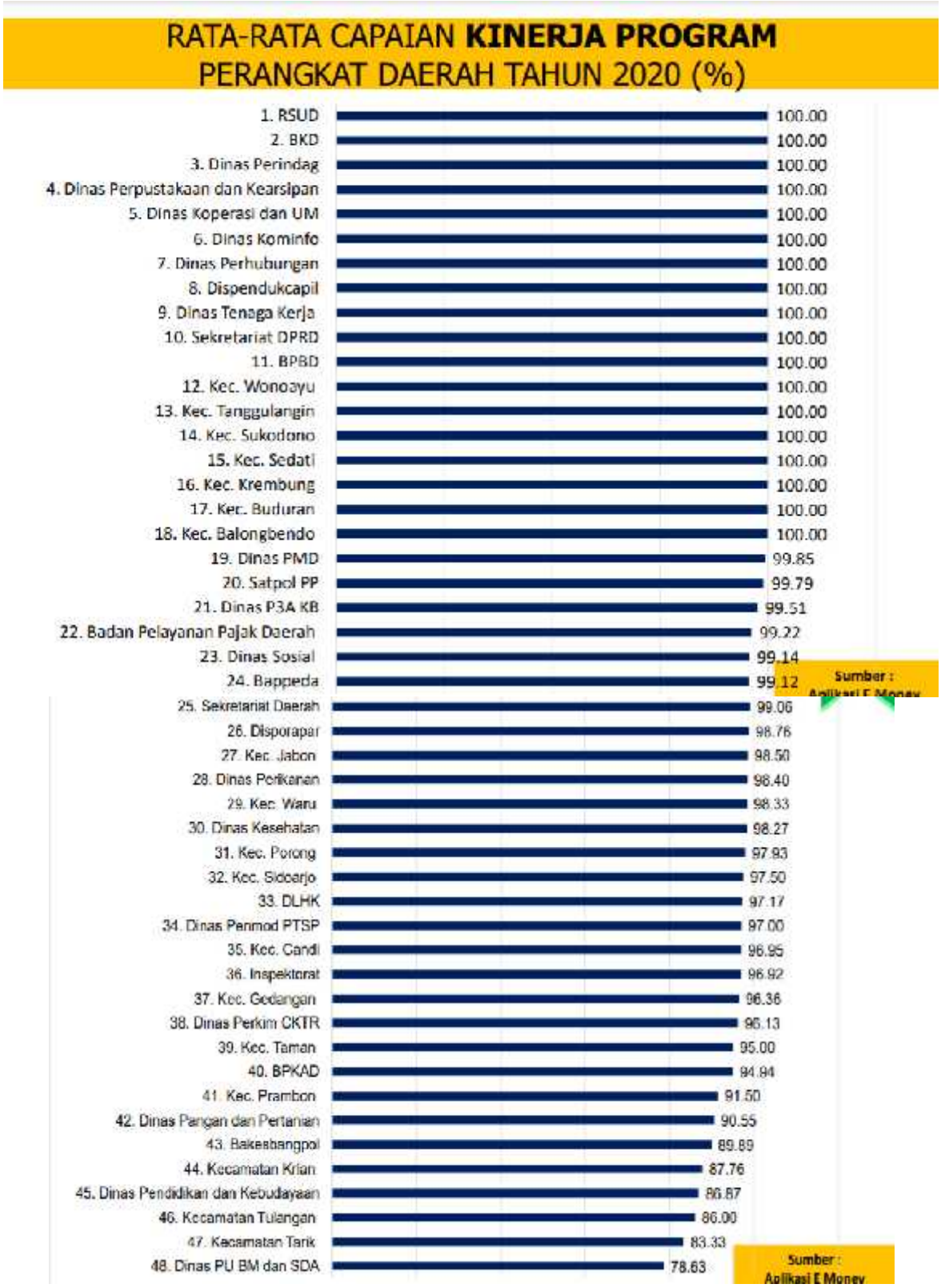
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (%)
1. RSUD 100.00
2. BKD 100.00
3. Dinas Perindag 100.00
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 100.00
5. Dinas Koperasi dan UM 100.00
6. Dinas Kominfo 100.00
7. Dinas Perhubungan 100.00
8. Dispendukcapil 100.00
9. Dinas Tenaga Kerja 100.00
10. Sekretariat DPRD 100.00
11. BPBD 100.00
12. Kec. Wonoayu 100.00
13. Kec. Tanggulangin 100.00
14. Kec. Sukodono 100.00
15. Kec. Sedati 100.00
16. Kec. Krembung 100.00
17. Kec. Buduran 100.00
18. Kec. Balongbendo 100.00
19. Dinas PMD 99.85
20. Satpol PP 99.79
21. Dinas P3A KB 99.51
22. Badan Pelayanan Pajak Daerah 99.22
23. Dinas Sosial 99.14
24. Bappeda 99.12
25. Sekretariat Daerah 99.06
26. Disporapar 98.76
27. Kec. Jabon 98.50
28. Dinas Perikanan 98.40
29. Kec. Waru 98.33
30. Dinas Kesehatan 98.27
31. Kec. Porong 97.93
32. Kec. Sidoarjo 97.50
33. DLHK 97.17
34. Dinas Penmod PTSP 97.00
35. Kec. Candi 96.95
36. Inspektorat 96.92
37. Kec. Gedangan 96.36
38. Dinas Perkim CKTR 96.13
39. Kec. Taman 95.00
40. BPKAD 94.94
41. Kec. Prambon 91.50
42. Dinas Pangan dan Pertanian 90.55
43. Bakesbangpol 89.89
44. Kecamatan Krian 87.76
45. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 86.87
46. Kecamatan Tulangan 86.00
47. Kecamatan Tarik 83.33
48. Dinas PU BM dan SDA 78.63
Sumber : Aplikasi E Money
Sumber : Aplikasi E Money

Dari gambar diatas terlihat bahwa dari total 48 (empat puluh delapan) Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo, seluruh Perangkat Daerah atau sebanyak **100%** tingkat capaian hasil (*outcome*) nya lebih dari 76% (Sumber : Aplikasi e-Monev RDS).

6. **Indikator : Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW**

   Dari Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang disusun oleh Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kab. Sidoarjo, diperoleh tingkat kesesuaian sebagai berikut :

   - Tingkat kesesuaian rencana pembangunan terhadap RTRW pada tahun 2019 sebesar 80,00% (kriteria kesesuaian tinggi).
   - Rata-rata tingkat kesesuaian rencana pembangunan terhadap RTRW tahun 2018-2019 adalah sebesar 78,182% (kriteria kesuaian tinggi).

Aspek	Jumlah Total Program RTRW	Program yang sesuai dengan RTRW
Struktur ruang	24	19
Total program pola	31	25
Jumlah	55	44
Tingkat kesesuaian (%)	**55**	**80,00**

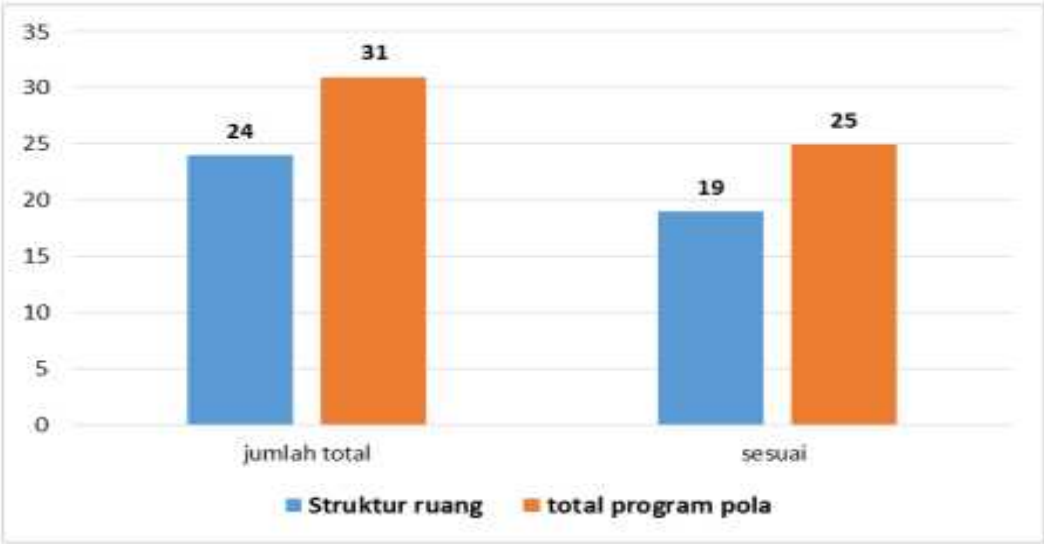

Kesesuaian Rencana Pembangunan Terhadap RTRW Tahun 2019

<u>Solusi dan upaya perbaikan di tahun mendatang :</u>

1. **Indikator : Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik.**
   - Menyusun dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD tahun berikutnya untuk menjaga konsistensi program/kegiatan RKPD dan RPJMD.
   - Seluruh usulan Renja PD harus mengacu pada dokumen Renstra dan RPJMD dan capaian indikator kinerja dalam RPJMD.
   - Dalam dokumen Renstra dan Renja PD hendaknya terdapat baseline ukuran capaian kinerja program/kegiatan, sehingga usulan yang dibuat tidak terus mengulang kegiatan tahun sebelum-sebelumnya yang telah selesai dilaksanakan.

2. **Indikator : Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD.**
   - Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada Kecamatan dan Desa pada saat Musrenbang Kecamatan tentang batasan usulan hasil Musrenbang Desa/kelurahan dan Kecamatan yang bisa diusulkan dalam Musrenbang untuk di akomodir dalam RKPD Kabupaten.

3. **Indikator : Persentase Program Pembangunan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian hasil (*outcame*) > 76%.**
   - Optimalisasi aplikasi e-Monev terus dilakukan dan diharapkan dapat terintegrasi dengan aplikasi SIKSDA secara maksimal agar data realisasi capaian kinerja dapat konsisten.
   - Bappeda terus berkomunikasi secara intensif dengan Tim RDS Kabupaten Sidoarjo untuk dapat mengembangkan aplikasi e-Monev ini secara maksimal dan inovatif.

4. **Indikator : Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.**
   - Melakukan sinkronisasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan daerah (RKPD Kabupaten Sidoarjo) dengan dokumen penataan ruang (RTRW dan RDTRK) pada saat pelaksanaan Verifikasi Renja Perangkat Daerah.
   - Melakukan sosialisasi terhadap dokumen tata ruang (RTRW/RDTRK) kepada seluruh stakeholders terkait baik perangkat daerah maupun masyarakat sehingga usulan kebutuhan dari Perangkat Daerah dan masyarakat dapat selaras dan sesuai dengan dokumen tata ruang yang telah disusun.

- Kedepannya, mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kegiatan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Sehingga telah dilakukan Penyampaian Berkas Rancangan Revisi RTRW Kabupaten Sidoarjo dari Bappeda Kabupaten Sidoarjo kepada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sesuai Surat No. 650/1214/438.6.1/2020 tertanggal 23 Desember 2020.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dokumen penelitian/kajian dan data

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALI SASI	%
Persentase dokumen Penelitian/kajian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pembangunan daerah	60	70	116,67	65	73	112,31	70	73,58	105,11	75	77	102.67

Keterangan :

Untuk data Realisasi Penelitian/Kajian yang telah ditindaklanjuti menjadi kebijakan Pembangunan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Penelitian/Kajian	Jumlah Penelitian/Kajian yang ditindaklanjuti		% Penelitian/Kajian yang ditindaklanjuti sebagai Kebijakan
			Non Kebijakan	Kebijakan	
1	2017	37	9	26	70,27%
2	2018	37	8	27	72,97%
3	2019	53	14	39	73,58%
4	2020	35	8	27	77%

Permasalahan :

1. Pada Tahun 2017 tidak ada satupun perangkat daerah yang mengajukan usulan judul kajian tahun 2018, tetapi saat pelaksanaan pada akhir tahun 2018 sebanyak 7 Perangkat Daerah yang mengirimkan Laporan Akhir dan executive Summary ke Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Sidoarjo.
2. Implementasi atau tindak lanjut dari rekomendasi hasil kajian Tahun 2018 sudah banyak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dari 35 kajian yang dilaksanakan sebanyak 97% yang sudah ditindaklanjuti. Hanya 1 (satu) kajian dari Bappeda Sidoarjo yang belum ditindaklanjuti dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Sidoarjo 2018“ dikarenakan mulai tahun 2019 Aksi pencegahan korupsi telah diambil alih oleh KPK.

3. Kajian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada Tahun 2018 tentunya harus menghasilkan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Sidoarjo. Dari 35 judul kajian yang telah ditindaklanjuti tercatat **77% hasil kajian ditindaklanjuti sebagai kebijakan**. Ini menandakan bahwa hasil rekomendasi kajian tahun 2018 sudah dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Sidoarjo. Kenyataan ini sedikit banyak menunjukkan bahwa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah mulai mengambil kebijakan berbasis riset.
4. Keterlambatan pengiriman Data terkait Penelitian/kajian oleh PD (di Tahun n-2) yang menjadi kebijakan pembangunan daerah di Tahun anggaran berjalan dikarenakan Perangkat Daerah yang memiliki Judul Kajian belum mengajukan dokumen KAK kajian, untuk dibahas oleh Tim Rekomendasi yang akan dibandingkan dengan Kebijakan Pembangunan Daerah yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Solusi dan upaya perbaikan di tahun mendatang :

1. Melakukan sosialisasi secara intensif terkait mekanisme kelitbangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang kelitbangan dan memasukkannya ke pedoman pelaksanaan APBD setiap tahun serta jika diperlukan diberlakukan reward dan punishment bagi PD yang tidak mentaati ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut.
2. Melakukan Monev terhadap seluruh rekomendasi Bidang litbang dan data yang telah dikeluarkan dan melakukan penelitian atas kelayakan rekomendasi yang dihasilkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka didukung dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

c. Program dan Kegiatan

1. **Program perencanaan pembangunan daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 2.820.790.830,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.517.671.140,- atau 89,25%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	PERSENTASE (%)
Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir menjadi RKPD	70%	62,86%	89,80%
Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah	98%	99,43%	101,46%
Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	98%	100%	102,04%

Permasalahan :

Pada dasarnya tidak terdapat permasalahan yang menghambat proses capaian kinerja namun demikian terdapat hal-hal yang harus diperhatikan untuk kelancaran program kegiatan mendatang, yaitu masih terdapatnya usulan Musrenbang RKPD yang diusulkan bukan merupakan kewenangan Kabupaten, tetapi kewenangan desa / provinsi / pusat serta masih terdapatnya usulan yang tidak berbasis kebutuhan isu-isu starategis wilayah setempat, sehingga pembiayaannya tidak bisa diusulkan melalui APBD Kabupaten.

Solusi :

a. Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada Kecamatan dan Desa pada saat Musrenbang Kecamatan tentang batasan usulan hasil Musrenbang Desa/kelurahan dan Kecamatan yang bisa diusulkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten untuk di akomodir dalam RKPD.
b. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinergitas antar instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (PD dan Kecamatan) sehingga tercipta keselarasan dan konsistensi antara dokumen perencanaan (RKPD dan Renja) dan penganggaran (RKA/DPA PD) dengan realisasinya.

Program tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2019	2020		
			Target	Realisasi	Capaian
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah tahapan musrenbang RKPD yang diselenggarakan tepat waktu	100 %	4 tahap	4 tahap	100 %
	Jumlah variabel perencanaan dalam Musrenbang yang dikelola data SI	100 %	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100 %
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang disusun	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen pengendalian konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah	100 %	5 dokumen	5 dokumen	100 %
	Jumlah program / kegiatan dalam dokumen perencanaan PD yang konsisten dengan yang ada di dokumen perencanaan daerah	100 %	195 program	195 program	100 %
	Jumlah PD dengan rata-rata capaian kinerja kategori 'tinggi'	100 %	40 PD	48 PD	120%
	Jumlah laporan pelaksanaan Renja PD	100 %	4 laporan	4 laporan	100 %

Keterangan :

a. Pada tahun 2020 Realisasi kinerja seluruh kegiatan telah mencapai target yang ditentukan.

b. Upaya yang dilakukan untuk dapat memenuhi target yang telah ditetapkan adalah dengan Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinergitas antar instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (PD dan Kecamatan) sehingga tercipta keselarasan dan konsistensi antara seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran.

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp.)	REALISASI TAHUN 2020 (Rp.)	PERSENTASE (%)
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	325.485.000,00	299.349.260,00	91,97

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	646.640.000,00	598.199.700,00	92,51
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	1.848.665.830,00	1.620.122.180,00	87,64

Keterangan :

Realisasi anggaran untuk semua kegiatan sudah mencapai target, hal ini karena adanya koordinasi yang baik sehingga seluruh anggaran kegiatan yang telah direncanakan di awal tahun dapat direalisasikan menjadi keluaran sesuai target prioritas bidang.

2. **Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan** dengan anggaran sebesar Rp.1.179.677.940,- dan terealisasi sebesar Rp.1.125.815.475,- atau 95,43%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	PERSENTASE (%)
Prosentase capaian kinerja program PD bidang Penmas thd perencanaan dengan capaian ≥ 76 %	90%	100%	111,11%
Prosentase dokumen perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang berkualitas baik	90%	90%	100%
Prosentase Hasil Rapat Koordinasi bidang Penmas yang ditindaklanjuti	75%	75%	100%

Permasalahan:

Pada dasarnya tidak terdapat permasalahan yang menghambat proses capaian kinerja namun demikian terdapat hal-hal yang harus diperhatikan untuk kelancaran program kegiatan mendatang, yaitu banyaknya Jumlah Perangkat Daerah dibawah koordinasi Bidang Pemerintahan dan masyarakat sehingga dibutuhkan adanya komunikasi yang intensif.

Solusi:

a. Menyusun jadwal kegiatan dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan dalam pelaksanaannya.
b. Mengadakan rapat koordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasi Bidang Pemerintahan dan Masyarakat.

Program tersebut didukung oleh 9 (Sembilan) kegiatan yaitu :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2019	2020		
			Target	Realisasi	Capaian
Koordinasi Perencanaan pembangunan Sub Bidang Kesra	Jumlah rekomendasi Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	100%	6 Rekom	6 Rekom	100%
Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pemberdayaan masyarakat	Jumlah rekomendasi Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dihasilkan	100%	6 Rekom	5 Rekom	83,3%
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Kesra	a. Jumlah laporan hasil monev pelaksanaan perencanaan PD sub bidang kesra	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	b. Jumlah program penanggulangan kemiskinan yang dimonev	100%	5 Program	3 Program	60%
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pemberdayaan masyarakat	Jumlah laporan hasil monev pelaksanaan perencanaan PD Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
Monitoring , Evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah laporan hasil monev pelaksanaan perencanaan PD Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
Penyusunan Perencanaan Sub Bidang Kesra	Jumlah dokumen perencanaan PD Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat yang disusun	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
Penyusunan Perencanaan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen perencanaan PD Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang disusun	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Penyusunan Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah dokumen perencanaan PD Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang disusun	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Keterangan :

Seluruh kegiatan dalam program perencanaan bidang Pemerintahan dan Masyarakat telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan untuk dapat merealisasikan target kinerja yang ada yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi secara intensif dengan Perangkat

Daerah yang berada dibawah koordinasi Bidang Pemerintahan dan Masyarakat.
Selain itu, dengan selalu menyusun jadwal kegiatan dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga seluruh kegiatan bidang menjadi lebih terarah dan efektif sesuai capaian yang ingin direalisasikan.

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp.)	REALISASI TAHUN 2020 (Rp)	PERSENTASE (%)
Koordinasi Perencanaan pembangunan Sub Bidang Kesra	98.725.000,00	80.431.400,00	81,47
Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pemberdayaan masyarakat	34.132.240,00	28.630.575,00	83,87
Monitoring , Evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Kesra	123.100.000,00	119.168.500,00	96,81
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pemberdayaan masyarakat	108.635.000,00	105.924.000,00	97,50
Monitoring , Evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	62.780.000,00	61.033.000,00	97,22
Penyusunan Perencanaan Sub Bidang Kesra	475.586.700,00	462.638.100,00	97,28
Penyusunan Perencanaan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat	218.755.000,00	211.966.900,00	96.90
Penyusunan Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	57.960.000,00	56.023.000,00	96,66

Keterangan :

a. Realisasi anggaran dalam program Perencanaan bidang Pemerintah dan Masyarakat telah mencapai diatas 90%. Hal ini karena adanya koordinasi yang baik sehingga seluruh anggaran kegiatan yang telah direncanakan di awal tahun dapat direalisasikan menjadi keluaran sesuai target prioritas bidang.

b. Upaya yang dilakukan untuk dapat menyerap anggaran kegiatan secara maksimal dan efektif adalah dengan terlebih dahulu menyusun kegiatan prioritas yang akan dilakukan oleh masing-masing sub bidang sehingga nantinya anggaran yang tersedia dapat dikelola sesuai jadwal yang telah ditentukan.

3. **Program Perencanaan Bidang Ekonomi** dengan anggaran sebesar Rp 841.417.400,- dan terealisasi sebesar Rp.825.546.905,- atau 98,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	PERSENTASE (%)
Persentase Capaian Kinerja Program PD bidang Ekonomi terhadap perencanaan dengan capaian ≥ 76%	85%	100%	117,65%
Persentase Dokumen Perencanaan PD dibawah bidang ekonomi berkualitas baik	100%	100%	100%
Persentase Hasil Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti sebagai bahan Kebijakan	90%	90%	100%

Permasalahan:

Pada dasarnya tidak terdapat permasalahan yang menghambat proses capaian kinerja namun demikian terdapat hal-hal yang harus diperhatikan untuk kelancaran program kegiatan mendatang, yaitu padatnya Kegiatan di Bidang Ekonomi sehingga beberapa sub kegiatan berjalan tidak sesuai waktu yang ditetapkan.

Solusi:

Menyusun jadwal kegiatan dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga seluruh kegiatan bidang menjadi lebih terarah dan efektif sesuai capaian yang ingin direalisasikan.

Program tersebut didukung oleh 9 (Sembilan) kegiatan yaitu :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2019	2020		
			Target	Realisasi	Capaian
Koordinasi Perencanaan Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Ekonomi Pariwisata	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan bidang ekonomi sub bidang Pertanian, SDA dan Ekonomi Pariwisata yang dihasilkan.	100%	3 Rekom	3 Rekom	100%
Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Industri, perdagangan dan Ekonomi Kreatif , Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah rekomendasi rapat koordinasi Sub bidang Industri, Perdagangan, Ekonomi Kreatif, Koperasi dan usaha mikro yang dihasilkan	100%	2 Rekom	2 Rekom	100%

Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Penanaman Modal & Alternatif Pembiayaan	Jumlah rekomendasi rapat koordinasi Sub Bidang Penanaman Modal & Alternatif Pembiayaan yang dihasilkan	100%	1 Rekom	1 Rekom	100%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Ekonomi Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Perencanaan PD sub bidang Pertanian, SDA dan Ekonomi Pariwisata	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sub Bidang Industri, Perdagangan dan ekonomi kreatif, koperasi dan usaha mikro	Jumlah Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Perencanaan PD sub bidang Industri, Perdagangan, Ekonomi Kreatif, Koperasi dan usaha mikro	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bidang Penanaman Modal & Alternatif Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Perencanaan PD Sub Bidang Penanaman Modal & Alternatif Pembiayaan	100%	- Laporan	- Laporan	-
Penyusunan perencanaan Sub Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Ekonomi Pariwisata	Jumlah dokumen Perencanaan bidang ekonomi sub bidang Pertanian, SDA dan Ekonomi Pariwisata yang disusun	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
Penyusunan perencanaan Sub Bidang Industri, Perdagangan & Ekonomi Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah dokumen Perencanaan PD sub bidang Industri, Perdagangan, Ekonomi Kreatif, Koperasi dan usaha mikro yang disusun	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
Penyusunan perencanaan Sub Bidang Penanaman Modal & Alternatif Pembiayaan	Jumlah dokumen Perencanaan PD sub bidang Penanaman Modal & Alternatif Pembiayaan yang disusun	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Keterangan :

Seluruh kegiatan dalam program perencanaan bidang Ekonomi telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan untuk dapat merealisasikan target kinerja yang ada yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasi Bidang Ekonomi. Selain itu, dengan selalu menyusun jadwal kegiatan dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan dalam pelaksanaannya

sehingga seluruh kegiatan bidang menjadi lebih terarah dan efektif sesuai capaian yang ingin direalisasikan.

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp.)	REALISASI TAHUN 2020 (Rp)	PERSENTASE (%)
Koordinasi Perencanaan Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Ekonomi Pariwisata	30.600.000,00	30.600.000,00	100
Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Industri, perdagangan dan Ekonomi Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro	104.792.400,00	95.835.405,00	91,45
Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Penanaman Modal & Alternatif Pembiayaan	33.100.000,00	32.600.000,00	98,49
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Ekonomi Pariwisata	91.375.000,00	90.695.000,00	99,26
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sub Bidang Industri,Perdagangan dan ekonomi kreatif , koperasi dan usaha mikro	102.100.000,00	100.960.300,00	98,88
Penyusunan perencanaan Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Ekonomi Pariwisata	142.450.000,00	140.709.000,00	98,78
Penyusunan perencanaan Sub Bidang Industri, Perdagangan & Ekonomi Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro	184.600.000,00	181.933.200,00	98,56
Penyusunan perencanaan Sub Bidang Penanaman Modal & Alternatif Pembiayaan	152.400.000,00	152.214.000,00	99,88

Keterangan :

a. Realisasi anggaran dalam program Perencanaan bidang Ekonomi telah mencapai lebih dari 90%. Hal ini karena adanya koordinasi yang baik sehingga seluruh anggaran kegiatan yang telah direncanakan di awal tahun dapat direalisasikan menjadi keluaran sesuai target prioritas bidang.
b. Upaya yang dilakukan untuk dapat menyerap anggaran kegiatan secara maksimal dan efektif adalah dengan terlebih dahulu menyusun kegiatan prioritas yang akan dilakukan oleh masing-masing sub bidang sehingga nantinya anggaran yang tersedia dapat dikelola sesuai jadwal yang telah ditentukan.

4. **Program Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah** dengan anggaran sebesar Rp.2.184.878.100,- dan terealisasi sebesar Rp.2.148.011.220,- atau 98,31%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	PERSENTASE (%)
Prosentase Hasil Rapat Koordinasi bidang PD Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah yang ditindak lanjuti	70%	70%	100%
Prosentase dokumen perencanaan RKPD yang sesuai dengan arahan dalam dokumen tata ruang	70%	80%	114.29%
Prosentase dokumen perencanaan Renja PD Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah berkualitas baik	90%	90%	100%
Prosentase capaian kinerja program PD Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah terhadap perencanaan dengan capaian ≥ 76 %	95%	100%	105,26%

Permasalahan:

Pada dasarnya tidak terdapat permasalahan yang menghambat proses capaian kinerja namun demikian terdapat hal-hal yang harus diperhatikan untuk optimalisasi kelancaran program kegiatan mendatang, yaitu terlaksananya proses untuk pengadaan langsung dimulai lebih lambat dari target sehingga waktu yang diperlukan untuk pekerjaan lebih pendek.

Solusi:

a. Mengoptimalkan SDM dan tenaga ahli sesuai waktu yang tersedia.
b. Mempersiapkan sedini mungkin penyusunan rencana kerja dan anggaran secara komprehensif sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Program tersebut didukung oleh 9 (Sembilan) kegiatan yaitu :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2019	2020		
			Target	Realisasi	Capaian
Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Pertanahan	Jumlah rekomendasi rakor Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Pertanahan yang dihasilkan	100%	- Rekom	- Rekom	-
Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi rapat koordinasi Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup yang dihasilkan	100%	1 Rekom	1 Rekom	100%

Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah, Komunikasi dan Informatika	Jumlah rekomendasi rapat koordinasi Sub Bidang Prasarana Wilayah, Komunikasi dan Informatika yang dihasilkan	100%	- Rekom	- Rekom	100%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Pertanahan	Jumlah lap hasil monev pelaksanaan perencanaan PD Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Pertanahan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan hasil monev pelaksanaan perencanaan PD Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bidang Prasarana Wilayah, Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan hasil monev pelaksanaan Perencanaan PD Sub Bidang Prasarana Wilayah, Komunikasi dan Informatika	100%	0 Laporan	0 Laporan	100%
Penyusunan Perencanaan Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Pertanahan	Jumlah dokumen perencanaan PD Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Pertanahan yang disusun	100%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
Penyusunan Perencanaan Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan PD Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup yang disusun	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Penyusunan Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah, Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen perencanaan PD Sub Bidang Prasarana Wilayah, Komunikasi dan Informatika yang disusun	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

Keterangan :

a. Seluruh kegiatan dalam program perencanaan bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b. Upaya yang dilakukan untuk dapat merealisasikan target kinerja yang ada yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasi sub bidang yang

mengampu masing-masing Perangkat Daerah di Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Selain itu, dengan selalu menyusun jadwal kegiatan dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga seluruh kegiatan bidang menjadi lebih terarah dan efektif sesuai capaian yang ingin direalisasikan.

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp.)	REALISASI TAHUN 2020 (Rp)	PERSENTASE (%)
Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Pertanahan	20.415.000,00	18.275.000,00	89,52
Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup	77.920.000,00	76.985.475,00	98,80
Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah, Komunikasi dan Informatika	10.500.000,00	10.000.000,00	95,24
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Pertanahan	101.900.000,00	100.461.500,00	98,59
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup	88.200.000,00	87.765.600,00	98,37
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bidang Prasarana Wilayah, Komunikasi dan Informatika	10.500.000,00	10.000.000,00	95,24
Penyusunan Perencanaan Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Pertanahan	953.710.800,00	936.965.465,00	98,24
Penyusunan Perencanaan Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup	339.369.650,00	331.320.190,00	97,63
Penyusunan Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah, Komunikasi dan Informatika	582.362.650,00	577.237.990,00	99,12

Keterangan :

a. Realisasi anggaran dalam program Perencanaan bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah telah mencapai lebih dari 90%. Hal ini karena adanya koordinasi yang sangat baik sehingga seluruh anggaran kegiatan yang telah direncanakan di awal tahun dapat direalisasikan menjadi keluaran sesuai target prioritas bidang.

b. Upaya yang dilakukan untuk dapat menyerap anggaran kegiatan secara maksimal dan efektif adalah dengan terlebih dahulu menyusun kegiatan prioritas yang akan dilakukan oleh masing-masing sub bidang sehingga nantinya anggaran yang tersedia dapat dikelola sesuai jadwal yang telah ditentukan.

5. **Program Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Data Pembangunan Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 1.153.574.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.094.924.440,- atau 94,92%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	PERSENTASE (%)
Persentase Rekomendasi hasil penelitian dan kajian yang ditindaklanjuti	90%	97%	107,78%
Persentase Ketersediaan elemen data yang actual dan valid sebagai masukan perencanaan pembangunan daerah	90%	94%	104,45%

Permasalahan:

Pada dasarnya tidak terdapat permasalahan yang menghambat proses capaian kinerja namun demikian terdapat hal-hal yang harus diperhatikan untuk kelancaran berjalannya program kegiatan mendatang, yaitu sering terjadinya keterlambatan data KAK yang diajukan oleh PD yang mempunyai kajian untuk dibahas oleh Tim Rekomendasi

Solusi:

Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan PD terkait yang memiliki kajian yang dapat menjadi untuk dapat segera dibahas oleh tim Rekomendasi.

Program tersebut didukung oleh 5 (Lima) kegiatan yaitu :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2019	2020		
			Target	Realisasi	Capaian
Koordinasi Litbang Bidang Ekonomi dan Prasarana wilayah	Jumlah rekomendasi kajian PD yang dihasilkan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Jumlah peserta Rakor Litbang	100%	60 Orang	60 Orang	100%
	Jumlah laporan hasil monev kajian PD	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Koordinasi Litbang Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kajian PD yang dihasilkan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Jumlah laporan hasil monev kajian PD	100%	0 Laporan	0 Laporan	0%
Penelitian isu-isu strategis Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah	Jumlah dokumen penelitian Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang dihasilkan	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Penelitian isu-isu strategis bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Jumlah dokumen penelitian bidang Pemerintahan dan kemasyarakatan yang dihasilkan	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Jumlah Sistem Informasi Litbang yang dikelola	100%	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100%
Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Rakor SIPD yang dilaksanakan	100%	1 Kali	1 Kali	100%
	Jumlah PD yang mengisi data SIPD dan Sibangsda secara lengkap	0	20 PD	30 PD	150%
	Jumlah indikator kinerja daerah yang disusun	100%	4 Indeks Daerah	4 Indeks Daerah	100%
	Jumlah Sistem Infrormasi Pembangunan Daerah yang dikelola	100%	1 Sistem	1 Sistem	100%

Keterangan :

a. Seluruh kegiatan dalam program perencanaan bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Data Pembangunan Daerah telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan ada yang melebihi target yaitu pada Penyusunan data dan Informasi Pembangunan Daerah (jumlah PD yang mengisi data SIPD dan Sibangsda secara lengkap).

b. Upaya yang dilakukan untuk dapat merealisasikan target kinerja yang ada yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasi Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Data Pembangunan Daerah.

   Selain itu, dengan selalu menyusun jadwal kegiatan dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga seluruh kegiatan bidang menjadi lebih terarah dan efektif sesuai capaian yang ingin direalisasikan.

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp.)	REALISASI TAHUN 2020 (Rp)	PERSENTASE (%)
Koordinasi Litbang Bidang Ekonomi dan Prasarana wilayah	16.850.000,00	11.555.000,00	68,58
Koordinasi Litbang Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	175.219.800,00	145.645.500,00	83,12
Penelitian isu-isu strategis Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah	301.455.000,00	292.837.340,00	97,14
Penelitian isu-isu strategis bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	211.400.000,00	205.649.600,00	97,28
Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	448.650.000,00	439.237.000,00	97,90

Keterangan :

a. Realisasi anggaran dalam program Perencanaan bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Data Pembangunan Daerah telah mencapai target lebih dari 90%. Hal ini karena adanya koordinasi yang sangat baik sehingga sebagian anggaran kegiatan yang telah direncanakan di awal tahun dapat direalisasikan menjadi keluaran sesuai target prioritas bidang.

b. Upaya yang dilakukan untuk dapat menyerap anggaran kegiatan secara maksimal dan efektif adalah dengan terlebih dahulu menyusun kegiatan prioritas yang akan dilakukan oleh masing-masing sub bidang sehingga nantinya anggaran yang tersedia dapat dikelola sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Unsur Penunjang Keuangan

Unsur penunjang keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; serta Badan Pelayanan Pajak Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Tujuan Urusan Penunjang Keuangan

Realisasi Kinerja Tujuan Urusan Penunjang Keuangan Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALI SASI	%	TARGET*)	REALI SASI	%
Mewujudkan penyelenggaraan	Opini atas Audit BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100

pemerintahan yang baik melalui pengelolaan Keuangan yang berkualitas										

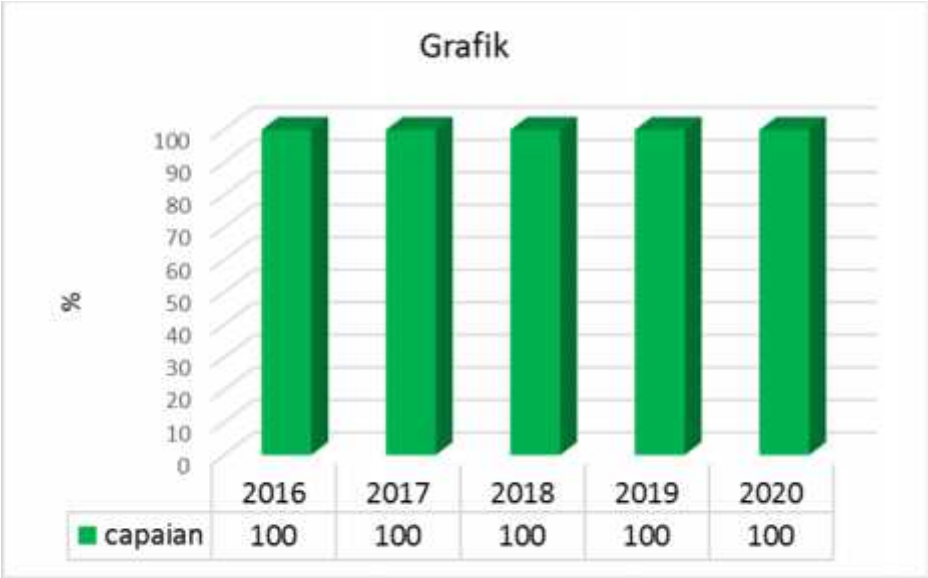

Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2020, maka capaian kinerja Tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan beberapa kegiatan pendukung dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pengelolaan dan pelaporan yang lebih akuntabel.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2019, maka capaian kinerja Tahun 2020 tidak mengalami perubahan, dengan opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian.

Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun yaitu opini BPK “WTP” Tahun 2020 adalah 100% dari target.

Apabila dibandingkan dengan standart Nasional dengan target 100%, maka capaian kinerja Tahun 2020 sudah memenuhi standart Nasional tercapainya opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019.

b. Realisasi Kinerja Sasaran Urusan Penunjang Keuangan

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan, transparan dan akuntabel.

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1. Persentase kepatuhan OPD dalam Penyusunan RAPBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan	93,75%	85,11%	90,77%	100%	85,42%	85,42%	100%	81,25%	81,25%
3. Persentase asset tetap dengan dokumentasi legal.	99,73%	99,812%	100,08%	99,74%	98,73%	98,99%	99,745%	99,483%	99,74%
4. Persentase OPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah.	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah*)	36,21%	39,12%	108,04%	37,93	38,14	100,54%	33%	40,92%	124%

*)Atas Target Tahun 2020 sehubungan dengan adanya Pandemi Covid 19 dilakukan penyesuaian menurut Renstra 38,42% Dirubah menjadi 33%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) **Indikator Kinerja 1**: **Kepatuhan OPD dalam penyusunan RAPBD**, dimaksudkan RKA yang penyusunannya sudah sesuai dengan pedoman penyusunan APBD, RKBU, SSH, dan kode rekening. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator tersebut mulai dari awal penyusunan Renstra di Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 adalah 100% dan terealisasi 100%.

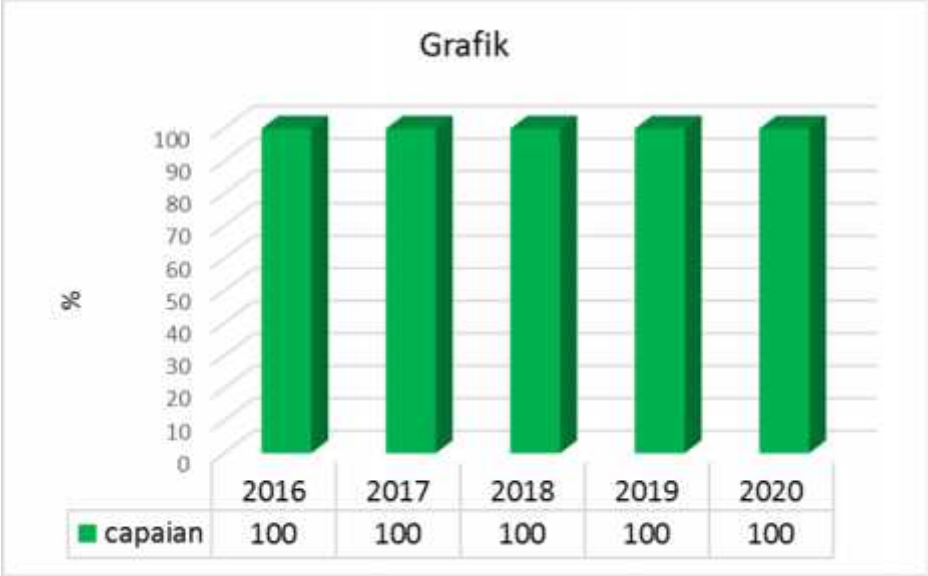

Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2020, maka capaian kinerja Tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan dari 48 OPD yang menyusun RAPBD telah 100% patuh dalam penyusunannya, dimana target yang ditetapkan di Tahun 2020 adalah 100% dan telah terealisasi 100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2019, maka capaian kinerja Tahun 2020 tidak mengalami perubahan, hal ini dikarenakan capaian kinerja di tahun tersebut sama / tidak berubah.

Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2021, maka progres capaian kinerja Tahun 2020 adalah 100% dari target, hal ini diupayakan dengan dilaksanakan verifikasi atas RKA OPD.

Untuk mengoptimalkan kinerja kedepannya akan dilaksanakan kegiatan verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

2) **Indikator Kinerja 2**: **Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan**, dimaksudkan bahwa OPD yang melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan pagu dan waktu yang telah ditetapkan (penyerapan ≥80%). Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2020, maka capaian kinerja Tahun 2020 tidak mencapai target, dimana target yang ditetapkan pada Tahun 2020 sebesar 100% dan realisasi 81,25% dengan capaian kinerja 81,25%.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2019, maka capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 81,25% turun dibandingkan Tahun 2019 sebesar 85,42%.

Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2021, maka progres capaian kinerja Tahun 2020 adalah 81,25%.

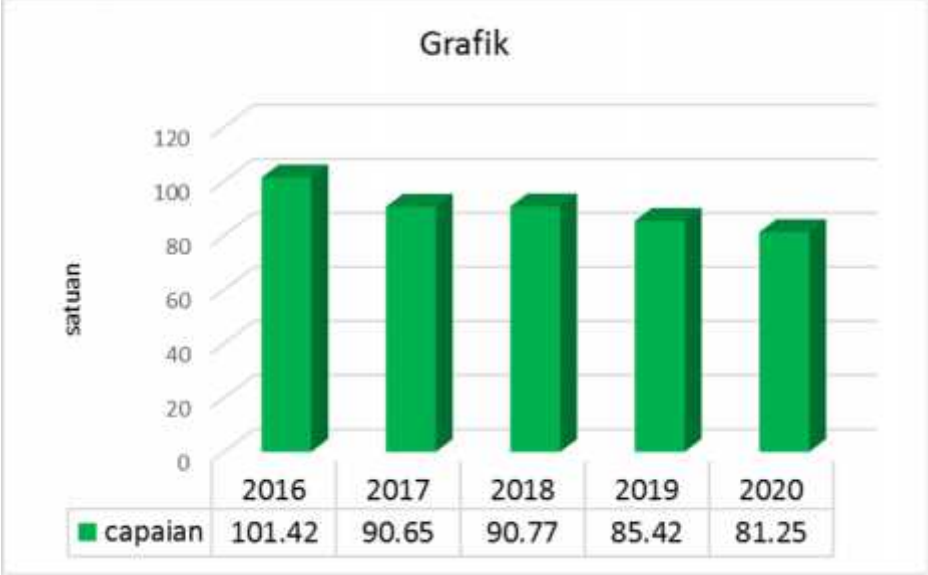

Permasalahan :

1. Tidak berhasilnya Perangkat Daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada masing – masing perangkat daerah;
2. Keterbatasan waktu pengadaan dikarenakan keterlambatan pengesahan PAPBD Tahun 2020;
3. Dampak pandemi covid-19 sehingga anggaran difokuskan untuk penanganan covid.

Solusi sebagai bentuk optimalisasi kinerja kedepan:

1. Adanya penguncian sistem atas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang lebih dari 1 (satu) bulan tidak dapat diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), serta adanya sanksi berupa tidak dibayarkannya honor PPKom untuk paket pekerjaan tersebut;
2. Penerapan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Prestasi Kerja berdasarkan realisasi penyerapan anggaran ;
3. Pelaksanaan rekonsiliasi penyerapan anggaran tiap triwulan;
4. Penerbitan surat edaran terkait percepatan penyerapan anggaran dan surat teguran terkait penyerapan anggaran.

3) **Indikator Kinerja 3**: **Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal,** dimaksudkan adalah aset tetap yang telah memiliki suatu catatan atau rekaman yang dapat dibuktikan keabsahannya atau dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum.

Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2020, maka capaian kinerja Tahun 2020 tidak mencapai target, dimana target yang ditetapkan pada Tahun 2020 sebesar 99,745% dan realisasi sebesar 99,483% dengan capaian kinerja 99,74%, hal ini dikarenakan dari masih banyaknya aset tetap berupa tanah yang belum bersertifikat.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2019, maka capaian kinerja Tahun 2020 mengalami peningkatan, capaian kinerja Tahun 2019 sebesar 98,99% dan Tahun 2020 sebesar 99,74%.

Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2021 sebesar 99,752% dan pada Tahun 2020 terealisasi 99,483%, maka progres capaian kinerja Tahun 2020 adalah 99,991% dari target, hal ini diupayakan dengan:

1. Koordinasi secara terus menerus terkait percepatan sertifikasi tanah;
2. Pemanfaatan dan optimalisasi aplikasi mapping tanah untuk menginventarisir kepemilikan tanah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Total Aset Tetap	Aset Tetap Berupa Tanah	Tanah Telah Bersertifikat	Tanah Belum Bersertifikat	Total Aset Tetap terdokumentasi Legal	% Aset Tetap Terdokumentasi Legal
(1)	(2)	(3)	4=(2-3)	5=(1-4)	6=(5/1)*100
379.151	2.398	437	1.961	377.190	99,483%

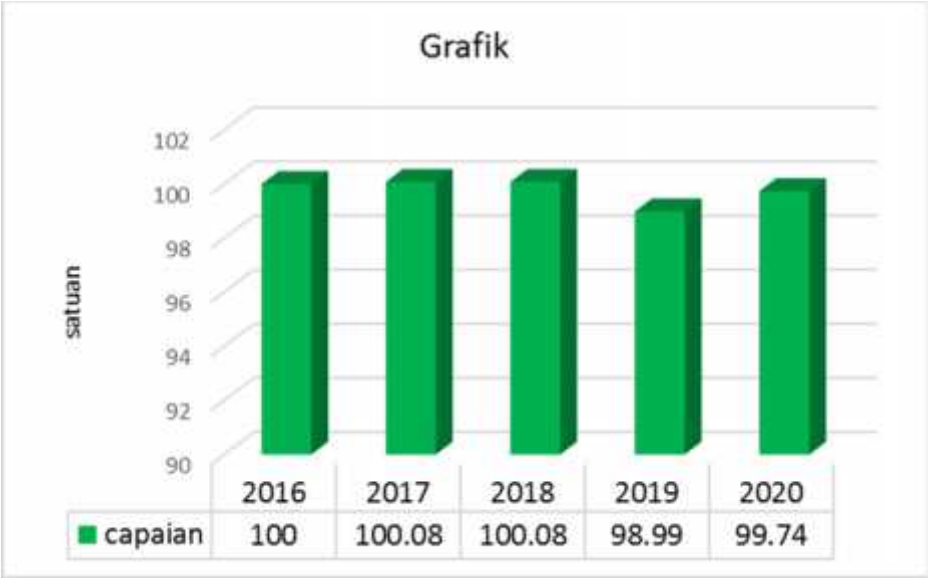

Permasalahan :

1. Pengguna barang kurang memahami kewajiban dalam pengamanan hukum dan administrasi aset yang berada dalam penguasaannya;
2. Kurang lengkapnya dokumen persyaratan dari OPD untuk pengurusan sertifikat.

Solusi sebagai bentuk optimalisasi kinerja kedepan:

1. Pemanfaatan aplikasi mapping tanah;
2. Sosialisasi dan atau Bimbingan Teknis kepada pengguna barang terkait hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pengamanan aset (BMD);
3. Koordinasi dengan OPD terkait kelengkapan persyaratan untuk pengurusan sertifikat;
4. Membentuk Tim Penyelesaian Status Kepemilikan BMD;
5. Penelusuran dokumen BMD guna tertib administrasi;
6. Pemasangan papan nama aset daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
7. Pemasangan patok batas tanah.

4) **Indikator Kinerja 4**: **Persentase OPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah,** dimaksudkan adalah OPD yang tepat waktu penyampaian pelaporan BMD (batas waktu penyampaian pelaporan BMD maksimal 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir). Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2020 sebesar

100%,dan realisasi kinerja Tahun 2020 sebesar 100%, maka capaian kinerja Tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan ketertiban OPD dalam penyampaian pelaporan BMD.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2019, maka capaian kinerja Tahun 2020 tidak mengalami perubahan, hal ini dikarenakan semua OPD telah tertib dalam penyampaian laporan BMD.

Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2021 sebesar 100% dan pada Tahun 2020 terealisasi 100%, maka progres capaian kinerja Tahun 2020 adalah 100% dari target.

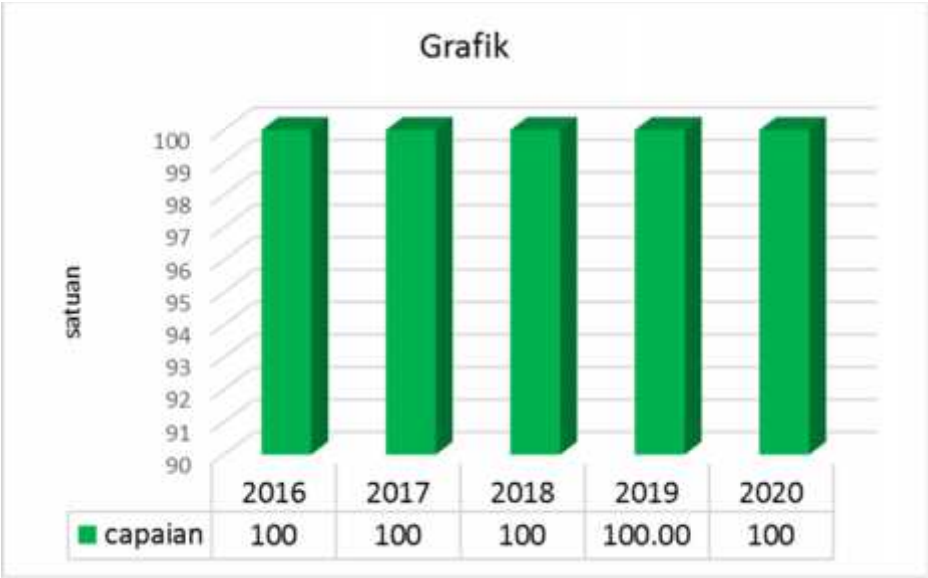

5) **Indikator Kinerja 5**: **Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah,** dimaksudkan adalah pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, yang dikelola oleh beberapa OPD, dari data akumulasi atas PAD.

Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2020, maka capaian kinerja Tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan sebesar 33% terealisasi 40,92%.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2019, maka capaian kinerja Tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan realisasi atas Tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2019.

Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2021, maka progres capaian kinerja Tahun 2020 adalah 103,03% dari target, melalui pengelolaan BMD secara tepat guna dan optimal dapat berperan penting guna mendorong optimalisasi dan maksimalisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah, sehingga menunjang dalam memperkuat peningkatan keberhasilan ekonomi daerah dan BPKAD turut berperan dalam hal tersebut dengan beberapa upayakan yang dilakukan antara lain:

1. Koordinasi dengan OPD pengguna barang terkait pemanfaatan BMD.
2. Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah

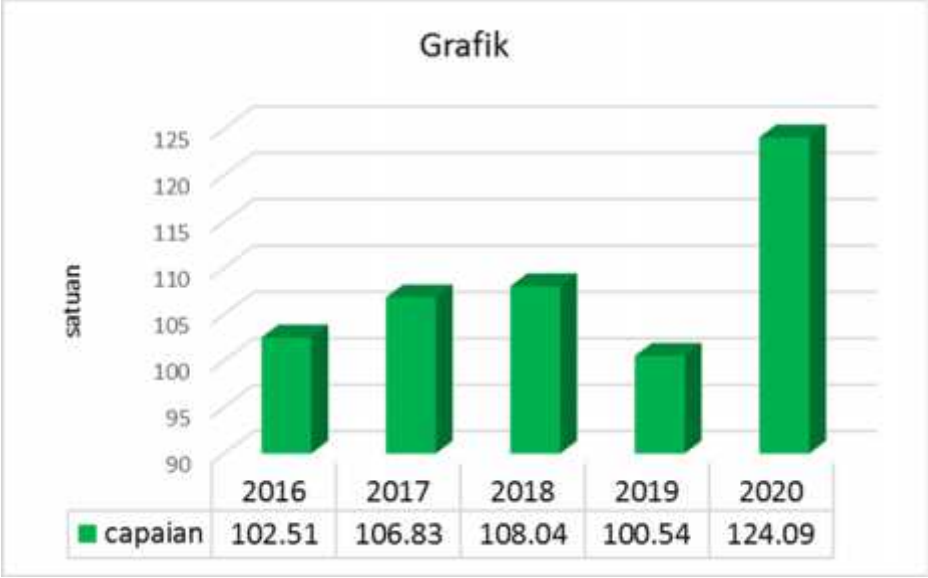

Program dan Kegiatan

1. Untuk mendukung capaian sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan, transparan dan akuntabel dengan indikator Persentase kepatuhan OPD dalam Penyusunan RAPBD didukung dengan program Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.608.200.410,- dan terealisasi sebesar Rp.1.512.013.924,- atau 94,02%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
1. Persentase dokumen penganggaran yang telah dipublikasikan melalui media publik	100%	100%	100%
2. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan PAPBD	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	-
3. Ketepatan waktu dalam penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
4. Persentase OPD yang tepat dalam menentukan kode rekening RKA OPD	100%	100%	100%

a. Dokumen penganggaran yang telah dipublikasikan dimaksudkan ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat diakses melalui website Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (portal.sidoarjokab.go.id);
b. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan PAPBD sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan perubahan APBD, adalah 3 hari kerja setelah persetujuan bersama. Terdapat keterlambatan pada penyusunan APBD dan PAPBD hal ini dikarenakan membutuhkan waktu dalam proses evaluasi dan persetujuan ke propinsi dan mendagri;
c. Ketepatan waktu dalam penyusunan KUA-PPAS dan KUPA PPAS Perubahan adalah penyusunan KUA-PPAS dan KUPA PPAS Perubahan yang sesuai dengan ketentuan yaitu paling lambat Minggu II bulan Agustus;
d. Tepat dalam menentukan kode rekening RKA dimaksudkan adalah OPD yang dalam pemilihan kode rekening telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Kegiatan Penyusunan Raperda/Raperbup dan	Dokumen Rancangan KUA-PPAS dan KUA-PPAS yang tersusun	60 buku	60 buku	100%	1.608.200.410,-	1.512.013.924,-	94,02%

Perda/Perbup APBD	Dokumen Raperda dan Perda APBD yang tersusun	50 buku	50 buku	100%			
	Dokumen Raperbup dan Perbup APBD yang tersusun	120 buku	120 buku	100%			
Penyusunan Raperda/Raperbup dan Perda/Perbup PAPBD	Dokumen Rancangan KUA-PPAS Perubahan dan KUA-PPAS Perubahan yang tersusun	60 buku	60 buku	100%	1.318.876.000,-	1.292.643.374,-	98,01%
	Dokumen Raperda dan Perda PAPBD yang tersusun	50 buku	50 buku	100%			
	Dokumen Raperbup dan Perbup PAPBD yang tersusun	60 buku	60 buku	100%			
Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD	64 Buku	64 Buku	100%	129.513.000,-	112.470.900,-	86,84%
	Buku Kode Rekening APBD	0 Buku	0 Buku	100%			
	Tersusunnya tata cara Penyusunan RKA/DPA	0 Buku	0 Buku	100%			

2. Untuk mendukung capaian sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan, transparan dan akuntabel dengan indikator indikator Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan dilaksanakan melalui Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.074.644.700,- dan terealisasi sebesar Rp.984.312.850,- atau 95,59%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
1. Prosentase OPD yang tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Keuangan berbasis SAP (Akrual)	100%	100%	100%

2. Persentase OPD yang tepat waktu penyerapan anggaran sesuai anggaran kas yang ditetapkan	95,7%	81,25%	95,35%
3. Ketepatan waktu dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%

a. OPD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan berbasis SAP dimaksudkan adalah OPD yang menyampaikan laporan keuangan maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b. OPD yang tepat waktu penyerapan anggaran sesuai anggaran kas yang ditetapkan dimaksud adalah OPD dengan penyerapan anggaran ≥80%;
c. Ketepatan waktu dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimaksudkan adalah penyampaian LKPD maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dari capaian 3 indikator tersebut diatas terdapat 1 indikator yang tidak berhasil yaitu Persentase OPD yang tepat waktu penyerapan anggaran sesuai anggaran kas yang ditetapkan, hal ini dikarenakan dari 48 OPD terdapat 39 OPD yang penyerapannya anggaran di Tahun 2020 ≥80% dan 9 OPD dengan penyerapan <80%. Adapun 9 OPD dengan penyerapan <80% antara lain :

No	Nama OPD	Anggaran	Realisasi	%	Penyebab Rendah Realisasi
1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	269.048.360.923	136.602.903.615	50,77	Keterbatasan waktu pengadaan
2	Sekretariat DPRD	100.259.873.212	56.071.866.719	55,93	Adanya pandemic covid-19 sehingga ada pembatasan kegiatan rapat serta perjalanan luar daerah
3	Kecamatan Porong	18.237.596.741	11.862.628.775	65,04	Penyerapan anggaran tidak dapat dilakukan karena Terkendala pandemi COVID
4	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta karya dan Tata Ruang	216.323.711.510	143.285.144.258	66,24	Keterbatasan waktu pengadaan
5	Kecamatan Waru	9.018.980.564	6.410.214.081	71,07	Pengadaan peralatan pembuatan SIM & SKCK tidak diserap karena merupakan tupoksi kepolisian
6	Kecamatan Sukodono	8.790.908.786	6.388.233.948	72,67	Pengadaan peralatan pembuatan SIM & SKCK tidak diserap karena merupakan tupoksi kepolisian
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22.266.690.684	16.387.932.332	73,60	Pengadaan untuk peralatan penunjang e voting memakai metode tender cepat maka penawaran yang paling rendah menjadi pemenang
8	Dinas Perhubungan	51.502.474.577	39.199.599.862	76,11	Pemeliharaan traffic light menyesuaiakan kebutuhan
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	25.589.415.864	20.233.899.458	79,07	Perlaksanaan FORDA Jatim di kabupaten sidoarjo yang direncanakan tahun 2020 ditunda menjadi tahun 2021

Adapun beberapa hal yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kinerja kedepannya antara lain:

1. Integrasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Manajemen BMD.

2. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah (SIKSDA);
3. Asistensi penyusunan laporan keuangan OPD.

Program tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Peningkatan, Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Juknis penatausahaan keuangan yang disusun	1 Juknis	1 Juknis	100%	359.139.700,-	303.606.650,-	84,54%
Monitoring, Evaluasi dan pembinaan akuntansi dan penatausahaan	Jumlah kegiatan rekonsiliasi yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	100%	694.905.000,-	660.271.200,-	95,02%
	Jumlah Bimtek pengelola keuangan	1 kali	-	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Dokumen LKPD yang sesuai ketentuan	20 Laporan	20 Laporan	100%	20.600.000,-	20.435.000,-	99,20%

Untuk mendukung capaian sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan, transparan dan akuntabel dengan indikator Persentase asset tetap dengan dokumentasi legal dan Persentase OPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah yang ditetapkan dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.633.019.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.521.376.197,- atau 93,16 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
1. Persentase aset tetap (tanah) yang telah diinventarisasi dalam laporan BMD.	30,94%	18,22%	58,89%
2. Persentase pemindahtanganan BMD yang diproses melalui lelang umum.	100%	100%	100%

3. Persentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian Laporan BMD.	100%	100%	100%

a. Aset tetap (tanah) yang telah diinventarisasi dalam laporan BMD dimaksudkan aset tetap berupa tanah yang telah bersertifikat;
b. Pemindahtangan BMD yang diproses melalui lelang umum dimaksudkan adalah proses penjualan BMD yang dilakukan secara lelang;
c. Tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD dimaksudkan adalah OPD yang menyampaikan lapran BMD maksimal 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

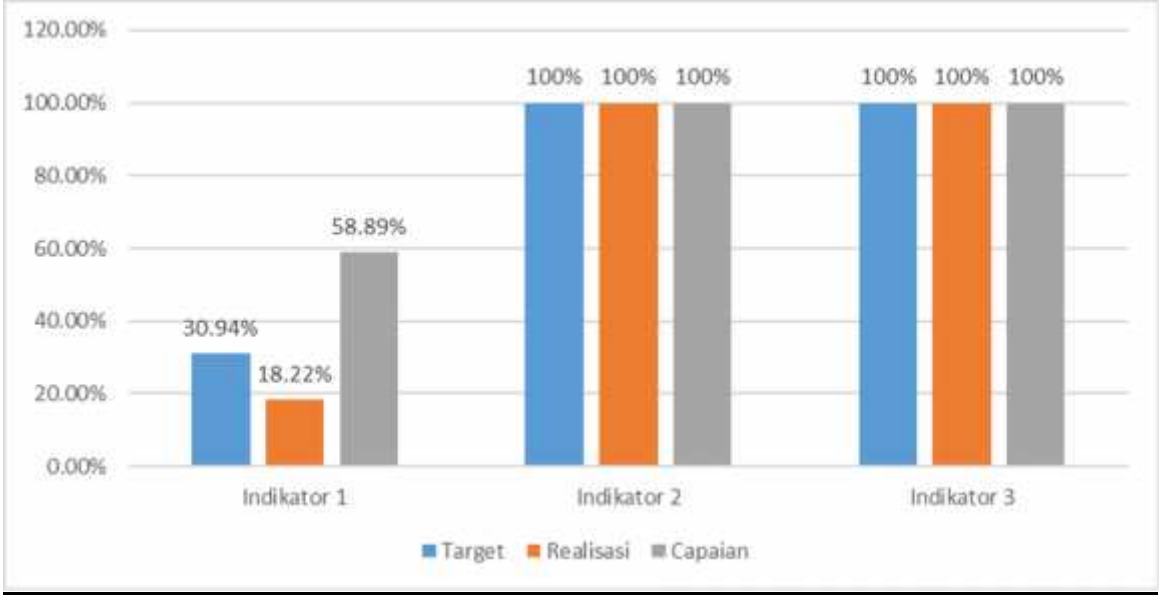

Rekapitulasi Tanah Dalam Proses BPN

No	Berkas Masuk Pendaftaran BPN	Jumlah
1	Tahun 2013 – 2017	22
2	Tahun 2018	7
3	Tahun 2019	16
4	Tahun 2020	31
Total		**76**

Dari capaian 3 indikator tersebut diatas terdapat 1 indikator yang tidak berhasil yaitu Persentase aset tetap (tanah) yang telah diinventarisasi dalam laporan BMD, hal ini dikarenakan pengguna barang kurang memahami kewajiban dalam pengamanan hukum dan administrasi aset yang berada dalam penguasaannya, dan kurang lengkapnya dokumen persyaratan dari OPD untuk

pengurusan sertifikat. Adapun guna mengoptimalkan capain kinerja dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi secara terus menerus terkait percepatan sertifikasi tanah;
2. Pemanfaatan dan optimalisasi aplikasi mapping tanah untuk menginventarisir kepemilikan tanah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Peningkatan/pengembangan manajemen aset daerah yaitu penatausahaan aset daerah melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Kabupaten Sidoarjo;
4. Rekonsiliasi BMD antara BPKAD dengan OPD secara berkala;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan BMD;
6. Membentuk tim penilai BMD.

Program tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Dokumen standart Satuan Harga/Jasa yang sesuai dengan rencana	125 Buku	125 Buku	100%	515.979.000,-	503.875.000,-	97,65%
	Persentase usulan pemanfaatan BMD yang diproses	97%	97%	100%			
Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Berkas usulan sertifikat tanah milik daerah yang memenuhi syarat dan diterima oleh BPN	16 Berkas	16 Berkas	100%	425.782.000,-	410.618.000,-	96,44%
	Jumlah tanah milik Pemkab pada pengelola barang yang dipasang papan nama kepemilikan Pemda	12 Bidang	12 Bidang	100%			
	Jumlah SK penghapusasn BMD yang diusulkan	6 SK	6 SK	100%			

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Jumlah laporan hasil penilaian BMD yang dipindahtangankan	6 Laporan	6 Laporan	100%			
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	4 Laporan	4 Laporan	100%	691.258.000,-	606.883.197,-	87,79%

a. Realisasi KinerjaTujuan Unsur Penunjang Urusan Keuangan

Kinerja pendapatan daerah di tahun 2020 mengalami fluktuasi yang sangat signifikan karena adanya bencana nasional PADEMI COVID – 19 yang sampai saat ini masih terjadi. Kondisi ini memberikan dampak yang besar terhadap dinamika perekonomian nasional dan menurunnya daya beli masyarakat secara menyeluruh. Hal ini mempengaruhi pencapaian target kinerja perangkat daerah, termasuk penerimaan pendapatan daerah sektor pajak daerah. Namun upaya maksimal terus dilakukan dalam rangka penerimaan pajak daerah dapat tercapai, walaupun target kinerja penerimaan pendapatan dalam Renstra harus disesuaikan.

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja jangka menengah yang telah dicapai berdasarkan tujuan **perencanaan strategis** adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya Peningkatan PAD	Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah	58 : 100	60,78 : 100	104,79 %	60 : 100	51,35 : 100	85,58%

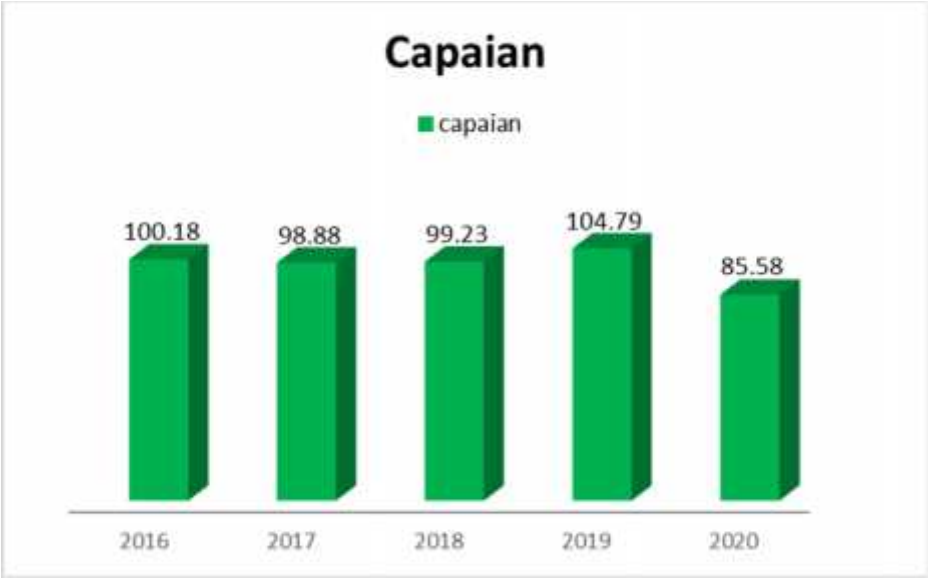

Sebagaimana tabel di atas untuk realisasi tujuan kinerja Unsur Penunjang Urusan Keuangan atas penerimaan Pajak Daerah di tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar **51,35%** atau Rp.929.261.529.986,45 dari realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1.809.832433.911,15. Hal ini memberikan gambaran bahwa **kontribusi penerimaan pajak daerah masih dominan dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**, walaupun capaian atas target Renstra belum tercapai.

b. Realisasi Kinerja Sasaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatkannya penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALI SASI	%
1) Nilai SKM terhadap layanan pajak daerah	77	87,93	114.19%	80	87,53	109.41 %
2) Prosentase keluhan WP yang diselesaikan sesuai waktu tanggap	100%	100%	100%	-	-	-
3) Prosentase peningkatan Penerimaan pajak daerah	7,05%	11,65 %	165.25%	– 15.89%	109,40%	109,40%

4) Prosentase Realisasi Piutang	75,8	92,94 %	122.61%	-	-	-

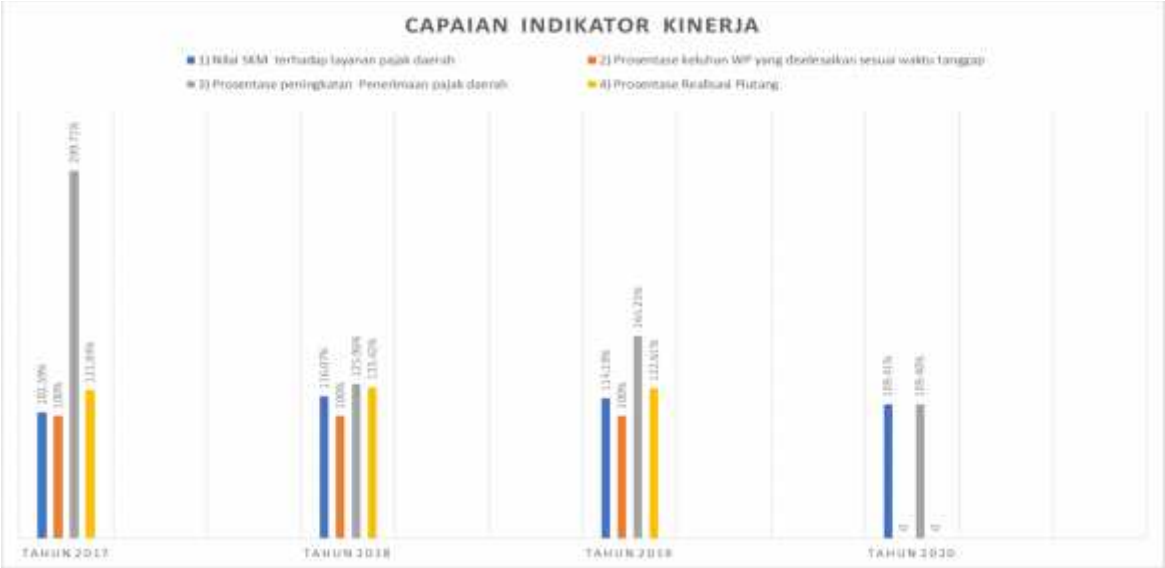

Adapun capaian realisasi Kinerja Sasaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan atas realisasi target penerimaan Pajak Daerah di tahun 2020 sebesar **109,40%** atau Rp. 929.261.529.986,45 dari Target dalam Perubahan APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 849.455.000.000,00. Namun ada penururan atas penyesuaian target penerimaan Pajak Daerah dalam Renstra dari Tahun 2019 sebesar Rp.1.009.946.880.000,00 menjadi Rp.849.455.000.000,00 di tahun 2020 turun sebesar **-15,89%.**

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 dengan target penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 953.962.000.000,00, maka progress capaian kinerja tahun 2020 naik sebesar **12,30%**, hal ini diupayakan dengan optimalisasi pendataan/pemutakhiran data OP/WP dan penagihan terhadap WP.

Kinerja diatas telah diseuaikan dengan kebijakan dari Pemerintah yang mempedomani SKB Mendagri dan Kemenkeu Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam rangka Penanganan Covid – 19 Serta Pegamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka Kebijakan Pemerintah Daerah yang harus dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut :

1. Refoccusing anggaran kegiatan
2. Penyesuaian Target Penerimaan Pajak Daerah tahun 2020
3. Pelayanan Wajib Pajak berbasis protokol kesehatan.

Permasalahan :

1. Dampak Pademi Covid-19 mempengaruhi perekonomian dan daya beli masyarakat yang berakibat langsung terhadap penurunan pembayaran Pajak Daerah.
2. Kebijakan Pemerintah Pusat terkait stimulus Pajak, sehingga berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah, misalnya pembebasan pembayaran listrik untuk golongan kelas tertentu / 450-900 watt, hal ini mempengaruhi penurunan penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
3. Banyak WP yang tutup usahanya/operasionalnya.
4. Banyaknya WP yang mengajukan penundaan pembayaran.

Solusi :

1. Memberikan relaksasi/stimulus kepada WP terkait kelonggaran/penghapusan sanksi adminitratif, berupa penundaan jatuh tempo pembayaran, antara lain
   a. Pajak Bumi dan Bangunan P-2
      - Ketetapan diatas Rp. 500.000,00 semula tanggal 15 agsutus menjadi 16 Nopember 2020.
      - Ketetapan sampai dengan Rp. 500.000,00 semula tanggal 15 september menjadi 16 Nopember 2020.
   b. Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir semula tanggal 10 setiap bulan diundur menjadi tanggal 25 setiap bulan untuk masa Pajak Maret s/d Oktober 2020.
   c. PPJ semula tanggal 15 setiap bulan diundur menjadi tanggal 25 setiap bulan untuk masa Pajak Maret s/d Oktober 2020.
2. Pendataan/pemutakhiran ulang terhadap data potensi OP/WP.
3. Tetapmengoptimalkanpenagihanpajakdaerah.

c. Program dan Kegiatan

1. **Program Pendataan**, **Peningkatan Dan Pengembangan Pajak Daerah** dengan anggaran sebesar Rp.2,048,054,900.00 dan terealisasi sebesar Rp.1,821,406,900.00 atau 88.93%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
ProsentasePertumbuhanObyek Pajak Daerah	4 %	4.78 %	119.5 %

Program tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Pendataan Dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian individu atas bangunan PBB	21 OP	21 OP	100 %
	Jumlah obyek pajak dan WP baru yang didata	9.000 OP	10.595 OP	117,72 %
Pengembangan Dan Intensifikasi Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian massal	804.000NOP	798.390 NOP	99.3%
Pengolahan Data Dan Informasi Pajak Daerah	Jumlah data informasi yang diperbarui	3 informasi	3 informasi	100 %
	Jumlah dan jenis data pajak daerah yang diolah	9 jenis pajak	9 jenis pajak	100 %

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Pendataan dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	277,594,900.00	236,210,400.00	85.09
Pengembangan dan Intensifikasi Pajak Daerah	1,273,700,000.00	1,189,295,000.00	93.37
Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah	496,760,000.00	395,901,500.00	79.70

Pencapaian indikator kinerja rata-rata dapat tercapai 100%, walaupun realisasi anggaran tidak tercapai secara keseluruhan dan hal ini dikarenakan ada efisiensi anggaran serta penyesuaian kegiatan terkait pembatasan kebijakan aturan terkait Pademi Covid - 19.

2. **Program Penetapan Pajak Daerah** dengan anggaran sebesar Rp.2.064.674.900,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.874.912.033,00 atau 90,81%.

Dengan indikator kinerja, yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Persentase jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sesuai ketentuan	83 %	102,45 %	123,44 %

Program tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Verifikasi penetapan pajak daerah	Jumlah verifikasi ketetapan pajak daerah	826.764 OP	842.750OP	101,93 %
	Jumlah surat pemberitahuan dan surat ketetapan yang disampaikan ke WP	831.636 OP	839.973 OP	101,00 %
Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	Persentase jumlah tunggakan yang ada obyek pajaknya	61 %	62,90 %	125,62 %
	Persentase jumlah tunggakan yang tidak ada obyek pajaknya	1 %	1,19 %	119,88 %
Pemeriksaan pajak daerah.	Jumlah WP yang dilakukan pemeriksaan	3.325 OP	5.841 OP	175,67 %

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Pemeriksaan pajak daerah.	20,320,000.00	15,785,800.00	77.69
Penyelesaian piutang pajak daerah	180,504,200.00	171,499,822.00	95.01
Verifikasi penetapan Pajak Daerah	1,863,850,700.00	1,687,626,411.00	90.55

Pencapaian indicator kinerja rata-rata dapat tercapai 100%, walaupun realisasi anggaran tidak tercapai secara keseluruhan dan hal ini dikarenakan ada efisiensi anggaran serta penyesuaian kegiatan terkait pembatasan kebijakan aturan terkait Pademi Covid - 19.

3. **Program Pengendalian Pajak Daerah** dengan anggaran sebesar Rp.1,018,954,850.00 dan terealisasi sebesar Rp.823,582,368.00 atau 80.83%. Dengan indikator kinerja, yaitu:

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Persentase Realisasi pembayaran tagihan Pajak Daerah	23 %	22,28 %	96,87 %

Pencapaian realisasi sebesar **22,28% atau 96,87%** atau sebesar **Rp.18.202.806.557,00** dari target **23%** atau sebesar **Rp.18.790.963.721,48** adalah **STPD** yang dikeluarkan atas **tagihan pembayaran Pajak Daerah yang jatuh tempo / telat bayar**. Hal ini karena dampak dari Pademi Covid – 19 dan kepatuhan membayar pajak masih belum optimal.

Program tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Evaluasi Dan Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Yang Disusun tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	100 %
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	100 %
Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pembayaran tunggakan pajak daerah	3.800 WP	3.990 WP	105 %
	Persentase wp yang membayar pajak melalui operasi sisir	-	-	-
Penindakan obyek pajak dan wajib pajak.	Jumlah penindakan yang dilaksanakan	84 Kegiatan	84 Kegiatan	100 %
	Jumlah koordinasi yang di laksanakan dengan instansi terkait	54 Kegiatan	54 Kegiatan	100 %
	Jumlah operasi sisir reklame tetap dan	96 Kegiatan	96 Kegiatan	100 %

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
	insidentil yang dilaksanakan			

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah	193,500,000.00	134,988,500.00	69.76
Pelaksanaan penagihan pajak daerah	617,789,350.00	506,959,118.00	82.06
Penindakan Obyek Pajak dan Wajib Pajak.	207,665,500.00	181,634,750.00	87.47

Pencapaian indikator kinerja rata-rata dapat tercapai 100%, walaupun realisasi anggaran tidak tercapai secara keseluruhan dan hal ini dikarenakan ada efisiensi anggaran serta penyesuaian kegiatan terkait pembatasan kebijakan aturan terkait Pademi Covid - 19.

Unsur Penunjang Kepegawaian

Unsur penunjang kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

a. Realisasi KinerjaTujuan

Berdasarkan mandat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan publik, pelayanan pemerintah, dan tugas pembangunan tertentu pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Terlebih dengan jumlah pegawai yang terus mengalami minus growth (Desember 2020 berjumlah 10.484 orang PNS dan 707 orang CPNS) dihadapkan tuntutan kondisi era industry 4.0 sehingga tujuan dalam manajemen ASN ini adalah meningkatkan profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN

Sampai denganTahun 2020 kinerja jangka menengah yang telah dicapai berdasarkan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut:

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Membangun SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang profesional	Indeks Profesionalisme ASN	78	86,57	110,99 %	78	71,53	91,71 %	79	79,39	100,49 %

GRAFIK

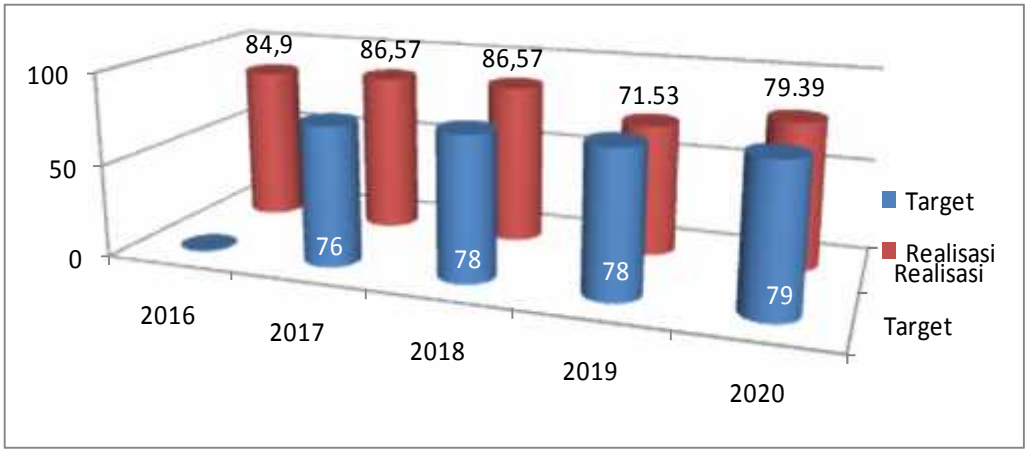

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai 100,49% atas target 2020 dan mengalami peningkatan sebesar 7,86 point terhadap capaian kinerja tahun 2019 serta telah mencapai Standart Nasional tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 73, hal ini didukung optimalisasi pemenuhan dimensi kompetensi (yang memiliki komposisi nilai paling besar yaitu 40%) dengan cara update data kediklatan, dan hal ini akan terus dilaksanakan secara rutin.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progress capaian kinerja tahun 2020 adalah 99,23 % dari target, kedepan untuk mencapai target pada akhir masa Renstra akan diupayakan memperbaiki Dimensi Kinerja yang saat ini memiliki nilai paling rendah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pelaporan prestasi kerja pada aplikasi e-kinerja. Untuk itu, kedepan perlu disusun instrument penilaian kinerja sesuai Peraturan Pemerintah terbaru tentang penilaian kinerja PNS agar kinerja PNS dapat lebih terukur dan bersifat objektif. Selain itu, perlu adanya monitoring dan evaluasi pelaporan pada aplikasi e-kinerja dan dilakukan secara berkala untuk dapat memantau kinerja PNS dalam mencapai target yang ditetapkan

Dalam penyajian data capaian indeks professional ASN diatas terdapat penurunan capaian kinerja tujuan pada tahun 2019. Hal tersebut disebabkan antara lain :

a. Terdapat perbedaan kebijakan mendasar dalam perhitungan Indek Profesionalitas ASN, yaitu :

	2018	2019 dan 2020
Dasar hukum perhitungan	Instruksi Badan Kepegawaian Negara 2017	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 **dan** Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019
Unsur Penilaian	a. kompetensi b. kompensasi, c. kinerja, d. disiplin	a. kualifikasi b. kompetensi c. kinerja, d. disiplin
Segmen perhitungan	Pejabat struktural (670 orang)	Seluruh PNS (10.484 orang)
Rumus perhitungan	*IP=(Koef(1-gaps))+ ((koef x KJ)/100) + (koef(1-Si))+ (koef(1-Indisp))*	*IP=(Koef Kualifikasi)25%+ (koef Kompetensi)40 %+ (koef Kinerja) 30%+ (koef Disiplin)5%*
Sumber data	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pemkab Sidoarjo	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara
Metode perhitungan	Manual	Aplikasi online

b. Kurang validnya data kompetensi pada SAPK, karena update data dilakukan pada SIMPEG

c. Tidak terkoneksinya SIMPEG Pemkab Sidoarjo dengan SAPK BKN.

Profesionalitas ASN dicapai melalui penerapan sistem rekrutmen yang terbuka dan obyektif, penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi, meningkatnya kompetensi ASN, meningkatnya kinerja ASN, meningkatnya motivasi & talent engagement, sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Merit dan PERMENPAN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta.

Hasil penilaian implementasi Sistem Merit di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tahun 2020 dan langkah pemenuhannya sebagai berikut :

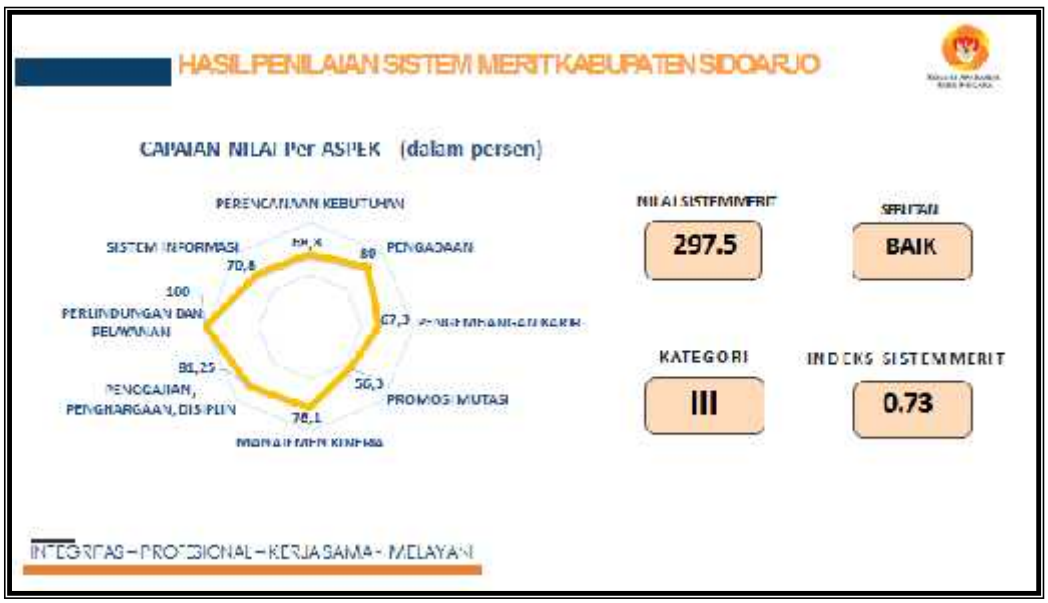

Keterangan :

Aspek	Nilai capaian (persen)	Langkahperbaikan
Perencanaan Kebutuhan	68,8	Penguatan Sistem penyusunan Peta Jabatan
Pengadaan	80	Evaluasi Pasca Diklat dalam mendorong Perencanaan Karier
Pengembangan Karir	67,3	Perlu memperbaiki infrastruktur dari manajemen talenta serta percepatan penetapan SKJ teknis
Promosi dan Mutasi	56,3	Menetapkan kebijakan Perbup Pola Karir berdasarkan manajemen talenta dalam pengisian Jabatan Kosong
Manajemen Kinerja	78,1	Menyusun analisis kesenjangan kinerja guna mendukung analisis kebutuhan diklat dan lainnya
Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	81,25	Membangun Sistem pemberian penghargaan secara periodic serta integrasi data
Perlindungan dan Pelayanan	100	Evaluasi dan mengoptimalkan program perlindungan & pelayanan ASN secara konsisten
Sistem Informasi	70,8	Integrasi system informasi kepegawaian dalam dash- board pimpinan

Nilai Sistem Merit	297,5
Sebutan	BAIK
Kategori	III
Indeks Sistem Merit	0.73

Dari hasil penilaian implementasi Sistem Merit tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapat rangking 2 nasional untuk tingkat kabupaten (memenuhi target nasional tahun 2020 sebesar 0.7) dan dianugrahi penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara atas keberhasilannya menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

ATAS KEBERHASILANNYA MENERAPKAN SISTEM MERIT
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN PREDIKAT

BAIK

Jakarta, 25 September 2020

b. Realisasi Kinerja Sasaran

Sampai dengan Tahun 2020 kinerja tahunan yang telah dicapai berdasarkan sasaran perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang didukung kualitas layanan administrasi kepegawaian yang prima

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase penempatan ASN sesuai dengan Kompetensinya	67	70,29	104,9 %	70	73,85	105,5 %	70	77,35	110,5 %
IKM layanan administrasi kepegawaian	78	80.05	02,6 %	78	82.06	105,2 %	82	88,99	108,5 %

a. Indikator 1 : Prosentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya

Pada tahun 2020 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo menetapkan target sasaran penempatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan kompetensinya sebesar 70%. Berdasarkan penempatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diperoleh data pengukuran kompetensi ASN, sebagai berikut :

Uraian	Jumlah ASN (31 Des 2020)	Terpetakan	ASN yang telah ditempatkan sesuai dengan kompetensinya				
			2020	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**
Jumlah ASN JFT	7630	7630	7630	7409	7.507		
Jumlah ASN JFU	2838	1448	854	589	322		
Jumlah ASN J. Struktural	705	703	158	343	267		
Jumlah ASN Kab. Sidoarjo	11173	9781	8642	8.341	8.096		
			77,35%	**73,85 %**	**70,29%**	69,4%	63,8%

Grafik Indikator 1

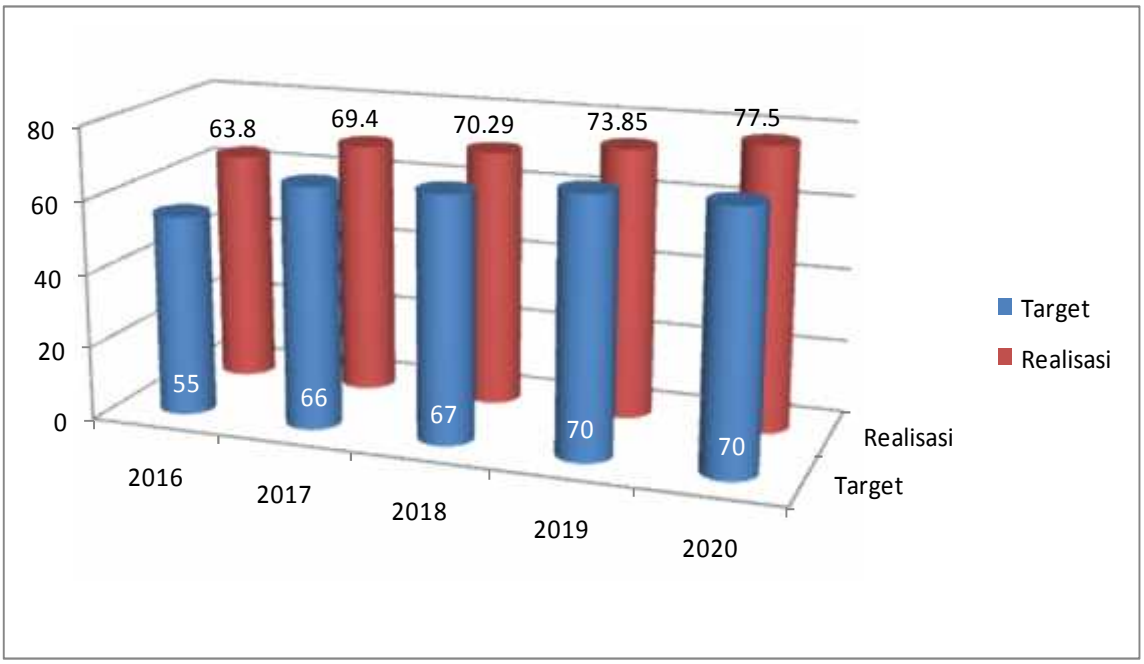

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 pada indicator 1 telah mencapai 110,5% atas target yang ditetapkan, dan mengalami peningkatan 3,5% dibandingkan capaian kinerja tahun 2019 dan apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progress capaian kinerja

tahun 2020 adalah 105% dari target. Penempatan ASN sesuai kompetensinya didukung melalui pengembangan kompetensi ASN baik yang dapat didukung APBD maupun fasilitasi pengembangan kompetensi yang dilakukan mandiri melalui penerbitan rekomendasi Ijin Belajar, Pencatuman gelar, Keterangan Pendidikan serta mulai mengembangkan metode peningkatan kompetensi berbasis " Smart Community for Competency Development" – SCCD yang secara legal dan terintegrasi dalam satu sistem di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara efektif dan efisien sejak 2014 serta dukungan administrasi kepegawaian yang tepat waktu.

Capaian kinerja pada indicator ini, tercapai dengan maksimal didukung oleh Program Pendidikan dan Pelatihan ASN, Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Program Program Pengembangan ASN, dan Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN.

Permasalahan:

Belum seluruh jabatan fungsional umum dapat dilaksanakan assessment mengingat keterbatasan tenaga, waktu dan anggaran.

Solusi :

1. Dijadwalkan secara bertahap agar seluruh jabatan dapat diassesment sehingga dapat meningkatkan kualitas data dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Memperkuat penerapan Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Pengoptimalisasian aplikasi kediklatan untuk memantau perkembangan kompetensi pegawai untuk menunjang kinerja individu dan organisasi.

Dalam hal penilaian kompetensi ASN, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 berhasil meraih penghargaan BKN Award untuk Kategori Penilaian Kompetensi dengan peringkat pertama kategori wilayah Kabupaten.

Penilaian kompetensi (Assesment) secara sektoral dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

b. Indikator2 : IKM layanan administrasi kepegawaian

No	UnsurPelayanan	Nilai SKM				
		2020	2019	2018	2017	2016
1	Persyaratan	90,95	79.73	78.21	76.55	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	89,7	79.4	78.01	76.29	
3	WaktuPenyelesaian	88,18	76.67	74.53	74.61	
4	Biaya / Tarif	89,9	97.33	94.12	79.9	
5	Produk Spesifikasi dan Jenis Pelayanan	88,73	80.75	77.87	77.77	
6	Kompetensi Pelaksana	89,45	80.73	79.28	78.67	
7	Perilaku Pelaksana	89,7	81.81	78.81	78.61	
8	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	88,25	79.11	77.61	76.35	
9	Sarana dan Prasarana	87,05	90.5	89.21	77.56	
Nilai SKM		**88,992**	**82.06**	**80.05**	**77.56**	**77.28**

Grafik Indikator 2

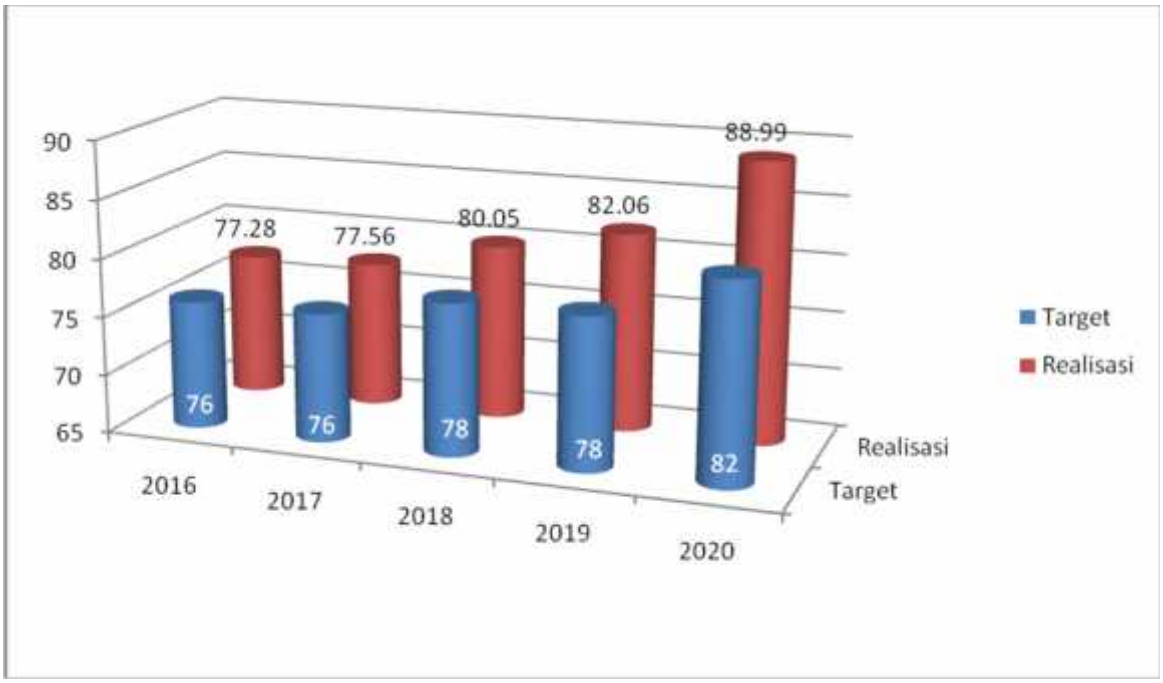

Dari penyajian data diatas, dapat dilihat bahwa kondisi tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat kenaikan 6.93 point dan capaian sebesar 108,5 % atas target point 82 di tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan dikarenakan adanya berbagai macam inovasi dan perubahan aplikasi layanan yang telah tersosialisasikan atas implementasi SOP yang ada. Dan kondisi ini akan terus dilakukan perbaikan dari berbagai evaluasi internal sebagai usaha perwujudan meningkatkan layanan administrasi kepegawaian yang prima.

Capaian kinerja pada indicator 2 ini, dapat tercapai dengan maksimal didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Program Pelayanan Pembinaan dan Kesejahteraan ASN

Perwujudan layanan prima dengan capaian yang maksimal dan tepat waktu pada tahun 2020 atas produk administrasi kepegawaian ini, tidak lepas dari dukungan inovasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Inovasi layanan ini diterapkan dengan menggunakan konsep digitalisasi

dan aplikasi online. Efek positif dari inovasiini, proses layanan administrasi kepegawaian menjadi lebih mudah, cepat, transparan dan efisien.

Berikut ragam inovasi yang diterbitkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam layanan administrasi kepegawaian ASN :

CUTI ONLINE
Aplikasi engajuan cuti secara online

SIPEKAT
Sistem Informasi Pengelolaan Kenaikan Pangkat

E-KGB
Elektronik Kenaikan Gaji Berkala

E KINERJA
Aplikasi Pelaporan Kinerja Individu secara online

ELA (Elektronik Layanan BKD)
Integrasi Layanan administrasi kepegawaian

c. Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian. Dengan anggaran sebesar Rp.559.078.520,-dan terealisasi sebesar Rp. 468.413.988,-atau 83,78%.

Dengan indikator kinerja yaitu:

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase ASN yang telah ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan	100	100	100%

Permasalahan:

1. Adanya kendala pelayanan administrasi kepegawaian pada data usulan dari OPD antara lain ada kesalahan, belum lengkap, dan keterterlambatan
2. Adanya kendala teknis pada database kepegawaian SIMPEG antara lain data kurang update data yang tidak terposting dan settingan print tata naskah pada Simpeg tidak sesuai.

Solusi:

1. Melaksanakan Koordinasi secara intensif dengan pihak OPD tentang informasi untuk mencukupi berkas usulan
2. Intensif melakukan croscek data dengan berkas yang diupload pada database kepegawaian SIMPEG;
3. Menyusun naskah SK Bupati secara manual melalui Microsoft Excel.

Program tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penyelenggaraan administrasi mutasi Jabatan ASN	Prosentase layanan administrasi mutasi jabatan yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	274.271.810	227.725.378	83,03
Penyelenggaraan administrasi mutasi kepangkatan dan pensiun ASN	Prosentase layanan Administrasi kepangkatan, KGB, dan pensiun yang di selesaikan tepat waktu	100	100	100	284.806.710	240.688.610	84,51

2. Program Pengembangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp.1.216.931.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.039.724.000.,- atau 85,44%.

Dengan indikator kinerja yaitu:

INDIKATOR KINERJA	TARGETTahun 2020	REALISASITahun 2020	PERSENTASE
Persentase PNS dalam Talent Pool	75	88	117 %

Permasalahan :

1. Kendala pada pemahaman ASN yang belum koprehensif dalam proses penyusunan SKP yang benar, serta pemahaman unsur pimpinan dalam peran dan fungsinya dalam alur penyampaian kinerja;
2. Proses pengumpulan data kinerja pada aplikasi e Kinerja dan pengumpulan data pendukung lainnya masih jadi kendala antara lain : proses yang panjang serta membutuhkan proses validasi data, perbedaan format dan butuh olah data lanjutan dari data SIMPEG;
3. Kondisi aplikasi data talent yang masih manual excel mempengaruhi proses pengolahan data yang ada.
4. Rumusan terkait Draft Perbup Pola Karier dan Rumusan terkait penyusunan Tim SK Pengelola Kinerja terkendala oleh suksesi kpemimpinan Bupati serta belum keluarnya petunjuk teknis Permenpan terkait PP 30 Tahun 2019.

Solusi :

1. Pressure terhadap OPD terkait dalam hal penyiapan data rekap pentahapan kinerja guna segera dilakukan penyelesaian tindak lanjut kebijakan atas masing-masing ASN;
2. Perbaikan menu yang ada pada aplikasi E Kinerja guna tampilan data lebih aplikatif dan lebih cepat dalam pengumpulan data.
3. Update data dan penyediaan menu data yang dibutuhkan untuk pengelolaan data Talent serta Penyediaan aplikasi Talent Pool berbasis web;
4. Pembahasan terkait Draft Perbup Pola Karier dan Rumusan terkait penyusunan Tim SK Pengelola Kinerjasetelah Bupati baru di lantik di tahun 2021 dengan melakukan beberapa perbaikan dan penyesuaiannya

Program tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pengembangan karir dan kinerja ASN	Prosentase PNS yang telah dievaluasi kinerjanya	76	95	125	202.263.370	162.191.270	80,19

	Jumlah PNS yang dikelola dalam Talent Pool	525	645	123			
	Jumlah rumusan kebijakan pengembangan karier dan kinerja	2	2	100			
Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengelolaan informasi ASN	Prosentase data PNS yang di-update	100	100	100	534.845.350	438.967.350	82,07
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Fasilitasi penilaian kompetensi ASN	Prosentase usulan penilaian kompetensi ASN yang ditindaklanjuti sesuai syarat dan ketentuan	100	100	100	479.822.280	438.565.380	91,40
	Jumlah PNS yang dinilai kompetensinya melalui assessment	325	325	100			

3. Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN, dengan anggaran sebesar Rp.1.150.922.081, - dan terealisasi sebesar Rp.976.118.510,00,- atau 84,81%

Dengan indikator kinerja yaitu:

INDIKATOR KINERJA	TARGETTahun 2020	REALISASITahun 2020	PERSENTASE
Persentase perangkat daerah yang telah tertib administrasi kepegawaian	80	80	100 %

Permasalahan:

Pandemi covid 19 menyebabkan kendala dalam optimalisasi pelayanan kesejahteraan dan pembinaan ASN seperti pengajuan Karis/Karsu dan Karpeg, monitoring cuti sakit, Uji kesehatan PNS sakit dan Pelepasan dan pembekalan PNS yang akan purnatugas.

Solusi:

Optimalisasi layanan kesejahteraan dan pembinaan ASN melalui sambungan telepon, jalur media sosial Whatsapp dan layanan online BKD melalui aplikasi ELA (Elektronik Layanan BKD)

Program tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penyelenggaraan Kesejahteraan ASN.	Prosentase layanan kesejahteraan yang ditindaklanjuti	100	100	100	900.551.721	741.531.830	82,34
Penyelenggaraan Pembinaan ASN.	Prosentase layanan pembinaan yang ditindaklanjuti	100	100	100	250.370.360	234.586.680	93,70

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp.2.099.419.370, - dan terealisasi sebesar Rp.1.729.000.300.,- atau 82,36%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	18	18	100%

Permasalahan :

Kegiatan kediklatan dan monev diklat tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dikarenakan refocusing anggaran akibat Pandemi Covid 19

Solusi:

1. Meniadakan kegiatan kediklatan yang bersifat tatap muka
2. Optimalisasi monev diklat melalui proses daring meeting zoom

Program tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penyelenggaraan Analisa dan Evaluasi Diklat ASN	Prosentase evaluasi peserta diklat yang berdayaguna	70	70	100	58.690.330	53.456.700	91,08
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ASN	Prosentase peserta diklat yang lulus bersertifikat	80	80	100	2.040.729.040	1.675.543.600	

C. PENANGANAN COVID

Covid-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan penyebarannya sampai ke Indonesia pada awal tahun 2020, tepatnya setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus ditemukan pertama kali covid-19 di Istana Negara tanggal 02 Maret 2020.

Dengan pertimbangan penyebaran Covid-19 dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang terus meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas Negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan salah satunya Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, sebagaimana yang telah di atur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020, yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020. Dalam menghadapi dampak yang ditumbulkan yang begitu luarbiasa tersebut Pememrintah Mengeluarkan PERPU Nomor 01 Tahun 2020 tentang kebijakkan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk menanganan pandemic Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas system keuangan, untuk mendukungan pelaksanaan peraturan Pemerintah telah di keluarkan PERPRES Nomer 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Mengingat kondisi penyebaran Covid-19 yang berlangsung masiv Pemerintah mengeluarkan KEPPRES Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Untuk medukungan percepatan penanganan Covid-19 Pemerintah Telah mengeluarkan INPRES Nomer 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, adapun penanganan secara teknis lebih lanjut telah di atur oleh beberapa Peraturan Menteri sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun pelaksanaan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan baik sesuai dengan arahan dari ketentuan yang berlaku, yaitu yang meliputi beberapa aspek penanganan, diantaranya :

1. Aspek Kesehatan
2. Aspek Ekonomi
3. Aspek Sosial

Regulasi / kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi masa pandemi covid-19, antara lain :

1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sidoarjo
2) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sidoarjo
3) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan dari Masyarakat dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo
4) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sidoarjo
5) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sidoarjo
6) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga dalam rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo
7) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat pada masa transisi menuju masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif di tengah pandemi *corona virus disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo

8) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *corona virus disease 2019 (covid-19)* melalui Kampung Tanggung di Kabupaten Sidoarjo
9) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan dari Masyarakat dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo
10) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga dalam rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sidoarjo
11) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Pada Masa Transisi menuju Masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif di tengah pandemi *corona virus disease 2019* di Kabupaten Sidoarjo
12) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Pada Masa Transisi menuju Masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif di tengah pandemi *corona virus disease 2019* di Kabupaten Sidoarjo
13) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga dalam rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sidoarjo
14) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga dalam rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sidoarjo
15) Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/302/438.1.1.3/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Sidoarjo

16) Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/307/438.1.1.3/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/302/438.1.1.3/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Sidoarjo

17) Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor : 440/189/438.1.1.3/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk pengendalian penyebaran *corona virus disease 2019 (covid-19)*

18) Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor " 440/907/438.1.1.3/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo, telah berupaya untuk menanggulangi penyebaran covid-19 dan pemulihan ekonomi akibat dampak yang ditimbulkan, sebagai berikut :

1) Kinerja penanganan kasus covid-19

Untuk penanganan kasus covid-19 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

- **Dinas Kesehatan**

  Program / Kegiatan Dinas Kesehatan Dalam Rangka Penanganan Covid-19, antara lain :

  1) Program Pelayanan Kesekretariatan

     Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur (pembelian ATK dan belanja modal untuk ruang isolasi di Badan Kepegawaian Daerah)

  2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

     Kegiatan :

     a) Pemberian Tambahan Nutrisi (untuk mamin pasien, mamin petugas khusus, ekstrafooding pasien, ekstrafooding petugas khusus, mamin rapat koordinasi covid)

b) Pelayanan Kesehatan Baik Promotif/Preventif, Maupun Kuratif/Rehabilitatatif (DBHCHT) (untuk ekstrafooding tenaga kesehatan dan petugas khusus)

c) Pengembangan media promosi sadar hidup sehat (untuk poster-poster covid, flyer, spanduk, rombi satgas).

d) Penyelenggaran Penyehatan Lingkungan dan Masyarakat (untuk honor jasa penyemprotan, mamin untuk kegiatan penyemprotan, penanganan limbah medis B3

3) Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (untuk honor tim satgas, BBM covid, biaya uji lab covid, sewa kamar hotel untuk pasien OTG, bantuan transport lintas sektor)

4) Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Kegiatan : Pembinaan Surveilance dan Imunisasi (untuk biaya perjalanan dinas dan mamin tim tracing)

5) Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Kegiatan :

a) Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) (untuk belanja obat-obatan/ vitamin petugas dan pasien terpapar covid-19, biaya penunjang medis covid-19)

b) Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (untuk belanja desinfektan, masker, peralatan kebersihan dan bahan pembersih covid-19, bahan perlengkapan pasien covid-19, belanja peralatan kesehatan, belanja bahan peralatan kedokteran)

Strategi Penanggulangan Covid Yang Telah Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan, antara lain :

- Penyediaan APD untuk tenaga kesehatan (masker, *handscoon*, *hazmat*, kacamata google, sepatu boot)

- Deteksi dini dengan motode RAPID Test massal (calon mahasiswa, pondok pesantren, ASN dan non ASN di OPD Kabupaten Sidoarjo, kelompok masyarakat tertentu, masyarakat umum)
- *Tracing* / pelacakan kontak erat
- Penyediaan Ruang Isolasi (Mall Pelayanan Publik dan Hotel Delta Sinar Mayang)
- Peningkatan imunitas bagi tenaga kesehatan yang terlibat langsung pada penanganan kasus (pemberian *extra fooding* dan vitamin)
- Pelaksanaan penyemprotan / *desinfektan*
- Penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik
- Melakukan kerjasama penanganan kasus covid dengan penunjukan 11 (sebelas) RS Rujukan covid-19

Rencana Penguatan Pasca Pandemi Covid 19 :

- Promosi kesehatan
- *Surveilance Epidemiologi*
- Peningkatan kompetensi Nakes
- Vaksinasi (penyediaan operasional pelaksanaan vaksinasi)
- Pembangunan Puskesmas baru (Bebekan Taman, Tarik II, dan Tambakrejo Waru)
- Pembangunan RS baru (RS Sukodono, RS Sedati, dan RS Krian)

Realisasi Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 :

NO	**SUMBER DANA**	**PAGU**	**REALISASI**	**%**
1	APBD + DID	77.106.719.421	60.658.559.130	78,67
2	BTT	18.845.840.710	12.783.056.560	67,83
	TOTAL	**95.952.560.131**	**73.441.615.690**	**76,54%**

Realisasi penyerapan anggaran penanganan Covid-19 Kabupaten Sidoarjo meliputi dana APBD (termasuk DID) dan BTT. Anggaran penanganan Covid-19 terdiri dari anggaran di Dinas Kesehatan dan anggaran di 26 puskesmas se-Kabupaten Sidoarjo.

Dana penanganan Covid-19 sebesar Rp.95.952.560.131, terealisasi sebesar Rp.73.441.615.690 (76,54%). Dana penanganan Covid-19 terdiri dari APBD termasuk DID dan BTT. Pagu anggaran APBD+DID sebesar Rp.77.106.719.421, terealisasi sebesar Rp.60.658.559.130 (78,67%). Sedangakan pagu anggaran BTT sebesar Rp.18.845.840.710, terealisasi sebesar Rp.12.783.056.560 (67,83%).

Beberapa penyerapan anggaran yang masih kurang antara lain seperti penyediaan obat dan baham medis habis pakai, penyediaan vitamin, obat-obatan untuk ruang isolasi, kegiatan penyemprotan dan desinfeksi serta pemberian tambahan nutrisi (makanan minuman untuk petugas yang terpapar serta makanan pasien ruang observasi covid).

- **Rumah Sakit Umum Daerah**

Realisasi Kinerja Penanganan covid-19 :

Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
Persentase Ketersediaan Tempat Tidur yang Digunakan Pasien Covid-19	28%	31%	111%

Dari Jumlah seluruh tempat Tidur RS yang sebanyak 725 Tempat Tidur (TT), yang dialokasikan untuk pasien Covid-19 sebanyak 225 TT. Dengan rincian sebagai berikut :

1. RIB (Ruang Isolasi Biasa) = 80 TT
2. RIK (Ruang Isolasi Khusus) = 100 TT
3. Ruang Isolasi Khusus ICU = 20 TT (10 Ventilator)

4. Kamar Bersalin Covid-19 = 15 TT
5. NICU Covid-19 = 10 TT
6. OK (Kamar Operasi) Covid-19 = 4 OK

Kesiapan RSUD Kab. Sidoarjo dalam Penanganan Covid-19 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Zonasi Covid-19 di RSUD Kabupaten Sidoarjo yang meliputi :
   Zonasi merah = untuk pelayanan pasien Covid-19
   Zonasi kuning = untuk pelayanan pasien non Covid-19
2. Pelayanan Rawat Jalan dengan Konsep Kluster (Asuhan Keperawatanm Periksa Dokter, Layanan Farmasi, Laboratorium, Radiologi, Rehabilitasi di Satu Area).
3. Ada Pelayanan Covid-19 di IGD, Maternal Neonatal, Kamar Operasi, Hemodialisis, Radiologi, Laboratorium, Kamar Jenazah;
4. Mobilisasi SDM untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di Ruang Isolasi Covid-19
5. Menyediakan Ruang Isolasi yang Cukup → Standar Ruang Isolasi Khusus (Tekanan Negatif – Hepafilter), ICU dan Ruang Isolasi Biasa;
6. Menyediakan Ruangan Khusu One Day Care (ODC) dan Tindakan Elektif;

Zonasi Covid-19 di RSUD Kab. Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran Yang Digunakan Untuk Penanganan Covid-19, sebagai berikut :

Rincian	Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Persentase	Asal Anggaran
Belanja BHP Kesehatan (APBD) - Covid-19	3.585.765.180,00	3.549.809.430,00	99,00%	APBD
Pembangunan Ruang Isolasi (APBD) - Covid-19	1.725.000.000,00	1.634.843.176,63	94,77%	APBD
Belanja Alkes (APBD) - Covid-19	4.074.743.413,00	3.994.635.465,00	98,03%	APBD
Insentif Tenaga Kesehatan (BOK tambahan)	5.998.522.728,00	5.998.522.728,00	100%	Kementerian Kesehatan RI
Belanja Dalam Penanganan Covid-19 BPBD (Belanja Tidak Terduga)	1.600.000.000,00	1.534.177.000,00	95,89%	APBD (Belanja Tidak Terduga)
Belanja Dalam Penanganan Covid-19 BPBD (Belanja Tidak Terduga)	590.000.000,00	534.545.460,00	90,60%	APBD (Belanja Tidak Terduga)
Pemeliharaan Tempat Tidur di Mal Pelayanan Publik	151.800.000,00	126.050.000,00	83,04%	APBD (Belanja Tidak Terduga)

Anggaran Belanja BHP Kesehatan untuk Covid-19 dari bantuan APBD sebesar Rp.3.585.765.180,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.549.809.430,00 dengan penyerapannya sebesar 99%. Belanja BHP Kesehatan untuk Covid-19 dikarenakan :

1. Kebutuhan BHP Pananganan Covid-19 sangat diperlukan dan mendesak.
2. Perlu dilakukan Penambahan persediaan alat pelindung diri.
3. Penyediaan BHP untuk pemeriksaan penunjang (testing) pasien terduga Covid-19

Anggaran Pembangunan Ruang Isolasi untuk Covid-19 dari bantuan APBD sebesar Rp.1.725.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.634.843.176,63 dengan penyerapannya sebesar 94,77%. Pembangunan Ruang Isolasi untuk Covid-19 dikarenakan semakin bertambah kasus Covid-19 di RSUD Kabupaten Sidoarjo sehingga dilakukan perluasan ruang isolasi khusus.

Anggaran Belanja Alkes untuk Covid-19 dari bantuan APBD sebesar Rp.4.074.743.413,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.994.635.465,00 dengan penyerapannya sebesar 98,03%. Belanja Alkes untuk Covid-19 dikarenakan keterbatasan alat kesehatan yang tersedia di RSUD Kabupaten Sidoarjo untuk penanganan dan percepatan kasus Covid-19.

Anggaran Insentif Tenaga Kesehatan (BOK tambahan) sebesar Rp5.998.522.728,00 dan terealisasi sebesar Rp5.998.522.728,00 dengan penyerapannya sebesar 100%.

Insentif Tenaga Kesehatan Penangan Covid-19 diberikan kepada tenaga kesehatan yang secara langsung menangani pasien Covid-19 di RSUD Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Insentif ini merupakan Bantuan Operasional Khusus dengan total anggaran sebesar Rp32.227.418.759,00 per 31 Desember 2020, dengan rincian sebesar Rp5.998.522.728,00 terdokumen pada DPA RSUD Sidoarjo, sedangkan sebesar Rp26.228.896.031,00 terdokumen pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan diberikan langsung ke masing-masing Nakes berdasarkan data usulan dari RSUD Sidoarjo.

Anggaran Belanja Dalam Penanganan Covid-19 BTT (Belanja Tidak Terduga) sebesar Rp.1.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.534.177.000,00 dengan penyerapannya sebesar 95,89%.

Belanja Dalam Penanganan Covid-19 yang diadakan meliputi :

1. Alat Kesehatan

   Pengadaan alat kesehatan dikarenakan :

   - Tidak tersedianya alat PCR Swab, berdasarkan instruksi Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo agar dapat melakukan pemeriksaan pasien Covid-19 dengan menggunakan alat PCR.
   - Hasil pemeriksaan PCR Swab yang telah dilaksanakan di dr.Soetomo tidak segera keluar.

2. BHP Kesehatan

   Pengadaan BHP Kesehatan Untuk penyediaan BHP sebagai pendukung alat PCR.

Anggaran Belanja Dalam Penanganan Covid-19 BTT (Belanja Tidak Terduga) sebesar Rp.590.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.534.545.460,00 dengan penyerapannya sebesar 90,60%. Belanja Dalam Penanganan Covid-19 ini adalah pengadaan Alat Hepafilter. Alat Hepafilter dipergunakan untuk mensterilkan udara ruangan di rumah sakit agar tidak tercemar oleh virus dan bakteri.

Anggaran Pemeliharaan Tempat Tidur di Mal Pelayanan Publik sebesar Rp.151.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.126.050.000,00 dengan penyerapannya sebesar 83,04%.

Perbaikan dan pemeliharaan tempat tidur pasien tanpa gejala dan tidak memerlukan perawatan yang intensif tindakan medis atau yang disebut dengan isolasi mandiri. Lokasi kegiatan di Mal pelayanan publik kabupaten Sidoarjo sejumlah 50 unit.

2) Kinerja penanggulangan penyebaran kasus covid-19

Untuk penanggulangan penyebaran kasus covid-19 dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

- **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

  Realisasi Kinerja penanggulangan penyebaran covid-19 :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	Jumlah Monev Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) yang Dilaksanakan	180 Titik	180 Titik
2	Jumlah Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) yang Diadakan	124 Unit	124 Unit
3	Jumlah Bilik Steril yang Diadakan	5 Unit	5 Unit
4	Prosentase Fasilitas Penyemprotan Disinfektan yang Dilayani	100%	100%

Realisasi Penyerapan Anggaran Yang Digunakan, sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A	**Program Pelayanan Kesekretariatan**			
A.1	**Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri**			
	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah Petugas Covid-19	15.000.000,00	7.020.000,00	46,80%
B	**Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan Manajemen**			
B.1	**Kegiatan operasional tanggap darurat dan manajemen logistik kebencanaan**			
	Belanja alat tulis kantor	1.722.700,00	1.722.700,00	100,00%
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	86.904.000,00	70.645.200,00	81,29%
	Belanja peralatan kesehatan	1.020.000.000,	967.100.000,00	94,81%
	Belanja bahan kebutuhan pokok	11.000.000,00	0,00	0,00%
	Belanja makanan dan minuman petugas khusus			

	Nasi Kotak petugas 18 orang x 98	52.920.000,00	45.584.000,00	86,14%
	Kue-kue Kardus Snack petugas 18	26.460.000,00	22.695.000,00	85,77%
	Belanja Bantuan Transport/Uang			
	Bantuan transportasi Uang lelah petugas untuk 15 orang (3 org	147.000.000,00	124.575.000,00	84,74%
	Uang lelah petugas untuk 15 org (3 shift) x 90 hari (PNS 2 org, Non PNS 3 org @95.000)	128.250.000,00	114.105.000,00	88,97%
C	**Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran**			
C.1	**Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran**			
	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih (Masker)	825.000,00	787.600,00	95,47%
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			
	BBM Mobil penanganan covid-19	7.966.200,00	7.966.200,00	100,00%
	BBM Power Sprayer Set Engine	2.592.000,00	1.987.200,00	76,67%
	BBM Hand Sprayer Power	288.000,00	0,00	0,00%
	Belanja peralatan pemadam			
	Stik Power Sprayer 60 cm	970.200,00	960.960,00	99,05%
	Slang Compressor /Spray 10 meter	1.663.200,00	1.656.600,00	99,60%
	Power Sprayer Set Engine	30.030.000,00	30.003.600,00	99,91%
	Belanja peralatan kesehatan			
	Alat Perlindungan Diri	16.500.000,00	15.757.500,00	95,50%
	Hand Sprayer Power	11.000.000,00	10.960.400,00	99,64%
	JUMLAH TOTAL	**1.561.091.300,**	**1.423.526.960,**	**91,19%**

Pada kegiatan operasional tanggap darurat dan manajemen logistik kebencanaan capaian kinerja telah terealisasi sesuai dengan target kinerja, walaupun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam kegiatan ini dilakukan pemasangan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebanyak 124 unit yang terpasang di semua OPD dan tempat - tempat umum serta pemasangan bilik steril di Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain pemasangan

tempat CTPS dan Bilik Steril dilakukan juga monev tempat CTPS yang terpasang.

Pada Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran capaian kinerja telah terealisasi 100% sesuai dengan Indikator Kinerjanya yaitu Prosentase Fasilitas Penyemprotan Disinfektan yang Dilayani sebesar 100%. Dalam kegiatan ini dilakukan penyemprotan disinfektan diberbagai titik seperti OPD dan tempat - tempat umum.

Penyiapan Ruang Isolasi Pasien Covid-19 Beserta Pendukungnya Di Gedung Serbaguna Kabupaten Sidoarjo

Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan ruang isolasi pasien COVID-19 beserta Pendukungnya di Gedung Serbaguna Kabupaten Sidoarjo dilakukan secara bersama-sama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Batalyon Zeni 2 Marinir.

Biaya pelaksanaan penyiapan Ruang Isolasi pasien COVID-19 beserta Pendukungnya di Gedung Serbaguna Kabupaten Sidoarjo seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Ruang lingkup pelaksanaan penyiapan ruang isolasi pasien Covid-19 oleh BPBD antara lain :

a. Penyiapan Ruang Isolasi Pasien COVID-19
b. Penyiapan Ruang Ganti APD
c. Penyiapan Tirai Eskalator
d. Rehab Kamar Mandi Pasien

Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten Sidoarjo dapat digunakan untuk isolasi pasien Covid-19 dengan kapasitas yang mampu menampung 129 pasien dan ditangani petugas medis gabungan yang berasal dari Dinas Kesehatan kabupaten Sidoarjo dan petugas medis dari Pasmar-1 AL.

Ruang isolasi MPP ditempati pasien Covid-19 kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) dan pasien yang pada saat itu melakukan isolasi mandiri di rumah.

Berikut ini realisasi anggaran penyiapan ruang isolasi pasien Covid-19 :

Sumber pendanaan : BTT

KEGIATAN	NILAI	REALISASI	SISA ANGGARAN
Kegiatan Penyiapan Ruang Isolasi dan Pendukungnya	363,787,650.00	363,711,474.00	76,176.00
Pengadaan Mamin, BBM dan Honor	60,600,000.00	41,679,170.00	18,920,830.00
JUMLAH	**424,387,650.00**	**405,390,644.00**	**18,997,006.00**

- **Satuan Polisi Pamong Praja**

Realisasi Kinerja Penanganan pelanggaran protokol kesehatan :

Pada indikator Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan mencapai prosentase 100%, kegiatan penertiban di titik beratkan pada sosialisasi Pandemi Covid-19 dan operasi Yustisi. Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan mitra kerja Satpol PP (Polres dan Kodim)

Rekap Data Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pelanggar Protokol Kesehatan yang Bertempat Di GOR Sidoarjo Tahun 2020

No	Tanggal	Lokasi Sidang Tpiring	Jumlah Pelanggar Keseluruhan	Pelanggar yang mengikuti sidang		Pelanggar yang hadir sidang namun belum membayar denda	Jumlah Pelanggar yang tidak hadir sidang (verstek)
(1)	(2)	**(3)**	**(4)**	**(5)**		**(7)**	**(9)**
1	14 September 2020	Depan Poslantas Waru Jl. Raya Waru Sidoarjo	27 Orang	27	Orang	-	-
		Taman Asean Jl. Raya Pagerwojo Buduran	35 Orang	35	Orang	-	-

2	15 September 2020	Depan Ruko Square Garden Sidodadi	60	Orang	60	Orang	-	-
3	17 September 2020	Lapangan Tennis Graha Tirta Waru	105	Orang	105	Orang	-	-
4	21 September 2020	Kantor Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman	8	Orang	8	Orang	-	-
5	24 September 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	789	Orang	488	Orang	-	301 orang
6	1 Oktober 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	719	Orang	419	Orang	-	300 orang
7	8 Oktober 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	387	Orang	173	Orang	-	214 orang
8	15 Oktober 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	367	Orang	188	Orang	-	179 orang
9	22 Oktober 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	704	Orang	323	Orang	-	381 orang
10	5 November 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	912	Orang	442	Orang	-	470 orang
11	12 November 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	509	Orang	196	Orang	-	313 orang
12	19 November 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	574	Orang	247	Orang	-	327 orang
13	26 November 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	618	Orang	288	Orang	-	330 orang
14	3 Desember 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	562	Orang	284	Orang	-	278 orang
15	17 Desember 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	128	Orang	47	Orang	-	81 orang

16	14 Januari 2021	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	595	Orang	287	Orang	-	308 orang
17	28 Januari 2021	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	2,376	Orang	1,347	Orang	9 orang	1.020 orang
18	4 Pebruari 2021	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	1,333	Orang	653	Orang	21 orang	680 orang
Jumlah Pelanggar			**10,808**	**Orang**	**5,617**	**Orang**	**30 orang**	**5,182 orang**

Realisasi Penyerapan Anggaran Yang Digunakan, sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
1.	BBM, Giat Covid 19	52.500.000,00	52.485.519,00
2.	Perjalanan dinas dalam daerah, Giat Covid 19	400.800.000,00	400.630.000,00
3.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	637.000.000,00	480.100.000,00
4.	Nasi Kotak, Giat Covid 19	825.480.000,00	824.340.000,00
5.	Bantuan Transport, Polres-Covid 19	615.000.000,00	614.250.000,00
	Bantuan Transport, TNI Polri terkait penanganan covid 19	3.600.000.000,00	1.558.525.000,00
	Bantuan Transport TNI Covid 19	427.500.000,00	427.500.000,00
		6.558.280.000,00	**4.357.830.519,00**
		SALDO	**2.200.449.481,00**

Dasar Hukum yang digunakan dalam penanggulangan penyebaran covid-19 yang dijadikan acuan penindakan, antara lain :

1. Perda No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ktertiban umum dan perlindungan masyarakat dan Perda No 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
2. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Covid 19 di kabupaten Sidoarjo.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
4. Keputusan Gubernur Jawa timur Nomor : 188/7/KPTSP/013/2013 tanggal 9 Januari 2021 tentang PPKM untuk pengendalian penyebaran corona virus Disease 2019.
5. Peraturan Gubernur Jawa timur Nomor : 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019
6. Surat Edaran Nomor 440/189/438.1.1.3/2021 tanggal 10 Januari 2021 tentang PPKM untuk pengendalian dan penyebaran corona virus disease 2019.

Kegiatan operasi yustisi gabungan antara Polresta, kodim dan Satpol PP di laksanakan dalam rangka penerapan PSBB dan PPKM dan menekan pelanggaran protokol kesehatan serta penyebaran covid-19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo dimana dalam kegatan operasi yustisi dan gabungan tersebut dikenakan sanksi/denda serta penyitaan kartu identitas/KTP, bahwa masyarakat yang kedapatan melanggar protokol kesehatan akan melaksanakan sidang tipiring bertempat di GOR Indoor Sidoarjo Disamping melaksanakan operasi gabungan, Satpol PP juga memberikan edukasi kepada masyarakat

yang terjaring tidak menggunakan masker untuk selalu menggunakan masker setiap keluar rumah dan selalu menataati peraturan protokol kesehatan.

3) Kinerja Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19

Untuk pemulihan ekonomi masa pandemi covid-19 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta Dinas Sosial, dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

- **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

  Realisasi Kinerja pemulihan ekonomi masa pandemi covid-19 :

  Pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo adalah :

  1. Penerapan protokol kesehatan pada perusahaan
  2. Penerapan protokol kesehatan pada toko swalayan dan toko modern
  3. Penerapan protokol kesehatan pada 19 pasar di kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase Pasar yang sudah memenuhi standar protokol kesehatan covid-19	100%	100%	100%
Persentase Swalayan/Pasar Modern yang Sudah Memenuhi Protokol Kesehatan Covid-19	100%	100%	100%
Persentase Toko Swalayan yang telah dilakukan monitoring protokol kesehatan COVID-19	36%	36%	100%
Persentase paket sembako gratis yang telah dibagikan kepada masyarakat terdampak COVID-19	100%	1050	100%
Persentase pasar rakyat yang telah dimonev untuk menerapkan protokol kesehatan	100%	100%	100%

Adapun uraian kegiatan dimaksud meliputi :

1) Monitoring penerapan protokol kesehatan pada Industri diantarnya :

   Kewajiban Pengusaha / Pimpinan Perusahaan :

   a. Membentuk Tim Penanganan COVID-19 ditempat kerja;
   b. Mewajibkan pekerja menggunakan masker;
   c. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan;
   d. Menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja di bawah 37,3º C;
   e. Menyediakan*hand sanitizer*;
   f. Menyediakansaranacucitangandengan air bersih yang mengalir dan sabun;
   g. Menjaga jarak dalam semua aktifitas kerja pengaturan jarak antara pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*);
   h. Memastikan pekerja yang masuk dalam kondisi sehat, negatif COVID-19 berdasarkan bukti hasil tes PCR/*Rapid Tes* yang dilakukan oleh Perusahaan;
   i. Menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
   j. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
   k. Membuat dan mengumumkan Pakta Integritas dan Protokol Kesehatan pencegahan Covid-19;
   l. Menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang berada dalam tempat kerja dalam waktu yang bersamaan;
   m. Melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, shift kerja dan system kerja;
   n. Dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan isolasi Mandiri/Karantina Mandiri karena COVID-19.

2) Monitoring pada toko modern penerapan protokol kesehatan diantarnya :

Kewajiban toko Swalayan (*Minimarket, Supermarket, Hypermarket, Department Store*) :

a. Menyediakan ruang tunggu diluar untuk Toko Swalayan dengan mengatur jarak kursi minimal 1 (satu) meter;
b. Menjual barang-barang yang higienis, yakni yang layak dikonsumsi;
c. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker;
d. Memastikan seluruh area kerja bersih dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan minimal 2 (dua) hari sekali;
e. Menerapkan pemeriksaan suhu tubuh setiap petugas, pengelola, dan pengunjung di bawah 37,3º C;
f. Menyediakan *hand sanitizer*;
g. Menyediakan sarana cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun;
h. Menjaga jarak antri pengunjung minimal antara 1,5 meter – 2 meter serta maksimal 5-10 orang di setiap antrian kasir (*physical distancing*), khusus minimarket jarak antri pengunjung minimal 1 (satu) meter ;
i. Mengurangi kapasitas lift dan escalator dengan memberikan tanda tempat berdiri;
j. Memberikan rambu jalan*one way* untuk pengunjung;
k. Memberikan pembatas jarak di ruang antrean kasir;
l. Memanfaatkan pembayaran non tunai (*cashless*);
m. Memastikan Petugas dan Pengelola Toko yang masuk kerja dalam kondisi sehat, negatif COVID-19 berdasarkan bukti hasil tes PCR / *Rapid Test* yang dilakukan oleh Pemilik Toko/ Dinas Kesehatan setempat;
n. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
o. Membuat dan mengumumkan Pakta Integritas serta Protokol Kesehatan pencegahan COVID- 19;
p. Menerapkan batasan kapasitas jumlah pengunjung di dalam pusat perbelanjaan/swalayan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kunjungan pada saat kunjungan saat kondisi normal;

q. Mengoptimalkan ruang terbuka (tempat parkir dan sebagainya) yang telah digunakan berjualan para Pedagang Kecil dalam rangka *physical distancing*, dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 2 meter;
r. Mengatur waktu pemasukan dan pengeluaran barang dagangan dari dan pusat perbelanjaan/swalayan oleh pemasok;
s. Mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan antar;
t. Melakukan pengaturan hari kerja
   1. Jam kerja *Hypermarket, Department Store* dan *Supermarket* adalah pukul 07.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB;
   2. Jam kerja *Minimarket* adalah sebagai berikut:
      a. Jam operasional adalah Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB;
      b. Untuk minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat (Terminal, Rumah Sakit, Bandara, SPBU, Hotel, Stasiun), Tempat Wisata yang ditetapkan dan yang berlokasi diakses jalan arteri, dapat beroperasi selama 24 jam;
u. Ketika pengunjung keluar, petugas melakukan *update* jumlah pengunjung melalui sistem yang telah disiapkan;
v. Dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjaan dalam kondisi yang bersangkutan melakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri karena COVID-19.

3) Monitoring penerapan protokol kesehatan pada pasar tradisional diantarnya :
   a. Mewajibkan pedagang dan pengunjung menggunakan masker;
   b. Memastikan seluruh area pedagang bersih dan *higienis* dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
   c. Menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk pasar di bawah 37,3ºC;

d. Menyediakan *hand sanitizer*;
e. Menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
f. Menjaga jarak antara pengunjung yang lain paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas pasar (*physical distancing*);
g. Memastikan pedagang dan pengunjung yang masuk pasar dalam kondisi sehat;
h. Melakukan pemantauan kesehatan pedagang secara proaktif;
i. Menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang berada dalam tempat kerja dalam waktu yang bersamaan;
j. Mengambil tindakan represif terhadap para pedagang pasar yang melanggar protokol kesehatan Covid – 19;

Realisasi Penyerapan Anggaran Yang Digunakan, sebagai berikut :

BIDANG	ANGGARAN	REALISASI	%
Sekretariat	Rp.1.061.325.000,-	Rp. 987.300.400,-	93,03%
Bidang Perdagangan	Rp.3.753.880.000,-	Rp. 3.748.720.000,-	99,86%
Bidang Pasar Rakyat	Rp.162.650.000,-	Rp. 119.011.250,-	73,17%
Total	**Rp. 4.997.955.000,-**	**Rp. 4.855.031.650,-**	**97,14%**

Anggaran tanggap covid pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.4.997.955.000,-. Kegiatan selama masa PSBB sampai menuju masa transisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan langkah-langkah inventarisasi permasalahan dampak ekonomi dan tanggap Covid-19 ke Perusahaan untuk koordinasi internal tentang pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pencegahan, penanganan dan penanggulangan serta memastikan ketersediaan sarana prasarana dan mewajibkan seluruh karyawan menerapkan protokol kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat.

Kegiatan selanjutnya melakukan sidak harga kebutuhan pokok, masa kadaluarsa produk barang dan sosialisasi serta sidak implementasi kebijakan protokol pencegahan Covid-19 pada Pasar Modern/Swalayan. Disamping itu juga telah dilakukan sosialisasi terkait kebijakan protokol kesehatan kepada pedagang dan pengunjung pasar serta mengambil tindakan represif terhadap pedagang pasar yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 dan koordinasi dengan instansi terkait.

Bantuan selama pandemi sebanyak 24.600 paket sembako untuk :

1. IKM
2. UKM
3. Ojek online
4. Pedagang kaki lima
5. PHK perusahaan
6. Istri Pensiunan janda – janda

- **Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

Usaha Mikro dan Koperasi merupakan salah satu bidang yang terdampak besar dengan adanya Pandemi COVID-19. Oleh karena itu, untuk penanganan dan penanggulangan dampak COVID-19 bagi pelaku usaha mikro dan koperasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo telah membuat kebijakan sebagai berikut :

1. Relaksasi Kredit Pinjaman Dana Bergulir.

   Sesuai dengan SK Bupati Sidoarjo Nomor 188/550/438.1.1.3/2020 Tanggal 3 Agustus 2020 Relaksasi Kredit Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, berupa :

   1) Penundaaan Pembayaran Angsuran selama 4 (empat) bulan.

   2) Penurunan suku bunga Dagulir dari 6% menjadi 4%.

   Adapun jumlah pelaku usaha mikro yang menerima manfaat relaksasi kredit pinjaman dana bergulir sebanyak 15 (lima belas) pelaku usaha mikro dengan nilai realisasi kredit pinjaman pinjaman dana bergulir sebesar Rp.490.000.000,00.

Selain memberikan kemudahan relaksasi kredit pinjaman dana bergulir, dalam rangka pemulihan ekonomi usaha mikro dan koperasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga telah melaksakan kegiatan sebagai berikut :

1) Memfasilitisasi usaha mikro untuk mengikuti Pameran Virtual yang bekerjasama dengan ICSB Sidoarjo dengan pembiayaan secara mandiri oleh peserta pameran. Pameran virtual ini memiliki dampak yang sangat positif terhadap pemasaran produk usaha mikro, antara lain :
   - Terjadinya kontak dagang antara customer dan pelaku usaha mikro dengan tidak harus bertatap muka.
   - Tidak ada batas wilayah pemasaran karena setiap orang dapat mengaksesnya.
   - Memenuhi standart protokol kesehatan.

2. Melaksanakan Pembinaan bagi Usaha Koperasi dan usaha mikro secara online. Pembinaan secara online dapat diakses melalui y*outube channel* Klinik Usaha Mikro.
3. Sedekah Ilmu Online*.*

   Sedekah ilmu merupakan kegiatan non anggaran yang dilaksanakan untuk mendukung pemberdayaan usaha koperasi dan usaha mikro dengan sistem dari, oleh, dan untuk pelaku usaha mikro serta merupakan kegiatan sinergi

antar instansi dan lembaga terkait untuk mendukung kegiatan tersebut. Selama masa pandemi COVID-19 sedekah ilmu tetap bisa dilaksanakan secara online.

- **Dinas Sosial**

  Dasar hukum pemberian bantuan sosial yaitu Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/329/438.1.1.3/2020 Tanggal 20 April 2020 tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Program Sembako Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020.

  Jenis, Sumber Dana, dan Realisasi pemberian Bantuan Sosial yang dilaksanakan pada masa pandemi covid-19, sebagai berikut :

  1. Bantuan Sosial Tunai

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	Kementerian Sosial RI
2.	Kuota/Pagu	44.754 KPM
3.	Besar Bantuan	1. Tahap 1 s/d 3 sebesar Rp. 600.000,- (April s/d Juni) 2. Tahap 4 s/d 9 sebesar Rp. 300.000,- (Juli s/d Desember)
4.	Realisasi Anggaran	1. Jumlah anggaran Tahap 1 s/d 3 = Rp. 89.098.200.000,- 2. Jumlah anggaran Tahap 4 s/d 5 = Rp. 25.825.200.000,- 3. Jumlah anggaran Tahap 6 = Rp. 12.855.900.000,- 4. Jumlah anggaran Tahap 7 = Rp. 12.853.800.000,- 5. Jumlah anggaran Tahap 8 = Rp. 12.823.200.000,- 6. Jumlah anggaran Tahap 9 = Rp. 12.784.200.000,- **Total anggaran Tahap 1 s/d 9 = Rp. 166.218.900.000,-**

5.	Realisasi	1. Tahap 1 s/d 3 realisasi 43.499 KPM blm realisasi 1.255 KPM 2. Tahap 4 & 5 realisasi 43.042 KPM blm realisasi 1.712 KPM 3. Tahap 6 realisasi 42.853 KPM blm realisasi 1.901 KPM 4. Tahap 7 realisasi 42.846 KPM blm realisasi 1.908 KPM

2. Bantuan Sosial Program Sembako (Bansos Sembako) / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

N	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	Kementerian Sosial RI
2.	Kuota/Pagu	Pagu awal (Januari s/d April) sebanyak 81.063 KPM Mulai Mei
3.	Besar Bantuan	Rp. 200.000,- per bulan
4.	Realisasi Anggaran	1. Jumlah anggaran Januari = Rp. 14.661.600.000,- 2. Jumlah anggaran Februari = Rp. 14.660.800.000,- 3. Jumlah anggaran Maret = Rp. 14.661.800.000,- 4. Jumlah anggaran April = Rp. 14.080.200.000,- 5. Jumlah anggaran Mei = Rp. 19.003.600.000,- 6. Jumlah anggaran Juni = Rp. 19.011.200.000,- 7. Jumlah anggaran Juli = Rp. 19.011.000.000,- 8. Jumlah anggaran Agustus = Rp. 19.074.400.000,- 9. Jumlah anggaran September = Rp. 19.473.400.000,- 10. Jumlah anggaran Oktober = Rp. 19.473.800.000,- 11. Jumlah anggaran November = Rp. 19.470.600.000,- **Total anggaran Januari s/d Nov = Rp. 192.582.400.000,-**
5.	Realisasi	1. Bulan Januari sebanyak 73.308 KPM 2. Bulan Februari sebanyak 73.304 KPM 3. Bulan Maret sebanyak 73.309 KPM 4. Bulan April sebanyak 70.401 KPM 5. Bulan Mei sebanyak 95.018 KPM 6. Bulan Juni sebanyak 95.056 KPM 7. Bulan Juli sebanyak 95.055 KPM

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	Kementerian Sosial RI
2.	Besar Bantuan	Ibu Hamil (250.000)/bln, Anak usia dini (250.000)/bln, Anak SD (75.000)/bln, Anak SMP (125.000)/bln, Anak SMA (166.000)/bln, Lanjut usia (200.000)/bln dan Disabilitas (200.000)/bln
3.	Realisasi Anggaran	1. Jumlah anggaran Januari = Rp. 23.229.050.000,- 2. Jumlah anggaran Maret = Rp. 23.654.625.000,- 3. Jumlah anggaran April = Rp. 8.463.188.000,- 4. Jumlah anggaran Mei = Rp. 8.493.911.000,- 5. Jumlah anggaran Juni = Rp. 8.544.912.000,- 6. Jumlah anggaran Juli = Rp. 8.546.034.000,- 7. Jumlah anggaran Agustus = Rp. 8.564.655.000,- 8. Jumlah anggaran September = Rp. 8.556.813.000,- 9. Jumlah anggaran Oktober = Rp. 25.212.609.000,- **Total anggaran Januari s/d Oktober = Rp. 123.265.797.000,-**
4.	Kuota/Pagu dan Realisasi	1. Bulan Januari pagu 34.620 KPM realisasi 34.570 KPM 2. Bulan Maret pagu 35.700 KPM realisasi 35.686 KPM 3. Bulan April pagu 38.863 KPM realisasi 38.849 KPM 4. Bulan Mei pagu 39.019 KPM realisasi 39.007 KPM 5. Bulan Juni pagu 39.051 KPM realisasi 39.040 KPM 6. Bulan Juli pagu 39.069 KPM realisasi 39.068 KPM 7. Bulan Agustus pagu 39.085 KPM realisasi 39.079 KPM 8. Bulan September pagu 38.740 KPM realisasi 38.718 KPM 9. Bulan Oktober pagu 37.763 KPM realisasi 37.748 KPM

4. Bantuan Sosial Beras Program Keluarga Harapan (BSB PKH)

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	Kementerian Sosial RI
2.	Kuota/Pagu	39.074 KPM
3.	Besar Bantuan	Beras Medium 15 Kg @Rp. 150.375,- (Rp. 10.025,- per kilo)
4.	Realisasi Anggaran	1. Jumlah Tahap 1 & 2 = Rp. 11.751.505.500,- 2. Jumlah Tahap 3 = Rp. 5.875.752.750,- **Total anggaran 1 s/d 3 = Rp. 17.627.258.250,-**
5.	Realisasi	1. Bulan Agustus s/d September sebanyak 39.074 KPM 2. Bulan Oktober sebanyak sebanyak 39.074 KPM

5. Sumplemen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kelurahan

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	Provinsi Jawa Timur
2.	Kuota/Pagu	4.518 KPM
3.	Besar Bantuan	Rp. 100.000,- per bulan
4.	Realisasi Anggaran	1. Jumlah anggaran Mei = Rp. 327.000.000,- 2. Jumlah anggaran Juni = Rp. 437.500.000,- 3. Jumlah anggaran Juli = Rp. 383.900.000,- **Total anggaran Mei s/d Juli = Rp. 1.148.400.000,-**
5.	Realisasi	1. Bulan Mei sebanyak 3.270 KPM 2. Bulan Juni sebanyak 4.375 KPM 3. Bulan Juli sebanyak 3.839 KPM

6. Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bantuan Pangan

N	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	Provinsi Jawa Timur
2.	Kuota/Pagu	65.000 jiwa
3.	Besar Bantuan	Rp. 200.000,- per tahap (Rp. 39.000.000.000,-)
4.	Realisasi Anggaran	1. Jumlah angaran Tahap 1 & 2 = Rp. 26.000.000.000,- 2. Jumlah anggaran Tahap 3 = Rp. 10.989.600.000,- **Total anggaran Tahap 1 s/d 3 = Rp. 36.989.600.000,-**

5.	Realisasi	1. Tahap 1 & 2 (Mei dan Juni) sebanyak 65.000 jiwa 2. Tahap 3 bulan Juli sebanyak 54.948 jiwa

7. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Daerah

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	APBD Kabupaten Sidoarjo
2.	Kuota/Pagu	5.000 jiwa
3.	Besar Bantuan	Rp. 110.000,- per bulan
4.	Realisasi Anggaran	Jumlah anggaran Rp. 550.000.000,- per bulan **Total anggaran Maret s/d Desember = Rp. 5.500.000.000,-**
5.	Realisasi	Bantuan BPNT Daerah diberikan selama 10 bulan mulai Maret s/d Desember 2020

8. Bantuan Sembako

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	APBD Kabupaten Sidoarjo
2.	Kuota/Pagu	135.572 KRT
3.	Besar Bantuan	1. Tahap 1 berupa sembako dengan nilai Rp. 150.000,- (Nilai anggaran Rp. 20.335.800.000,-) 2. Tahap 2 berupa uang tunai Rp. 200.000,- (Nilai anggaran Rp. 27.114.400.000,-)
4.	Realisasi Anggaran	1. Jumlah anggaran Tahap 1 = Rp. 19.855.596.420,- 2. Jumlah anggaran Tahap 2 = Rp. 27.087.800.000,- (diajukan melalui BTT) **Total anggaran Tahap 1 & 2 = Rp. 46.943.396.420,-**
5.	Realisasi	1. Tahap 1 berupa sembako tersalurkan 135.572 KRT 2. Tahap 2 berupa uang tunai tersalurkan 135.439 KRT

9. Dapur Umum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	BTT Kabupaten Sidoarjo
2.	Kuota/Pagu	115.400 bungkus (Rp. 1.965.600.000,-)
3.	Besar Bantuan	Makan 2 kali (Buka puasa dan sahur)

4.	Realisasi Anggaran	Rp. 1.410.866.000,-
5.	Realisasi	Pelaksanaan dilakukan pada Puasa Bulan Ramadhan mulai tanggal 28 April s/d 22 Mei 2020 (25 hari)

10. Nasi Kotak Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	APBD & BTT Kabupaten Sidoarjo
2.	Kuota/Pagu	806.954 kotak Anggaran APBD = Rp. 4.477.500.000,- Anggaran BTT = Rp. 27.427.630.000,- + **Total = Rp. 31.905.130.000,-**
3.	Besar Bantuan	Nasi Kotak Rp. 30.000,- per kotak Air Mineral Rp. 2.500,- per botol
4.	Realisasi Anggaran	1. Jumlah anggaran April = Rp. 635.212.500,- 2. Jumlah anggaran Mei = Rp. 2.994.030.000,- 3. Jumlah anggaran Juni = Rp. 8.875.652.500,- 4. Jumlah anggaran Juli = Rp. 13.721.110.000,- 5. Biaya Distribusi = Rp. 2.324.908.029,- (BBM, Bantuan Transport + Mamin Petugas) **Total anggaran April s/d Juli = Rp. 28.550.913.029,-**
5.	Realisasi	1. Bulan April sebanyak 19.545 kotak 2. Bulan Mei sebanyak 92.124 kotak 3. Bulan Juni sebanyak 273.097 kotak Bulan Juli sebanyak 422.188 kotak

11. Bantuan Tunai Pengganti Permakanan PDP Covid-19

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	BTT Kabupaten Sidoarjo
2.	Kuota/Pagu	502 Orang (Rp. 278.925.000,-)
3.	Besar Bantuan	Rp. 75.000,- perhari
4.	Realisasi	Bantuan Tunai PDP 454 Orang = Rp. 251.250.000,-

5.	Realisasi	1. Bantuan terhitung mulai 1 Agustus 2020 tercatat sebagai Pasien Covid-19

12. Permakanan Ruang Isolasi

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	BTT Kabupaten Sidoarjo
2.	Kuota/Pagu	***258 Orang dengan rincian :*** - 129 Orang pasien OTG - 84 Orang Pasukan Pengamanan (56 Pasmar, 12 Kodim, 12 Polres dan 4 Satpol PP)
3.	Besar Bantuan	Nasi Kotak Rp. 30.000,- per kotak Air Mineral Rp. 2.500,- per botol Ekstra Fooding Rp. 15.000,- per pak **Anggaran = Rp. 1.754.762.500,-**
4.	Realisasi Anggaran	1. Jumlah anggaran Juni = Rp. 404.332.500,- 2. Jumlah anggaran Juli = Rp. 718.282.500,- 3. Jumlah anggaran Agustus = Rp. 133.087.500,- **Total anggaran Juni s/d Agustus = Rp. 1.255.702.500,-**
5.	Realisasi	1. Bulan Juni makan 9.663, minum 9.663 & ekstra fooding 6.019 2. Bulan Juli makan 16.917, minum 16.917 & ekstra fooding 11.232 3. Bulan Agutus makan 3.147, minum 3.147 & ekstra fooding 2.054 **Total Makan = 29.727 Kotak, Minum = 29.727 Botol dan Ekstra Fooding = 19.305 Bungkus**

13. Bantuan Tunai Korban PHK

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	BTT Kabupaten Sidoarjo
2.	Kuota/Pagu	5.000 Orang (Rp. 3.033.150.000,-)
3.	Besar Bantuan	Rp. 600.000,- per Orang
4.	Realisasi Anggaran	1. Bantuan Korban PKH 4.868 = Rp. 2.920.800.000,- 2. Biaya Operasional = Rp. 29.290.000,- (Spanduk, Bantuan Transport dan Mamin) **Total Anggaran = Rp. 2.950.090.000,-**
5.	Realisasi	Bantuan diberikan sekali

14. Bantuan Sembako Korban Banjir

No	Uraian	Keterangan
1.	Sumber	BTT Kabupaten Sidoarjo
2.	Kuota/Pagu	754 KK (Rp. 527.800.000,-)
3.	Besar Bantuan	Rp. 700.000,- per paket (realisasi Rp. 684.255,- per paket)
4.	Realisasi Anggaran	1. Desa Banjarasri 361 paket = Rp. 247.016.055,- 2. Desa Kedungbanteng 393 paket = Rp. 268.912.215,- **Total Anggaran = Rp. 515.928.270,-**
5.	Realisasi	Bantuan diberikan sekali

REKAPITULASI PROGRAM BANTUAN

No	Program Bantuan	Sumber	Kuota (KPM/PM)	Realisasi		Ket
				KPM/PM	Anggaran (Rp)	
1.	Bantuan Sosial Tunai (BST)	Kemensos RI	44.754 KPM	42.614 KPM	187.714.800.000	April 2020 s/d Feb 2020
2.	BPNT	Kemensos RI	106.207 KPM	97.353 KPM	192.582.400.000	Jan s/d Nov
3.	Bantuan PKH	Kemensos RI	39.069 KPM	37.763 KPM	147.943.647.000	Jan 2020 s/d Jan 2021
4.	Bantuan Beras PKH	Kemensos RI	39.074 KPM	39.074 KPM	17.627.258.250	Ags s/d Sept
Jumlah Kemensos (1)			***229.104 KPM***	***216.804 KPM***	***545.889.705.250***	
5.	Suplemen BPNT Kelurahan	Provinsi Jatim	4.518 KPM	3.839 KPM	1.148.400.000	Mei s/d Juli
6.	JPS BP	Provinsi Jatim	65.000 Jiwa	54.948 Jiwa	36.989.600.000	Mei s/d Juli
Jumlah Prov. Jatim (2)			***69.518 PM***	***58.787 PM***	***38.138.000.000***	

7.	BPNT Daerah	APBD Kab. Sidoarjo	5.000 KPM	5.000 KPM	5.500.000.000	Mart s/d Des
8.	Bantuan Sembako	APBD Kab. Sidoarjo	135.572 KPM	135.439 KPM	46.943.396.420	Mei dan Juli
9.	Dapur Umum PSBB	BTT Kab. Sidoarjo	115.400 Bks	115.400 Bks	1.410.866.000	25 Hari
10.	Nasi Kotak PDP Covid-19	APBD & BTT Kab. Sidoarjo	806.954 Ktk	806.954 Ktk	28.550.913.029	April s/d Juli
11.	Bantuan Tunai Pengganti Permakanan PDP Covid-19	BTT Kab. Sidoarjo	502 Jiwa	454 Jiwa	251.250.000	10 Hari
12.	Permakanan Ruang Isolasi	BTT Kab. Sidoarjo	29.727 Ktk	29.727 Ktk	1.255.702.500	Juni s/d Ags
13.	Bantuan Tunai Korban PHK	BTT Kab. Sidoarjo	5.000 Jiwa	4.846 Jiwa	2.950.090.000	1 kali
14.	Bantuan Sembako Korban Banjir	BTT Kab. Sidoarjo	754 KK	754 KK	515.928.270	1 kali
Jumlah APBD + BTT (3)			***1.098.909 PM***	***1.098.574 PM***	***87.378.146.219***	
Jumlah Total (1 + 2 + 3)			**1.397.531**	**1.374.165**	**671.405.851.469**	

4) Kegiatan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

Pembelajaran secara daring, baik secara interaktif maupun non interaktif dimana pembelajaran harus terjadi meskipun di rumah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat inovasi pembelajaran melalui Chanel Youtube "**Sidoarjo Belajar**" untuk mewadahi berbagai video pembelajaran untuk peserta didik jenjang Sekolah Dasar yang dibuat oleh guru-guru SD Kabupaten Sidoarjo melalui KKG untuk mendukung proses belajar mengajar secara daring yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama pandemic covid-19. Sidoarjo Belajar dapat diakses melalui https://www.youtube.com/channel/UCd2MBaGL49jPjNpFxMZZA0g

Chanel Youtube "**Sidoarjo Belajar**" telah diikuti kurang lebih 1.970 pengguna youtube, ditonton lebih dari 95.000 kali dan telah menghasilkan 762 video pembelajaran

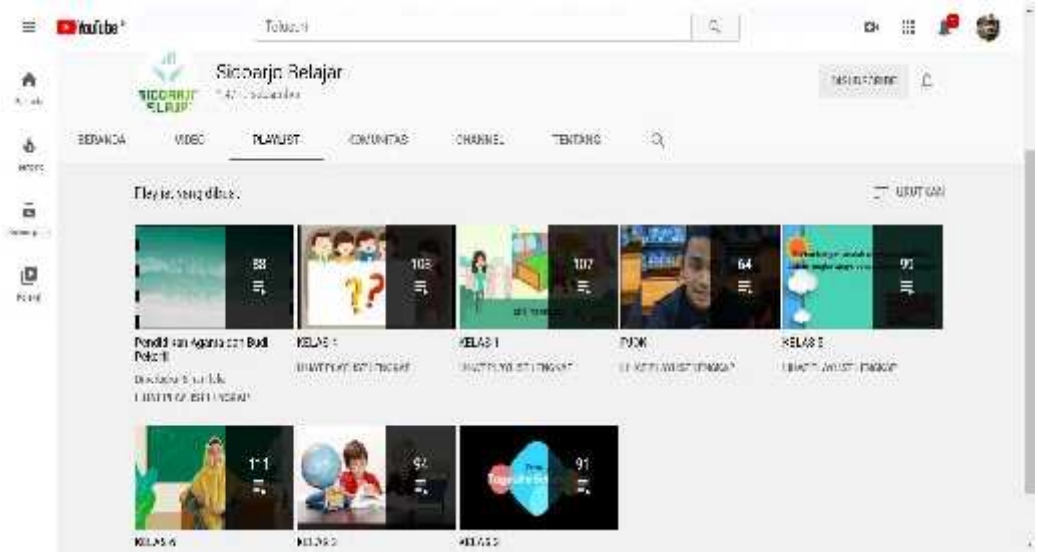

Tenaga kependidikan memberikan pembelajaran kepada anak-anak tentang kecakapan hidup, yakni Pendidikan yang bersifat kontekstual sesuai kondisi rumah masing-masing, terutama memberikan pengertian Covid 19, mengenai karakteristik, cara menghindarinya dan bagaimana seseorang tidak terjangkit serta memberikan pembelajaran hidup bersih (selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak/social distancing dan menjaga imunitas tubuh.

Kondisi pembelajaran disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing anak, memperhatikan semua kondisi lingkungan anak-anak termasuk akses internet.

Menyediakan peralatan yang terkait penanganan Covid 19 bagi seluruh lembaga negeri dan swasta (PAUD, SD/MI, SMP/MTs) meliputi :

- Masker untuk guru dan siswa
- Thermogun
- Tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun
- Hand sanitizer
- Disinfektan dan penyemprotan secara berkala

Dengan sumber pembiayaan melalui dana BOSREG atau BOSDA

Memberikan bantuan pulsa untuk paket data/internet bagi guru dan siswa terutama yang tidak mampu untuk menunjang pembelajaran daring melalui dana BOSREG dan BOSDA.

Bagi peserta didik di sekolah sulit terjangkau mengalami beberapa kendala dalam pembelajaran daring, disamping akses internet terbatas, tidak semua orang tua/siswa mempunya HP android, sekolah tersebut sesuai SK Bupati Sidoarjo Nomor 188/965/404.1.3.2/2012 sebagai berikut :

1. SDN Gebang II Sidoarjo
2. MI. Al Abror Sidoarjo
3. SDN kedungpeluk II Candi
4. SDN Sawohan II Buduran
5. SMP Satu Atap Buduran
6. SDN Tambak Kalisogo 1 Jabon
7. SDN kedungpandan II Jabon
8. SDN kupang III Jabon
9. SDN Kupang IV Jabon
10. SMP Satu Atap Jabon

Khusus pembelajaran peserta didik disekolah sulit terjangkau dilaksanakan dengan daring dan luring. Bagi yang kesulitan mengikuti pembelajaran daring, guru memberikan tugas dan pembelajaran dengan mendatangi rumah peserta didik dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan Program yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk tugas pembantuan. Program / Kegiatan, jumlah anggaran serta realisasinya, Perangkat Daerah yang melaksanakan, serta asal dana diperoleh diuraikan sebagai berikut :

Program	:	**Penyediaan dana bantuan operasioanal sekolah regional (BOSREG)**
Kegiatan	:	Penyediaan dana bantuan Operasional BOSREG
Anggaran	:	Rp. 175.779.347.615,00
Realisasi	:	Rp. 167.763.845.774,00
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Lokasi	:	Satuan pendidikan SD - SMP se Kabupaten Sidoarjo

Program	:	**Program Pendidikan Sekolah Dasar**
Kegiatan	:	Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan (DAK)
Anggaran	:	Rp. 3.562.598.000,00
Realisasi	:	Rp. 3.562.596.400,00
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Lokasi	:	SDN Sawotratap 2, SDN Siwalanpanji, SDN

		Sidokare 2, SDN Kebaron, SDN Singogalih, SDN Kletek, SDN Simogirang, SDN Bluru Kidul 1
Program	:	**Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**
Kegiatan	:	Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan (DAK)
Anggaran	:	Rp. 1.974.474.000,00
Realisasi	:	Rp. 1.974.474.000,00
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Lokasi	:	SMPN 2 Buduran, SMPN 1 Tulangan, SMPN 6 Sidoarjo, SMPN 5 Sidoarjo, SMPN 2 Sukodono, SMPN 2 Krembung, SMPN 2 Gedangan
Program	:	**DAK Non Fisik BOP PAUD**
Anggaran	:	Rp. 34.205.460.000,00
Realisasi	:	Rp. 34.205.460.000,00
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Lokasi	:	Satuan pendidikan PAUD se Kab. Sidoarjo
Program	:	**DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan**
Anggaran	:	Rp. 1.820.640.200,00
Realisasi	:	Rp. 1.820.640.200,00
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Lokasi	:	Satuan Pendidikan Kesetaraan se Kab-Sidoarjo

Program	:	**Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**
Kegiatan	:	Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan (Non DAK)
Anggaran	:	Rp. 202.930.000,00
Realisasi	:	Rp. 198.347.000,00
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	:	Kementerian Keuangan
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Lokasi	:	SMPN 1 Sidoarjo

Program	:	**Program Pelayanan Kesekretariatan**
Kegiatan	:	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
Anggaran	:	Rp. 75.000.000,00
Realisasi	:	Rp. 74.085.000,00
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	:	Kementerian Keuangan
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Lokasi	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program	:	**Program Pendidikan Sekolah Dasar**
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Evaluasi Sekolah Pendidikan Tingkat SD/MI
Anggaran	:	Rp. 250.000.000,00
Realisasi	:	Rp. 247.452.000,00
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	:	Kementerian Keuangan
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Lokasi	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program	:	**Program Pendidikan Sekolah Dasar**

Kegiatan	:	Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan (Non DAK)
Anggaran	:	Rp. 171.425.000,00
Realisasi	:	Rp. 167.165.000,00
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	:	Kementerian Keuangan
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Lokasi	:	SDN Kedungkembar Prambon
Program	:	**Program Perluasan dan Aksesibilitas Pendidikan**
Kegiatan	:	Sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan BOS, BKSM dan BPP
Anggaran	:	Rp. 100.000.000,00
Realisasi	:	Rp. 32.920.000,00
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	:	Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Lokasi	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	:	**Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**
Kegiatan	:	Pembinaan penyelenggaraan pendidikan masyarakat
Anggaran	:	Rp. 10.000.000,00
Realisasi	:	Rp. 2.300.000,00
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	:	Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Lokasi	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	:	**TMMD**

Kegiatan	:	TMMD
Anggaran	:	Rp. 150.000.000,00
Realisasi	:	Rp. 148.500.000,00
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	:	Dinas PMD Provinsi Jawa Timur
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lokasi	:	Kabupaten Sidoarjo

Program	:	**Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan**
Kegiatan	:	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Anggaran	:	Rp. 73.000.000,00
Realisasi	:	Rp. 45.350.000,00
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	:	Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pangan dan Pertanian Bidang Produksi TP dan Perkebunan
Lokasi	:	16 Kecamatan

Program	:	**Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian**
Kegiatan	:	Bimtek Monev Lingkup Afsintan Penyusunan e-RDKK Layanan Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Asuransi Pertanian Layanan Manajemen Perkantoran
Anggaran	:	Rp. 447.650.000,00
Realisasi	:	Rp. 315.192.100,00
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	:	Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian

OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pangan dan Pertanian
Lokasi	:	Kabupaten Sidoarjo

BAB V
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program / kegiatan tahun anggaran 2020 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Selain LKPJ ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Bupati Sidoarjo kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Akhir Tahun Anggaran 2020.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, Legislatif (DPRD) dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang mendukung situasi dan kondisi tetap

terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka selebar - lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian LKPJ Buati Sidoarjo Akhir Tahun Anggaran 2020 ini, diiringi harapan semoga di tahun - tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.

LAMPIRAN
PENGHARGAAN TAHUN 2020

Pada tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala Nasional maupun Regional. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Januari 2020 : Menerima Penghargaan sebagai Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik Peringkat III tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 oleh Gubernur Jawa Timur, di Surabaya.
2. Pada tanggal 27 Januari 2020 : Menerima penghargaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award dengan kategori BB (Sangat Baik) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Denpasar, Provinsi Bali.
3. Pada tanggal 16 Oktober 2020 : Meraih Penghargaan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) tahun 2018 dengan Status Kinerja Sangat Tinggi dan menempati peringkat ke – 2 oleh Gubernur Jawa Timur, di Surabaya.
4. Pada tanggal 19 Oktober 2020 : Meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKPD Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan diberikan oleh Gubernur Jawa Timur, di Surabaya.
5. Pada tanggal 03 November 2020 : Meraih Pengelolaan Manajemen ASN kategori Baik dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) di Sidoarjo.
6. Pada tanggal 02 November 2020 : RSUD Kabupaten Sidoarjo meraih Kategori sebagai RS dengan Kesiapsiagaan Terbaik Menghadapi Pandemi Covid-19 dari PERSI Golden Award 2020 Pramakarya Dharmartha Husada, di Sidoarjo.
7. Pada tanggal 13 November 2020 : Meraih Penghargaan Top 30 Kovablik untuk Aplikasi Calisline dari SMPN 4 Sidoarjo dari Gubernur Jawa Timur, di Batu, Malang.
8. Pada tanggal 10 November 2020 : Pj. Bupati Sidoarjo Hudiyono Meraih Penghargaan sebagai Mitra Kreatif dari Memorandum, di Surabaya.

9. Pada tanggal 14 Desember 2020 : Meraih Penghargaan Kabupaten / Kota Peduli HAM (KKPHAM) dari Kementerian Hukum dan HAM, di Surabaya.
10. Pada tanggal 18 Desember 2020 : meraih Penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif “Innovatife Government Award 2020” dari Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta.
11. Pada tanggal 22 Desember 2020 : Meraih Top Digital Awards 2020 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Jakarta.
12. BKD Kabupaten Sidoarjo meraih Predikat Unit Kerja Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)